



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 311 -

Utang Jangka Panjang SBN
Rp4.832,28 triliun

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.832.289.530.565.900 dan Rp3.714.851.256.058.415, mengalami kenaikan sebesar Rp1.117.438.274.507.485 atau 30,08 persen. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.829.853.117.031.900 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.832.289.530.565.900 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp46.614.743.504.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp44.178.329.970.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Utang Jangka Panjang SBN	4.832.289.530.565.900	3.714.851.256.058.415
<i>Unamortized Discount</i>	(46.614.743.504.000)	(37.092.489.249.000)
<i>Unamortized Premium</i>	44.178.329.970.000	38.948.454.751.000
Jumlah Neto	4.829.853.117.031.900	3.716.705.221.560.415

Pembiayaan SBN
Ditangguhkan
Rp11,29 triliun

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.299.218.500.000 dan Rp0. merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Rupiah Seri FR0064, FR0081, FR0082, PBS018 yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2021.

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp0

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp669.808.470.045. Penurunan utang kepada Dana Pensiun dan THT (UPSL) disebabkan adanya pengalihan dari kewajiban jangka Panjang menjadi utang jangka pendek mengingat UPSL tersebut akan dibayarkan pada tahun 2021.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan.

Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
UPSL 2012-2013	0	0
UPSL 2014-2015	0	0
UPSL 2015-2016	0	669.808.470.045
Total	0	669.808.470.045

Unfunded Past Service Liability (UPSL) Pegawai Negeri Sipil Program THT diatur dalam:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 312 -

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability Program* (UPSL) Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah (Rp)	Tanggal/Keterangan	Jumlah (Rp)
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000		-
Jumlah	7.557.126.930.000		6.000.000.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 - 2015

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah (Rp)	Tanggal/Keterangan	Jumlah (Rp)
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	6.899.954.609.263		3.800.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 313 -

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 - 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Dalam surat tersebut, utang pemerintah yang diakui sebesar Rp669.808.470.045 akan dibayarkan sekaligus pada tahun 2021.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka
Panjang DN
Lainnya
Rp289,38
triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp289.381.766.612.800 dan Rp224.737.743.429.342, mengalami kenaikan sebesar Rp64.644.023.183.458 atau 28,76 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.08	63.895.801.775.612	51.502.656.693.703
BA 999.09	-	843.918.661.365
BA 999.99	193.232.461.333.683	169.098.380.731.016
Dana atas <i>Abandonment and Site Restoration</i> (ASR)	29.096.514.483.667	-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.245.061.292.679	1.380.861.616.099
Jumlah	289.381.766.612.800	224.737.743.429.342

1. BA 999.04

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.911.927.727.159 dan Rp1.911.927.727.159. Nilai tersebut merupakan Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLB) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (*channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25 persen X Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas *Risk Sharing* Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola *Channeling* Sebesar Rp5,71 triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999. Dalam surat tersebut, Kamenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan non petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

Surat Bank Indonesia nomor 21/5/DOTP/Srt/B tanggal 16 Januari 2019 kepada Direktorat SMI perihal penyampaian dokumen klarifikasi Bank pelaksana KUT TP 1998/99 Pola *Channeling* menyatakan bahwa Bank pelaksana (Bank BRI, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Bukopin dan Bank Muamalat) mengalami kesulitan untuk melakukan pemilahan debitur penerima KUT TP 1998/99 Pola *Channeling* antara petani dan bukan petani.

2. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp63.895.801.775.612 dan Rp51.502.656.693.703. Saldo utang tersebut merupakan kewajiban pemerintah kepada Badan Usaha terkait kebijakan penetapan dengan rincian sebagai berikut

- 1) Utang Jangka Panjang dari satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp18.823.101.252 yang merupakan utang bantuan kepada PT PLN (Persero) yang belum dapat dibayarkan hingga periode TA 2020.
- 2) Reklasifikasi utang dari kewajiban jangka pendek yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka panjang yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.101.407.559.716 karena dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penetapan HJE BBM dalam LKPP Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah baru merencanakan pembayaran utang kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat penetapan HJE BBM pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.259.037.426.780.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 315 -**

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.101.407.559.716 merupakan utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM Minyak Solar Tahun 2018.

- 3) Kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018 diperhitungkan *set off* dengan kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Non Jamali sebesar Rp4.222.953.981.191 sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, sehingga sisa utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 menjadi sebesar Rp11.314.119.162.046.
- 4) Merujuk surat Menteri Keuangan nomor: S-109/MK.02/2021 hal permohonan pemeriksaan perhitungan dana kompensasi tahun 2020, BPKP telah melakukan reviu atas perhitungan kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020.

Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan bahwa perhitungan dana kompensasi BBM tahun 2020 atas penyaluran JBT dan JBKP adalah sebesar Rp5.589.490.147.448. Sebelumnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT Pertamina (Persero) Nomor BA-23/AG.6/2021 terkait Kelebihan dan/atau Kekurangan Penerimaan Sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Tahun 2020 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, disepakati bahwa nilai kompensasi BBM tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi BBM sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-136/D404/2/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebesar Rp5.589.490.147.448. Dimana Kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 sebesar Rp30.864.175.990.750, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 menjadi sebesar Rp29.214.696.246.652 dengan rincian:

- a) JBT Minyak Solar sebesar Rp16.389.880.533.600;
- b) JBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650; dan
- c) JBKP Premium Jamali sebesar Rp5.488.824.389.500 diperhitungkan *set off* dengan Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Jamali sebesar Rp1.649.479.744.098, sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 sehingga utang dana kompensasi atas kekurangan penerimaan PT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 316 -**

Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBKP Premium Jamali Tahun 2019 menjadi sebesar Rp3.839.344.645.402.

Berdasarkan BAR Pencatatan dan Penyajian Utang-Piutang Kompensasi Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-SO tanggal 15 Mei 2020, telah disepakati pencatatan dan penyajian Utang-Piutang Tidak Lancar antara Pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp51.502.656.693.703. Dalam hal terdapat perubahan atas pencatatan dan penyajian utang-piutang kompensasi atas kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM tahun 2018 dan 2019, maka BAR tersebut akan dilakukan revisi oleh kedua belah pihak. Penyelesaian utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

- 5) Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan Kekurangan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 sebesar Rp298.816.254.300.
- 6) Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-236/MK.02/2021 tanggal 26 Maret 2021 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2019, dinyatakan bahwa kekurangan penerimaan atas penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2019 pada PT AKR Corporindo, Tbk sebesar Rp52.859.702.822,45. Dan utang tersebut diperhitungkan set off dengan Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT AKR Corporindo, Tbk. Tahun 2020 sebesar Rp15.872.676.459. Dimana kelebihan penerimaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT AKR Corporindo, Tbk. Nomor BA-22/AG.6/2021 terkait Kelebihan Penerimaan Sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2020 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT AKR Corporindo, Tbk. yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, disepakati bahwa nilai kompensasi BBM tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi BBM sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 yaitu sebesar Rp15.872.676.459, sehingga sisa utang dana kompensasi pada PT AKR Corporindo, Tbk Tahun 2019 sebesar Rp36.987.026.363.
- 7) Di samping itu, pada akhir periode pelaporan TA 2020 (Audited) dilakukan reklasifikasi dari kewajiban jangka pendek, yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka Panjang, yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp6.444.692.421. Utang tersebut berasal dari sebagian kekurangan penerimaan akibat kebijakan penetapan HJE BBM Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp6.444.692.421 dari total kekurangan penerimaan sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018.
- 8) Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan bahwa perhitungan dana Kompensasi Listrik Tahun 2020, terdapat kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) sebagai akibat dari penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi bulan Januari sampai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 317 -

Desember Tahun 2020 sebesar Rp17.904.507.732.862. Dimana sebelumnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT PLN (Persero) Nomor BA-4/AG.6/2021 terkait Kekurangan Penerimaan atas Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT PLN (Persero), disepakati bahwa nilai kompensasi listrik tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi listrik sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-136/D404/2/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebesar Rp17.904.507.732.862.

Pencatatan atas utang-piutang kompensasi yang terjadi dalam TA 2020 mengacu pada Nota Kesepakatan Final, asersi manajemen badan usaha, dan hasil reviu BPKP atas Perhitungan Dana Kompensasi yang dituangkan dalam asersi manajemen KPA serta hasil kesepakatan Rapat Tiga Menteri. Pembayaran utang kompensasi TA 2020 di atas belum diperhitungkan dalam APBN TA 2021, kecuali dilakukan mekanisme revisi anggaran atau perubahan atas rincian postur APBN TA 2021.

3. BA 999.99

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebesar Rp193.232.461.333.683 dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN yang berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp78.168.343 berisi uang pembayaran sewa yang dibayarkan penyewa pada 2020, namun baru diakui menjadi pendapatan sewa setelah 2021. AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik pihak ketiga yang dikuasai oleh pemerintah.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.134.080.602.667 jika dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652	20.017.273.714.875
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.786.640.129.813	17.669.911.410.364	4.116.728.719.449
Jumlah	193.232.383.165.340	169.098.380.731.016	24.134.002.434.324

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Saldo Aset Lainnya berupa :

- Kenaikan nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Taspen (Persero) dari sebesar Rp151.428.469.320.652 pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp171.445.821.203.870 pada 31 Desember 2020 terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan hasil investasi dan nilai investasi AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Taspen (Persero).
- Kenaikan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Asabri (Persero) dari Rp17.669.911.410.364 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp21.786.640.129.813 per 31 Desember tahun 2020 dipengaruhi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 318 -

kenaikan nilai investasi di PT Asabri (Pesero) sesuai dengan Laporan Keuangan Audited PT Asabri (Pesero).

4. Dana atas *Abandonment and Site Restoration* (ASR)

Nilai Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya sebesar Rp29.096.514.483.668 merupakan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas/BPMA dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.245.061.292.679. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya berada pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.217.499.595.450, Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp27.295.007.268, dan Kemenpora sebesar Rp266.689.961.

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka
Panjang
Subsidi
Rp18,42
triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.422.169.463.379 dan Rp16.988.193.854.354, mengalami kenaikan sebesar Rp1.433.975.609.025 atau 8,44 persen.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	K/L	Jumlah	
		31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1	Kementerian Keuangan	11.058.398.337.272	10.908.912.579.401
2	Kementerian Pertanian	6.283.932.584.546	5.485.688.506.936
3	Kementerian Perhubungan	1.078.838.541.561	593.592.768.017
Jumlah		18.422.169.463.379	16.988.193.854.354



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 319 -**

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.059.398.337.272 dan Rp10.908.912.579.401. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.059.398.337.272, terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.172.267.720.202 dan Rp10.600.449.516.519 atau mengalami penurunan sebesar Rp428.181.796.317. Berdasarkan pengakuan kurang bayar, reklasifikasi serta hasil pemeriksaan BPK RI, rincian Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Utang Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.600.449.516.519;
- 2) Penurunan Utang Subsidi Jangka Panjang 31 Desember 2020 sebesar minus Rp10.868.494.466.558;
- 3) Koreksi Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp268.043.012.194;
- 4) Kenaikan Utang Subsidi Jangka Panjang 31 Desember 2020 sebesar Rp10.172.269.658.047;
- 5) Total Utang Subsidi Jangka Panjang Tahun 2020 sebesar Rp10.172.267.720.202

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp887.130.617.070 dan Rp308.463.062.882.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 merupakan:

- 1) Tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 sebesar Rp308.444.080.204 ditambah dengan *recurrent Cost SPAN* sebesar Rp18.982.678. Tagihan tersebut merupakan tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2019 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2019 tidak mencukupi.

Tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2020 terdiri atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp341.871.338.039, PPh DTP SBN Valas sebesar Rp236.780.895.411 ditambah dengan *recurrent Cost SPAN* sebesar Rp15.320.738.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.283.932.584.546 dan Rp5.485.688.506.936, utang subsidi jangka panjang mengalami kenaikan senilai Rp798.244.077.610 karena terdapat pembayaran kurang subsidi Tahun 2017 dan 2019.

Utang Jangka Panjang Subsidi sampai dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp6.283.932.584.546 terdiri atas saldo Kurang Bayar Tahun 2019 senilai Rp3.783.466.067.715 dan koreksi utang jangka panjang subsidi sesuai hasil perhitungan BPK pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Sriwijaya sebesar Rp2.500.466.516.831.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.078.838.541.561 dan Rp593.592.768.018. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.078.838.541.561 adalah sebagai berikut.

- a. Nilai Utang Jangka Panjang pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp596.323.617.905 dengan penjelasan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 320 -

- 1) Utang Jangka Panjang Subsidi sebesar Rp110.501.878.520 yang merupakan kekurangan pembayaran terhadap pelaksanaan PSO TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan TA 2016 sebesar Rp2.224.897.079.
- 2) Utang Jangka Panjang Subsidi sebesar Rp485.821.739.385 berdasarkan berita acara perhitungan subsidi pada PT.KAI oleh BPK..

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sebesar Rp482.514.923.656 merupakan utang jangka panjang subsidi berdasarkan Berita Acara Perhitungan Subsidi pada PT.Pelni oleh BPK.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka
Panjang
Pinjaman Luar
Negeri
Rp764,10
triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp764.106.403.002.755 dan Rp667.750.107.263.114, mengalami kenaikan sebesar Rp96.356.295.739.641 atau 14,43 persen. Kenaikan Utang Jangka Panjang Luar Negeri tersebut disebabkan oleh adanya penambahan pembiayaan APBN.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Utang Program	438.966.473.667.352	349.111.788.301.602
Utang Proyek	325.139.929.335.404	318.638.318.961.512
Utang Jangka Panjang Luar Negeri*)	764.106.403.002.756	667.750.107.263.114

*)Selisih TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada Lampiran 28.

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka
Panjang Luar
Negeri
Lainnya
Rp25,11
miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp25.119.765.919 dan Rp24.499.064.239, mengalami kenaikan sebesar Rp620.701.680 atau 2,53 persen. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada periode per 31 Desember 2020. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Penurunan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan kurs. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	Mata Uang Asal		31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	16.009.440.240	15.777.885.218
Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450	3.872.424.134	3.483.277.476
Jumlah*			25.119.765.919	24.499.064.239

*) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD, Rp17.330/EUR

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 321 -

<i>Promissory Note</i>	<i>Tanggal</i>	<i>Nilai (Rp)</i>
2 (two) promissory note	19 Januari 1973	129.523.754,28
1 (one) promissory note	21 Juni 1973	355.340.803,50
1 (one) promissory note	26 Desember 1973	71.956.501,40
1 (one) promissory note	25 Mei 1974	514.542.828,77
1 (one) promissory note	30 Juni 2000	2.163.936.250
1 (one) promissory note	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		5.237.901.544,95

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas
Rp4.473,19
triliun

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dan Rp5.127.312.881.160.402. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp654.114.382.401.920.



D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas dan Rekening Penerimaan Panas Bumi) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)*

Rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85 persen, yang terdiri dari 71,15 persen hak pihak lain dan 13,85 persen merupakan Pendapatan Pajak.

Tabel 15. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	31 Desember 2020 <i>(Audited)</i>		31 Desember 2019 <i>(Audited)</i>	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	128.674.401,02	1.788.702,85	295.535.144,40	4.279.644,43
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNBPD SDA Migas dan PNBPD lainnya ^{a)}	2.173.901.950,26	31.873.703,32	3.587.006.612,58	50.468.419,08
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI ^{b)}	27.898.345,54	389.823,57		
3. Penerimaan lain-lain ^{c)}	14.562.014,74	206.384,82	14.143.158,70	201.253,79
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ^{d)}	41.549,75	588,38	176.863,48	2.483,87
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit ^{e)}		3.412.575,38		2.809.769,30
<i>Total Penerimaan</i>	<i>2.216.403.860,29</i>	<i>35.883.055,45</i>	<i>3.581.325.635,76</i>	<i>53.481.926,04</i>
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	802.870.191,06	11.573.738,30	824.568.647,83	11.639.819,89
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	4.666.972,48	68.247,07	4.798.347,18	67.466,72
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNBPD SDA Migas			349.230.000,00	4.927.495,56
• Pendapatan dari PNBPD Migas lainnya ^{f)}	249.872,14	3.717,60	162.423.555,36	2.265.236,74
<i>Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD</i>	<i>807.787.035,68</i>	<i>11.643.702,96</i>	<i>1.341.020.550,37</i>	<i>18.900.018,91</i>
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	375.713.524,65	5.412.852,51	729.434.716,82	10.299.498,71
b. Pembayaran DMQ Fee KKKS	526.605.366,98	7.564.062,48	783.346.322,11	10.818.078,09
c. Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	515.393.774,69	7.470.500,76	913.083.747,36	12.915.011,11
<i>Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD</i>	<i>1.417.712.666,32</i>	<i>20.447.415,75</i>	<i>2.405.864.786,29</i>	<i>34.032.588,91</i>
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI ^{b)}	27.898.345,54	389.823,57		
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening	41.549,75	588,38	176.863,48	2.495,46
5. Pengeluaran Lainnya ^{d)}	2.139.754,82	33.619,83	1.125.179,00	16.009,05
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{e)}		3.894.225,71		3.021.755,29
<i>Total Pengeluaran</i>	<i>2.255.579.352,21</i>	<i>36.409.376,18</i>	<i>3.748.187.378,14</i>	<i>55.972.867,82</i>
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(39.175.491,92)	(526.320,74)	(166.860.743,39)	(2.490.941,58)
V. Saldo Akhir (I + IV) ^{g)}	89.498.909,10	1.262.382,11	128.674.401,02	1.788.702,85

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 323 -

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas) per 31 Desember 2020 sebesar USD89,498,909.10 atau setara Rp1.262.382.112.856. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama tahun 2020.

Penjelasan:

- 1) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBP SDA Migas dan PNBP Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.
 - PNBP SDA Migas merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD2.173.780.086,31 atau setara Rp31.871.910.733.922.
 - PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas meliputi setoran atas Penerimaan dari Kegiatan *Non-Lifting*, Denda atas Keterlambatan Pembayaran, serta Keuntungan atas Selisih Transaksi Retur sebesar USD121.864 atau setara Rp1.792.589.190,51.
- 2) Koreksi Pembukuan oleh BI merupakan koreksi atas pendebetan dua kali transaksi di Rekening Migas sebesar USD27.898.345,54 atau setara Rp389.823.568.348. Atas transaksi tersebut, masing-masing telah dilakukan Koreksi Pembukuan Debit dan Kredit oleh BI.
- 3) Penerimaan Lain-Lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD14.562.014,74 atau setara Rp206.364.821.399 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
- 4) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Reimbursement* PPN sebesar USD20.351,33 atau setara Rp288.357.995 dan atas retur penyelesaian DMO Fee KKKS sebesar USD21.198,42 atau setara Rp300.000.000.
- 5) Selisih Kurs Pembukuan Kredit sebesar Rp3.412.575.376.224 dan debit sebesar Rp3.894.225.708.728 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.
- 6) Pendapatan dari PNBP Migas Lainnya berasal dari pemindahbukuan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebesar USD249.872,14 atau setara Rp3.717.597.698,92 adalah pemindahbukuan atas penerimaan migas dari kegiatan *non-lifting*, antara lain pendapatan jasa giro dan kompensasi penjualan gas bumi.
- 7) Pengeluaran Lainnya merupakan pemindahbukuan atas dua kali pengkreditan oleh PT Pertamina Persero untuk transaksi bagian negara dari produk LPG Domestik Wilayah Kerja Jabung sebesar USD2,139,754.92 atau setara Rp33.619.829.303.
- 8) Saldo Akhir sebesar USD89,498,909.10 atau setara Rp1.262.382.112.856 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 324 -

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain *reimbursement* PPN, PBB, dan lainnya. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.220.126.090.533 dan Rp1.027.878.594.169. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

	URAIAN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
I.	Saldo Awal	1.027.878.594.178	1.374.911.063.212
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.631.392.972.046	2.251.334.080.206
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		2
	Total Penerimaan	2.631.392.972.046	2.251.334.080.208
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	384.008.328.296	361.728.617.338
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	95.531.904.768	199.232.752.080
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	74.880.717.100	142.158.318.231
	4. Pemindahbukuan PNBPT Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	1.884.724.525.524	1.695.246.863.593
	5. Koreksi Pembukuan debit	3	
	Total Pengeluaran	2.439.145.475.691	2.598.366.549.242
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	192.247.496.355	(347.032.469.038)
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.220.126.090.533	1.027.878.594.178

Penjelasan:

- 1) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp384.008.328.296 terdiri dari : (1) tahap pertama sebesar Rp341.224.620.729 dan (2) tahap kedua sebesar Rp42.783.707.567.
- 2) Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp95.531.904.768 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2019 dan 2020 dengan perincian: (1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2019 sebesar Rp85.057.684.777 dan (2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2020 sebesar Rp10.474.219.991.
- 3) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp74.880.717.100 dengan rincian:
 - a) penggantian bonus produksi tahun 2014 sebesar Rp525.362.079
 - b) penggantian bonus produksi tahun 2015 sebesar Rp2.912.114.448.
 - c) penggantian bonus produksi tahun 2016 sebesar Rp693.390.828.
 - d) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp15.788.416.788.
 - e) penggantian bonus produksi tahun 2019 sebesar Rp31.307.067.580.
 - f) penggantian bonus produksi tahun 2020 sebesar Rp23.654.365.377
- 4) Pemindahbukuan PNBPT Panas Bumi Tahun 2020 ke RKUN sebesar Rp1.884.724.525.524 terdiri dari:
 - a) PNBPT Panas Bumi Triwulan I TA 2020 sebesar Rp191.278.104.950.
 - b) PNBPT Panas Bumi Triwulan II TA 2020 sebesar Rp455.950.528.775.
 - c) PNBPT Panas Bumi Triwulan III TA 2020 sebesar Rp613.714.302.456.
 - d) PNBPT Panas Bumi Triwulan III TA 2020 sebesar Rp623.781.589.343



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 325 -

- 5) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2020 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian:

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	175.882.676.409	48.447.537.322	224.330.213.731
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	310.438.829.715	5.205.416.816	315.644.246.331
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	259.188.490.318	3.007.583.582	262.196.073.880
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	376.704.935.577	3.337.387.596	380.042.323.173
5.	PT. Geo Dipa Energy (Persero)	23.082.537.027	14.830.696.381	37.913.233.408
Jumlah*)		1.145.297.469.046	74.828.621.477	1.220.126.090.523

*)Selisih total sebesar Rp10 karena pembulatan

c. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. 9 (sembilan) rekening kredit program yang dinihalkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP)*.
2. 7 (tujuh) rekening penampungan PIR/UPP disetorkan ke RKUN melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

d. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003298301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	13.606.616.520
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	14.551.094.191
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	33.108.769.932
E1045	RETUR GAJI BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	5.193.000
E1046	RETUR.SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	326.305.801.701



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 326 -

E9011	RR RPKBUNP GAJI BPD JABAR BANTEN (0022220170303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.633.810
S0001	DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	1.262.382.108.906
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.220.126.090.533
T0001	Menteri Keuangan Rekening Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	24
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	7
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	107.855.308
W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	37.935.100
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	3
W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD) (1008275013)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	18.663.500
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0018	RPL BUN PIR NON SPH (020601006221309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0019	RPL BUN UPP NON SPH (020601006222305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PIR NON SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
U8001	Rekening Kelolaan TDR (502000008980)	111318	Kas di Rekening Kelolaan Dana TDR	-
S0008	Menkeu. utk Penerimaan Hibah Educat.Sector Support Prog.(ESSP)d/ Uni Eropa d/val.EUR-DCI- ASIE/2009/021-060 DCI-ASIE/2010/021-723 (609001991980)	111312	Kas di RPL dalam Valuta Asing	-
E8001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	11.492.728
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	314.226.438
E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	793.046.090
E8004	RR Reksus SBSN DJ Perkeretaapian (0221401042)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8005	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Udara (0221401044)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	11.867.984.568
E8006	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Laut (0221401046)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8007	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Darat (0221401048)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8008	RR Reksus SBSN DJ Bina Marga (3314010423)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8009	RR Reksus SBSN BP Jaminan Produk Halal (2514010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8010	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Iptek & Dikti (4214010428)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8011	RR Reksus SBSN LIPI (7914010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	1.657.296.708



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 327 -

E8012	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air (7331410424)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8013	RR Reksus SBSN DJ KONS SDA EKSTM (7291410426)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	60.218.181
E8014	RR Reksus SBSN BPP SDM KLHK (7291410442)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8015	RR Reksus SBSN BSN (7841410429)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3000	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (032901004409305)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	291.208.250
E3001	RR RKPLHN ISPHRE (0807209994)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3002	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (1190077883377)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3003	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (0001401300021840)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8016	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air 2 (7139327149)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	99.639.822
E8017	RR Reksus SBSN Balitbang KLHK (7139328188)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8018	RR Reksus SBSN DTPA LAPAN (7139329036)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	125.990.455
E8019	RR Reksus SBSN DJ Bina Marga 2 (3314010467)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	252.163.890
E8020	RR Reksus SBSN DJ Perkeretaapian 2 (104989288)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				2.885.728.029.464

2. Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah BMN yang menjadi target penilaian kembali dalam kurun waktu 2017-2018 adalah 884.064 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tersebar pada 13.782 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga (K/L). Hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sesuai data dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 12 Oktober 2018 sebanyak 945.460 NUP BMN (106,94% dari target) telah selesai dinilai kembali dengan wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Dari 945.460 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 748.568 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 157.531 NUP tidak dapat ditemukan, dan sebanyak 39.361 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (berlebih).

Inventarisasi				Penilaian		
Ditemukan	Tidak Ditemukan	Berlebih	Total	Nilai Buku	Perubahan	Nilai Wajar
748.568	157.531	39.361	945.460	1.538.185.259.209.587	4.190.306.958.698.349	5.728.492.217.907.936



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 328 -

Penyajian Hasil Penilaian Kembali Dalam Laporan Keuangan 2019

Pemerintah telah melaporkan bahwa seluruh K/L telah menyampaikan progres tindak lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP K/L yang terdiri atas 1.563 CHR dengan total catatan sebanyak 37.105 NUP. Seluruh catatan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja bersama KPKNL dimana sebanyak 30.416 NUP telah ditindaklanjuti dalam hasil perbaikan penilaian kembali di tahun 2019 sedangkan sisanya sebanyak 6.689 NUP merupakan objek penyelesaian target tahun 2020.

Terkait dengan penyajian hasil penilaian kembali BMN dalam Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga telah menyajikan koreksi hasil penilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019, dan melakukan proses *take in* jurnal di satuan kerja konsolidasi terkait jurnal *take out* Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2019 (*Audited*) dengan pengungkapan yang memadai.

Selama tahun 2019 Pemerintah telah melakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun atau mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp135,51 triliun atau 2,46 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp5.498,63 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	49.617	4.730.424.322.028.610	4.705.749.328.830.090	(24.674.993.198.520)	(0,52)%
2	Gedung dan Bangunan	113.163	188.407.059.414.563	172.571.322.642.624	(15.835.736.771.939)	(8,41)%
3	JJBA	32.819	579.796.366.220.147	484.792.297.321.634	(95.004.068.898.513)	(16,39)%
TOTAL		195.599	5.498.627.747.663.320	5.363.112.948.794.350	(135.514.798.868.963)	(2,46)%

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2019 audited adalah sebesar Rp4.113,17 triliun, selama tahun 2019 telah dilakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun.

Pelaksanaan perbaikan dan penyajian hasil penilaian kembali BMN pada Tahun 2020

Target penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan di tahun 2020 adalah sejumlah 594.274 NUP atau sebesar 3 (tiga) kali lebih banyak dari jumlah NUP yang telah diselesaikan pada tahun 2019 yang merupakan jumlah keseluruhan atas hasil penilaian kembali BMN untuk BMN ditemukan dan BMN Berlebih tahun 2017-2018 di luar objek perbaikan penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019.

Penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN dilakukan dengan tahapan sampai dengan akhir semester I 2020 proses perbaikan penilaian kembali BMN sudah dapat dituntaskan sampai dengan tahap 4 (Kirim LHI ke KPKNL) dan pada semester II sudah bisa dimulai untuk penyelesaian dari tahap 5 (Penilaian Selesai) sampai dengan tahap 9 (BAR IP Selesai).

Adapun terkait hasil perbaikan penilaian kembali BMN, selama tahun 2020 telah dilakukan perbaikan penilaian kembali BMN 2017-2018 dengan total BMN sebanyak 597.139 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp303,895 triliun atau mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp75,708 triliun atau 33,18 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp228,18 triliun, dengan rincian sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 329 -

No	Uraian	Jumlah RUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	55.311	63.784.782.473.610	66.450.810.743.142	2.666.028.269.532	4,18%
2	Gedung dan Bangunan	291.731	87.192.515.114.064	93.300.343.325.162	6.107.828.211.098	7,00%
3	JJBA	250.097	77.210.049.245.246	144.143.969.243.579	66.933.919.998.333	86,89%
TOTAL		597.134	228.187.346.832.920	308.218.812.198.403	75.707.776.478.983	33,18%

Selanjutnya, pada tahun 2020 juga dilakukan proses penilaian atas BMN yang sebelumnya belum dilakukan penilaian kembali pada tahun 2017-2018 sebanyak 11.629 NUP dengan nilai wajar Rp32,697 triliun dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah NUP	Perubahan
1	Tanah	553	8.926.185.988.500
2	Gedung dan Bangunan	6.845	2.948.713.390.786
3	JJBA	4.231	20.820.688.514.771
TOTAL		11.629	32.698.587.894.059

Koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 *Audited* sebesar Rp82,48 triliun dengan rincian koreksi hasil penilaian kembali BMN per Kementerian Lembaga sebagai berikut:

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Koreksi Penilaian Kembali BMN
1	002	Dewan Perwakilan Rakyat	16.121.664.578
2	004	Badan Pemeriksa Keuangan	284.839.464
3	005	Mahkamah Agung	198.218.702.710
4	006	Kejaksaan Republik Indonesia	140.493.581.532
5	010	Kementerian Dalam Negeri	72.280.893.102
6	011	Kementerian Luar Negeri	51.074.317.012
7	012	Kementerian Pertahanan	6.686.543.587.430
8	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	37.421.532.134
9	015	Kementerian Keuangan	(11.195.694.130)
10	018	Kementerian Pertanian	93.802.287.817
11	019	Kementerian Perindustrian	113.152.801.955
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10.373.707.447
13	022	Kementerian Perhubungan	9.975.609.230.258
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	126.993.476.530
15	024	Kementerian Kesehatan	152.670.974.083
16	025	Kementerian Agama	6.989.548.549.701



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 330 -**

17	026	Kementerian Ketenagakerjaan	38.549.569.453
18	027	Kementerian Sosial	277.669.193.080
19	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.958.602.518
20	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	464.383.857.339
21	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	76.521.589.311.610
22	040	Kementerian Pariwisata	4.064.774.661
23	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	573.448.073.295
24	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.889.081.000
25	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	732.100.000
26	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	276.303.000
27	050	Badan Intelijen Negara	(187.351.000)
28	051	Lembaga Sandi Negara	30.767.215.809
29	054	Badan Pusat Statistik	7.520.813.074
30	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	57.006.925.695
31	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	36.749.733.478
32	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	696.127.860
33	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.421.065.319
34	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	779.613.944.645
35	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	10.604.648.149
36	064	Lembaga Ketahanan Nasional	(62.314.000)
37	066	Badan Narkotika Nasional	(2.697.079.471)
38	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	20.896.734.600
39	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	26.149.220.428
40	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	40.619.651.553
41	076	Komisi Pemilihan Umum	515.034.214
42	077	Mahkamah Konstitusi	4.318.006.000
43	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	83.050.376.851
44	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.106.438.000
45	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.459.345.240
46	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	7.579.141.282
47	086	Lembaga Administrasi Negara	1.237.723.375



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 331 -

48	088	Badan Kepegawaian Negara	14.577.025.804
49	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	20.466.220.186
50	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	(508.429.676)
51	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	3.119.326.124
52	107	Badan SAR Nasional	22.541.851.336
53	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	44.774.000
54	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	936.256.391.794
55	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	150.721.397
56	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116.264.208.312
57	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	105.215.376.862
58	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	(35.332.822.664)
59	119	Badan Keamanan Laut	(4.077.928.683)
TOTAL			104.920.037.433.472

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 32.

3. **Penilaian Kembali Barang Milik Negara Terhadap Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

Mulai Agustus tahun 2020, *underlying asset* atas penerbitan SBSN menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai hasil revaluasi berdasarkan LKPP Audited 2019 yang disampaikan oleh DJKN melalui Nota Dinas Dirjen Kekayaan Negara Nomor ND-420/KN/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Aset SBSN. BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN pada penerbitan SBSN selama tahun 2020 adalah sejumlah 1836 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp229.174.033.340.840. Dari total nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* pada penerbitan tahun 2020 tersebut, terdapat BMN sejumlah 1096 NUP dengan nilai sebesar Rp115.458.645.299.784 yang telah menggunakan nilai hasil revaluasi sebagaimana disampaikan oleh DJKN. Dengan demikian hasil revaluasi BMN tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penerbitan SBSN tahun 2020, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dari penerbitan SBSN yang jumlahnya mengalami peningkatan dari semula Rp191,8 Triliun menjadi Rp367,8 Triliun.

Outstanding SBSN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp960.681.146.000.000 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp974.998.046.000.000,00 (menggunakan kurs 30 Desember 2020). Adapun *Outstanding asset* per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 961.553.482.844.152,00 yang terdiri dari:

- BMN sebesar Rp425.376.347.147.327,00 Nilai ini merupakan nilai sebelum revaluasi adalah sebesar Rp425.376.347.147.327,00 adapun nilai setelah revaluasi adalah sebesar Rp891.548.308.362.290,00 (per April 2021); (rincian terlampir)
- Proyek sebesar Rp 516.496.729.194.678,00; dan
- Jasa sebesar Rp19.697.000.000.000,00.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 332 -

Selain itu, dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying asset* antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, maka pada tahun 2020 juga telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset*, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Dengan adanya penggantian asset tersebut maka risiko atas *double underlying asset* dapat diminimalisir. Penggantian *underlying asset* berupa BMN dengan perolehan setelah tahun 2011 yang dilakukan pada tahun 2020 adalah untuk SBSN seri IFR0006, IFR0007, IFR0010, PBS002, PBS005, PBS011, PBS012, PBS014, PBS015, PBS019, PBS021, PBS022, PBS024, PBS025, PBS026, SNI0229, SNI0322, SNI0327, SNI0824, SNI21, SNI22, SNI24, SNI25, SNI26, SR011, USDPBS002.

4. **Aset KKKS**

Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020, karena tidak memenuhi kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. **Aset Tanah**

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2019	13.472.698.350.945
Mutasi Tambah:	142.394.190.051,92
Koreksi Alih Kelola KKKS Terminasi yang belum di IP	3.543.952.476,75
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	89.810.732.964,56
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	12.033.840.075,41
Koreksi Pelaporan Tanah Baru	37.005.664.535,20
Mutasi Kurang:	371.023.859.649,67
Reklas neraca hasil IP	185.791.372.139,82
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	32.147.436.179,00
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	148.924.561.954,30
Koreksi Alih Kelola KKKS Terminasi yang belum di IP	3.543.952.476,75
Koreksi Pembetulan pencatatan	616.536.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	13.244.068.681.347

Penjelasan atas mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2019 (*Audited*).
- 2) Mutasi tambah sebesar Rp142.394.190.051,92 terdiri dari:
 - a) Terdapat koreksi tambah dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED yang merupakan aset perolehan dibawah tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan penilaian sebesar Rp3.543.952.476,75.
 - b) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp84.977.438.548.
 - c) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp3.968.216.120.
 - d) Terdapat koreksi tambah dikarenakan terdapat aset tanah yang telah diidentifikasi oleh SKK Migas sebagai pelaporan tanah baru namun belum disertai dokumen pendukung dan masih akan dilakukan verifikasi kembali pada KKKS JOB Pertamina Medco E&P Simenggaris sebesar Rp491.300.000.
 - e) Terdapat koreksi tambah dikarenakan terdapat aset tanah yang telah diidentifikasi oleh SKK Migas sebagai pelaporan tanah baru namun belum disertai dokumen pendukung dan masih akan dilakukan verifikasi kembali pada KKKS Medco E&P Tarakan sebesar Rp373.778.297.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 333 -

- f) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp12.033.840.075,41.
- g) Terdapat koreksi dikarenakan pelaporan tanah baru pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp37.005.664.535.
- 3) Mutasi kurang sebesar Rp371.023.859.649,67 terdiri dari:
- a) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS JOB Pertamina Medco Tomori sebesar Rp4.721.688.200.
- b) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp168.514.647.689.
- c) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp12.555.036.251.
- d) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp32.147.436.179.
- e) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp136.121.850.747.
- f) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp1.645.559.900.
- g) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp11.157.151.307.
- h) Terdapat koreksi kurang dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED yang merupakan aset perolehan dibawah tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan penilaian sebesar Rp3.543.952.477.
- i) Terdapat koreksi Pembetulan Pencatatan karena pencatatan ganda hasil koreksi penyesuaian pencatatan rekomendasi BPK atas KKKS hasil IP 2009/2010 pada Eks KKKS Medco Kampar sebesar Rp616.536.900.

Tindak Lanjut Pembetulan Selisih Tanah Aset KKKS atas Temuan Pemeriksaan BPK RI:

No	KKKS	Temuan BPK (Rp)	Selesai dilakukan Tindak lanjut (Rp)	Belum selesai dilakukan Tindak Lanjut (Rp)
1	JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi	3.274.558.000	3.274.558.000	-
2	a. PT Pertamina EP	1.041.133.782.335	25.527.879.335	1.015.605.903.000
	b. PT Pertamina EP (Aset TAC)	-	197.787.502.270	-
3	Eks VICO	371.056.100.334	3.968.216.120	367.087.884.214
4	PT Chevron Pacific Indonesia	10.592.439.949.130		10.592.439.949.130
5	PT Pertamina Hulu Energi Siak	9.403.683.400		9.403.683.400
6	Eks CICO	475.008.806.000		475.008.806.000
7	Eks Petroselat, Ltd.	10.602.840.000		10.602.840.000
8	Eks PT Medco E&P Indonesia (Kampar)	85.269.873.180	616.536.900	84.653.336.280
Total		12.588.189.592.379	231.174.692.625	12.554.802.402.024

Terdapat 8 (delapan) KKKS yang dilakuan Off Balance Sheet karena hasil IP 2009/2010 senilai Rp12.588.189.592.379. Dari keseluruhan KKKS tersebut, telah dilakukan *Desk Review* terhadap Dokumen Perolehan dan Rekonsiliasi serta telah selesai dilakukan Tindak Lanjut sebesar Rp231.174.692.625 dan masih terdapat 7 KKKS yang belum selesai dilakukan tindak lanjut sebesar Rp12.554.802.402.024. Terhadap KKKS yang belum selesai dilakukan tindak lanjut, telah dilakukan upaya perbaikan pencatatan tanah Off Balance



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 334 -

Sheet dengan penjelasan sebagai berikut:

1. KKKS PT Pertamina E&P

Terdapat 18 aset telah diusulkan take out karena merupakan aset KMK 92 (nilai wajar pada 9 Aset dengan eks Pertamina masih berbeda) dan menjadi temuan di Dit.PKNSI DJKN Kementerian Keuangan.

2. Eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga-Sanga

Temuan Off Balance sheet tanah pada eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga Sanga belum selesai ditindaklanjuti, karena menunggu selesai dilakukan proses BAST (data catatan tanah eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga sanga mengacu pada BAST tersebut).

3. KKKS PT Chevron Pacific Indonesia

Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia belum selesai ditindaklanjuti karena masih dalam proses Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan pelaporan *Unrecorded* belum selesai 100%.

4. KKKS PT Pertamina Hulu Energi Siak

Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Siak belum ditindaklanjuti karena dalam proses pembenahan catatan di KKKS (data KKKS berbeda dengan data SKK Migas dan DJKN/PPBMN).

5. Eks KKKS Chevron Indonesia Company

Hasil penelusuran DJKN/PPBMN, SKK Migas dan KKKS, tanah di lokasi Lawe-Lawe dan Penajam tersebut merupakan aset Pertamina Persero sesuai BA rapat IP tanggal 3 September 2015 (DJKN telah bersurat kepada Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Persero untuk meminta klarifikasi lebih lanjut).

6. Eks KKKS Petroselat Ltd

Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS Petroselat Ltd belum dapat ditindaklanjuti karena pailit.

7. Eks KKKS Medco E&P Indonesia Kampar

Temuan Off Balance Sheet tanah pada Eks KKKS PT Medco E&P Indonesia Kampar Sebagian belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu selesai dilakukannya proses BAST (data catatan tanah eks KKKS PT Medco E&P Indonesia Kampar mengacu pada BAST tersebut).

b. Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (*plug and abandoned*).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2020 dengan total nilai USD USD152.437.284. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya disajikan sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Sumur 31 Desember 2019 (USD)
16 KKKS	152,572,616.67	57,249	192,582.00	152,437,284.00

a) Mutasi tambah sebesar USD57,249 berasal dari pembenahan asset pada KKKS Malacca Strait.

b) Mutasi kurang sebesar USD192,582 berasal dari adanya alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS CNOOC.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 335 -

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
93,766,532	18, 985.234	6,133,270	106,618,496

- a) Mutasi tambah sebesar USD18,985,234 berasal dari Reklasifikasi dari Neraca akibat pemutakhiran data kondisi barang oleh KKKS.
- b) Mutasi kurang sebesar USD6,133,270 berasal dari adanya transaksi penjualan lelang/*transfer out*/selisih pembulatan/jalih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1,283,582,746.07	68,772,549.44	635,872,015.27	716,483,280.24

- a) Mutasi Tambah aset sebesar USD68,772,549.44 berasal dari :
- a) penambahan SE yang dilaporkan oleh SKK Migas;
- b) Koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka pembenahan pencatatan aset.
- b) Mutasi Kurang aset sebesar USD635,872,015.27 berasal dari kapitalisasi SE yang reklas ke neraca sebesar USD571,087,094.45 dan koreksi pembenahan aset sebesar Rp64,784,921.82.
- c) Terdapat SE pada 8 KKKS yaitu Premiere Oil Natuna Sea B.V, Chevron Indonesia Company, Medco EP Natuna, Saka Indonesia Pangkah, Exxon Mobile Cepu, Petrochina International Jabung Ltd, Pertamina EP dan VICO Indonesia dengan nilai perolehan dibawah 50 persen nilai perolehan induk yang tidak dapat dikapitalisasi ke Neraca dengan rincian sebagaimana berikut.

Kode	Nama KKKS	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wejar (Rp)
A15	Medco EP Natuna	38.484.052	592.802.632.384
A23	Saka Pangkah	20.413.593	196.072.560.285
A80	Vico Sanga-sanga	627.211	9.256.878.800
A51	Premier Oil Natuna Sea BV	2.356.068	23.074.949.382
A47	Petrochina	5.045.207	49.618.324.309
	International		
	Jabung LTD		
A7	Chevron Indonesia	12.849.266	57.375.293.927
	Company East		
	Kalimantan		
A62	PT Pertamina EP	9.702.053	286.260.699.137
A39	ExxonMobil Cepu	19.249.891	260.242.761.350
Jumlah		108.727.341	1.474.704.099.573



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 336 -

Aset HBM KKKS Exxonmobil Cepu (A.39) dari SE sebesar Rp1.607.798.891.263, diketahui memiliki deskripsi aset "tanah", dengan rincian sebagai berikut.

No	Nomor Sinas	Deskripsi	Nilai perolehan (Rp)
1.	9913000001602	Land - River Water Intake	28.256.155.457
2.	9911990000102	Land - Building and Other 2015	54.185.333.406
3.	9915990026704	Land Train B 2016	177.801.272.487
4.	9915990026703	Land EPC 1 Others 2016	338.315.147.612
5.	9915990026702	Land Train A 2015	554.682.547.338
6.	9913000000802	Land - Water Basin	454.558.434.964
7.	9911990000103	Land - Building and Other 2016	-
Total			1.607.798.891.263

Atas SE tersebut akan dilakukan penelusuran ke dokumen sumber SE oleh SKK Migas untuk memastikan bahwa aset tersebut adalah tanah atau HBM. Hasil penelusuran tersebut akan digunakan untuk perbaikan nilai aset KKKS dalam Laporan Keuangan.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2020.

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2020 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
5,911,524,305.49	112,870,743.40	243,569,456.19	5,780,825,592.69

- Mutasi Tambah aset sebesar USD112,870,743.40 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD243.569.456,19 berasal dari penjualan lelang/*transfer out* selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
152,159,458	4,223,249	49,418,099	106,964,608

- Mutasi Tambah aset sebesar USD4,736,788 merupakan reklasifikasi aset yang di *off-balance* ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada tahun 2019, namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD42,893,165 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 337 -

6) **Selisih Pencatatan dengan Unit Pengendali**

Terdapat selisih pencatatan nilai perolehan dan selisih *line item* HBM antara catatan Pengelola Barang dengan catatan Unit Pengendali pada 31 Desember 2020 yang direklas dari neraca dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi serta rekonsiliasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Unit Pengendali sebagai berikut:

Nilai Perolehan Audited 2019 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2020 (USD)
0	132,349,819.14	0	132,349,819.14

- Mutasi tambah sebesar USD132,349,819.14 merupakan nilai perolehan aset pada KKKS Pertamina EP yang masih perlu di Rekonsiliasi dengan SKK Migas dikarenakan perbedaan ID *Number Asset*.
- Selisih pencatatan yang dilakukan reklasifikasi dari Neraca sesuai ketentuan pada pasal 8 huruf b angka 4 PMK 116/PMK.05/2020 dengan nilai wajar sebesar Rp1.489.240.489,206 terdiri dari:
 - KKKS Chevron Indonesia Company sebesar Rp884.845.544.517,40.
 - KKKS Kalrez Petroleum Limited sebesar Rp11.538.453.525,36.
 - KKKS Medco EP Indonesia sebesar Rp44.871.576.233,35.
 - KKKS Pertamina Hulu Energi OSES sebesar Rp121.127.752.486.
 - KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp133.138.227.657.
 - KKKS Kangean Energy Indonesia sebesar Rp35.222.412.910,42.
 - KKKS Medco EP Rimau sebesar Rp35.816.813.144.
 - KKKS PHE Ogan Komering sebesar Rp1.355.919.273.
 - KKKS JOB Pertamina Golden Spike sebesar Rp117.600.000.
 - KKKS Pertamina EP sebesar Rp150.030.102.737.
 - KKKS BOB Siak Pusako sebesar Rp1.607.372.385,50
 - KKKS PHE Jambi Merang sebesar Rp293.677.750.
 - KKKS Premier Oil Natuna Sea sebesar Rp1.399.629.125.
 - KKKS Mobil Cepu Ltd sebesar Rp65.058.050.820.
 - Eks KKKS JOB Pertamina Jadestone Energy sebesar Rp1.355.919.273.
 - Eks KKKS JOB Pertamina Petrochina East Java sebesar Rp1.461.437.369.
- Terdapat selisih pencatatan yang telah dilakukan reklasifikasi dari Neraca pada periode sebelumnya dan belum selesai ditindaklanjuti pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp6.579.234.311.467,06

c. **Aset Harta Benda Inventaris**

Nilai Perolehan 2019 Audited(USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2020 (USD)
4,565,579.49	366,971.29	378,957.69	4,553,593.10

- 1) Mutasi tambah aset sebesar USD366,971.29 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- 2) Mutasi kurang akurang bayar DBHset sebesar USD378,957.69 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*/selisi pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 338 -

5. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertifikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

- a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2020 yaitu sebanyak 15.426 bidang tanah.
- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.
- c. Satuan kerja mengajukan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah ke Kantor Pertanahan setempat.
- d. Kantor Pertanahan memproses penerbitan pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan permohonan dari satuan kerja.
- e. Penyusunan daftar usulan indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah. Sebagai dampak kebijakan *refocusing* APBN yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menangani permasalahan pandemi virus COVID-19 yang dialami dunia, Kementerian ATR/BPN melakukan revisi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara sehingga output target pensertipikatan tahun 2020 yang semula sebanyak 15.426 bidang direvisi menjadi 6.921 bidang. Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2020 sebanyak 7.870 bidang (113,7%) dari target sebanyak 6.921 bidang. Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2021, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah. Data bidang tanah usulan daftar indikatif tersebut telah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasikan biaya pensertipikatannya pada DIPA Kementerian ATR/BPN dan kepada Kementerian/Lembaga pemilik tanah agar dialokasikan biaya pendampingan lapangan di tahun 2021.

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat. Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.
- b. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa Data Khasanah Arsip Statis yang terdiri atas:
 - 1) Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.370 meter linier.
 - 2) Poster sebanyak 336 lembar
 - 3) Arsip Kartografi/Peta sebanyak 131.072 lembar.
 - 4) Arsip foto sebanyak 3.474.532 lembar
 - 5) Arsip Film sebanyak 59.035 reel.
 - 6) Arsip Mikrofilm sebanyak 14.502 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 339 -

- 7) Arsip Video sebanyak 25.774 kaset.
 - 8) Arsip Rekaman Suara sebanyak 54.727 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 *reel*.
 - 9) Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.363 keping.
 - 10) Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
 - 11) Arsip *Flashdisk* sebanyak 2 keping.
 - 12) Arsip elektronik sebanyak 390 *terabyte*.
- Jumlah Aset Bersejarah pada Satker BAST Aceh, terdiri atas :
- 1) Arsip Kertas sebanyak 8.879 meter linier;
 - 2) Arsip Kearsitekturan sebanyak 495 meter linier;
 - 3) Arsip Peta sebanyak 5.536 lembar;
 - 4) Arsip CD/DVD /VCD sebanyak 1228 keping;
 - 5) Arsip Kaset sebanyak 52 kaset;
 - 6) Arsip Foto sebanyak 1979 lembar;
 - 7) Arsip Disket sebanyak 43 keping.
- d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit berupa Tugu Lady Raffles, Tugu J.J. Smith, Tugu Teysmann, dan Arca Lembu Nandi di PKT Kebun Raya LIPI.
 - e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
 - f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 977.283 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb);
 - 2) Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
 - g. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno.
 - h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
 - i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - 1) Candi/ tugu peringatan/ prasasti sebanyak 15 unit;
 - 2) bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit; dan
 - 3) Laporan/ bahan perpustakaan sebanyak 9 buah.
 - j. Kementerian Luar Negeri berupa Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gedung Pancasila. Aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

7. Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 340 -

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, terdapat 2 (dua) jenis yaitu UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker.

Pada tahun 2020 terdapat penambahan 5 UBL baru dan pengurangan 12 UBL, sehingga jumlah UBL per 31 Desember 2020 adalah 70 UBL. Rincian penambahan/pengurangan UBL adalah sebagai berikut:

Penambahan 5 UBL baru, antara lain :

1. Tim Pengembangan Vaksin Covid-19
2. Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
3. Komite Cipta Kerja
4. Komite Nasional Geopark Indonesia
5. Komite Nasional Disabilitas

Pengurangan 12 UBL , antara lain:

1. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Badan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minir (BPP-SPAM)
5. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU)
6. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
7. Dewan Riset Nasional
8. Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia)
9. Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN)
10. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
11. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
12. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dari total 70 UBL, 61 UBL adalah UBL Satker/Bagian Satker dan 9 UBL adalah UBL Bukan Satker. Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
2. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
3. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
4. Otorita Asahan (dalam proses likuidasi)
5. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
6. Komite Nasional Geopark Indonesia
7. Komite Nasional Disabilitas
8. Otoritas Nasional Senjata Kimia
9. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pemerintah menyajikan ekuitas bersih atas beberapa UBL Bukan Satker sebagai aset lainnya pada Unit Badan Lainnya, yaitu berasal dari UBL sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 341 -

4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Badan Pengelola Keuangan Haji

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam Lampiran 29.

8. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih befrlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	DATA ABMA/T	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Kompensai	Nilai Pasar Aset	Besaran Kompensasi	Status
1	Rumah Tinggal di Hl. Sumatera No.27 (d.h. 13-15)	Surat Menkeu No.S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020	7.503.853.000	7.503.853.000	Belum diunasi

9. Aset Kredit Eks BPPN

Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank. Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit *Asset Transfer Kit* (ATK), aset kredit *Non Asset Transfer Kit* (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB.SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

Daftar Aset Kredit Non ATK yang Belum Diterbitkan PB/ditandatangani PJPN

No	Uraian	31 Desember 2020
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	307.805.191.997
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	28.834.322.845.767
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	897.678.554.101
	Jumlah	30.039.806.591.865

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu pada Bank Centris (BBKU), PT sebesar Rp897.678.554.101.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN senilai Rp4.807.839.787.364 yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan BPK atas 7188 aset kredit tanpa disertai dengan dokumen kredit yang adanya dan besarnya piutang hanya berdasarkan bukti dari SAPB dengan rincian sebagai berikut.

No.	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Nilai Dalam Rupiah
1.	Dollar Amerika (USD)	232.486.020	3.279.216.479.185
2.	Dollar Australia (AUD)	7.191	77.455.916
3.	Dollar Hongkong (HKD)	12.807.644	23.301.458.707
4.	Dollar New Zeland (NZD)	1.785.135	18.058.645.160
5.	Dollar Singapura (SGD)	144.507	1.538.149.687
6.	Euro (EUR)	90.023	1.560.109.843
7.	Golden Belanda (NLG)	6.393	244.169.498
8.	Poundsterling (GBP)	83.503	1.593.686.546
9.	Rupiah (IDR)	1.479.580.554.909	1.479.580.554.909
10.	Yen Jepang (JPY)	19.557.775	2.669.077.913
	Jumlah	1.479.847.523.100	4.807.839.787.364

Direktorat PKNSI melakukan penatausahaan pada tahun 2020 terhadap barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 343 -

PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) periode Semester II Tahun 2020 antara Direktorat PKNSI dan KPKNL. Adapun hasil penatausahaan dimaksud adalah sebagai berikut.

Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
AJB	139
Bukti Pemilikan Kapal	38
BPKB	658
Girik	294
SHGB	370
SHGU	6
SHM	816
SHP	10
Jumlah	2.331

Direktorat PKNSI akan menyempurnakan data penatausahaan barang jaminan dimaksud sampai dengan Semester II Tahun 2022. Atas daftar barang jaminan aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan eks Kelolaan PT. PPA (Persero) yang masih dikelola dan belum diadministrasikan oleh DJKN serta masih dalam proses inventarisasi DJKN, akan diungkapkan dalam LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI Tahun 2022.

10. **Aset Properti Eks BPPN**

Aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan, pada tahun 2009 - 2020 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN TA 2013 - 2020

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	626	400.289.684.383,89
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.069.231.521
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	248	73.615.607.202

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2016-2019, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 344 -

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117
Hasil Penelusuran TA 2016-2019:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912,345,839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA		
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita		
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)		
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	0
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10,800,137,076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	248	73.615.607.202

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum. Rincian aset eks BPPN yang berperkara di lembaga peradilan sampai dengan per 31 Desember 2020 disajikan di Lampiran 25H.

11. Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan dan Peralihan, serta Penguasaan Fisik atas Aset Eks BLBI

Aset Lain berupa aset properti eks BPPN dan eks PT. PPA (Persero), Kementerian Keuangan telah melaksanakan inventarisasi Aset Properti dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN

- 1) Terdapat 184 unit aset senilai Rp1.555.146.271.196 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan;
- 2) Terdapat 1.072 unit aset senilai Rp1.019.550.453.562, yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan;
- 3) Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan;
- 4) Terdapat 709 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)

- 1) Terdapat 1.195 unit aset senilai Rp3.247.509.025.705 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan;
- 2) Terdapat 294 unit aset senilai Rp813.919.115.844 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan;
- 3) Terdapat 31 unit aset senilai Rp686.157.637.452 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 345 -

- 4) Terdapat 557 unit aset senilai Rp1.725.818.297.515 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah:

- a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 643 aset;
- b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 1.463 aset;
- c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 820 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan Pada tahun 2020 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebanyak 326 unit.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan dan/atau dokumen peralihan aset properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Terhambatnya penyelesaian inventarisasi terjadi karena adanya pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 selama beberapa waktu yang meniadakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (adanya cluster Gedung Arsip DJKN), sehingga perlu dilakukan penutupan dan sterilisasi Gedung Arsip DJKN selama beberapa minggu. Dengan demikian, kegiatan inventarisasi pada tahun 2020 terakhir dilaksanakan per tanggal 25 November 2020.

Kegiatan inventarisasi, yang dilakukan tahun 2020 dan masih berlangsung pada tahun 2021, belum sepenuhnya selesai dan belum dilakukan reviu oleh APIP, sehingga aset properti yang disajikan pada Neraca belum berdasarkan hasil inventarisasi per 25 November 2020. Hasil inventarisasi aset properti akan digunakan setelah kegiatan inventarisasi selesai dan dilakukan reviu oleh APIP, serta akan disajikan pada LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI periode Semester I Tahun 2022.

Atas piutang bukan pajak berupa aset kredit PKPS beserta jaminannya, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan akan melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan. Sedangkan aset kredit yang tidak memiliki jaminan akan dilakukan penelitian dan penelusuran ke harta kekayaan obligor, dan selanjutnya dilakukan upaya hukum melalui Kejaksaan Republik Indonesia paling lambat pada tahun 2022.

12. Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan tahun 2020, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) persetujuan, dengan total PNBPN sebesar Rp32.622.482.000. Rincian atas pemanfaatan aset dimaksud disajikan dalam Lampiran 25C.

13. Penggunaan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Kementerian/Lembaga

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga 2020, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 212 aset. Rincian atas penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam Lampiran 25D.

Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 346 -

Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang. Rincian atas rencana penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25E**.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri. Sesuai Surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Rincian atas usul penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25F**.

14. Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

a. Tanggal 17 Juni 2016

Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).

b. Tanggal 18 Januari 2017

Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa Apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.

c. Tanggal 22 September 2017

Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).

d. Tanggal 27 Desember 2018

Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.

e. Tanggal 18 Desember 2019

Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.

f. Tanggal 27 Desember 2020

Serah kelola 61 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp53.833.690.650.

Terkait daftar aset properti yang diserahkan kepada LMAN sebagaimana tersebut di atas diuraikan rinci dalam **Lampiran 25G**.

15. Pemindahan Dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan

Pemindahan dana yang dikelola BLU ke BLU lainnya dilakukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dana yang dipindahkan berasal dari BLU LMAN kepada 29 BLU rumpun layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan RI, Kemhan/TNI, dan POLRI yang telah berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 dan mengalami kesulitan dalam kesinambungan layanan dan keuangan.

Dasar Hukum atas pemindahan dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan adalah sebagai berikut.

- a. PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 347 -

- b. KMK Nomor 319/KMK.05/2020 tentang Pemindahan Saldo Kas BLU LMAN ke BLU Rumpun Layanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19;
- c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemindahan Dana yang Dikelola oleh BLU ke BLU Lain untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Total dana yang dipindahkan adalah Rp1.116.422.586.550. Sampai dengan 31 Desember 2020 dana tersebut sudah digunakan oleh BLU Penerima untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp1.047.555.827.482 atau 93,83 persen dari dana yang dipindahkan.

Dampak positif yang signifikan dari adanya pemindahan dana BLU antara lain:

- a. Dalam waktu cepat berhasil menyediakan penambahan kapasitas ICU, Ruang Isolasi Tekanan Negatif, Ruang Isolasi Biasa serta fasilitas gedung/bangunan lainnya untuk meningkatkan layanan Covid-19;
- b. Dalam waktu cepat berhasil meningkatkan keselamatan dan kepercayaan diri petugas layanan Covid-19 dengan penyediaan APD yang dibutuhkan;
- c. Dalam waktu cepat berhasil memangkas waktu tunggu hasil pemeriksaan SWAB PCR dari yang semula 3-6 hari menjadi hanya 1 hari saja;
- d. Dalam waktu cepat berhasil meningkatkan kualitas diagnosa dan kualitas pemeriksaan bagi pasien Covid-19 dengan penyediaan alat kesehatan yang lebih canggih dan/atau bersifat *portable* sehingga juga memudahkan pelaksanaan layanan;

Penyebab masih adanya sisa dana yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2020 adalah:

- a. BLU Rumpun Layanan Kesehatan penerima pemindahan dana mampu melaksanakan efisiensi sehingga pencapaian output yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan biaya yang tidak sebesar sebagaimana yang dimintakan (48,1 persen dari total sisa dana).
- b. Terdapat beberapa output yang secara tidak terduga mendapatkan komitmen pendanaan dari sumber lain di luar pemindahan dana BLU sehingga diutamakan menggunakan sumber dana lain tersebut untuk mencapai output yang direncanakan (34,5 persen dari total sisa dana).
- c. Terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terkendala proses pengadaan, mulai dari proses impor sampai dengan adanya gagal lelang (9,1 persen dari total sisa dana).
- d. Tagihan dari penyedia barang dan jasa atas kegiatan yang sudah dilakukan belum diterima oleh BLU rumpun layanan kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sehingga belum dapat dibayarkan meskipun kegiatan sudah 100% terselesaikan (4,7 persen dari total sisa dana).
- e. Terdapat insentif perpajakan yang mengakibatkan pembayaran terhadap penyedia jasa menjadi tidak sebesar dana yang dialokasikan, sehingga tersisa dana senilai angka yang seharusnya merupakan potongan pajak (3,6 persen dari total sisa dana).

Rincian penggunaan Pemindahan Dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 4 D.

16. Investasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diatur bahwa:

Pasal 1: Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 348 -

pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

Pasal 15: Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

Kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) belum dapat diukur secara memadai karena perlu memastikan ada tidaknya tanggung jawab hukum Pemerintah yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan informasi terakhir, terhadap putusan pengadilan atas kasus pidana tersebut masih akan terus berproses pada tahapan Banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam hal diputus (*incracht*) bersalah kepada pelaku tindak pidana akan dihukum dan hasil kejahatan yang merugikan negara disita untuk dikembalikan negara.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sesuai POJK nomor 71/POJK.05/2016 PT Asuransi Jiwasraya telah menyusun Buku Rencana Penyelamatan Keuangan (RPK) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN selaku RUPS pada tanggal 11 September 2020 dan telah dibahas dalam rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 14 September 2020. Dalam RPK tersebut PT Asuransi Jiwasraya mengajukan tiga opsi fundamental yakni (i) opsi *bail-out*, (ii) opsi likuidasi, dan (iii) opsi restrukturisasi dan *bail-in* yang mencakup dukungan Pemerintah untuk peningkatan modal. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, politik dan berbagai risiko lainnya, maka diputuskan opsi restrukturisasi dan *bail-in* sebagai opsi yang paling optimal dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada para pemegang polis.

Opsi Restrukturisasi dan *Bail-In* dijelaskan sebagai berikut :

1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan restrukturisasi seluruh portofolio polis eksisting, mengubah produk dengan karakteristik manfaat pasti (*defined benefit*) menjadi iuran pasti (*defined contribution*) dan disertai kemungkinan penyesuaian (*haircut*) nilai tunai dengan target penyelesaian restrukturisasi polis pada tanggal 31 Mei 2021.
2. Sebagai induk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan, PT BPUI (Persero) telah membentuk anak usaha PT IFG Life, yang telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dari OJK pada tanggal 7 April 2021;
3. Setelah selesainya restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan memindahkan aset dan liabilitas hasil restrukturisasi kepada PT IFG Life. Sementara portofolio gagal restrukturisasi dan aset *non-clean and clear* akan tetap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
4. Dalam rangka mempertahankan *Risk Base Capital* (RBC) IFG Life paling sedikit 120%, sebagai indikator modalitas yang cukup sebagai perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan bisnisnya, Pemerintah dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 telah menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan untuk PMN kepada PT BPUI (Persero) yang nantinya akan bertindak selaku induk usaha IFG Life sebesar Rp20 triliun kepada BPUI. Kajian atas PMN tersebut saat ini sedang dalam proses;
5. Selain dari PMN, sumber pendanaan PT BPUI (Persero) dalam rangka peningkatan modal PT IFG Life adalah dengan melakukan *Fundraising* dengan *update dividen* dari anak perusahaan PT BPUI (Persero), yang diproyeksikan dapat menghimpun dana sebesar Rp4,7 triliun.

Sebagai bentuk peran dan tanggung jawab Pemerintah terhadap asuransi Asabri, Pemerintah sebagai pemegang saham menyiapkan regulasi untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan penyesuaian bunga aktuarial sebagai wujud pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan investasi PT Asabri (Persero). Selain itu, Pemerintah tengah mengkaji strategi pemulihan keuangan PT Asabri (Persero). Pemerintah akan segera menyelesaikan perbaikan regulasi terkait PT Asabri (Persero), dimana sebagai wujud perbaikan tata kelola dimaksud, Pemerintah telah membentuk Komite Pengawas Badan Penyelenggara Asuransi/Jaminan Sosial sesuai KMK nomor 118/KMK.01/2020.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

17. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu. Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP Nomor 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- a. karakteristik kewajiban kontinjensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan:

- 1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
- 2) percepatan penyediaan air minum;
- 3) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
- 4) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
- 5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 7) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 8) percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan
- 9) Penjaminan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 350 -

Amanat Pengaturan Pemberian Jaminan

1. Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
2. Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.
3. Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
4. Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.
5. Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
6. Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelenggaraan *Light Rail Transit*/LRT Jabodebek.
7. Perpres Nomor 58/2017, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian /Lembaga /Pemda /BUMN /BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan badan usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.
8. Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditor atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain :

1. Perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan dana;
2. Perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 351 -

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp590,58 miliar, yang terdiri atas anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp421,07 miliar dan anggaran kewajiban penjaminan untuk program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN sebesar Rp169,52 miliar. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional tersebut dalam APBN TA 2020 sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko *default* dari program penjaminan untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Sampai dengan tahun 2020, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJP/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Sampai dengan tahun 2020 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 89 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp594,82 triliun (USD25,49 miliar, Rp200,82 triliun dan EURO,78), dimana terdapat 29 penjaminan yang telah berakhir sebesar ekuivalen Rp59,58 triliun (USD1,81 miliar dan Rp32,59 triliun) serta akumulasi posisi outstanding kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir triwulan III tahun 2020 adalah sebesar ekuivalen Rp295,25 triliun (USD14,48 miliar dan Rp70,59 triliun dan EURO,49 miliar). Adapun rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan tahun 2020 sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 352 -

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)			Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
								Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	15	10	s.d.	15	USD 3,70	IDR 63.545,81	USD 1,03	IDR 19.153,02
								IDR 8.395,18		IDR 3.763,16	
2	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	6	6	s.d.	13	IDR 229,50	IDR 229,50	IDR 84,49	IDR 84,49
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	7	15	s.d.	35	EUR 0,78	IDR 44.701,53	EUR 0,49	IDR 26.898,88
								USD 2,07		USD 1,23	
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan	10	5	s.d.	25	IDR 54.943,75	IDR 63.894,55	IDR 34.363,72	IDR 43.314,52
								USD 0,60		USD 0,60	
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15	s.d.	20	USD 3,91	IDR 58.398,31	USD 3,88	IDR 57.927,28
6	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15	s.d.	21	USD 4,24	IDR 131.846,64	USD 3,56	IDR 72.368,35
								IDR 68.536,14		IDR 19.332,06	
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5	s.d.	9	IDR 4.454,80	IDR 4.454,80	IDR 2.751,10	IDR 2.751,10
8	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	15	s.d.	18	IDR 19.250,00	IDR 19.250,00	IDR 5.791,73	IDR 5.791,73
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	3	10	s.d.	10	IDR 12.423,79	IDR 148.923,49	IDR 4.504,48	IDR 66.958,63
			Pengembang Listrik Swasta	3	15	s.d.	20	USD 9,15		USD 4,19	
Total				60				USD 23,68	IDR 535.244,63	USD 14,48	IDR 295.248,00
							EUR 0,78	EUR 0,49			
							IDR 168.233,16	IDR 70.590,74			
							14.918,00				

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 30 September 2020

(IDR/USD1)

(IDR/EUR1)

17.527,17

**) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta) sejak Tanggal Operasi Komersial*

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp7,67 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

Pengungkapan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Penjaminan sampai dengan tahun 2020 hanya terkait kewajiban penjaminan di Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah) dan Bagian Anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

Pengungkapan Kewajiban Kontinjensi pada Kementerian Kesehatan

Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan terdapat Kewajiban Kontinjensi atas klaim COVID-19 dengan status *dispute* sebesar Rp7.758.199.309.700 dengan rincian klaim belum diverifikasi sebesar Rp1.279.718.055.600.

18. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

Pada Tahun 2020 terdapat persetujuan pemanfaatan BMN dengan rincian sebagai berikut:

1) Sewa BMN kepada PT. Elnusa Tbk berupa 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 6.510,08 m2 berikut bangunan di atasnya, terletak di Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp2.160.000.000, selama 5 tahun mulai Februari 2016 sampai dengan Januari 2021. Berikut detail sewa BMN Eks Pertamina oleh PT Elnusa:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 353 -**

- a) Perjanjian Sewa BMN antara Kemenkeu RI dengan PT Elnusa Tbk Nomor PRJ-2/MK.6/KN.3/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan objek sewa berupa tanah dengan luas 4.611 m² dan sebagian bangunan dengan luas 852,2 m² yang berlokasi di Jalan Cirebon, Komplek Pertamina EP Aset 2 Lapangan Pendopo, Kabupaten Pali. Jangka waktu sewa selama 5 tahun mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 8 Februari 2021, dengan harga sewa sebesar Rp1.735.000.000.
- b) Perjanjian Sewa BMN antara Kemenkeu RI dengan PT Elnusa Tbk Nomor PRJ-1/MK.6/KN.3/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan objek sewa tanah dengan luas 1.899,08 m² dan sebagian bangunan dengan luas 562,7 m² yang berlokasi di Jalan Pramuka, Komplek Pertamina EP Aset 2 Lapangan Prabumulih, Kotamadya Prabumulih, Sumatera Selatan. Jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2021. Harga sewa sebesar Rp.425.000.000.
- 2) Sewa BMN kepada Bass Oil Sukananti Limited berupa 1 (satu) bidang tanah dengan total luas 791,07 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp243.100.000, selama 5 tahun mulai Januari 2017 sampai dengan Januari 2021.
- 3) Sewa BMN kepada PT Pertamina (Persero) berupa 15 unit selain tanah dan/atau bangunan (Tanki-04 beserta fasilitas terkait) terletak di Terminal Jatibarang Balongan, sebesar Rp614.651.000, selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021.

19. PTNBH Universitas Indonesia

Laporan Keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya.

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2017

Berdasarkan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perhitungan Pencatatan Terkait Aset Tetap UI yang berasal dari hibah Pemerintah pada Laporan Keuangan UI Tahun 2017, dijelaskan bahwa UI telah mencatat sejumlah aset hibah Pemerintah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian PUPR) kepada Universitas Indonesia. Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil audit KAP yang berpedoman ketentuan PSAK 16 Aset Tetap di mana Auditor berpendapat bahwa aset tersebut dapat diakui sebagai aset tetap UI karena telah memenuhi kriteria dalam PSAK 116. Namun secara peraturan perundang-undangan, aset tersebut masih tercatat sebagai BMN karena belum diterbitkan BAST Hibah BMN yang menjadi dasar peralihan hak kepemilikan "*Strata of Title*". Per tanggal 31 Desember 2020, Aset yang belum ada dokumen BAST Hibah BMN antara lain:

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai yang ditambahkan sebagai Beban Operasional UI (2019) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2019)	Progres Penyelesaian	Dokumen Pendukung
1	Gedung Asrama Blok H-1	Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR	16.545.400.000		16.545.400.000	Sedang proses	Surat Menkeu No. S-1121/MK.06/2020 hal Permohonan Persetujuan Hibah BMN pada Kementerian PUPR kepada UI tgl 2 Desember 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 354 -

2	Hibah RS UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti	1.072.343.623.551	5.122.248.372	1.087.221.375.179	Sedang proses	Berita Acara Penetapan Nilai Aset Tetap UI (RS UI) No. B/24/B1.3/PL02/2019
3	Hibah Klinik Satelit	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti	10.372.032.228	37.313.650	10.334.718.578	Sedang proses	Berita Acara Pencatatan Aset UI di Sistem Akuntansi RS UI No. 002/BA.KEU/UI/2020
		Total	1.009.261.055.779	5.159.562.022	1.094.101.493.757		

Dari 11 Aset yang dihibahkan Pemerintah kepada UI pada tahun 2017, sampai dengan tahun 2020 status aset yang telah selesai proses hibahnya dari Kementerian Ristekdikti dan Kementerian PUPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2017)	Nilai yang dihibahkan dari Pemberi Hibah
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	5.347.889.590
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	21.598.007.200	-	21.598.007.200	21.598.007.200
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	49.830.000.000	0	49.830.000.000	49.830.000.000
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	3.837.744.000	0	3.837.744.000	3.837.744.000
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	24.368.312.958	0	24.368.312.958	24.368.312.958
6	Peralatan Medical Research Laboratory Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	38.228.343.871	0	38.228.343.871	38.228.343.871
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	16.830.777.445	0	16.830.777.445	16.830.777.445



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 355 -

8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	219.441.365.799
9	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	0	37.480.500.000	18.363.932.684
10	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	0	289.060.000	
Total			550.002.960.244	132.785.444.381	417.217.515.862	397.846.373.546

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2019

Pada tahun 2019, UI mendapatkan aset hibah dari Kementerian Ristekdikti berupa Gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia berikut sarana dan prasarannya dengan nilai hibah sebesar Rp1.082.715.656.970. Aset tersebut telah dicatat sebagai aset Tetap UI mengacu berdasarkan dokumen hibah dan juga mengacu pada PSAK 16. Namun proses administrasi hibah masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian Ristekdikti.

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI (2019) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2019)	Dokumen Pendukung Hibah
1	Rumah Sakit Universitas Indonesia	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	Keputusan Rektor UI Nomor 1126/SK/R/UI/2019 tentang Pentapan Daftar Aset Tetap Rumah Sakit UI
Total			1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	

20. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.708.632.116.222.53 dan Rp18.399.657.640.674,60. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2019 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2020 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 (Rp)
PT Perusahaan Listrik Negara	13.806.824.973.945,00	8.661.179.646.845,00	70.435.403.088,00	5.075.209.924.012,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 356 -

PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	881.022.753.453,34	0	0
PT Pelindo I	0	0	0	0
PT ASDP	620.969.314.032,00	0	0	620.969.314.032,00
PT Pertamina	2.115.334.499.582,53	2.102.881.621.404,00	0	12.452.878.178,53
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	904.692.510.333,20	70.813.589.328,50	0
Jumlah	18.399.667.640.674,60	12.649.776.532.035,50	141.248.992.416,00	5.708.632.116.222,53

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.691.025.524.452. Pada tahun 2020, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) PT Perusahaan Listrik Negara
 - a) Nilai PMN yang ditetapkan pada PT PLN pada tahun 2020 sebesar Rp8.661.179.646.845 merupakan PP Nomor 60 Tahun 2019 sebesar Rp4.028.229.959 dan PP Nomor 36 Tahun 2020 sebesar Rp4.632.949.945.886;
 - b) Pengurangan pada PT PLN sebesar Rp70.435.403.088 merupakan koreksi nilai BPYBDS (Eks UIP) yang berdasarkan revidi Itjen Kementrian bahwa atas asset tersebut sudah tercatat sebagai aset PT PLN dan tidak tercatat sebagai BPYBDS pada PT PLN (LHR-209.Lap/07/IR.1/2020).
- 2) PT Angkasa Pura II
Sebesar Rp881.022.753.453,34 telah ditetapkan dengan PP Nomor 38 Tahun 2020
- 3) PT ASDP
 - a) Sebesar Rp598.637.032 menunggu penetapan Presiden;
 - b) Sebesar Rp122.389.677.000 merupakan asset yang dihibahkan kepada Pemprov Jatim dan rencananya akan dikeluarkan dari daftar asset BPYBDS. Saat ini menunggu dokumen dari Kemenhub untuk mengeluarkan asset dimaksud dari daftar BPYBDS dengan melakukan revisi BASTO Nomor 07/LLASDP-JTM/SRT-11/2015 sebagai dasar pengeluaran dari daftar asset BPYBDS
- 4) PT Pertamina
 - a) Sebesar Rp2.102.881.621.404 telah ditetapkan PP Nomor 50 tahun 2020;
 - b) BPYBDS pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp12.452.878.178,53 yang berdasarkan hasil revidi BPKP belum dapat di-PMN-kan kepada PT Pertamina karena belum terpenuhinya persyaratan sebagaimana pasal 23 ayat1 UU Nomor 19 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2013 bahwa asset dimaksud saat ini tidak digunakan dan/atau dioperasikan oleh PT Pertamina, para pihak berkomitmen untuk segera berkoordinasi guna penyelesaian status asset BPYBDS ini.
- 5) Perum LPPNPI
 - a) Sebesar Rp904.692.520.333,2 telah ditetapkan PP Nomor 65 Tahun 2020;
 - b) Pengurangan nilai BPYBDS pada Perum LPPNPI sebesar Rp70.813.589.328,50 merupakan koreksi nilai BMN untuk Satker Pengembangan Bandar Udara Duanda berdasarkan Laporan Hasil Revidi BPKP Nomor :LHA-6416/PW09/4/2011 dan LR-80/D502/H/2014 (Surat Mensesneg Nomor B-221/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan surat Karo Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Kemenhub Nomor PM.003/1/3 PHB 2020 tanggal 14 Juli 2020.

21. Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH Berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021

Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan alokasi sementara Kurang Bayar DBH meliputi kurang bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019, lebih bayar DBH sampai dengan Tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 357 -

Anggaran 2018, lebih bayar DBH Tahun Anggaran 2019 dan alokasi sementara kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2020, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416, terdiri atas:
 - Bagian Daerah sebesar Rp3.317.353.017.726.
 - Biaya Pemungutan sebesar Rp121.404.263.690.
- b. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.613.096.183.770, terdiri atas:
 - Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp1.264.319.072.730.
 - Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp513.628.250.218.
 - Lebih Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp3.337.065.903.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.089.748.910.090.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp3.664.424.773.555.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp828.998.422.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp74.264.368.550.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp2.544.744.302.
- c. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.039.768.178.079, terdiri atas:
 - Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp120.130.578.561.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp357.128.941.577.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp275.092.357.702.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi berupa Iuran Tetap (*landrent*) sebesar Rp542.096.485.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp286.874.203.754.
- d. Alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp9.907.810.566.250, terdiri atas:
 - Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.897.248.455.500.
 - Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp2.010.562.110.750.

Untuk penyalurannya, ditetapkan dalam KMK 3/KMK.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar pada Tahun 2021. Penyaluran sebagaimana terdapat dalam peraturan ini meliputi, penyaluran PBB sektor Migas TA 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416 dan penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp9.907.810.566.250 serta adanya penyelesaian Lebih Bayar dengan memperhitungkan penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp2.396.430.919.807.

22. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang telah diubah menjadi PMK 234/PB.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Kewajiban

- a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 358 -

- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

2. Pencatatan Aset Tetap

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - 1) Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - 2) Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL jika SK penghapusan belum terbit.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; dan
- c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Data Tuntutan Hukum pada seluruh Kementerian/Lembaga diperoleh dari aplikasi Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPAUHU). Untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan yang memadai terkait kewajiban Pemerintah yang berasal tuntutan hukum yang telah *inkracht*, Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-4PB/PB.6/2020 tanggal 29 Januari 2021 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hal Konfirmasi Pencatatan/Pengungkapan Data Tuntutan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Tetap (*inkracht*).

Berdasarkan surat tanggapan dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020, maka Data Tuntutan Hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2020 yang dapat diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2020 sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan hukum pada Kementerian Keuangan:

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 5 (lima) tuntutan hukum pada Kementerian Keuangan yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah senilai Rp201.369.286.270,75 dan tanah seluas 50.156,20 m², dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara Nomor 45/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst jo. No. 495/Pdt/2007/PT.DKI jo. No. 367K/Pdt/2009 jo. No. 706PK/Pdt/2014, dengan gugatan senilai Rp836.478.647 dan bunga Rp198.663.678;
- b. Perkara Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Jo. 205/PDT/2007/PT.DKI No.277K/Pdt/2017 dengan gugatan senilai Rp199.821.818.945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 359 -

- c. Perkara Nomor 2301K/Pdt/2018 jo Nomor: 371/Pdt/2017/PT.Mks jo Nomor: 236/Pdt.G/2015/PN.MKS tanggal 12 Mei 2016 dengan gugatan berupa tanah/bangunan seluas 785 m²;
- d. Perkara Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Sda jo. No.675/Pdt/2014/PT.Sby jo. No.675K/Pdt/2016 jo. No. 22/Eks/2019 dengan gugatan berupa tanah seluas 49.371,2 m²;
- e. Perkara Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.MDO senilai Rp512.325.000.

Atas 5 (lima) tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut, Kementerian Keuangan belum menganggarkan dalam DIPA. Terkait alokasi anggaran terhadap tuntutan hukum *inkracht* oleh pihak ketiga dimaksud, saat ini sedang dikaji kembali mengingat adanya risiko fiskal yang berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi pengeluaran negara dari APBN. Negara juga berisiko kehilangan potensi penerimaan negara dan hak kepemilikan atas aset tanah dan/atau bangunan. Selain itu, alokasi anggaran atas tuntutan hukum *inkracht* di masa pandemi Covid-19 tidak semudah yang diperkirakan karena struktur anggaran yang ada difokuskan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

2. Tuntutan hukum pada Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Putusan *inkracht* kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa program KPU/ USO Tahun Jamak (*multiyears*) melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebesar Rp1.638.520.805.645 dan USD1,129,208. Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2020 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada Kementerian ATR/BPN:

Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*anmaaning*), dan tidak ada upaya hukum lanjutan sebesar Rp1.000.860.816.74, namun belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- a. Kasus Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 7267 seluas 160.000 m² (16 Ha) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pdt.G/2001/Jak.Sel tanggal 14 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 11 September 2003, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611/K/Pdt/2004 tanggal 25 Oktober 2005, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 PK/Pdt/2007 tanggal 3 Juli 2008.

Dalam amar keputusan pengadilan tersebut di atas, pengadilan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas tanah milik para penggugat, yaitu bagian eks *Eigendom Verponding* Nomor 7267 terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20 persen dari seluas 132 Ha yakni 16 Ha sebesar Rp960.030.816.744. Dalam putusan ini tidak diketahui lokasi pasti 20 persen areal atau 16 Ha yang dimaksud. Dengan demikian belum dapat diketahui porsi jumlah pasti nilai ganti rugi yang menjadi kewajiban dari Kementerian ATR/BPN. Atas tuntutan hukum *inkracht* tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk pembayaran ganti rugi dimaksud, karena gugatan ini tidak terkait dengan aset Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, melainkan terkait proses pembebasan tanah masyarakat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini Kementerian ATR/BPN terlibat sebagai pihak pelaksana pembebasan lahan yaitu pemutusan hubungan hukum dan pembayaran ganti rugi.

- b. Kasus tanah bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Wonokromo s.d. Nomor 7/Wonokromo seluas 6.000 m² dengan jumlah ganti rugi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 1997 Nomor 436/Pdt.G/1996/PN.SBY jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 September 1997 Nomor 534/PDT/1997/PT.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 September 2004 Nomor 2631K/Pdt.G/1999. Gugatan ini terkait dengan proses tukar menukar aset dengan Kementerian ATR/BPN, yang dimenangkan oleh penggugat. Atas tuntutan hukum *inkracht* tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk pembayaran ganti rugi dimaksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 360 -

4. Tuntutan hukum pada BAPPENAS:

Terdapat satu tuntutan hukum yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*anmaaning*), dan tidak ada upaya hukum lanjutan, yang tertuang pada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 No: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No: 116/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal tanggal 19 Oktober 2017 No.1950/Pdt/2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 No: 451 PK/Pdt/2019. Tuntutan hukum tersebut senilai Rp3.944.514.500.000 yang nantinya akan ditanggung renteng oleh 10 instansi. Tuntutan ini belum dianggarkan kedalam DIPA tahun 2020, sehingga belum dilakukan pencatatan atas utang.

5. Tuntutan hukum pada Kementerian PUPR:

Data tuntutan hukum pada Kementerian PUPR yang telah berstatus *inkracht*, *anmaaning*, dan tidak ada upaya hukum lanjutan, tetapi belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Perkara Perdata No. 202/Pdt.G/2003/PN.TNG atas Gugatan dan tuntutan ganti rugi tanah seluas 5.500 m2 untuk Jalan Tol Serpong – Jakarta sebesar Rp10.400.000.000.
- b. Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2004/PN.LP atas gugatan sebidang tanah seluas 3.603 m2 yang terkena pembangunan jalan tol incasu pembangunan *interchange* Mabar sebesar Rp. 1.207.005.000,- ditambah Dwangsom Rp. 300.000/hari terhitung sejak 25 Februari 1993.
- c. Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2007/PN.BKS hal Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi atas tanah seluas 8.094 m2 yang digunakan untuk Jalan Tol JORR sebesar Rp8.104.060.000.
- d. Perkara Perdata No. 273/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM, Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi atas tanah seluas 6.670 m2 untuk Jalan Tol JORR sebesar Rp13.505.000.000.
- e. Perkara Perdata No. 83/PDT.G/2012/PN.MKS hal Tanah seluas 72.786 m2 untuk UGR Jalan Tol Makassar sebesar Rp14.557.200.000.
- f. Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2014/PN.SGU atas Gugatan Ganti Rugi atas Tanah Aset BMN di Kabupaten Sanggau seluas ± 6 ha senilai Rp3.000.000.000 dan penggantian seharga emas pada tahun 1984.
- g. Perkara No 3/Pdt.G/2016/PN.Kgn atas Gugatan Keberatan terhadap Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kepala BWS Kalimantan II sebesar Rp428.203.200;
- h. Perkara Perdata No. 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar atas Gugatan Uang Ganti Rugi dalam Pembangunan Tol Bandara sebesar Rp24.250.000.000;
- i. Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl atas Gugatan Wanprestasi sisa pembayaran nilai kontrak pekerjaan pelebaran jalan air Sebaku – Betungan sebesar Rp3.082.459.046,00 ditambah bunga Rp616.491.809.

6. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat permasalahan tuntutan hukum mantan pegawai setempat yang sudah *inkracht* sebagai berikut

a. KBRI Buenos Aires

Pegawai setempat KBRI Buenos Aires melakukan gugatan kepada KBRI Buenos Aires atas uang pensiun dan ganti kerugian atas tidak dibayarkannya uang lembur, *provident fund*, dan pembayaran pajak sebesar USD24,218.00. Pengadilan melalui amar putusannya tanggal 13 September 2016 memerintahkan KBRI Buenos Aires untuk membayar tuntutan materil ditambah dengan fasilitas hukum (15%), biaya penggugat (13%), psikolog (7%) dan bunga (10%) sejumlah total USD24,218.00.

b. KBRI Mexico City

Pegawai setempat KBRI Mexico City melakukan gugatan atas tuntutan pesangon dan pengadilan negeri setempat telah memberikan putusan memerintahkan KBRI Mexico City untuk melakukan pembayaran sebesar MXN468.875,88



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 361 -

23. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle*. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN *Idle* yang diketahui nilainya dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya. BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. BMN *Idle* yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN *Idle* adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bngunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak Lanjut proses pelaksanaan penghapusan adalah pada tahapan permohonan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu sesuai nota dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-173/KN/2019 tanggal 18 April 2019
- b. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN.10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang. Kepala KPKNL Surabaya telah menyampaikan surat Nomor S-2826/WPJ.24/KP.04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Permintaan Sertifikat Tanah BMN *Idle*.
 - 2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017. KPKNL Surabaya telah melakukan cek fisik dan ditemukan fakta bahwa tanah dimaksud telah terpasang papan nama Pemerintah Kota Surabaya. Melalui nota dinas Kepala KPKNL Surabaya kepada Kepala KPP Gresik Utara Nomor ND-289/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019, Kepala KPKNL telah menyampaikan permohonan penjelasan dokumen kepemilikan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima BMN *Idle* dimaksud.
- c. Terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Pemerintah yang terletak di Jalan Cideng Timur No. 54 Jakarta Pusat ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
 - 2) Satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jalan Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
- d. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2020 adalah nol, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
 - 2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

- 3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec. Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec. Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 6) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen yang terletak di Jalan Letjen Suprpto nomor 31 Jember, perolehan tahun 1969 dengan nilai perolehan Rp125.552.000 yang dicatat oleh KPKNL Jember.

Pada periode Tahun 2020, telah dianggarkan pelaksanaan inventarisasi atas BMN eks BMN idle sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.0/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Pelaksanaan inventarisasi BMN eks BMN idle tidak dapat dilakukan serentak pada seluruh KPKNL disebabkan kendala dampak pandemi COVID-19 dan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Kanwil DJKN yang telah melaksanakan dan menyampaikan laporan inventarisasi adalah sebagai berikut: 1. Kanwil DJKN Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. 2. Kanwil DJKN Kanwil DJKN Jawa Timur.

24. Piutang kepada Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan Rp4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018).

Sepanjang Tahun 2020 tidak terdapat transaksi apapun terkait penyelesaian piutang. Namun demikian terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs dan penilaian aset sitaan. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 363 -

U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.

4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.
5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa outstanding Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
 - a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);
 - b. Sebidang tanah seluas 8.120 m² (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).
7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.
8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.
9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
10. Kejaksaan Republik Indonesia telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).
11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 364 -

menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.

13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.
15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.

25. Penyelesaian Piutang Negara

a. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang negara pada PDAM sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan 9 agenda prioritas (Nawacita) yang diwujudkan dalam salah satu target RPJMN 2015-2019 yaitu 100 persen Akses Aman Air Minum, perlu segera mengupayakan perbaikan kondisi keuangan PDAM yang saat ini mengalami utang macet sebesar Rp4,3 triliun (tingkat NPL 85 persen), agar PDAM semakin *bankable* di tengah terbatasnya sumber pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- 2) Program 10 juta sambungan rumah harus didukung dengan perbaikan kemampuan keuangan PDAM sehingga perlu upaya untuk mengubah hambatan di PDAM menjadi potensi pencapaian target.
- 3) Target MDGs untuk cakupan pelayanan air minum tahun 2019 adalah 100 persen, namun baru tercapai 71,14 persen di tahun 2016 dan 72,04 persen di tahun 2017.
- 4) Utang PDAM selama bertahun-tahun telah membebani PDAM, sehingga mempengaruhi kemampuan PDAM dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2020 terdapat 2 PDAM masih dalam proses penyelesaian utang, yaitu PDAM Kabupaten Nganjuk (kewenangan penghapusan utang pada Presiden) dan PDAM Kota Ambon (kewenangan penghapusan utang pada Menteri Keuangan).

Piutang Negara terhadap PDAM Kabupaten Nganjuk berupa Piutang Non Pokok senilai Rp11.253.042.579 telah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4089/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2005 jo. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang tersebut telah dihapusbukukan dari Neraca Pengelolaan Pemberian Pinjaman tanpa dihapuskan dari hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara pada PDAM Kabupaten Nganjuk mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden.

Piutang Negara terhadap PDAM Kota Ambon berupa Piutang Non Pokok senilai Rp589.182.544 telah mendapatkan persetujuan penyelesaian piutang negara dari Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Nomor S-949/MK.052016 Tanggal 8 November 2016. Pada saat ini penyelesaian pinjaman PDAM Kota Ambon masih dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dengan Bank Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 365 -

b. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

- 1) Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.
- 2) Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
- 3) Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- 4) Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Pada Tahun 2020 terdapat 2 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara mutlak Piutang Negara Non Pokok, yaitu :

- 1) Pemkab Musi Rawas Rp263.817.337,08 melalui KMK 71/KMK.05/2020 tanggal 28 Februari 2020.
- 2) Pemkot Bitung Rp8.230.202.848,15 melalui KMK No. 267/KMK.05/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Selain itu, terdapat 1 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara bersyarat Piutang Negara Non Pokok yaitu Pemkab Kepulauan Sangihe, penghapusan piutang negara secara bersyarat sebesar Rp4.244.724.549 melalui KMK No. 352/KMK.05/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 Pemda dalam proses penyelesaian piutang Negara, sebagai berikut:

- 1) 4 Pemda dalam proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok di Presiden yaitu Pemkot Palembang, Pemkot Singkawang, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Propinsi Riau.
- 2) 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penyelesaian debt swap yaitu Pemkot Manado dan Pemprov Maluku.
- 3) 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Sangihe dan Pemkab Labuhan Batu.
- 4) 1 Pemda dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) yaitu Pemkot Makassar.
- 5) 2 Pemda dalam proses persetujuan penyelesaian piutang negara yaitu Pemkab Lampung Utara dan Eks Provinsi Timor Timur.

Berikut daftar Piutang Pemberian Pinjaman kepada Pemda yang telah mendapat penetapan penghapusan piutang negara non pokok:

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok
1	Pemkab Musirawas	Menkeu	S-842/MK.05/2018	263.817.337
2	Pemkot Bitung	Menkeu	S-750/MK.05/2011	8.230.202.848
Jumlah				8.494.020.185

Berikut daftar Piutang kepada Pemda yang masih melaksanakan Restrukturisasi:

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang non pokok
1	Pemprov Riau	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	14.328.031.497
2	Pemkot Palembang	Presiden	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013	64.933.488.506
3	Pemkot Singkawang	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	17.666.354.370
4	Pemerintah Aceh	Presiden	B-1372/Kemensetneg/Ses/PB.02/05/2019	23.833.926.048
Jumlah				120.761.800.422



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 366 -

c. Dampak Covid-19 terhadap piutang Negara yang berasal dari pemberian pinjaman kepada BUMN/PT/BHL :

1) Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri dalam rangka pembiayaan RIDF pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Sampai dengan Tahun 2020, PT SMI memiliki 5 (lima) *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) untuk pembiayaan dalam rangka *Regional Infrastructure Development Program Funds* (RIDF) dan *Indonesia Infrastructure Financial Funds* (IIFF) dengan status pembayaran aktif, yakni:

No	Nomor RDI/SLA	Tujuan Pinjaman
1	AMA-464/SLA-1229/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
2	AMA-466/SLA-1230/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
3	SLA-1268/DSMI/2017	Tambahan pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
4	SLA-1266/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF
5	SLA-1267/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF

Status kesekuruhan pembayaran pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh PT SMI adalah lancar dengan ditandai dengan pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah atas tagihan pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian pinjaman (SLA).

Namun demikian, terdapat permohonan amandemen terkait dengan SLA pembiayaan kegiatan RIDF sesuai dengan Nota Dinas Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor ND-521/PB.4/2020 Tanggal 23 Juni 2020 hal Pinjaman World Bank No. 8714-ID dan AIB No. 000012-1-IDN: *Regional Infrastructure Development Fund Project* (RIDF)-konfirmasi penyesuaian tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri. Permohonan penyesuaian tingkat bunga tersebut dilatarbelakangi oleh permohonan dari PT SMI atas terjadinya *negative carry* dalam pelaksanaan pembiayaan RIDF. *Negative carry* disebabkan perbedaan tingkat bunga antara pinjaman SLA dengan pinjaman RIDF kepada Pemda. Sesuai perkiraan dari PT SMI bahwa hingga akhir program pembiayaan RIDF *negative carry* akan mencapai Rp307,8 miliar yang dirasa memberatkan bagi keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan telah memberikan usulan atau masukan berdasarkan hasil kajian aspek finansial maupun aspek legal terkait penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF melalui Nota Dinas nomor ND-521/PB.4/2020 tanggal 23 Juni 2020. Usulan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 108/PMK.05/2019 yaitu ditetapkan sebesar imbal hasil Surat Utang Negara Seri *Benchmark* dengan tenor 10 tahun (setara jangka waktu Penerusan Pinjaman Luar Negeri).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan meminta Bank Dunia untuk menyetujui permintaan perubahan perjanjian atas pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan RIDF melalui surat nomor S-134/MK.8/2020 tanggal 29 Juni 2020. Proposal amandemen perjanjian yang tertuang pada surat tersebut, antara lain berupa:

- Penambahan komponen 3: *Early Response and Recovery* (ERRC), komponen ini merupakan dukungan pemerintah dalam rangka penanganan dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
- Perpanjangan *Closing Date* atas pinjaman SLA RIDF dari tanggal 31 Desember 2020 menjadi 31 Desember 2022.
- Penghapusan klausul pada LA terkait tingkat suku bunga pada SLA dengan tujuan fleksibilitas atau kemudahan kepada pemerintah untuk menyesuaikan tingkat bunga pinjaman pada SLA.

2) Pengajuan relaksasi penyelesaian piutang Negara pada BUMN terkait Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa untuk beberapa BUMN sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian utang terhadap Negara. Terdapat beberapa BUMN yang mengajukan restrukturisasi/relaksasi dalam penyelesaian utang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 367 -

terhadap Negara, diantaranya:

- a) Bank Jatim - Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis)
- b) PT Barata (Persero)
- c) PT Djakarta Llyod (Persero)
- d) Perum PPD
- e) PT Amarta Karya (Persero)

25. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela karena belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit*). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *pay as you go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *Pay As You Go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Terkait penerapan PSAP Nomor 10 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), dalam hal penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas, Pemerintah telah mempertimbangkan IPSAS 39 dan PSAK 24 dalam merumuskan kebijakan akuntansi mengenai pencatatan hak dan kewajiban terkait program pensiun PNS dan TNI/Polri. Setelah mempertimbangkan IPSAS 39 dan PSAK 24, Pemerintah memilih kebijakan yaitu pengungkapan atas nilai kewajiban program pensiun PNS dan TNI/Polri di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2020 merupakan hasil perhitungan aktuaris badan penyelenggara (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)) berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam surat nomor S-274/MK.02/2021 tanggal 13 April 2021 hal Permintaan Perhitungan atas Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun adalah sebesar Rp2.928.926.839.599.440.

Asumsi-asumsi perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Asumsi/Metoda
1	Tabel Mortalita	GAM 1983
2	Selisih Usia Peserta dengan istri/suami	Menggunakan data factual
3	Selisih Usia Peserta dengan Anak	Menggunakan data factual
4	Skala Kenaikan Gaji	3,5%
5	Tingkat Bunga Aktuarial	7%
6	Tingkat Inflasi	2%
7	Metode Perhitungan	<i>Accrued Benefit Cost Method</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 368 -

Sedangkan asumsi-asumsi perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang digunakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Asumsi/Metoda
1	Tabel Mortalita	GAM 1971
2	Selisih Usia peserta dengan istri/suami	5 tahun
3	Selisih Usia peserta dengan anak	25 tahun
4	Skala kenaikan gaji	2,5% per tahun
5	Tingkat bunga aktuaria	9,7%
6	Tingkat Inflasi	3% per tahun
7	Metode Penghitungan	<i>Projected Benefit Cost Method</i>

Dampak perubahan asumsi/metoda perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun ialah terdapat peningkatan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Taspen (Persero) dari Rp2.511.825.655.479.840 menjadi Rp2.583.314.764.599.440 dan penurunan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Asabri (Persero) dari Rp364.936.226.000.000 menjadi Rp345.612.075.000.000.

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Saldo dana AIP per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, berturut-turut adalah sebesar Rp194,26 triliun dan Rp169,09 triliun. Sesuai dengan regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunakan untuk (i) mengembalikan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, (ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran manfaat pensiun, (iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta (iv) Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah khusus untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Perhitungan AIP antara KPA dan badan penyelenggara yaitu PT Taspen dan PT Asabri, saldo dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Dana AIP	31 Desember 2020	31 Desember 2019
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	172.467.456.216.202	151.428.469.320.652
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.797.937.705.714	17.669.911.410.364
Jumlah	194.265.393.921.916	169.098.380.731.016

Dibandingkan dengan data Per 31 Desember 2019, Dana AIP pada PT Taspen mengalami kenaikan sebesar Rp21.038.986.895.550 berdasarkan Berita Acara Perhitungan AIP Nomor 2/BA/LK/DJPb-TSP/2021 tanggal 29 Januari 2021. Begitu pula dengan Dana AIP pada PT Asabri mengalami kenaikan sebesar Rp4.116.728.719.449.

Karena AIP bukan merupakan Dana Pensiun dan belum memenuhi kriteria sebagai Aset Program dari Dana Pensiun, maka Dana AIP tidak diperhitungkan dengan potensi kewajiban Manfaat Pasti Masa Depan Program Pensiun Pemerintah.

26. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 369 -

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.096.069	963.408	2.059.477
	b. Pinjaman luar negeri	845.775	-	845.775
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.941.844	963.408	2.905.252
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	99.964	3.062.213	3.162.177
	b. Pinjaman dalam negeri	-	12.531	12.531
	Jumlah Utang Dalam Negeri	99.964	3.074.744	3.174.708
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah	2.041.808	4.038.152	6.079.960

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (Part IV *Balance of Payments Manual* (BOPM) IMF, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Buhtek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akreal.

Dampak Covid-19 Pada Kebijakan Pengelolaan Utang Tahun 2020

- Pada tahun 2020 ini terdapat kejadian luar biasa yaitu pandemi Covid-19, pemerintah kemudian mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya ditetapkan Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, dimana Pemerintah memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN), tentunya memberikan dampak terhadap kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit yang diakibatkan karena penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.
- Di tengah meningkatnya kebutuhan dana yang signifikan untuk memastikan kegiatan PC-PEN dapat berjalan dengan baik, terdapat arahan dari pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Bank Indonesia (BI) selaku regulator kebijakan moneter untuk memberikan dukungan dana kepada Pemerintah terutama melalui Kemenkeu dengan kerjasama pembiayaan utang untuk memastikan kebutuhan dana dimaksud dapat tersedia tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap keuangan negara. Menindaklanjuti pembicaraan di DPR, Kemenkeu dan BI kemudian melaksanakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 370 -

pembahasan mengenai skema kerjasama pembiayaan utang antara Pemerintah dan Bank Sentral, yang menghasilkan kesepakatan kerjasama terkait pendanaan PC-PEN dengan skema pembagian beban/*Burden Sharing* antara Kemenkeu dan BI. Kerjasama Kemenkeu dan BI tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. nomor 347/KMK.08/2020 dan nomor 22/9/KEP.GBI/2020 Tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional. Untuk mengatur hal yang lebih teknis, disusun juga aturan turunan teknis pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal PPR dan Deputi Gubernur BI nomor PRJ-289/PR/2020 dan nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional.

Dalam kerjasama pembiayaan dengan skema *burden sharing*, BI sepakat untuk memberikan kepastian penyediaan dana dalam bentuk pembelian instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah untuk pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Public Goods* (PG) tanpa menimbulkan beban kupon atas instrumen dimaksud, serta berbagi beban/kontribusi kepada Pemerintah atas beban yang ditimbulkan atas penerbitan instrumen SBN untuk pembiayaan pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Non Public Goods* (NPG) untuk UMKM dan Korporasi.

27. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT. Kebijakan akuntansi dan Pengaturan Teknis pencatatan konsesi jasa telah diatur dalam:

- a. Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang sebagaimana Lampiran dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- b. Teknis perekaman untuk penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa di Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020. Teknis pencatatan dan penatausahaan aset konsesi jasa dapat diakomodir oleh Aplikasi SIMAK-BMN.

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Pemerintah, terdapat dua Kementerian yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Kementerian PUPR untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik jalan tol. Perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian PUPR merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Sedangkan pengaturan konsesi jasa yang teridentifikasi pada Kementerian Kominfo adalah KPBU penyelenggaraan pelayanan publik jaringan telekomunikasi dan informatika (Palapa Ring). Perjanjian konsesi jasa untuk Proyek Palapa Ring merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan (*financial liability model/scheme*).

Pendekatan/metode yang utama yang digunakan dalam pencatatan pertama kali aset dan kewajiban konsesi jasa adalah retrospektif, yaitu K/L harus bisa menyajikan nilai aset konsesi jasa berikut akumulasi penyusutan aset pada saat awal perjanjian aktif di masa lalu. Namun demikian apabila tidak dimungkinkan untuk disajikan nilainya secara retrospektif karena tidak tersedia datanya, atau kesulitan mendapatkan nilai yang andal, maka dibolehkan untuk menentukan nilai aset dimaksud secara metode prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa pertimbangan dan catatan manajemen harus disertai alasan yg kuat dan jelas, bukan semata-mata untuk alasan pemilihan metode yang lebih muda dan tidak berupaya untuk memperoleh nilai yang andal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 371 -

Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 sebagai perubahan PMK Nomor 225/PMK.05/2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.5/2020.

Dalam surat Menteri Keuangan dimaksud diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki perjanjian dengan karakteristik pengaturan konsesi jasa agar mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengungkapan pengaturan konsesi jasa dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - b. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan, termasuk penyediaan aset dan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian;
 - b. Jenis skema kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mitra/badan usaha dalam penyediaan aset dan jasa pelayanan publik (misalnya skema pembayaran oleh pemerintah, skema pemberian hak konsesi jasa, atau kombinasi skema);
 - c. Ketentuan signifikan dalam pengaturan konsesi jasa yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang); dan
 - d. Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa
3. Dalam hal terdapat Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa, hal tersebut tetap disajikan di *face* Neraca sebagai aset kemitraan dan diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan mempedomani, ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.05/2020 dimaksud, maka pada laporan Keuangan tahun 2020, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa di neraca atau *face* laporan keuangan, namun hanya mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR dijelaskan bahwa terdapat aset konstruksi jalan tol per 31 Desember 2020 sebesar Rp 638,039 triliun yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Aset konstruksi jalan tol tersebut saat ini masih dalam masa konsesi dan akan diserahkan kepada Kementerian PUPR setelah masa konsesi.

Pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo diperoleh informasi bahwa Perolehan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Proyek Palapa Ring	Nilai
1	Paket Barat	1.335.729.218.541
2	Paket Tengah	1.082.269.778.326
3	Paket Timur	5.378.127.196.087
Total		7.796.126.192.954

Sedangkan untuk kewajiban konsesi jasa, sampai dengan 31 Desember 2020 Menteri Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah membayar kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) sesuai dengan penyediaan ketersediaan layanan masing-masing BUP dengan jumlah sebesar Rp3.155.041.317.625 dari jumlah kewajiban konsesi jasa sebesar Rp21.214.465.106.848 sebagai berikut:

- a. PTPRB sebesar Rp860.165.580.043 dari jumlah kewajiban sebesar Rp3.486.383.120.000;
- b. PT LTI sebesar Rp625.225.909.370 dari jumlah kewajiban sebesar Rp3.736.930.208.900;
- c. PT PTT sebesar Rp1.669.649.828.212 dari jumlah kewajiban sebesar Rp13.991.151.777.948.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 372 -

28. Penempatan Dana dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Bank Umum

Untuk penanganan Covid-19 dan PEN terdapat mekanisme pembiayaan kebutuhan *Public Goods* dan *Non Public Goods* sesuai dengan skema *burden sharing* yang telah disepakati antara Pemerintah dan bank Indonesia. Hasil penerbitan SUN/SBSN dipindahkan dari RKUN ke dalam dua rekening khusus sesuai dengan peruntukannya yaitu Rekening Khusus PEN *Public Goods* dan Rekening Khusus PEN *Non Public Goods*. Pada rekening khusus PEN *Non Public Goods* dilakukan Penempatan dana kepada bank umum mitra melalui mekanisme PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penempatan dana pada bank umum mitra dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara dan merupakan bagian dari pembiayaan program PEN *Non Public Goods*. Bank umum mitra menggunakan penempatan dana untuk menyalurkan kredit kepada debitur untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kategori debitur mencakup debitur UMKM, Koperasi, debitur non-UMKM (debitur kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, kredit komersial, dan kredit korporasi) serta lembaga keuangan. Bank umum mitra merupakan bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra Kuasa BUN Pusat dalam penempatan dana untuk pelaksanaan program PEN dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
2. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/Badan Hukum Indonesia/Pemerintah Daerah;
3. Memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional berupa ekspansi kredit kepada debitur UMKM, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan/atau pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Akuntansi dan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan penempatan dana dalam rangka program PEN didesain mengikuti proses bisnisnya. Pengaturan pada PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang secara spesifik mengatur proses bisnis penempatan dana dalam rangka program PEN yang ditempatkan dalam bentuk deposito, dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan batas maksimal/limit penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penetapan batas maksimal/limit penempatan dilakukan dengan memperhitungkan rencana penggunaan penempatan dana, penilaian tingkat risiko dan tingkat likuiditas bank.
2. Berdasarkan keputusan penetapan transaksi *over the counter*, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* ke rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Umum Mitra melakukan pemindahbukuan dana hasil setelmen tersebut ke rekening penempatan deposito atas nama Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara di Bank Umum Mitra.
3. Jangka waktu penempatan dana pada Bank Umum Mitra paling lama enam bulan.
4. Penarikan atas penempatan dana pada bank umum mitra dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Adapun penarikan penempatan dana sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemerintah dan/atau meningkatnya risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.

Berdasarkan proses bisnis pada PMK Nomor 104/PMK.05/2020 dan kesesuaian dengan PSAP Nomor 6 (Akuntansi Investasi) kebijakan Pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. PSAP 06 tidak berlaku untuk penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas (0 s.d 3 bulan), namun demikian untuk investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan s.d 12 bulan merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan dengan penempatan dana dalam rangka manajemen kas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 373 -

2. Penempatan Dana Dalam Rangka Manajemen Kas akan dicatat sebagai Setara Kas (0 s.d 3 bulan) atau Investasi Jangka Pendek (> 3 s.d 12 bulan).
3. Penempatan dana pada bank umum mitra dengan mekanisme pengelolaan uang negara/manajemen kas disajikan pada Laporan Arus Kas sebagai transaksi transitoris; dan Neraca sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas (untuk penempatan dana dengan jangka waktu s.d. 3 bulan) atau Investasi Jangka Pendek (untuk penempatan dana dengan jangka waktu > 3 s.d. 12 bulan), serta dilakukan pengungkapan secara memadai di CaLK.
4. Pada akhir periode pelaporan di akhir tahun, catatan akuntansi terkait dengan transaksi penempatan dana dalam rangka program PEN adalah sebagai berikut:
 - a. Catatan aset berupa Kas Lainnya Dan Setara Kas dan/atau Investasi Dalam Deposito Jangka Pendek pada neraca apabila pada akhir tahun terdapat penempatan dana program PEN pada Bank Umum Mitra yang belum jatuh tempo.
 - b. Catatan aset berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas kas yang tersedia pada Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* dan *Non Public Goods*.
 - c. Catatan pengakuan piutang bukan pajak dan pendapatan remunerasi atas penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program PEN secara akrual, sesuai dengan perhitungan penyisihan piutang dan pendapatan yang dihitung secara akrual.

29. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait Investasi Pemerintah

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Pemerintah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PNBP).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam rangka program PEN kepada BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan talangan (investasi) untuk modal kerja yang menambah nilai investasi pemerintah yaitu.

No	BUMN	REALISASI	KETERANGAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA		17.500.000.000.000	
1	PT Utama Karya (Persero)	7.500.000.000.000	PP 71/2020
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	6.000.000.000.000	PP 72/2020
3	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.500.000.000.000	PP 63/2020
4	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC	500.000.000.000	PP 64/2020
5	PT Bio Farma (Persero)	2.000.000.000.000	PP 80/2020
Investasi Non Permanen PEN		19.650.000.000.000	
1	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000	.
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	.
3	Perum Perumnas	650.000.000.000	.
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000	.
5	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000	.
TOTAL		37.150.000.000.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 374 -

Selain itu terdapat PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan pembiayaan SWF. Sampai dengan 31 Desember alokasi tersebut dapat terealisasi seluruhnya dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi
	Penyertaan Modal Negara	Rp1.570.000.000.000
1	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Rp1.570.000.000.000
	Pembiayaan SWF	Rp15.000.000.000.000
1	Lembaga Pengelola Investasi	Rp15.000.000.000.000
Total		Rp16.570.000.000.000

Penambahan penyertaan modal negara untuk modal awal kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah) dititipkan sementara pada rekening BUN pada Bank Indonesia (rekening *escrow*) berdasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

30. Piutang Pajak

Dalam rangka mengatasi kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Piutang Perpajakan DJP telah mengimplementasikan *Revenue Accounting System* (RAS) secara nasional mulai tanggal 1 Juli 2020. Dengan diterapkannya RAS, maka pemutakhiran dan validasi data piutang dilakukan pada setiap transaksi sehingga Saldo Piutang dapat diketahui secara *real time*.

Jumlah Piutang Pajak Bruto Unit Eselon I DJP Per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.891.088.751.611. Saldo piutang tersebut berdasarkan Laporan Piutang Pajak dari sistem aplikasi *Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS). Rincian mutasi piutang pajak DJP per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	72.630.633.482.247
2	Penambah Piutang :	
	Penetapan Pajak	56.524.249.304.581
	<i>Inkracht</i> Ketetapan	8.841.257.021.097
	Upaya Hukum Menambah	16.746.387.626.300
	Penerbitan Kembali Menambah	10.108.788.691
	Pindah Masuk	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Menambah	406.626.457.629
	Koreksi Menambah	5.338.478.655.249
	Tambah Lain	716.770.936.791
	Total Penambah	90.893.252.301.087
3	Pengurang Piutang :	
	Penyesuaian jurnal manual	28.423.129.559
	Pembayaran	45.824.473.163.683
	Pemindahbukuan	5.892.762.078.260
	Kompensasi	7.504.876.547.719



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 375 -

	Upaya Hukum Berkurang	4.919.472.180.232
	Penerbitan Kembali Berkurang	7.090.568.387
	Pindah Keluar	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Berkurang	368.752.582.072
	Koreksi Berkurang	7.259.012.630.688
	Kurang Lain	6.371.622.968.525
	Hapus Buku	13.145.937.671.821
	Total Pengurang	93.632.797.031.703
4	Saldo Akhir	69.891.088.751.831
5	Nilai Penyisihan	37.439.661.754.138
6	Saldo Net*)	32.451.426.997.493

*) terdapat selisih pembulatan nilai saldo antara Laporan Piutang TPA Modul RAS dengan Aplikasi SAKTI dan E-Rekon-LK

1. Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari:

- (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain and unrealized gain*); dan
- (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari :

- (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss and unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan
- (2) pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

4. Upaya hukum keberatan, banding serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap

Selama tahun 2020, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, maupun pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 32.138 ketetapan pajak senilai Rp27.109.053.523.968,20;
 - b. Ketetapan Pajak yang belum diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding) sebanyak 21.894 senilai Rp62.419.225.231.945,40
5. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp69.891.088.751.631 terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp37.439.661.754.138 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp32.451.426.997.493. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	69.891.088.751.631	72.602.210.352.657	(2.711.121.601.026)	(3,73)
Penyisihan Piutang Pajak	37.439.661.754.138	44.914.175.769.659	(7.474.514.015.521)	(16,64)
Piutang Pajak Netto	32.451.426.997.493	27.688.034.582.998	4.763.392.414.495	17,20

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai barang sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan. Nilai estimasi aset WP yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang, dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang per 31 Desember 2020 sebagai pengurang nilai Piutang untuk perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebesar Rp177.875.621.759.

Perhitungan nilai penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per 31 Desember 2020 disajikan dengan rincian sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 377 -

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	15.801.496.315	12.856.237.873	10.046.140.160	31.187.214.403	69.891.088.752
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan	-	20.689.662	48.001.857	108.184.103	177.875.622
Dasar Penghitungan Penyisihan	15.801.496.315	12.835.548.211	9.998.138.303	31.078.030.300	69.713.213.130
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	79.007.482	1.283.554.821	4.999.069.152	31.078.030.00	37.439.661.754

Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel berikut.

Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Brute	Nilai Penyisihan	Piutang Netto
Sampai dengan 1 Tahun	17.241.692.215.989	223.029.861.634	17.018.662.354.355
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.524.322.359.575	1.701.677.658.660	10.822.644.700.915
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	9.000.570.471.375	4.499.634.631.244	4.500.935.840.131
Lebih dari 3 Tahun	31.124.503.704.693	31.015.319.602.600	109.184.102.093
Total	69.891.088.751.631	37.439.661.754.138	32.451.426.997.493

6. Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak yang Telah Deluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp43.256.163.879.792 mengalami kenaikan sebesar Rp11.346.267.952.829 dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 378 -

Tabel Rincian Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Daluwarsa	43.256.163.879.792	31.909.895.927.163	11.346.267.952.629	35,58

Kenaikan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp11.346.267.952.629 berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.820, dikurangi Penghapustagihan Piutang Pajak tahun 2020 sebesar Rp1.769.392.480.418, dan *restate* piutang daluwarsa 2019 menjadi belum daluwarsa sebesar Rp30.277.238.774.

KEYERANGAN	NILAI
Saldo Awal Daluwarsa	31.909.895.927.163
Penambahan Daluwarsa	13.145.937.671.821
Penghapustagihan	(1.769.392.480.418)
<i>Restate</i> Hapus Buku	(30.277.238.774)
Saldo Akhir Daluwarsa	43.256.163.879.792

Rincian penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.821 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang PPh Psl. 21	107.924.125.958,30
Piutang PPh Psl. 22	9.643.908.960,50
Piutang PPh Psl. 23	321.636.904.457,83
Piutang PPh Psl. 25 OP	209.393.701.067,22
Piutang PPh Psl. 25 Badan	2.244.085.667.956,02
Piutang PPh Psl. 26	422.445.361.846,34
Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	164.384.198.074,58
Piutang PPN	2.549.006.994.697,73
Piutang PPh BM	41.148.473.148,00
Piutang PBB Perkebunan	168.986.691.522,66
Piutang PBB Kehutanan	90.748.574.353,00
Piutang PBB Pertambangan Migas	473.865.260.245,00
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	771.886.285.995,00
Piutang PBB Sektor Lainnya	1.338.550.260,00
Piutang Bunga Penagihan PPh	3.697.583.926.796,66
Piutang Bunga Penagihan PPN	1.850.936.218.795,78
Piutang Bunga Penagihan PPhBM	20.916.827.686,00
Jumlah	13.145.937.671.820,60

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dilakukan penghapustagihan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada periode terjadinya penghapustagihan.

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2020 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan *reviu* oleh Inspektorat Jenderal Kementerian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 379 -

Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 7 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp1.769.392.480.418 dari 7 Kanwil dengan rincian pada tabel dan atas piutang pajak yang tersebut dihapusstaghikan (dikeluarkan dari laporan keuangan), dengan rincian berikut.

Tabel Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jawa Timur III	35/KMK.03/2020	12/02/2020	884	168.582.075.455
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	36/KMK.03/2020	12/02/2020	646	852.387.628.582
Kanwil DJP Jawa Tengah II	121/KMK.03/2020	18/03/2020	692	150.010.871.251
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	434/KMK.03/2020	25/09/2020	704	207.888.350.448
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	475/KMK.03/2020	20/10/2020	635	225.010.521.434
Kanwil DJP Jakarta Utara	476/KMK.03/2020	20/10/2020	8	1.318.519.556
Kanwil DJP Jawa Timur II	534/KMK.03/2020	24/11/2020	682	164.196.513.692
Total			4.249	1.769.392.480.418

7. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh WP belum diakui sebagai piutang pajak.

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh WP untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 2.922.757 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp99.052.637.578.352 dan USD654.561.063. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020

Jenis Pajak	Kurs	Jml Trx	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	5	1.011.462.559	1.011.462.559	0
	USD	1	415	415	0
PPh PsI. 21	IDR	362.699	2.193.660.065.375	1.400.497.885.863	793.162.179.512
PPh PsI. 22	IDR	12.611	689.447.845.170	228.586.942.062	460.860.703.108
PPh Pasal 22 Impor	IDR	158	5.616.634.856	3.275.415.789	2.341.219.067



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 380 -

PPh PsL 23	IDR	127.265	7.063.638.672.415	1.592.096.041.947	5.471.542.630.488
	USD	1	522.760	258.861	263.899
PPh PsL 25 OP	IDR	729.034	1.241.499.717.522	907.601.018.096	333.898.699.426
PPh PsL 25 Badan	IDR	259.868	27.082.716.155.019	7.745.010.918.424	19.337.705.236.595
	USD	606	502.559.427	145.138.956	357.420.472
PPh PsL 26	IDR	6.390	5.086.164.370.492	909.047.542.343	4.177.116.828.149
PPh PsL 4 Ayat (2)	IDR	749.188	6.380.843.982.412	1.547.454.842.129	4.833.389.140.283
	USD	2	208.310	166.492	41.818
PPN	IDR	650.804	22.862.333.584.143	11.708.347.114.051	11.152.986.470.092
PPN Impor	IDR	289	88.724.534.265	28.980.340.483	59.744.193.782
PPn BM	IDR	15	18.115.301.229	699.569.016	17.415.742.213
PBB Perkebunan	IDR	7.599	3.060.896.819.546	3.060.896.819.546	0
PBB Kehutanan	IDR	1.207	888.010.812.531	888.010.812.531	0
PBB Pertambangan Migas	IDR	7.805	18.103.871.902.656	18.103.871.902.656	0
PBB Sektor Lainnya	IDR	1.773	163.474.647.270	163.474.647.270	0
Bea Materai	IDR	526	269.959.688.859	37.532.425.431	232.427.243.428
PTLL	IDR	2	514.553.479	514.553.479	0
Bunga Penagihan PPh	IDR	2.212	2.772.828.539.544	2.772.828.539.544	0
	USD	19	151.270.150	151.270.150	0
Bunga Penagihan PPN	IDR	2.678	1.079.308.509.011	1.079.308.509.011	0
TOTAL	IDR	2.922.128	98.052.637.578.352	52.180.047.292.229	46.872.590.286.123
	USD	629	654.561.063	296.834.874	357.726.189

Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh WP. Terhadap pajak terutang yang disetujui WP wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, WP dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian WP membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal WP belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Nilai pembayaran terkait ketetapan pajak atas jumlah yang tidak disetujui WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.162.411.560.710.

WP yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila WP mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasil upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai dasar bagi DJP dalam mencatat piutang perpajakan, baik sebagai penambah maupun pengurang piutang perpajakan WP.

8. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangi, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 381 -

Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Pengadilan Pajak namun belum diterbitkan SP2B	IDR	37	230.548.745.758
	USD	3	5.809.696

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terdapat Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali sedang proses penerbitan SP2PK dengan diteruskan ke KPP tempat WP terdaftar karena WP pindah sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Mahkamah Agung namun belum diterbitkan SP2PK	IDR	171	1.324.514.753.342

31. Piutang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

a. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 382 -

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi yaitu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur. Pada tanggal 11 Februari 2020 telah diadakan pembahasan Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

32. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021

Pemerintah akan berkoordinasi dengan KSAP untuk mendorong percepatan penyelesaian PSAP yang terkait:

- a. Kewajiban Jangka Panjang Pensiun PNS dan TNI/Polri;
- b. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa;
- c. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Transaksi Pajak.

Selanjutnya, pemerintah akan mengimplementasikan PSAP mengenai hal tersebut segera setelah PSAP berlaku. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan negara di dalam laporan keuangan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 383 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp872.618.264.239.235. Nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp623.391.624.668.022 atau 250,13 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp249.226.639.571.213. Defisit LO Tahun 2020 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp817.921.696.353.299 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54.696.567.885.936, serta Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp817.921.696.353.299, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp1.783.192.349.751.058 dan Beban Operasional sebesar Rp2.601.114.046.104.357.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54.696.567.885.936, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp15.620.045.735.162, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp39.076.522.150.774.

Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2015- 2020

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

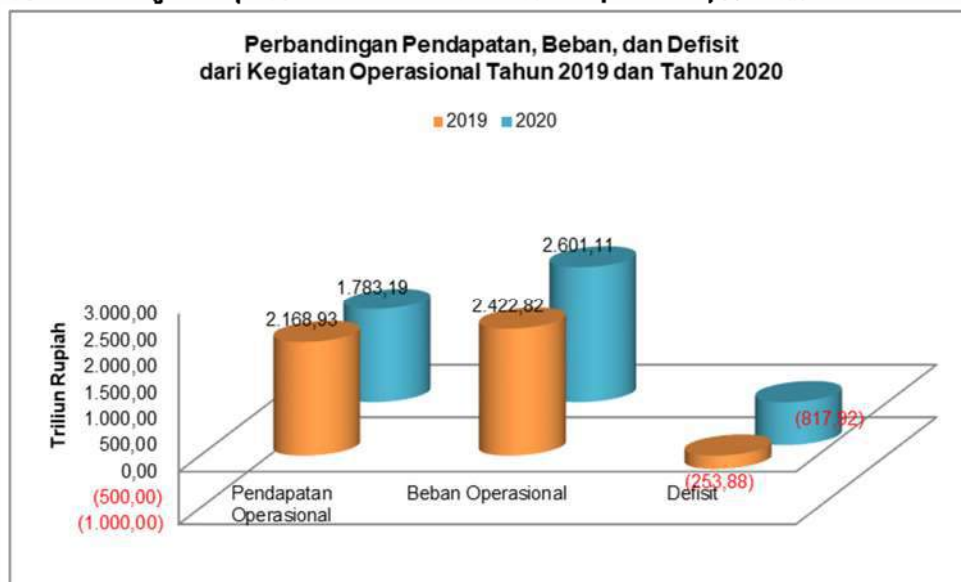


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 384 -

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-Lain. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KNDI), Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-Lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2020 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp817.921.696.353.299. Nilai defisit tersebut bertambah sebesar Rp564.036.708.978.818 atau 222,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp253.884.987.374.481. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Grafik 29.



Grafik 29. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp1.783,19 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 385 -

Pendapatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp1.783.192.349.751.058 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.296.658.808.569.667, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp457.556.142.971.260, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp28.977.398.210.131. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2020 lebih rendah sebesar Rp385.738.461.614.779 atau 17,78 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp2.168.930.811.365.837. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 30.



Grafik 30. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2020

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

*Pendapatan
Perpajakan
Rp1.296,65
triliun*

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2020, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.296.658.808.569.667. Nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp280.875.074.016.380 atau 17,80 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.577.533.882.586.047. Pendapatan Perpajakan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437
Pendapatan Cukai	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271
Pendapatan Pajak Lainnya	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661
Pendapatan Bea Masuk	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126
Pendapatan Bea Keluar	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269
Pendapatan Pajak Lain-lain	(19.303.388.856)	22.422.050.495
Total	1.296.658.808.569.667	1.577.533.882.586.047

Pendapatan Pajak yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya merupakan dampak dari perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Kontraksi juga dialami oleh Pendapatan Bea Masuk sejalan dengan penurunan aktivitas impor. Namun demikian, masih terdapat pertumbuhan Pendapatan Kepabeanan dan Cukai yang ditopang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 386 -

oleh kenaikan Pendapatan Cukai. Tumbuhnya Pendapatan Cukai merupakan dampak dari kebijakan tarif efektif cukai hasil tembakau dan pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, Pendapatan Bea Keluar juga mengalami pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan harga komoditas tembakau dan kelapa sawit.

*Pendapatan
Pajak
Penghasilan
Rp588,31
triliun*

E.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 adalah sebesar Rp588.311.959.554.395. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp202.029.361.616.619 atau 25,56 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp790.341.321.171.014. Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	10.767.293.105.466	24.476.377.046.788
Pendapatan PPh Gas Bumi	21.685.235.687.599	34.652.118.896.779
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.370.461.126	2.541.269.599
Pendapatan PPh Pasal 21	139.575.497.367.579	148.962.352.462.971
Pendapatan PPh Pasal 22	16.898.546.592.900	21.450.645.481.140
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	27.094.680.529.938	53.750.052.700.672
Pendapatan PPh Pasal 23	40.580.199.641.894	45.499.149.466.003
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.859.262.159.002	11.557.660.082.012
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	160.573.261.368.734	261.687.731.414.986
Pendapatan PPh Pasal 26	44.601.670.971.389	46.731.219.638.473
Pendapatan PPh Final	113.379.490.545.307	130.283.487.190.539
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	111.539.653.990	134.377.615.887
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	97.269.537
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	-	7.345.980
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	-	730.495
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	-	472.736.000
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	-	(22.247.678)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	-	2.240.629.780.907
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	1.179.911.469.471	8.912.420.935.294
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	-	854.630
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	-	500.000
Jumlah	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014

Penurunan besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi nasional, di antaranya konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, kegiatan ekspor impor tertekan, turunnya kinerja sektor riil, dan melemahnya pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi kebijakan insentif perpajakan juga memengaruhi besaran Pendapatan Pajak Penghasilan.

Penurunan Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 yang paling signifikan terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019, melemahnya harga komoditas utama, meningkatnya restitusi pajak dan diberlakukannya insentif pajak. Penurunan PPh Migas disebabkan oleh tren penurunan harga minyak di pasar global karena turunnya permintaan sebagai dampak pandemi serta *oversupply* minyak sebagai akibat dari eskalasi politik negara-negara penghasil minyak.

E.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

*Pendapatan
Pajak
Pertambahan
Nilai Rp453,59
triliun*

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 adalah sebesar Rp453.594.425.319.088. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.344.276.836.686 atau 15,21 persen dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp534.938.702.155.774. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>	Tahun 2019 <i>(Audited)</i>
Pendapatan PPN Dalam Negeri	304.017.056.179.001	347.356.073.946.386
Pendapatan PPN Impor	140.348.420.416.740	171.290.004.084.136
Pendapatan PPN Lainnya	713.298.440.085	162.985.906.464
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5.508.290.452.818	11.318.474.863.766
Pendapatan PPnBM Impor	3.006.550.518.122	4.778.052.113.626
Pendapatan PPnBM Lainnya	809.312.322	33.111.241.396
Jumlah	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774

Penurunan pada Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2020 paling signifikan terdapat pada PPN Dalam Negeri yang dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga dan pemerintah akibat rendahnya daya beli masyarakat, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi, penurunan volume penjualan kendaraan bermotor, dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Penurunan tertinggi kedua adalah PPN Impor dipengaruhi oleh berlanjutnya tren penurunan volume dan nilai impor sepanjang tahun 2020 sebagai dampak menurunnya aktivitas perdagangan global akibat penerapan kebijakan *lockdown* di negara mitra dagang utama dan berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang terhenti selama pembatasan sosial. Penurunan PPnBM Impor terutama karena penurunan volume impor mobil CBU.

E.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

*Pendapatan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp 21,87 triliun*

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp21.873.478.094.366. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp245.819.172.929 atau 1,14 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp21.627.658.921.437. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 388 -

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.875.110.174.042	2.679.871.714.018
Pendapatan PBB Kehutanan	736.092.315.967	707.311.119.548
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	3.624.067.977.841	3.488.813.971.721
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.020.848.448.733	14.254.853.341.298
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	453.101.854.619	368.605.843.245
Pendapatan PBB Lainnya	164.257.323.164	128.202.931.607
Jumlah	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 relatif tidak terpengaruh dengan Pandemi Covid-19 karena realisasinya dihitung berdasarkan aktivitas pertambangan migas tahun 2019. Kinerja Pendapatan PBB ditopang oleh PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai kontributor utama. Namun demikian, Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam pada bulan April tahun 2020. Harga minyak *West Texas Intermediate Crude (WTI)* saat itu sempat mencatatkan harga minyak negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

Pendapatan
Cukai
Rp185,89
triliun

Pendapatan Cukai Tahun 2020 mencapai nilai Rp185.896.669.118.177. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.886.750.676.906 atau 2,70 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp181.009.918.441.271. Pendapatan Cukai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	179.829.381.555.178	173.457.613.724.100
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	241.785.540.000	122.516.071.000
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.760.903.436.430	7.339.164.710.070
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	52.485.794.559	75.024.437.900
Pendapatan Cukai Lainnya	12.112.792.010	15.599.498.201
Jumlah	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2020 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol. Peningkatan yang signifikan terhadap Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol disebabkan oleh peningkatan permintaan bahan dasar pembuatan produk disinfektan yang terjadi sejak pertengahan April 2020. Namun demikian, Pendapatan Cukai Hasil Tembakau tetap merupakan penopang utama peningkatan Pendapatan Cukai. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta kebijakan penyesuaian tarif cukai. Sedangkan untuk Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap sektor pariwisata nasional.

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan
Pajak Lainnya
Rp10,49 triliun

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.497.063.339.658. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.896.208.854.997 atau 22,05 persen dibandingkan Tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 389 -

2019 sebesar Rp8.600.854.484.661. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Materai	1.451.068.784.948	1.480.547.017.178
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.638.052.138.011	4.117.446.934.631
Pendapatan PPh Batubara	485.164.815.391	538.680.322.182
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	8.160.222.960	97.145.996.283
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.077.680.856.075	1.229.599.650.789
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	836.860.288.869	917.242.557.662
Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM	1.863.959	220.033.197.452
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	74.369.445	158.808.484
Jumlah	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661

Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya disebabkan oleh lonjakan setoran komponen Pendapatan Bunga Penagihan Pajak pada tahun 2020, sedangkan komponen lain mengalami penurunan.

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

*Pendapatan
Bea Masuk
Rp 32,45 triliun*

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp32.451.724.568.651. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.109.121.639.475 atau 13,60 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp37.560.846.208.126. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	29.699.692.420.467	35.103.349.503.286
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	804.979.187.019	523.769.571.149
Pendapatan Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	544.681.579.309	557.592.576.555
Pendapatan BM-DTP	-	354.326.302.000
Pendapatan Pabean Lainnya	(1.972.648.229)	8.516.851.048
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	179.547.240.000	271.986.036.790
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	1.864.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.224.796.790.085	741.303.503.298
Jumlah	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126

Secara umum Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak melambatnya aktivitas impor nasional yang disebabkan oleh perlambatan perekonomian global sehingga devisa bayar impor Indonesia menurun. Faktor lain yang memengaruhi penurunan ini antara lain penguatan kurs Rupiah terhadap USD dan impor yang mengalami penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC).

E.2.1.1.1.7 Pendapatan Bea Keluar

*Pendapatan
Bea Keluar
Rp4,05 triliun*

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2020 mencapai Rp4.052.791.964.188. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp620.632.810.919 atau 18,08 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp3.432.159.153.269. Pendapatan Bea Keluar terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 390 -

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Keluar	4.039.312.741.098	3.431.785.216.838
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	972.895.569	373.535.431
Pendapatan Bunga Bea Keluar	12.506.327.521	401.000
Jumlah	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269

Pendapatan Bea Keluar menunjukkan kinerja positif dibandingkan periode tahun lalu. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan harga komoditas ekspor, terutama pada tembaga dan hasil kelapa sawit.

E.2.1.1.1.8 Pendapatan Pajak Lain-Lain

*Pendapatan
Pajak Lain-lain
minus Rp19,30
miliar*

Pendapatan Pajak Lain-lain Tahun 2020 sebesar minus Rp19.303.388.856, sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp22.422.050.495.

Pendapatan Pajak Lain-Lain merupakan penyesuaian pendapatan pajak atas nilai pajak yang telah berada di rekening kas bendahara (dipungut bendahara) namun belum disetorkan ke kas negara sampai dengan periode tahun anggaran berakhir, sehingga diakui sebagai pendapatan Pajak Lain-lain. Karena Pendapatan Pajak Lain-Lain yang diakui tahun lalu telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan jenis pajaknya, maka pada tahun 2020, atas nilai tahun lalu dilakukan jurnal balik dan atas pungutan tahun 2020 yang belum disetorkan ke kas negara, dilakukan pengakuan pendapatan pajak lain-lain.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp 457,55
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp457.556.142.971.260 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp107.208.373.405.304, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp170.294.841.425.980, Pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp114.412.629.710.689, dan Pendapatan BLU sebesar Rp65.640.298.429.287. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp119.536.100.871.513 atau 20,71 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp577.092.243.842.773. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan dampak pelemahan ekonomi. Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terbatasnya aktivitas masyarakat. Penurunan ini terjadi juga pada porsi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pendapatan negara. Belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik, baik dari sisi *supply* dan *demand* mengakibatkan kontraksi pada Pendapatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Walaupun mengalami penurunan, Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun 2020 masih menunjukkan kinerja yang positif dalam menopang pendapatan negara dibuktikan dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 391 -

melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp
107,20 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2020 adalah sebesar Rp107.208.373.405.304. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.418.797.295.545 atau 37,90 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp172.627.170.700.849. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	52.511.224.852.254	96.743.924.765.308
Pendapatan Gas Bumi	25.571.141.491.082	43.025.535.710.437
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1.055.716.410.561	325.897.894.657
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	20.746.020.965.002	25.336.541.437.191
Pendapatan Dana Reboisasi	1.332.470.711.889	1.621.321.817.342
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	997.138.816.959	1.054.313.008.732
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPHH)	36.786.009.400	153.200.888.858
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.744.312.258.609	1.669.225.474.530
Pendapatan Perikanan	-	521.936.215.435
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	10.669.946.160	-
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	589.992.820.528	-
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.538.791.778.007	2.133.823.161.944
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	30.792.710.176	33.769.617.067
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	43.314.634.677	3.682.709.348
Jumlah	107.208.373.405.304	172.627.170.700.849

Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi dan gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Apabila tidak dilakukan koreksi penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB migas sebanyak dua kali.

Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2020. Pendapatan SDA Tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan Minyak Bumi dipengaruhi terutama oleh rata-rata ICP tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 392 -

2020, sedangkan Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara dipengaruhi antara lain oleh harga dan kinerja produksi batubara serta komoditas pertambangan mineral. Penurunan dengan nilai yang signifikan pada Pendapatan SDA Tahun 2020 antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batubara. Selain itu, penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Indonesia *Crude Price* (ICP) pada tahun 2020, serta *lifting* migas.

Realisasi Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perusahaan tambang yang mengajukan izin penggunaan kawasan hutan, dampak dari mulai naiknya Harga Batubara Acuan (HBA) serta terdapat pembayaran pokok dan denda Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan tahun-tahun sebelumnya.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 adalah sebesar Rp170.294.841.425.980. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp67.116.042.436.122 atau 28,27 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp237.410.883.862.102. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan dari KND Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi. Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	44.598.740.807.393	50.629.562.819.999
Pendapatan dari KND Lainnya	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	104.214.490.130.849	156.689.413.217.400
Jumlah	170.294.841.425.980	237.410.883.862.102

Menurunnya realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan disebabkan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 dan turunnya setoran dividen BUMN (akibat dampak Pandemi Covid-19). Target tidak tercapai pada beberapa BUMN disebabkan karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, kontribusi terbesar dalam penurunan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dikarenakan penurunan ekonomi nasional yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan kinerja perusahaan negara dalam meraih laba. Penurunan pendapatan pada BUMN perbankan dan migas berkontribusi besar. Hal ini dikarenakan Pendapatan penyesuaian untuk BUMN disajikan dalam mata uang rupiah sehingga untuk BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Pada empat BUMN, dua diantaranya membukukan laba sehingga dicatat sebagai pendapatan penyesuaian investasi adalah PT Pertamina dan PT Krakatau Steel dengan menggunakan kurs untuk nilai laba rugi Rp14.577.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp 170,29
triliun*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 393 -**

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNPB Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNPB Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2020 sebesar Rp44.598.740.807.393 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp23.987.948.592.740 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp20.610.792.214.653.

Pendapatan dari KND Lainnya berupa Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia sebesar Rp21.481.610.487.738 merupakan setoran PNPB yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah dari Surplus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp104.214.490.130.849. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*invested*) yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari:

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp74.420.764.697 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan.
2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp3.468.961.940.048, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan.
3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp19.440.154 merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito *mudharabah* dari penempatan dana Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin.
4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp26.217.927.680.100 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (IPB, UNAIR, ITB, UI, UGM, UPI, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2020 terdapat kenaikan pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah apabila dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan kenaikan atas investasi pada Bank Indonesia,
5. Pendapatan Penyesuaian sebesar Rp57.962.880.000 berupa kenaikan nilai wajar investasi LPDP dari nilai per 31 Desember 2019 dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karakteristik *available for sale*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 394 -

6. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp48.853.825.850 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp114,41
triliun

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp114.412.629.710.689. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.367.344.222.769 atau 2,03 persen dari tahun 2019 sebesar Rp116.779.973.933.458. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	13.541.058.365.679	18.257.607.077.740
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	483.020.614.148	584.054.856.489
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	440.104.804.791	261.320.052.508
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	33.869.453.997	83.695.898.935
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	10.856.422.377.125	22.389.594.380.397
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	920.843.169.891	1.262.712.091.113
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	26.275.318.785.631	42.838.984.357.182
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.758.337.809.264	4.152.387.184.196
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	397.886.851.223	672.001.706.644
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	592.638.693.045	878.817.568.804
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	3.046.746.138.564	2.040.746.153.806
Pendapatan Perizinan	1.375.185.071.553	1.643.400.661.631
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	6.603.787.005.914	8.166.831.888.928
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	853.292.371.857	960.165.945.007
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	549.081.875.432	598.656.088.407
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	16.176.955.816.852	19.113.007.197.423
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.066.576.743.768	3.075.628.977.654
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	201.669.505.022	204.150.647.780
Pendapatan Jasa Karantina	351.274.090.335	361.118.490.833
Pendapatan Jasa Agraria	1.749.435.231.950	2.276.753.279.082
Pendapatan Jasa Keagamaan	761.085.175.808	908.056.396.376
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	5.130.040.746.883	6.825.707.791.725
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.206.493.099.950	4.333.756.020.756
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.533.713.527	471.035.859.158
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	316.955.252.409	470.818.683.410
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	3.261.451.100	7.307.894.897
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.712.243.516.986	5.282.918.458.221



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 395 -

Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	8.200.043.539.410	6.800.583.039.237
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	22.110.390.216.786	17.806.844.910.890
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	249.436.250.396	172.363.356.753
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	28.559.870.006.592	24.779.791.306.880
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79.213.416.054	193.144.073.199
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	48.859.241.039	29.304.366.554
Pendapatan Jasa Lainnya	184.030.673.189	208.613.808.815
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	312.103.330.282	431.062.048.568
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.751.517.612.408	1.856.126.995.439
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	5.575.987.844.000	4.906.089.972.942
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan <i>Fee</i> Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	234.568.829.914	112.468.995.089
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	425.207.410.926	250.300.537.228
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	7.906.858.335.025	7.762.671.609.771
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	563.457.541.590	661.434.155.257
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	16.457.697.573.883	15.549.092.265.728
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	1.089.513.149.580	607.707.985.438
Pendapatan Denda II	54.837.573.366	302.145.470.923
Pendapatan Denda III	429.062.743.677	396.251.260.289
Subtotal Pendapatan Denda	1.573.413.466.623	1.306.104.716.650
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	7.948.511.344.000	476.204.460
Pendapatan Lain-Lain II	6.885.809.814.656	305.891.401.869
Subtotal Pendapatan Lain-lain	14.834.321.158.656	306.367.666.329
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	110.135.193	795.220.944
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	110.135.193	795.220.944
Pendapatan Penyesuaian Akruai		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	380.555.173.128	346.142.983.810
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akruai	380.555.173.128	346.142.983.810
Jumlah PNPB Lainnya	114.412.629.710.889	118.779.973.933.458

Penurunan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 yang signifikan terdapat pada Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan dan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan iuran Badan Usaha terutama pada Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pendapatan iuran produksi/royalti dan hasil produksi pada sektor mineral dan batubara serta pendapatan *firm commitment* wilayah kerja minyak dan gas bumi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 396 -

Meskipun cenderung mengalami penurunan, beberapa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tahun 2020 mengalami kenaikan di antaranya Pendapatan Lain-lain, dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terutama karena pada tahun 2020 terdapat Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara dengan nilai yang cukup signifikan dan kenaikan pada Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara. Pada tahun 2020 ini Pendapatan dari Selisih Kurs disajikan dalam Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Selain itu, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum juga mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelayanan umum masyarakat (pelayanan paspor, visa, perizinan), serta semakin baiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada Pendapatan Lain-lain termasuk di dalamnya telah memperhitungkan Penyetoran dari Bank Indonesia sebesar Rp2.696.798.988.866.995 yang merupakan kontribusi Bank Indonesia atas Public Goods sebesar Rp1.753.214.980.000, dan kontribusi atas Non Public Goods sebesar Rp941.773.886.995 yang diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain, serta penyesuaian akrual atas kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan atas PG sebesar Rp1.456.927.480.000, dan NPG sebesar Rp255.535.887.600 yang juga diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp 65,64
triliun*

Pendapatan BLU Tahun 2020 adalah sebesar Rp65.640.298.429.287. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.366.083.082.923 atau 30,56 persen dari tahun 2019 sebesar Rp50.274.215.346.364. Pendapatan BLU Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	30.133.935.535.607	34.409.116.101.702
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	969.446.015.272	1.193.071.664.155
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	24.859.153.399.744	5.302.611.898.735
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	545.753.149.780	715.253.770.340
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	56.508.288.100.403	41.620.053.434.932
Pendapatan Hibah BLU	1.050.388.351.754	744.837.706.710
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.044.785.516.662	976.138.212.549
Pendapatan dari Alokasi APBN	654.622.181.174	157.282.122.276
Pendapatan BLU Lainnya	6.382.214.279.294	6.775.903.869.897
Jumlah	65.640.298.429.287	50.274.215.346.364

Peningkatan Pendapatan BLU paling signifikan terdapat pada Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 2020 terutama berasal dari rumpun Pengelola Dana yaitu BLU BPDPKS (Sawit) karena pemberlakuan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 397 -

produk turunannya terhitung mulai 1 Januari 2020, setelah di tahun 2019 relaksasi pungutan Rp0. Selain itu, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 terdapat kenaikan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Peningkatan Pendapatan BLU ini juga dipengaruhi oleh pendapatan layanan kesehatan.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2020 yang signifikan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

*Pendapatan
Hibah Rp28,97
triliun*

Pendapatan Hibah selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp28.977.398.210.131. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.672.713.273.114 atau 102,57 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp14.304.684.937.017. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	4.362.717.987.979	4.535.834.189.821
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	5.120.550.591	854.875.450
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	21.365.855.163.212	8.209.767.397.950
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	533.880.884.575	591.671.964.284
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	1.188.769.070.469	469.822.176.046
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	5.040.568.486.761	4.557.091.285.795
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.300.917.711.407	1.232.593.695.958
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	8.064.136.153.212	6.851.179.122.083
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(452.593.106.293)	(756.261.583.016)
Jumlah Pendapatan Hibah	28.977.398.210.131	14.304.684.937.017

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendali penerima hibah. Pada tahun 2020, Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh hibah terkait dengan Pilkada, hibah dalam rangka penanganan pandemic Covid-19, dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkannya pendapatan hibah langsung kepada BUN. Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami kenaikan pada Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan hibah dalam bentuk jasa.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp452.593.106.293 berasal dari jurnal balik dari tahun 2019, pendapatan hibah yang belum disahkan pada 2019 sebesar Rp503.813.880.194 dan jumlah neto dari pendapatan hibah K/L yang belum disahkan di tahun 2020 sebesar Rp51.220.773.901, dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Pertahanan Nasional. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak awal tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Sampai dengan periode Tahun 2020 (*Audited*), terdapat 213 hibah yang telah diregistrasi oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR dan Kanwil DJPb.

Dari 213 register hibah, terdapat 211 register yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah terkait Covid-19 sebesar Rp884.762.239.530,00.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

*Beban
Operasional
Rp 2.601,11
triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.601.114.046.104.357. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp178.298.247.364.039 atau 7,36 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp2.422.815.798.740.318. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Beban Operasional Tahun 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 399 -

Rincian Beban Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Pegawai	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470
Beban Persediaan	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784
Beban Barang dan Jasa	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638
Beban Pemeliharaan	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258
Beban Perjalanan Dinas	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610
Beban Subsidi	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202
Beban Hibah	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209
Beban Bantuan Sosial	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535
Beban Lain-lain	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116
Beban Penyusutan dan Amortisasi	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843
Jumlah	2.601.114.046.104.357	2.422.815.798.740.318

Beban Pegawai
Rp 386,48
triliun

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp386.481.644.924.399. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.230.548.074.929 atau 1,11 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp382.251.096.849.470. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	80.754.793.678.002	85.226.296.329.141
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	66.822.788.042.088	61.403.616.357.443
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	931.485.002.871	1.012.151.341.499
Beban Gaji Dokter PTT	2.146.411.864	66.709.821.503
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	17.612.008.275.271	15.829.893.376.147
Beban Honorarium	1.671.855.242.202	1.875.981.047.121
Beban Lembur	738.970.077.370	722.353.102.378
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	75.747.725.543.224	82.912.239.677.327
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	120.597.991.461.591	114.621.544.011.613
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	10.179.323.191.990	7.311.746.189.636
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	11.422.557.997.926	11.268.565.595.662
Jumlah	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 400 -

Persentase kenaikan signifikan pada komponen dari Beban Pegawai Tahun 2020 terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS, Beban Pensiun dan Uang Tunggu serta Beban Program Jaminan Sosial Pegawai. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan kenaikan tarif dan dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

Beban Pegawai dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada BA BUN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan. Beban Pegawai pada BA BUN antara lain terdapat pada satuan kerja PNPB Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp 30,46 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp30.460.702.045.047. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.946.484.108.157 atau 8,82 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp33.410.271.463.784. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Persediaan Konsumsi	19.600.690.884.556	19.359.077.297.762
Beban Persediaan Amunisi	1.498.948.995.541	1.490.379.822.174
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	3.085.310.580
Beban Persediaan Bahan Baku	2.023.727.007.070	5.063.418.526.096
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	16.533.115.935	12.270.625.963
Beban Persediaan Lainnya	7.320.802.041.945	7.482.039.881.209
Jumlah	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Secara umum Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Terlihat dari seluruh komponen Beban Persediaan tidak ada yang mengalami kenaikan. Namun, yang menunjang nilai Beban Persediaan terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Penurunan Beban Persediaan yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges karena tidak terdapat realisasi di Tahun 2020. Selanjutnya, yang mengalami penurunan yang signifikan terdapat pada komponen Beban Persediaan Bahan Baku, penunjang terbesar komponen ini adalah Komisi Pemilihan Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 401 -

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp 220,55
triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp220.554.499.337.304. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.125.367.385.666 atau 28,66 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp171.429.131.951.638. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Barang Operasional	42.216.873.039.311	43.498.846.215.645
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	2.438.273.727.061	-
Beban Barang Non Operasional	58.289.564.227.151	69.651.215.376.781
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.212.742.369.592	-
Beban Kontribusi	61.486.467.641	509.322.684.387
Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund)	641.849.435.152	-
Beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	764.200.000	-
Beban Selisih Harga Biodiesel	2.779.998.939.792	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.658.795.803.944	6.679.970.288.081
Beban Jasa Pos dan Giro	28.041.086.035	23.631.222.946
Beban Jasa Konsultan	5.809.425.616.730	5.971.711.705.594
Beban Sewa	5.315.718.874.956	5.802.846.302.732
Beban Jasa Profesi	3.167.834.350.722	4.602.959.572.516
Beban Jasa kepada BLU	14.598.614.643	1.233.431.300
Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	422.761.212.000	-
Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	875.816.796	-
Beban Jasa Lainnya	12.738.841.176.787	14.436.659.763.891
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.034.561.514.854	-
Beban Barang dan Jasa BLU	45.848.544.261.719	19.939.593.574.379
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	9.095.332.785	7.226.178.000
Beban Barang dan Jasa BLU II	593.417.776.298	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	270.435.493.335	303.915.635.386
Jumlah	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638

Pertumbuhan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 disebabkan adanya penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alasan lain pertumbuhan realisasi tersebut adalah adanya pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit.

Beban Barang dan Jasa memiliki enam komponen baru yang tidak dimiliki pada Tahun 2019 yaitu:

1. Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund*) yang memiliki dukungan kelayakan pada Proyek KPBU SPAM Umbulan tahap IV dan V belum dapat dicairkan sehingga dijadwalkan untuk dicairkan pada tahun 2020 sesuai dengan jadwal pada perubahan terakhir Surat Dukungan Kelayakan Menteri Keuangan nomor S-112/MK.08/2020 tanggal 14 Februari 2020. Selain itu komponen ini juga terdapat alokasi pencairan dukungan kelayakan untuk proyek SPAM Kota Bandar Lampung sesuai dengan jadwal pada Surat Dukungan Kelayakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 402 -

Menteri Keuangan nomor S-426/MK.08/2018 tanggal 6 Juni 2018.

2. Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*. Komponen ini tidak terdapat pada tahun sebelumnya dikarenakan DIPA pembayaran kompensasi penugasan dukungan *loss limit* baru diterbitkan pada TA 2020 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga tidak terdapat realisasi anggaran kompensasi penugasan dukungan *loss limit* pada TA 2019.
3. Beban Kompensasi Penugasan – Penanganan Pandemi Covid-19 ini adalah komponen dari akun beban selisih harga biodiesel.
4. Beban *Fee* Pelayanan Bank/Pos Persepsi digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA).
5. Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan yang digunakan untuk membayar layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGA/SWIFT, pembayaran jasa SWIFT BO Valas, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional dan pembayaran imbalan jasa Bank Kustodian.
6. Beban Barang dan Jasa BLU II merupakan komponen dari gabungan Belanja Barang dan Jasa BLU Penanganan Pandemi Covid-19.

Kenaikan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang dan Jasa BLU, dan Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19. Meskipun secara keseluruhan mengalami kenaikan, namun nilai Beban Barang Operasional dan Beban Jasa Lainnya mengalami penurunan yang signifikan.

Pada Beban Barang dan Jasa terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Nilai Beban Barang dan Jasa akun khusus Covid-19 signifikan pada komponen Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beban Barang dan Jasa dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kementerian Keuangan memiliki nilai Beban Barang dan Jasa paling signifikan, terjadi karena kenaikan Beban Barang dan Jasa BLU. Hal tersebut terjadi diakibatkan peningkatan signifikan dana insentif biodiesel yang harus dibayarkan oleh BPDPKS. Penurunan harga minyak solar dunia mengakibatkan selisih harga biodiesel dengan solar semakin besar. Selain itu, pencanangan Program B30 di tahun 2020 sehingga volume penyaluran biodiesel semakin meningkat.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp30,55 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp30.553.180.667.458. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.447.195.695.200 atau 4,97 persen dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp29.105.984.972.258. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 403 -**

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.413.271.951.149	4.666.495.098.778
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	22.715.442.440	1.771.922.951
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi Covid-19	242.049.279.113	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	354.265.946.837	333.943.271.605
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.169.344.786.876	8.136.195.593.397
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.184.676.392.142	1.660.317.338.249
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	759.786.120	697.108.466
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.483.804.722	224.468.257.037
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.881.619.699.849	4.632.109.600.502
Beban Pemeliharaan Irigasi	884.653.639.924	843.607.481.181
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.971.361.332.587	1.604.081.612.615
Beban Pemeliharaan Lainnya	400.351.457.277	447.939.541.640
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.276.314.958.414	1.231.868.310.247
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU	102.562.600	111.224.200
Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid- 19	44.102.949.816	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	283.418.783.521	284.796.130.643
Beban Persediaan Suku Cadang	5.188.533.055.937	5.030.792.011.808
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	20.154.838.134	6.790.468.939
Jumlah	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Beban Persediaan Suku Cadang. Penunjang utama Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Beban Pemeliharaan Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua komponen tersebut Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki nilai paling besar terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akun ini digunakan sebagian besar untuk penyediaan fasilitas cuci tangan di lingkungan perkantoran.

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp24,38
triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 adalah sebesar Rp24.381.867.318.524. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.654.528.704.806 atau 47,04 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp46.036.396.023.330. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 404 -**

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.710.878.105.506	21.545.832.538.626
Beban Perjalanan Dinas Tetap	45.812.115.237	81.622.654.790
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.934.082.604.901	3.009.695.727.331
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	2.977.624.787.729	6.776.673.431.833
Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	1.049.336.105.397	-
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	4.374.973.403.991	9.768.362.441.018
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	463.134.187.814	1.783.767.706.245
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	19.027.390.754	44.060.179.995
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	265.810.920.671	1.712.236.079.558
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	506.244.725.550	1.314.145.263.934
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19	34.942.970.974	-
Jumlah	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalananan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Jika dilihat dari tabel tersebut hampir seluruh Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Penurunan signifikan terdapat pada komponen Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* dalam Kota. Menurunnya realisasi Beban Perjalanan Dinas merupakan dampak kebijakan *refocusing* realokasi anggaran belanja K/L, pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan mekanisme kerja *working from home/ flexible working space*.

Pada Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua Beban Perjalanan Dinas pada kelompok akun khusus Covid-19 yang memiliki nilai signifikan adalah Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 adalah sebesar Rp103.388.684.664.344. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp45.982.918.992.060 atau 80,10 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp57.402.680.361.704. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 405 -

**Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
Pemda
Rp103,38
triliun**

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.793.679.012.047	6.247.584.732.816
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda- Penanganan Covid-19	7.820.290.000	-
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	2.343.300.000	330.494.682
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	11.814.437.871.782	17.804.744.758.176
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda- Penanganan Covid-19	58.604.270.085.952	-
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa Penanganan Covid-19	4.226.303.530.380	-
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.939.830.574.183	33.350.020.376.030
Jumlah	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704

Secara umum Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan pada tahun 2020. Akan tetapi komponen-komponen yang memiliki realisasi pada Tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan terbesar terdapat pada Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

Pada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19, Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 dan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Ketiga belanja tersebut yang memiliki nilai signifikan adalah Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 terutama pada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Agama.

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda paling signifikan terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Kementerian Ketenagakerjaan, beban paling besar terdapat pada Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

**Beban
Pembayaran
Kewajiban
Utang Rp
317,89 triliun**

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2020 sebesar Rp317.892.180.673.151 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp40.658.870.729.541 atau 14,67 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp277.233.309.943.610. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 406 -**

Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	15.653.120.052.865	20.882.043.996.401
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	595.797.036.630	570.898.022.241
Beban Bunga Pinjaman Program	6.981.026.176.203	10.760.229.959.412
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	245.610.120.997	100.552.464.466
Beban Bunga Pinjaman Proyek	6.907.259.838.583	8.506.655.899.156
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	923.017.494.020	943.218.054.388
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	409.386.432	489.596.738
Beban Bunga SBN	293.878.360.999.045	246.698.626.996.109
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	200.604.245.078.152	168.287.501.028.232
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	120.809.813.682	114.302.414.090
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	39.521.333.127.852	35.432.465.969.539
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	67.821.789.876	81.057.207.629
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	43.520.423.525.854	33.751.880.934.060
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	156.387.006.408	132.542.448.817
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	9.860.581.848.221	8.875.876.187.742
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	26.758.809.000	23.000.806.000
Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	8.360.699.621.241	9.652.638.951.100
Jumlah	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610

Beban Pembayaran Kewajiban Hutang terbesar terdapat pada BA BUN. Tumbuhnya realisasi Beban Pembayaran Kewajiban Hutang, sejalan dengan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Beban Bunga Instrumen Pinjaman Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 antara lain karena adanya pembayaran bunga pinjaman program yang lebih kecil dibandingkan Tahun 2019.. Adapun Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp293.878.360.999.045 dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar Rp8.360.699.621.241.

Pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah telah memperhitungkan pengembalian atas kelebihan pembayaran bunga atas SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1.809.592.188.

Di samping itu, nilai beban bunga atas SBN TA 2020 yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 Audited termasuk nilai beban discount sebagai penambah beban bunga..

Perbedaan nilai antara beban pembayaran kewajiban utang di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 407 -

pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2020.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2020 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Beban diskonto menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
542111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	1.742.915.185.000	3.353.190.803.000
542121	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	3.918.914.715.768	3.274.832.902.500
542141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	394.554.456.100	373.544.996.000
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	1.703.892.389.373	1.123.099.682.600
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah	600.422.875.000	1.527.970.567.000
Jumlah		8.360.699.621.241	9.652.638.951.100

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp 183,62
triliun*

Beban Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp183.621.464.262.798 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.707.922.162.404 atau 3,01 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp189.329.386.425.202. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Subsidi Minyak Solar	13.992.009.748.310	32.438.883.567.686
Beban Subsidi Minyak Tanah	1.213.190.526.436	2.868.252.604.635
Beban Subsidi Elpiji	40.235.383.299.234	41.588.894.626.543
Beban Subsidi Listrik	47.988.113.661.517	51.711.774.354.480
Beban Subsidi Pupuk	26.045.775.388.134	29.975.667.317.918
Beban Subsidi PPh-DTP	-	10.557.240.293.147
Beban Subsidi BM-DTP	-	354.326.302.000
Beban Subsidi PT KAI	2.887.184.259.086	2.316.457.506.279
Beban Subsidi PT PELNI	2.193.106.619.656	2.130.280.875.028
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya	151.853.103.000	156.132.228.800
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	159.458.000.000	632.060.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.571.573.732.509	3.323.491.684.431
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	-	1.156.833.360
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	-	16.265.935.542
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	11.670.923.731.073	9.579.101.472.424
Beban Subsidi <i>Risk Sharing</i> KKP dan Energi	-	265.313.074
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	197.426.768	1.476.359.572
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	148.670.929	532.604.682
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	-	4.699.315.947
Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	12.267.506.577.246	-
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	-
Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 408 -

Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	4.795.833.147.937	-
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	4.047.739.351.211	-
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	-
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.861	-
Beban Subsidi Estimasi	8.680.755.733.872	1.672.427.229.654
Jumlah	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202

Penurunan besaran Beban Subsidi Tahun 2020 yang signifikan terdapat pada Beban Subsidi Minyak Solar dan Beban Subsidi PPh-DTP.

Penurunan Beban Subsidi bunga dan IJP antara lain disebabkan karena jumlah tagihan yang diajukan oleh bank penyalur lebih kecil, nilai BAV periode penagihan subsidi yang ditagihkan bank penyalur sebagian besar merupakan tagihan periode TAYL, dan skema penyaluran belanja subsidi telah berakhir kecuali Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) yang masih berjalan

Meskipun secara umum mengalami penurunan, terdapat peningkatan pada komponen-komponen Beban Subsidi dari tahun sebelumnya antara lain Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya, Beban Subsidi PT PELNI dan Beban Subsidi PT KAI.

Pada Beban Subsidi Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19 berupa penyaluran diskon tarif Listrik Rumah Tangga Tahun 2020 dan Kurang Bayar Diskon Tarif Bisnis dan Industri 450 VA 2020; Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Bank BTN, Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19 pada Provinsi Papua dan Papua Barat, dan Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19 yang terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, terdapat Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2020 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2020 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2020. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp8.680.755.733.872 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Keuangan.

Pada Beban Subsidi Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi BM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19, dan Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Beban yang memiliki nilai signifikan diantara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 409 -

akun khusus Covid-19 adalah Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada BA BUN.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp5,79 triliun*

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera pada BAST atau apabila dalam BAST tidak terdapat nilai barang/jasa menggunakan nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2020 sebesar Rp5.798.660.821.822. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp677.546.464.387 atau 10,46 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp6.476.207.286.209. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	3.981.718.191.660	6.241.521.667.087
Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	1.787.401.112.712	-
Beban Hibah Lainnya	129.939.658	411.231.836
Jumlah	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209

Beban Hibah hanya berasal dari BUN. Pada Beban Hibah Tahun 2020 terdapat akun khusus Covid-19 yang digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu klasifikasi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182. Dari nilai tersebut, dilakukan koreksi Penyesuaian Beban Hibah Pariwisata atas Sisa Dana Hibah per 31 Desember 2020 yang masih di RKUD dan harus disetorkan kembali ke RKUN sebesar Rp477.246.134.470.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
Rp204,77
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp204.774.725.400.005. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.961.109.927.583 atau 89,93 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp107.813.615.472.422. Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	3.981.718.191.660	6.241.521.667.087
Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	1.787.401.112.712	-
Beban Hibah Lainnya	129.939.658	411.231.836
Jumlah	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 410 -

Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	777.570.433.000	2.918.167.739.000
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	9.291.927.285.528	3.950.717.607.408
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	2.593.222.370.842	33.860.057.941.981
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	36.320.608.388.361	
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	399.673.065.913	14.273.215.574.714
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	73.767.150.417.671	
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	4.671.188.662.475	2.717.527.043.331
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang	6.842.771.860.010	
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.383.485.183.634	3.196.933.907.896
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.669.612.356.671	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.107.048.827.535	
Jumlah	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya karena dorongan perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Alasan lain terjadi peningkatan adalah tumbuhnya serapan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kementerian-kementerian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program bantuan sosial yang mendukung Penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada Kementerian Sosial meningkatnya Beban Bantuan sosial dipengaruhi oleh :

1. Adanya peningkatan target penerima bantuan sosial Program Sembako menjadi 15.200.000 KPM pada awal tahun 2020, serta adanya peningkatan kembali target Program Sembako akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi 20.000.000 KPM. Selain itu disebabkan juga kenaikan indeks Program Sembako dari Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan.
2. Adanya kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai respon atas adanya pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk 9.000.000 KPM dengan nilai Rp600.000/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2020 dan Rp300.000/bulan yang diberikan selama 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020.
3. Adanya kenaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebesar 25% yang disalurkan pada bulan April, Mei, dan September 2020.

Pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 terdapat akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 pada Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara, Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19, Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 berupa Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah Covid-19 sejumlah 9 juta KPM. Selain itu, terdapat juga Beban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 411 -

Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang dan Jasa-Penanganan Covid-19 yang berasal dari Beban Hibah Covid-19 Dalam Negeri dan Luar Negeri. Diantara beban-beban tersebut, beban terbesar terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 yang terdapat pada Kementerian Sosial. Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dari tahun sebelumnya terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang, Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang, dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 752,58 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp752.583.826.022.245 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.183.508.136.290 atau 7,40 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp812.767.334.158.535. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	87.032.902.063.295	104.713.947.999.521
Beban Dana Alokasi Umum	381.612.451.495.551	420.910.238.556.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	50.175.976.373.103	64.165.654.543.270
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.414.726.609.534	121.322.377.555.524
Beban Dana Otonomi Khusus	19.556.727.696.000	20.979.943.308.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	1.279.572.655.079	1.166.576.228.221
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	18.455.285.206.000	9.694.447.489.000
Beban Dana Desa	71.056.183.923.683	69.814.148.478.999
Jumlah	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535

Jumlah Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 lebih kecil dari Tahun 2019 disebabkan adanya kebijakan relaksasi percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 32 berikut.



Grafik 32. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 412 -**

Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 adalah sebesar Rp87.032.902.063.295. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.681.045.936.226 atau 16,89 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp104.713.947.999.521. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya pagu Dana Bagi Hasil dari tahun sebelumnya disebabkan adanya kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Alasan lain penurunan pagu Dana Bagi Hasil ini adalah turunnya rencana penerimaan Pajak dan PNPB yang dibagihasikan pada tahun anggaran 2020. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	28.212.170.568.820	29.700.461.156.954
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.758.006.450.796	2.806.363.414.670
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.396.725.062.979	3.459.140.234.859
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	13.575.699.048.167	13.669.038.797.935
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	109.671.757.169	105.515.816.770
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	482.660.723.639	489.996.644.211
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	2.095.361.001.376	2.114.590.004.049
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	5.762.178.967.576	11.901.910.112.248
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5%	189.453.317.037	390.671.141.718
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	302.781.100.729	668.881.581.817
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	5.095.201.445.602	9.797.587.763.681
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0,5%	70.875.576.676	145.205.689.471
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.181.793.748.122	1.484.800.270.188
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Iuran Tetap	350.167.044.637	360.691.989.728
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	16.593.026.029.061	20.714.261.451.552
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.511.421.365.408	1.516.197.490.874
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	23.368.532.647	26.888.711.800
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	34.651.707.742	2.946.167.478
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	51.138.945.320	122.617.293.659
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	949.263.232.639	862.768.231.175
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	403.442.596.500	661.582.338.020
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	480.530.213.350	417.105.678.324
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.403.313.627.303	3.294.726.018.340
Jumlah	87.032.902.063.295	104.713.947.999.521

Penurunan Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi. Meskipun demikian, terdapat peningkatan dengan nilai signifikan pada Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 413 -**

Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH.

Kebijakan pada UU APBN Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya.

Beban Transfer DBH merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2020. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 ini juga memperhitungkan pengakuan beban atas potensi/estimasi kurang bayar dan lebih bayar DBH di tahun berjalan.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Beban DAU Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp420.910.238.556.000. Penurunan tersebut disebabkan oleh alokasi DAU Formula tahun anggaran 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula tahun anggaran 2019 karena penurunan Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN tahun anggaran 2020. Alasan lain yang menimbulkan penurunan Nilai Beban DAU adalah peyaluran DAU tahun anggaran 2020 dikaitkan dengan basis kinerja.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 adalah sebesar Rp50.175.976.373.103. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Beban DAK Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270. Penurunan ini terjadi akibat penurunan pagu DAK Fisik dari adanya kebijakan *refocusing* pagu anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Beban DAK Fisik Tahun 2020 sebesar Rp50.175.976.373.103 terdiri dari Beban DAK Reguler sebesar Rp31.993.306.369.443, Beban DAK Penugasan sebesar Rp12.826.103.642.806, Beban DAK Afirmasi sebesar Rp5.356.566.360.854.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 adalah sebesar Rp123.414.726.609.534. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.092.349.054.010 atau 1,72 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp121.322.377.555.524. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 414 -**

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.333.831.058.494	52.001.837.749.380
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	995.067.035.767	1.977.231.267.885
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	168.035.770.138	463.968.756.915
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.413.477.330.782	49.200.273.626.885
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.834.908.476.291	9.729.473.301.595
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.638.121.587.819	1.723.241.760.092
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	168.829.475.417	193.663.883.050
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	858.464.679.519	867.822.995.199
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.665.172.473.990	3.659.144.963.421
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan	1.096.715.820.783	1.167.549.190.102
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	115.348.463.502	127.476.500.000
Beban Dana Pelayanan Kepariwisata	126.754.437.032	210.693.561.000
Jumlah	123.414.726.609.534	121.322.377.555.524

Peningkatan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 terdapat perubahan pola penyaluran yaitu pemindahbukuan Dana BOS dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Sekolah serta disalurkan secara bertahap. Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan lebih salur Dana BOS TA 2019 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan.

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2020 adalah sebesar Rp19.556.727.696.000. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.423.215.612.000 atau 6,78 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000. Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.288.694.844.000	5.850.230.158.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.711.275.076.000	2.824.446.537.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.583.504.000	2.507.241.496.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.734.895.924.000	1.440.553.463.000
Jumlah	19.556.727.696.000	20.979.943.308.000

Beban Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian pagu sesuai dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Akan tetapi, Beban Dana Otonomi Khusus di Tahun 2020 mengalami percepatan penyaluran, hal ini disebabkan adanya relaksasi penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap II yang tanpa syarat dan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020.

Beban Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 415 -**

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode tahun 2020. Tidak terdapat realisasi kurang bayar periode sebelumnya yang dibayarkan selama Tahun 2020 dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan serta tidak ada pengembalian lebih salur tahun sebelumnya.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.279.572.655.079 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp112.996.426.858 atau 9,69 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp1.166.576.228.221. Peningkatan tersebut sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 yang sejalan dengan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2020, dengan nilai sebesar Rp40.427.344.920.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar Rp18.455.285.206.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2020. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp8.760.837.717.000 atau 90,37 persen dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp9.694.447.489.000.

Jumlah Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sama dengan realisasi DID Tahun 2020 karena semua SPM Transfer Dana Insentif Daerah yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan. Pertumbuhan capaian realisasi ini salah satunya disebabkan karena Kelompok Kategori Bidang Kesehatan pada tahap I disalurkan secara sekaligus 100 persen. Selain itu, terjadi relaksasi syarat salur pada kategori lainnya dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penyebab lainnya adalah pemerintah pusat mengalokasikan Dana Insentif Daerah Tambahan sebesar Rp5.000.000.000.000 kepada pemerintah daerah dalam 3 periode untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.

Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2020. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 416 -

meningkatkan kinerja dan dukungannya untuk meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dukungan terhadap peningkatan kinerja ekspor, mendorong penurunan angka stunting serta peningkatan pengelolaan lingkungan melalui pengurangan sampah plastik.

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2020 adalah sebesar Rp71.056.183.923.683. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.242.035.444.684 atau 1,78 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp69.814.148.478.999. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2020 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah diterima Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut merupakan upaya pemerintah dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa. Selain itu, sebagai respon atas Pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian dalam kebijakan pengelolaan Dana Desa.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp86,22 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2020 sebesar Rp86.222.605.803.664. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.965.179.316.548 atau 45,51 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp59.257.426.487.116. Beban Lain-lain Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Cadangan Beras Pemerintah	2.583.365.569.008	880.895.042.614
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	53.116.712.664	53.917.840.896
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	-	519.773.868.148
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	108.794.852.646	103.520.762.425
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	543.291.772.307	635.037.508.668
Beban Lain-Lain BUN Lainnya	12.315.017.585.414	-
Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19	18.921.897.571.811	-
Beban Lain-lain	1.837.533.068.319	2.116.234.499.871
Biaya Perbankan (Bank Charge)	-	533.665
Beban Pihak Ketiga Migas	24.390.020.073.105	36.809.117.831.201
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Reimbursement PPN	153.260.995.363	216.520.542.309
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	91.134.138.274	82.064.311.148



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 417 -**

Beban Diestimasi <i>Reimbursement</i> PPN dan Penggantian Bonus Produksi	185.707.974.761	335.462.257.956
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	313.977.040.220	235.732.424.035
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	24.725.488.449.772	17.269.149.064.180
Jumlah	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116

Beban Lain-Lain pada Tahun 2020 mengalami kenaikan disebabkan adanya kegiatan baru pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain yaitu Program Kartu Prakerja, Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Tagihan Listrik. Penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Pihak Ketiga Migas dan Beban Lain-Lain. Beban Lain-Lain hanya terdapat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan BA BUN. Kenaikan tertinggi pada Beban Lain-Lain terdapat pada Beban Penyesuaian Nilai Investasi.

Pada Beban Lain-Lain Tahun 2020 terdapat akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19. Komponen ini berisi Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp4.403.239.252.500, Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp12.811.795.218.059, dan Beban lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.706.863.101.252..

Rincian beban Lain-lain BUN Lainnya pada tahun 2020 bernilai Rp12.315.017.585.414 pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai
1	Kekurangan penerimaan dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero)	298.816.254.300
2	Kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi bulan Januari sampai dengan Desember	17.904.507.732.862
3	Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual Premium PT Pertamina (Persero)	(4.222.953.981.191)
4	Piutang Lainnya atas Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Jamali	(1.649.479.744.098)
5	Piutang Lainnya atas Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT AKR Corporindo, Tbk	(15.872.676.459)
Jumlah		12.315.017.585.414

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp24.390.020.073.105 antara lain berasal dari Beban Pihak Ketiga Migas - DMO *Fee* KKKS sebesar Rp7.100.908.928.692 Beban Pihak Ketiga Migas - *Reimbursement* PPN KKKS sebesar Rp6.097.587.552.284, Beban Pihak Ketiga Migas - *Underlifting* KKKS sebesar Rp11.159.160.026.429, Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah ke Pemda sebesar Rp189.430.498 dan Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Penerangan Jalan nonPLN ke Pemda sebesar Rp32.174.135.202.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 418 -**

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp24.725.488.449.772 berasal dari penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari PTNBH Universitas Sumatera Utara dan BPJS kesehatan sebesar Rp79.284.762.878, bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam laporan keuangannya sebesar Rp24.597.739.610.594, dan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp48.464.076.300 pada PT Tuban Petrochemical Industries. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun lalu karena adanya peningkatan beban/rugi operasional BUMN pada KPA Kementerian BUMN. Hal ini diakibatkan Beban Penyesuaian Nilai Investasi BUMN disajikan dalam mata uang rupiah sehingga untuk BUMN yang menyusun laporan keuangan dengan mata uang asing akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Dari empat BUMN yang menggunakan mata uang dollar terdapat dua BUMN yang mengalami kerugian yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 2020 kurs yang digunakan untuk nilai beban penyesuaian adalah Rp14.577.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp225,17
triliun*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp225.173.233.636.287. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.254.475.206.910 atau 5,95 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp239.427.708.843.197.

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.007.506.496.536	62.600.232.488.375
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	-	72.321.600
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.644.871.210.388	13.351.596.641.309
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	77.186.614.118.471	90.457.968.883.373
Beban Penyusutan Irigasi	25.113.271.980.801	34.388.148.666.323
Beban Penyusutan Jaringan	1.646.796.632.170	2.053.072.972.453
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.590.074.606.977	1.415.556.923.775
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.756.928.273	1.839.528.986
Beban Amortisasi Paten	12.398.417.731	15.139.312.402
Beban Amortisasi <i>Software</i>	2.976.025.768.610	2.136.825.864.602
Beban Amortisasi Lisensi	370.040.938.111	360.106.409.418
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	379.583.488.966	365.001.156.398
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	118.624.827.474	8.564.924.672
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.126.922.491.703	238.718.117.918
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.907.313.279.869	2.782.722.791.815
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	26.191.320.007.615	24.908.802.394.824
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA	4.795.638.293	4.424.901.690
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.148.676.356.078	2.128.496.846.079



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 419 -

Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	1.743.543.686.115	2.207.368.946.572
Beban Penyusutan Aset <i>Idle</i> yang Sudah Diserahkan ke DJKN	377.666.850	386.575.300
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain BUN	2.719.095.256	2.662.175.313
Jumlah	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan adalah Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan, Beban Penyusutan Irigasi, dan Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B. Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan terbesar terdapat pada Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BA BUN, dan Kementerian Pertahanan. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada BA BUN beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada Kementerian Pertahanan beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Nilai beban penyusutan Aset Eks Pertamina pada LKPP sebesar Rp2.148.676.356.078, terdiri dari BA 999.03 sebesar Rp1.455.484.615.810 dan BA 999.99 sebesar Rp693.191.740.268

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp29,22 triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 adalah sebesar Rp29.226.770.527.309. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.351.522.025.466 atau 168,75 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.875.248.501.843. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2020. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas	38.896	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	2.024.861.122.586	6.174.418.091.108
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	1.311.744.681.313	2.869.164.894.580
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	(46.518.001.329)	263.925.244.581
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	1.818.411.959.141	3.019.767.987.122
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	47.164.005.949	9.471.191.328
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	511.584.224.822	594.489.740.229
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	50.522.091.177	(22.344.717.168)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	3.547.680.399.834	323.105.593.835
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	14.974.680.338.609	(1.018.188.531.727)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	364.301.183.075	(1.823.598.864.031)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 420 -

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	(87.382.990.688)	(182.698.116.118)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	4.258.529.799	3.206.751.877
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(121.384.396)	(48.575.983)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	10.152.407.583	(9.342.950.323)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(177.319)	7.693.847.543
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	3.075.404.707	53.445.540.072
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	144.763.363.703	474.537.573.577
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	408.169.238	(511.075.744)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	6.693.977.614	36.782.669.499
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	4.143.401.716.384	105.205.574.325
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	99.832.353	(11.430.425)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	8.505.391.872	19.302.940.938
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	(4.679.234)	(4.688.169)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	388.488.921.620	(22.520.189.083)
Jumlah	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843

Secara umum Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Nilai Beban Penyisihan piutang terdapat pada BA BUN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Beban Penyisihan Utang di BA BUN terdapat pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah yang tersebar pada 6 Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai terbesar pada Kuasa Pengguna Anggaran BLU Set BPJT. Kenaikan terbesar terdapat pada komponen Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya terutama pada BA BUN. Selain itu, terdapat penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2020 antara lain Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB, dan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Kegiatan Non
Operasional
Defisit
Rp 54,69 triliun*

Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp54.696.567.885.936. Defisit kegiatan non operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar dan defisit kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 sebesar Rp4.658.347.803.268, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp59.354.915.689.204 atau 1.274,16 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 421 -

tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp15,62 triliun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 sebesar Rp15.620.045.735.162. Defisit ini menurun sebesar Rp9.724.177.714.511 atau 164,93 persen dari Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.895.868.020.651. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp310.006.160.448 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp15.930.051.895.610.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp 310,00 miliar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp310.006.160.448. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp170.757.715.849 atau 35,52 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp480.763.876.297.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	3.641.558.151	3.948.035.294
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	102.113.573.693	111.118.368.021
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	24.501.985.560	196.870.000
Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.000.000	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	168.423.082.816	209.010.880.903
Pendapatan Pelepasan Aset	11.224.960.228	156.489.722.079
Jumlah	310.006.160.448	480.763.876.297

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp15,93 triliun Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp15.930.051.895.610. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.553.419.998.662 atau 149,82 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp6.376.631.896.948.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 422 -

barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948
Jumlah	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp15.904.631.202.619 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp25.420.692.991. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/(Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka
Panjang

Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Defisit ini menurun sebesar Rp378.083.000.000 atau 100,00 persen dibandingkan defisit Tahun 2019 sebesar Rp378.083.000.000. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka
Panjang.

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Pendapatan ini menurun sebesar Rp5.807.000.000 atau 100,00 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp5.807.000.000. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Beban ini menurun sebesar Rp383.890.000.000 atau 100,00 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp383.890.000.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/
(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya minus
Rp 39,07 triliun

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 sebesar minus Rp39.076.522.150.774 yang menandakan defisit. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp50.008.820.974.693 atau 457,44 persen dibandingkan surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.932.298.823.919. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp54.620.720.966.608 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp93.697.243.117.382.



*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp 54,62 triliun*

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp54.620.720.966.608. Nilai tersebut turun sebesar Rp71.131.010.899.071 atau 56,56 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp125.751.731.865.679. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan BLU Lainnya	68.947.505.785	60.296.406.733
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.821.299.061	4.950.810.289
Pendapatan dari Selisih Kurs	1.843.487.181.965	12.531.024.709
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	33.071.130.987	45.492.863.731
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	2.424.633.478.019	5.239.509.424.727
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	176.625.321.942	172.806.638.038
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	18.033.647.648	24.218.407.398
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	17.818.255.957.464	74.723.098.430.575
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	4.253.083.286.888	92.742.711.721
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	19.564.631.485.724	25.461.150.481.941
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.415.130.671.125	19.914.934.665.817
Jumlah	54.620.720.966.608	125.751.731.865.679

Turunnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (999). Kementerian Pertahanan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar Rp 15.958.191.143.846 diantaranya adalah selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya. Sedangkan defisit selisih kurs belum terealisasi Tahun 2020 berasal dari beban kerugian selisih kurs belum terealisasi atas transaksi pembayaran *banking commission* kepada MUFG Tokyo.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar 15.697.354.499.164 berupa penambahan pencatatan aset baru HBM, HBI dan Tanah pada KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.270.961.392.697 dan penambahan pencatatan aset nontanah, aset baru dan kapitalisasi aset induk Aset PKP2B sebesar Rp1.427.258.184.764. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan nilai signifikan berasal dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, persentase peningkatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I terutama pada Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali transfer ke Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 424 -

dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu. Selain itu di dalamnya terdapat setoran pengembalian belanja hibah dari Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak rutin. Setoran tersebut diidentifikasi sebagai pengembalian Belanja Hibah

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp93.697.243.117.382. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp21.122.189.924.378 atau 18,40 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp114.819.433.041.760. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp 93,69 triliun*

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	1.876.738.097	3.321.314.672
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	8.053.503.251	5.138.251.399
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8.673.197.834.928	10.334.914.070.220
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	4.986.150.758.902	5.654.603.528.934
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pembulatan	534.191.815.848	458.037.177.476
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	-	240.984.341
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	78.432.394.301.193	5.889.071.283.348
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	2.907.199.251	3.672.195.959
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	487.151.717.787	-
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	199.218.607.873	59.079.719.679
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	372.100.636.465	92.411.354.515.746
Pembulatan	3.787	(14)
Jumlah	93.697.243.117.382	114.819.433.041.760

Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2020 terdapat pada Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional dan Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2020 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan

Beban Lain-lain pada Kegiatan non Operasional Lainnya terdiri dari selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman yang dilakukan tahun 2020. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan dan dicatat sebagai beban lain-lain antara lain sebesar 352.579.879.798, Beban lain-lain dari satker Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar minus Rp62.752.609.311 dan beban lainnya atas pendapatan perolehan jasa pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp82.273.365.978.

Meskipun secara keseluruhan nilainya mengalami penurunan namun terdapat peningkatan yang signifikan pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp78.432.394.301.193 terdapat pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp76.771.165.702.557 dan pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.661.228.598.636. Nilai ini mengalami peningkatan nilai surat hutang/*promissory notes* akibat perubahan kurs.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 425 -

Beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Beban penyesuaian nilai persediaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan sebesar Rp4.986.150.758.902 adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas, termasuk penyesuaian akibat selisih kursnya.

E.2.3 POS LUAR BIASA

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat transaksi pada Pos Luar Biasa di Tahun 2020.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

*Pendapatan
Luar Biasa Rp0*

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2020.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

*Beban Luar
Biasa Rp0*

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2020.

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Beban LO yang Berkaitan dengan Penanganan Covid-19 dan PEN

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa termasuk realokasi APBN 2020. Penajaman program-program penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Sampai dengan Tahun 2020, beban atas penanganan Covid-19 dan PEN dapat dirinci sebagai berikut.

NO	AKUN	URAIAN	RUPIAH	SEBARAN BA
1	521131	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	2.438.273.727.061	81 BA
2	521241	Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.212.742.389.592	80 BA
3	521731	Beban Kompensasi Perugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	764.200.000	BA BUN
4	522182	Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.034.581.514.854	83 BA
5	525162	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	417.557.124.364	18 BA
6	525154	Beban Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	175.860.651.934	16 BA
7	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19	242.049.279.113	55 BA
8	525155	Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	44.102.949.818	9 BA
9	524115	Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	1.049.336.105.397	71 BA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 426 -

10	525156	Beban Perjalanan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	34.942.970.974	15 BA
11	526131	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	7.820.290.000	4 BA
12	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	58.604.270.085.952	13 BA
13	526323	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Jasa Penanganan Covid-19	4.226.303.530.380	2 BA
14	554111	Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	12.267.506.577.246	BA BUN
15	554112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	BA BUN
16	554113	Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	BA BUN
17	554114	Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	4.984.218.342.076	BA BUN
18	554117	Belanja Subsidi Bunga/Subsidi <i>Margin</i> Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	7.695.512.627.586	BA BUN
19	554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	BA BUN
20	554121	Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.881	BA BUN
21	563131	Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	2.264.647.247.182	BA BUN
22	572114	Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	28.900.000	Kemeneg
23	574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	36.320.608.388.361	Kemensos
24	575114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	73.767.150.417.671	Kemensos
25	576114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.669.612.356.671	BNPB, Kemdikbud
26	576116	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.107.048.827.535	BNPB
27	581521	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi Covid-19	4.403.239.252.500	BA BUN
28	581522	Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	12.811.795.218.059	BA BUN
29	581523	Beban Lain-Lain Pembayaran Dana Bantuan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi	1.706.863.101.252	BA BUN
JUMLAH			284.207.527.341.456	

Realokasi anggaran terdapat di BA BUN dan Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN seperti Kementerian Kesehatan, BNPB dan Kementerian Sosial. Kementerian Kesehatan telah mengusulkan tambahan anggaran belanja melalui stimulus belanja negara yang sebagian sudah disetujui dan diterbitkan dalam Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA 999.08) dengan mempertimbangkan perkembangan kejadian kasus di lapangan. SP SABA tersebut diperuntukkan kegiatan insentif nakes dan santuan kematian nakes Covid-19 di tingkat Pusat. Kementerian Kesehatan juga masih berproses merevisi DIPA nya pada Semester II Tahun 2020 untuk *refocusing* pada penanganan Pandemi Covid-19. Selain itu, pada BNPB terdapat Dana Siap Pakai (DSP) yang seluruhnya digunakan dalam rangka penanganan darurat bencana di seluruh Indonesia. Bantuan DSP Tahun 2020 terbesar adalah untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pemanfaatan DSP untuk penanganan Covid-19 telah disalurkan pada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat kesehatan RS Rujukan Covid-19, Pencegahan dan pengendalian Covid-19 Tahun 2020, Operasional pelayanan kesehatan di Pulau Sebaru dan klaim 13.000 pasien, dan pembelian APD. Selain itu DSP juga telah disalurkan pada BNPB, Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur, Mabes TNI, Lembaga Biologi Eijkman, dan Universitas Airlangga. Pada Kementerian Sosial terdapat Beban Bantuan Sosial, di mana pada Triwulan III tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yang dipengaruhi oleh penanganan dampak Pandemi Covid-19 baik yang melekat pada Beban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 427 -

Bantuan Sosial yang telah ada sebelumnya maupun Beban Bantuan Sosial dengan akun khusus Covid-19.

Beberapa beban terkait penanganan Covid-19 dan PEN juga terdapat pada BA BUN dengan menggunakan akun normal karena berkaitan dengan program yang selama ini telah berjalan. Dalam penyaluran DAU bulan Mei s.d. September 2020 terdapat persyaratan tambahan berupa laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19; dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Sementara itu, untuk insentif tenaga kesehatan di tingkat daerah, telah disiapkan anggaran yang akan disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (BOK tambahan). Sejalan dengan itu, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan penanganan Covid-19 dan/ atau untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19; Dana Keistimewaan Yogyakarta juga dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Selain itu, penyesuaian alokasi DID untuk masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan secara proporsional untuk seluruh kelompok kategori DID, kecuali kelompok kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan. Dalam Beban Subsidi, terdapat kelompok akun khusus Covid-19 antara lain berupa Beban Subsidi Listrik, Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, Beban Subsidi Bunga KPR dan Beban Subsidi Bunga KUR.

2. Porsi Pemerintah dan BI dan penyesuaian akrual TA 2020 dalam skema burden sharing serta perbedaan nilai penyesuaian akrual kontribusi BI yang disajikan di LKPP TA 2020 dan LKTBI Tahun 2020

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema Burden Sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	10/Nov/20	779.950.000.000	-	779.950.000.000
2	30/Nov/20	163.024.980.000	-	163.024.980.000
3	28/Dec/20	810.240.000.000	-	810.240.000.000
4	Penyesuaian Akrual	1.456.927.480.000	-	1.456.927.480.000
SUBTOTAL PG		3.210.142.460.000	-	3.210.142.460.000
B. Non Public Goods				
1	15/Dec/20	941.773.886.995	832.657.444.604	1.774.431.331.599
2	Penyesuaian Akrual	255.535.887.600	212.171.279.523	467.707.167.123
SUBTOTAL NPG		1.197.309.774.595	1.044.828.724.127	2.242.138.498.722
TOTAL PG DAN NPG		4.407.452.234.595	1.044.828.724.127	5.452.280.958.722



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 428 -

Penyesuaian AkruaI Kontribusi Bank Indonesia yang disajikan LKBUN Tahun 2020 sebagaimana tabel di atas, berbeda dengan yang disajikan oleh Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kontribusi BI yang tersaji pada LKBUN	Kontribusi BI yang tersaji pada LKTBI	Selisih
1	Penyesuaian AkruaI PG	1.456.927.480.000	1.455.772.056.575	1.155.423.425
2	Penyesuaian AkruaI NPG	255.535.887.600	255.536.113.005	(225.405)

Selisih Penyesuaian AkruaI PG disebabkan karena pada LKBUN Tahun 2020 menghitung berdasarkan pola perhitungan untuk pembayaran bunga yang sama dengan sistem BI-SSSS (Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System*) sedangkan BI pada LKTBI menghitung menggunakan pola perhitungan pada FOMOBO (*Front Office Midle Office Back Office*) Bank Indonesia. Selisih Penyesuaian NPG disebabkan adanya pembulatan pada LKTBI Tahun 2020 dimana angka pada LKTBI Tahun 2020 dalam satuan jutaan Rupiah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 429 -

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per
1 Januari 2020
sebesar Rp235,47
triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp235.477.658.828.423, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2019. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2019 sebesar Rp240.152.602.171.525, Saldo Awal Kas TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.674.943.343.102.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Kas Transitoris	-	-
Kas Escrow	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Kas pada BLU yang telah disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
Saldo Awal Kas	235.477.658.828.423	240.152.602.171.525

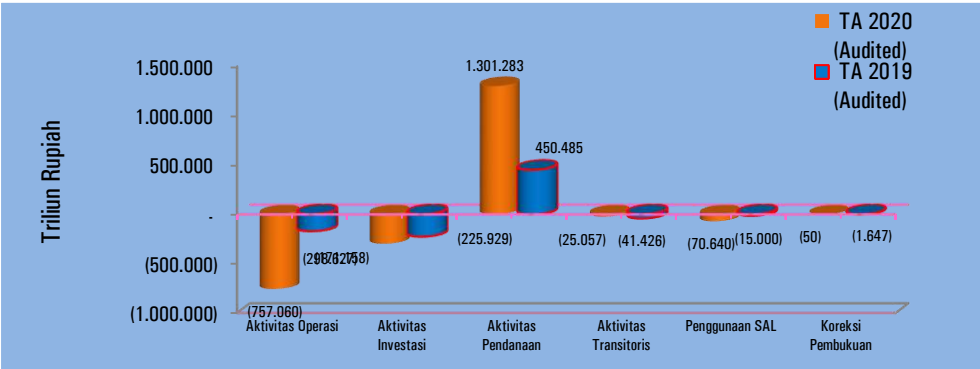
F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut.

Kenaikan
(Penurunan) Kas
sebesar Rp149,84
triliun

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(757.060.086.481.976)	(171.158.277.117.462)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(298.626.891.678.470)	(225.929.135.037.521)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.301.283.054.425.414	450.485.196.418.840
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(25.057.121.769.181)	(41.425.640.178.382)
Penggunaan SAL *)	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan **)	(50.149.808.575)	(1.647.087.428.577)
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	149.848.804.687.212	(4.674.943.343.102)

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2020 disajikan dalam Grafik 33.



Grafik 33. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 430 -

- *) Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

- **) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp50.149.808.575, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SiLPA	447.536.410.409
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(227.575.834.013)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(270.110.384.971)
Total Koreksi Pembukuan		(50.149.808.575)

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp447.536.410.409 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp165.007.135.154 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp612.543.545.563. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai minus Rp158.272.894.029 dan transaksi pengembalian pendapatan hibah senilai minus Rp6.734.241.125.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp227.575.834.013 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp270.110.384.971, terdiri dari:
 - a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp50.865.145.620 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN BANDA ACEH (001)	8.490.697.140
2	KPPN JAKARTA II (019)	1.054.958.530.721
3	KPPN BANDUNG I (022)	1
4	KPPN BOGOR (023)	1.072.289.448
5	KPPN YOGYAKARTA (030)	(2.711.792.764)
6	KPPN MALANG (032)	(70.432.626.825)
7	KPPN KUPANG (039)	(230.821.103)
8	KPPN TERNATE (062)	9.670.295.858
9	KPPN JAYAPURA (063)	5.688.598.709
10	KPPN MEDAN II (123)	(74.332.677.600)
11	KPPN SURABAYA II (135)	(442.605.538)
12	KPPN BLITAR (150)	68.526.668.873
13	KPPN JAKARTA VII (182)	(1.051.121.702.540)
		(50.865.145.620)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 431 -

- b. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp7.551.767.998 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN SURABAYA I (031)	(87.929.778)
2	KPPN BANJARMASIN (045)	(99.682.020)
3	KPPN MANADO (049)	(35.792.338)
4	KPPN MANOKWARI (065)	(984.572.000)
5	KPPN JAKARTA III (088)	(4.064.724.267)
6	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	(288.353.396)
7	KPPN CURUP (146)	(27.500.000)
8	KPPN JAKARTA VI (175)	(1.963.214.199)
		(7.551.767.998)

- c. Koreksi Kas di BUN merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp211.693.471.353.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp256.923.467.961.654 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp256,92 triliun

Uraian	TA 2020 (<i>Audited</i>)	TA 2019 (<i>Audited</i>)
Saldo Akhir Kas ¹⁾	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan	124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan ²⁾	3.819.744.936.794	3.956.502.008.861
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(14.247.797.371.759)	(10.817.836.834.384)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ³⁾	-	(3.932.640)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) ⁴⁾	(118.830.237.152.177)	(20.053.770.625.020)
Kas Transito (Kiriman Uang)	-	52.495.330
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	256.923.467.961.654	208.962.960.718.114

¹⁾ Saldo Akhir Kas sebesar Rp385.326.463.515.635 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode TA 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (<i>Audited</i>)	TA 2019 (<i>Audited</i>)
Rekening Kas BUN di BI	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Rekening Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening DDP)	118.830.237.152.177	20.053.770.625.020
Jumlah	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 432 -

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2020 sebesar Rp57.688.418.512.516 termasuk Kas yang telah didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU) sebesar Rp14.247.797.371.759 oleh Satker BLU.

²⁾ Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.819.744.936.794 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp7.682.561.400.884 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp3.862.816.464.090.

³⁾ Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	43.440.621.140.757	45.736.358.514.505
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	14.247.797.371.759	10.817.836.834.384
	57.688.418.512.516	56.554.195.348.889
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Kas pada BLU yang belum disahkan	-	(3.932.640)

⁴⁾ Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) sebesar minus Rp118.830.237.152.177 merupakan kumpulan Saldo Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya yang rekeningnya dikelola oleh UAPBUN-AP dan disajikan dalam komponen Aset Lainnya pada Neraca LKPP (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat TA 2020 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2020. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp757.060.086.481.976 dan minus Rp171.158.277.117.462, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.647.501.178.312.215	1.960.287.552.753.207
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.404.561.264.794.191	2.131.445.829.870.669
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(757.060.086.481.976)	(171.158.277.117.462)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp585.901.809.364.514 atau 342,32 persen dari TA 2019.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2020 sebesar minus Rp757.060.086.481.976 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat penurunan arus kas masuk pada TA 2020 jika dibandingkan dengan TA 2019 disebabkan penurunan realisasi penerimaan negara. Namun demikian, arus kas keluar lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi
sebesar minus
Rp757,06 triliun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 433 -

pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah terjadi terutama pada peningkatan belanja pemerintah dalam bentuk belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mempertahankan perekonomian dan menanggulangi pandemi Covid-19.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2020 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.285.136.317.135.799 dan Rp1.546.141.893.392.193, dengan rincian sebagai berikut.

*Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp1.285,13 triliun*

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
Pendapatan BPHTB	-	-
Pendapatan Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
Pendapatan Pajak Lainnya	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.248.415.111.170.305	1.505.088.202.287.697
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496
Penerimaan Perpajakan	1.285.136.317.135.799	1.546.141.893.392.193

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp261.005.576.256.394 atau 16,88 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp594.033.333.770.490 dan Rp772.265.718.286.668, dengan rincian sebagai berikut.

*Pendapatan Pajak
Penghasilan sebesar
Rp594,03 triliun*

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	11.332.221.314.991	24.493.086.993.337
Pendapatan PPh Gas Bumi	21.689.144.755.946	34.654.705.206.760
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.370.055.232	2.522.619.831
Jumlah Pendapatan PPh Migas	33.026.736.126.169	59.150.314.819.928
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	139.351.267.744.195	148.503.893.801.199
Pendapatan PPh Pasal 22	16.849.783.981.344	21.308.577.041.891
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	27.117.480.784.100	53.704.105.315.897
Pendapatan PPh Pasal 23	40.013.897.522.066	42.582.956.281.130
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.563.111.563.072	11.200.108.698.779



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 434 -

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	155.076.444.520.586	252.167.838.904.327
Pendapatan PPh Pasal 26	43.602.468.786.460	46.138.482.953.287
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	112.164.589.833.830	126.223.171.183.087
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	15.156.290.554.678	11.153.510.635.628
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	111.262.353.990	132.758.651.515
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	581.006.597.644.321	713.115.403.466.740
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp178.232.384.516.178 atau 23,08 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

*Pendapatan PPN
sebesar Rp450,32
triliun*

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp450.328.063.257.688 dan Rp531.577.293.855.031, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	298.670.175.293.033	344.440.292.858.365
Pendapatan PPN Impor	140.453.213.447.920	171.368.962.616.010
Pendapatan PPN Lainnya	713.064.561.571	162.381.392.806
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5.554.000.093.959	10.847.390.983.819
Pendapatan PPnBM Impor	3.000.581.915.947	4.725.154.762.635
Pendapatan PPnBM Lainnya	809.312.322	33.111.241.396
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	1.936.218.632.936	-
Jumlah Pendapatan PPN dan PPnBM	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp81.249.230.597.343 atau 15,28 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

*Pendapatan PBB
sebesar Rp20,95
triliun*

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp20.953.610.013.766 dan Rp21.145.900.040.486, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.627.109.411.467	2.486.750.566.151
Pendapatan PBB Kehutanan	653.561.272.344	487.201.065.051
Pendapatan PBB Pertambangan	3.004.587.635.379	3.477.736.065.334
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.081.875.255.844	14.250.961.673.713
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	408.132.427.296	368.435.097.874
Pendapatan PBB Lainnya	178.344.011.436	74.815.572.363
Jumlah Pendapatan PBB	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp192.290.026.720 atau 0,91 persen dari TA 2019.

*Pendapatan BPHTB
sebesar Rp0*

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pada TA 2020 dan TA 2019 tidak terdapat Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 435 -

*Pendapatan Cukai
sebesar Rp176,30
triliun*

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp176.309.313.789.576 dan Rp172.421.940.270.562, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	170.239.842.643.814	164.872.445.405.658
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	241.784.163.000	122.528.191.000
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.759.288.405.930	7.338.510.818.070
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	56.239.915.199	73.182.280.071
Pendapatan Cukai Lainnya	12.158.661.633	15.273.575.763
Jumlah Pendapatan Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp3.887.373.519.014 atau 2,25 persen dari TA 2019.

*Pendapatan Pajak
Lainnya sebesar
Rp6,79 triliun*

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp6.790.790.338.785 dan Rp7.677.349.834.950, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Pajak Lainnya		
Pendapatan Bea Meterai	1.446.535.466.431	1.480.577.017.178
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	3.638.052.138.011	4.117.446.934.631
Pendapatan PPn Batubara	485.164.790.391	538.680.322.182
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	10.832.559.640	75.490.463.210
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	5.580.584.954.473	6.212.194.737.201
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.179.768.900.131	655.039.379.502
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	30.360.250.777	589.923.712.311
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.863.959	220.033.197.452
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	74.369.445	158.808.484
Jumlah Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.210.205.384.312	1.465.155.097.749
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp886.559.496.165 atau 11,55 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional sebesar
Rp36,72 triliun*

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp36.721.205.965.494 dan Rp41.053.691.104.496, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	29.750.557.857.631	34.824.420.858.209
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	-
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	567.207.949.682	682.054.914.763
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	502.288.602.777	589.890.171.268
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	-
Pendapatan BM – DTP	233.478.860.370	354.326.302.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 436 -

Pendapatan Pabean Lainnya	(8.782.796.689)	29.077.858.500
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	183.028.721.000	308.468.786.790
Pendapatan Bea Masuk Imbalan		22.101.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.215.719.773.794	738.720.319.589
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	4.264.317.752.839	3.526.335.855.946
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	891.590.589	373.535.431
Pendapatan Bunga Bea Keluar	12.497.653.521	401.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp4.332.485.139.002 atau 10,55 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

*PNBP sebesar
Rp343,53 triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp343.532.045.955.792 dan Rp408.648.315.368.093, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Sumber Daya Alam	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790
Pendapatan PNBP Lainnya	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366
Jumlah PNBP	343.532.045.955.792	408.648.315.368.093

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp65.116.269.412.301 atau 15,93 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan SDA
sebesar Rp97,22
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp97.225.067.272.619 dan Rp154.895.286.766.287, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	44.868.847.085.493	83.622.340.876.020
Pendapatan Gas Bumi	24.211.325.322.339	37.467.520.404.392
Pendapatan Pertambangan Umum	21.178.987.879.156	26.343.691.801.600
Pendapatan Kehutanan	4.403.263.272.502	5.007.257.006.149
Pendapatan Perikanan	600.662.766.688	521.936.215.435
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.961.980.946.441	1.932.540.462.691
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp57.670.219.493.668 atau 37,23 persen dari TA 2019.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 437 -

*Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan sebesar
Rp66,08 triliun*

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp66.080.543.541.337 dan Rp80.726.119.206.790, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	43.888.106.053.599	49.773.695.752.482
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	710.827.000.000	860.515.629.605
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Jumlah Pendapatan KND	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp14.645.575.665.453 atau 18,14 persen dari TA 2019.

*Pendapatan PNB
Lainnya sebesar
Rp110,91 triliun*

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNB Lainnya

Pendapatan PNB Lainnya pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp110.918.107.259.637 dan Rp124.157.596.399.650, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	110.135.193	795.220.944
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	16.883.143.705.279	32.083.100.353.355
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	13.646.524.410.853	18.366.375.054.747
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	5.396.987.712.963	6.728.386.646.421
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.788.763.353.158	5.229.029.641.870
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	28.185.586.049.245	25.903.218.006.612
Pendapatan Jasa Lainnya	304.133.236.159	429.902.216.890
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	22.980.902.226.353	19.333.882.339.344
Pendapatan Denda	503.790.164.112	614.389.891.175
Pendapatan Lain-lain	18.228.166.266.322	15.468.517.028.292
Jumlah PNB Lainnya	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp13.239.489.140.013 atau 10,66 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp69.308.327.882.199 dan Rp48.869.312.995.366, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.460.957.814.443	40.698.144.354.523
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	123.568.742.424	154.843.013.918
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	587.981.383.580	855.074.995.219
Pendapatan Dari Alokasi APBN	1.370.313.178.626	328.485.663.104
Pendapatan BLU Lainnya	5.765.506.763.126	6.832.764.968.602
Jumlah Pendapatan BLU	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366

*Pendapatan BLU
sebesar Rp69,30
triliun*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 438 -

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp20.439.014.886.833 atau 41,82 persen dari TA 2019.

*Pendapatan Hibah
sebesar Rp18,83
triliun*

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha, dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp18.832.815.220.624 dan Rp5.497.343.992.921, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Bentuk Uang – Perorangan	106.054.090.800	65.693.597.291
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	136.446.170.086	292.430.943.086
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	16.677.597.815.474	3.312.864.612.302
Bentuk Uang – Lainnya	77.918.548.282	2.089.180.000
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Terencana Bilateral	152.509.083.261	284.221.022.174
Terencana Multilateral	381.371.801.314	305.016.747.985
Terencana Lainnya	-	2.434.194.125
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Langsung Bentuk Uang Perorangan	421.800.000	-
Langsung Bentuk Uang Bilateral	490.258.603.112	686.083.404.317
Langsung Bentuk Uang Multilateral	671.422.064.921	514.852.423.425
Langsung Bentuk Uang Lainnya	138.815.243.374	31.657.868.216
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.834.798.595.982	1.824.265.660.242
Jumlah Pendapatan Hibah	18.832.815.220.624	5.497.343.992.921

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp13.335.471.227.703 atau 242,58 persen dari TA 2019.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp380,53
triliun*

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp380.532.228.590.618 dan Rp376.074.259.852.619, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.671.631.840.396	85.321.262.531.959
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	62.034.543.646.479	61.403.644.284.678
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	932.231.171.338	1.011.570.524.956
Belanja Gaji Dokter PTT	2.160.810.114	66.695.423.253
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.014.581.489.535	15.785.948.877.732
Belanja Honorarium	1.672.163.315.177	1.876.741.556.492
Belanja Lembur	738.864.388.804	723.295.487.788
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	75.902.029.595.284	83.006.573.420.266
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	125.525.829.327.121	119.482.270.828.040
Belanja Asuransi Kesehatan	10.038.193.006.370	7.396.256.917.455
Total Belanja Pegawai	380.532.228.590.618	376.074.259.852.619



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 439 -

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp4.457.968.737.999 atau 1,19 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

*Belanja Barang Dan
Jasa sebesar
Rp422,33 triliun*

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp422.338.225.598.487 dan Rp334.418.207.630.784, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Barang	154.711.094.977.522	131.972.860.461.463
Belanja Jasa	31.719.971.475.536	32.584.478.436.045
Belanja Pemeliharaan	38.090.179.431.346	36.134.531.242.498
Belanja Perjalanan	23.834.433.535.430	44.705.074.918.849
Belanja Badan Layanan Umum	63.616.794.783.911	41.238.015.097.725
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	110.365.751.394.742	47.783.247.474.204
Jumlah Belanja Barang	422.338.225.598.487	334.418.207.630.784

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp87.920.017.967.703 atau 26,29 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp314,08 triliun*

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp314.088.112.296.556 dan Rp275.521.165.410.219. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp38.566.946.886.337 atau 14,00 persen dari TA 2019.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp297.154.737.528.797 dan Rp16.933.374.767.759, dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp297.154.737.528.797 dan Rp254.075.967.998.852, dengan rincian sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 440 -

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	590.719.783.504	562.706.663.882
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	228.629.948.417.773	200.915.665.461.632
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	50.592.442.385.279	40.902.078.447.238
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara	9.413.603.000.868	7.923.133.935.500
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	-	383.890.000.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara	7.928.023.941.373	3.388.493.490.600
Jumlah Belanja Pembayaran Bunga atas Utang DN	297.154.737.528.797	254.075.967.998.852

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp43.078.769.529.945 atau 16,96 persen dari TA 2019.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp16.933.374.767.759 dan Rp21.445.197.411.367, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	8.624.802.890.283	11.653.996.532.055
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	8.308.162.491.044	9.790.711.282.574
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	409.386.432	489.596.738
Jumlah Pembayaran Bunga atas Utang LN	16.933.374.767.759	21.445.197.411.367

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp4.511.822.643.608 atau 21,04 persen dari TA 2019.

*Belanja Subsidi
sebesar Rp196,23
triliun*

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp196.231.455.278.876 dan Rp201.802.566.846.111, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – BBM	47.737.013.915.933	84.209.349.146.017
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – Non BBM	93.659.530.043.258	98.482.626.361.250
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – PSO	4.746.898.208.197	4.143.114.912.890
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	146.143.442.167.388	186.835.090.420.157
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	16.691.129.783.687	14.967.476.425.954
Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	-	-
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	16.691.129.783.687	14.967.476.425.954
Belanja Subsidi - Darurat Bencana		
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	33.396.883.327.801	-
Jumlah Belanja Subsidi - Darurat Bencana	33.396.883.327.801	-
Jumlah Belanja Subsidi	196.231.455.278.876	201.802.566.846.111



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 441 -

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Subsidi sebesar Rp5.571.111.567.235 atau 2,76 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp6.275.907.926.228 dan Rp6.476.205.662.045, dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Hibah
sebesar Rp6,27
triliun

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	6.246.365.438.842	6.241.521.667.087
Belanja Hibah Lainnya	130.909.594	409.607.672
Jumlah Belanja Hibah	6.275.907.926.228	6.476.205.662.045

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp200.297.735.817 atau 3,09 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp202.529.969.428.206 dan Rp112.480.254.777.629, dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Bantuan
Sosial sebesar
Rp202,52 triliun

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	231.593.203.136	397.798.295.384
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	64.530.742.396.461	47.129.306.212.971
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	4.903.114.838.186	2.827.675.472.473
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	38.810.923.377.200	34.703.408.078.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	75.631.317.802.066	19.789.409.255.595
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	18.422.277.811.157	7.632.657.463.206
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	202.529.969.428.206	112.480.254.777.629

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp90.049.714.650.577 atau 80,06 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp120.035.189.519.041 dan Rp11.699.746.548.649, dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Lain-lain
sebesar Rp120,03
triliun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 442 -

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.083.584.096.722	8.028.004.141.391
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	53.116.712.664	567.760.624.610
Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian	-	-
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	-	-
Belanja Lain-lain BUN	91.732.086.624.853	749.878.030.942
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	24.058.522.796.424	-
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	66	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.107.879.288.312	2.354.103.751.706
Jumlah Belanja Lain-lain	120.035.189.519.041	11.699.746.548.649

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Lain-lain sebesar Rp108.335.442.970.392 atau 925,96 persen dari TA 2019.

*Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp44,28 triliun*

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp44.283.738.827.545 dan Rp39.158.751.141.991, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	31.159.010.681.964	22.073.087.555.530
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.124.728.145.581	17.085.663.586.461
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	44.283.738.827.545	39.158.751.141.991

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp5.124.987.685.554 atau 13,09 persen dari TA 2019.

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
sebesar Rp46,49
triliun*

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp46.498.603.739.756 dan Rp61.684.868.346.770, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	10.034.450.778.887	15.219.315.833.056
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	10.637.937.161.265	16.739.397.376.741
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	22.795.930.108.197	25.884.279.134.431
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	1.333.181.001.349	1.372.588.054.173
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.296.813.708.379	2.119.085.885.757
Dana Bagi Hasil Perikanan	400.290.981.679	350.202.062.612
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	46.498.603.739.756	61.684.868.346.770

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp15.186.264.607.014 atau 24,62 persen dari TA 2019.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 443 -

*Dana Bagi Hasil
Cukai sebesar
Rp3,12 triliun*

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp3.124.018.679.699 dan Rp3.136.352.925.658. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp12.334.245.959 atau 0,39 persen dari TA 2019.

*Dana Alokasi Umum
sebesar Rp381,61
triliun*

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 dan Rp420.910.238.556.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Umum sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dari TA 2019.

*Dana Alokasi Khusus
Fisik sebesar
Rp50,17 triliun*

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp50.175.976.373.103 dan Rp64.165.654.543.270. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dari TA 2019.

*Dana Otonomi
Khusus, Dana
Keistimewaan DIY,
Dana Insentif Daerah
sebesar Rp39,33
triliun*

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp39.332.012.902.000 dan Rp31.874.390.797.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audit ed)	TA 2019 (Audit ed)
Dana Otonomi Khusus Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Dana Otonomi Khusus Papua	7.999.969.920.000	8.674.676.695.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.001.479.428.000	3.947.794.959.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.200.000.000.000
Dana Insentif Daerah	18.455.285.206.000	9.694.447.489.000
Jumlah	39.332.012.902.000	31.874.390.797.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp7.457.622.105.000 atau 23,40 persen dari TA 2019.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 444 -

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp126.402.855.554.669 dan Rp122.229.018.352.925, dengan rincian sebagai berikut.

Dana Alokasi Khusus
Non Fisik sebesar
Rp126,40 triliun

	2020 <i>Audited</i>	2019 <i>Audited</i>
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	52.178.079.254.000	53.979.069.017.265
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.164.000	463.968.756.915
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293	49.200.273.626.885
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	15.704.774.423.376	12.052.644.554.156
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisata	1.294.266.820.000	1.318.013.311.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.308.731.600.000	5.215.049.086.704
	126.402.855.554.669	122.229.018.352.925

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp4.173.837.201.744 atau 3,41 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa sebesar
Rp71,10 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp71.100.518.583.856 dan Rp69.814.148.478.999. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp1.286.370.104.857 atau 1,84 persen dari TA 2019.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi
sebesar minus
Rp298,62 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp298.626.891.678.470 dan minus Rp225.929.135.037.521, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 <i>(Audited)</i>	TA 2019 <i>(Audited)</i>
Arus Kas Masuk	22.551.446.110.746	2.677.421.193.017
Dikurangi Arus Kas Keluar	321.178.337.789.216	228.606.556.230.538
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(298.626.891.678.470)	(225.929.135.037.521)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp72.697.756.640.949 atau 32,18 persen dari TA 2019. Penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagian diakibatkan oleh peningkatan belanja modal pemerintah khususnya untuk belanja modal peralatan dan mesin dan peningkatan investasi pemerintah terutama dalam rangka mendukung proyek strategis nasional serta dukungan kepada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 445 -

Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

F.2.2.1 Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

*Pengelolaan dan
Penjualan BMN
sebesar Rp282,16
miliar*

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp282.163.876.771 dan Rp346.030.832.782, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	281.310.250.571	341.531.328.482
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengabaian Barang	853.626.200	4.499.504.300
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	282.163.876.771	346.030.832.782

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp63.866.956.011 atau 18,46 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

*Penerimaan Hasil
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
sebesar Rp299,52
miliar*

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp299.524.709.410 dan Rp179.982.155.162, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	259.445.722.509	169.188.403.022
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	40.078.986.901	10.793.752.140
Jumlah Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	299.524.709.410	179.982.155.162

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp119.542.554.248 atau 66,42 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

*Penerimaan
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp2,01 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp2.014.582.699.001 dan Rp1.376.096.205.074. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp638.486.493.927 atau 46,40 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

*Penerimaan Cicilan
Pokok Investasi
Pemerintah sebesar
Rp19,95 triliun*

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah, Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah dan Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp19.955.174.825.564 dan Rp775.311.999.999, yang merupakan penerimaan yang berasal dari Manajemen Aset Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 446 -

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp19.179.862.825.565 atau 2.473,83 persen dari TA 2019.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1 Belanja Modal

*Belanja Modal
sebesar Rp190,91
triliun*

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp190.919.832.381.884 dan Rp177.841.479.636.714, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Modal Tanah	23.537.354.331.766	4.195.231.872.492
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.102.627.430.616	60.175.192.195.620
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.349.710.208.626	27.559.666.510.439
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	52.450.183.388.085	74.559.542.865.905
Belanja Modal Fisik Lainnya	6.054.072.120.731	6.497.371.766.901
Belanja Modal BLU	4.425.884.902.060	4.854.474.425.357
Jumlah Belanja Modal	190.919.832.381.884	177.841.479.636.714

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Modal sebesar Rp13.078.352.745.170 atau 7,35 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

*Pengeluaran
Pengembangan
Pendidikan Nasional
sebesar Rp10,00
triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp10.000.000.000.000 dan Rp5.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000 atau 100,00 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

*Pengeluaran
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp13,30 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp13.306.582.699.000 dan Rp8.200.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp5.106.582.699.000 atau 62,28 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

*Penyertaan Modal
Negara sebesar
Rp64,28 triliun*

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN Lainnya. Penyertaan Modal Negara TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp64.288.017.000.000 dan Rp23.565.076.593.824, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	31.288.017.000.000	17.800.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	-	2.275.076.593.824
Penyertaan Modal Negara Lainnya	33.000.000.000.000	3.490.000.000.000
Jumlah PMN	64.288.017.000.000	23.565.076.593.824



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 447 -

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp40.722.940.406.176 atau 172,81 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

*Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp42,66
triliun*

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp42.663.905.708.332 dan Rp14.000.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Investasi Pemerintah	660.695.141.097	2.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	19.650.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	-	12.000.000.000.000
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	18.762.627.567.235	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	590.583.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.000.000.000	-
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	42.663.905.708.332	14.000.000.000.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp28.663.905.708.332 atau 204,74 persen dari TA 2019

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp757.060.086.481.976 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp298.626.891.678.470 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp1.055.686.978.160.446. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp1.301,28
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.301.283.054.425.414 dan Rp450.485.196.418.840, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.761.418.470.813.740	1.018.597.889.862.368
Dikurangi Arus Kas Keluar	460.135.416.388.326	568.112.693.443.528
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	1.301.283.054.425.414	450.485.196.418.840

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp850.797.858.006.574 atau 188,86 persen dari TA 2019. Peningkatan pada Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan terutama akibat upaya pemerintah dalam melakukan penerimaan pembiayaan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan penerimaan dimaksud dilakukan dalam rangka menutupi defisit APBN TA 2020 dan percepatan target pembangunan serta pemulihan ekonomi nasional,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 448 -

penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program PEN, serta mendukung pertumbuhan UMKM dan dunia usaha.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.615.659.685.880.024 dan Rp940.725.025.633.239, dengan rincian sebagai berikut.

*Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp1.615,65 triliun*

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	70.640.000.000.000	15.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	-
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	1.382.099.584.258.674	772.906.022.331.714
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	159.152.720.000.000	148.576.772.200.000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	3.767.381.621.350	4.242.231.101.525
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	1.615.659.685.880.024	940.725.025.633.239

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp674.934.660.246.785 atau 71,75 persen dari TA 2019.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp70.640.000.000.000 dan Rp15.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan sebesar Rp55.640.000.000.000 atau 370,93 persen dari TA 2019.

Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2020 sebesar Rp70.640.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN tahun 2020 yang seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilakukan penarikan dari Rekening SAL sampai dengan 31 Desember 2020. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan pada TA 2020 dan TA 2019.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.382.099.584.258.674 dan Rp772.906.022.331.714, dengan rincian sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 449 -**

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	57.410.000.000.000	89.340.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	988.838.806.806.018	451.908.593.101.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	291.538.007.190.656	165.862.683.778.114
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	26.150.000.000.000	37.360.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	18.162.770.262.000	28.434.745.452.600
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	1.382.099.584.258.674	772.906.022.331.714

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri sebesar Rp609.193.561.926.960 atau 78,82 persen dari TA 2019.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp159.152.720.000.000 dan Rp148.576.772.200.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Obligasi Negara Valuta Asing	123.490.220.000.000	119.059.172.200.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing - Jangka Panjang	35.662.500.000.000	29.517.600.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	159.152.720.000.000	148.576.772.200.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp10.575.947.800.000 atau 7,12 persen dari TA 2019.

e. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp3.767.381.621.350 dan Rp4.242.231.101.525. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp474.849.480.175 atau 11,19 persen dari TA 2019.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp141,11 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp141.112.305.195.604 dan Rp74.210.001.746.454, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penarikan Pinjaman Tunai	102.259.679.376.875	36.717.630.284.048
Penarikan Pinjaman Kegiatan	38.852.625.818.729	37.492.371.462.406
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	141.112.305.195.604	74.210.001.746.454

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp66.902.303.449.150 atau 90,15 persen dari TA 2019.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 450 -

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

*Penerimaan Cicilan
Pengembalian
Pemberian Pinjaman
sebesar Rp4,64
triliun*

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp4.646.479.738.112 dan Rp3.662.862.482.675, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	316.513.485.875	336.041.308.615
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	4.329.966.252.237	3.326.821.174.060
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	4.646.479.738.112	3.662.862.482.675

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp983.617.255.437 atau 26,85 persen dari TA 2019.

*Penerimaan
Pembiayaan Lain
sebesar Rp0*

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2020 dan TA 2019.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

*Pengeluaran
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp365,50 triliun*

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp365.504.237.359.459 dan Rp476.403.454.377.526, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	-
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara - Rupiah	317.304.724.605.881	412.729.586.110.100
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	46.795.251.750.000	62.464.607.300.000
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.404.261.003.578	1.209.260.967.426
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	365.504.237.359.459	476.403.454.377.526

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp110.899.217.018.067 atau 23,28 persen dari TA 2019.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

*Pengeluaran
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp90,99 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp90.999.290.652.394 dan Rp85.992.757.963.622, dengan rincian sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 451 -

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	36.364.451.431.115	31.317.372.208.106
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	54.634.839.221.279	54.675.385.755.516
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	90.999.290.652.394	85.992.757.963.622

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp5.006.532.688.772 atau 5,82 persen dari TA 2019.

F.2.3.2.3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement sebesar Rp3,63 triliun

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp3.631.888.376.473 dan Rp5.716.481.102.380. Dengan demikian, terdapat penurunan Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* sebesar Rp2.084.592.725.907 atau 36,47 persen dari TA 2019.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp245,59 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.301.283.054.425.414 dan defisit anggaran sebesar Rp1.055.686.978.160.446, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp245.596.076.264.968.

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp25,05 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp25.057.121.769.181 dan minus Rp41.425.640.178.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
Transito (Neto)	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	52.495.332	(52.495.332)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(25.057.121.769.181)	(41.425.640.178.382)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp16.368.518.409.201 atau 39,51 persen dari TA 2019.

F.2.4.1 Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar minus Rp1,67 triliun

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp1.675.465.318.005 dan Rp1.716.415.098.932, dengan rincian sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 452 -

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	24.618.345.533.285	25.515.614.381.003
Penerimaan PFK Beras BULOG	279.696.218.459	280.466.003.968
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	8.418.242.210.391	4.581.202.139.229
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	2.975.598.117	1.259.915.539
Penerimaan PFK Lain-lain	252.028.385.257	679.884.687.668
Jumlah Penerimaan PFK	33.571.287.945.509	31.058.427.127.407
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	16.992.959.549.171	16.441.954.391.147
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	25.000.000.000	52.559.070.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	113.566.813	129.104.986
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	744.679.310.501	1.122.009.541.801
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	-	3.467.016.222.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	71.100.556.962.856	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	88.863.309.389.341	21.083.668.329.934
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji	(21.727.375.893.278)	(23.172.051.236.852)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.863.241.998.108)	(1.764.977.656.829)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(279.719.345.401)	(280.491.880.002)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	(8.480.524.625.406)	(5.017.916.032.378)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	(13.312.520)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji	(3.002.134.286)	(2.120.354.344)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(901.208.015.176)	(307.548.821.039)
Jumlah Pengeluaran PFK	(33.255.072.011.655)	(30.545.119.293.964)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(18.984.436.758.832)	(15.238.976.230.644)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(25.000.000.000)	(52.559.070.000)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	(317.609.011)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(744.679.310.501)	(1.122.009.541.801)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	-	(3.467.016.222.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	(71.100.556.962.856)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	(90.854.990.641.200)	(19.880.561.064.445)
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932

Dengan demikian, terdapat penurunan Perhitungan Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp3.391.880.416.937 atau 197,61 persen dari TA 2019.

F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito (Neto)
sebesar Rp31,63
triliun

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu. Transito (Neto) juga berasal dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 453 -

transaksi penerimaan *Escrow*. Transito (Neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp31.636.865.658.712 dan Rp2.817.768.874.869, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	14.870.819.147.387	11.291.293.101.338
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	80.562.439.904	8.971.178.672.357
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	328.513.851	152.554.329
Penerimaan atas transaksi pemindahan kas antar BLU	1.116.422.586.551	-
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	49.123.735.148.036	23.480.128.286.930
Penerimaan <i>Escrow</i>	47.698.088.789.481	8.737.496.913.592
Jumlah Penerimaan Transito	112.889.956.625.210	52.480.249.528.546
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(15.340.689.945.358)	(11.309.426.786.254)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	(80.562.439.904)	(8.971.178.672.357)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(328.513.851)	(152.554.329)
Pengeluaran atas transaksi pemindahan kas antar BLU	(1.116.422.586.551)	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(49.126.004.386.184)	(23.429.998.627.129)
Pengeluaran <i>Escrow</i>	(15.589.083.094.650)	(5.951.724.013.608)
Jumlah Pengeluaran Transito	(81.253.090.966.498)	(49.662.480.653.677)
Jumlah Transito (Neto)	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transito (Neto) sebesar Rp28.819.096.783.843 atau 1.022,76 persen dari TA 2019.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditangguhkan dan Kesalahan Sistem Perbankan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) juga berasal dari transaksi non anggaran pihak ketiga Rekening Pemerintah Lainnya, Migas, Non Migas, Rekening Khusus dan Optimalisasi Kas.

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp55.018.574.605.220 dan minus Rp45.959.771.656.851, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	107.250.288.389.717	40.312.556.247.186
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.600.718.321.518.214	942.358.812.624.291
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	3.717.597.699	17.776.784.379.532
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	509.868.017.795.874	562.020.730.222.589
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.999.178.000.155	8.156.386.337.513
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	85.857.839.026.533	71.975.041.983.110
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	2.310.697.362.328.192	1.642.600.311.794.221

Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga (Neto)
sebesar minus
Rp55,01 triliun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 454 -

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(106.965.579.952.374)	(40.392.038.442.495)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(1.557.342.752.471.365)	(952.732.631.126.359)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(32.125.026.905.725)	(52.948.605.117.911)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(509.675.770.299.518)	(562.367.762.691.627)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(6.999.178.000.155)	(8.143.992.149.951)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(152.607.839.026.533)	(71.975.041.983.110)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(2.365.716.146.655.670)	(1.688.560.071.511.453)
Neto	(55.018.784.327.478)	(45.959.759.717.232)
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	18.367.125.378.547	5.026.821.072.580
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(18.367.124.834.211)	(5.026.821.072.577)
	544.336	3
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	160.097.938.286	152.350.074.997
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(159.888.760.364)	(152.362.014.619)
	209.177.922	(11.939.622)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp9.058.802.948.369 atau 19,71 persen dari TA 2019.

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang, serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp52.495.332 dan minus Rp52.495.332, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	17.138.677.449.804.027	14.838.442.845.811.636
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(17.138.677.397.308.695)	(14.838.442.898.307.968)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	52.495.332	(52.495.332)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp104.990.664 atau 200,00 persen dari TA 2019.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp52,49 juta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 455 -

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp5.127,31 triliun*

Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dan Rp1.407.808.224.645.741. Nilai Ekuitas Awal tahun 2020 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2019 pada LKPP Tahun 2019 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

*Defisit LO
Rp872,61 triliun*

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp872.618.264.239.235 dan Rp249.226.639.571.213. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0.

G.3.2. Penyesuaian SiLPA

*Penyesuaian SiLPA
Rp454,27 miliar*

Penyesuaian SiLPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp454.270.651.534 dan minus Rp1.304.223.887.208. Penyesuaian SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu. Penyesuaian SiLPA dibentuk dari Jurnal Penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (*null*) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas pendapatan tahun anggaran yang lalu 311212. Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
311211	SILPA	612.543.545.563	(943.746.557.215)
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(158.272.894.029)	(360.477.329.993)
Jumlah		454.270.651.534	(1.304.223.887.208)

G.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp2,87
triliun*

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.873.247.690.030 dan Rp4.175.849.408.082. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 456 -

koreksi atas nilai persediaan pada K/L dan BUN yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Persediaan pada KL sebesar Rp2.873.059.590.030. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:
 - a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.799.984.765.567 yang disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu;
 - b. Kementerian PUPR sebesar Rp2.028.352.747.391 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - c. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar minus Rp955.277.922.928.
2. Koreksi Nilai Persediaan pada BUN sebesar Rp188.100.00

G.3.4. Revaluasi Aset Tetap

*Revaluasi Aset
Tetap Rp104,77
triliun*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp104.773.275.462.472 dan Rp4.113.213.336.254.225. Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan baru disetujui oleh BPK untuk dapat disajikan di dalam LKPP tahun 2019.

G.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp71,29 triliun*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.297.154.112.414 dan minus Rp82.075.076.826.694. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2020 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang dilakukan di tahun 2020, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelum tahun 2019.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dikurangi Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 457 -

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	59.104.912.220.029	(74.763.226.060.772)
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	(1.680.370.687.043)	2.942.057.554.556
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	(2.268.049.973)	(3.670.950.852)
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	15.705.822.438.822	(5.381.414.523.626)
5. Penyesuaian Konsolidasi	(1.830.941.809.421)	(4.868.822.846.000)
Jumlah	71.297.154.112.414	(82.075.076.826.694)

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar Rp59.104.912.220.029.
Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)
Kementerian Sekretariat Negara	60.241.594.956.027
Kementerian PUPR	(18.635.855.226.050)
Kementerian Pertahanan	13.352.810.994.272
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.938.740.294.339
Kementerian Kesehatan	(4.477.101.037.857)
Kementerian Perhubungan	1.434.096.937.805
Kepolisian RI	1.269.014.410.230
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	981.610.891.263
Jumlah	59.104.912.220.029

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp1.680.370.687.043. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)
Kementerian PUPR	(1.355.411.601.614)
Kementerian Perhubungan	(431.307.516.759)
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	106.348.431.330
Jumlah	(1.680.370.687.043)

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp2.268.049.973 merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada SKK Migas (BA 999.08).
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp15.705.822.438.822. Koreksi tersebut berasal dari:
- a. BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) sebesar minus Rp2.429.223.160 merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset kelolaan pada KPA Satker BLU LMAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 458 -

- b. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp48.250.000 yang merupakan nilai koreksi pencatatan nilai/kuantitas pada BP Kawasan Karimun atas Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Pengembangan Website;
- c. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp15.708.203.411.982. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut terdiri dari:
 - 1) Satker Pengelola BMN PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.918.265.958.793.
 - 2) Satker Pengelola BMN KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp13.789.937.453.189. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan karena revaluasi.
- 5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp1.830.941.809.421 dan minus Rp4.868.822.846.000. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 terdiri dari:

Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar minus Rp1.642.932.406.000 merupakan penyesuaian pencatatan ganda atas tanah pada K/L, yaitu:

 - 1. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah antara BPS yang juga dicatat oleh Kemenhan sebesar Rp104.278.709.000;
 - 2. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah antara POLRI dengan Kemensetneg sebesar Rp1.496.393.822.000;
 - 3. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah Kemenhan dengan Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000.

Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar minus Rp188.009.403.421 merupakan penyesuaian atas reklasifikasi BMN yang Dihentikan dari Penggunaan menjadi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Kementerian Perhubungan.

Atas pencatatan ganda aset tanah pada beberapa K/L dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Dalam Negeri atas tanah seluas 5.943 m² di Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat seluas 5.943 m² dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mencatat kepemilikan tanah seluas 3.099 m². Atas kedua tanah tersebut tetap disajikan sesuai dengan dokumen pendukung pada masing-masing Kementerian/Lembaga, hal ini dilakukan karena pencatatan telah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham sesuai dengan sertifikat masing-masing. Terkait dengan adanya dugaan irisan lahan seluas 374 m² tersebut selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Kantah pengukuran dan penentuan batas Badan Pertanahan.
- 2. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kemensetneg dengan Kemendikbud dimana Kemendikbud melakukan pencatatan dengan nilai Rp1 per meter persegi, saat ini Kemendikbud menyajikan tanah dimaksud sebagai BMN tidak ditemukan dalam proses Penilaian Kembali. Sehingga penyelesaian atas double pencatatan tersebut dilakukan melalui mekanisme tindak lanjut atas BMN Tidak Ditemukan yang saat ini sudah dalam proses pelaksanaan penghapusan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 459 -

Koreksi Atas
Reklasifikasi minus
Rp 7,54 triliun

G.3.6. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.542.957.446.049 dan minus Rp7.901.610.374.191. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp7.542.957.446.049 terdiri dari Koreksi Atas Reklasifikasi pada KL sebesar Rp7.542.081.937.994 dan Koreksi Atas Reklasifikasi pada BUN (BA 999.08) sebesar Rp875.508.055.

Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada KL sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)
Kementerian Pertahanan	(532.824.028.698)
Kementerian Perhubungan	707.489.442.002
Kementerian PUPR	7.718.430.811.581
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(351.014.286.891)
Jumlah	7.542.081.937.994

Koreksi Atas Reklasifikasi pada BUN berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp875.508.055 merupakan Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada SKK Migas.

G.3.7. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya
Rp31,98 triliun

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp31.986.614.856.946 dan minus Rp57.777.054.738.064. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2019 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	9.091.462.482.372	(7.606.703.373.338)
2. Koreksi Lainnya pada BUN	25.058.730.405.441	(48.872.200.812.343)
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(2.163.578.030.866)	(1.298.150.552.384)
Jumlah	31.986.614.856.947	(57.777.054.738.065)

*) selisih TA 2019 dan TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

1. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp9.091.462.482.372 dan minus Rp7.606.703.373.338. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2020 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 460 -

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kementerian Komunikasi dan Informatika	10.994.673.781.808	2.146.839.824.485
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	(6.210.220.841.332)	(40.721.498.306)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.920.224.645.590	(302.477.453)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.507.903.674.672	250.679.958.529
Kementerian Keuangan	(4.531.119.200.934)	(12.234.512.666.453)
Kementerian Pertahanan	(1.591.943.414.416)	863.856.283.759
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(998.056.183.016)	1.407.457.202.101
Jumlah	9.091.462.482.372	(7.606.703.373.338)

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp25.058.730.405.441 dan minus Rp48.872.200.812.343. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
999.00 Kuasa BUN	(48.183.763.352.239)	(9.710.896.704.384)
999.01 Pengelolaan Utang	590.209.933.252	23.817.039.836
999.02 Pengelolaan Hibah	879.884.835.372	1.713.550.086.234
999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	4.196.341.555.631	(56.554.564.930.800)
999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman	(2.705.358.870)	2.701.116.570
999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	531.135.366.213	(4.212.787.952.888)
999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(1.358.176.531.478)	1.732.661.632.352
999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	(37.155.948.956)	216.262.939.952
999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	6.332.379.612.280	966.590.553.080
999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	79.642.661.399.186	17.116.302.925.293
Penyesuaian	(17.531.861.104.950)	(165.837.517.878)
Jumlah	25.058.730.405.441	(48.872.200.812.433)

*) Selisih TA 2019 sebesar Rp90 karena pembulatan

a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN (BA 999.00)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp48.109.430.674.639 dan minus Rp9.710.896.704.384. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 461 -

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	486.872.508.275	(50.643.356.242)
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.228.254.527.851	907.673.305.405
Mutasi Kas BLU	1.134.219.230.987	1.543.557.229.176
Koreksi SAL (311111)	(52.495.330)	(154.125.800.908)
Koreksi Penggunaan SAL (311112)	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Ekuitas (391111)	18.596.942.875.978	3.042.641.918.10
Jumlah*	(48.183.763.352.239)	(9.710.896.704.379)

*J Selisih TA 2019 Rp5 karena pembulatan

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp590.209.933.252 dan Rp23.817.039.836. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.01	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Koreksi nilai Utang Proyek	590.209.933.252	(5.925.391.708)
Koreksi nilai Utang Program	.	22.096.642.908
Koreksi nilai Utang Lainnya	.	8.783.284.092
Penyesuaian Beban Bunga LO	.	134.458.544
Penyesuaian Pendapatan LO	.	(1.271.954.000)
Jumlah	590.209.933.252	23.817.039.836

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp879.664.835.372 dan Rp1.713.550.086.234. Koreksi lain-lain sebesar Rp879.664.835.372 terdiri dari Koreksi Lain-Lain atas sisa dana hibah RR tahun 2015 s.d 2019 yang masih harus disetorkan kembali ke RKUN sebesar Rp27.718.682.691 dan pengesahan hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp851.946.152.681.

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.196.341.555.631 dan minus Rp56.554.564.930.800. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah disajikan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 462 -

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.03	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
KPA Dit PNBPDJA	1.220.000.001	64.899.993.857
BLU LPDB KUMKM	9.303.373.479	(5.697.606.196)
KPA Kemen BUMN	(73.123.122.338.357)	(28.295.649.664.359)
KPA DJKN	(20.565.809.011.597)	(2.223.363.743.339)
UAIP	94.825.101.143.444	(23.104.753.910.763)
BPJT	2	-
LMAN	3.048.118.771.386	-
P2H	76.699.306.391	-
BLU LDKPI	3.000.000.000.000	-
KPA Dit. SMI (DJPB)	(76.386.036.992)	(990.000.000.000)
KPA Dit. Pinjaman dan Hibah (DJPPR)	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF	(1.000.000.000.000)	-
KPA Dit. Pembiayaan (Modal Awal BP Tapera)	1.216.347.874	-
Jumlah	4.196.341.555.631	(56.554.564.930.800)

- e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp2.705.358.870 dan Rp2.701.116.570. Koreksi Lain-lain ini berasal dari pengurangan atas pengakuan piutang jangka panjang pada NoD/SP4H yang memiliki *value date* Tahun 2019 namun belum diterbitkan SP3 di Tahun Anggaran 2019 dan telah diterbitkan SP3-nya di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.705.358.870.
- f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp531.135.366.213 dan minus Rp4.212.787.952.888. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD sebesar Rp531.135.366.213 merupakan selisih antara nilai estimasi DBH dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif sebesar Rp526.130.858.167 dan saldo koreksi piutang atas sisa DAK nonfisik TA 2019 Audited sebesar minus Rp5.004.508.046.
- g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)
Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Belanja Subsidi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp1.358.176.531.478 dan Rp1.732.661.632.352. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL disajikan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 463 -

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.07	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kementerian PUPR	16.010.143.398	60.257.298.971
Kementerian Pertanian	10	(15.467.053.196)
Kementerian Keuangan	(806.636.142.345)	(565.647.093.460)
Kementerian Koperasi dan UKM	(567.550.532.542)	2.253.518.479.336
Kementerian Perhubungan	1	701
Jumlah Koreksi Lainnya	(1.358.176.531.478)	1.732.661.632.352

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp37.155.948.956 dan Rp216.262.939.952, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Ditjen Anggaran	(52.859.702.722)	(7.456.451.880.000)
Ditjen Tanaman Pangan	15.728.824.952	(392.787.899)
SKK Migas	(25.071.186)	156.402.193
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	-	525.889.755
Satker Suspen	-	7.672.425.315.903
Jumlah*	(37.155.948.956)	216.262.939.952

- 1) Dit. PNBPD SDA dan KND (999510) merupakan Koreksi Lainnya atas sisa kewajiban Pemerintah atas kebijakan penetapan tarif tenaga listrik tahun 2019 yang belum terbayarkan sebesar Rp100 dan Koreksi lainnya sebesar minus Rp52.859.702.822 berupa pengakuan utang PT AKR yang merupakan kekurangan penerimaan BBM Solar Tahun 2019 sebagaimana surat Menteri Keuangan kepada Presiden Direktur PT. AKR Corporindo Tbk. Nomor: S-236/MK.02/2021 tanggal 26 Maret 2021.
- 2) Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp15.728.824.952 yang merupakan koreksi lainnya yang disebabkan audit Itjen Kementan.
- 3) SKK Migas sebesar minus Rp25.071.186 merupakan Koreksi Lainnya.

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya (BA 999.09)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.332.379.612.280 dan Rp966.590.553.080. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 464 -

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.09	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Otorita Asahan	.	(1.040.454.951)
Yayasan TMII	(22.510.147.320)	85.151.640
Yayasan Gedung Veteran	434.501.827	(1.215.524.084)
Baznas	49.699.016.895	21.568.082.370
Badan Wakaf Indonesia	10.345.971.174	99.654.207
SKK Migas	(7.555.539.288)	(29.124.427.010)
DJK	307.478.235.326	293.570.506.332
Badan Pengelola Keuangan Haji	5.994.487.573.666	682.647.564.576
Jumlah	6.332.379.612.280	966.590.553.080

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp79.642.661.399,186 dan Rp17.116.302.925.293. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

UAPBUN TK	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	70.639.973.270.768	14.983.448.665.698
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	11.858.199.419.918	2.614.340.557.155
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(2.855.511.291.500)	(481.486.297.560)
4) Penyesuaian	.	.
Jumlah	79.642.661.399,186	17.116.302.925.293

k. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp17.531.861.104.950 dan minus Rp165.837.517.678. Penyesuaian pada LKBUN diantaranya merupakan bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp2.163.578.030.866 dan minus Rp1.298.150.552.384. Penyesuaian konsolidasian antara lain berasal dari eliminasi penyajian ganda antara KL dengan BA BUN.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar
Entitas minus
Rp423,63 miliar

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp423.638.382.132 dan Rp400.076.249.724. Transaksi Antar Entitas TA 2020 dijelaskan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 465 -

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	10.799.508.700.068.219	9.464.964.346.763.850
Diterima Dari Entitas Lain	(10.829.656.773.066.617)	(9.479.843.736.107.350)
Pengesahan Hibah Langsung	28.957.570.035.891	14.584.887.973.846
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(53.120.253.929)	(117.296.886.522)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	842.976.246.238	846.768.035.664
Setoran Surplus BLU	(80.562.439.904)	(1.171.178.672.357)
Transfer Keluar	(968.346.022.060.134)	(243.191.067.333.248)
Transfer Masuk	968.403.593.088.304	244.327.352.475.842
Jumlah	(423.638.382.132)	400.076.249.724

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dicatat pada BUN. Dana lainnya juga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan sehingga agar tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp10.799.508.700.068.219, DDEL sebesar minus Rp10.829.656.773.066.617,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 466 -

pengesahan hibah langsung sebesar Rp28.957.570.035.691, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp53.120.253.929, pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp842.976.246.238, dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp80.562.439.904. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebesar minus Rp481.209.410.302 sudah dapat dijelaskan seluruhnya. Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan TAE pada BA BUN 999.99	-
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(471.811.522.268)
c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara catatan KL dengan SiAP	(8.768.716.466)
d) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	6.371
e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(630.556.530)
f) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL	1.378.591
Jumlah	(481.209.410.302)

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp481.209.410.302 di antaranya sebagai berikut.

- Tidak ada perbedaan TAE pada BUN.
 - Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan *posting rule* ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp471.811.522.268.
 - Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp8.768.716.466. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih kecil dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL) yang disebabkan antara lain karena selisih kurs transaksi penerimaan perpajakan.
 - Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp6.371 lebih besar catatan KL.
 - Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp630.556.530. Selisih tersebut disebabkan antara lain karena terdapat Pengesahan Hibah Langsung Uang TAYL yang belum dicatat di K/L. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.
 - Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL sebesar Rp1.378.591.
2. Setoran Surplus BLU, merupakan penyeteroran saldo kas BLU ke Kas Negara sehubungannya dengan adanya pencabutan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada 4 (empat) Unit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 467 -

Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan. Rincian Setoran Surplus BLU adalah sebagai berikut.

No	Satuan Kerja	Setoran Surplus BLU (Rp)
1	BLU UPBU H.A.S. Hanandjoedin	6.780.644.779
2	BLU UPBU Radin Inten	29.194.225.169
3	BLU UPBU Sentani	22.524.340.439
4	BLU UPBU Fatmawati Soekarno	22.063.229.517
Jumlah		80.562.439.904

3. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK) konsolidasian LKPP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
K/L	(1.104.894.671.105.993)	1.103.673.549.670.533	(1.221.121.435.460)
BUN	136.548.649.045.859	(135.269.956.582.229)	1.278.692.463.630
Eliminasi LKPP	-	-	-
Total LKPP*	(968.346.022.060.134)	(968.403.593.088.304)	57.571.028.170

Selisih lebih kecil Transfer Masuk pada KL dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

- Selisih pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp389.053.170.983.308, antara lain disebabkan oleh selisih Harga Perolehan Terakhir (HPT) atas barang konsumsi, transfer keluar dari Aset Tetap yang tidak digunakan operasi pemerintahan, perbedaan *posting rule* pada aset ATR dan KDP.
- Selisih pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp388.816.508.232.307, antara lain disebabkan oleh karena transfer keluar barang dihentikan, transfer keluar dari Aset Tetap dan/atau Aset Lain-lain yang tidak digunakan operasi pemerintahan.
- Selisih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.132.477.019.649 antara lain karena kode satker pengirim/penerima tidak muncul dalam aplikasi namun secara total tidak terdapat selisih, transfer aset yang dihentikan dari operasi penggunaan diterima sebagai aset aktifnya sebagaimana *posting rule* Aplikasi SIMAK-BMN, koreksi pencatatan atas tanah PSN pada Satker Konsolidasi Kementerian PUPR, serta transfer keluar atas Aset Tetap Renovasi (ATR) yang diterima dengan penerimaan ATR yang langsung mengkapitalisasi aset induknya.
- Selisih pada Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp4.224.329.717.628 antara lain disebabkan karena perbedaan Harga Perolehan Terakhir (HPT) atas barang konsumsi, akibat koreksi non revaluasi, kesalahan pengisian kode barang, dan aset yang dihentikan penggunaannya pada satker Transfer Masuk berubah ke kelompok induk golongan barang Aset Tetap.
- Selisih pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar minus Rp1.100.736.543.801 sebagian besar disebabkan adanya transfer masuk aset tetap dari Kementerian PUPR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 468 -

- f) Selisih Transfer Keluar Transfer Masuk pada BA BUN sebesar Rp1.278.692.463.630 dapat dijelaskan sebagai berikut.

BA	Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
999.03	Transfer Keluar	BLBI, PUPR	1.320.272.810.397
999.03	Transfer Masuk	Karaba Digdaya, Sejahtera Eka Graha, Aldevco	274.335.740.586
999.99	Transfer Keluar	Kemendikbud, Kemenkeu, BIN, Karaba Digdaya, Sejahtera Eka Graha	(340.535.757.588)
999.99	Transfer Masuk	LMAN	31.682.517.400
999.99	Transfer Keluar	Aldevco, Kemenhan, Kemenkeu, LAPAN	(7.661.053.000)
999.99	Transfer Masuk	KPK	558.823.252
999.99	Transfer Keluar	Kemenkeu	(4.757.006.511)
999.99	Transfer Masuk	Kemenkeu	4.796.389.094
	Jumlah		1.278.692.463.630

Beberapa selisih TKTM yang merupakan transaksi wajar dan pada umumnya terjadi di Kementerian/Lembaga berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 33/PB/2018, antara lain sebagai berikut:

- a) Transaksi lintas wilayah/eselon I/Kementerian/Lembaga
Transfer yang dilakukan suatu satker kepada satker lain yang berada di bawah wilayah/eselon I/K/L lain, dapat mengakibatkan perbedaan nilai TKTM pada laporan keuangan unit pelaporan wilayah/eselon I/KL selalu konsolidator laporan keuangan satker, karena dalam laporan keuangan unit konsolidator hanya tersaji transaksi transfer dari salah satu pihak saja, TK atau TM saja, sedangkan transaksi transfer pihak lainnya akan tersaji pada laporan unit konsolidator lain.
- b) Transfer lintas periode pelaporan
Transfer dari suatu satker kepada satker lain yang dilakukan lintas periode pelaporan keuangan dapat mengakibatkan perbedaan nilai TKTM di laporan keuangan unit pelaporan di atasnya, karena dalam laporan keuangan unit pelaporan tersebut hanya tersaji transaksi TK saja, sedangkan transaksi TM akan tersaji pada semester berikutnya.
- c) Transfer atas Aset tetap Renovasi (ATR)
Transfer atas ATR seolah-olah mengakibatkan selisih TKTM pada monitoring TKTM, hal ini karena pada Aplikasi SIMAK BMN, pengeluaran aset dilakukan melalui Menu Transfer Keluar sedangkan penerimaan aset dicatat melalui menu Pengembangan Langsung. Pada saat transfer ATR, satker pengirim mengeluarkan ATR melalui TK, sedangkan satker penerima merekam pengembangan aset definitif atas aset yang diterimanya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 469 -

- d) Penyesuaian nilai transfer persediaan karena penggunaan metode HPT (Harga Perolehan Terakhir) yang dapat berimplikasi pada perbedaan nilai TKTM.

Secara lengkap, rincian per KL terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada Lampiran 31.

6.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

*Kenaikan Ekuitas
minus Rp654,11
triliun*

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp654.114.382.401.922 dan Rp3.719.504.656.514.661. Nilai Kenaikan/ Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

6.6. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp4.473,19 triliun*

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dan Rp5.127.312.881.160.402. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp654.114.382.401.922.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 470 -

H. PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Aseri final yang disajikan dalam LKPP tahun 2020 telah melalui proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 471 -

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

			Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	126
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	127
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	128
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	130
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	131
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	131
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	133
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	133
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	135
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	136
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	136
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	136
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	140
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	141
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	142
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	143
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	144
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	146
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	147
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	148
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	149
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	149
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	149
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	150
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	150
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	151
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	153
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	153
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	154
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	155
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	155
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	155
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	156
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran	157
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	157
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri	158
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah	158
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	158
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	159
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	159



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 472 -

Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	160
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	161
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	164
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	164
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain	165
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	165
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	165
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program/Tunai	166
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	166
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	166
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	167
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	167
Catatan	B.3	CATATAN PENTING LAINNYA	168

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	203
Catatan	C.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	203
Catatan	C.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	203
Catatan	C.4	Penyesuaian Pembukuan	204
Catatan	C.5	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	205
Catatan	C.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	210

NERACA

Catatan	D.2.1	ASET	212
Catatan	D.2.1.1	Aset Lancar	212
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	212
Catatan	D.2.1.1.1.1	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	212
Catatan	D.2.1.1.1.2	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	214
Catatan	D.2.1.1.1.3	Kas di Rekening Kas di KPPN	215
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transito	216
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	216
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	216
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	216
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas pada BLU	218
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka Rekening BUN	219
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	219
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	220
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	221
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	221
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	221
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	223
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	233
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	233
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	233
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	233
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	234



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 473 -

Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	235
Catatan	D.2.1.1.6.9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	235
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	237
Catatan	D.2.1.2	Investasi Jangka Panjang	237
Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	238
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	238
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	241
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	244
Catatan	D.2.1.2.1.4	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	247
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	247
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	247
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	249
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	249
Catatan	D.2.1.3	Aset Tetap	251
Catatan	D.2.1.3.1	Tanah	252
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	252
Catatan	D.2.1.3.3	Gedung dan Bangunan	253
Catatan	D.2.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	253
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	253
Catatan	D.2.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	253
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	254
Catatan	D.2.1.4	Piutang Jangka Panjang	254
Catatan	D.2.1.4.1	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	254
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tagihan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	255
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	255
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Lainnya	255
Catatan	D.2.1.4.5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	258
Catatan	D.2.1.5	Aset Lainnya	259
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	259
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	261
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	262
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	270
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	272
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	275
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	288
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	291
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	291
Catatan	D.2.2	KEWAJIBAN	292
Catatan	D.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	292
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	293
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	294
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Bunga	301
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	302
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	305
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)	306
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	307
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	307
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	308



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 474 -

Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	309
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	309
Catatan	D.2.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	310
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	310
Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	310
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	311
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	311
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	311
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	313
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	318
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	320
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	320
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	320
Catatan	D.2.3	EKUITAS	321
Catatan	D.3	CATATAN PENTING LAINNYA	322

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	383
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	384
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	385
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	386
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	387
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	387
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	388
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	388
Catatan	E.2.1.1.1.6	Pendapatan Bea Masuk	389
Catatan	E.2.1.1.1.7	Pendapatan Bea Keluar	389
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	390
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	390
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	391
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	392
Catatan	E.2.1.1.2.3	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	394
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	396
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	397
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	398
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	399
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	400
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	401
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	402
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	403
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	404
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	405
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	407
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	409
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	410
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	411
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	416



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 475 -

Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	418
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	419
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	420
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	421
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	421
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	421
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	422
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	422
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	422
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	422
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	423
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	424
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	425
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	425
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	425
Catatan	E.3	CATATAN PENTING LAINNYA	425
LAPORAN ARUS KAS			
Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	429
Catatan	F.1.2	Kenaikan (Penurunan) Kas	429
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	431
Catatan	F.2.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	432
Catatan	F.2.1.1	Arus Kas Masuk	433
Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	433
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	433
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	434
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	434
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	434
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	435
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	435
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	435
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	436
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	436
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	437
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	437
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum	437
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	438
Catatan	F.2.1.2	Arus Kas Keluar	438
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	438
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	439
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	439
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	440
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	441
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	441
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	441



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 476 -

Catatan	F.2.1.2.8	Dana Bagi Hasil Pajak	442
Catatan	F.2.1.2.9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	442
Catatan	F.2.1.2.10	Dana Bagi Hasil Cukai	443
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	443
Catatan	F.2.1.2.12	Dana Alokasi Khusus Fisik	443
Catatan	F.2.1.2.13	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	443
Catatan	F.2.1.2.14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	444
Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	444
Catatan	F.2.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	444
Catatan	F.2.2.1	Arus Kas Masuk	445
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	445
Catatan	F.2.2.1.2	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	445
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	445
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	445
Catatan	F.2.2.2	Arus Kas Keluar	446
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	446
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Dalam Negeri – Pengembangan Pendidikan Nasional	446
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	446
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	446
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	447
Catatan	F.2.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	447
Catatan	F.2.3.1	Arus Kas Masuk	448
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	448
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	449
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	450
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	450
Catatan	F.2.3.2	Arus Kas Keluar	450
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	450
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	451
Catatan	F.2.3.2.3	Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari SLA	451
Catatan	F.2.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	451
Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	451
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	452
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	453
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	454
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Catatan	G.1	Ekuitas Awal	455
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	455
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	455
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	455
Catatan	G.3.2	Penyesuaian SiLPA	455
Catatan	G.3.3	Koreksi Nilai Persediaan	455
Catatan	G.3.4	Revaluasi Aset Tetap	456
Catatan	G.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	456
Catatan	G.3.6	Koreksi atas Reklasifikasi	459



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 477 -

Catatan	G.3.7	Koreksi Lainnya	459
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	464
Catatan	G.5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	469
Catatan	G.6	Ekuitas Akhir	469



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 478 -

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 479 -

DBH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	: Dana Penguatan Modal
DPPN	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 480 -

LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
ORI	: Obligasi Ritel Indonesia
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 481 -

SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SIAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPB	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pembersihan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 482 -

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 483 -

DAFTAR LAMPIRAN

1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2020	485
2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020	507
3	Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020	549
4	Rincian Realisasi Program PC-PEN Tahun 2020.....	661
5	Saldo Kas Di Rekening KPPN Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	676
6	Kas Pada K/L dan BUN Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	678
7	Belanja Dibayar Di Muka, Uang Muka Belanja dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	683
8	Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2020.....	690
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	697
10	Rincian Piutang Transfer Ke Daerah Per 31 Desember 2020	703
11	Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2020	715
12	Rincian Aset Kredit Eks BPPN dan Eks PT PPA Per 31 Desember 2020	718
13	Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	729
14	Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	732
15	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2020	736
16	Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan Tahun 2020	746
17	Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2020.....	749
18	Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (Minoritas) Tahun 2020	753
19	Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Per 31 Desember 2020.....	758
20	Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	760
21	TP/TGR Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	785



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 484 -

22	Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	791
23	Rincian Aset Eks BPPN Per 31 Desember 2020.....	799
24	Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	816
25	Daftar BMN Eks BMN <i>idle</i> yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda Tahun 2020 & Pemanfaatan Aset Eks BLBI/Eks PT PPA.....	823
26	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	947
27	Rincian Utang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Dana Bagi Hasil)	954
28	Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Per 31 Desember 2020.....	963
29	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Per 31 Desember 2020	973
30	Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan Per 31 Desember 2020	982
31	Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2020	985
32	Rekapitulasi Revaluasi Aset Tetap Kementerian Lembaga Tahun 2020.....	988
33	Laporan Pertanggungjawaban SBN Tahun 2020.....	1027
34	Representasi Manajemen DJP dan DJBC Terkait Insentif Perpajakan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19	1073



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 485 -

LAMPIRAN 1

LRA PENDAPATAN

PEMERINTAH PUSAT

TA 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 486 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
4	PENDAPATAN NEGARA	1.699.948.469.678.000	1.647.783.342.188.990	96,93%	1.960.633.583.585.990	(312.850.241.397.003)	-15,96%
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.880	91,50%	1.546.141.893.392.190	(261.005.578.256.394)	-16,88%
411	PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI	1.371.020.559.002.000	1.248.415.111.170.300	91,06%	1.505.088.202.287.700	(256.673.091.117.392)	-17,05%
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	670.379.543.400.000	594.033.333.770.480	88,61%	772.265.718.286.668	(178.232.384.516.178)	-23,08%
41111	Pendapatan PPh Migas	31.859.004.222.000	33.026.736.126.188	103,67%	59.150.314.019.928	(26.123.578.693.758)	-44,16%
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	14.662.391.743.000	11.332.221.314.991	77,29%	24.493.086.983.337	(13.160.865.678.346)	-53,73%
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	17.196.612.479.000	21.694.514.811.197	126,12%	34.654.705.206.760	(12.965.560.450.814)	-37,41%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya		5.370.055.232		2.522.619.831	2.847.435.401	112,88%
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	638.520.539.178.000	545.850.307.089.643	85,49%	701.981.892.831.112	(156.111.585.741.468)	-22,24%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	134.592.462.848.000	139.351.267.744.185	103,54%	148.503.893.801.199	(9.152.626.057.004)	-6,16%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	19.139.368.790.000	18.849.783.961.344	98,04%	21.308.577.041.891	(4.458.793.060.547)	-20,92%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	47.378.967.342.000	27.117.480.784.100	57,24%	53.704.105.315.897	(26.586.624.531.797)	-49,51%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	37.845.767.974.000	40.013.897.522.066	105,73%	42.582.958.281.130	(2.568.058.759.064)	-6,03%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.237.830.904.000	11.563.111.563.072	112,94%	11.200.108.698.779	363.002.864.293	3,24%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	224.539.270.897.000	155.076.444.520.586	69,08%	252.167.838.904.327	(97.091.394.383.741)	-38,50%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	49.801.009.939.000	43.602.468.786.460	87,55%	46.138.482.953.287	(2.536.014.166.827)	-5,50%
411128	Pendapatan PPh Final	114.869.405.088.000	112.164.589.833.830	97,65%	126.223.171.183.087	(14.058.581.349.257)	-11,14%
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	116.455.396.000	111.262.353.990	95,54%	132.758.651.515	(21.496.297.525)	-16,19%
41114	Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah		15.156.290.554.678		11.153.510.635.628	4.002.779.919.050	35,89%
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		1.709.586.633.777		7.345.980	1.709.579.287.797	23272310,68%
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah				730.495	(730.495)	-100,00%
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah		358.937.283		472.738.000	(113.798.717)	-24,07%
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah				-22.247.678	22.247.678	-100,00%
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah		2.964.908.597.094		2.240.829.780.907	724.278.816.187	32,32%
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah		9.797.088.181.415		8.912.420.935.294	884.667.246.121	9,93%
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah		684.348.205.108		854.630	584.347.350.479	80075278,25%
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah				500.000	(500.000)	-100,00%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 487 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/penurunan
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	507.516.237.686.000	450.328.063.257.688	88,73%	531.577.293.955.031	(81.249.230.597.343)	-15,28%
41121	Pendapatan PPN	493.039.805.753.000	439.836.453.302.524	89,21%	515.971.636.867.181	(76.135.183.564.657)	-14,76%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	330.106.967.671.000	298.670.175.293.033	90,48%	344.440.292.859.365	(45.770.117.565.332)	-13,29%
411212	Pendapatan PPN Impor	162.828.440.346.000	140.453.213.447.920	86,26%	171.368.962.618.010	(30.915.749.168.090)	-18,04%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	103.397.736.000	713.054.561.571	689,63%	162.381.392.806	550.683.168.765	339,13%
41122	Pendapatan PPnBM	14.476.431.943.000	8.555.391.322.228	59,10%	15.605.656.987.850	(7.050.265.665.622)	-45,18%
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	9.963.284.270.000	5.554.000.093.959	55,74%	10.847.390.963.819	(5.293.390.889.860)	-48,80%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	4.513.147.673.000	3.000.581.915.947	66,49%	4.725.154.762.835	(1.724.572.846.688)	-36,50%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya		809.312.322		33.111.241.396	(32.301.929.074)	-97,56%
41124	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah		1.936.218.632.936			1.936.218.632.936	
411241	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah		1.936.218.632.936			1.936.218.632.936	
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	13.441.937.380.000	20.953.610.013.766	155,88%	21.145.900.040.486	(192.290.026.720)	-0,91%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	13.441.937.380.000	20.953.610.013.766	155,88%	21.145.900.040.486	(192.290.026.720)	-0,91%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.512.973.053.000	2.627.109.411.467	173,64%	2.486.750.566.151	140.358.845.316	5,64%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	522.758.943.000	653.561.272.344	125,02%	487.201.065.051	166.360.207.293	34,15%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.187.925.109.000	3.004.587.635.379	252,93%	3.477.736.065.334	(473.148.429.955)	-13,61%
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	9.931.480.107.000	14.081.875.255.844	141,79%	14.250.961.673.713	(169.086.417.869)	-1,19%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	258.725.816.000	408.132.427.296	157,75%	368.435.097.874	39.697.329.422	10,77%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	28.074.352.000	178.344.011.436	635,26%	74.815.572.363	103.528.439.073	138,38%
4115	Pendapatan Cukai	172.197.172.827.000	176.309.313.789.576	102,39%	172.421.940.270.562	3.887.373.519.014	2,25%
41151	Pendapatan Cukai	172.197.172.827.000	176.309.313.789.576	102,39%	172.421.940.270.562	3.887.373.519.014	2,25%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	164.944.132.827.000	170.239.842.643.814	103,21%	164.872.445.405.658	5.367.397.238.156	3,26%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	154.600.000.000	241.784.163.000	156,39%	122.528.191.000	119.255.972.000	97,33%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	7.088.440.000.000	5.759.288.405.930	81,13%	7.338.510.818.070	(1.579.222.412.140)	-21,52%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai		56.239.915.199		73.182.280.071	(16.942.364.872)	-23,15%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya		12.159.861.633		15.273.576.763	(3.114.914.130)	-20,39%
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	7.485.667.699.000	6.790.790.338.785	90,72%	7.677.349.834.950	(886.558.496.165)	-11,55%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 488 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	7.485.667.699.000	5.590.584.954.473	74,55%	6.212.194.737.201	(631.609.782.728)	-10,17%
411611	Pendapatan Bea Meterai		1.448.535.486.431		1.480.577.017.178	(34.041.550.747)	-2,30%
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai		3.638.052.138.011		4.117.446.934.631	(479.394.796.620)	-11,64%
411613	Pendapatan PPh Batubara		485.164.790.391		538.680.322.182	(53.515.531.791)	-9,93%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	7.485.667.699.000	10.832.559.640	0,14%	75.490.463.210	(64.657.903.570)	-85,85%
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		1.210.205.384.312		1.465.155.097.749	(254.949.713.437)	-17,40%
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh		1.179.768.900.131		655.039.378.502	524.729.520.629	80,11%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPh		30.360.250.777		589.923.712.311	(559.563.461.534)	-94,85%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM		1.863.959		220.033.197.452	(220.031.333.493)	-100,00%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL		74.389.445		158.808.484	(84.439.039)	-53,17%
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	33.486.946.770.000	36.721.205.965.494	109,66%	41.053.691.104.496	(4.332.485.139.002)	-10,55%
4121	Pendapatan Bea Masuk	31.833.785.159.000	32.443.496.968.565	101,92%	37.526.981.312.119	(5.083.482.343.554)	-13,55%
41211	Pendapatan Bea Masuk	31.833.785.159.000	31.044.750.473.771	97,52%	36.479.770.104.740	(5.435.019.630.969)	-14,90%
412111	Pendapatan Bea Masuk	31.833.785.159.000	29.750.557.857.631	93,46%	34.824.420.858.209	(5.073.863.000.578)	-14,57%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		567.207.949.682		682.054.914.763	(114.846.965.081)	-16,84%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		502.288.602.777		589.890.171.268	(87.601.568.491)	-14,85%
412116	Pendapatan BM-DTP		233.478.860.370		354.326.302.000	(120.847.441.630)	-34,11%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		8.782.796.689		29.077.858.500	(37.860.655.189)	-130,20%
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan		1.398.748.494.794		1.047.211.287.379	351.537.287.415	33,57%
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping		183.028.721.000		308.468.786.790	(125.440.065.790)	-40,67%
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan				22.101.000	(22.101.000)	-100,00%
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan		1.215.719.773.794		738.720.319.589	476.998.454.205	64,57%
4122	Pendapatan Bea Keluar	1.653.161.611.000	4.277.706.996.929	258,76%	3.526.709.782.377	750.997.204.552	21,29%
41221	Pendapatan Bea Keluar	1.653.161.611.000	4.277.706.996.929	258,76%	3.526.709.782.377	750.997.204.552	21,29%
412211	Pendapatan Bea Keluar	1.653.161.611.000	4.264.317.752.838	257,95%	3.526.335.855.946	737.981.896.893	20,93%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		891.590.569		373.535.431	518.055.138	138,68%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		12.497.853.521		401.000	12.497.252.521	3116521,83%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 489 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	294.140.953.906.000	343.814.209.832.563	116,89%	408.994.346.200.875	(65.180.136.368.312)	-15,94%
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	79.086.884.879.000	97.225.067.272.619	122,93%	154.895.288.766.287	(57.670.219.493.668)	-37,23%
4211	PENDAPATAN MINYAK BUMI	40.385.879.343.000	44.868.847.085.493	111,10%	83.622.340.876.020	(38.753.493.790.527)	-46,34%
42111	Pendapatan Minyak Bumi		44.868.847.085.493		83.622.340.876.020	(38.753.493.790.527)	-46,34%
421111	Pendapatan Minyak Bumi		44.868.847.085.493		83.622.340.876.020	(38.753.493.790.527)	-46,34%
4212	PENDAPATAN GAS BUMI	12.909.043.600.000	24.211.325.322.339	187,55%	37.467.520.404.392	(13.256.195.082.053)	-35,38%
42121	Pendapatan Gas Bumi		24.211.325.322.339		37.467.520.404.392	(13.256.195.082.053)	-35,38%
421211	Pendapatan Gas Bumi		24.211.325.322.339		37.467.520.404.392	(13.256.195.082.053)	-35,38%
4213	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	19.351.516.817.000	21.178.987.878.156	109,44%	26.343.691.801.600	(5.164.703.922.444)	-18,61%
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara		437.708.805.796		450.864.987.180	(13.156.181.384)	-2,92%
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi		42.816.046.082		54.471.693.795	(11.655.647.713)	-21,40%
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi		394.888.344.632		396.383.327.407	(1.494.982.775)	-0,38%
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat		4.415.082		9.965.858	(5.550.876)	-55,70%
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara		20.741.278.073.360		25.892.826.814.440	(5.151.547.741.080)	-19,80%
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara		12.558.022.864.632		19.718.730.438.003	(7.160.707.573.371)	-36,31%
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga		1.525.271.498.390		1.249.063.747.310	276.207.751.080	22,11%
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas		2.345.256.561.192		1.891.027.836.171	454.228.725.021	24,02%
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak		90.505.319.283		68.373.867.540	22.131.451.743	32,37%
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel		2.918.853.139.180		2.014.421.160.336	904.431.978.844	44,90%
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah		513.014.600.220		574.628.561.705	(61.611.961.485)	-10,72%
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya		790.355.090.463		376.583.203.375	413.771.887.088	109,88%
4214	PENDAPATAN KHUTANAN	4.197.183.539.000	4.403.263.272.502	104,91%	5.007.257.006.149	(603.993.733.647)	-12,06%
42141	Pendapatan Dana Reboisasi		1.404.552.989.544		1.653.956.206.171	(249.403.216.627)	-15,08%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi		1.404.552.989.544		1.653.956.206.171	(249.403.216.627)	-15,08%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan		1.009.577.399.789		1.078.460.288.969	(68.882.889.180)	-6,39%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan		1.009.577.399.789		1.078.460.288.969	(68.882.889.180)	-6,39%
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)		63.121.473.400		153.271.617.074	(90.150.143.674)	-58,82%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 490 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/penurunan
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPHH)		63.121.473.400		153.271.617.974	(90.150.143.674)	-58,82%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan		1.926.011.409.769		2.121.568.893.935	(195.557.484.166)	-9,22%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan		1.926.011.409.769		2.121.568.893.935	(195.557.484.166)	-9,22%
4215	PENDAPATAN PERIKANAN	900.354.236.000	600.662.766.688	66,71%	521.936.215.435	78.726.551.253	15,08%
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan		10.669.946.160		6.727.835.681	3.942.110.479	58,59%
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap		10.491.009.160		6.173.718.151	4.317.291.009	69,83%
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		178.937.000		554.117.530	(375.180.530)	-67,71%
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan		589.992.820.528		515.208.379.754	74.784.440.774	14,52%
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan		589.992.820.528		515.208.379.754	74.784.440.774	14,52%
4216	PENDAPATAN PANAS BUMI	1.342.907.344.000	1.961.980.946.441	146,10%	1.932.540.462.691	29.440.483.750	1,52%
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi		1.889.276.706.760		1.895.246.863.593	(5.970.156.833)	-0,32%
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi		1.889.276.706.760		1.895.246.863.593	(5.970.156.833)	-0,32%
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi		29.389.605.004		33.610.889.750	(4.221.284.746)	-12,56%
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi		21.483.606.226		32.075.873.025	(10.592.266.799)	-33,02%
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi		7.905.998.778		1.535.016.725	6.370.982.053	415,04%
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi		43.314.634.677		3.682.709.348	39.631.925.329	1076,18%
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi		43.314.634.677		3.682.709.348	39.631.925.329	1076,18%
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)	65.000.000.000.000	66.080.543.541.337	101,66%	80.728.119.208.790	(14.645.575.665.453)	-18,14%
4221	PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN	65.000.000.000.000	44.598.933.053.589	68,61%	50.634.211.382.887	(6.035.278.328.498)	-11,92%
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN		43.888.106.053.599		48.773.695.752.482	(5.885.588.698.883)	-11,82%
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN		23.987.948.582.740		18.595.470.253.531	5.392.478.339.209	29,00%
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN		19.900.157.460.859		31.178.225.498.951	(11.278.068.038.092)	-36,17%
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan		710.827.000.000		860.515.629.605	(149.688.629.605)	-17,40%
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan		710.827.000.000		860.515.629.605	(149.688.629.605)	-17,40%
4222	PENDAPATAN DARI KND LAINNYA		21.481.610.487.738		30.091.907.824.703	(8.610.297.336.965)	-28,61%
42221	Pendapatan dari Surplus Lembaga		21.481.610.487.738		30.091.907.824.703	(8.610.297.336.965)	-28,61%
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia		21.481.610.487.738		30.091.907.824.703	(8.610.297.336.965)	-28,61%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 491 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/penurunan
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	50.000.280.182.000	69.308.327.882.188	138,62%	48.869.312.995.366	20.439.014.886.833	41,82%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum		61.460.957.814.443		40.698.144.354.523	20.762.813.458.920	51,02%
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat		33.948.496.986.500		33.307.807.529.959	640.689.456.541	1,92%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit		17.464.123.392.311		16.357.696.591.954	1.106.426.800.347	6,76%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		12.658.879.393.162		12.847.247.226.609	11.732.166.553	0,09%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi		446.358.981.181		530.882.505.266	(84.523.524.075)	-15,92%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan		55.000.000		161.068.800	(106.068.800)	-65,85%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian		63.989.891.678		303.698.692.268	(239.698.800.590)	-78,93%
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi		2.475.207.132.376		2.743.344.770.718	(268.137.638.342)	-9,77%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran		4.579.182		220.786.962	(216.207.780)	-97,93%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang		955.362.590		1.189.210.350	(233.847.760)	-19,66%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		838.823.254.010		723.376.677.022	115.446.576.988	15,96%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu		1.462.658.598.988		1.615.780.715.595	(153.122.116.607)	-9,48%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita		1.308.579.056.567		1.332.326.711.631	(23.747.655.064)	-1,78%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya		154.079.542.421		283.454.003.964	(129.374.461.543)	-45,64%
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat		25.443.176.871.730		5.003.672.214.239	20.439.504.757.491	408,49%
424133	Pendapatan Program Modal Venture		8.426.087.952		5.252.628.262	3.173.459.690	60,42%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral		265.833.746.346		315.069.336.520	(49.235.590.174)	-15,63%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah		42.882.630.116		25.454.026.350	17.428.603.766	68,47%
424136	Pendapatan Investasi		951.069.211.629		1.037.684.147.207	(86.614.935.578)	-8,35%
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional		3.908.193.732.847		3.807.055.917.983	301.137.814.864	8,35%
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		20.262.827.078.266			20.262.827.078.266	
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya		3.944.484.774		13.156.157.917	(9.211.673.143)	-70,02%
42414	Pendapatan dari pengelolaan BUMN pada Pengelola Barang		606.625.257.225		770.883.894.730	(164.258.637.505)	-21,31%
424141	Pendapatan dari pengelolaan BUMN pada Pengelola Barang		606.625.257.225		770.883.894.730	(164.258.637.505)	-21,31%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum		123.568.742.424		154.843.013.918	(31.274.271.494)	-20,20%
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang		43.183.931.862		89.369.579.648	(46.205.647.787)	-51,70%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 492 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang		518.896.191		198.211.372	320.684.819	161,79%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		20.353.429.482		17.222.959.992	3.130.469.490	18,18%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang		20.650.082.791		67.576.698.713	(46.926.615.922)	-69,44%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang				138.613.955	(138.613.955)	-100,00%
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		1.641.523.388		4.233.095.617	(2.591.572.219)	-61,22%
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang		80.404.810.582		65.473.434.269	14.931.376.293	22,81%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang		62.785.903.974		59.880.889.272	2.905.014.702	4,85%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		17.217.906.588		4.624.889.507	12.593.017.081	272,29%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang				967.655.490	(967.655.490)	-100,00%
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya - Uang		401.000.000			401.000.000	
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU		587.981.383.580		855.074.995.219	(267.093.611.639)	-31,24%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU		587.981.383.580		855.074.995.219	(267.093.611.639)	-31,24%
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		37.865.071.780		64.938.557.558	(27.073.485.779)	-41,89%
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		483.405.931.457		862.082.231.024	(198.656.299.567)	-30,01%
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah		88.710.380.343		128.074.206.636	(41.363.826.293)	-32,30%
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN		1.370.313.178.626		328.485.863.104	1.041.827.515.522	317,16%
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat		1.370.313.178.626		328.485.863.104	1.041.827.515.522	317,16%
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga		1.192.644.918.747		173.181.163.285	1.019.463.755.462	588,87%
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU		177.668.259.879		155.304.499.819	22.363.760.060	14,40%
4249	Pendapatan BLU Lainnya		5.765.508.763.126		6.832.764.968.602	(1.067.256.205.476)	-15,62%
42491	Pendapatan BLU Lainnya		5.684.375.480.353		6.700.931.131.892	(1.036.555.671.539)	-15,47%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		5.400.704.158.066		6.457.293.927.737	(1.056.589.771.671)	-16,36%
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolannya		499.200.971			499.200.971	
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU		2.888.625.462		583.725.327	2.304.900.135	394,52%
424914	Pendapatan Sektir Kurs Terealisasi - BLU		322.858.330		2.578.745	2.255.886.415	12612,22%
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		45.559.327.415		23.507.243.728	22.052.083.687	93,81%
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		4.522.815.957		30.206.906.626	(25.684.090.669)	-85,03%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 493 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU		2.209.523.518		2.855.526.484	(646.002.966)	-22,62%
424919	Pendapatan Lain-lain BLU		207.671.152.834		186.486.380.735	21.184.771.899	11,36%
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa		101.085.490.791		131.542.324.010	(30.536.833.219)	-23,21%
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah		11.190.470.545		8.488.775.977	2.701.694.568	31,83%
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		23.857.565.189		40.193.556.153	(16.335.990.964)	-40,64%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		37.759.706.943		55.331.546.499	(17.571.839.556)	-31,76%
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin		18.931.500.474		15.466.998.253	3.464.502.221	22,40%
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya		5.453.381.574		6.417.857.752	(964.476.178)	-15,03%
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya		3.812.866.066		5.643.589.376	(1.830.723.310)	-32,44%
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU		125.811.982		291.512.700	(165.700.718)	-56,84%
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU		34.250.000		55.000.000	(20.750.000)	-37,73%
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU		17.833.982			17.833.982	
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU				133.517.000	(133.517.000)	-100,00%
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU		73.728.000		102.995.700	(29.267.700)	-28,42%
425	PENDAPATAN PNPB LAINNYA	100.853.788.845.000	111.200.271.136.408	111,14%	124.503.827.232.432	(13.303.356.096.024)	-10,69%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	15.181.044.351.000	17.185.307.582.050	113,07%	32.429.131.188.137	(15.263.823.604.087)	-47,07%
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	12.062.031.538.000	13.539.707.459.461	112,25%	19.006.470.818.652	(5.466.763.359.191)	-28,78%
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara						
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	12.062.031.538.000	13.468.556.728.171	111,68%	18.580.975.151.710	(5.112.418.423.539)	-27,51%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Palelelangan		49.831.364.688		68.668.735.753	(18.837.371.065)	-27,43%
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni		4.000.016.780		1.452.205.712	2.547.811.068	175,44%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		17.319.349.822		339.727.022.946	(339.727.022.946)	-100,00%
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN		15.647.702.531				
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		3.721.822.537		1.671.647.291	2.050.175.246	122,51%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		3.948.035.294		341.531.328.482	(337.583.293.188)	-99,43%
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Blok Rumah Negara Golongan III		101.783.596.489		111.020.574.073	(9.236.977.584)	-8,32%
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan		4.861.677.545		10.831.948.400	(5.970.270.855)	-55,12%
			101.000.000			101.000.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 494 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		170.842.154.000		215.730.769.715	(44.888.615.715)	-20,81%
42513	Pendapatan dari Pemertaan BMN		513.738.203.370		522.960.362.436	(9.222.159.066)	-1,76%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		441.318.174.033		430.901.024.632	10.417.149.401	2,42%
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		996.070.785		4.427.843.340	(3.431.772.575)	-77,50%
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.395.464.844		4.427.118.712	(2.031.653.868)	-45,89%
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan		39.884.325.808		50.082.127.864	(10.197.802.056)	-20,36%
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan				30.788.411	(30.788.411)	-100,00%
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)		2.366.939.546		360.047.373	2.006.892.173	557,40%
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya		26.777.228.374		32.731.412.104	(5.954.183.730)	-18,19%
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang		412.885.184.853		626.866.552.049	(213.981.367.196)	-34,14%
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS		183.040.831.130		352.293.827.465	(169.252.996.335)	-48,04%
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B		127.784.000		10.953.567.000	(10.825.783.000)	-99,83%
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti		2.777.775.000		5.753.369.930	(2.975.594.930)	-51,72%
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain		394.969.388		1.721.611.720	(1.326.642.332)	-77,06%
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa		853.626.200		4.499.504.300	(3.645.878.100)	-81,03%
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dan Pengelola Barang		225.690.199.135		251.644.671.584	(25.954.472.449)	-10,31%
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		34.883.315.174		81.725.622.928	(46.842.307.754)	-57,32%
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		34.883.315.174		81.725.622.928	(46.842.307.754)	-57,32%
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	3.119.012.813.000	1.413.819.541.242	45,33%	10.530.277.359.314	(9.116.457.818.072)	-86,57%
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMD)	3.119.012.813.000	1.349.251.006.233	43,26%	5.604.477.690.308	(4.255.226.684.075)	-75,93%
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		64.568.535.009		4.925.799.669.006	(4.861.231.133.997)	-98,69%
42517	Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		988.963.627.379		1.319.299.142.276	(330.335.514.897)	-26,55%
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM		724.686.510.502		1.033.323.653.631	(308.637.143.129)	-29,87%
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa		239.032.982.093		285.666.685.044	(46.633.702.951)	-16,32%
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN		5.244.134.784		308.803.601	4.935.331.183	1596,21%
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM		13.846.524.410.853		18.366.375.054.747	(4.519.850.643.894)	-25,70%
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum		2.880.688.923.673		4.303.327.782.245	(1.422.638.858.572)	-33,06%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 495 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425211	Pendapatan Paspor		451.296.950.000		1.253.341.710.000	(802.044.760.000)	-63,99%
425212	Pendapatan Visa		228.088.321.928		406.729.595.455	(177.641.273.527)	-43,68%
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)		605.627.700.000		716.924.200.000	(111.296.500.000)	-15,52%
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya		52.946.700.000		182.197.521.707	(129.250.821.707)	-70,94%
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia		487.999.450.000		750.037.350.000	(262.037.900.000)	-34,94%
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum		220.362.824.484		238.882.867.249	(18.530.042.765)	-7,76%
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya		42.654.863.729		40.468.433.955	2.186.429.774	5,40%
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual		789.272.323.564		714.326.594.505	74.945.729.059	10,49%
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya		1.419.789.968		408.509.374	1.010.280.594	248,71%
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri		398.679.943.717		737.756.064.394	(339.076.120.677)	-45,96%
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri		75.845.274.019		300.888.401.352	(225.043.127.333)	-74,79%
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri		108.480.933.838		129.232.888.295	(20.751.954.457)	-16,06%
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran		139.377.582.957		157.602.960.540	(18.225.377.583)	-11,56%
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri		36.845.959.624		50.513.757.198	(13.667.797.572)	-27,08%
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri		8.297.828.286		13.032.788.858	(3.734.960.572)	-28,66%
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri		28.832.364.983		86.485.268.153	(57.652.903.160)	-66,66%
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi		570.140.874.539		738.384.144.329	(168.243.269.790)	-22,79%
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		245.930.000		453.775.000	(207.845.000)	-45,80%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan		2.873.481.000		2.728.044.000	145.447.000	5,33%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara		27.649.955.721		30.675.082.972	(3.025.127.251)	-9,86%
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara		3.208.869.572		3.306.854.563	(97.984.991)	-2,96%
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi		254.641.392		291.420.200	(36.778.808)	-12,62%
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan		92.516.447.012		95.941.361.611	(3.424.914.599)	-3,57%
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas		290.664.650.816		488.135.317.858	(177.470.666.842)	-37,91%
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya		44.774.830.863		70.856.062.920	(26.081.232.057)	-36,81%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		107.952.058.163		65.996.225.405	41.955.832.758	63,57%
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang		640.405.823.287		1.150.028.180.079	(609.622.356.792)	-53,01%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 496 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		253.027.454.018		208.172.274.861	44.855.179.157	21,55%
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		22.582.316.251		66.923.562.763	(44.341.246.512)	-66,26%
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		142.215.926.951		749.286.543.236	(606.070.616.285)	-80,99%
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang		9.925.927.845		5.523.390.703	4.402.537.142	79,71%
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi		4.242.280.237		4.067.467.388	174.812.849	4,30%
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi		58.292.617.206		78.164.266.761	(19.871.651.555)	-25,42%
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang		110.000.000		100.000.000	10.000.000	10,00%
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara		2.171.381.238		4.579.266.922	(2.407.907.684)	-52,58%
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		47.837.939.541		34.211.403.445	13.626.536.096	39,83%
42525	Pendapatan Perizinan		1.264.212.053.867		1.705.887.057.430	(441.675.004.363)	-25,89%
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing		1.112.731.807.308		1.562.679.096.600	(449.947.289.292)	-28,79%
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian		17.109.860.000		16.125.200.000	984.660.000	6,11%
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan		26.573.250.089		44.064.625.000	(17.491.374.911)	-39,68%
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan		68.014.250.001		49.776.000.000	18.238.250.001	36,94%
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		9.125.683.055		9.095.993.526	29.689.529	0,33%
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya		30.657.202.614		24.146.142.304	6.511.060.310	26,97%
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I		6.597.417.235.000		8.165.177.999.800	(1.567.760.764.800)	-19,20%
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)		488.739.635.000		662.022.775.000	(173.283.140.000)	-26,17%
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)		611.184.475.000		643.802.560.000	(32.618.085.000)	-5,07%
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		1.999.538.300.000		2.416.492.675.000	(416.954.375.000)	-17,25%
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		1.759.266.825.000		2.426.285.000.000	(667.018.175.000)	-27,49%
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		1.117.272.300.000		1.366.160.314.000	(248.888.014.000)	-18,22%
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi		27.912.200.000		29.462.750.000	(1.550.550.000)	-5,26%
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah		184.751.000.000		169.194.425.000	15.556.575.000	9,19%
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan		408.752.500.000		451.757.500.000	(43.005.000.000)	-9,52%
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II		854.364.965.215		959.273.823.322	(104.888.858.107)	-10,93%
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara		392.500.000		1.354.200.000	(961.700.000)	-71,02%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 497 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara		392.100.000		1.099.800.000	(707.700.000)	-64,36%
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian		220.293.045.000		304.062.795.000	(83.769.750.000)	-27,55%
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)		133.189.725.000		220.762.225.000	(87.592.500.000)	-39,68%
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman		24.714.500.000		29.633.095.000	(4.918.595.000)	-16,60%
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital		471.384.595.215		397.718.608.322	73.666.086.893	18,52%
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya		4.038.500.000		4.643.000.000	(604.500.000)	-13,02%
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi		540.614.692.355		606.540.203.948	(65.925.611.593)	-10,87%
425281	Pendapatan Akreditasi		28.698.136.022		37.130.370.000	(8.432.233.978)	-22,71%
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		680.408.620		1.275.790.950	(595.382.330)	-46,67%
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian		65.945.023.325		97.941.517.905	(31.996.494.580)	-32,67%
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan		14.524.495.157		24.719.552.313	(10.195.057.156)	-41,24%
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan		45.799.218.209		52.987.983.138	(7.188.764.929)	-13,57%
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum		7.674.872.000		9.799.166.896	(2.124.294.896)	-21,68%
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan		119.606.869.517		122.729.388.536	(3.122.517.019)	-2,54%
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika		191.703.842.000		182.769.738.300	8.934.103.700	4,89%
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya		85.981.727.505		77.186.698.110	(8.795.029.395)	-10,34%
4253	PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN		5.396.987.712.963		6.728.386.648.421	(1.331.398.935.458)	-19,79%
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan		2.297.548.113.551		3.007.631.953.650	(710.083.840.099)	-23,61%
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		314.996.579.888		310.473.901.765	4.522.678.123	1,46%
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)		1.509.854.718.999		2.004.913.987.324	(495.059.278.325)	-24,69%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan		331.702.519.829		422.332.391.494	(90.629.871.665)	-21,48%
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan		63.127.644.835		50.478.258.829	12.649.386.006	25,06%
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan		41.585.300.000		186.486.124.238	(144.900.824.238)	-77,70%
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan		36.281.350.000		32.947.280.000	3.334.070.000	10,12%
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan		195.367.640.022		198.358.994.030	(2.991.354.008)	-1,50%
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan		195.367.640.022		198.358.994.030	(2.991.354.008)	-1,50%
42533	Pendapatan Jasa Karantina		351.382.411.935		361.295.658.526	(9.913.246.591)	-2,75%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 498 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/penurunan
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan		277.462.493.803		282.423.147.523	(4.960.653.720)	-1,76%
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan		73.899.918.132		78.872.511.003	(4.972.592.871)	-6,30%
42534	Pendapatan Jasa Agraria		1.790.813.998.252		2.255.101.588.584	(464.288.470.332)	-20,59%
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan		1.790.812.275.252		2.255.050.745.584	(464.238.470.332)	-20,59%
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora		823.000		50.823.000	(50.000.000)	-98,38%
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan		761.898.449.203		907.998.471.831	(146.102.022.428)	-18,99%
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama		748.263.703.259		893.380.971.243	(135.117.267.984)	-15,30%
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya		13.632.745.944		24.617.500.388	(10.984.754.444)	-44,62%
4254	PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI		4.788.783.353.158		5.229.029.841.870	(440.246.288.712)	-8,42%
42541	Pendapatan Pendidikan		4.205.010.467.015		4.234.051.512.314	(29.641.045.299)	-0,70%
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan		68.430.767.843		77.814.031.824	(9.383.263.981)	-12,06%
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		3.907.988.972.359		3.880.258.521.182	27.730.451.167	0,71%
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat		54.209.545.906		64.809.654.774	(10.600.108.868)	-16,36%
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya		174.381.180.907		211.769.304.524	(37.388.123.617)	-17,66%
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia		185.587.786.527		471.750.913.878	(286.153.127.351)	-60,86%
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan		167.810.164.139		432.209.746.650	(264.399.582.511)	-61,17%
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya		17.787.622.388		39.541.167.228	(21.753.544.840)	-55,01%
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek		393.225.995.891		515.980.531.081	(122.754.535.190)	-23,79%
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek		63.663.176.792		96.697.907.922	(33.034.731.130)	-34,16%
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan		180.891.683.722		141.095.689.020	39.795.994.702	28,20%
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika		87.171.998.518		158.700.588.501	(71.528.589.983)	-45,07%
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek		18.221.057.830		16.285.033.806	1.936.024.024	11,83%
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan		24.603.800.619		29.271.262.669	(4.667.462.050)	-15,95%
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual		4.229.011.805		9.446.517.906	(5.217.506.101)	-55,23%
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya		16.445.266.805		64.483.531.257	(48.038.264.452)	-74,50%
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan		4.929.103.725		6.646.684.597	(1.717.580.872)	-25,84%
425451	Pendapatan Museum		765.673.000		3.280.582.500	(2.514.909.500)	-76,86%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 499 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/penurunan
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya		4.163.430.725		3.366.102.097	797.328.628	23,69%
4255	PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		28.186.588.049.245		25.903.218.006.612	2.282.368.042.633	8,81%
42551	Pendapatan Jasa Transportasi		6.053.993.240.597		6.965.694.762.838	(911.701.522.241)	-13,09%
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		1.136.547.385.000		1.327.042.275.000	(190.494.890.000)	-14,35%
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge		544.520.182.917		754.538.627.463	(210.018.444.546)	-27,83%
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan		2.284.086.549.888		2.377.829.710.302	(93.743.160.414)	-3,94%
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran		573.040.644.803		583.366.683.379	(10.326.048.576)	-1,77%
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan		250.917.198.787		258.654.687.547	(5.737.488.760)	-2,24%
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan		189.352.834.441		334.869.823.037	(145.516.988.596)	-43,45%
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan		401.952.937.112		600.916.462.942	(198.963.525.830)	-33,11%
425518	Pendapatan dari Komisi Bidang Transportasi		583.968.621.578		628.949.891.930	(44.981.270.352)	-7,15%
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya		89.606.886.071		101.526.591.238	(11.919.705.167)	-11,74%
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika		21.884.424.385.636		18.767.884.812.439	3.126.439.573.197	16,66%
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio		20.706.918.508.536		17.805.970.108.203	3.100.948.400.333	17,61%
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi		1.118.429.585.689		1.098.145.698.318	20.283.887.371	1,85%
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran		57.614.162.420		53.817.359.746	3.796.802.674	7,05%
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos		822.000.000		860.002.500	(38.002.500)	-4,42%
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal		5.289.977.070		4.364.165.031	925.812.039	21,21%
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia		1.528.938.921		1.437.450.524	91.488.397	6,38%
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya		3.821.213.000		3.390.028.117	431.184.883	12,72%
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik		237.188.423.012		169.538.431.335	67.629.991.677	39,89%
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI		27.973.661.786		23.325.821.008	4.648.040.780	19,93%
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI		8.750.000		23.650.000	(14.900.000)	-63,00%
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI		185.610.646.053		99.720.388.759	85.890.257.294	86,13%
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI		23.575.365.173		46.488.771.570	(22.893.406.397)	-49,27%
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA		304.133.238.159		429.802.216.880	(125.768.980.731)	-29,28%
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		89.463.033.718		208.710.655.182	(111.247.621.464)	-55,43%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 500 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425611	Pendapatan Wisata Alam		46.626.912.347		163.397.316.441	(116.770.404.094)	-71,46%
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		23.435.819.408		22.813.875.898	621.943.510	2,73%
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya		19.400.301.963		14.499.462.823	4.900.839.140	33,80%
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan		40.438.401.258		30.821.873.691	9.616.527.567	31,20%
425621	Pendapatan Jasa Palebuan Perikanan		39.860.456.258		27.586.904.928	12.273.551.330	44,49%
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya		577.945.000		3.234.968.763	(2.657.023.763)	-82,13%
42569	Pendapatan Jasa Lainnya		174.231.801.183		198.369.688.037	(24.137.886.854)	-12,17%
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan		3.951.942.374		7.061.872.692	(3.109.930.318)	-44,04%
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi		32.362.198.697		43.416.365.465	(11.054.166.768)	-25,46%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya		137.917.660.112		147.891.449.880	(9.973.789.768)	-6,74%
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN		22.980.902.226.353		19.333.882.339.344	3.647.019.887.009	18,86%
42571	Pendapatan Bunga		1.738.056.334.505		1.825.320.700.269	(87.264.365.764)	-4,78%
425713	Pendapatan Bunga dari Pinjaman dan Pemberian Pinjaman		1.414.878.784.678		1.427.160.584.683	(12.281.800.015)	-0,86%
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah				34.297.104.173	(34.297.104.173)	-100,00%
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program		1.169.801			1.169.801	
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutang		321.986.818.123		363.779.634.791	(41.793.016.668)	-11,49%
425719	Pendapatan Bunga Lainnya		1.189.561.903		83.176.612	1.106.385.291	1330,16%
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption				5.807.000.000	(5.807.000.000)	-100,00%
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang				5.807.000.000	(5.807.000.000)	-100,00%
42573	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara		10.819.795.285.000		8.713.038.583.942	2.106.756.711.058	24,18%
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah		4.585.718.321.300		6.467.340.854.900	(1.881.622.533.600)	-29,09%
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah		6.234.076.973.700		2.245.697.729.042	3.988.379.244.658	177,60%
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara		200.631.019.737		118.681.119.410	81.949.900.327	69,05%
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur		74.339.065.475		109.490.920.300	(35.151.854.825)	-32,10%
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo		2.019.076.533		9.190.189.110	(7.171.122.577)	-78,03%
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit		124.272.877.729			124.272.877.729	
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs		1.843.194.491.548		12.607.030.733	1.830.587.460.815	14520,37%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 501 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN		1.843.093.474.875		12.344.438.860	1.830.749.035.915	14830,56%
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan		101.013.488		262.591.562	(161.578.074)	-61,53%
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D		3.185		211	2.974	1409,48%
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening		425.899.686.878		232.120.267.593	193.779.419.285	83,48%
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan		27.246.877		1.196.378	26.050.499	2177,45%
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman		318.415.000		621.867.500	(303.452.500)	-48,80%
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman		52.556.762.832		62.068.077.051	(9.511.314.219)	-15,32%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		151.180.801.451		169.381.376.368	(18.180.574.917)	-10,73%
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening		221.816.460.718		67.750.296	221.748.710.422	327302,94%
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara		7.357.805.092.258		7.736.672.109.435	(378.867.017.177)	-4,90%
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum		370.871.747.945		341.764.926.905	29.106.821.040	8,52%
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		784.362.529.745		334.653.594.490	449.708.935.255	134,38%
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia		6.202.570.814.568		7.060.253.588.040	(857.682.773.472)	-12,15%
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara		565.743.212.949		660.546.658.421	(94.803.445.472)	-14,35%
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa		1.555.014.720		1.720.573.299	(165.558.579)	-9,62%
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		367.163.631.212		419.520.706.655	(52.357.075.443)	-12,48%
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		85.706.265.700		75.207.825.916	10.498.439.784	13,96%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pengadaan		84.004.706.550		96.652.758.212	(12.648.052.662)	-13,09%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		27.313.594.767		67.444.793.339	(40.131.198.572)	-59,50%
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		29.777.093.478		29.088.869.541	688.223.937	2,37%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.		15.090.834.156		14.941.008.384	148.825.772	1,00%
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara		2.067.900.643		1.021.552.126	1.046.348.517	102,43%
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga		12.618.358.679		13.126.309.031	(507.950.352)	-3,87%
4258	PENDAPATAN DENDA		503.790.184.112		614.389.891.175	(110.599.727.063)	-18,00%
42581	Pendapatan Denda I		459.876.608.867		417.029.576.247	42.847.032.620	10,27%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		420.418.065.013		372.701.521.461	47.716.543.552	12,80%
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		37.369.898.638		38.563.210.702	(1.193.312.064)	-3,09%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 502 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan		1.313.400.000		387.200.000	926.200.000	238,20%
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA		1.226.586			1.226.586	
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		30.567.703		7.544.393	23.023.310	305,17%
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi		635.131.479		5.013.364.234	(4.378.232.755)	-87,33%
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas		20.401.520		89.629.117	(69.227.597)	-77,24%
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi		87.817.928		287.106.340	(179.188.412)	-67,09%
42582	Pendapatan Denda II		41.889.380.736		188.899.072.767	(148.289.692.021)	-78,89%
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyakuran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyakur Gaji		151.449			151.449	
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman		274.478.770		70.201.415	204.277.355	290,99%
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program		923.608.306		1.816.802.234	(893.193.928)	-49,16%
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik		208.298.248		386.907.790	(178.609.542)	-46,16%
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)				3.894.939	(3.894.939)	-100,00%
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III		308.582.825		768.954.214	(460.371.389)	-59,87%
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		39.894.261.138		186.852.312.165	(146.958.051.027)	-78,05%
42583	Pendapatan Denda III		2.304.174.509		7.461.242.171	(5.157.067.662)	-89,12%
425839	Pendapatan Denda Lainnya		2.304.174.509		7.461.242.171	(5.157.067.662)	-89,12%
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN		18.228.276.401.515		15.469.312.249.236	2.758.964.152.279	17,84%
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Laku I		9.563.345.512.882		14.879.041.347.105	(5.315.695.834.223)	-35,73%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Laku		119.073.722.482		353.185.642.078	(234.091.919.594)	-86,28%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku		1.338.665.346.400		1.648.403.305.948	(309.737.959.548)	-18,79%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Laku		866.387.498.612		1.261.227.358.017	(294.859.859.405)	-23,38%
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Laku		980.759.311.703		1.178.030.618.466	(197.271.306.763)	-16,75%
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Laku		28.313.526.967		73.285.930.819	(44.972.403.852)	-61,37%
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Laku		2.854.209.137.424		1.071.160.235.179	1.783.048.902.245	166,46%
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Laku		11.423.596.898		20.573.663.715	(9.150.067.017)	-44,47%
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Laku		3.264.533.372.586		9.273.194.592.887	(6.008.661.220.291)	-84,80%
42582	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Laku II		237.882.685.505		308.842.085.674	(70.959.400.169)	-22,98%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 503 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/penurunan
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL		237.882.885.505		308.842.085.674	(70.959.400.169)	-22,98%
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan		18.082.294.056		24.230.258.247	(6.147.962.191)	-25,37%
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS		15.374.604.619		17.114.436.445	(1.739.831.826)	-10,17%
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan		1.947.860.928		6.260.237.939	(4.312.377.011)	-68,89%
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri		602.788.061		631.281.364	(28.493.303)	-4,51%
425934	Pendapatan Setoran dan Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara		157.040.448		224.300.489	(67.260.051)	-29,99%
42598	Pendapatan Lain-Lain I		7.948.511.344.000		476.204.460	7.948.035.139.540	1669038,37%
425982	Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun		7.948.205.994.000			7.948.205.994.000	
425983	Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye		305.350.000		476.204.460	(170.854.460)	-35,88%
42599	Pendapatan Lain-Lain II		460.454.565.072		256.722.355.750	203.732.209.322	79,36%
422212	Pendapatan dari Surplus Otonias Jasa Keuangan		110.135.193		795.220.944	(685.085.751)	-86,15%
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		64.886.154.407		5.448.196.082	59.436.958.325	1080,75%
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak		1.042.933.741		171.834.472	871.099.269	506,94%
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN		568.025.000		670.320	567.354.680	84639,38%
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan		25.600		79.508.146	(79.482.546)	-99,97%
425998	Pendapatan dari Retur SP2D		12.986.839.337		10.936.423.836	2.050.415.501	18,75%
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		380.860.451.794		239.289.501.950	141.570.949.844	59,18%
43	PENDAPATAN HIBAH	1.300.000.000.000	18.832.815.220.624	1448,68%	5.497.343.992.921	13.335.471.227.703	242,58%
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	1.300.000.000.000	18.832.815.220.624	1448,68%	5.497.343.992.921	13.335.471.227.703	242,58%
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		16.998.016.624.842		3.673.078.332.679	13.324.938.291.963	362,77%
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang		16.998.016.624.842		3.673.078.332.679	13.324.938.291.963	362,77%
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan		106.054.090.800		65.693.587.281	40.360.493.509	61,44%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha		136.446.170.066		292.430.943.086	(155.984.773.000)	-53,34%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah		16.677.597.815.474		3.312.864.812.302	13.364.733.203.172	403,42%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya		77.918.548.282		2.089.180.000	75.829.368.282	3629,62%
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.300.000.000.000	1.834.798.595.982	141,14%	1.824.265.660.242	10.532.935.740	0,58%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	1.300.000.000.000	533.880.884.575	41,07%	591.671.964.284	(57.791.079.708)	-9,77%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 504 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	1.300.000.000.000	152.509.083.261	11,73%	284.221.022.174	(131.711.938.913)	-46,34%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral		381.371.801.314		305.016.747.985	76.355.053.329	25,03%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya				2.434.194.125	(2.434.194.125)	-100,00%
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang		1.300.917.711.407		1.232.593.695.958	68.324.015.449	5,54%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan		421.800.000			421.800.000	
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral		490.258.603.112		686.083.404.317	(195.824.801.205)	-28,54%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral		671.422.064.921		514.852.423.425	156.569.641.496	30,41%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya		138.815.243.374		31.657.868.216	107.157.375.158	339,49%
Grand Total		1.699.948.459.678.000	1.647.783.342.188.990	96,93%	1.960.633.543.585.990	(312.850.241.397.003)	-15,96%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 505 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.B

**REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2020**

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
Non Perbankan (Minoritas)		
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	27.072.840.908
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	27.088.902.500
3	PT Socfin Indonesia	29.532.092.400
4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.632
5	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	3
6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	42
7	PT Perkebunan Nusantara IV	4.414.343.300
8	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	129.694
9	PT Jasa Raharja (Persero)	156.000
10	Perum Jaminan Kredit Indonesia	56.554
Jumlah I		88.108.523.033
II Pembayaran Dividen Interim		
1	PT Socfin Indonesia	31.835.631.600
Jumlah II		31.835.631.600
III Perbankan (Mayoritas)		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.774.153.468.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.893.567.936.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.307.671.406.731
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12.555.782.009
Jumlah III		23.987.948.592.740
IV Non Perbankan (Mayoritas)		
1	PT Pertamina (Persero)	8.500.000.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.950.281.728.753
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	973.500.000.000
4	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	122.023.822.510
5	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	77.249.117.305
6	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	708.218.661.061
7	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	524.815.825.889
8	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	83.958.445.763
9	PT Biofarma (Persero)	71.187.955.348
10	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	60.050.953.594
11	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	297.314.781.801
12	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	30.975.850.789
13	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	4.650.521.000
14	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	107.005.744.428
15	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	33.854.377.955
16	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	16.934.781.205
17	Perum Jasa Tirta II	20.764.222.676



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 506 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 1.B

**REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2020**

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
18	Perum Jasa Tirta I	17.669.777.501
19	PT Sucofindo (Persero)	49.337.320.926
20	PT Surveyor Indonesia (Persero)	14.047.751.110
21	PT Kawasan Industri Makassar	1.145.953.248
22	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	73.000.000.000
23	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	11.015.000.000
24	Perum Perhutani	20.594.000.000
25	Kawasan Industri Medan	9.246.913.364
Jumlah IV		19.778.843.306.226
V	Pembayaran Piutang Sebelum TA 2020	
1	PT Inhutani V	300.000.000
2	PT Bina Karya	70.000.000
3	Perum Perumnas	1.000.000.000
Jumlah V		1.370.000.000
VI	BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	500.000.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	100.000.000.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	110.827.000.000
Jumlah VI		710.827.000.000
JUMLAH I + II + III + IV + V		44.598.933.053.599
PENDAPATAN DARI SURPLUS BANK INDONESIA		21.481.610.487.738
JUMLAH TOTAL		66.080.543.541.337



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 507 -

LAMPIRAN 2

LRA BELANJA

PEMERINTAH PUSAT

TA 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 508 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	576.139.182.000	800.513.132.000	702.440.692.102	(98.072.439.898)	87,75%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	148.263.800.000	183.427.232.000	164.615.869.638	(18.811.362.362)	89,74%
02	MAJELIS	427.875.382.000	617.085.900.000	537.824.822.464	(79.261.077.536)	87,16%
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.897.999.780.000	5.128.671.829.000	4.821.602.269.373	(307.069.559.627)	94,01%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.206.318.477.000	1.280.038.081.000	1.245.675.133.454	(34.362.947.546)	97,32%
02	DEWAN	3.691.681.303.000	3.848.633.748.000	3.575.927.135.919	(272.706.612.081)	92,91%
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.457.674.941.000	3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	(160.359.107.916)	95,54%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.457.674.941.000	3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	(160.359.107.916)	95,54%
005	MAHKAMAH AGUNG	9.854.906.030.000	9.855.005.915.000	9.408.446.508.251	(446.559.406.749)	95,45%
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	9.266.526.824.000	9.258.025.882.000	8.822.787.974.703	(433.237.907.297)	95,32%
02	KEPANITERAAN	169.033.639.000	170.762.255.000	169.036.146.316	(1.726.108.684)	98,99%
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	138.938.623.000	138.938.623.000	133.486.673.583	(5.451.949.417)	96,08%
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	78.411.619.000	87.283.830.000	86.027.451.650	(1.256.378.350)	98,56%
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA	26.251.651.000	26.251.651.000	24.450.948.675	(1.800.702.325)	93,14%
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN	143.771.338.000	143.771.338.000	141.373.866.706	(2.397.471.294)	98,33%
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	31.972.336.000	31.972.336.000	29.283.446.618	(2.688.889.382)	91,59%
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.661.907.661.000	6.996.809.443.000	6.880.109.600.910	(116.699.842.090)	98,33%
01	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.661.907.661.000	6.996.809.443.000	6.880.109.600.910	(116.699.842.090)	98,33%
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.633.673.716.000	2.222.461.374.000	2.040.834.574.217	(181.626.799.783)	91,82%
01	SEKRETARIAT NEGARA	880.788.626.000	1.297.811.921.000	1.214.618.060.391	(83.193.860.609)	93,59%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 509 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
03	SEKRETARIAT PRESIDEN	360.993.715.000	437.708.319.000	390.364.174.458	(47.344.144.542)	89,18%
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	157.817.951.000	144.324.099.000	119.076.839.662	(25.247.259.338)	82,51%
05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	23.309.304.000	23.933.985.000	23.831.959.195	(102.025.805)	99,57%
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	59.996.255.000	97.010.396.000	75.804.799.487	(21.205.596.513)	78,14%
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	29.319.615.000	29.103.107.000	28.262.195.188	(840.911.812)	97,11%
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	45.842.457.000	101.412.918.000	100.405.646.847	(1.007.271.153)	99,01%
10	KANTOR STAF PRESIDEN	75.605.793.000	91.158.629.000	88.270.898.989	(2.885.730.011)	96,83%
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.471.591.078.000	2.778.026.233.000	2.746.593.074.849	(31.433.158.151)	98,87%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	928.023.279.000	979.525.830.000	966.469.629.728	(13.056.200.272)	98,67%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	49.937.754.000	54.780.543.000	54.441.110.808	(339.432.192)	99,38%
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	189.173.691.000	193.629.347.000	193.167.776.060	(461.570.940)	99,76%
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	74.434.546.000	74.434.546.000	73.958.090.929	(476.455.071)	99,36%
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	158.878.714.000	133.524.506.000	129.721.177.720	(3.803.328.280)	97,15%
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	188.010.165.000	202.468.886.000	200.074.540.934	(2.394.345.066)	98,82%
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	63.517.364.000	63.017.364.000	62.699.885.667	(317.478.343)	99,50%
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	539.112.970.000	803.890.983.000	799.761.415.021	(4.129.567.979)	99,49%
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	51.790.866.000	52.590.866.000	52.066.166.073	(524.699.927)	99,00%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	47.862.486.000	46.862.486.000	46.013.421.275	(849.064.725)	98,19%
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	180.849.243.000	173.300.876.000	168.219.860.644	(5.081.015.356)	97,07%
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.662.459.507.000	7.490.563.031.000	7.143.103.684.774	(347.459.346.226)	95,36%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 510 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.666.350.035.000	6.545.338.784.000	6.228.716.672.980	(316.622.111.020)	95,16%
02	DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	46.687.731.000	46.287.731.000	45.218.208.016	(1.069.522.984)	97,69%
03	DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA	43.132.599.000	39.972.599.000	38.648.611.514	(1.323.987.486)	96,69%
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN	39.291.103.000	35.803.151.000	34.066.420.063	(1.736.730.937)	95,15%
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	609.934.363.000	606.701.763.000	603.595.514.952	(3.106.248.048)	99,49%
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	59.220.320.000	54.401.263.000	49.373.377.380	(5.027.885.620)	90,76%
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	30.337.683.000	26.867.683.000	26.730.414.935	(137.268.065)	99,49%
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	118.169.428.000	92.198.812.000	74.703.435.629	(17.495.376.371)	81,02%
09	INSPEKTORAT JENDERAL	25.480.865.000	20.560.865.000	20.327.664.937	(233.200.063)	98,87%
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	23.875.380.000	22.430.380.000	21.723.364.368	(707.015.632)	96,85%
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	117.909.050.388.000	144.207.914.335.000	136.871.429.771.736	(7.336.484.563.264)	94,91%
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	18.267.119.850.000	38.440.734.525.000	34.623.722.097.970	(3.817.012.427.030)	90,07%
21	MARKAS BESAR TNI	8.480.227.232.000	10.663.596.732.000	10.372.691.927.117	(290.904.804.883)	97,27%
22	MARKAS BESAR TNI AD	56.810.205.914.000	59.453.809.247.000	56.854.867.280.650	(2.598.941.966.350)	95,63%
23	MARKAS BESAR TNI AL	19.648.245.599.000	20.230.494.775.000	19.782.421.028.668	(448.073.746.332)	97,79%
24	MARKAS BESAR TNI AU	14.703.251.773.000	15.419.279.056.000	15.237.727.437.331	(181.551.618.669)	98,82%
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	13.151.324.014.000	13.316.389.571.000	12.399.546.538.086	(916.843.032.914)	93,11%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.950.288.471.000	3.824.578.224.000	3.793.728.406.003	(30.849.817.997)	99,19%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	40.351.639.000	40.351.639.000	39.241.200.164	(1.110.438.836)	97,25%
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	656.126.286.000	658.150.387.000	455.684.459.855	(202.465.927.145)	69,24%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 511 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	5.588.051.879.000	5.666.211.858.000	5.556.703.938.014	(109.507.919.986)	98,07%
06	DITJEN IMIGRASI	2.248.013.429.000	2.287.096.865.000	1.752.315.595.441	(534.781.269.559)	76,62%
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	212.431.838.000	379.609.753.000	352.149.150.377	(27.460.602.623)	92,77%
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.732.211.000	41.732.211.000	40.937.761.219	(794.449.781)	98,10%
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	40.582.351.000	41.851.594.000	40.964.340.210	(887.253.790)	97,88%
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	105.187.810.000	106.552.521.000	103.707.365.689	(2.845.155.311)	97,33%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	37.230.110.000	36.375.008.000	36.004.793.098	(370.214.902)	98,98%
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	231.347.990.000	233.879.511.000	228.109.528.016	(5.768.982.984)	97,53%
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	39.025.438.102.000	65.720.685.696.000	62.083.004.306.573	(3.637.681.389.427)	94,48%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	19.759.796.843.000	20.250.501.149.000	18.216.701.551.594	(2.033.799.597.406)	89,96%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	87.847.130.000	87.847.130.000	75.220.769.748	(12.626.360.252)	85,63%
03	DITJEN ANGGARAN	122.250.716.000	122.250.716.000	118.364.523.299	(3.886.192.701)	96,82%
04	DITJEN PAJAK	6.543.681.055.000	6.643.681.055.000	6.372.169.760.131	(271.511.294.869)	95,91%
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	3.171.184.516.000	3.596.197.935.000	3.453.257.359.007	(142.940.575.993)	96,03%
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	81.342.606.000	81.342.606.000	71.613.100.067	(9.729.505.933)	88,04%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO	88.818.575.000	93.448.240.000	87.675.978.114	(5.772.261.886)	93,82%
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	7.766.510.841.000	33.405.636.045.000	32.413.176.548.181	(992.459.496.819)	97,03%
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	856.295.969.000	715.572.969.000	657.670.943.049	(57.902.025.951)	91,91%
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	556.549.579.000	533.047.579.000	457.953.218.886	(75.094.360.114)	85,91%
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	103.805.317.000	103.805.317.000	76.978.687.877	(26.826.629.123)	74,16%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 512 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
13	LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW	87.354.955.000	87.354.955.000	82.221.866.620	(5.133.088.380)	94,12%
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	14.049.785.814.000	15.886.240.106.000	15.188.739.413.432	(697.500.692.568)	95,61%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.814.543.174.000	1.694.234.641.000	1.583.137.035.101	(111.097.605.899)	93,44%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	79.581.831.000	79.581.831.000	76.171.876.625	(3.409.954.375)	95,72%
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.356.143.498.000	4.765.343.498.000	4.511.862.098.135	(253.481.399.865)	94,68%
04	DITJEN HORTIKULTURA	556.146.411.000	620.481.902.000	578.873.473.965	(41.608.428.035)	93,29%
05	DITJEN PERKEBUNAN	812.670.698.000	1.000.057.871.000	907.956.733.977	(92.101.137.023)	90,79%
06	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.219.759.789.000	1.299.595.278.000	1.253.144.887.704	(46.450.390.296)	96,43%
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	1.932.440.445.000	2.925.084.980.000	2.832.574.253.081	(92.490.726.919)	96,84%
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.457.118.372.000	1.060.400.650.000	1.035.260.364.449	(25.140.285.551)	97,63%
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.379.187.543.000	1.057.850.961.000	1.043.140.666.542	(14.710.294.458)	98,61%
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	475.903.216.000	475.903.216.000	466.931.810.211	(8.971.405.789)	98,11%
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	966.290.837.000	907.725.278.000	899.686.213.642	(8.039.064.358)	99,11%
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.093.175.026.000	2.107.801.309.000	1.975.729.108.365	(132.072.200.635)	93,73%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	164.886.421.000	174.092.740.000	162.355.353.266	(11.737.386.734)	93,26%
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	54.098.389.000	54.098.389.000	46.067.117.610	(8.031.271.390)	85,15%
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	66.285.336.000	62.785.336.000	61.334.612.089	(1.450.723.901)	97,69%
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	66.698.469.000	63.698.469.000	60.299.348.982	(3.399.120.018)	94,66%
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	286.846.391.000	324.596.391.000	315.773.566.719	(8.822.824.281)	97,28%
06	INSPEKTORAT JENDERAL	30.111.422.000	30.111.422.000	29.125.573.823	(985.848.177)	96,73%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 513 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	568.237.420.000	562.942.220.000	496.187.719.114	(66.754.500.886)	88,14%
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	101.972.213.000	100.472.213.000	94.305.207.014	(6.167.005.986)	93,86%
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	754.038.965.000	735.004.129.000	710.280.609.738	(24.723.519.262)	96,64%
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.201.412.633.000	6.242.113.848.000	5.871.880.036.293	(370.233.811.707)	94,07%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	409.531.371.000	387.082.446.000	379.908.489.765	(7.173.956.235)	98,15%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	149.061.262.000	120.657.859.000	111.056.568.611	(9.601.290.389)	92,04%
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	1.779.700.589.000	2.013.617.820.000	1.953.482.587.046	(60.135.252.954)	97,01%
05	DITJEN KETENAGALISTRIKAN	133.666.727.000	125.581.148.000	123.746.461.863	(1.834.684.137)	98,54%
06	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA	490.940.242.000	445.992.312.000	441.594.889.959	(4.397.422.041)	99,01%
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	51.734.671.000	49.050.204.000	46.832.553.114	(2.217.650.886)	95,48%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	573.142.750.000	592.968.246.000	503.995.186.169	(88.973.059.831)	85,00%
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	643.416.928.000	608.461.929.000	574.954.612.758	(33.507.316.242)	94,49%
13	BADAN GEOLOGI	814.044.798.000	767.681.551.000	707.585.256.876	(60.096.294.124)	92,17%
14	BPH MIGAS	249.700.000.000	249.700.000.000	223.072.226.266	(26.627.773.734)	89,34%
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	827.196.575.000	803.528.011.000	734.304.353.157	(69.223.657.843)	91,39%
16	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	79.276.720.000	77.792.324.000	71.346.870.709	(6.445.453.291)	91,71%
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	32.745.701.301.000	36.321.164.960.000	34.717.825.579.891	(1.603.339.380.109)	95,59%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	608.078.606.000	597.504.566.000	589.863.661.979	(7.640.904.021)	98,72%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	89.087.483.000	86.587.483.000	85.469.610.455	(1.117.872.545)	98,71%
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	5.664.106.959.000	5.748.848.778.000	5.631.173.929.193	(117.674.848.807)	97,95%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 514 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8.999.716.035.000	9.911.938.562.000	9.513.422.842.201	(398.515.719.799)	95,98%
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	8.120.807.171.000	5.806.575.875.000	5.481.792.247.764	(324.783.627.236)	94,41%
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	7.860.229.196.000	10.944.517.605.000	10.271.105.992.183	(673.411.612.817)	93,85%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	163.660.744.000	157.347.077.000	155.444.975.066	(1.902.101.934)	98,79%
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	3.021.179.217.000	2.840.208.124.000	2.764.482.039.080	(75.727.084.920)	97,33%
13	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	218.835.890.000	227.635.890.000	225.070.281.970	(2.565.608.030)	98,87%
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	70.718.123.434.000	86.386.047.573.000	79.061.797.338.948	(7.324.250.234.052)	91,52%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	22.081.627.145.000	34.145.468.261.000	30.894.234.132.631	(3.251.234.128.369)	90,48%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	185.402.955.000	185.402.955.000	169.643.631.744	(15.759.323.256)	91,50%
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	5.069.637.405.000	4.812.589.293.000	4.675.871.795.073	(136.717.497.927)	97,16%
05	DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	133.964.454.000	144.673.267.000	140.710.035.493	(3.963.231.507)	97,26%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	683.792.559.000	633.292.559.000	536.219.861.394	(97.072.697.606)	84,67%
13	BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN	418.162.180.000	385.162.180.000	352.864.488.030	(32.297.671.970)	91,61%
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.394.431.152.000	1.327.431.152.000	1.239.607.365.702	(87.823.786.298)	93,38%
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.518.394.435.000	2.236.061.732.000	2.131.732.037.567	(104.329.694.433)	95,33%
17	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	31.617.158.059.000	35.887.814.203.000	32.885.032.852.127	(3.002.781.350.873)	91,63%
18	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI	6.617.553.110.000	6.628.151.991.000	6.035.881.139.187	(592.270.851.813)	91,06%
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	78.506.724.870.000	107.033.608.465.000	102.207.399.746.493	(4.826.208.718.507)	95,49%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	50.442.594.268.000	51.171.377.446.000	50.240.067.587.738	(931.309.858.262)	98,18%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	84.965.935.000	81.480.999.000	78.736.761.553	(2.744.237.447)	96,63%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 515 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
03	DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT	893.180.904.000	912.278.290.000	885.781.937.849	(26.496.352.151)	97,10%
04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	16.484.082.226.000	37.415.416.049.000	34.474.945.198.042	(2.940.470.850.958)	92,14%
05	DITJEN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.576.337.668.000	4.203.943.210.000	3.838.076.301.658	(365.866.908.342)	91,30%
07	DITJEN Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2.792.619.132.000	4.182.277.051.000	4.054.663.877.758	(127.613.173.242)	96,95%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	538.155.166.000	582.506.013.000	523.522.461.686	(58.983.551.314)	89,87%
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	5.894.809.570.000	8.484.329.407.000	8.111.605.620.209	(372.723.786.791)	95,61%
025	KEMENTERIAN AGAMA	62.411.389.983.000	70.570.581.962.000	67.984.181.158.634	(2.586.400.803.366)	96,34%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.837.389.455.000	1.934.744.602.000	1.887.379.372.478	(47.365.229.522)	97,55%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	141.265.446.000	135.213.119.000	133.932.403.883	(1.280.715.117)	99,05%
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5.515.587.545.000	5.570.128.422.000	5.441.390.758.406	(128.737.663.594)	97,69%
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	49.425.476.216.000	57.366.826.574.000	55.302.157.660.838	(2.064.668.913.362)	96,40%
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.704.235.017.000	1.747.440.937.000	1.695.098.286.095	(52.342.650.905)	97,00%
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	843.263.864.000	848.175.849.000	809.088.961.009	(40.086.887.991)	95,28%
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	712.091.838.000	706.064.290.000	681.927.851.222	(24.136.438.778)	96,58%
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	244.310.235.000	239.567.545.000	232.442.299.845	(7.125.245.155)	97,03%
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	1.366.359.265.000	1.410.085.537.000	1.204.214.917.073	(205.870.619.927)	85,40%
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	489.297.220.000	478.597.220.000	465.625.970.900	(12.971.249.100)	97,29%
12	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	32.113.882.000	132.737.867.000	130.922.677.085	(1.815.189.915)	98,63%
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.479.798.847.000	34.885.914.698.000	34.246.307.050.046	(639.607.647.954)	98,17%
01	SEKRETARIS JENDERAL	261.218.597.000	261.218.597.000	253.063.419.501	(8.155.177.499)	96,88%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 516 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
02	INSPEKTUR JENDERAL	58.274.529.000	58.274.529.000	55.965.696.247	(2.308.832.753)	96,04%
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	577.506.190.000	1.087.566.930.000	1.054.546.348.651	(33.019.581.349)	96,96%
05	DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	143.814.024.000	29.991.877.767.000	29.621.251.090.043	(370.626.676.957)	98,76%
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN	167.712.760.000	190.701.535.000	177.078.335.476	(13.623.199.524)	92,86%
11	BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	92.675.186.000	92.675.186.000	91.481.880.892	(1.193.305.108)	98,71%
13	DIRJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	3.178.595.561.000	3.203.601.154.000	2.992.920.279.236	(210.680.874.764)	93,42%
027	KEMENTERIAN SOSIAL	104.440.803.730.000	134.171.889.274.000	130.288.443.238.820	(3.883.446.035.180)	87,11%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	340.586.591.000	405.637.271.000	392.155.995.237	(13.481.275.763)	96,68%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	32.550.770.000	32.550.770.000	31.824.447.870	(726.322.130)	97,77%
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	261.757.849.000	5.695.998.226.000	5.685.852.047.219	(10.146.178.781)	99,82%
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	893.764.729.000	895.793.030.000	850.643.474.141	(45.149.555.859)	94,96%
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	42.542.073.615.000	46.216.528.775.000	46.161.541.297.254	(54.987.477.746)	99,88%
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	59.993.150.028.000	80.552.568.002.000	76.808.991.707.799	(3.743.574.294.201)	95,35%
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL	377.020.148.000	372.815.200.000	357.434.269.300	(15.380.830.700)	95,87%
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.779.614.954.000	7.858.838.783.000	7.196.166.202.928	(462.672.580.072)	93,98%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	490.113.410.000	479.910.542.000	431.760.909.231	(48.149.632.769)	89,97%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	54.613.724.000	54.613.724.000	50.751.346.088	(3.862.377.912)	92,93%
03	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	235.167.798.000	243.201.666.000	236.682.939.150	(6.518.726.850)	97,32%
04	DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	1.799.350.387.000	2.215.375.908.000	2.129.138.180.338	(86.237.727.662)	96,11%
05	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.659.873.444.000	1.684.998.371.000	1.585.513.048.394	(99.485.322.606)	94,10%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 517 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	350.007.464.000	447.060.836.000	403.868.152.731	(43.192.683.269)	90,34%
07	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	373.643.107.000	402.726.612.000	372.296.696.051	(30.429.915.949)	92,44%
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	276.286.386.000	285.216.386.000	264.000.608.643	(21.215.776.357)	92,56%
09	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	330.949.570.000	347.153.115.000	310.842.077.462	(36.311.037.538)	89,54%
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	313.665.771.000	313.665.771.000	310.936.183.079	(2.729.587.921)	99,13%
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	247.988.868.000	255.248.067.000	247.789.616.150	(7.458.450.850)	97,08%
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA	261.468.377.000	261.468.377.000	256.182.322.492	(5.306.054.508)	97,97%
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	386.486.648.000	668.199.408.000	596.424.122.119	(71.775.285.881)	89,26%
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.600.264.778.000	5.269.869.632.000	4.809.863.593.815	(460.006.038.185)	91,27%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	381.643.774.000	400.700.274.000	371.774.244.798	(28.926.029.202)	92,78%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	64.704.539.000	68.784.539.000	65.520.750.972	(3.263.788.028)	95,28%
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	489.617.324.000	575.400.303.000	492.002.433.664	(83.397.869.336)	85,51%
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	721.055.687.000	1.018.205.687.000	816.747.196.652	(201.458.490.348)	80,21%
05	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	697.889.085.000	708.278.921.000	678.507.729.219	(29.771.191.781)	95,80%
06	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	161.970.795.000	212.391.107.000	205.412.538.137	(6.978.568.863)	96,71%
07	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	208.287.583.000	411.880.638.000	393.614.623.041	(18.266.014.959)	95,57%
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.406.992.451.000	1.384.789.374.000	1.320.746.519.611	(64.042.854.389)	95,38%
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	488.103.540.000	489.438.789.000	465.537.557.721	(23.901.231.279)	95,12%
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	75.632.407.614.000	107.159.063.172.000	100.793.056.240.518	(6.366.006.931.482)	94,06%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	502.055.390.000	502.055.390.000	447.798.389.551	(54.257.000.449)	89,19%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 518 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	111.744.238.000	103.744.238.000	92.401.428.374	(11.342.809.626)	89,07%
04	DITJEN BINA MARGA	25.396.919.107.000	48.450.488.470.000	47.255.031.889.994	(1.195.436.780.006)	97,53%
05	DITJEN CIPTA KARYA	13.774.579.244.000	16.802.855.504.000	15.032.515.354.814	(1.770.340.149.186)	89,46%
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	27.308.236.935.000	31.133.513.384.000	28.870.794.984.318	(2.262.718.399.682)	92,73%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN	6.684.874.257.000	7.917.680.914.000	7.454.298.524.089	(463.381.389.931)	94,15%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	365.072.414.000	389.425.886.000	308.720.793.558	(80.704.892.442)	83,57%
13	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	610.484.410.000	613.506.738.000	501.552.896.795	(111.953.841.205)	81,75%
14	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	175.877.709.000	205.748.635.000	183.421.123.515	(22.327.511.485)	89,15%
15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	463.788.892.000	416.474.512.000	358.481.236.287	(57.993.275.713)	86,08%
16	DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	238.775.018.000	643.609.701.000	288.038.819.243	(355.570.881.757)	44,75%
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	268.970.603.000	268.970.603.000	254.655.179.652	(14.315.423.348)	94,68%
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	268.970.603.000	268.970.603.000	254.655.179.652	(14.315.423.348)	94,68%
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	393.334.438.000	421.095.548.000	406.114.336.588	(14.981.211.412)	96,44%
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	393.334.438.000	421.095.548.000	406.114.336.588	(14.981.211.412)	96,44%
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	232.623.827.000	232.623.827.000	207.287.358.066	(25.336.468.934)	89,11%
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	232.623.827.000	232.623.827.000	207.287.358.066	(25.336.468.934)	89,11%
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	3.321.757.461.000	3.684.440.805.000	3.410.271.877.209	(274.168.727.791)	92,56%
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	3.321.757.461.000	3.684.440.805.000	3.410.271.877.209	(274.168.727.791)	92,56%
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	266.392.551.000	266.392.551.000	260.130.543.993	(6.262.007.007)	97,65%
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	266.392.551.000	266.392.551.000	260.130.543.993	(6.262.007.007)	97,65%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 519 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.873.258.843.000	1.877.563.886.000	1.766.292.613.082	(211.271.272.918)	89,32%
01	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	623.961.813.000	508.876.663.000	364.063.090.771	(144.813.572.229)	71,54%
02	INSPEKTORAT JENDERAL		0	526.336.548	526.336.548	
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN	1.220.221.494.000	1.313.905.930.000	1.278.772.236.725	(35.133.693.275)	97,33%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI	29.075.536.000	154.781.293.000	122.930.949.038	(31.850.343.962)	79,42%
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	649.771.358.000	29.474.605.608.000	29.256.403.276.678	(218.202.331.322)	99,26%
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	649.771.358.000	29.474.605.608.000	29.256.403.276.678	(218.202.331.322)	99,26%
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.777.485.000	203.487.939.000	199.479.107.576	(4.008.831.424)	98,03%
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.777.485.000	203.487.939.000	199.479.107.576	(4.008.831.424)	98,03%
049	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	224.366.346.000	224.366.346.000	208.970.613.949	(15.395.732.051)	93,14%
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	224.366.346.000	224.366.346.000	208.970.613.949	(15.395.732.051)	93,14%
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.210.465.702.000	8.321.881.983.000	8.267.884.098.765	(53.797.884.235)	99,35%
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.210.465.702.000	8.321.881.983.000	8.267.884.098.765	(53.797.884.235)	99,35%
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.061.943.726.000	1.061.943.726.000	1.021.890.641.538	(40.053.084.462)	96,23%
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.061.943.726.000	1.061.943.726.000	1.021.890.641.538	(40.053.084.462)	96,23%
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	46.285.830.000	49.051.252.000	45.884.008.144	(3.167.243.856)	93,54%
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	46.285.830.000	49.051.252.000	45.884.008.144	(3.167.243.856)	93,54%
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.641.097.503.000	4.649.035.198.000	4.265.978.556.609	(383.056.641.391)	91,76%
01	BADAN PUSAT STATISTIK	4.641.097.503.000	4.649.035.198.000	4.265.978.556.609	(383.056.641.391)	91,76%
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.188.267.498.000	1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	(100.896.528.851)	91,71%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 520 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
01	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.188.287.498.000	1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	(100.896.528.851)	91,71%
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8.180.542.799.000	8.269.680.586.000	8.925.656.132.044	(1.344.004.453.956)	83,75%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	7.489.561.873.000	7.613.634.997.000	6.370.094.600.296	(1.243.540.396.704)	83,67%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	19.606.400.000	19.606.400.000	18.793.510.117	(812.889.883)	95,85%
03	DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	180.712.521.000	232.585.929.000	213.412.761.553	(19.183.167.447)	91,75%
04	DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN	289.357.477.000	201.018.732.000	147.631.717.296	(53.387.014.704)	73,44%
05	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN	21.703.735.000	21.703.735.000	18.499.579.057	(3.204.155.943)	85,24%
06	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA	20.948.607.000	20.948.607.000	19.961.711.236	(986.895.764)	95,29%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH	13.229.627.000	13.229.627.000	12.542.774.424	(686.852.576)	94,81%
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN	128.971.857.000	130.471.857.000	111.200.384.889	(19.271.472.111)	85,23%
09	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN	16.450.702.000	16.450.702.000	13.519.093.176	(2.931.608.824)	82,18%
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	454.777.211.000	454.777.211.000	439.399.016.449	(15.378.194.551)	96,62%
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	454.777.211.000	454.777.211.000	439.399.016.449	(15.378.194.551)	96,62%
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.078.010.147.000	8.093.071.658.000	7.945.022.266.785	(148.049.391.215)	98,17%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	212.943.347.000	580.175.844.000	568.596.741.373	(11.579.102.627)	98,00%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	25.788.863.000	29.394.817.000	28.955.943.458	(438.873.542)	98,51%
03	DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	685.163.535.000	698.710.991.000	673.815.474.327	(24.895.516.673)	96,44%
04	DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	164.877.563.000	394.777.455.000	360.335.097.901	(34.442.357.099)	91,28%
05	DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	275.006.277.000	282.676.766.000	278.503.914.235	(4.172.851.765)	98,52%
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	371.833.476.000	304.801.530.000	271.407.492.196	(33.394.037.804)	89,04%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 521 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
07	DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	191.639.929.000	272.133.310.000	263.572.277.703	(8.561.032.297)	96,85%
08	BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI)	3.170.757.157.000	5.530.400.945.000	5.499.835.325.592	(30.565.619.408)	99,45%
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	92.619.921.082.000	105.481.989.493.000	100.373.548.208.183	(5.108.441.284.817)	95,16%
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	92.619.921.082.000	105.481.989.493.000	100.373.548.208.183	(5.108.441.284.817)	95,16%
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.544.407.583.000	1.544.827.210.000	1.459.523.487.684	(85.303.722.316)	94,48%
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.544.407.583.000	1.544.827.210.000	1.459.523.487.684	(85.303.722.316)	94,48%
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	189.431.030.000	189.431.030.000	176.265.110.244	(13.165.919.756)	93,05%
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	189.431.030.000	189.431.030.000	176.265.110.244	(13.165.919.756)	93,05%
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	439.503.802.000	524.406.706.000	512.081.055.659	(12.325.650.341)	97,65%
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	439.503.802.000	524.406.706.000	512.081.055.659	(12.325.650.341)	97,65%
068	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.628.341.024.000	1.650.244.863.000	1.554.150.015.593	(96.094.847.407)	94,18%
01	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.628.341.024.000	1.650.244.863.000	1.554.150.015.593	(96.094.847.407)	94,18%
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2.376.218.926.000	2.564.755.594.000	2.451.244.317.401	(113.511.276.599)	95,57%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	27.901.857.000	28.364.144.000	28.084.867.912	(279.276.088)	99,02%
03	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.603.456.615.000	1.791.993.283.000	1.719.516.501.715	(72.476.781.285)	95,96%
04	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	46.868.603.000	46.868.603.000	46.648.742.969	(219.860.031)	99,53%
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU	38.196.530.000	38.196.530.000	37.684.472.748	(512.057.252)	98,66%
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	42.619.958.000	44.557.252.000	44.189.329.550	(367.922.450)	99,17%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	128.783.704.000	128.783.704.000	126.316.051.722	(2.467.652.278)	98,08%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 522 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	143.150.949.000	142.888.682.000	139.815.936.052	(2.872.725.948)	97,99%
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA INFORMASI	170.663.339.000	170.663.339.000	144.334.803.380	(26.328.535.620)	84,57%
10	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI	174.577.371.000	172.640.077.000	164.653.611.353	(7.986.465.647)	95,37%
088	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.172.994.896.000	3.209.531.284.000	2.913.825.985.027	(295.705.298.973)	90,79%
01	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.172.994.896.000	3.209.531.284.000	2.913.825.985.027	(295.705.298.973)	90,79%
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	100.312.787.000	105.534.794.000	95.988.673.522	(9.546.120.478)	90,95%
01	KOMNAS HAM	100.312.787.000	105.534.794.000	95.988.673.522	(9.546.120.478)	90,95%
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.157.797.896.000	2.241.579.204.000	2.076.026.802.297	(165.552.401.703)	92,61%
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.157.797.896.000	2.241.579.204.000	2.076.026.802.297	(165.552.401.703)	92,61%
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.861.968.253.000	15.328.654.212.000	11.205.978.044.122	(4.122.676.167.878)	73,10%
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.861.968.253.000	15.328.654.212.000	11.205.978.044.122	(4.122.676.167.878)	73,10%
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	187.763.424.000	222.388.424.000	219.575.877.394	(2.812.546.606)	98,74%
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	187.763.424.000	222.388.424.000	219.575.877.394	(2.812.546.606)	98,74%
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	243.960.199.000	243.960.199.000	208.269.277.734	(35.690.921.266)	85,37%
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	243.960.199.000	243.960.199.000	208.269.277.734	(35.690.921.266)	85,37%
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.526.513.481.000	1.503.374.248.000	1.185.612.287.850	(317.761.960.150)	78,86%
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.526.513.481.000	1.503.374.248.000	1.185.612.287.850	(317.761.960.150)	78,86%
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	672.909.868.000	669.407.836.000	604.365.612.359	(65.042.223.641)	90,28%
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	672.909.868.000	669.407.836.000	604.365.612.359	(65.042.223.641)	90,28%
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.476.455.616.000	1.497.762.242.000	1.350.475.623.929	(147.286.618.071)	90,17%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 523 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.476.455.616.000	1.497.762.242.000	1.350.475.623.929	(147.286.618.071)	90,17%
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	680.331.450.000	682.841.245.000	547.953.322.590	(134.887.922.410)	80,25%
01	L A P A N	680.331.450.000	682.841.245.000	547.953.322.590	(134.887.922.410)	80,25%
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	541.450.843.000	537.093.455.000	430.275.105.242	(106.818.349.758)	80,11%
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	541.450.843.000	537.093.455.000	430.275.105.242	(106.818.349.758)	80,11%
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	249.142.555.000	246.863.909.000	245.229.035.228	(1.634.873.772)	99,34%
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	249.142.555.000	246.863.909.000	245.229.035.228	(1.634.873.772)	99,34%
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	106.658.189.000	106.658.189.000	90.920.939.678	(15.737.249.322)	85,25%
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	106.658.189.000	106.658.189.000	90.920.939.678	(15.737.249.322)	85,25%
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	305.044.603.000	308.155.040.000	285.718.264.130	(22.436.775.870)	92,72%
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	305.044.603.000	308.155.040.000	285.718.264.130	(22.436.775.870)	92,72%
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	165.418.004.000	165.418.004.000	156.632.536.842	(8.785.467.158)	94,69%
01	ARSIP NASIONAL	165.418.004.000	165.418.004.000	156.632.536.842	(8.785.467.158)	94,69%
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	700.644.563.000	701.558.963.000	595.325.743.616	(106.233.219.384)	84,86%
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	700.644.563.000	701.558.963.000	595.325.743.616	(106.233.219.384)	84,86%
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.412.618.193.000	1.546.287.963.000	1.485.298.168.205	(60.989.794.795)	96,06%
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.412.618.193.000	1.546.287.963.000	1.485.298.168.205	(60.989.794.795)	96,06%
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.919.115.968.000	3.477.064.284.000	3.244.652.636.286	(232.411.647.714)	93,32%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	949.083.007.000	949.083.007.000	901.458.497.877	(47.624.509.123)	94,98%
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.211.768.948.000	1.769.181.122.000	1.664.709.372.071	(104.471.749.929)	94,09%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 524 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	125.678.711.000	125.678.711.000	107.261.648.588	(18.417.062.412)	85,35%
04	DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	104.784.020.000	104.784.020.000	93.393.211.487	(11.390.808.513)	89,13%
05	INSPEKTORAT JENDERAL	39.795.184.000	39.795.184.000	34.901.987.527	(4.893.196.473)	87,70%
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	170.390.443.000	170.390.443.000	155.039.932.332	(15.350.510.668)	90,99%
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	59.075.529.000	59.075.529.000	52.456.941.457	(6.618.587.543)	88,80%
08	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	33.056.420.000	33.056.420.000	27.041.404.651	(6.015.015.349)	81,80%
09	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	225.483.726.000	226.019.868.000	208.389.640.296	(17.630.227.704)	92,20%
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.173.661.690.000	1.175.868.688.000	1.114.645.758.311	(61.222.929.689)	94,79%
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.173.661.690.000	1.175.868.688.000	1.114.645.758.311	(61.222.929.689)	94,79%
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	859.975.256.000	920.280.999.000	873.027.305.489	(47.253.693.511)	94,87%
01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	859.975.256.000	920.280.999.000	873.027.305.489	(47.253.693.511)	94,87%
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	899.729.904.000	988.275.448.000	946.617.204.727	(41.658.243.273)	95,78%
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	229.796.088.000	243.485.988.000	229.945.752.280	(13.540.235.740)	94,44%
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	669.933.816.000	744.789.460.000	716.671.452.467	(28.118.007.533)	96,22%
100	KOMISI YUDISIAL RI	80.196.352.000	81.731.950.000	80.476.068.463	(1.255.881.537)	98,46%
01	KOMISI YUDISIAL RI	80.196.352.000	81.731.950.000	80.476.068.463	(1.255.881.537)	98,46%
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.926.128.774.000	12.713.492.686.000	11.757.551.961.151	(955.940.724.849)	92,48%
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.926.128.774.000	12.713.492.686.000	11.757.551.961.151	(955.940.724.849)	92,48%
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	260.635.351.000	260.635.351.000	256.027.656.165	(4.607.694.835)	98,23%
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	260.635.351.000	260.635.351.000	256.027.656.165	(4.607.694.835)	98,23%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 525 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	129.575.851.000	136.677.585.000	133.403.172.724	(3.274.412.276)	97,60%
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	129.575.851.000	136.677.585.000	133.403.172.724	(3.274.412.276)	97,60%
107	BADAN SAR NASIONAL	1.583.163.924.000	1.585.594.299.000	1.499.824.232.321	(85.770.066.679)	94,59%
01	BADAN SAR NASIONAL	1.583.163.924.000	1.585.594.299.000	1.499.824.232.321	(85.770.066.679)	94,59%
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	103.087.521.000	114.053.530.000	113.228.643.932	(824.886.068)	99,28%
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	103.087.521.000	114.053.530.000	113.228.643.932	(824.886.068)	99,28%
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	156.866.492.000	156.866.492.000	68.951.937.748	(87.914.554.252)	43,96%
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	156.866.492.000	156.866.492.000	68.951.937.748	(87.914.554.252)	43,96%
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	137.839.359.000	137.839.359.000	135.599.123.417	(2.240.235.583)	98,37%
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	137.839.359.000	137.839.359.000	135.599.123.417	(2.240.235.583)	98,37%
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	213.002.832.000	213.002.832.000	203.875.475.187	(9.127.356.813)	95,71%
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	213.002.832.000	213.002.832.000	203.875.475.187	(9.127.356.813)	95,71%
112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2.014.195.179.000	2.198.101.902.000	1.693.496.603.566	(504.605.298.434)	77,04%
01	BPKPB BATAM	2.014.195.179.000	2.198.101.902.000	1.693.496.603.566	(504.605.298.434)	77,04%
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	440.818.091.000	443.579.218.000	428.334.421.623	(15.244.796.377)	96,56%
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	440.818.091.000	443.579.218.000	428.334.421.623	(15.244.796.377)	96,56%
114	SEKRETARIAT KABINET	250.941.188.000	250.941.188.000	231.593.164.881	(19.348.023.119)	92,29%
01	SEKRETARIAT KABINET	250.941.188.000	250.941.188.000	231.593.164.881	(19.348.023.119)	92,29%
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.573.240.603.000	5.231.437.386.000	4.582.402.434.860	(649.034.951.140)	87,59%
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.573.240.603.000	5.231.437.386.000	4.582.402.434.860	(649.034.951.140)	87,59%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 526 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.075.756.201.000	1.076.120.781.000	946.139.242.824	(129.981.538.176)	87,92%
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.075.756.201.000	1.076.120.781.000	946.139.242.824	(129.981.538.176)	87,92%
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	996.062.655.000	1.284.385.142.000	1.201.587.777.606	(82.797.364.394)	93,55%
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	996.062.655.000	1.284.385.142.000	1.201.587.777.606	(82.797.364.394)	93,55%
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	110.143.715.000	110.143.715.000	71.730.782.618	(38.412.932.382)	65,12%
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	110.143.715.000	110.143.715.000	71.730.782.618	(38.412.932.382)	65,12%
119	BADAN KEAMANAN LAUT	442.605.503.000	565.473.073.000	544.469.245.208	(21.003.827.792)	96,29%
01	BADAN KEAMANAN LAUT	442.605.503.000	565.473.073.000	544.469.245.208	(21.003.827.792)	96,29%
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	259.596.417.000	259.596.417.000	244.408.582.366	(15.187.834.634)	94,15%
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	259.596.417.000	259.596.417.000	244.408.582.366	(15.187.834.634)	94,15%
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	160.050.978.000	160.050.978.000	147.442.970.121	(12.608.007.879)	92,12%
01	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	160.050.978.000	160.050.978.000	147.442.970.121	(12.608.007.879)	92,12%
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	1.138.859.899.591.000	849.064.820.474.000	773.333.585.931.730	(75.731.234.542.270)	91,08%
01	PENGELOLAAN UTANG	338.784.308.000.000	337.855.506.000.000	314.088.112.296.556	(23.767.393.703.444)	92,97%
02	PENGELOLAAN HIBAH	5.072.138.588.000	8.946.027.133.000	6.275.907.926.228	(2.670.119.206.772)	70,15%
07	PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI	192.023.203.430.000	241.026.561.739.000	196.231.455.278.876	(44.795.106.460.124)	81,41%
08	PENGELOLAAN BELANJA LAIN	463.810.531.965.000	122.210.091.802.000	119.438.781.034.004	(2.771.310.767.996)	97,73%
99	PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS	139.169.719.608.000	139.026.633.800.000	137.299.329.396.066	(1.727.304.403.934)	98,76%
XXX	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA SIAP DAN SAI			-6.371		
JUMLAH		1.975.240.206.353.000	1.968.558.902.231.000	1.832.950.921.019.900	142.289.285.326.733	92,80%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 527 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Utang	Belanja Subv.	Belanja Hibah	Belanja Donasi	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	96.783.487.645	568.258.495.709	36.367.708.748						702.448.952.102
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	975.753.289.672	3.516.390.126.430	329.468.853.271						4.821.612.269.373
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.981.586.733.636	1.213.615.416.985	263.882.512.463						3.459.084.663.084
005	MAHKAMAH AGUNG	6.715.009.279.141	2.044.407.831.008	547.029.398.102						9.306.446.508.251
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.140.477.834.840	1.474.777.995.387	1.264.853.770.683						6.880.106.600.910
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	425.186.111.055	1.462.673.858.379	152.794.604.783						2.040.654.574.217
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	712.899.881.512	1.879.523.513.652	164.198.888.685						2.746.621.283.849
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.803.815.040.559	2.774.717.527.101	784.571.117.114						7.363.103.684.774
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	48.686.234.009.715	43.279.428.232.336	44.905.767.529.683						136.871.429.771.734
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	6.474.614.295.030	5.004.314.364.128	920.817.878.930						12.399.546.538.088
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.940.955.982.585	40.483.804.106.968	1.658.344.217.020						61.083.104.306.573
016	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.299.121.687.344	12.289.603.400.859	621.614.325.229						15.199.739.413.432
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	859.944.763.614	1.136.628.925.849	179.155.413.102						1.975.728.108.565
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	818.219.772.108	3.115.227.788.989	1.940.438.475.188						5.874.100.036.285
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.446.103.121.152	12.570.252.618.905	18.701.468.839.830						34.717.825.579.887
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.252.244.406.323	33.110.580.911.847	5.520.413.112.022				16.178.558.908.756		79.061.797.338.948
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.010.576.630.437	43.720.797.191.692	4.851.079.038.164				48.624.944.886.000		102.207.399.746.493
025	KEMENTERIAN AGAMA	39.211.897.682.156	21.380.734.953.589	5.380.799.886.008				2.910.749.574.882		67.994.181.158.634
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	386.745.875.232	33.278.696.783.101	580.864.311.713						34.246.387.058.046
027	KEMENTERIAN SOSIAL	445.956.309.885	5.215.424.069.046	247.360.830.337				124.390.051.808.552		130.288.443.238.820
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.786.883.943.993	4.895.393.714.580	512.806.544.275						7.195.108.202.848
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.713.484.863.225	2.786.436.287.846	307.842.442.744						4.807.763.593.815
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.603.444.176.503	30.632.382.972.375	67.556.828.991.840						100.793.058.246.518
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	54.531.303.285	188.082.780.110	11.881.116.277						254.495.179.672



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 528 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	97 072 256 865	295 345 903 008	13 696 178 815						406 114.336.589
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	54 888.181.884	143 853 893 077	8 735 283 095						207 297.358.056
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	292 692 527 342	2 639 331 173 611	478 048 176 254						3.410.271.877.209
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	57 840 216 705	97 614.016.966	104 876 308 432						259 130.542.993
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	117 086 921 231	1 544 380 675 210	104 804 816 541						1.766.282.613.962
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KEcil DAN MENENGAH	101 270 101 843	28.139 302 310 273	18 830 884 562						28.258.483.276.678
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47 412 373.226	148.879 676 014	3 193.156 336						199.479.101 576
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI Birokrasi	78 999.636 864	110 825 757 586	18 045 219 689						208.970.613.849
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	382 265 227 894	5 427 138 880.771	2 458 458 990 000						8 267.884.098.785
051	LEMBAGA SAKSI NEGARA	171 635 089 506	207.745 805 262	642 509 746 770						1.021.890.641.538
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	24 739 083.239	21.104 516 805	40.408 000						46.884.006.144
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2 024 719 411 218	2 120 308 074 748	120 951.070 843						4 265.978 556 809
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	149 301 536 269	884.565 670 476	82 993 972 404						1 116.861 179.148
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	2 141 035 785.805	4.418 925 363 452	385 895 002 967						6.945.656.132.044
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	116 966 789 840	288 827 837 864	53 601 408 745						439.395.016.449
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	482 346.101 685	7 089 738 958 299	372 837 206 801						7.945.022.266.785
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	49 201 263.371 349	27 582.309 486 287	23 589 675 350 547						100.373.548.288.183
063	BADAN PENSAWAS OBAT DAN MAKANAN	597 113 534 151	711 595 721.070	150 814.232 463						1.459.523 487 684
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	68 581 058 958	87 738 745 201	20 435 306 085						176 265.118.244
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	128 469 840 263	351.728.489 554	30 882 325 842						512.081.665.659
068	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	467 635.880 906	884 317 957 969	222 186.076 716						1.554.150 015 593
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSFORMASI	253 454 101 379	2 151 823 109 760	45 967 108.262						2 461.244.317 401



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 529 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.968.063.527.951	884.037.492.269	50.724.984.807						2.813.825.995.027
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	36.184.977.778	56.321.383.061	3.482.312.883						95.988.673.522
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	674.042.832.787	756.384.358.657	645.599.809.843						2.075.826.892.287
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.236.965.942.677	9.688.791.995.705	80.200.105.740						11.295.978.044.122
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	52.140.478.854	149.606.351.856	17.829.046.884						219.575.877.394
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	111.710.028.261	51.117.245.830	45.442.003.543						208.269.277.734
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	587.466.929.134	172.468.368.091	425.957.985.625						1.185.812.287.850
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	371.442.094.379	187.226.690.387	45.686.913.593						604.355.612.359
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	454.612.881.202	510.333.126.775	395.529.915.952						1.359.475.923.929
082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARKASA NASIONAL	176.792.258.912	121.637.739.947	247.323.326.631						545.752.322.590
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	80.132.250.828	122.205.946.050	227.938.905.386						430.275.105.242
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	67.842.567.708	82.652.892.250	94.733.576.270						245.228.935.228
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	55.278.409.612	32.994.703.770	2.647.826.396						90.920.939.678
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	143.012.407.710	112.712.390.123	29.993.466.297						285.718.264.130
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93.718.898.297	56.082.281.205	4.833.287.340						154.632.526.842
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	288.246.157.774	258.381.290.493	38.698.295.359						585.325.743.616
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	929.082.822.279	430.413.948.681	125.791.980.236						1.485.296.160.205
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	480.018.386.347	2.465.335.194.701	299.299.065.238						3.244.652.636.285
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	112.824.443.049	880.736.976.635	20.984.436.627						1.114.545.756.311
093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	608.284.332.078	217.712.922.349	46.030.051.082						873.027.305.409
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	324.485.097.838	602.237.380.409	18.894.761.080						945.617.244.727
100	KOMISI YUDISIAL RI	35.104.113.636	44.581.142.547	790.912.380						60.476.068.463
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	71.248.910.208	338.591.539.842	14.089.362.085				11.335.624.148.018		11.757.561.961.151



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 530 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsid	Belanja Hibah	Belanja Berekas	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	108.608.446.278	144.953.710.944	2.484.498.943						256.027.656.165
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	43.358.477.106	81.118.599.087	8.925.086.551						133.402.172.724
107	BADAN SAR NASIONAL	403.879.101.378	683.731.124.547	432.214.006.398						1.489.824.232.321
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	40.384.889.250	67.509.580.837	5.334.193.845						113.228.643.932
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA	9.293.679.100	57.764.778.093	1.903.580.555						69.951.937.748
110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	72.845.981.487	60.385.719.089	2.587.442.631						135.599.123.417
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	30.239.901.220	187.585.023.972	6.070.549.995						203.875.475.187
112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM		1.088.555.272.232	584.941.331.334						1.683.496.603.566
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	29.981.744.387	382.104.875.318	8.237.701.806						426.334.421.523
114	SEKRETARIAT KABINET	158.767.287.165	73.130.038.326	1.895.858.400						231.593.164.881
116	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	384.123.184.491	4.148.805.455.412	49.473.794.957						4.582.482.434.858
118	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	510.346.852.331	314.123.005.982	121.869.384.501						946.138.242.814
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	575.865.858.150	487.213.907.088	128.408.912.368						1.201.587.777.606
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		34.788.809.307	38.942.173.311						71.730.982.618
119	BADAN KEAMANAN LAUT	63.862.816.101	302.634.683.125	184.071.745.982						544.469.245.208
120	KEMENTERIAN KORDONATOR BIDANG KEMARITIMAN	50.886.359.646	168.332.045.697	24.210.176.621						244.488.582.964
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	48.187.355.212	92.217.890.773	9.037.724.136						147.442.970.121
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	135.584.022.333.491	1.138.988.577.538		314.088.112.286.556	198.231.455.278.878	6.275.807.926.228		128.035.189.519.041	773.333.585.831.736
	JUMLAH BELANJA KIL (SAI)	380.532.228.594.618	422.338.225.594.487	190.918.832.381.894	314.088.112.286.556	198.231.455.278.878	6.275.807.926.228	202.529.989.428.288	128.035.189.519.041	1.032.950.821.619.808
	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA SAI DAN SAI	(2.151)	(4.221)	1						(6.371)
	JUMLAH BELANJA (SIAP)	380.532.228.594.618	422.338.225.594.487	190.918.832.381.894	314.088.112.286.556	198.231.455.278.878	6.275.807.926.228	202.529.989.428.288	128.035.189.519.041	1.032.950.821.619.808



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 531 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Satuan BLU	Rumpun	Audit KAP		Keterangan
					Ya	Tidak	
1	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AL di Remban Surabaya	Kesehatan	✓		
2	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Ciput Mangrovekurum-Jakarta	Kesehatan	✓		
3	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Fatmawati Jakarta	Kesehatan	✓		
4	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Pahlawan Sekeloa-Jakarta	Kesehatan	✓		
5	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	Kesehatan	✓		
6	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin Bandung	Kesehatan	✓		
7	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Marzuki Mahdi Bogor	Kesehatan	✓		
8	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Karipah Semarang	Kesehatan	✓		
9	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Dr Soedjadi Tirtonegara,Matan	Kesehatan	✓		
10	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta	Kesehatan	✓		
11	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Sorabaya	Kesehatan	✓		
12	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr M Djamil Padang	Kesehatan	✓		
13	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Mok Hoesan Palembang	Kesehatan	✓		
14	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Kesehatan	✓		
15	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	Kesehatan	✓		
16	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Sanglah Denpasar	Kesehatan	✓		
17	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum H. Adnan Muli Medan	Kesehatan	✓		
18	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Prof Dr R Kandou Manado	Kesehatan	✓		
19	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Mahidin Sudirhadono Makassar	Kesehatan	✓		
20	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AU di Handoharjo Yogyakarta	Kesehatan		✓	Proses peninjauan KAP
21	022	Kementerian Pertahanan	Balai Kesehatan Pematang	Kesehatan	✓		
22	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Sirok Nasional, Bt. Ingg	Kesehatan	✓		
23	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kusala Dr. Teguhdan Chand Makassar	Kesehatan	✓		
24	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Kesehatan Panti Masyarakat Bandung	Kesehatan	✓		
25	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Kesehatan Panti Masyarakat Sorabaya	Kesehatan	✓		
26	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Kesehatan Panti Masyarakat Makassar	Kesehatan	✓		
27	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jawa Dr Soeharto Hanyang Jakarta	Kesehatan	✓		
28	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Panti Dr Komolopu Bandung	Kesehatan	✓		
29	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Mitra Orsindo Bandung	Kesehatan	✓		
30	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Paru Gejawan Partowidigda, Cusasa Rogo	Kesehatan	✓		
31	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kurus Sejahtera Tangerang	Kesehatan	✓		
32	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jawa Dr Soeroyo Magelang	Kesehatan	✓		
33	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Paru Dr Arie Herman, Salanga	Kesehatan	✓		
34	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soehadiman Sekeloa-Solo	Kesehatan	✓		
35	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jawa Radjiman W. Lawang	Kesehatan	✓		
36	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kusta Dr. Riva Abdillah Palembang	Kesehatan	✓		
37	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kesanggungan Obal, Jakarta	Kesehatan	✓		
38	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Teluk Prof Dr Sukanti Sarong Jakarta	Kesehatan	✓		
39	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita Jakarta	Kesehatan	✓		
40	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta	Kesehatan	✓		
41	024	Kementerian Kesehatan	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar	Kesehatan	✓		
42	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kanker Bhayangkara Jakarta	Kesehatan	✓		
43	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Pusat Ocul Nasional	Kesehatan	✓		
44	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta	Kesehatan	✓		Proses peninjauan KAP
45	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD TA II Purn Heger Medan	Kesehatan	✓		Belum peninjauan KAP
46	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD TA II Duxton Cendeh	Kesehatan	✓		Proses peninjauan KAP
47	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD TA II Cemas Cerdas	Kesehatan	✓		
48	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD TA II di Soegiono Malang	Kesehatan	✓		Proses peninjauan KAP
49	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD TA II Palamone Makassar	Kesehatan	✓		Proses peninjauan KAP
50	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Th. V Pontianak	Kesehatan	✓		
51	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Medan	Kesehatan	✓		
52	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Sespertama Lembang polisi	Kesehatan	✓		
53	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua	Kesehatan	✓		
54	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Bandung	Kesehatan	✓		
55	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Timkat II Kediri	Kesehatan	✓		
56	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banyuwangi	Kesehatan	✓		
57	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Bendoresso	Kesehatan	✓		
58	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Magelang Oedang Makassar	Kesehatan	✓		
59	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raseo Sind Sukarno	Kesehatan	✓		
60	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Puskabidhistrak. IV Ponorogo	Kesehatan	✓		
61	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Serkapo Sekeloa	Kesehatan	✓		
62	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tembung Tinggi	Kesehatan	✓		
63	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Jambi	Kesehatan	✓		
64	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Timkat III Palembang	Kesehatan	✓		
65	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Semarang	Kesehatan	✓		
66	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Timkat II H.S. Samsen Mertayasa Surabaya	Kesehatan	✓		
67	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Timkat II Tjaja Pelda Bak	Kesehatan	✓		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 532 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode PA	Keterangan	Nama Sederhana	Ruang	Audit KAP	Keterangan
61	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Mataram	Kesehatan	✓	
69	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Palangkaraya	Kesehatan	✓	
70	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan	Kesehatan	✓	
71	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Kendari	Kesehatan	✓	
72	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Manado	Kesehatan	✓	
73	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Padang	Kesehatan	✓	
74	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru	Kesehatan	✓	
75	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Bangkulu	Kesehatan	✓	
76	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Indragiri	Kesehatan	✓	
77	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Mpanuk	Kesehatan	✓	
78	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Tukogagung	Kesehatan	✓	
79	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Lingsang	Kesehatan	✓	
80	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kumpang	Kesehatan	✓	
81	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Benamatin	Kesehatan	✓	
82	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Palu	Kesehatan	✓	
83	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Jayapura	Kesehatan	✓	
84	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tugayakaria	Kesehatan	✓	
85	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Bramek Warukach	Kesehatan	✓	
86	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Rasta Inala Batu	Kesehatan	✓	
87	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Jakarta	Pendidikan	✓	
88	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Semarang	Pendidikan	✓	
89	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Jendral Sudirman	Pendidikan	✓	
90	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Yogyakarta	Pendidikan	✓	
91	023	Kementerian Perhubungan	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tolgi	Pendidikan	✓	
92	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Surabaya	Pendidikan	✓	
93	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Brangwaja Malang	Pendidikan	✓	
94	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Malang	Pendidikan	✓	
95	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Syiah Kuala Aceh	Pendidikan	✓	
96	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Medan	Pendidikan	✓	
97	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Andalas	Pendidikan	✓	
98	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten	Pendidikan	✓	
99	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Rajah Falaq Palembang	Pendidikan	✓	Proses peninjauan KAP
100	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Jambi	Pendidikan	✓	
101	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Srinagara	Pendidikan	✓	
102	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Lampung	Pendidikan	✓	
103	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Lampung Pura	Pendidikan	✓	
104	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Muhammadiyah Samarinda	Pendidikan	✓	Proses peninjauan KAP
105	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Sam Ratulangi	Pendidikan	✓	
106	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Gorontalo	Pendidikan	✓	
107	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Raden Ismail Lampung	Pendidikan	✓	Proses peninjauan KAP
108	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Patemba, Maluku	Pendidikan	✓	
109	023	Kementerian Perhubungan	Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya	Pendidikan	✓	
110	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Surabaya	Pendidikan	✓	
111	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Cirebon	Pendidikan	✓	
112	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Bengkulu	Pendidikan	✓	
113	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Haskuto	Pendidikan	✓	
114	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas R. su	Pendidikan	✓	
115	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Pendidikan	✓	Proses peninjauan KAP
116	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Hassanudin Banda Aceh	Pendidikan	✓	Proses peninjauan KAP
117	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri As Herry Darussalam Banda Aceh	Pendidikan	✓	Proses peninjauan KAP
118	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Pendidikan	✓	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 533 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Sub-BU	Rangkap	Audit KAP	Keterangan
119	022	Kementerian Perhubungan	Poltekprok Penerbangan Surabaya	Pendidikan	✓	
120	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pendidikan	✓	
121	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Gunung Djati Bandung	Pendidikan	✓	
122	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Tanjungkarang	Pendidikan	✓	
123	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Waluyo Semarang	Pendidikan	✓	
124	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendidikan	✓	
125	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Pendidikan	✓	
126	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Malang	Pendidikan	✓	
127	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Serikata	Pendidikan	✓	
128	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Smpurna Uluu Medan	Pendidikan	✓	
129	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Yogyakarta	Pendidikan	✓	
130	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Pendidikan	✓	Proses pemungutan KAP
131	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sarawak	Pendidikan	✓	
132	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Pontianak	Pendidikan	✓	
133	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Malang	Pendidikan	✓	
134	015	Kementerian Keuangan	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Pendidikan	✓	Belum pemungutan KAP
135	019	Kementerian Perindustrian	Poltekprok AKA Bogor	Pendidikan	✓	
136	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PPSDM Migas Cebu	Pendidikan	✓	
137	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Poltekprok Energi Dan Mineral AKAMIGAS	Pendidikan	✓	
138	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PPSDM Geologi, Mineral Dan Batubara	Pendidikan	✓	Belum pemungutan KAP
139	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Pendidikan	✓	
140	022	Kementerian Perhubungan	Poltekprok Ilmu Pelayaran Makassar	Pendidikan	✓	
141	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Mayana	Pendidikan	✓	
142	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Terbuka	Pendidikan	✓	
143	022	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	Pendidikan	✓	
144	022	Kementerian Perhubungan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	Pendidikan	✓	
145	022	Kementerian Perhubungan	Poltekprok Ilmu Pelayaran Semarang	Pendidikan	✓	
146	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta	Pendidikan	✓	
147	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Bengkulu	Pendidikan	✓	
148	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Tadulaka	Pendidikan	✓	
149	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Serang	Pendidikan	✓	
150	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Mataram	Pendidikan	✓	
151	022	Kementerian Perhubungan	Poltekprok Transportasi Sungai, Danau dan Perairan Poltekprok	Pendidikan	✓	
152	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pendidikan	✓	
153	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Poltekprok Negeri Malang	Pendidikan	✓	
154	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perairan Poltekprok	Pendidikan	✓	
155	022	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Perairan Indonesia Cileug	Pendidikan	✓	
156	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perairan Poltekprok Jayapura	Pendidikan	✓	
157	022	Kementerian Perhubungan	Akademi Perairan Indonesia Medan	Pendidikan	✓	
158	022	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	Pendidikan	✓	
159	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bek	Pendidikan	✓	
160	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Cengk	Pendidikan	✓	
161	022	Kementerian Perhubungan	Poltekprok Pelayaran Barabunga	Pendidikan	✓	
162	022	Kementerian Perhubungan	Akademik Penerbangan Indonesia Banyuwangi	Pendidikan	✓	
163	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Medan	Pendidikan	✓	
164	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol	Pendidikan	✓	Proses pemungutan KAP
165	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Makassar Aceh	Pendidikan	✓	
166	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Jakarta II	Pendidikan	✓	
167	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Jakarta III	Pendidikan	✓	
168	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Bandung	Pendidikan	✓	
169	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Semarang	Pendidikan	✓	
170	022	Kementerian Perhubungan	Akademi Teknik dan Kejuruan Penerbangan Medan	Pendidikan	✓	
171	022	Kementerian Perhubungan	Akademi Teknik dan Kejuruan Penerbangan Makassar	Pendidikan	✓	
172	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang	Pendidikan	✓	
173	024	Kementerian Kesehatan	Poltekprok Kesehatan Makassar	Pendidikan	✓	
174	020	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Padang	Pendidikan	✓	
175	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Pendidikan Garut	Pendidikan	✓	
176	015	Kementerian Keuangan	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Manajemen Dana	✓	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 534 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Satuan BLU	Kelembagaan	Audit KAP	Keterangan
177	015	Kementerian Keuangan	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Pengelola Dana	✓	
178	015	Kementerian Keuangan	Pusat Investasi Pemerintah	Pengelola Dana	✓	
179	029	Kementerian Kehutanan	Pusat Pembinaan Pembangunan Hutan	Pengelola Dana	✓	
180	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan	Pengelola Dana	✓	
181	033	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Pusat Pengelolaan Dana Pembenihan Perikanan	Pengelola Dana	✓	
182	044	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	Lembaga Pengelola Dana Bagiur Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pengelola Dana	✓	
183	059	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Pengelola Dana	✓	
184	067	Kementerian Sekretariat Negara	Pusat Pengelolaan Komplek Gedung Bung Karno	Kawasan	✓	Proses peninjauan KAP
185	067	Kementerian Sekretariat Negara	Pusat Pengelolaan Komplek Kementerian	Kawasan	✓	Proses peninjauan KAP
186	015	Kementerian Keuangan	Lembaga Manajemen Aset Negara	Barang Jasa Lainnya	✓	Proses peninjauan KAP (lapor selanjut)
187	092	Kementerian Perencanaan Dan Tata Ruang	Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keadirgantaraan	Barang Jasa Lainnya	✓	Proses peninjauan KAP
188	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	Kawasan	✓	Belum ditetapkan KAP, sedang draft RPK (Bagian Anggaran tersendiri)
189	113	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sibolga	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sibolga	Kawasan	✓	Belum ditetapkan KAP, sedang draft RPK (Bagian Anggaran tersendiri)
190	015	Kementerian Perikanan	Pusat Veteriner Farmasi Surabaya	Barang Jasa Lainnya	✓	
191	015	Kementerian Perikanan	Sala Besar Industri Perikanan Singaperbangsa	Barang Jasa Lainnya	✓	Proses peninjauan KAP
192	019	Kementerian Perindustrian	Sala Besar Industri Agro	Barang Jasa Lainnya	✓	
193	019	Kementerian Perindustrian	Sala Besar Bahan dan Barang Tekstil	Barang Jasa Lainnya	✓	
194	019	Kementerian Perindustrian	Sala Besar Teknologi Pengolahan Perikanan Industri	Barang Jasa Lainnya	✓	
195	019	Kementerian Perindustrian	Sala Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung	Barang Jasa Lainnya	✓	
196	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Barang Jasa Lainnya	✓	
197	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Barang Jasa Lainnya	✓	
198	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Barang Jasa Lainnya	✓	
199	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keterselamatan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Barang Jasa Lainnya	✓	
200	022	Kementerian Perhubungan	Bandar Udara Juanda Tarakan	Barang Jasa Lainnya	✓	
201	022	Kementerian Perhubungan	Bandara Djokjodibon Gorontalo	Barang Jasa Lainnya	✓	Belum ditetapkan KAP
202	022	Kementerian Perhubungan	Bandara Mutiara SIS Al Jufri Pekanbaru	Barang Jasa Lainnya	✓	
203	022	Kementerian Perhubungan	Bandar Udara Kallimarau di Tanjung Pireb	Barang Jasa Lainnya	✓	
204	022	Kementerian Perhubungan	Sala Besar Kalbar Fasilitas Penerbangan	Barang Jasa Lainnya	✓	Proses peninjauan KAP
205	042	Kementerian Riset Dan Teknologi	Pusat Pengujian (PIER) Jakarta	Barang Jasa Lainnya	✓	
206	044	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	Lembaga Layanan Pemecatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Barang Jasa Lainnya	✓	
207	081	Badan Pengkajian Dan Pengkajian Teknologi	BPPT Engineering Jakarta	Barang Jasa Lainnya	✓	Proses peninjauan KAP
208	025	Kementerian Agama	Instansi Agama Islam Negeri Bontolungga	Pendidikan	✓	
209	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Pendidikan	✓	
210	069	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Ambon	Kesehatan	✓	
211	069	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung	Kesehatan	✓	
212	025	Kementerian Agama	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Barang Jasa Lainnya	✓	Gara ditetapi sebagai BLU 2020
213	012	Kementerian Perumahan	Rumah Sakit Tl II Udayana	Kesehatan	✓	Proses peninjauan KAP
214	012	Kementerian Perumahan	Rumah Sakit Tl II Kartika Hertasila	Kesehatan	✓	Proses peninjauan KAP
215	012	Kementerian Perumahan	Rumah Sakit AD Tl IV di Bratanegara Uluwatu	Kesehatan	✓	Belum peninjauan KAP
216	012	Kementerian Perumahan	Rumah Sakit AD Tl II di M. Sakti Bandung	Kesehatan	✓	Proses peninjauan KAP
217	012	Kementerian Perumahan	Rumah Sakit AD Tl II di Gedung Mayangk	Kesehatan	✓	
218	012	Kementerian Perumahan	Rumah Sakit AD Tl II Magarotom Perwoberto	Kesehatan	✓	Proses peninjauan KAP
219	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Makassar	Pendidikan	✓	
220	040	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Badan Pelaksana Operasi Danasa Tobo	Kawasan	✓	Belum ditetapkan KAP
221	024	Kementerian Kesehatan	Poliklinik Kesehatan Kolektif Tami	Pendidikan	✓	Belum peninjauan KAP
222	024	Kementerian Kesehatan	Poliklinik Kesehatan Denpasar	Pendidikan	✓	
223	024	Kementerian Kesehatan	Poliklinik Kesehatan Manado	Pendidikan	✓	
224	024	Kementerian Kesehatan	Poliklinik Kesehatan Tasikmalaya	Pendidikan	✓	
225	012	Kementerian Perumahan	RS TNI AD Tl II Prof dr J. A. Listiawan Nalatu	Kesehatan	✓	Proses peninjauan KAP
226	012	Kementerian Perumahan	RS TNI AD Tl II Robert Walter Mungga Mungga	Kesehatan	✓	Proses peninjauan KAP
227	012	Kementerian Perumahan	RS TNI AU DR. Esmawan Antarkita	Kesehatan	✓	
228	024	Kementerian Kesehatan	Poliklinik Kesehatan Kupang	Pendidikan	✓	Belum peninjauan KAP
229	015	Kementerian Keuangan	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Pengelola Dana	✓	LK 2020 hasil mutasi BLU PSH dalam pendampingan BPP dan Rjen Kemendagri
230	015	Kementerian Keuangan	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	Pengelola Dana	✓	BLU Baru ditetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 536 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No	PLIN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)			Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
Kementerian Dalam Negeri																						
1	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX78CA	02 November 2016	08 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	18.839.853	14.747.180	215.247.830.189	-	11.301.360.378	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Cipta Karya (KemenPUPR)	BPK
2	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	PDIMP	21256000	1283YDPA	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	500.000.000,00	56.644.000,00	97.252.115,87	1.815.163.140.389	-	22.283.087.218	78.388.085	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KerenPUPR	BPK
					21257000	11DDKS1A	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	100.000.000,00	11.356.000,00	19.487.122,87	323.808.208.250	-	4.462.392.143	15.715.254	-	-	-		
3	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NAHP	20426000	1HG72SWA	30 November 2017	24 Januari 2018	28 Februari 2022	USD	450.000.000,00	131.310.800,00	86.027.995,00	1.249.807.104.790	-	18.100.000.000	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KerenPUPR	BPK
4	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NUOP	20436000	1PF75CLA	15 November 2019	25 November 2019	31 Desember 2024	USD	49.600.000,00	-	2.562.500,00	37.825.082.500	-	5.772.806.723	65.150.000	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KerenPUPR	BPK
5	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NUWSP	20432000	1CPUK3GA	02 Agustus 2018	08 Agustus 2018	31 Desember 2022	USD	100.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	144.540.500.000	-	14.964.049.399	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Pembiayaan Perumahan, KerenPUPR	BPK
6	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	P3PD/Village Service Delivery	20439000	1C28CF2A	30 Januari 2020	19 Februari 2020	31 Desember 2024	USD	300.000.000,00	-	5.170.000,00	73.233.050.000	-	850.976.500	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Cipta Karya (KamenPUPR)	BPK
7	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	PAMSIMAS III	20418000	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2021	USD	300.000.000,00	195.250.000,00	77.900.000,00	1.137.245.200.000	-	2.755.898.943	-	-	-	-	BPKP	
8	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	AIB & IBRD	SIMURP	20430000	1NF3PMGA	25 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,42	5.000.000,00	73.590.000.000	-	7.945.367.875	-	-	-	-	BPK	
					20600004	1HS4NF8A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,41	5.000.000,00	72.795.000.000	-	7.945.367.875	-	-	-	-	BPK	
Total														-	96.381.307.854	159.253.318	-	-	-	-	-	
Kementerian Pertahanan																						
9	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Assault Helicopter	28609300	1YAE8NGA	27 November 2019	08 April 2020	27 Februari 2022	USD	156.388.376,15	-	66.100.302,90	982.904.557.917,84	-	-	982.904.557.917	-	-	-	-	
10	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Procurement of UAV	28609200	1T70Z4PA	15 November 2019	20 Maret 2020	15 Oktober 2021	USD	93.489.897,45	-	32.989.999,10	527.889.985.803,00	-	-	527.889.985.802	-	-	-	-	
11	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	BBVA	MLM 2ND PHASE	23770700	1EUS50PA	30 Maret 2016	30 Maret 2016	30 April 2020	USD	15.287.250,00	14.388.000,00	889.250,00	13.998.633.742,50	-	-	13.998.633.742	-	-	-	-	
					23770800	1AUPJCSA	30 Maret 2016	30 Maret 2016	30 April 2020	USD	27.212.750,00	25.812.000,00	1.690.750,00	24.918.891.257,50	-	-	104.727.974.772	-	-	-	-	
12	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	40MM CANNON TWIN BARREL	23582000	1JJKXGXA	22 Desember 2015	22 Juni 2016	30 September 2020	EUR	9.732.500,00	5.725.000,00	1.717.500,00	27.366.248.975,00	-	-	27.366.248.975	-	-	-	-	
13	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Meriam Kaliber 30 MM	23589000	1WLVADRA	25 Oktober 2017	13 Juli 2018	31 Oktober 2020	EUR	19.346.850,00	8.819.887,50	3.507.210,66	60.310.163.870,12	-	-	60.310.163.869	-	-	-	-	
14	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Meriam Kaliber 40 MM	23590000	14ZFXJJA	25 Oktober 2017	13 Juli 2018	31 Oktober 2020	EUR	24.184.200,00	9.959.200,00	2.045.225,18	33.030.509.370,51	-	-	33.030.509.370	-	-	-	-	
15	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Torpedo A2445 Mod. 3	23585000	155VOT1A	10 Maret 2017	13 Juli 2018	31 Maret 2021	EUR	4.110.557,50	967.180,00	1.450.785,00	25.142.263.636,35	-	-	25.142.263.636	-	-	-	-	
16	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Torpedo Black Shark	23591000	18DWZABA	25 Oktober 2017	13 Juli 2018	28 Februari 2021	EUR	18.893.927,27	7.779.852,41	2.222.814,97	39.268.916.104,51	-	-	39.268.916.104	-	-	-	-	
17	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	BNP PARIBAS, PARIS	PENGADAAN AWR AWSS	23583000	1P4XZ2YA	07 September 2016	30 Mei 2017	31 Desember 2019	USD	4.152.250,00	4.152.249,99	-	-	-	17.646.177.438	-	-	-	-		
18	LK PLN 10	Pinjaman Luar Negeri	BNP PARIBAS, PARIS	Pengadaan FSU LPKE TA 2018	28608100	17PRJ1UA	29 Desember 2017	05 November 2018	29 Juni 2021	CHF	101.946.786,00	59.988.698,00	35.981.217,67	580.506.255.356,74	-	-	580.506.255.356	-	-	-	-	
19	LK PLN 11	Pinjaman Luar Negeri	BRI-CAYMAN ISLAND	SIMULATOR SUKHOI	24097008	1UEW33A	25 Januari 2017	25 Januari 2017	31 Desember 2020	USD	38.180.750,00	17.120.000,00	21.040.750,00	304.158.703.000,00	-	-	304.158.703.000	-	-	-	-	
20	LK PLN 12	Pinjaman Luar Negeri	COMMERZBANK	MINI COUNTER	22146000	1ZFF6MBA	25 November 2019	28 Agustus 2020	25 November 2023	EUR	152.721.115,00	-	35.934.380,00	623.324.223.668,40	-	-	623.324.223.668	-	-	-	-	
21	LK PLN 13	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	155MM Gun Howitzer	23588000	16G1HVJA	06 September 2017	30 April 2018	07 Desember 2020	EUR	100.533.750,00	24.300.117,32	68.804.952,67	1.149.064.465.429,79	-	-	1.149.064.465.426	-	-	-	-	
22	LK PLN 14	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	HELIO ANGKUT BERAT	23587002	1KT7ZLMA	15 November 2019	31 Maret 2020	15 Maret 2024	EUR	243.908.150,85	-	68.617.787,86	1.163.850.203.622,81	-	-	1.163.850.203.622	-	-	-	-	
23	LK PLN 15	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	PENGADAAN RUDAL TN AD	23586000	1TYGYPASA	22 Mei 2017	19 September 2017	28 Februari 2021	USD	170.000.000,00	81.033.512,02	75.003.133,14	1.104.606.178.198,18	-	1.104.606.178.196	-	-	-	-	-	



- 537 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
24	LK PLN 16	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	UPGRADE FCS EXOCET	23587000	14QDPHPA	08 Oktober 2018	27 Mei 2019	08 Juni 2023	EUR	35.214.565,00	-	12.428.670,00	200.633.347.645,95	-	200.633.347.645	-	200.633.347.645	-	-	-	-
25	LK PLN 17	Pinjaman Luar Negeri	CZECH EXPORT BANK	Amphibious Bridging and Ferry	22801001	10WSJMN	29 September 2017	29 September 2017	29 Maret 2021	USD	130.474.830,00	56.489.105,94	66.457.693,16	988.336.928.044,74	-	988.336.988.395	-	988.336.988.395	-	-	-	-
26	LK PLN 18	Pinjaman Luar Negeri	ERSTE BANK, VIENNA	Garut Subroto Hospital (AFPA)	23859000	16CCNUCA	02 Oktober 2019	07 Januari 2020	02 April 2020	EUR	20.250.000,00	-	20.250.000,00	315.457.942.500,00	-	315.457.942.500	-	315.457.942.500	-	-	-	-
27	LK PLN 19	Pinjaman Luar Negeri	ERSTE BANK, VIENNA	Garut Subroto Hospital (ECFA)	23860000	16SGJW7A	02 Oktober 2019	27 Maret 2020	27 Maret 2023	EUR	114.750.000,00	-	37.289.309,00	679.838.450.533,77	-	679.838.450.533	-	679.838.450.533	-	-	-	-
28	LK PLN 20	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK KOREA	KAPAL SELAM DIESEL ELEKTRIK	28845000	40Z06401	06 Juli 2012	06 Juli 2012	31 Desember 2020	USD	917.999.150,00	900.213.333,33	17.785.816,67	251.598.162.613,82	-	748.035.877.366	-	748.035.877.366	-	-	-	-
29	LK PLN 21	Pinjaman Luar Negeri	ING BANK AMSTERDAM	25SHIPSET FFBW PKR VESSEL 10514	22569000	1FESR85A	14 Desember 2016	14 Juni 2017	08 Maret 2021	EUR	166.961.250,00	137.487.500,00	14.731.875,00	229.363.901.100,00	-	229.363.901.099	-	229.363.901.099	-	-	-	-
30	LK PLN 22	Pinjaman Luar Negeri	PT BNI TOKYO BRANCH	PROC. OF MISSILE MLRS AVIRBAST	28226000	1WGFUXVA	02 November 2018	02 November 2018	02 November 2020	USD	18.700.000,00	17.444.200,00	1.255.800,00	17.754.560.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	LK PLN 23	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI CAYMAN IS	PROCUREMENT OF RADAR PASSIVE	24097013	1E7ZAEXA	20 November 2019	19 Maret 2020	20 November 2021	USD	34.849.150,00	-	24.598.400,00	382.295.216.499,00	-	382.295.216.499	-	382.295.216.499	-	-	-	-
32	LK PLN 24	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI CAYMAN IS	ROCKET AND AVRM0 AVFCU	24097009	1JWHPTXA	20 September 2017	20 April 2018	31 Desember 2020	USD	321.300.000,00	216.908.482,26	104.390.517,74	1.465.320.107.217,44	-	1.465.320.107.217	-	1.465.320.107.217	-	-	-	-
33	LK PLN 25	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-HONG KONG	Overhaul KRI Cakra-401	28747000	144PPR5A	29 November 2017	24 Juli 2018	29 Juni 2021	USD	34.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	81.912.000.000,00	-	81.912.000.000	-	81.912.000.000	-	-	-	-
34	LK PLN 26	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-SINGAPORE	UPGRADE RETROFIT C130 2009	28591000	40Z30Z01	17 Juli 2012	17 Oktober 2012	28 Februari 2020	USD	54.162.498,25	52.483.593,58	1.678.904,67	23.897.529.072,78	-	23.897.529.072	-	23.897.529.072	-	-	-	-
35	LK PLN 27	Pinjaman Luar Negeri	UBS, ZURICH	PENGADAAN PERALATAN SANDI	23780500	15CE1RCA	05 April 2019	06 November 2019	05 April 2021	CHF	25.390.380,60	11.584.814,40	11.244.814,40	181.137.767.451,26	-	181.137.767.451	-	181.137.767.451	-	-	-	-
36	LK PLN 28	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTRI	ILS CORVETTE CLASS	28607100	1SR8AMNA	06 Desember 2016	20 Desember 2017	15 September 2020	EUR	19.141.207,77	16.665.805,66	2.475.402,11	43.218.416.748,81	-	43.218.416.748	-	43.218.416.748	-	-	-	-
37	LK PLN 29	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTRI	MEDICAL EQUIP DOOY SARJOTO MKS	23857000	13P1BLTA	10 Desember 2018	08 April 2019	08 Oktober 2020	EUR	12.500.000,00	11.742.250,00	757.750,00	13.333.072.345,00	-	27.514.455.311	-	27.514.455.311	-	-	-	-
38	LK PLN 30	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTRI	MEDICAL EQUIP WAHYU SLAMET	23858000	1LDCDAKA	10 Desember 2018	12 April 2019	12 Januari 2021	EUR	12.000.000,00	7.539.229,32	4.460.770,88	77.217.285.993,86	-	77.217.285.993	-	77.217.285.993	-	-	-	-
39	LK PLN 31	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTRI	Putri Hijau Hospital	23862000	1LL3PDHA	30 Juni 2020	16 Oktober 2020	16 Oktober 2021	EUR	8.000.000,00	-	2.200.203,66	38.078.388.892,12	-	38.078.388.892	-	38.078.388.892	-	-	-	-
40	LK PLN 32	Pinjaman Luar Negeri	EKSPORTKREDIT AS	MEDIUM RANGE MISSILE	23819000	1HT9CASA	21 Juni 2017	21 Juni 2017	01 Januari 2021	USD	101.860.000,00	92.049.935,00	9.610.065,00	136.165.010.984,00	-	136.165.010.984	-	136.165.010.984	-	-	-	-
41	LK PLN 33	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	PROC. OF INFANTRY VEHICLE	28752000	1K27S3AA	08 April 2020	28 September 2020	08 April 2021	USD	69.699.840,20	-	16.399.962,40	234.224.262.996,00	-	234.224.262.996	-	234.224.262.996	-	-	-	-
Total													-	1.186.771.918.336	11.441.425.052.458	-	-	11.441.425.052.458	-	-	-	-
Kementerian Pertanian																						
42	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	A0B-0F	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX78CA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000,00	19.839.852,64	14.747.160,27	215.247.630.185,36	-	7.408.108.052	54.000.000	-	-	-	-	BPK
43	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	A0B	SMURP	20800004	1HS4NF9A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,41	5.000.000,00	72.785.000.000,00	-	8.529.677.859	-	-	-	-	-	BPK
44	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	SMURP	20430000	1WSPM8A	25 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,42	5.000.000,00	73.580.000.000,00	-	8.529.677.859	-	-	-	-	-	BPK
45	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	IPDMIP-IFAD	20818000	1116R8FA	13 Februari 2017	13 Februari 2017	30 September 2023	EUR	93.150.000,00	8.993.929,81	3.589.151,07	57.279.778.771,00	-	36.530.891.589	-	-	-	-	-	BPKP
46	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	READIS	20819000	1918RJYA	08 Januari 2018	08 Januari 2018	30 September 2023	USD	39.885.000,00	2.500.000,00	9.755.000,00	140.468.745.000,00	-	350.417.287	-	-	-	-	-	BPK
47	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	UPLANDs	20821000	1J275XUA	23 Desember 2019	23 Desember 2019	30 Juni 2025	EUR	44.950.000,00	-	300.000,00	4.936.329.000,00	-	1.378.059.127	364.537.000	-	-	-	-	BPKP
48	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	YOUTH ENTREPRENEURSHIP (YESS)	20820000	1DYTXRIA	17 Juni 2019	17 Juni 2019	31 Desember 2025	USD	55.300.000,00	500.000,00	3.500.000,00	47.925.500.000,00	-	23.136.137.938	9.034.313.056	-	-	-	-	BPK
Total													-	103.668.651.783	9.803.267.343	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Perhubungan																						



- 538 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Belanja Pegawai	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*			Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Neraca (Rupiah)		Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban	Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)				
															Belanja Barang	Belanja Modal														
49	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB	EARR LOAN 2 TRANS INFRA	21266000	156H3ESA	30 September 2019	04 November 2019	30 September 2023	USD	109.750.000,00	-	1.012.705,04	14.390.751.296,00	-	14.390.751.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
50	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	JICA	ES JKT MRT EAST WEST PHASE I	27769000	1LZT4FLA	04 Desember 2015	31 Maret 2016	31 Maret 2022	JPY	1.919.000.000,00	-	256.053.147,00	35.021.366.247,44	-	35.021.366.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
51	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	JICA	PATIMBAN PORT DEV. PROJECT II	27777000	1AVH2LAA	15 November 2017	13 Maret 2018	13 Maret 2026	JPY	118.906.000.000,00	37.389.061.798,00	23.412.082.258,00	3.210.844.180.882,89	-	2.702.441.056.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total															2.751.853.174.093															
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan																														
52	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	AKSI	21263000	17507J1A	17 Desember 2018	08 April 2019	30 Juni 2024	USD	200.000.000,00	2.142.000,00	3.519.380,30	50.103.530.000,00	-	58.798.380.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
53	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	IDB	4in1 HE	20999014	1YJJBPSA	19 Mei 2016	06 November 2016	09 Juni 2021	USD	13.870.000,00	7.823.519,18	1.362.774,02	19.814.360.427,00	-	31.837.288.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKP				
54	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IDB	SUPPORT TO HIGHER EDUCATION	20999009	10879501	02 Januari 2014	14 April 2014	30 Juni 2021	USD	174.010.000,00	148.590.344,73	5.562.468,51	77.133.395.765,00	-	2.747.105.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAP				
55	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	JICA	DEV. OF WORLD CLASS UNIV. UGM	27776000	1FAHSUWA	15 November 2017	13 Maret 2018	13 Maret 2025	JPY	8.309.000.000,00	1.122.294.873,00	1.718.102.691,00	235.245.337.408,68	-	235.245.337.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
56	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	KfW	Hasanudin University Hospital	23594000	17739EMA	01 November 2017	31 Agustus 2018	15 November 2022	EUR	30.000.000,00	1.871.283,64	5.777.959,22	99.891.006.918,63	-	99.891.006.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
57	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	SFD	DEV. OF EDUC. IN SEVEN UNIV.	27838000	21685701	12 Maret 2014	15 September 2014	30 Maret 2021	SAR	131.250.000,00	99.558.456,27	11.640.223,92	42.629.373.900,00	-	883.765.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total															428.192.884.447	552.601.224.145														
Kementerian Kesehatan																														
58	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	1SPHERE	20429000	16AND8ZA	17 Juli 2018	09 Oktober 2018	30 April 2024	USD	150.000.000,00	37.500.000,00	11.797.500,00	166.144.192.500,00	-	152.398.319.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
Total															-	152.398.319.248														
Kementerian Agama																														
59	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	REALPRO	20437000	1NW20UAA	15 November 2019	26 November 2019	31 Desember 2024	USD	250.000.000	-	8.300.000	115.531.700.000	-	55.948.641.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
60	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	IDB	4 in 1	20999003	10863301	16 Februari 2013	18 Mei 2013	18 Desember 2020	USD	123.750.000	54.158.082	48.576.958	711.449.779.201	-	895.625.909.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKP				
Total															-	71.772.625.950	697.705.416.900													
Kementerian Ketenagakerjaan																														
61	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTRIA	Maritime VTC Medan	23861000	172BTWNA	13 Desember 2019	21 Februari 2020	30 April 2023	EUR	12.400.000	-	3.100.000	52.295.840.600	-	52.295.840.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total															-	52.295.840.600														
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																														
62	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB	EARR LOAN 1 PUBLIC WORKS	21265000	17037YEA	30 September 2019	04 November 2019	30 September 2023	USD	188.000.000	-	18.901.610	279.169.099.514	-	244.490.587.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
63	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	ENGINEERING SERVICES PROJECT	21254000	1F1NDHGA	28 November 2016	21 Desember 2016	29 April 2022	USD	148.200.000	14.910.774	20.446.834	294.674.630.015	-	43.689.953.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
64	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX7BCA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	19.839.853	14.747.160	215.247.630.189	-	68.483.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
65	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	PUMP	21258000	110DKS1A	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	100.000.000	11.356.000	19.487.123	323.808.208.250	-	25.847.885.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
66	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF		21257000	1283YOPA	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	500.000.000	56.644.000	97.252.116	1.615.163.140.369	-	127.512.988.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
67	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	METRO SANITATION MAN & HEALTH	21228000	10811901	21 September 2010	22 November 2010	31 Desember 2020	USD	33.673.448	28.207.087	4.014.505	57.939.429.777	-	57.939.429.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
68	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	METRO SANITATION	21245000	10883301	13 Mei 2014	09 Juli 2014	31 Desember 2023	USD	80.000.000	6.912.862	4.768.155	67.881.137.227	-	25.292.989.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
69	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	METRO SANITATION MAN INVEST PR	21248000	10884001	13 Mei 2014	09 Juli 2014	23 Desember 2023	USD	40.000.000	-	3.443.626	49.986.614.575	-	49.986.614.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				
70	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	AIB	DISP PHASE II	20600002	1KH37LZA	29 Mei 2017	27 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	18.876.747	19.000.000	272.668.000.000	-	48.513.637.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKP				
71	LK PLN 10	Pinjaman Luar Negeri	INSUP		20600001	1PTDQAAA	01 September 2016	31 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	216.500.000	100.450.000	36.300.000	515.832.900.000	-	432.568.935.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKP				
72	LK PLN 11	Pinjaman Luar Negeri	SIMURP		20600004	1HS4NFSA	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000	5.988.873	5.000.000	72.785.000.000	-	2.272.322.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 539 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Belanja Pegawai	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*			Neraca (Rupiah)			Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban	
73	LK PLN 12	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK KOREA	CONST OF KARIAN MULTIPURP DAM	22718000	21654001	22 Desember 2011	14 Februari 2012	14 Juni 2022	KRW	109.428.000.000	69.365.516.910	15.064.658.780	185.509.637.573	-	-	185.322.232.391	-	-	-	-	-
74	LK PLN 13	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	DEV MANADO BITUNG CSU-01	28743000	UGGAGFA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	78.099.963	70.423.132	6.627.121	95.337.646.867	-	-	95.337.646.867	-	-	-	-	-
75	LK PLN 14	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	CISUMDANU Phase III	28748000	1SFVCKGA	07 Mei 2018	18 Oktober 2018	18 Oktober 2023	USD	130.387.426	47.554.803	37.735.904	543.205.128.651	-	-	543.205.128.651	-	-	-	-	-
76	LK PLN 15	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	TOLL ROAD BALUKPAPAN SAMARINDA	28741000	1VMMBHYA	29 Desember 2015	30 September 2016	30 September 2021	USD	53.405.756	37.072.647	11.419.606	168.941.652.369	-	-	168.941.652.369	-	-	-	-	-
77	LK PLN 16	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	TOLL ROAD CISUMDANU PHASE II	28742000	1RWVDTA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	219.398.580	138.555.739	47.523.330	680.123.977.395	-	-	680.123.977.395	-	-	-	-	-
78	LK PLN 17	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	TOLL ROAD SULO KERTOSONO I	28740000	1MZJG1EA	29 Desember 2015	30 September 2016	30 September 2021	USD	198.772.235	175.467.167	19.644.254	280.587.719.816	-	-	280.587.719.816	-	-	-	-	-
79	LK PLN 18	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	CSRSP	20441000	178292YA	05 Juni 2020	30 Juni 2020	30 Juni 2024	USD	150.000.000	-	3.650.000	53.322.850.000	-	-	16.067.896.650	-	-	-	-	BPK
80	LK PLN 19	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	DOISP PHASE II	20421000	1ZZ7LGXA	09 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	19.876.747	19.000.000	270.814.000.000	-	-	49.516.678.338	-	-	-	-	BPKP
81	LK PLN 20	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	ITDP	20433000	1M1JWRAA	24 Oktober 2018	28 November 2018	31 Desember 2023	USD	300.000.000	5.250.812	12.029.550	172.639.677.360	-	-	24.136.062.360	-	-	-	-	BPK
82	LK PLN 21	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NAHP	20426000	1HG7ZSWA	30 November 2017	28 Januari 2018	28 Februari 2022	USD	450.000.000	131.310.800	86.027.995	1.249.807.104.790	-	-	1.234.093.168.602	-	-	-	-	BPK
83	LK PLN 22	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NSUP	20419000	18K8ECNA	22 Agustus 2016	11 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	218.500.000	100.450.000	36.300.000	524.340.300.000	-	-	190.918.694.318	-	-	-	-	BPKP
84	LK PLN 23	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NUWSP	20432000	1CPUK3GA	02 Agustus 2018	08 Agustus 2018	31 Desember 2022	USD	100.000.000	2.500.000	10.000.000	144.540.500.000	-	-	27.758.509.272	-	-	-	-	BPK
85	LK PLN 24	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	PAMSIMAS III	20418000	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2021	USD	300.000.000	195.250.000	77.900.000	1.137.245.200.000	-	-	1.016.148.369.920	-	-	-	-	BPKP
86	LK PLN 25	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	SIMURP	20430000	1NF3PMGA	25 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000	5.888.873	5.000.000	73.590.000.000	-	-	2.361.303.858	-	-	-	-	BPK
87	LK PLN 26	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	WESTERN INDONES	20398000	10M476NA	14 Desember 2011	13 Maret 2012	28 Februari 2021	USD	250.000.000	206.815.770	15.086.434	221.805.742.448	-	-	3.940.564.156	-	-	-	-	BPK
88	LK PLN 27	Pinjaman Luar Negeri	IBD	NSUP	20999011	1ENY9EPA	19 Mei 2016	19 November 2016	09 Mei 2021	USD	311.780.000	192.559.263	32.725.332	489.538.243.482	-	-	411.299.199.281	-	-	-	-	BPKP
89	LK PLN 28	Pinjaman Luar Negeri	IBD		20999012	1NT81PXA	19 Mei 2016	19 November 2016	22 November 2021	USD	10.000.000	689.552	6.000.000	85.678.000.000	-	-	62.000.000.000	-	-	-	-	BPKP
90	LK PLN 29	Pinjaman Luar Negeri	IBD		20999013	1VFX5ZJA	19 Mei 2016	19 November 2016	04 Mei 2021	USD	8.000.000	2.943.668	1.226.135	18.331.940.797	-	-	23.585.937.210	-	-	-	-	BPKP
91	LK PLN 30	Pinjaman Luar Negeri	IBD	SANIMAS PROJECT	20999010	10880201	19 Februari 2014	19 Agustus 2014	12 Juni 2020	USD	100.000.000	70.710.966	-	-	-	-	22.176.149.540	-	-	-	-	BPKP
92	LK PLN 31	Pinjaman Luar Negeri	IBD	Trans South-South Java	20999016	1NQA7ENA	16 Mei 2017	31 Mei 2018	02 Februari 2023	USD	235.000.000	8.584.898	42.195.346	612.647.423.240	-	-	612.647.423.240	-	-	-	-	BPKP
93	LK PLN 32	Pinjaman Luar Negeri	IBD	Road	20999017	1SMHNPXA	16 Mei 2017	07 November 2017	19 Januari 2024	USD	15.000.000	1.748.489	-	29.343.862.135	-	-	-	-	-	-	-	BPKP
94	LK PLN 33	Pinjaman Luar Negeri	JICA	BALI BEACH CONSERV. PRJ PHASE2	27775000	17HCSZYA	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	9.855.000.000	-	200.511.027	27.389.711.018	-	-	-	-	-	-	-	-
95	LK PLN 34	Pinjaman Luar Negeri	JICA	COUNT SEDIMENT WONGGIRI DAM II	27767000	21684001	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	4.954.000.000	2.374.432.704	310.152.215	41.416.581.240	-	-	7.338.235.600	-	-	-	-	-
96	LK PLN 35	Pinjaman Luar Negeri	JICA	EIS METRO SANITATION MAN	27765000	21683301	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	1.968.000.000	983.478.679	82.911.687	11.474.243.967	-	-	-	-	-	-	-	-
97	LK PLN 36	Pinjaman Luar Negeri	JICA	IRSL in Central Sulawesi	27780000	16CJY14A	09 Januari 2020	22 April 2020	22 April 2026	JPY	27.970.000.000	-	561.301.671	77.082.144.576	-	-	-	-	-	-	-	-
98	LK PLN 37	Pinjaman Luar Negeri	JICA	PATIMBAN PORT DEV. PROJECT (II)	27777000	1AVH2LAA	15 November 2017	13 Maret 2018	13 Maret 2026	JPY	118.906.000.000	37.369.061.798	23.412.082.259	3.210.844.180.883	-	-	508.403.206.216	-	-	-	-	-
99	LK PLN 38	Pinjaman Luar Negeri	JICA	RENTANG IRRIGATION MORN PRJ.	27773000	1HJ95NBA	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2026	JPY	48.237.000.000	-	5.371.559.214	745.113.536.785	-	-	-	-	-	-	-	-
100	LK PLN 39	Pinjaman Luar Negeri	JICA	UPP CITARUM BASIN FLOOD MAN	27759000	21688801	28 Maret 2013	25 Juli 2013	25 Juli 2021	JPY	3.311.000.000	2.002.202.245	812.065.471	111.183.713.068	-	-	-	-	-	-	-	-
101	LK PLN 40	Pinjaman Luar Negeri	JICA	URG T DIS MERAPI & LOW PROSD B	27766000	21682601	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	5.111.000.000	4.803.732.342	371.773.893	50.138.806.039	-	-	-	-	-	-	-	-
102	LK PLN 41	Pinjaman Luar Negeri	KfW	EMISSION REDUCTION IN CITIES	22138000	21667101	02 Mei 2013	06 Mei 2014	30 Juni 2021	EUR	75.000.000	30.242.328	23.124.887	383.907.032.256	-	-	386.562.321.080	-	-	-	-	-
Total															3.784.816.686.646	7.469.579.097.440	-	-	-	-	-	-
Kementerian Pariwisata																						



- 540 -

LAMPIRAN 2.D

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)								
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban										
103	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	ITDP	20433000	1M1JWRAA	24 Oktober 2018	28 November 2018	31 Desember 2023	USD	300.000.000	5.250.812	12.029.550	172.639.677.360	-	9.568.810.600	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BPK							
Total															-	9.568.810.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional																																
104	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	RESEARCH & INNOV SCIENCE TECHN	20408000	10864001	12 April 2013	12 Juni 2013	31 Desember 2021	USD	74.763.379	66.951.345	1.124.000	16.436.252.000	-	33.128.975.216	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK							
Total															-	33.128.975.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas																																
105	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX78CA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	19.839.853	14.747.160	215.247.630.189	-	5.049.580.424	49.000.000	-	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR	BPK							
106	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	AIIB	DOISP PHASE II	20600002	1XH37LZA	29 Mei 2017	27 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	19.876.747	19.000.000	272.668.000.000	-	3.480.676.484	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR	BPKP							
107	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	AIIB	NSUP	20600001	1PTDQDAA	01 September 2016	31 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	216.500.000	100.450.000	36.300.000	515.832.900.000	-	3.540.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Deputi Bidang Pengembangan Regional	BPKP							
108	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	COREMAP-CTI	20413000	10881901	17 Maret 2014	05 Juni 2014	30 Juni 2022	USD	47.380.000	28.000.000	6.750.000	94.348.200.000	-	8.180.460.582	-	-	-	-	-	-	-	Indonesian Institute of Sciences (IISIP)	BPK							
109	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	DOISP PHASE II	20421000	1ZZ7L6XA	09 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	19.876.747	19.000.000	270.914.000.000	-	3.480.676.484	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR	BPKP							
110	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NSUP	20419000	18K6ECNA	22 Agustus 2016	11 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	216.500.000	100.450.000	36.300.000	524.340.300.000	-	4.505.986.000	-	-	-	-	-	-	-	Deputi Bidang Pengembangan Regional	BPKP							
111	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	JICA	KOMERING IRRIGATION PRJ PHASE3	27774000	1SYVA9ZA	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	15.896.000.000	-	9.408.894	1.304.712.592	-	1.304.712.592	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA	-							
112	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	JICA	PROF HUMAN RESOURCE DEV IV	27768000	21680201	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2023	JPY	7.075.000.000	4.916.722.295	695.090.451	95.368.021.346	-	104.047.272.665	-	-	-	-	-	-	-	Publindiklatren Bappenas	-							
113	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	JICA	RENTANG IRRIGATION MDRN PRJ.	27773000	1HJ85NBA	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2026	JPY	48.237.000.000	-	5.371.559.214	745.113.536.785	-	3.066.138.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Total															-	136.655.503.981	49.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN																																
114	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	OMP	20434000	1BUY9N3A	26 Oktober 2018	15 November 2018	31 Oktober 2023	USD	200.000.000	7.784.948	28.176.000	403.816.496.000	-	161.601.376.343	19.967.905.977	-	-	-	-	-	-	-	BPK RI							
Total															-	161.601.376.343	19.967.905.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepolisian Republik Indonesia																																
115	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	APC Multifungsi Brimob TA 2016	28608700	150BAKZA	28 September 2018	18 Desember 2018	28 Juli 2021	USD	33.999.754	-	33.584.579	505.108.229.062	-	-	505.108.229.062	-	-	-	-	-	-	-	-							
116	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	PENGADAAN PUSLABOR 2011	28607600	1ELURJOA	27 Maret 2017	05 April 2019	27 Juli 2020	USD	25.498.059	23.989.915	1.508.144	21.073.316.783	-	-	21.073.316.781	-	-	-	-	-	-	-	-							
117	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	PER PENG JARINGAN IT TA 2016	28608400	16GUAHGA	28 September 2018	11 Desember 2018	28 Maret 2021	USD	8.498.433	7.933.836	72.250	1.051.021.473	-	-	1.051.021.472	-	-	-	-	-	-	-	-							
118	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	PERALATAN INTEL TA 2016	28608300	1DZKYRBA	28 September 2018	18 Desember 2018	28 Januari 2021	USD	42.313.477	34.698.913	7.614.563	110.399.246.201	-	-	110.399.246.200	-	-	-	-	-	-	-	-							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 541 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Belanja Pegawai	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Neraca (Rupiah)	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban	Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)			
119	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Sabbara AWC TA 2016	28608500	18AP234A	28 September 2018	18 Desember 2018	28 Juni 2020	USD	16.999.111	16.940.319	58.792	868.301.411	-	-	-	868.301.411	-	-	-	-	-		
120	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Sabbara Quick Patrol Vehicle	28608800	14JC47XA	28 September 2018	13 Desember 2018	28 Oktober 2020	USD	28.029.003	27.996.958	32.045	473.785.645	-	-	-	473.785.645	-	-	-	-	-		
121	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	BNI SEOUL	BRIMOB LONG RANGE PATROL	28800002	1M1DVXNA	04 Maret 2019	04 Maret 2019	04 Juni 2021	USD	25.499.717	-	5.646.500	80.304.523.000	-	-	-	80.304.523.000	-	-	-	-	-		
122	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	BNI SEOUL	PUSINAFIS EQUIPMENT	28800001	138EFZKA	04 Maret 2019	04 Maret 2019	04 Maret 2021	USD	12.747.960	-	12.747.960	178.413.505.455	-	-	-	178.413.505.455	-	-	-	-	-		
123	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	MUFG SINGAPORE	PENGADAAN PERALATAN DVI	28607300	1CWHNY7A	27 Januari 2017	06 Mei 2020	28 Februari 2022	USD	5.939.237	-	385.157	5.528.542.143	-	-	-	5.528.542.142	-	-	-	-	-		
124	LK PLN 10	Pinjaman Luar Negeri	PT BNI TOKYO BRANCH	PROC OF EDUC TECH IND NAT POL	28225000	1FFPVIVA	08 Agustus 2017	08 Agustus 2017	08 Maret 2020	USD	12.707.509	12.571.242	136.267	1.944.119.862	-	-	-	1.944.119.862	-	-	-	-	-		
125	LK PLN 11	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI CAYMAN IS	Technology System of Budgeting	24097011	122ZV7AA	06 Desember 2018	21 Maret 2019	14 Agustus 2021	USD	12.725.959	6.612.048	5.166.479	81.378.972.952	-	-	-	81.378.972.951	-	-	-	-	-		
126	LK PLN 12	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	KBR EQUIPMENT T.A. 2016	28748000	1PYJBXHA	05 Desember 2018	13 Februari 2019	05 Oktober 2020	USD	12.725.945	12.168.480	559.455	7.641.597.342	-	-	-	7.641.597.341	-	-	-	-	-		
127	LK PLN 13	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	PROCUREMENT OF HELICOPTER	28751000	1XB7D7GA	06 November 2019	24 Desember 2019	06 Maret 2022	USD	169.995.989	36.810.696	79.940.005	1.141.314.468.885	-	-	-	1.025.933.388.050	-	-	-	-	-		
128	LK PLN 14	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	SPECIAL EQUIPMENT FOR ANIMALS	28608600	1V00095A	28 September 2018	08 Februari 2019	28 Juli 2020	USD	12.748.725	8.170.770	4.577.956	64.581.131.730	-	-	-	64.581.131.729	-	-	-	-	-		
129	LK PLN 15	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-HONG KONG	PROC OF FORENSIC LAP EO	28746000	127MLJBA	14 September 2017	28 November 2017	14 Juli 2020	USD	25.499.985	19.392.241	6.107.744	86.625.580.457	-	-	-	86.625.580.456	-	-	-	-	-		
130	LK PLN 16	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-SINGAPORE	Peng.Ind.Tek.Pol.TA 2016	28609100	1AXPM6JA	11 Desember 2018	11 Maret 2019	11 Juni 2021	USD	22.082.702	5.092.827	16.789.744	246.120.340.366	-	-	-	246.120.340.364	-	-	-	-	-		
131	LK PLN 17	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-SINGAPORE	Peralatan Security Barrier	28609000	12GUG6DA	11 Desember 2018	11 Maret 2019	11 Desember 2020	USD	12.718.423	12.833.848	84.575	1.212.974.650	-	-	-	1.212.974.650	-	-	-	-	-		
Total															-	-	-	2.418.658.576.571	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Desa PDTT																									
132	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	P3PO/Village Service Delivery	20439000	1C28CF2A	30 Januari 2020	19 Februari 2020	31 Desember 2024	USD	300.000.000	-	5.170.000	73.233.050.000	-	-	18.745.681.885	13.830.012.999	-	-	-	-	BPK		
133	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	PAMSIMAS III	20418000	1NPS3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2021	USD	300.000.000	195.250.000	77.900.000	1.137.245.200.000	-	-	1.559.802.740	-	-	-	-	BPKP			
134	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	TEKAD	20822000	18XMS76A	23 Desember 2019	23 Desember 2019	30 Juni 2026	EUR	28.800.000	-	3.000.000	90.924.680.000	-	-	-	4.011.794.955	-	-	-	-	BPK		
Total															-	-	-	24.317.279.589	13.830.012.999	-	-	-	-	-	-
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika																									
135	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	NATIXIS BANQUE	Scaling Up Strengthening BMKG	22461800	1XCJ3SRA	25 Januari 2019	06 Juli 2020	31 Juli 2024	EUR	20.779.100	-	4.891.996	83.843.289.483	-	-	-	110.895.004.335	-	-	-	-	-		
136	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	NATIXIS BANQUE	DEVELOPMENT OF MMS1	22461500	16ARS10A	13 Agustus 2018	16 Desember 2020	31 Juli 2025	EUR	42.782.978	-	6.374.584	110.895.004.335	-	-	-	83.843.289.482	-	-	-	-	-		
Total															-	-	-	194.738.293.817	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia																									
137	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	COREMAP-CTI	20413000	10881901	17 Maret 2014	05 Juni 2014	30 Juni 2022	USD	47.380.000	28.000.000	6.750.000	94.348.200.000	-	-	5.578.141.417	68.333.877.177	-	-	-	-	BPK		
Total															-	-	-	5.578.141.417	68.333.877.177	-	-	-	-	-	-
Badan Informasi Geospasial																									
138	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	OMP	20434000	1BYU9N3A	26 Oktober 2018	15 November 2018	31 Oktober 2023	USD	200.000.000	7.784.948	28.176.000	403.816.496.000	-	-	2.243.397.428	37.335.682.867	-	-	-	-	BPK		
Total															-	-	-	2.243.397.428	37.335.682.867	-	-	-	-	-	-
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan																									
139	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB	STAR ADDITIONAL FINANCING	21268000	17JES3EA	08 Desember 2019	15 Januari 2020	30 September 2025	USD	90.000.000	-	Rp1.500.000	Rp22.053.000.000	-	-	8.638.511.591	6.340.891.956	-	-	-	-	BPKP		
140	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	STAR PROJECT	21238000	10859501	26 November 2012	19 Februari 2013	25 September 2020	USD	56.918.189	57.115.235	-	-	-	-	3.287.892.557	1.221.066.105	-	-	-	-	BPK		



- 542 -

LAMPIRAN 2.D

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban			
Total														11.926.404.148	7.561.958.061								
Badan Pengusahaan Batam																							
141	UK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK KOREA	DEV OF SEWERAGE SYST IN BATAM	22719000	21687101	21 Maret 2014	29 Desember 2014	30 Juni 2021	KRW	57.387.000.000	31.906.667.090	10.892.733.800	133.013.797.551	-	-	132.753.184.114	-	-	-	-	-	
Total															132.753.184.114								
Total													-	8.809.477.137.022	23.268.215.963.036								

* nilai belanja merupakan nilai realisasi SP2D pada KL dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 543 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.E

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan /GrantID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan/Grant Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
														Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
Kementerian Sekretariat Negara																							
1	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	INEY (STUNTING)	GIBR0296	278EATNA	01-08-2018	01-08-2018	31-12-2021	USD	20.000.000	-	3.000.000	44.091.500.000	-	29.736.103.027	-	-	-	-	-	Kementerian Sekretariat Negara cq. Sekretariat Wakil Presiden	BPK
Kementerian Dalam Negeri																							
2	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	INEY (STUNTING)	GIBR0296	278EATNA	01-08-2018	01-08-2018	31-12-2021	USD	20.000.000	-	3.000.000	44.091.500.000	-	23.328.008.943	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	BPK
Kementerian Keuangan																							
3	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	IIFD	GIBR0290	24DE9BGA	25-04-2016	25-04-2016	31-12-2021	USD	8.280.000	-	1.271.561	18.158.175.318	-	16.166.262.526	515.204.204	-	-	-	-	-	BPK
4	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	PFM MDTF II	GIBR0289	2H616GHA	21-03-2016	21-03-2016	14-08-2020	USD	2.384.321	-	(220.288)	(3.148.298.554)	-	870.448.145	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Perhubungan																							
5	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	KfW	STUDY SURABAYA REGIONAL RAIL	GBDE0078	2PVSR06J	12-01-2015	12-01-2015	09-07-2020	EUR	1.325.000	-	247.250	3.901.982.042	-	-	3.901.982.042	-	-	-	-	-	-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
6	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	ADB	Community-Focused Investments	GADB0159	2SAWBGKA	26-10-2016	24-01-2017	30-06-2022	USD	17.000.000	-	3.297.708	48.405.526.920	-	40.500.056.226	4.890.325.014	-	-	-	-	-	BPK
7	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	BioCF-ISFL	GIBR0287	2PV9GJLA	31-10-2018	31-10-2018	30-09-2021	USD	1.500.000	-	425.945	5.901.846.170	-	1.443.738.600	246.250.000	-	-	-	-	-	BPK
8	LK HLN 3	Hibah Luar Negeri	IBRD	FCPF REDD+ READINESS PREPARATION	GIBR0276	71671901	10-06-2011	10-06-2011	31-12-2020	USD	8.196.428	-	877.170	12.721.383.328	-	14.533.109.625	113.000.000	-	-	-	-	-	BPK
9	LK HLN 4	Hibah Luar Negeri	IBRD	Forest Investment Program	GIBR0283	22PS3RDA	29-08-2016	29-09-2016	31-12-2021	USD	17.350.000	-	4.781.690	68.761.010.210	-	49.255.712.253	852.635.600	-	-	-	-	-	BPK
10	LK HLN 5	Hibah Luar Negeri	IBRD	OPTF-HCFC Phase Out	GIBR0281	73821901	11-07-2013	11-07-2013	30-06-2023	USD	6.969.350	-	461.983	6.543.881.324	-	4.501.381.798	-	-	-	-	-	-	BPKP
11	LK HLN 6	Hibah Luar Negeri	KfW	FOREST PROG- SUP FOR MIN FORES	GBDE0068	71227101	19-10-2010	19-10-2010	07-01-2021	EUR	20.000.000	-	1.195.667	19.306.000.902	-	16.029.224.607	221.760.000	-	-	3.899.759.008	-	-	-
12	LK HLN 7	Hibah Luar Negeri	KfW	Forest Program IV	GBDE0082	2KYJAT3A	23-04-2019	23-04-2019	30-12-2026	EUR	23.500.000	-	413.597	6.953.524.611	-	1.197.614.800	3.868.733.809	-	-	-	-	-	-
13	LK HLN 8	Hibah Luar Negeri	KfW	FOREST PROGRAMME II	GBDE0075	267KEYYS	16-07-2014	16-07-2014	31-12-2022	EUR	23.000.000	-	2.949.691	51.576.895.863	-	58.601.519.518	4.717.453.195	-	-	-	-	-	BPK
14	LK HLN 9	Hibah Luar Negeri	KfW	FOREST PROGRAMME III SULAWESI	GBDE0079	21LHDAJA	29-12-2015	29-12-2015	31-12-2024	EUR	13.500.000	-	2.346.521	40.045.008.147	-	32.200.456.653	743.772.182	-	-	-	-	-	BPK
15	LK HLN 10	Hibah Luar Negeri	KfW	Gunung Leuser Ecosystem	GBDE0077	2AHFUGNL	25-11-2014	25-11-2014	07-12-2020	EUR	8.460.000	-	2.263.571	37.924.098.126	-	6.429.799.068	-	-	453.300.000	-	-	-	BPKP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																							
16	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	Support TF for PAMSIMAS III	GIBR0298	2B7K43PA	29-01-2019	29-01-2019	31-12-2021	USD	23.600.000	-	6.200.000	87.227.400.000	-	26.528.284.600	-	-	-	-	-	-	BPK
17	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	Tourism	GIBR0295	2XNH4UJA	21-11-2017	21-11-2017	30-06-2020	USD	2.100.000	-	1.021.247	14.000.688.049	-	-	-	-	-	-	-	-	BPK
18	LK HLN 3	Hibah Luar Negeri	KfW	Emission Reduction in Cities	GBDE0074	73857101	02-05-2013	02-05-2013	12-01-2021	EUR	6.980.000	-	410.000	6.832.481.700	-	-	6.832.481.700	-	-	-	-	-	BPKP
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas																							
19	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	A D B GROUP	COREMAP CTI	GADB0150	74828801	23-12-2013	23-03-2014	31-12-2022	USD	8.000.000.00	-	431.120	6.115.267.015	-	1.133.908.090	-	-	-	-	-	-	BPK
20	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	COREMAP CTI	GIBR0285	74975701	17-03-2014	15-06-2014	30-06-2022	USD	10.000.000.00	-	1.500.000	21.155.200.000	-	20.969.053.092	46.813.636	-	-	-	-	-	BPK
21	LK HLN 3	Hibah Luar Negeri	IBRD	INEY (STUNTING)	GIBR0296	278EATNA	01-08-2018	01-08-2018	31-12-2021	USD	20.000.000.00	-	3.000.000	44.091.500.000	-	5.594.188.736	-	-	-	-	-	-	BPK
22	LK HLN 4	Hibah Luar Negeri	IFAD	IPDMIP-IFAD	GIFAD0007	2E6LVHNA	13-02-2017	13-02-2017	30-09-2023	EUR	1.410.000.00	-	175.337	3.062.035.030	-	4.136.351.675	339.270.000	-	-	-	-	-	BPKP
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi																							
23	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IFAD	TEKAD	GIFAD0010	2AJUD5HA	23-12-2019	23-12-2019	30-06-2026	EUR	1.360.000	-	250.000	4.170.852.500	-	202.581.000	-	-	-	-	-	-	BPK
Total														-	367.358.474.031	27.288.681.382	-	-	-	-	-	-	-

* nilai belanja merupakan nilai realisasi SP2D pada KL dengan sumber dana Hibah Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 544 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.F

**Belanja Mandatory Spending
Realisasi Anggaran Pendidikan TA 2020**

Uraian	Realisasi
APBN	508.843.834.877.000
Kementerian Dalam Negeri	554.993.424.793
Kementerian Pertahanan	185.386.951.424
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	50.096.642.049
Kementerian Keuangan	2.173.856.555.341
Kementerian Pertanian	317.600.176.273
Kementerian Perindustrian	710.280.609.738
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	190.049.671.417
Kementerian Perhubungan	2.764.482.039.080
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	79.061.797.338.948
Kementerian Kesehatan	1.492.209.753.270
Kementerian Agama	58.496.176.938.806
Kementerian Ketenagakerjaan	2.576.430.216.613
Kementerian Sosial	70.254.581.740
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	102.782.196.703
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	392.203.714.974
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2.861.092.517.582
Kementerian Pariwisata	673.659.603.034
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	1.452.651.409.854
Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	50.265.662.959
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	246.924.916.442
Kementerian Komunikasi Dan Informatika	94.036.454.917
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	144.334.803.380
Badan Tenaga Nuklir Nasional	29.004.097.392
Lembaga Administrasi Negara	19.207.544.451
Kementerian Perdagangan	5.823.634.773
Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	397.471.511.174
Bendahara Umum Negara	19.134.142.050.924
Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	174.247.215.018.051
Dana Transfer Umum	150.224.700.000.000
DAK Fisik	18.028.306.418.799
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.859.259.952.000
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.318.819.302.000
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.184.000
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	191.909.875.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.998.367.300.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.174.932.300.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	135.432.000.000
Dana Otonomi Khusus	3.562.900.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 545 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.F

Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah	281.411.630.605.092
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	10.000.000.000.000
Dana Abadi Penelitian	4.000.000.000.000
Dana Abadi Kebudayaan	1.000.000.000.000
Dana Abadi Perguruan Tinggi	3.000.000.000.000
Jumlah Realisasi Pembiayaan	18.000.000.000.000
Total Realisasi Anggaran Pendidikan	473.658.845.623.143
% Realisasi Anggaran Pendidikan	93,09%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 546 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.F

Realisasi Anggaran Kesehatan TA 2020

Uraian	Realisasi
APBN	212.452.700.000.000
Kementerian Kesehatan	100.715.189.993.223
BPOM	1.459.523.487.684
BKKBN	2.913.825.985.027
Kementerian Pertahanan	9.499.989.382.650
Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.141.616.239.091
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.913.825.985.027
Kementerian Komunikasi Dan Informatika	161.005.987.685
Badan Intelijen Negara	816.874.770.200
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	80.809.575.120
Bendahara Umum Negara	13.441.781.508.082
Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	135.144.442.913.789
DAK Fisik	19.174.650.239.679
DAK NonFisik	15.704.774.423.376
Dana Otonomi Khusus	2.230.800.000.000
Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah	37.110.224.663.055
Jumlah Realisasi Pembiayaan	-
Total Realisasi Anggaran Kesehatan	172.254.667.576.844
% Realisasi Anggaran Kesehatan	81,08%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 547 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.G

**PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)
PER 31 DESEMBER 2020**

BA	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALOKASI ANGGARAN PER TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
005	MAHKAMAH AGUNG	513.046.000.000				
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	350.000.000.000	214.802.000.000			
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	43.500.000.000	23.035.370.000			
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	615.973.544.037	987.104.097.973	935.447.548.749	311.306.746.659	224.102.367.804
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.906.573.933.600	1.096.326.000.000	84.000.000.000		
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.485.067.887.000	1.257.373.644.000	387.095.171.000	826.261.649.000	
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	94.090.967.000				
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.903.714.064.000				
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	148.394.002.200				
025	KEMENTERIAN AGAMA	1.251.882.998.523	855.119.311.529			
027	KEMENTERIAN SOSIAL	275.385.904.837	275.385.904.837	275.385.904.836		
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	257.764.450.000	108.694.139.222	74.651.384.656		
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	78.386.750.000	214.599.962.000			
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	36.349.347.773.277	6.683.770.076.110	1.880.694.754.160	570.383.474.000	220.837.489.000
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8.013.942.439.000				
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	247.329.535.000	174.205.501.000			
080	BATAN	27.641.000.000	92.777.000.000	140.425.000.000		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 548 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 2.G

**PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)
PER 31 DESEMBER 2020**

BA	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALOKASI ANGGARAN PER TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	21.060.925.000				
107	BADAN SAR NASIONAL	376.347.264.000				
119	BADAN KEAMANAN LAUT	103.024.380.000				
JUMLAH		56.062.473.817.474	11.983.193.006.671	3.777.699.763.402	1.707.951.869.659	444.939.856.804



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 549 -

LAMPIRAN 3

LAPORAN REALISASI

TKDD TA 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 550 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.A

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	WILAYAH	DANA BAGI HASIL				DAU	DAK	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA INSENTIF DAERAH, TRANSFER DANA KEISTIMEWAHAN DIY DAN DANA DESA	TOTAL TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
		PAJAK	SDA	CUKAI	JUMLAH 8 = 3 + 4 + 5				
1	2	3	4	5	8 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Provinsi Aceh	537.889.048.922	583.615.241.009	17.613.688.642	1.138.517.959.573	14.236.289.378.000	5.186.703.931.583	13.095.925.452.462	33.657.836.721.618
2	Provinsi Sumatera Utara	1.335.874.881.620	216.629.981.920	15.155.889.399	1.567.660.742.939	22.837.576.589.000	10.012.265.974.005	5.221.200.520.691	39.738.703.828.635
3	Provinsi Sumatera Barat	395.006.187.394	70.751.450.825	4.770.102.770	470.527.740.889	12.872.260.806.000	5.211.895.216.839	1.599.802.491.319	19.954.486.355.247
4	Provinsi Riau	3.143.612.243.092	4.225.378.847.093	4.549.800	7.368.995.640.585	8.406.131.918.530	4.712.581.416.381	1.854.983.715.250	22.342.672.690.746
5	Provinsi Kepulauan Riau	807.342.773.134	1.368.486.217.899	575.730.721	1.976.404.721.714	4.317.726.419.000	1.817.323.762.272	534.389.016.241	8.445.825.919.227
6	Provinsi Jambi	649.824.020.192	1.129.488.705.241	2.258.867.608	1.781.649.593.041	7.502.959.382.003	3.040.777.722.721	1.557.560.113.895	13.882.936.811.657
7	Provinsi Sumatera Selatan	2.861.998.272.771	5.435.462.286.583	1.065.367.497	8.098.526.926.851	11.681.145.314.000	5.883.745.388.823	3.268.980.188.819	28.942.407.828.583
8	Provinsi Bangka Belitung	178.863.999.512	364.458.493.770	118.690	543.327.611.882	4.046.273.512.900	1.413.586.254.319	591.116.032.990	8.594.307.411.191
9	Provinsi Bengkulu	155.275.588.832	123.829.694.007	-	279.105.260.839	6.066.414.779.000	2.361.334.282.797	1.335.531.253.150	10.062.395.595.786
10	Provinsi Lampung	403.782.287.755	178.678.774.025	5.995.323.160	586.456.384.940	12.157.055.111.000	5.574.971.548.115	2.909.878.773.887	21.228.361.796.042
11	Provinsi DKI Jakarta	13.928.938.702.814	80.805.977.722	75.027.600	14.009.821.708.136	-	3.282.953.513.783	65.176.975.000	17.357.952.196.919
12	Provinsi Jawa Barat	4.069.071.393.027	1.783.670.823.028	372.732.646.170	5.205.474.852.225	32.798.632.956.021	21.298.174.559.801	7.254.987.020.841	67.567.269.388.888
13	Provinsi Banten	1.797.962.830.153	21.138.729.721	98.927.000	1.819.200.498.874	7.914.848.056.000	4.917.352.963.142	1.483.925.070.000	16.135.328.566.016
14	Provinsi Jawa Tengah	1.847.960.074.047	103.842.707.272	677.411.848.318	2.629.314.630.437	35.323.981.967.000	17.463.891.267.844	10.182.763.414.083	65.599.951.279.364
15	Provinsi DI Yogyakarta	288.348.676.633	4.105.282.650	11.971.000.857	314.424.959.940	5.257.119.715.000	2.371.840.770.312	2.209.888.610.300	10.153.053.055.552
16	Provinsi Jawa Timur	3.219.897.831.325	3.481.734.289.238	1.863.160.956.378	8.344.793.176.941	37.862.670.743.000	18.590.718.159.233	9.775.748.680.378	74.573.930.759.552
17	Provinsi Kalimantan Barat	425.041.451.153	301.649.332.558	189.058.882	726.958.842.591	10.930.487.685.000	4.726.758.140.020	2.395.816.806.760	18.779.931.474.371
18	Provinsi Kalimantan Tengah	500.097.978.062	1.513.423.314.041	154.069.899	2.013.675.362.002	9.361.563.643.000	3.297.946.914.158	1.945.724.215.854	14.818.900.135.014
19	Provinsi Kalimantan Selatan	680.911.582.664	4.258.924.830.381	496.800	4.919.936.709.645	7.581.907.115.000	3.342.512.542.080	2.322.829.825.092	18.188.868.292.727
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.525.373.232.609	11.759.124.759.151	2.378.500	14.284.600.370.260	5.393.165.714.000	2.891.995.003.522	1.322.683.232.912	23.892.344.320.694
21	Provinsi Kalimantan Utara	327.106.310.086	922.916.505.057	-	1.250.022.815.143	3.726.056.753.000	1.081.769.954.103	687.891.599.000	6.727.741.121.246
22	Provinsi Sulawesi Utara	271.814.491.588	158.953.627.571	-	430.768.119.159	8.147.792.208.000	3.081.829.035.238	1.757.233.249.654	13.417.622.611.051
23	Provinsi Gorontalo	73.151.528.348	7.733.629.219	846.825	80.886.002.192	3.806.478.200.000	1.539.670.545.310	872.478.708.550	6.298.513.456.052
24	Provinsi Sulawesi Tengah	903.996.384.133	932.559.748.637	973.626.875	1.237.429.761.745	9.039.566.878.000	4.014.943.409.317	1.929.251.829.118	16.218.211.877.180
25	Provinsi Sulawesi Selatan	688.577.061.325	249.285.904.565	13.887.141.518	931.560.127.408	17.523.299.149.000	8.249.628.215.943	3.038.851.301.058	29.743.339.793.409



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 551 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.A

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	WILAYAH	DANA BAGI HASIL				DAU	DAS	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA INSENTIF BAERAN, TRANSFER DANA KESTIMAWAAN SIY DAN DANA DESA	TOTAL TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
		PAJAK	SDA	CUKAI	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
26	Provinsi Sulawesi Barat	65 727 719 424	5 335 416 587	-	71 063 135 991	4 020 857 165 000	1.888 348 483 795	707 448 911 604	6 687 715 896 590
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	214 339 408 389	796 206 209 037	2 150 200	1 010 547 765 626	8 393 148 277 000	3 981 504 569 077	2 167 136 635 086	16 552 337 345 789
28	Provinsi Bali	540 753 126 811	7 094 456 601	8 449 010 821	556 286 624 233	6 739 800 892 000	2 615 089 242 010	1 385 718 121 000	11 306 904 979 243
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	276 673 523 008	296 659 394 000	323 406 451 127	896 739 068 135	8 148 705 304 000	4 161 646 658 487	1 688 758 250 000	14 875 850 280 632
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	239 518 896 174	25 548 845 363	4 275 711 232	269 343 511 769	12 849 034 910 000	6 202 787 231 148	3 382 423 804 265	22 703 589 457 182
31	Provinsi Maluku	168 362 398 022	100 901 643 312	-	269 264 042 334	7 449 371 467 000	2 796 779 502 930	1 298 473 858 428	11 811 888 871 692
32	Provinsi Maluku Utara	153 612 952 632	516 874 181 712	-	672 587 134 344	5 866 394 530 000	2 375 053 229 248	1 235 563 031 134	10 250 668 324 726
33	Provinsi Papua	881 677 669 827	2 154 107 284 689	-	3 035 784 954 486	20 797 198 612 000	5 255 144 582 614	13 563 380 259 072	42 651 508 418 182
34	Provinsi Papua Barat	757 352 156 867	3 359 147 335 354	-	4 116 499 492 221	7 544 514 748 000	2 114 517 648 682	5 622 251 407 663	19 587 783 496 366
35	Sisa Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		44.283.738.827 545	46.898.883.739 758	3.124.018 678 699	93.906.361 247 000	381 612 451 495 551	176.578.831.927 772	118 432 531 485 856	762.530.176.156 179

Catatan: Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatas adalah Total dari Realisasi Pemerintah Provinsi ditambah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 552 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
1	Provinsi Aceh	148.003.235.864	100.400.658.353	47.602.577.511	148.003.235.864
2	Kab. Aceh Barat	16.275.736.452	7.858.140.979	8.417.595.473	16.275.736.452
3	Kab. Aceh Besar	13.180.010.376	9.028.483.707	4.151.526.669	13.180.010.376
4	Kab. Aceh Selatan	9.143.609.483	5.073.904.001	4.069.705.482	9.143.609.483
5	Kab. Aceh Singkil	9.434.670.651	3.305.753.785	6.128.916.866	9.434.670.651
6	Kab. Aceh Tengah	10.426.832.623	5.771.246.480	4.655.586.143	10.426.832.623
7	Kab. Aceh Tenggara	6.753.881.485	2.848.279.680	3.905.601.805	6.753.881.485
8	Kab. Aceh Timur	29.088.848.341	8.749.536.715	20.339.311.626	29.088.848.341
9	Kab. Aceh Utara	62.152.788.892	8.010.941.627	54.141.847.265	62.152.788.892
10	Kab. Bireuen	11.911.368.894	6.982.822.370	4.928.546.524	11.911.368.894
11	Kab. Pidie	11.483.234.592	6.305.887.168	5.177.347.424	11.483.234.592
12	Kab. Simeulue	6.509.543.549	2.796.903.340	3.712.640.209	6.509.543.549
13	Kota Banda Aceh	32.992.501.068	29.593.992.228	3.398.508.840	32.992.501.068



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 553 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
14	Kota Sabang	6.970.927.675	3.561.794.981	3.409.132.694	6.970.927.675
15	Kota Langsa	9.371.328.219	5.550.051.229	3.821.276.990	9.371.328.219
16	Kota Lhokseumawe	40.054.803.857	13.500.512.603	26.554.291.254	40.054.803.857
17	Kab. Nagan Raya	8.818.401.629	3.190.477.432	5.627.924.197	8.818.401.629
18	Kab. Aceh Jaya	7.417.773.373	3.479.502.073	3.938.271.300	7.417.773.373
19	Kab. Pidie Jaya	7.141.064.464	3.615.307.074	3.525.757.390	7.141.064.464
20	Kab. Aceh Barat Daya	7.239.699.739	3.508.499.777	3.731.199.962	7.239.699.739
21	Kab. Gayo Lues	7.064.369.538	3.067.524.922	3.996.844.616	7.064.369.538
22	Kab. Aceh Tamiang	60.463.306.742	5.761.073.187	54.702.233.555	60.463.306.742
23	Kab. Bener Meriah	6.959.121.220	3.392.656.017	3.566.465.203	6.959.121.220
24	Kota Subukussalam	8.831.990.196	4.936.917.721	3.895.072.475	8.831.990.196
25	Provinsi Sumatera Utara	421.882.759.048	352.726.692.106	69.156.066.942	421.882.759.048
26	Kab. Asahan	35.460.401.705	13.142.444.375	22.317.957.330	35.460.401.705



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 554 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
27	Kab. Dairi	12.315.795.748	8.199.028.141	4.116.767.607	12.315.795.748
28	Kab. Deli Serdang	57.557.879.403	38.876.627.188	18.681.252.215	57.557.879.403
29	Kab. Karo	14.798.574.420	10.414.749.118	4.383.825.302	14.798.574.420
30	Kab. Labuhanbatu	26.142.139.202	10.447.908.799	15.694.230.403	26.142.139.202
31	Kab. Langkat	113.591.683.384	15.461.211.426	98.130.471.958	113.591.683.384
32	Kab. Mandailing Natal	16.611.717.105	7.806.835.008	8.804.882.097	16.611.717.105
33	Kab. Nias	8.726.163.900	5.396.164.749	3.329.999.151	8.726.163.900
34	Kab. Simalungun	30.871.376.163	13.602.867.986	17.268.508.177	30.871.376.163
35	Kab. Tapanuli Selatan	28.642.080.810	13.227.529.896	15.414.550.914	28.642.080.810
36	Kab. Tapanuli Tengah	13.002.020.044	7.732.395.054	5.269.624.990	13.002.020.044
37	Kab. Tapanuli Utara	21.413.515.065	9.499.537.911	11.913.977.154	21.413.515.065
38	Kab. Toba Samosir	13.901.308.312	10.125.144.829	3.776.163.483	13.901.308.312
39	Kota Binjai	17.756.652.185	11.765.543.446	5.991.108.739	17.756.652.185



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 555 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
40	Kota Medan	214.375.276.463	207.350.661.985	7.024.614.478	214.375.276.463
41	Kota Pematang Siantar	21.666.828.747	18.323.920.422	3.342.908.325	21.666.828.747
42	Kota Sibolga	13.175.515.096	9.813.353.856	3.362.161.240	13.175.515.096
43	Kota Tanjung Balai	11.065.210.722	7.607.001.785	3.458.208.937	11.065.210.722
44	Kab. Batu Bara	20.509.550.011	14.243.176.104	6.266.373.907	20.509.550.011
45	Kab. Labuhanbatu Utara	20.560.850.846	8.631.412.965	11.929.437.881	20.560.850.846
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	30.201.105.410	8.220.316.829	21.980.788.581	30.201.105.410
47	Kab. Padang Lawas Utara	22.169.236.355	5.734.848.213	16.434.388.142	22.169.236.355
48	Kab. Padang Lawas	23.425.964.075	6.445.655.198	16.980.308.877	23.425.964.075
49	Kab. Nias Utara	9.674.605.988	6.091.041.136	3.583.564.852	9.674.605.988
50	Kab. Nias Barat	8.867.203.397	5.561.706.776	3.305.496.621	8.867.203.397
51	Kota Tebing Tinggi	12.277.321.473	8.971.396.439	3.305.925.034	12.277.321.473
52	Kota Padang Sidempuan	15.513.835.235	11.878.923.248	3.634.911.987	15.513.835.235



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 556 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
53	Kab. Pakpak Bharat	9.538.362.639	5.585.918.540	3.952.444.099	9.538.362.639
54	Kab. Nias Selatan	11.308.906.362	6.132.165.806	5.176.740.556	11.308.906.362
55	Kab. Humbang Hasundutan	10.357.163.896	6.241.392.187	4.115.771.709	10.357.163.896
56	Kab. Serdang Bedagai	25.669.475.805	10.382.438.233	15.287.037.572	25.669.475.805
57	Kab. Samosir	10.588.350.423	6.828.832.886	3.759.517.537	10.588.350.423
58	Kota Gunungsitoli	12.256.052.183	8.956.024.041	3.300.028.142	12.256.052.183
59	Provinsi Sumatera Barat	126.832.386.290	117.596.434.412	9.235.951.878	126.832.386.290
60	Kab. Lima Puluh Kota	12.457.929.235	8.231.570.951	4.226.358.284	12.457.929.235
61	Kab. Agam	15.022.088.728	9.496.676.913	5.525.411.815	15.022.088.728
62	Kab. Kepulauan Mentawai	9.602.659.795	4.841.894.205	4.760.765.590	9.602.659.795
63	Kab. Padang Pariaman	6.855.006.957	3.096.488.815	3.758.518.142	6.855.006.957
64	Kab. Pasaman	9.548.740.290	5.658.469.036	3.890.271.254	9.548.740.290
65	Kab. Pesisir Selatan	11.596.581.178	4.332.208.404	7.264.372.774	11.596.581.178



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 557 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
66	Kab. Sijunjung	9.096.047.227	4.166.862.679	4.929.184.548	9.096.047.227
67	Kab. Solok	9.408.644.038	5.332.635.502	4.076.008.536	9.408.644.038
68	Kab. Tanah Datar	11.703.507.745	8.082.361.098	3.621.146.647	11.703.507.745
69	Kota Bukit Tinggi	13.374.457.145	10.242.175.804	3.132.281.341	13.374.457.145
70	Kota Padang Panjang	7.981.572.127	4.793.216.281	3.188.355.846	7.981.572.127
71	Kota Padang	71.716.209.265	65.722.744.099	5.993.465.166	71.716.209.265
72	Kota Payakumbuh	8.968.869.880	5.812.150.863	3.156.719.017	8.968.869.880
73	Kota Sawahlunto	8.191.265.542	4.379.082.368	3.812.183.174	8.191.265.542
74	Kota Solok	9.159.063.125	5.879.449.379	3.279.613.746	9.159.063.125
75	Kota Pariaman	9.991.242.393	6.574.662.447	3.416.579.946	9.991.242.393
76	Kab. Pasaman Barat	15.382.989.534	7.377.643.500	8.005.346.034	15.382.989.534
77	Kab. Dharmasraya	13.167.094.900	6.823.371.615	6.343.723.285	13.167.094.900
78	Kab. Solok Selatan	14.849.832.000	4.235.438.513	10.714.393.487	14.849.832.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 558 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
79	Provinsi Riau	761.173.040.462	236.113.297.970	525.059.742.492	761.173.040.462
80	Kab. Bengkalis	1.057.105.887.982	60.932.547.444	996.173.340.538	1.057.105.887.982
81	Kab. Indragiri Hilir	38.185.130.427	18.582.826.171	19.602.304.256	38.185.130.427
82	Kab. Indragiri Hulu	69.592.907.875	16.362.488.341	53.230.419.534	69.592.907.875
83	Kab. Kampar	209.060.247.705	21.498.612.996	187.561.634.709	209.060.247.705
84	Kab. Kuantan Singingi	25.306.008.512	13.386.872.328	11.919.136.184	25.306.008.512
85	Kab. Pelalawan	101.425.311.664	27.055.927.747	74.369.383.917	101.425.311.664
86	Kab. Rokan Hilir	243.877.637.518	17.046.718.842	226.830.918.676	243.877.637.518
87	Kab. Rokan Hulu	49.365.739.395	15.502.634.582	33.863.104.813	49.365.739.395
88	Kab. Siak	377.293.633.477	24.237.211.060	353.056.422.417	377.293.633.477
89	Kota Dumai	47.191.538.762	29.449.500.701	17.742.038.061	47.191.538.762
90	Kota Pekanbaru	112.929.387.645	98.168.864.684	14.760.522.961	112.929.387.645
91	Kab. Kepulauan Meranti	51.105.772.268	13.475.738.879	37.630.033.389	51.105.772.268



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 559 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
92	Provinsi Kepulauan Riau	197.877.274.559	159.693.540.020	38.183.734.539	197.877.274.559
93	Kab. Bintan	23.951.093.791	18.393.343.621	5.557.750.170	23.951.093.791
94	Kab. Natuna	95.668.721.641	14.224.322.854	81.444.398.787	95.668.721.641
95	Kab. Karimun	39.982.274.308	23.989.537.736	15.992.736.572	39.982.274.308
96	Kota Batam	128.308.534.367	122.025.656.595	6.282.877.772	128.308.534.367
97	Kab. Kepulauan Anambas	73.122.835.464	18.220.959.049	54.901.876.415	73.122.835.464
98	Kota Tanjung Pinang	30.239.812.719	26.091.949.837	4.147.862.882	30.239.812.719
99	Kab. Lingga	18.192.226.285	12.986.239.688	5.205.986.597	18.192.226.285
100	Provinsi Jambi	157.012.580.626	62.786.280.779	94.226.299.847	157.012.580.626
101	Kab. Batanghari	61.134.862.259	3.685.493.041	57.449.369.218	61.134.862.259
102	Kab. Bungo	21.114.288.301	8.474.492.123	12.639.796.178	21.114.288.301
103	Kab. Kerinci	7.921.017.842	3.312.302.100	4.608.715.742	7.921.017.842
104	Kab. Merangin	13.226.507.653	6.965.531.691	6.260.975.962	13.226.507.653



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 560 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
105	Kab. Muaro Jambi	69.950.618.201	6.641.859.512	63.308.758.689	69.950.618.201
106	Kab. Sarolangun	35.255.946.815	5.466.847.010	29.789.099.805	35.255.946.815
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	130.522.695.657	7.166.342.865	123.356.352.792	130.522.695.657
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	58.566.269.188	6.966.965.504	51.599.303.684	58.566.269.188
109	Kab. Tebo	23.401.917.326	5.391.521.624	18.010.395.702	23.401.917.326
110	Kota Jambi	62.351.931.035	34.799.281.400	27.552.649.635	62.351.931.035
111	Kota Sungai Penuh	9.465.385.289	6.125.698.232	3.339.687.057	9.465.385.289
112	Provinsi Sumatera Selatan	618.638.614.053	209.498.342.896	409.140.271.157	618.638.614.053
113	Kab. Lahat	115.659.079.940	12.906.406.059	102.752.673.881	115.659.079.940
114	Kab. Musi Banyuasin	701.940.644.992	20.472.356.498	681.468.288.494	701.940.644.992
115	Kab. Musi Rawas	152.607.425.687	9.270.889.344	143.336.536.343	152.607.425.687
116	Kab. Musi Rawas Utara	22.603.577.407	7.383.398.876	15.220.178.531	22.603.577.407
117	Kab. Muara Enim	376.916.500.950	37.205.208.400	339.711.292.550	376.916.500.950



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 561 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
118	Kab. Ogan Komering Ilir	35.097.554.961	13.387.943.157	21.709.611.804	35.097.554.961
119	Kab. Ogan Komering Ulu	68.963.797.654	11.913.428.042	57.050.369.612	68.963.797.654
120	Kota Palembang	112.591.140.912	107.386.735.961	5.204.404.951	112.591.140.912
121	Kota Pagar Alam	11.738.984.040	7.546.178.758	4.192.805.282	11.738.984.040
122	Kota Lubuk Linggau	15.922.839.480	12.304.070.448	3.618.769.032	15.922.839.480
123	Kota Prabumulih	73.597.425.102	17.065.022.373	56.532.402.729	73.597.425.102
124	Kab. Empat Lawang	12.693.286.442	8.041.535.340	4.651.751.102	12.693.286.442
125	Kab. Banyuasin	57.994.104.860	13.156.212.972	44.837.891.888	57.994.104.860
126	Kab. Ogan Ilir	53.718.388.403	10.075.167.723	43.643.220.680	53.718.388.403
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	15.326.797.051	9.831.642.975	5.495.154.076	15.326.797.051
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	12.850.396.939	7.846.799.298	5.003.597.641	12.850.396.939
129	Kab. Penukai Abab Lematang Ilir	203.138.713.898	9.344.563.669	193.794.150.229	203.138.713.898
130	Provinsi Bangka Belitung	44.149.765.735	36.220.153.093	7.929.612.642	44.149.765.735



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 562 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
131	Kab. Bangka	46.960.833.204	7.824.275.846	39.136.557.358	46.960.833.204
132	Kab. Belitung	13.279.867.799	6.586.387.783	6.693.480.016	13.279.867.799
133	Kota Pangkal Pinang	20.142.632.645	16.586.431.060	3.556.201.585	20.142.632.645
134	Kab. Bangka Selatan	12.381.724.468	5.122.661.096	7.259.063.372	12.381.724.468
135	Kab. Bangka Tengah	11.449.289.297	6.186.178.161	5.263.111.136	11.449.289.297
136	Kab. Bangka Barat	16.250.650.612	6.970.833.771	9.279.816.841	16.250.650.612
137	Kab. Belitung Timur	14.249.235.752	5.051.976.981	9.197.258.771	14.249.235.752
138	Provinsi Bengkulu	44.071.942.030	38.654.706.642	5.417.235.388	44.071.942.030
139	Kab. Bengkulu Selatan	8.325.357.845	4.723.449.413	3.601.908.432	8.325.357.845
140	Kab. Bengkulu Utara	12.574.387.413	5.088.876.464	7.485.510.949	12.574.387.413
141	Kab. Rejang Lebong	8.863.051.898	5.018.023.868	3.845.028.030	8.863.051.898
142	Kota Bengkulu	29.215.224.144	23.219.685.685	5.995.538.459	29.215.224.144
143	Kab. Kaur	6.387.616.976	2.329.084.412	4.058.532.564	6.387.616.976



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 563 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
144	Kab. Seluma	9.061.138.760	4.499.208.240	4.561.930.520	9.061.138.760
145	Kab. Mukomuko	12.239.352.191	3.839.298.577	8.400.053.614	12.239.352.191
146	Kab. Lebong	8.508.234.368	3.141.242.824	5.366.991.544	8.508.234.368
147	Kab. Bengkulu Tengah	8.699.042.541	3.475.427.880	5.223.614.661	8.699.042.541
148	Kab. Kepahiang	7.330.238.666	3.523.485.551	3.806.753.115	7.330.238.666
149	Provinsi Lampung	124.428.970.920	106.352.951.257	18.076.019.663	124.428.970.920
150	Kab. Lampung Barat	9.039.759.747	5.441.334.641	3.598.425.106	9.039.759.747
151	Kab. Lampung Selatan	22.337.228.083	15.081.752.241	7.255.475.842	22.337.228.083
152	Kab. Lampung Tengah	25.952.544.906	14.334.247.083	11.618.297.823	25.952.544.906
153	Kab. Lampung Utara	16.745.191.771	11.041.281.237	5.703.910.534	16.745.191.771
154	Kab. Lampung Timur	28.380.820.814	10.969.564.044	17.411.256.770	28.380.820.814
155	Kab. Tanggamus	29.283.470.594	6.734.940.655	22.548.529.939	29.283.470.594
156	Kab. Tulang Bawang	15.954.849.572	8.193.656.529	7.761.193.043	15.954.849.572



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 564 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
157	Kab. Way Kanan	11.469.324.607	5.353.446.819	6.115.877.788	11.469.324.607
158	Kab. Pesawaran	12.386.529.106	7.491.915.828	4.894.613.278	12.386.529.106
159	Kab. Pesisir Barat	8.365.819.950	4.592.033.156	3.773.786.794	8.365.819.950
160	Kab. Pringsewu	12.152.147.209	8.564.363.976	3.587.783.233	12.152.147.209
161	Kab. Mesuji	12.201.393.852	4.929.441.906	7.271.951.946	12.201.393.852
162	Kab. Tulang Bawang Barat	9.852.281.196	5.457.249.279	4.395.031.917	9.852.281.196
163	Kota Bandar Lampung	52.417.270.224	47.781.126.229	4.626.143.995	52.417.270.224
164	Kota Metro	12.814.665.204	9.347.136.825	3.467.528.379	12.814.665.204
165	Provinsi DKI Jakarta	13.928.939.702.814	13.871.004.305.394	57.935.397.420	13.928.939.702.814
166	Provinsi Jawa Barat	1.482.168.039.735	1.376.116.801.553	106.051.238.182	1.482.168.039.735
167	Kab. Bandung	126.554.751.084	68.101.545.635	58.453.205.449	126.554.751.084
168	Kab. Bekasi	366.687.739.191	323.982.779.748	42.704.959.443	366.687.739.191
169	Kab. Bogor	174.815.342.929	135.578.679.051	39.236.663.878	174.815.342.929



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 565 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
170	Kab. Ciamis	43.507.434.632	34.659.662.570	8.847.772.062	43.507.434.632
171	Kab. Cianjur	53.662.141.051	43.056.738.612	10.605.402.439	53.662.141.051
172	Kab. Cirebon	64.537.783.219	52.269.782.864	12.268.000.355	64.537.783.219
173	Kab. Garut	78.186.297.980	44.390.940.078	33.795.357.902	78.186.297.980
174	Kab. Indramayu	131.102.695.556	43.344.992.141	87.757.703.415	131.102.695.556
175	Kab. Karawang	204.978.701.642	165.196.102.513	39.782.599.129	204.978.701.642
176	Kab. Kuningan	41.628.575.206	35.339.768.919	6.288.806.287	41.628.575.206
177	Kab. Majalengka	48.634.153.432	35.557.186.403	13.076.967.029	48.634.153.432
178	Kab. Pangandaran	30.476.908.798	26.419.453.400	4.057.455.398	30.476.908.798
179	Kab. Purwakarta	71.818.124.294	64.577.061.332	7.241.062.962	71.818.124.294
180	Kab. Subang	116.309.718.940	44.091.342.931	72.218.376.009	116.309.718.940
181	Kab. Sukabumi	77.375.647.668	48.343.088.260	29.032.559.408	77.375.647.668
182	Kab. Sumedang	52.927.024.931	46.780.911.057	6.146.113.874	52.927.024.931



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 566 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
183	Kab. Tasikmalaya	42.291.455.471	35.176.832.729	7.114.622.742	42.291.455.471
184	Kab. Bandung Barat	57.625.833.881	50.639.824.195	6.986.009.686	57.625.833.881
185	Kota Bandung	307.033.109.103	300.799.365.308	6.233.743.795	307.033.109.103
186	Kota Bekasi	124.216.072.218	117.080.893.580	7.135.178.638	124.216.072.218
187	Kota Bogor	82.022.540.739	77.728.629.160	4.293.911.579	82.022.540.739
188	Kota Cirebon	46.519.860.578	42.156.395.343	4.363.465.235	46.519.860.578
189	Kota Depok	82.777.380.446	77.407.563.952	5.369.816.494	82.777.380.446
190	Kota Sukabumi	37.098.461.363	33.730.280.062	3.368.181.301	37.098.461.363
191	Kota Cimahi	46.150.746.334	42.517.164.195	3.633.582.139	46.150.746.334
192	Kota Tasikmalaya	47.655.786.825	41.463.752.998	6.192.033.827	47.655.786.825
193	Kota Banjar	30.309.055.781	26.549.351.437	3.759.704.344	30.309.055.781
194	Provinsi Banten	698.762.829.603	691.488.827.316	7.274.002.287	698.762.829.603
195	Kab. Lebak	58.123.345.750	50.996.533.911	7.126.811.839	58.123.345.750



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 567 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
196	Kab. Pandeglang	73.940.688.471	53.685.660.735	20.255.027.736	73.940.688.471
197	Kab. Serang	82.596.829.565	76.102.133.655	6.494.695.910	82.596.829.565
198	Kab. Tangerang	213.690.463.506	206.901.094.689	6.789.368.817	213.690.463.506
199	Kota Cilegon	118.029.778.682	114.440.138.651	3.589.640.031	118.029.778.682
200	Kota Tangerang	285.108.622.049	279.438.593.356	5.670.028.693	285.108.622.049
201	Kota Serang	76.228.843.588	72.466.817.791	3.762.025.797	76.228.843.588
202	Kota Tangerang Selatan	191.481.428.939	186.971.814.329	4.509.614.610	191.481.428.939
203	Provinsi Jawa Tengah	650.674.971.690	599.476.321.238	51.198.650.452	650.674.971.690
204	Kab. Banjarnegara	25.512.890.561	17.953.573.083	7.559.317.478	25.512.890.561
205	Kab. Banyumas	43.654.509.766	35.115.018.069	8.539.491.697	43.654.509.766
206	Kab. Batang	29.223.358.127	22.544.204.774	6.679.153.353	29.223.358.127
207	Kab. Blora	78.014.144.646	18.625.679.709	59.388.464.937	78.014.144.646
208	Kab. Boyolali	23.953.678.017	17.661.800.228	6.291.877.789	23.953.678.017



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 568 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
209	Kab. Brebes	29.102.813.778	18.079.575.127	11.023.238.651	29.102.813.778
210	Kab. Cilacap	47.890.898.316	35.491.269.626	12.399.628.690	47.890.898.316
211	Kab. Demak	24.333.274.306	18.701.021.131	5.632.253.175	24.333.274.306
212	Kab. Grobogan	34.819.648.617	18.061.644.588	16.758.004.029	34.819.648.617
213	Kab. Jepara	34.792.803.366	28.236.976.097	6.555.827.269	34.792.803.366
214	Kab. Karanganyar	25.928.901.457	21.078.681.137	4.850.220.320	25.928.901.457
215	Kab. Kebumen	26.785.930.919	20.152.395.148	6.633.535.771	26.785.930.919
216	Kab. Kendal	24.992.754.273	17.070.599.245	7.922.155.028	24.992.754.273
217	Kab. Klaten	26.624.918.804	21.648.371.713	4.976.547.091	26.624.918.804
218	Kab. Kudus	82.708.366.676	77.798.627.460	4.909.739.216	82.708.366.676
219	Kab. Magelang	22.711.495.795	17.203.912.310	5.507.583.485	22.711.495.795
220	Kab. Pati	30.005.473.722	20.108.355.206	9.897.118.516	30.005.473.722
221	Kab. Pekalongan	22.970.606.359	14.672.178.302	8.298.428.057	22.970.606.359



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 569 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
222	Kab. Pemalang	24.870.946.270	17.015.128.688	7.855.817.582	24.870.946.270
223	Kab. Purbalingga	23.674.008.136	16.677.926.935	6.996.081.201	23.674.008.136
224	Kab. Purworejo	22.335.788.971	17.276.188.949	5.059.600.022	22.335.788.971
225	Kab. Rembang	24.082.333.172	16.210.671.399	7.871.661.773	24.082.333.172
226	Kab. Semarang	30.230.434.404	23.687.466.200	6.542.968.204	30.230.434.404
227	Kab. Sragen	22.393.299.405	17.213.989.317	5.179.310.088	22.393.299.405
228	Kab. Sukoharjo	31.803.696.495	27.215.840.815	4.587.855.680	31.803.696.495
229	Kab. Tegal	27.540.433.167	19.745.329.368	7.795.103.799	27.540.433.167
230	Kab. Temanggung	22.413.478.639	17.353.496.371	5.059.982.268	22.413.478.639
231	Kab. Wonogiri	22.286.233.001	16.572.694.754	5.713.538.247	22.286.233.001
232	Kab. Wonosobo	22.964.058.266	14.864.362.814	8.099.695.452	22.964.058.266
233	Kota Magelang	20.687.085.865	17.602.923.672	3.084.162.193	20.687.085.865
234	Kota Pekalongan	20.875.490.087	17.531.232.487	3.344.257.600	20.875.490.087



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 570 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
235	Kota Salatiga	18.852.304.840	15.665.572.791	3.186.732.049	18.852.304.840
236	Kota Semarang	153.568.304.499	146.839.429.991	6.728.874.508	153.568.304.499
237	Kota Surakarta	52.288.025.318	48.599.713.565	3.688.311.753	52.288.025.318
238	Kota Tegal	22.392.715.117	19.098.478.124	3.294.236.993	22.392.715.117
239	Provinsi DI Yogyakarta	112.202.769.574	110.507.140.385	1.695.629.189	112.202.769.574
240	Kab. Bantul	32.085.691.513	27.734.845.287	4.350.846.226	32.085.691.513
241	Kab. Gunung kidul	21.264.019.973	16.998.314.343	4.265.705.630	21.264.019.973
242	Kab. Kulon Progo	23.071.759.041	19.392.056.212	3.679.702.829	23.071.759.041
243	Kab. Sleman	57.802.014.193	53.233.427.950	4.568.586.243	57.802.014.193
244	Kota Yogyakarta	51.922.422.339	48.447.264.511	3.475.157.828	51.922.422.339
245	Provinsi Jawa Timur	1.069.532.925.894	902.500.796.359	167.032.129.535	1.069.532.925.894
246	Kab. Bangkalan	29.880.625.581	17.249.296.516	12.631.329.065	29.880.625.581
247	Kab. Banyuwangi	54.748.949.229	23.278.973.093	31.469.976.136	54.748.949.229



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 571 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
248	Kab. Blitar	25.908.968.528	18.236.548.194	7.672.420.334	25.908.968.528
249	Kab. Bojonegoro	445.059.403.978	27.047.990.226	418.011.413.752	445.059.403.978
250	Kab. Bondowoso	24.196.117.278	17.451.771.829	6.744.345.449	24.196.117.278
251	Kab. Gresik	128.341.951.271	92.304.408.516	36.037.542.755	128.341.951.271
252	Kab. Jember	44.270.190.135	32.078.165.803	12.192.024.332	44.270.190.135
253	Kab. Jombang	30.064.023.026	24.189.477.026	5.874.546.000	30.064.023.026
254	Kab. Kediri	34.809.475.193	26.621.857.654	8.187.617.539	34.809.475.193
255	Kab. Lamongan	29.991.076.201	21.415.375.174	8.575.701.027	29.991.076.201
256	Kab. Lumajang	24.913.046.877	16.572.706.378	8.340.340.499	24.913.046.877
257	Kab. Madiun	24.260.330.638	16.319.615.318	7.940.715.320	24.260.330.638
258	Kab. Magetan	23.181.127.049	19.023.925.315	4.157.201.734	23.181.127.049
259	Kab. Malang	51.127.019.390	33.528.052.500	17.598.966.890	51.127.019.390
260	Kab. Mojokerto	35.904.242.626	28.372.206.701	7.532.035.925	35.904.242.626



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 572 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
261	Kab. Nganjuk	28.835.914.247	21.703.968.126	7.131.946.121	28.835.914.247
262	Kab. Ngawi	29.138.642.256	19.153.772.556	9.984.869.700	29.138.642.256
263	Kab. Pacitan	20.929.437.200	16.771.790.869	4.157.646.331	20.929.437.200
264	Kab. Pamekasan	25.552.368.992	18.036.502.976	7.515.866.016	25.552.368.992
265	Kab. Pasuruan	54.180.307.948	47.418.734.254	6.761.573.694	54.180.307.948
266	Kab. Ponorogo	30.232.315.098	21.546.079.247	8.686.235.851	30.232.315.098
267	Kab. Probolinggo	28.031.643.967	20.570.515.561	7.461.128.406	28.031.643.967
268	Kab. Sampang	26.605.931.881	14.777.188.908	11.828.742.973	26.605.931.881
269	Kab. Sidoarjo	122.440.690.036	105.878.627.269	16.562.062.767	122.440.690.036
270	Kab. Situbondo	24.695.690.949	17.837.118.617	6.858.572.332	24.695.690.949
271	Kab. Sumenep	30.367.547.001	17.120.108.523	13.247.438.478	30.367.547.001
272	Kab. Trenggalek	23.752.716.353	17.860.668.122	5.892.048.231	23.752.716.353
273	Kab. Tuban	74.836.068.629	28.788.895.025	46.047.173.604	74.836.068.629



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 573 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
274	Kab. Tulungagung	32.062.077.488	24.323.381.606	7.738.695.882	32.062.077.488
275	Kota Blitar	19.606.466.007	16.445.653.467	3.160.812.540	19.606.466.007
276	Kota Kediri	38.241.439.693	34.869.201.596	3.372.238.097	38.241.439.693
277	Kota Madiun	26.960.613.761	23.735.525.023	3.225.088.738	26.960.613.761
278	Kota Malang	60.014.503.594	55.881.335.864	4.133.167.730	60.014.503.594
279	Kota Mojokerto	22.539.424.135	18.237.266.305	4.302.157.830	22.539.424.135
280	Kota Pasuruan	24.756.895.251	19.998.890.229	4.758.005.022	24.756.895.251
281	Kota Probolinggo	21.007.231.321	17.415.221.185	3.592.010.136	21.007.231.321
282	Kota Surabaya	358.889.027.837	351.692.116.247	7.196.911.590	358.889.027.837
283	Kota Batu	20.031.504.787	16.081.036.773	3.950.468.014	20.031.504.787
284	Provinsi Kalimantan Barat	119.636.912.875	91.396.632.522	28.240.280.353	119.636.912.875
285	Kab. Bengkayang	20.941.954.752	5.589.631.591	15.352.323.161	20.941.954.752
286	Kab. Landak	16.923.958.258	6.089.539.653	10.834.418.605	16.923.958.258



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 574 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
287	Kab. Kapuas Hulu	19.892.039.864	6.306.445.464	13.585.594.400	19.892.039.864
288	Kab. Ketapang	50.624.531.487	13.373.718.253	37.250.813.234	50.624.531.487
289	Kab. Mempawah	10.998.531.619	6.085.660.136	4.912.871.483	10.998.531.619
290	Kab. Sambas	15.982.777.189	7.680.369.281	8.302.407.908	15.982.777.189
291	Kab. Sanggau	26.643.143.005	9.321.724.323	17.321.418.682	26.643.143.005
292	Kab. Sintang	24.278.912.132	9.529.032.695	14.749.879.437	24.278.912.132
293	Kota Pontianak	43.283.517.062	39.341.504.320	3.942.012.742	43.283.517.062
294	Kota Singkawang	11.639.956.935	8.010.018.972	3.629.937.963	11.639.956.935
295	Kab. Kayong Utara	11.726.755.324	4.199.613.662	7.527.141.662	11.726.755.324
296	Kab. Kubu Raya	19.252.611.295	9.627.988.748	9.624.622.547	19.252.611.295
297	Kab. Sekadau	18.809.781.851	5.823.482.237	12.986.299.614	18.809.781.851
298	Kab. Melawi	14.406.067.505	5.296.983.621	9.109.083.884	14.406.067.505
299	Provinsi Kalimantan Tengah	127.269.761.928	82.798.824.468	44.470.937.460	127.269.761.928



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 575 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
300	Kab. Barito Selatan	12.243.737.642	6.025.362.583	6.218.375.059	12.243.737.642
301	Kab. Barito Utara	46.450.993.602	7.034.451.311	39.416.542.291	46.450.993.602
302	Kab. Kapuas	30.888.650.024	8.792.276.769	22.096.373.255	30.888.650.024
303	Kab. Kotawaringin Barat	29.740.702.411	13.877.247.354	15.863.455.057	29.740.702.411
304	Kab. Kotawaringin Timur	45.942.901.316	17.391.662.765	28.551.238.551	45.942.901.316
305	Kota Palangkaraya	29.130.154.327	25.489.903.764	3.640.250.563	29.130.154.327
306	Kab. Barito Timur	19.212.070.527	8.379.467.164	10.832.603.363	19.212.070.527
307	Kab. Murung Raya	34.919.690.261	6.591.018.995	28.328.671.266	34.919.690.261
308	Kab. Pulang Pisau	10.433.911.846	3.813.680.662	6.620.231.184	10.433.911.846
309	Kab. Gunung Mas	15.202.948.402	5.843.504.151	9.359.444.251	15.202.948.402
310	Kab. Lamandau	21.722.468.535	5.021.805.119	16.700.663.416	21.722.468.535
311	Kab. Sukamara	11.770.258.682	4.169.245.945	7.601.012.737	11.770.258.682
312	Kab. Katingan	40.791.060.925	5.552.794.928	35.238.265.997	40.791.060.925



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 576 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
313	Kab. Seruyan	24.378.667.634	5.895.864.144	18.482.803.490	24.378.667.634
314	Provinsi Kalimantan Selatan	192.888.520.562	132.719.274.866	59.969.245.696	192.688.520.562
315	Kab. Banjar	24.768.239.859	11.274.086.554	13.494.153.305	24.768.239.859
316	Kab. Barito Kuala	11.690.861.885	6.269.268.754	5.421.593.131	11.690.861.885
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	19.715.067.090	8.373.890.359	11.341.176.731	19.715.067.090
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	13.003.022.248	9.149.703.873	3.853.318.375	13.003.022.248
319	Kab. Hulu Sungai Utara	13.009.129.346	8.903.131.408	4.105.997.938	13.009.129.346
320	Kab. Kotabaru	31.799.656.942	15.142.843.023	16.656.813.919	31.799.656.942
321	Kab. Tabalong	62.927.707.638	15.962.676.865	46.965.030.773	62.927.707.638
322	Kab. Tanah Laut	29.051.039.129	12.935.901.665	16.115.137.464	29.051.039.129
323	Kab. Tapin	61.988.969.431	9.336.864.626	52.652.104.805	61.988.969.431
324	Kota Banjarbaru	27.774.129.264	24.209.984.383	3.564.144.881	27.774.129.264
325	Kota Banjarmasin	50.635.541.420	46.672.377.971	3.963.163.449	50.635.541.420



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 577 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
326	Kab. Balangan	27.289.055.984	11.155.647.962	16.133.408.022	27.289.055.984
327	Kab. Tanah Bumbu	94.570.641.866	15.858.665.625	78.711.976.241	94.570.641.866
328	Provinsi Kalimantan Timur	680.158.788.279	380.218.004.082	299.940.784.197	680.158.788.279
329	Kab. Berau	66.829.654.662	42.515.774.685	24.313.879.977	66.829.654.662
330	Kab. Kutai Kartanegara	952.892.026.691	74.704.678.180	878.187.348.511	952.892.026.691
331	Kab. Kutai Barat	72.983.677.923	29.747.707.734	43.235.970.189	72.983.677.923
332	Kab. Kutai Timur	193.251.359.468	63.989.840.443	129.261.519.025	193.251.359.468
333	Kab. Mahakam Ulu	28.252.047.168	20.271.178.564	7.980.868.604	28.252.047.168
334	Kab. Paser	53.464.546.532	32.874.993.385	20.589.553.147	53.464.546.532
335	Kota Balikpapan	147.855.573.617	142.465.466.818	5.390.106.799	147.855.573.617
336	Kota Bontang	147.435.458.017	72.131.064.675	75.304.393.342	147.435.458.017
337	Kota Samarinda	101.584.468.766	71.900.296.258	29.684.172.508	101.584.468.766
338	Kab. Penajam Paser Utara	80.665.631.486	22.805.428.316	57.860.203.170	80.665.631.486



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 578 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
339	Provinsi Kalimantan Utara	79.431.732.249	27.857.628.303	51.574.103.946	79.431.732.249
340	Kab. Bulungan	69.722.242.811	12.341.023.458	57.381.219.353	69.722.242.811
341	Kab. Malinau	34.979.905.378	5.792.410.258	29.187.495.120	34.979.905.378
342	Kab. Nunukan	48.321.336.380	6.039.348.038	42.281.988.342	48.321.336.380
343	Kab. Tana Tidung	15.135.641.148	4.227.234.635	10.908.406.513	15.135.641.148
344	Kota Tarakan	79.515.452.120	13.520.885.262	65.994.566.858	79.515.452.120
345	Provinsi Sulawesi Utara	79.481.090.193	68.024.274.365	11.456.815.828	79.481.090.193
346	Kab. Bolaang Mongondow	10.750.141.203	3.228.652.473	7.521.488.730	10.750.141.203
347	Kab. Minahasa	14.236.276.860	6.918.694.864	7.317.581.996	14.236.276.860
348	Kab. Sangihe	8.709.066.305	5.138.705.885	3.570.360.420	8.709.066.305
349	Kota Bitung	27.001.541.616	6.669.156.269	20.332.385.347	27.001.541.616
350	Kota Manado	43.416.120.548	39.771.593.076	3.644.527.472	43.416.120.548
351	Kab. Kepulauan Talaud	7.405.535.854	3.547.189.621	3.858.346.233	7.405.535.854



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 579 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
352	Kab. Minahasa Selatan	8.816.726.684	4.714.218.777	4.102.507.907	8.816.726.684
353	Kab. Minahasa Tenggara	6.980.199.827	3.307.542.391	3.672.657.436	6.980.199.827
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	6.600.224.070	3.049.732.969	3.550.491.101	6.600.224.070
355	Kota Kotamobagu	10.462.345.133	7.153.261.973	3.309.083.160	10.462.345.133
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.650.405.272	2.973.647.561	3.676.757.711	6.650.405.272
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10.237.754.343	2.797.408.684	7.440.345.659	10.237.754.343
358	Kota Tomohon	12.823.375.810	5.305.293.742	7.518.082.068	12.823.375.810
359	Kab. Minahasa Utara	11.390.662.735	7.040.197.255	4.350.465.480	11.390.662.735
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6.853.025.135	3.136.028.009	3.716.997.126	6.853.025.135
361	Provinsi Gorontalo	20.664.123.645	18.953.452.104	1.710.671.541	20.664.123.645
362	Kab. Boalemo	6.701.816.752	2.945.260.513	3.756.556.239	6.701.816.752
363	Kab. Gorontalo	10.001.403.520	5.480.497.487	4.520.906.033	10.001.403.520
364	Kota Gorontalo	14.152.844.187	10.801.408.747	3.351.435.440	14.152.844.187



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 580 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
365	Kab. Pohuwato	7.409.591.835	3.123.677.334	4.285.914.501	7.409.591.835
366	Kab. Gorontalo Utara	6.814.911.136	2.889.287.985	4.125.623.151	6.814.911.136
367	Kab. Bone Bolango	7.406.835.273	3.678.630.778	3.728.204.495	7.406.835.273
368	Provinsi Sulawesi Tengah	88.827.579.996	58.263.023.315	30.564.556.681	88.827.579.996
369	Kab. Banggai	82.249.274.000	10.418.439.293	71.830.834.707	82.249.274.000
370	Kab. Banggai Laut	6.686.326.837	3.129.642.173	3.556.684.664	6.686.326.837
371	Kab. Banggai Kepulauan	6.884.504.128	3.134.880.693	3.749.623.435	6.884.504.128
372	Kab. Buol	8.572.990.205	3.466.253.502	5.106.736.703	8.572.990.205
373	Kab. Tolitoli	8.617.673.755	4.607.881.745	4.009.792.010	8.617.673.755
374	Kab. Donggala	9.647.214.881	4.813.466.023	4.833.748.858	9.647.214.881
375	Kab. Morowali	19.133.495.240	11.906.971.874	7.226.523.366	19.133.495.240
376	Kab. Morowali Utara	11.055.593.923	3.675.650.230	7.379.943.693	11.055.593.923
377	Kab. Poso	10.057.539.447	5.358.657.195	4.698.882.252	10.057.539.447



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 581 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
378	Kota Palu	26.297.054.246	22.758.753.174	3.538.301.072	26.297.054.246
379	Kab. Parigi Moutong	9.677.000.746	5.114.537.777	4.562.462.969	9.677.000.746
380	Kab. Sigi	8.290.802.514	4.406.117.480	3.884.685.034	8.290.802.514
381	Kab. Tojo Una Una	7.899.334.215	3.659.313.497	4.240.020.718	7.899.334.215
382	Provinsi Sulawesi Selatan	223.098.997.855	207.805.724.254	15.293.273.601	223.098.997.855
383	Kab. Bantaeng	9.780.935.639	6.163.488.335	3.617.447.304	9.780.935.639
384	Kab. Barru	10.399.718.677	6.805.655.881	3.594.062.796	10.399.718.677
385	Kab. Bone	19.875.686.202	13.684.281.008	6.191.405.194	19.875.686.202
386	Kab. Bulukumba	13.973.924.251	9.453.065.660	4.520.858.591	13.973.924.251
387	Kab. Enrekang	9.726.052.819	5.723.138.083	4.002.914.736	9.726.052.819
388	Kab. Gowa	16.321.680.269	10.828.278.396	5.493.401.873	16.321.680.269
389	Kab. Jeneponto	13.055.018.918	8.313.541.236	4.741.477.682	13.055.018.918
390	Kab. Luwu	12.143.677.337	7.121.797.135	5.021.880.202	12.143.677.337



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 582 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
391	Kab. Luwu Utara	11.553.435.329	6.983.841.503	4.569.593.826	11.553.435.329
392	Kab. Maros	16.600.486.869	11.742.107.570	4.858.379.299	16.600.486.869
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	20.242.051.573	14.005.294.847	6.236.756.726	20.242.051.573
394	Kab. Pinrang	12.286.822.318	8.365.368.318	3.921.454.000	12.286.822.318
395	Kab. Kepulauan Selayar	10.562.848.475	6.508.452.232	4.054.396.243	10.562.848.475
396	Kab. Sidenreng Rappang	10.948.046.348	6.795.661.037	4.152.385.311	10.948.046.348
397	Kab. Sinjai	10.977.249.909	7.350.837.690	3.626.412.219	10.977.249.909
398	Kab. Soppeng	11.739.798.919	7.998.578.709	3.741.220.210	11.739.798.919
399	Kab. Takalar	11.455.510.553	7.367.810.655	4.087.699.898	11.455.510.553
400	Kab. Tana Toraja	11.426.556.537	7.746.418.602	3.680.137.935	11.426.556.537
401	Kab. Wajo	32.778.116.010	10.286.916.918	22.491.199.092	32.778.116.010
402	Kota Parepare	12.918.528.143	9.569.523.547	3.349.004.596	12.918.528.143
403	Kab. Toraja Utara	9.937.970.914	6.340.264.552	3.597.706.362	9.937.970.914



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 583 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.8

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
404	Kota Makassar	113.943.184.588	108.596.990.852	5.346.193.736	113.943.184.588
405	Kota Palopo	13.444.909.193	10.098.664.494	3.346.244.699	13.444.909.193
406	Kab. Luwu Timur	29.385.873.680	16.890.514.366	12.495.359.314	29.385.873.680
407	Provinsi Sulawesi Barat	16.754.272.669	13.885.896.576	2.868.376.093	16.754.272.669
408	Kab. Majene	6.902.639.713	3.089.744.497	3.812.895.216	6.902.639.713
409	Kab. Mamuju	12.119.641.145	6.867.252.792	5.252.388.353	12.119.641.145
410	Kab. Mamuju Tengah	5.711.810.100	1.785.939.224	3.925.870.876	5.711.810.100
411	Kab. Polewali Mandar	8.477.776.899	4.394.595.067	4.083.181.832	8.477.776.899
412	Kab. Mamasa	6.076.572.614	2.146.688.399	3.929.884.215	6.076.572.614
413	Kab. Pasangkayu	9.685.006.284	2.600.048.084	7.084.958.200	9.685.006.284
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	53.578.906.334	40.443.347.492	13.135.558.842	53.578.906.334
415	Kab. Buton	5.765.800.871	2.534.452.893	3.231.347.978	5.765.800.871
416	Kab. Konawe	8.205.171.903	2.778.305.257	5.426.866.646	8.205.171.903



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 584 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
417	Kab. Konawe Kepulauan	4.799.587.852	1.379.226.094	3.420.361.758	4.799.587.852
418	Kab. Kolaka	21.963.239.917	6.816.800.242	15.146.439.675	21.963.239.917
419	Kab. Kolaka Timur	5.259.079.925	1.682.350.352	3.576.729.573	5.259.079.925
420	Kab. Muna	6.882.779.661	3.511.768.141	3.371.011.520	6.882.779.661
421	Kota Kendari	24.618.642.558	21.064.690.706	3.553.951.852	24.618.642.558
422	Kota Bau-bau	8.407.369.098	4.563.697.495	3.843.671.603	8.407.369.098
423	Kab. Konawe Selatan	11.620.164.986	3.839.653.719	7.780.511.267	11.620.164.986
424	Kab. Bombana	11.653.391.439	2.000.649.991	9.652.741.448	11.653.391.439
425	Kab. Konawe Utara	19.140.409.146	1.746.620.823	17.393.788.323	19.140.409.146
426	Kab. Buton Utara	5.419.676.784	1.688.153.466	3.731.523.318	5.419.676.784
427	Kab. Wakatobi	5.957.125.395	2.222.823.992	3.734.301.403	5.957.125.395
428	Kab. Kolaka Utara	5.689.209.704	1.730.838.590	3.958.371.114	5.689.209.704
429	Kab. Muna Barat	4.968.612.699	1.798.626.808	3.169.985.891	4.968.612.699



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 585 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
430	Kab. Buton Tengah	5.185.680.631	1.763.751.133	3.421.929.498	5.185.680.631
431	Kab. Buton Selatan	5.224.557.486	1.635.216.496	3.589.340.990	5.224.557.486
432	Provinsi Bali	204.331.407.396	202.156.769.121	2.174.638.275	204.331.407.396
433	Kab. Badung	87.497.774.663	83.920.455.843	3.577.318.820	87.497.774.663
434	Kab. Bangli	18.235.715.856	14.763.487.390	3.472.228.466	18.235.715.856
435	Kab. Buleleng	30.907.360.846	26.735.429.304	4.171.931.542	30.907.360.846
436	Kab. Gianyar	30.991.950.542	27.401.941.089	3.590.009.453	30.991.950.542
437	Kab. Jembrana	18.660.092.261	14.916.731.486	3.743.360.775	18.660.092.261
438	Kab. Karangasem	21.429.345.761	17.509.881.242	3.919.464.519	21.429.345.761
439	Kab. Klungkung	18.439.978.173	15.098.426.191	3.341.551.982	18.439.978.173
440	Kab. Tabanan	25.821.821.932	21.894.163.600	3.927.658.332	25.821.821.932
441	Kota Denpasar	84.437.679.381	80.639.376.791	3.798.302.590	84.437.679.381
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	92.909.075.784	81.984.219.002	10.924.856.782	92.909.075.784



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 586 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
443	Kab. Bima	14.011.518.785	9.055.083.530	4.956.435.255	14.011.518.785
444	Kab. Dompu	10.828.884.564	7.035.442.582	3.793.441.982	10.828.884.564
445	Kab. Lombok Barat	14.598.964.094	10.502.273.390	4.096.690.704	14.598.964.094
446	Kab. Lombok Tengah	13.959.796.873	9.372.037.954	4.587.758.919	13.959.796.873
447	Kab. Lombok Timur	16.219.427.091	11.025.216.109	5.194.210.982	16.219.427.091
448	Kab. Sumbawa	33.584.803.598	10.987.514.459	22.597.289.139	33.584.803.598
449	Kota Mataram	34.126.743.416	30.435.705.983	3.691.037.433	34.126.743.416
450	Kab. Lombok Utara	9.987.850.880	6.579.822.007	3.408.028.873	9.987.850.880
451	Kota Bima	11.996.865.746	8.547.896.719	3.448.968.027	11.996.865.746
452	Kab. Sumbawa Barat	24.449.592.177	17.367.139.776	7.082.452.401	24.449.592.177
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	65.427.679.043	59.222.650.846	6.205.028.197	65.427.679.043
454	Kab. Alor	6.490.535.094	2.658.161.812	3.832.373.282	6.490.535.094
455	Kab. Belu	7.160.449.851	3.806.757.183	3.353.692.668	7.160.449.851



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 587 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
456	Kab. Ende	9.489.035.032	5.411.188.491	4.077.846.541	9.489.035.032
457	Kab. Flores Timur	7.153.972.716	3.120.180.503	4.033.792.213	7.153.972.716
458	Kab. Kupang	8.103.080.726	3.994.764.015	4.108.316.711	8.103.080.726
459	Kab. Lembata	6.232.300.654	2.613.496.711	3.618.803.943	6.232.300.654
460	Kab. Malaka	5.697.019.394	2.455.426.583	3.241.592.811	5.697.019.394
461	Kab. Manggarai	9.261.426.241	4.395.377.565	4.866.048.676	9.261.426.241
462	Kab. Ngada	6.164.476.763	2.313.660.614	3.850.816.149	6.164.476.763
463	Kab. Sikka	8.251.430.724	4.489.966.629	3.761.464.095	8.251.430.724
464	Kab. Sumba Barat	5.949.869.806	2.531.112.842	3.418.756.964	5.949.869.806
465	Kab. Sumba Timur	8.709.772.246	3.861.150.441	4.848.621.805	8.709.772.246
466	Kab. Timor Tengah Selatan	7.759.325.799	3.153.093.637	4.606.232.162	7.759.325.799
467	Kab. Timor Tengah Utara	6.498.596.626	2.657.526.384	3.841.070.242	6.498.596.626
468	Kota Kupang	28.322.114.125	24.565.159.439	3.756.954.686	28.322.114.125



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 588 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
469	Kab. Rote Ndao	6.451.987.875	2.756.812.894	3.695.174.981	6.451.987.875
470	Kab. Nagekeo	6.103.423.529	2.532.761.804	3.570.661.725	6.103.423.529
471	Kab. Sumba Tengah	5.287.348.855	1.737.449.420	3.549.899.435	5.287.348.855
472	Kab. Sumba Barat Daya	6.267.457.827	2.533.805.385	3.733.652.442	6.267.457.827
473	Kab. Manggarai Timur	6.217.126.766	2.534.384.774	3.682.741.992	6.217.126.766
474	Kab. Sabu Raijua	5.218.993.199	1.929.734.796	3.289.258.403	5.218.993.199
475	Kab. Manggarai Barat	7.301.532.283	3.505.069.954	3.796.462.329	7.301.532.283
476	Provinsi Maluku	45.254.587.302	36.255.702.595	8.998.884.707	45.254.587.302
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	7.067.906.813	2.536.671.693	4.531.235.120	7.067.906.813
478	Kab. Maluku Tengah	12.184.100.572	5.521.567.051	6.662.533.521	12.184.100.572
479	Kab. Maluku Tenggara	6.720.141.836	2.874.041.960	3.846.099.876	6.720.141.836
480	Kab. Buru	7.205.704.032	2.745.884.003	4.459.820.029	7.205.704.032
481	Kota Ambon	26.578.437.822	22.901.160.702	3.677.277.120	26.578.437.822



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 589 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
482	Kab. Seram Bagian Barat	7.310.034.905	2.801.786.104	4.508.248.801	7.310.034.905
483	Kab. Seram Bagian Timur	23.223.506.022	2.327.707.297	20.895.798.725	23.223.506.022
484	Kab. Maluku Barat Daya	11.403.973.355	6.486.190.566	4.917.782.789	11.403.973.355
485	Kab. Buru Selatan	6.292.789.366	1.992.330.420	4.300.458.946	6.292.789.366
486	Kab. Kepulauan Aru	7.432.116.763	2.574.371.850	4.857.744.913	7.432.116.763
487	Kota Tual	5.689.100.234	2.079.931.880	3.609.168.354	5.689.100.234
488	Provinsi Maluku Utara	40.609.857.945	30.163.453.914	10.446.404.031	40.609.857.945
489	Kab. Halmahera Tengah	7.162.493.144	2.135.215.753	5.027.277.391	7.162.493.144
490	Kab. Halmahera Barat	6.893.961.964	2.794.742.816	4.099.219.148	6.893.961.964
491	Kota Ternate	17.286.412.409	13.353.657.076	3.932.755.333	17.286.412.409
492	Kab. Halmahera Timur	12.139.130.316	3.091.843.133	9.047.287.183	12.139.130.316
493	Kota Tidore Kepulauan	8.643.686.934	4.808.882.958	3.834.803.976	8.643.686.934
494	Kab. Kepulauan Sula	6.659.529.126	2.123.431.393	4.536.097.733	6.659.529.126



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 590 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
495	Kab. Pulau Morotai	8.194.876.245	2.248.728.040	3.946.148.205	6.194.876.245
496	Kab. Pulau Taliabu	6.964.903.670	2.011.892.323	4.953.011.347	6.964.903.670
497	Kab. Halmahera Selatan	19.154.329.854	3.773.644.937	15.380.684.917	19.154.329.854
498	Kab. Halmahera Utara	22.103.771.025	10.335.585.855	11.768.185.170	22.103.771.025
499	Provinsi Papua	269.060.225.668	222.650.508.357	46.409.717.311	269.060.225.668
500	Kab. Yalimo	7.324.427.888	3.767.337.121	3.557.090.767	7.324.427.888
501	Kab. Lanny Jaya	7.691.134.973	3.926.075.498	3.765.059.475	7.691.134.973
502	Kab. Biak Numfor	11.465.280.376	8.007.056.838	3.458.223.538	11.465.280.376
503	Kab. Jayapura	13.806.807.479	8.516.803.657	5.290.003.822	13.806.807.479
504	Kab. Jayawijaya	11.493.308.872	7.916.516.770	3.576.792.102	11.493.308.872
505	Kab. Merauke	21.445.492.513	10.759.811.936	10.685.680.577	21.445.492.513
506	Kab. Mimika	272.474.081.449	158.162.014.864	114.312.066.585	272.474.081.449
507	Kab. Nabire	14.230.723.719	7.121.395.617	7.109.328.102	14.230.723.719



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 591 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
508	Kab. Paniai	9.672.524.281	5.608.078.533	4.064.445.748	9.672.524.281
509	Kab. Puncak Jaya	9.414.930.753	4.942.962.593	4.471.968.160	9.414.930.753
510	Kab. Kepulauan Yapen	10.793.883.601	6.593.715.390	4.200.168.211	10.793.883.601
511	Kota Jayapura	38.283.836.475	35.277.153.554	3.006.682.921	38.283.836.475
512	Kab. Sarmi	17.611.169.130	4.611.367.800	12.999.801.330	17.611.169.130
513	Kab. Keerom	11.046.825.100	5.115.971.250	5.930.853.850	11.046.825.100
514	Kab. Yahukimo	9.945.441.824	4.475.045.095	5.470.396.729	9.945.441.824
515	Kab. Pegunungan Bintang	10.363.780.999	4.897.747.682	5.466.033.317	10.363.780.999
516	Kab. Tolikara	9.241.866.603	4.601.002.413	4.640.864.190	9.241.866.603
517	Kab. Boven Digoel	20.301.031.221	8.411.266.266	11.889.764.955	20.301.031.221
518	Kab. Mappi	10.570.576.461	4.311.726.224	6.258.850.237	10.570.576.461
519	Kab. Asmat	11.633.757.403	5.517.552.598	6.116.204.805	11.633.757.403
520	Kab. Waropen	10.613.279.510	4.347.113.083	6.266.166.427	10.613.279.510



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 592 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
521	Kab. Mamberamo Raya	11.507.210.426	4.116.386.718	7.390.843.708	11.507.210.426
522	Kab. Mamberamo Tengah	8.219.684.721	4.402.687.306	3.816.997.415	8.219.684.721
523	Kab. Nduga	7.559.744.669	3.664.564.881	3.895.179.788	7.559.744.669
524	Kab. Dogiyai	8.462.242.521	4.147.891.359	4.314.351.162	8.462.242.521
525	Kab. Intan Jaya	8.982.081.010	4.582.845.234	4.399.235.776	8.982.081.010
526	Kab. Puncak	8.559.571.259	3.810.702.940	4.748.868.319	8.559.571.259
527	Kab. Deiyai	11.526.821.153	5.999.929.882	5.526.891.271	11.526.821.153
528	Kab. Supiori	8.375.927.770	4.384.646.018	3.991.281.752	8.375.927.770
529	Provinsi Papua Barat	170.600.462.644	43.633.027.029	126.967.435.615	170.600.462.644
530	Kab. Sorong	117.385.577.739	4.405.347.056	112.980.230.683	117.385.577.739
531	Kab. Manokwari	20.039.084.474	12.828.866.243	7.210.218.231	20.039.084.474
532	Kab. Manokwari Selatan	6.903.495.579	2.060.111.423	4.843.384.156	6.903.495.579
533	Kab. Fak Fak	19.120.062.297	3.559.752.183	15.560.310.114	19.120.062.297



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 593 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
534	Kota Sorong	26.424.715.818	12.817.990.216	13.606.725.602	26.424.715.818
535	Kab. Pegunungan Arfak	10.483.840.954	1.906.290.658	8.577.550.296	10.483.840.954
536	Kab. Sorong Selatan	8.912.952.563	3.065.930.629	5.847.021.934	8.912.952.563
537	Kab. Raja Ampat	11.406.222.944	2.657.502.468	8.748.720.476	11.406.222.944
538	Kab. Teluk Bintuni	332.980.447.765	14.289.689.761	318.690.758.004	332.980.447.765
539	Kab. Teluk Wondama	7.984.039.217	2.324.199.559	5.659.839.658	7.984.039.217
540	Kab. Tambora	7.568.950.029	1.881.409.235	5.687.540.794	7.568.950.029
541	Kab. Maybrat	7.560.634.102	1.814.984.382	5.745.649.720	7.560.634.102
542	Kab. Kaimana	9.981.670.542	3.037.417.563	6.944.252.979	9.981.670.542
	Dana Cadangan				
	JUMLAH	44.283.738.827.545	31.159.010.681.964	13.124.728.145.581	44.283.738.827.545



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 594 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Portambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Aceh	418.076.408.579	204.305.967.336	204.747.174.388	11.657.918.396	299.197.053	66.151.406		418.076.408.579
2	Kab. Aceh Barat	16.665.779.009	1.168.621.218	1.704.800.083	12.954.007.634	27.200.181	21.012.254	788.276.289	16.663.917.659
3	Kab. Aceh Besar	4.601.240.178	1.168.621.218	1.704.800.083	674.048.492	254.188.300	11.305.796	788.276.289	4.601.240.178
4	Kab. Aceh Selatan	4.368.711.855	1.168.621.218	1.704.800.083	669.222.267	27.200.181	8.588.417	788.276.289	4.366.708.455
5	Kab. Aceh Singkil	4.711.279.354	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.824.957	27.200.181	12.666.826	788.276.289	4.709.189.554
6	Kab. Aceh Tengah	5.010.290.433	1.168.621.218	1.704.800.083	1.268.770.345	27.200.181	52.622.317	788.276.289	5.010.290.433
7	Kab. Aceh Tenggara	4.702.295.054	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	27.200.181	5.800.182	788.276.289	4.702.295.054
8	Kab. Aceh Timur	10.567.447.758	914.218.247	7.814.050.057	1.007.597.101	27.200.181	13.067.483	788.276.289	10.564.409.358
9	Kab. Aceh Utara	40.891.421.366	16.792.753.915	22.260.902.791	1.007.597.101	27.200.181	12.987.089	788.276.289	40.889.717.366
10	Kab. Bireuen	4.702.812.025	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.598.872	27.200.181	5.121.282	788.276.289	4.701.618.825
11	Kab. Pidie	4.506.940.098	1.168.621.218	1.704.800.083	809.618.861	27.200.181	7.092.966	788.276.289	4.505.609.598
12	Kab. Simeulue	4.716.086.184	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	27.200.181	19.601.312	788.276.289	4.716.086.184
13	Kota Banda Aceh	4.708.441.254	1.168.621.218	1.704.800.083	1.013.229.101	27.200.181	5.121.282	788.276.289	4.707.248.154
14	Kota Sabang	4.765.177.173	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	80.082.300	5.800.182	788.276.289	4.765.177.173
15	Kota Langsa	4.702.952.111	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	27.200.181	5.238.039	788.276.289	4.701.732.911
16	Kota Lhokseumawe	4.702.295.054	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	27.200.181	5.800.182	788.276.289	4.702.295.054
17	Kab. Nagan Raya	6.608.149.826	1.168.621.218	1.704.800.083	2.902.208.297	27.200.181	14.635.958	788.276.289	6.605.742.026
18	Kab. Aceh Jaya	4.713.797.782	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.605.093	27.200.181	17.294.918	788.276.289	4.713.797.782
19	Kab. Pidie Jaya	4.702.296.411	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.598.458	27.200.181	5.800.182	788.276.289	4.702.296.411
20	Kab. Aceh Barat Daya	4.758.052.200	1.168.621.218	1.704.800.083	1.062.838.586	27.200.181	5.122.743	788.276.289	4.756.859.100
21	Kab. Gayo Lues	4.739.565.246	1.168.621.218	1.704.800.083	1.014.831.332	27.200.181	35.836.143	788.276.289	4.739.565.246
22	Kab. Aceh Tamiang	6.291.308.854	2.754.758.000	1.704.800.083	1.007.598.865	27.200.181	8.675.436	788.276.289	6.291.308.854
23	Kab. Bener Meriah	4.719.991.882	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	27.200.181	19.066.860	788.276.289	4.715.561.732



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 595 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hesli Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Kota Subulussalam	4.707.348.323	1.168.621.218	1.704.800.083	1.009.577.287	27.200.181	7.680.165	788.276.289	4.706.155.223
25	Provinsi Sumatera Utara	50.054.517.483	1.388.215.649	2.447.905.099	32.141.836.764	2.157.945.700	9.208.845.071		47.343.948.283
26	Kab. Asahan	3.217.747.384	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	149.175.152	788.276.289	3.188.090.884
27	Kab. Deli	3.717.988.940	86.763.394	152.993.963	2.375.540.443	134.870.850	179.544.001	788.276.289	3.717.988.940
28	Kab. Deli Serdang	3.222.705.320	31.042.000	227.267.027	1.878.011.236	134.870.850	165.237.918	788.276.289	3.222.705.320
29	Kab. Kara	3.390.794.484	86.763.394	152.993.963	1.878.013.502	134.870.850	351.878.466	788.276.289	3.390.794.464
30	Kab. LabuhanBata	3.195.358.644	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	126.820.162	788.276.289	3.185.735.894
31	Kab. Langkat	6.797.956.116	567.821.800	3.250.372.761	1.878.011.284	134.870.850	150.692.732	788.276.289	6.767.845.716
32	Kab. Mandailing Natal	10.862.855.988	86.763.394	152.993.963	4.902.203.156	4.315.893.350	557.831.486	788.276.289	10.803.951.638
33	Kab. Nias	3.204.695.676	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	165.779.944	788.276.289	3.204.695.676
34	Kab. Simalungun	4.233.846.033	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	1.088.356.501	788.276.289	4.127.272.233
35	Kab. Tapanuli Selatan	46.645.496.241	86.763.394	152.993.963	44.971.923.854	134.870.850	510.667.891	788.276.289	46.645.496.241
36	Kab. Tapanuli Tengah	3.881.094.661	86.763.394	152.993.963	2.574.511.103	134.870.850	143.679.062	788.276.289	3.881.094.661
37	Kab. Tapanuli Utara	4.100.175.709	86.763.394	152.993.963	2.339.354.032	134.870.850	597.917.181	788.276.289	4.100.175.709
38	Kab. Tobo Samosir	3.621.311.919	86.763.394	152.993.963	1.878.030.779	134.870.850	582.376.644	788.276.289	3.621.311.919
39	Kota Binjai	3.230.114.759	113.027.794	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.230.114.759
40	Kota Medan	3.184.635.410	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	145.719.678	788.276.289	3.184.635.410
41	Kota Pematang Siantar	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
42	Kota Sibolga	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
43	Kota Tanjung Balai	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
44	Kab. Batu Bara	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
45	Kab. LabuhanBatu Utara	3.486.345.773	86.763.394	152.993.963	2.113.870.971	134.870.850	209.570.306	788.276.289	3.486.345.773
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	5.605.014.138	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	2.566.096.407	788.276.289	5.605.014.138



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 596 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kab. Padang Lawas Utara	3.852.459.862	86.763.394	152.993.963	1.878.012.827	134.870.850	613.542.739	788.276.289	3.852.459.862
48	Kab. Padang Lawas	3.875.871.419	269.251.800	105.382.629	1.878.011.236	134.870.850	701.878.815	788.276.289	3.875.871.419
49	Kab. Nias Utara	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
50	Kab. Nias Barat	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
51	Kota Tebing Tinggi	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
52	Kota Padang Sidempuan	3.518.527.374	86.763.394	152.993.963	2.190.688.251	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.518.527.374
53	Kab. Pakpak Bharat	3.224.236.714	86.763.394	152.993.963	1.885.854.639	134.870.850	175.477.579	788.276.289	3.224.236.714
54	Kab. Nias Selatan	3.869.880.046	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	783.423.464	788.276.289	3.822.339.196
55	Kab. Humbang Hasundutan	3.541.322.125	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	502.406.393	788.276.289	3.541.322.125
56	Kab. Serdang Bedagai	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
57	Kab. Sumsel	3.561.602.990	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	434.608.608	788.276.289	3.473.524.340
58	Kota Bengkulu	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.878.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
59	Provinsi Sumatera Barat	21.226.632.583	121.446.200	-	6.009.405.666	3.531.810.500	8.736.178.287	-	18.389.940.633
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.814.271.538	13.494.000	-	501.254.336	392.434.850	118.812.263	788.276.289	1.814.271.538
61	Kab. Agam	1.714.412.873	13.494.000	-	396.116.251	392.434.850	100.586.383	788.276.289	1.690.907.573
62	Kab. Kepulauan Mentawai	3.841.866.151	13.494.000	-	641.853.536	392.434.850	1.662.709.526	788.276.289	3.498.768.001
63	Kab. Padang Pariaman	1.948.710.482	13.494.000	-	641.853.536	392.434.850	112.651.986	788.276.289	1.948.710.482
64	Kab. Pasaman	2.058.650.859	13.494.000	-	748.750.677	392.434.850	117.696.043	788.276.289	2.058.650.859
65	Kab. Pasir Selaian	1.781.040.996	13.494.000	-	462.724.000	392.434.850	124.112.057	788.276.289	1.781.040.996
66	Kab. Sijunjung	4.810.891.932	242.891.600	-	3.120.725.693	392.434.850	266.563.700	788.276.289	4.810.891.932
67	Kab. Solok	1.870.959.096	13.494.000	-	457.748.950	473.880.950	111.515.607	788.276.289	1.844.915.796
68	Kab. Tanah Datar	2.000.418.102	13.494.000	-	681.422.882	392.434.850	114.790.291	788.276.289	2.000.418.102
69	Kota Bukit Tinggi	1.948.710.481	13.494.000	-	641.853.536	392.434.850	112.651.986	788.276.289	1.948.710.481



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 597 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Kota Padang Panjang	1.948.710.461	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.651.986	788.276.289	1.948.710.461
71	Kota Padang	1.951.141.963	13.494.000	-	641.854.388	392.434.650	115.082.636	788.276.289	1.951.141.963
72	Kota Payakumbuh	1.948.804.761	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.746.286	788.276.289	1.948.804.761
73	Kota Sawahlunto	6.869.707.138	13.494.000	-	5.580.978.323	392.434.650	114.523.876	788.276.289	6.869.707.138
74	Kota Solok	1.948.737.961	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.679.486	788.276.289	1.948.737.961
75	Kota Pekanbaru	1.948.740.261	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.681.786	788.276.289	1.948.740.261
76	Kab. Pasaman Barat	1.702.758.535	13.494.000	-	393.034.450	392.434.650	115.519.146	788.276.289	1.702.758.535
77	Kab. Dharmasraya	2.232.552.886	13.494.000	-	800.580.673	392.434.650	196.415.524	788.276.289	2.191.201.136
78	Kab. Solok Selatan	8.454.422.436	13.494.000	-	482.302.150	6.982.373.200	187.976.797	788.276.289	8.454.422.436
79	Provinsi Riau	1.041.964.623.283	1.024.329.781.066	15.489.674.385	12.778.899.810	-	27.456.578.252	-	1.040.034.943.533
80	Kab. Bengkalis	678.795.484.056	664.127.549.795	2.437.549.637	2.116.852.709	-	9.325.255.626	788.276.289	678.795.484.056
81	Kab. Indragiri Hilir	217.141.053.090	186.241.780.185	2.812.667.412	11.870.909.091	-	15.427.420.113	788.276.289	217.141.053.090
82	Kab. Indragiri Hulu	135.089.692.830	122.037.868.409	2.437.549.637	4.871.349.598	-	4.954.548.837	788.276.289	135.089.692.830
83	Kab. Kampar	301.260.803.179	286.126.734.115	5.420.651.400	1.516.142.502	-	7.408.898.873	788.276.289	301.260.803.179
84	Kab. Kuantan Singingi	198.371.688.323	186.241.780.185	2.812.667.412	2.583.118.050	-	5.945.846.387	788.276.289	198.371.688.323
85	Kab. Pelalawan	162.213.408.312	124.029.406.535	23.002.846.874	2.189.054.710	-	12.223.823.904	788.276.289	162.213.408.312
86	Kab. Rokan Hilir	420.671.590.686	410.447.121.558	2.437.549.637	2.116.852.709	-	4.881.790.495	788.276.289	420.671.590.686
87	Kab. Rokan Hulu	146.177.129.855	136.721.430.610	2.437.549.637	1.536.167.170	-	4.893.706.149	788.276.289	146.177.129.855
88	Kab. Siah	342.358.735.100	326.280.361.882	2.437.549.637	2.116.852.709	-	10.755.694.583	788.276.289	342.358.735.100
89	Kota Dumai	197.525.362.203	186.241.780.185	2.812.667.412	2.116.852.709	-	5.565.785.808	788.276.289	197.525.362.203
90	Kota Pekanbaru	196.119.338.508	186.241.780.185	2.812.667.412	2.116.852.709	-	3.672.114.764	788.276.289	196.119.338.508
91	Kab. Kepulauan Meranti	150.925.654.067	128.406.829.545	5.335.509.745	9.767.492.630	-	5.815.156.358	788.276.289	150.107.264.567
92	Provinsi Kepulauan Riau	263.350.472.820	59.225.856.348	185.154.952.945	7.717.784.250	-	728.389.277	-	262.826.971.820



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 598 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Kab. Bintan	169.890.163.651	29.998.397.771	134.547.375.146	4.490.161.704	-	59.233.241	788.276.289	169.883.443.651
94	Kab. Natuna	142.613.163.396	73.514.540.564	64.552.219.866	3.695.534.467	-	55.997.010	788.276.289	142.606.568.196
95	Kab. Karimun	172.521.781.952	29.998.397.771	134.547.375.146	7.006.117.804	-	162.642.192	788.276.289	172.502.809.202
96	Kota Batam	168.094.863.365	29.998.397.771	134.547.375.146	3.695.534.467	-	58.382.962	788.276.289	168.087.966.635
97	Kab. Kepulauan Anambas	113.686.205.099	48.493.414.016	60.652.861.332	3.695.534.467	-	36.118.995	788.276.289	113.686.205.099
98	Kota Tanjung Pinang	169.065.640.104	29.998.397.771	134.547.375.146	3.671.386.596	-	60.204.302	788.276.289	169.065.640.104
99	Kab. Lingga	168.846.613.152	29.998.397.771	134.547.375.146	3.269.965.566	-	242.596.380	788.276.289	168.846.613.152
100	Provinsi Jambi	287.970.986.801	69.806.145.732	169.254.868.721	43.191.246.616	-	5.995.788.932	-	287.448.050.001
101	Kab. Batanghari	40.673.294.324	8.192.007.400	20.205.966.038	9.237.198.702	-	2.249.825.895	788.276.289	40.673.294.324
102	Kab. Bungo	70.848.851.371	13.801.228.804	33.850.974.823	21.485.676.888	-	1.022.694.567	788.276.289	70.848.851.371
103	Kab. Kerinci	57.843.344.547	13.801.228.804	33.850.974.823	8.212.393.311	-	990.471.320	788.276.289	57.843.344.547
104	Kab. Merangin	55.383.582.129	13.801.228.804	33.850.974.823	5.729.626.684	-	1.213.475.529	788.276.289	55.383.582.129
105	Kab. Muaro Jambi	37.612.729.716	9.654.008.600	20.481.103.558	4.935.739.051	-	1.753.602.218	788.276.289	37.612.729.716
106	Kab. Sarolangun	70.117.416.830	9.217.862.600	20.222.707.110	38.325.808.753	-	1.562.662.078	788.276.289	70.117.416.830
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	269.228.843.317	83.640.569.567	174.705.136.652	5.789.755.034	-	3.738.087.375	788.276.289	268.641.824.917
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	84.793.317.713	26.785.822.336	46.488.948.024	8.212.393.312	-	2.517.877.752	788.276.289	84.793.317.713
109	Kab. Tebo	59.997.036.928	13.085.018.595	33.850.974.823	10.465.493.489	-	1.807.273.732	788.276.289	58.997.036.928
110	Kota Jambi	38.539.994.057	8.394.321.400	20.150.278.238	8.212.393.311	-	994.724.819	788.276.289	38.539.994.057
111	Kota Sungai Penuh	57.669.262.708	13.801.228.804	33.850.974.823	8.212.393.311	-	1.016.389.481	788.276.289	57.669.262.708
112	Provinsi Sumatera Selatan	1.337.714.906.132	137.815.727.204	827.944.724.992	361.336.756.514	1.483.648.200	8.276.288.222	-	1.336.857.066.132
113	Kab. Lahat	304.779.330.227	12.671.423.960	84.596.876.520	204.864.165.050	581.687.000	1.276.901.408	788.276.289	304.779.330.227
114	Kab. Musi Banyuasin	1.212.965.665.238	173.820.337.137	953.637.705.532	80.716.001.796	185.915.100	3.817.429.384	788.276.289	1.212.965.665.238
115	Kab. Musi Rawas	217.486.916.225	18.535.243.402	160.638.733.832	35.386.472.496	185.915.100	2.026.122.656	734.428.739	217.486.916.225



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 599 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Kab. Muar Rawas Utara	113.183.515.242	14.180.350.477	70.019.832.607	27.004.128.700	185.996.350	1.078.978.369	734.428.739	113.183.515.242
117	Kab. Muara Enim	463.864.249.617	17.368.602.000	116.658.743.760	324.456.886.091	2.014.009.250	2.830.579.777	734.428.739	463.864.249.617
118	Kab. Ogan Komering Ilir	172.332.462.314	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.238.917	185.915.100	5.361.016.596	788.276.289	172.332.462.314
119	Kab. Ogan Komering Ulu	133.869.536.549	20.897.703.860	76.759.250.605	34.295.320.886	185.915.100	825.564.309	788.276.289	133.752.031.049
120	Kota Palembang	167.821.519.694	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.091.731	185.915.100	850.221.162	788.276.289	167.821.519.694
121	Kota Pagar Alam	168.028.480.878	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.091.731	740.939.350	502.158.098	788.276.289	168.028.480.878
122	Kota Lubuk Linggau	167.821.519.694	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.091.731	185.915.100	850.221.162	788.276.289	167.821.519.694
123	Kota Prabumulih	124.537.149.282	11.548.866.400	77.762.624.275	33.401.421.806	185.915.100	850.245.412	788.276.289	124.537.149.282
124	Kab. Empat Lawang	156.081.378.648	17.785.924.331	103.493.091.081	32.977.950.685	185.915.100	850.221.162	788.276.289	156.081.378.648
125	Kab. Banyuasin	126.784.039.487	14.361.998.800	70.019.832.607	37.814.705.383	185.915.100	3.813.511.308	788.276.289	126.784.039.487
126	Kab. Ogan Ilir	128.693.063.985	11.808.201.000	70.019.832.607	45.032.817.827	185.915.100	850.221.162	788.276.289	128.693.063.985
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	169.737.328.501	17.785.924.331	103.493.091.081	46.573.035.287	185.915.100	911.084.413	788.276.289	169.737.328.501
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	153.617.681.116	17.785.924.331	103.493.091.081	30.526.936.385	188.409.100	835.043.930	788.276.289	153.617.681.116
129	Kab. Penuk Abab Lematang Ilir	117.128.891.254	9.648.711.000	67.539.886.934	38.073.969.388	185.996.350	945.898.843	734.428.739	117.128.891.254
130	Provinsi Bangka Belitung	85.158.646.596	1.752.087.200	-	83.060.431.889	-	42.799.387	-	84.855.327.596
131	Kab. Bangka	57.795.135.906	904.465.750	-	56.083.264.114	-	18.129.753	788.276.289	57.795.135.906
132	Kab. Belitung	30.877.045.729	904.465.750	-	29.155.291.900	-	28.011.790	788.276.289	30.877.045.729
133	Kota Pangkal Pinang	24.164.015.189	904.465.750	-	22.458.071.108	-	13.202.042	788.276.289	24.164.015.189
134	Kab. Bangka Selatan	42.876.894.940	904.465.750	-	41.170.798.974	-	13.353.927	788.276.289	42.876.894.940
135	Kab. Bangka Tengah	38.319.772.644	904.465.750	-	36.613.688.413	-	13.342.192	788.276.289	38.319.772.644
136	Kab. Bangka Barat	51.191.571.591	904.465.750	-	49.484.774.784	-	14.054.768	788.276.289	51.191.571.591
137	Kab. Belitung Timur	34.378.730.175	904.465.750	-	32.629.658.950	-	56.329.186	788.276.289	34.378.730.175
138	Provinsi Bengkulu	29.314.680.794	-	-	28.225.551.061	279.782.030	408.091.693	-	28.913.404.784



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 600 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Kab. Bengkulu Selatan	6.890.270.313	-	-	6.013.817.978	62.168.061	26.006.985	788.276.289	6.890.270.313
140	Kab. Bengkulu Utara	22.259.308.393	-	-	21.170.288.950	62.168.061	238.574.083	788.276.289	22.259.308.393
141	Kab. Rejang Lebong	6.981.135.002	-	-	6.013.807.829	153.641.950	25.408.834	788.276.289	6.981.135.002
142	Kota Bengkulu	6.874.353.601	-	-	6.013.807.929	62.168.061	10.100.322	788.276.288	6.874.353.601
143	Kab. Kaur	4.989.370.154	-	-	4.104.654.260	62.168.061	14.270.554	788.276.289	4.989.370.154
144	Kab. Seluma	6.194.695.534	-	-	5.300.381.000	62.168.061	43.889.184	788.276.289	6.194.695.534
145	Kab. Mukomuko	6.890.559.744	-	-	6.013.814.560	62.189.061	24.232.834	788.276.289	6.888.482.744
146	Kab. Lebong	5.890.823.836	-	-	5.029.366.350	62.168.061	8.945.136	788.276.289	5.888.756.836
147	Kab. Bengkulu Tengah	20.896.787.814	-	-	20.018.182.250	62.168.037	28.160.238	788.276.289	20.896.787.814
148	Kab. Kepahiang	7.073.118.832	-	-	6.013.807.929	203.532.360	67.502.264	788.276.289	7.073.118.832
149	Provinsi Lampung	35.443.405.317	22.150.757.800	4.194.587.051	4.315.946.861	4.432.714.651	349.399.154	-	35.443.405.317
150	Kab. Lampung Barat	8.013.286.100	5.249.193.048	559.003.599	774.815.781	644.120.850	51.718.083	734.428.739	8.013.286.100
151	Kab. Lampung Selatan	7.977.147.374	5.249.193.048	559.003.599	582.392.555	746.271.900	52.009.983	788.276.289	7.977.147.374
152	Kab. Lampung Tengah	7.786.446.534	5.249.193.048	559.003.599	502.282.808	637.869.386	49.821.404	788.276.289	7.786.446.534
153	Kab. Lampung Utara	7.861.927.098	5.249.193.048	559.003.599	577.141.393	637.869.386	50.443.383	788.276.289	7.861.927.098
154	Kab. Lampung Timur	16.247.432.037	13.635.391.400	559.003.599	577.140.830	637.869.386	49.750.533	788.276.289	16.247.432.037
155	Kab. Tanggamus	21.915.860.090	5.249.193.048	559.003.599	7.412.585.721	7.854.682.250	62.119.183	788.276.289	21.915.860.090
156	Kab. Tulang Bawang	7.818.456.910	5.249.193.048	559.003.599	534.384.055	637.869.386	49.750.533	788.276.289	7.818.456.910
157	Kab. Way Kanan	8.072.882.312	5.249.193.048	559.003.599	648.541.374	637.869.386	189.998.616	788.276.289	8.072.882.312
158	Kab. Pesawaran	7.951.816.894	5.249.193.048	559.003.599	548.563.625	757.029.800	49.750.533	788.276.289	7.951.816.894
159	Kab. Pesisir Barat	7.885.096.791	5.249.193.048	559.003.599	569.854.488	705.744.836	46.872.083	734.428.739	7.885.096.791
160	Kab. Pringsewu	7.861.404.395	5.249.193.048	559.003.599	577.311.540	637.869.386	49.750.533	788.276.289	7.861.404.395
161	Kab. Mesuji	8.270.644.036	5.249.193.048	559.003.599	496.146.055	637.869.386	540.155.659	788.276.289	8.270.644.036



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 601 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	Kab. Tulang Bawang Barat	7.861.232.341	5.249.193.048	559.003.599	577.139.486	637.869.385	49.750.533	788.276.289	7.861.232.341
163	Kota Bandar Lampung	7.870.503.455	5.249.193.048	559.003.599	577.139.486	647.140.500	49.750.533	788.276.289	7.870.503.455
164	Kota Metro	7.861.232.341	5.249.193.048	559.003.599	577.139.486	637.869.385	49.750.533	788.276.289	7.861.232.341
165	Provinsi DKI Jakarta	80.806.977.722	66.899.385.313	12.579.654.180	-	-	1.078.728	1.326.869.601	80.806.977.722
166	Provinsi Jawa Barat	472.239.602.103	48.033.150.785	60.554.184.782	9.024.996.550	353.818.329.001	808.940.985	-	472.239.602.103
167	Kab. Bandung	171.941.369.007	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	180.429.655.750	70.888.913	788.276.289	171.941.369.007
168	Kab. Bekasi	49.945.402.453	5.866.462.200	15.336.307.775	674.675.115	27.216.795.079	62.985.995	788.276.289	49.945.402.453
169	Kab. Bogor	69.871.606.305	5.198.363.984	4.779.508.956	12.661.561.104	46.328.027.400	115.868.572	788.276.289	69.871.606.305
170	Kab. Ciamis	38.250.589.905	4.440.481.584	4.779.508.956	626.712.865	27.216.795.079	452.662.682	734.428.739	38.250.589.905
171	Kab. Cianjur	39.137.884.428	5.198.363.984	4.779.508.956	942.699.339	27.216.795.079	312.240.781	788.276.289	39.137.884.428
172	Kab. Cirebon	38.576.825.943	5.198.363.984	4.779.508.956	520.127.817	27.216.795.079	73.753.818	788.276.289	38.576.825.943
173	Kab. Garut	87.298.303.692	5.198.363.984	4.779.508.956	641.599.517	75.810.137.200	80.417.746	788.276.289	87.298.303.692
174	Kab. Indramayu	48.110.137.117	7.577.582.000	9.741.862.215	674.675.115	27.216.795.079	110.946.419	788.276.289	48.110.137.117
175	Kab. Karawang	57.204.406.443	5.508.740.600	22.827.006.998	674.675.115	27.216.795.079	87.912.362	788.276.289	57.204.406.443
176	Kab. Kuningan	38.842.684.674	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	185.085.251	788.276.289	38.842.684.674
177	Kab. Majalengka	37.176.991.809	3.584.639.000	4.825.319.505	674.675.115	27.216.795.079	87.288.821	788.276.289	37.176.991.809
178	Kab. Pangandaran	38.029.322.506	4.440.481.584	4.779.508.956	626.712.865	27.216.795.079	231.395.293	734.428.739	38.029.322.506
179	Kab. Perawang	23.518.537.478	5.198.363.984	4.779.508.956	516.844.667	12.139.646.300	95.897.282	788.276.289	23.518.537.478
180	Kab. Subang	62.188.570.668	4.185.185.800	44.228.384.425	674.675.115	12.218.643.250	93.405.789	788.276.289	62.188.570.668
181	Kab. Sukabumi	55.918.887.573	5.198.363.984	4.779.508.956	879.245.962	44.048.833.850	224.658.532	788.276.289	55.918.887.573
182	Kab. Sumedang	23.643.742.373	5.198.363.984	4.779.508.956	674.695.715	12.060.615.750	142.281.679	788.276.289	23.643.742.373
183	Kab. Tasikmalaya	38.779.571.781	5.198.363.984	4.779.508.956	524.930.617	27.216.795.079	271.696.856	788.276.289	38.779.571.781
184	Kab. Bandung Barat	23.689.955.846	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	12.165.519.350	83.612.152	788.276.289	23.689.955.846



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 602 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	Kota Bandung	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
186	Kota Bekasi	41.684.087.669	5.198.363.984	7.743.091.207	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	41.684.087.669
187	Kota Bogor	38.721.289.571	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	63.670.148	788.276.289	38.721.289.571
188	Kota Cirebon	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
189	Kota Depok	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
190	Kota Sukabumi	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
191	Kota Cimahi	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
192	Kota Tasikmalaya	38.720.576.468	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.957.045	788.276.289	38.720.576.468
193	Kota Banjar	38.577.950.126	5.198.363.984	4.779.508.956	532.263.667	27.216.795.079	62.742.151	788.276.289	38.577.950.126
194	Provinsi Banten	3.133.593.368	-	-	2.498.870.273	488.866.250	166.856.845	-	3.133.593.368
195	Kab. Lebak	2.541.085.144	-	-	1.548.515.203	133.961.800	70.331.852	788.276.289	2.541.085.144
196	Kab. Pandeglang	5.432.663.467	-	-	3.997.003.937	336.832.900	310.550.341	788.276.289	5.432.663.467
197	Kab. Serang	2.066.014.522	-	-	622.348.562	607.729.400	47.662.271	788.276.289	2.066.014.522
198	Kab. Tangerang	1.596.570.364	-	-	626.716.212	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.596.570.364
199	Kota Cilegon	1.592.200.714	-	-	622.348.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
200	Kota Tangerang	1.592.200.714	-	-	622.348.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
201	Kota Serang	1.592.200.714	-	-	622.348.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
202	Kota Tangerang Selatan	1.592.200.714	-	-	622.348.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
203	Provinsi Jawa Tengah	16.913.183.862	853.548.771	12.093.116.843	36.455.183	648.100.727	3.181.961.458	-	16.913.183.862
204	Kab. Banjarnegara	1.830.023.409	56.090.685	711.359.243	2.379.694	38.123.288	233.794.210	788.276.289	1.830.023.409
205	Kab. Banyumas	2.006.569.039	56.090.685	711.359.243	1.223.244	183.748.300	265.871.278	788.276.289	2.006.569.039
206	Kab. Batang	2.218.705.975	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	623.633.226	788.276.289	2.218.705.975
207	Kab. Bora	19.938.687.989	841.908.800	15.677.392.543	1.223.244	38.123.288	2.591.673.805	788.276.289	19.938.687.989



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 603 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	Kab. Boyolali	1.926.449.692	56.090.685	711.359.243	1.223.244	32.288.600	337.211.631	788.276.289	1.926.449.692
209	Kab. Brebes	2.331.939.529	56.090.685	711.359.243	1.223.244	78.634.750	696.355.318	788.276.289	2.331.939.529
210	Kab. Cilacap	2.025.813.303	56.090.685	711.359.243	44.839.078	38.123.288	318.278.670	788.276.289	1.957.066.253
211	Kab. Demak	1.788.051.496	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	192.978.747	788.276.289	1.788.051.496
212	Kab. Grobogan	2.609.268.027	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	1.014.185.278	788.276.289	2.609.268.027
213	Kab. Jepara	1.884.512.906	56.090.685	711.359.243	1.223.647	38.123.288	289.439.754	788.276.289	1.884.512.906
214	Kab. Karanganyar	1.895.508.662	56.090.685	711.359.243	1.223.244	158.567.650	179.991.551	788.276.289	1.895.508.662
215	Kab. Kebumen	1.851.024.063	56.090.685	711.359.243	30.596.766	38.123.288	226.577.792	788.276.289	1.851.024.063
216	Kab. Kendal	2.404.168.377	56.090.685	711.359.243	1.223.244	40.912.150	806.308.766	788.276.289	2.404.168.377
217	Kab. Klaten	1.782.400.253	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.327.504	788.276.289	1.782.400.253
218	Kab. Kudus	1.795.139.774	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	200.067.025	788.276.289	1.795.139.774
219	Kab. Magelang	1.817.769.014	56.090.685	711.359.243	1.223.244	66.762.700	194.056.853	788.276.289	1.817.769.014
220	Kab. Pati	2.209.658.497	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	614.585.748	788.276.289	2.209.658.497
221	Kab. Pekalongan	1.824.071.065	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	228.998.316	788.276.289	1.824.071.065
222	Kab. Pemalang	2.459.409.898	56.090.685	711.359.243	1.223.244	44.925.450	857.534.987	788.276.289	2.459.409.898
223	Kab. Purbalingga	1.800.716.287	56.090.685	711.359.243	1.223.244	47.639.100	196.127.726	788.276.289	1.800.716.287
224	Kab. Purworejo	1.808.882.396	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	213.808.647	788.276.289	1.808.882.396
225	Kab. Rembang	2.203.959.705	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	608.886.956	788.276.289	2.203.959.705
226	Kab. Semarang	2.328.682.218	56.090.685	711.359.243	1.223.244	409.703.550	362.029.207	788.276.289	2.328.682.218
227	Kab. Sragen	1.833.933.246	56.090.685	711.359.243	1.223.244	51.369.600	225.614.285	788.276.289	1.833.933.246
228	Kab. Sukoharjo	1.782.152.344	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.078.595	788.276.289	1.782.152.344
229	Kab. Tegal	2.383.490.261	56.090.685	711.359.243	1.223.244	40.810.700	785.730.100	788.276.289	2.383.490.261
230	Kab. Temanggung	1.795.931.414	56.090.685	711.359.243	1.223.244	43.299.750	195.682.203	788.276.289	1.795.931.414



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 604 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	Kab. Wonorejo	1.851.401.434	56.090.685	711.359.243	57.108.326	32.297.250	206.271.641	788.276.289	1.851.401.434
232	Kab. Wonorejo	1.816.925.247	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	221.852.498	788.276.289	1.816.925.247
233	Kota Magelang	1.782.156.584	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.083.835	788.276.289	1.782.156.584
234	Kota Pekalongan	1.782.152.053	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.079.304	788.276.289	1.782.152.053
235	Kota Salatiga	1.775.308.465	56.090.685	711.359.243	1.223.244	31.279.700	187.079.304	788.276.289	1.775.308.465
236	Kota Semarang	1.989.102.552	56.090.685	812.704.643	1.223.244	38.123.288	292.684.403	788.276.289	1.989.102.552
237	Kota Surakarta	1.782.152.053	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.079.304	788.276.289	1.782.152.053
238	Kota Tegal	1.782.152.053	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.079.304	788.276.289	1.782.152.053
239	Provinsi DI Yogyakarta	30.428.738	-	-	16.101.127	-	14.327.611	-	30.428.738
240	Kab. Bantul	796.438.770	-	-	788.301	-	7.372.180	788.276.289	796.438.770
241	Kab. Gunung Kidul	800.519.498	-	-	788.301	-	11.454.908	788.276.289	800.519.498
242	Kab. Kulon Progo	856.885.368	-	-	61.245.098	-	7.163.981	788.276.289	856.885.368
243	Kab. Sleman	796.228.571	-	-	788.301	-	7.163.981	788.276.289	796.228.571
244	Kota Yogyakarta	824.983.705	-	-	788.301	-	35.919.115	788.276.289	824.983.705
245	Provinsi Jawa Timur	636.497.772.211	551.466.802.279	52.451.713.802	28.507.073.224	586.124.350	3.487.068.356	-	636.497.772.211
246	Kab. Bangkalan	66.384.258.891	32.731.734.313	31.083.516.126	1.534.713.771	31.628.750	214.389.642	788.276.289	66.384.258.891
247	Kab. Banyuwangi	88.406.296.312	37.803.687.552	5.382.490.341	42.320.970.803	395.814.850	1.715.056.477	788.276.289	88.406.296.312
248	Kab. Blitar	45.901.723.880	37.803.687.552	5.382.490.341	1.538.987.221	31.628.750	358.663.727	788.276.289	45.901.723.880
249	Kab. Bojonegara	1.102.102.591.753	1.086.849.838.203	2.252.332.706	1.534.721.499	31.628.750	645.794.306	788.276.289	1.102.102.591.753
250	Kab. Bondowoso	46.030.647.615	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	212.679.900	308.792.034	788.276.289	46.030.647.615
251	Kab. Gresik	40.622.557.208	30.792.707.590	7.260.190.122	1.534.721.499	31.628.750	215.932.958	788.276.289	40.622.557.208
252	Kab. Jember	46.308.218.570	37.803.687.552	5.382.490.341	1.133.688.167	31.628.750	1.163.447.481	788.276.289	46.308.218.570
253	Kab. Jombang	45.910.157.007	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	369.352.676	788.276.289	45.910.157.007



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 605 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Kab. Kediri	45.895.590.069	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	354.785.638	788.276.289	45.895.590.069
255	Kab. Lamongan	45.988.321.038	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	447.516.607	788.276.289	45.988.321.038
256	Kab. Lumajang	45.371.015.713	37.803.687.552	5.382.490.341	1.126.191.007	31.628.750	238.741.774	788.276.289	45.371.015.713
257	Kab. Madun	46.630.769.213	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	94.324.250	1.027.269.282	788.276.289	46.630.769.213
258	Kab. Magetan	45.746.782.677	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	45.858.050	181.748.946	788.276.289	45.746.782.677
259	Kab. Malang	45.431.098.073	37.803.687.552	5.382.490.341	1.130.799.807	39.226.900	266.617.384	788.276.289	45.431.098.073
260	Kab. Mojokerto	45.822.023.894	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	54.460.200	258.397.813	788.276.289	45.822.023.894
261	Kab. Nganjuk	46.135.109.001	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	594.304.570	788.276.289	46.135.109.001
262	Kab. Ngawi	46.410.594.180	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	86.668.100	834.749.399	788.276.289	46.410.594.180
263	Kab. Ponorogo	45.817.858.249	37.803.687.552	5.382.490.341	1.617.406.564	31.628.750	194.368.753	788.276.289	45.817.858.249
264	Kab. Pamekasan	45.752.542.779	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	211.738.348	788.276.289	45.752.542.779
265	Kab. Pasuruan	45.787.568.653	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	48.671.300	229.719.672	788.276.289	45.787.568.653
266	Kab. Ponorogo	46.194.786.546	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.741.849	248.077.700	437.513.015	788.276.289	46.194.786.546
267	Kab. Probolinggo	45.868.155.558	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	327.351.127	788.276.289	45.868.155.558
268	Kab. Sampang	45.728.684.159	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	187.879.728	788.276.289	45.728.684.159
269	Kab. Sidoarjo	34.596.259.391	29.827.361.577	2.224.568.200	1.534.721.499	31.628.750	189.703.076	788.276.289	34.596.259.391
270	Kab. Situbondo	45.841.848.858	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	34.698.700	297.974.477	788.276.289	45.841.848.858
271	Kab. Sumenep	35.635.806.715	30.472.535.251	2.590.304.856	1.534.721.499	31.628.750	218.140.070	788.276.289	35.635.806.715
272	Kab. Trenggalek	45.415.276.906	37.803.687.552	5.382.490.341	1.129.675.757	31.628.750	279.518.217	788.276.289	45.415.276.906
273	Kab. Tuban	36.461.129.096	30.498.491.868	2.805.145.525	1.534.721.499	31.628.750	802.865.165	788.276.289	36.461.129.096
274	Kab. Tulungagung	45.449.953.482	37.803.687.552	5.382.490.341	1.130.318.457	31.628.750	313.552.093	788.276.289	45.449.953.482
275	Kota Blitar	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
276	Kota Kediri	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 606 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277	Kota Medan	45.729.684.314	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.879.883	788.276.289	45.729.684.314
278	Kota Malang	45.729.200.395	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.513	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.395
279	Kota Mojokerto	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
280	Kota Pasuruan	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
281	Kota Probolinggo	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
282	Kota Surabaya	45.736.001.131	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.736.001.131
283	Kota Batu	45.747.205.996	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	47.804.000	190.126.315	788.276.289	45.747.205.996
284	Provinsi Kalimantan Barat	82.145.641.768	-	-	56.218.885.884	-	18.750.563.834	-	74.969.449.718
285	Kab. Bengkayang	6.957.763.392	-	-	5.843.438.047	-	526.049.056	788.276.289	6.957.763.392
286	Kab. Landak	15.379.741.505	-	-	13.722.064.938	-	669.400.378	788.276.289	15.379.741.505
287	Kab. Kapuas Hulu	10.649.653.801	-	-	8.705.788.638	-	3.155.680.874	788.276.289	10.649.653.801
288	Kab. Ketapang	73.808.587.022	-	-	69.351.889.504	-	3.669.421.228	788.276.289	73.808.587.022
289	Kab. Mempawah	7.851.154.225	-	-	6.383.578.893	-	879.301.243	788.276.289	7.851.154.225
290	Kab. Sambas	7.857.887.484	-	-	6.711.849.784	-	349.231.711	788.276.289	7.849.357.764
291	Kab. Sanggau	45.118.445.900	-	-	43.630.652.214	-	699.517.397	788.276.289	45.118.445.900
292	Kab. Sintang	8.789.968.413	-	-	6.003.595.284	-	1.098.096.840	788.276.289	8.789.968.413
293	Kota Pontianak	8.096.823.588	-	-	6.711.903.029	-	586.644.280	788.276.289	8.096.823.588
294	Kota Singkawang	8.020.071.838	-	-	6.711.903.029	-	519.882.320	788.276.289	8.020.071.838
295	Kab. Kayong Utara	6.982.718.568	-	-	5.665.840.689	-	529.601.610	788.276.289	6.982.718.568
296	Kab. Kulu Raya	10.269.454.148	-	-	6.711.865.282	-	2.769.312.577	788.276.289	10.269.454.148
297	Kab. Sekeloa	7.124.118.038	-	-	5.787.198.597	-	548.643.152	788.276.289	7.124.118.038
298	Kab. Melawi	9.780.025.606	-	-	7.879.316.665	-	1.112.432.652	788.276.289	9.780.025.606
299	Provinsi Kalimantan Tengah	524.872.383.025	7.770.808	147.494.208	383.892.138.807	-	158.862.658.918	-	482.210.862.725



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 607 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	Kab. Bantorejo	77.248.734.443	1.194.800	22.691.200	70.569.041.061	-	5.867.531.093	788.276.289	77.248.734.443
301	Kab. Bantul	138.330.393.466	10.570.600	294.990.000	128.792.692.088	-	8.443.864.508	788.276.289	138.330.393.466
302	Kab. Bantul	173.612.571.785	1.193.800	22.691.200	165.493.861.314	-	7.306.549.182	788.276.289	173.612.571.795
303	Kab. Bantul	39.426.943.159	1.193.800	22.691.200	33.621.272.721	-	4.993.509.149	788.276.289	39.426.943.159
304	Kab. Bantul	51.797.490.978	1.193.800	22.691.200	41.841.226.116	-	9.144.103.571	788.276.289	51.797.490.976
305	Kab. Bantul	49.042.234.371	1.193.800	22.691.200	44.830.966.753	-	3.599.106.328	788.276.289	49.042.234.371
306	Kab. Bantul	66.326.559.926	4.958.000	22.691.200	59.806.013.034	-	5.704.621.403	788.276.289	66.326.559.926
307	Kab. Bantul	154.135.864.949	1.193.800	22.691.200	139.956.331.745	-	13.367.371.915	788.276.289	154.135.864.949
308	Kab. Bantul	49.292.859.968	1.193.800	22.691.200	44.633.362.165	-	3.847.336.514	788.276.289	49.292.859.968
309	Kab. Bantul	51.587.932.581	1.193.800	22.691.200	37.021.449.510	-	13.754.321.782	788.276.289	51.587.932.581
310	Kab. Bantul	54.181.217.585	1.193.800	22.691.200	41.664.814.521	-	11.704.141.775	788.276.289	54.181.217.585
311	Kab. Bantul	49.476.670.722	1.193.800	22.691.200	44.915.012.881	-	3.749.496.552	788.276.289	49.476.670.722
312	Kab. Bantul	52.664.326.818	1.193.800	22.691.200	40.414.998.210	-	9.454.448.718	788.276.289	50.681.608.218
313	Kab. Bantul	46.072.169.137	1.193.800	22.691.200	33.426.531.416	-	11.833.476.432	788.276.289	46.072.169.137
314	Provinsi Kalimantan Selatan	1.060.189.075.983	3.176.248.631	-	1.053.694.537.317	-	2.360.241.105	-	1.059.231.028.053
315	Kab. Banjar	172.296.417.068	529.374.882	-	170.916.369.363	-	62.396.534	788.276.289	172.296.417.068
316	Kab. Banjar	176.073.061.508	529.374.882	-	174.688.712.003	-	66.698.334	788.276.289	176.073.061.508
317	Kab. Banjar	223.997.373.400	529.374.882	-	222.617.570.945	-	62.151.284	788.276.289	223.997.373.400
318	Kab. Banjar	124.137.361.814	529.374.882	-	122.757.608.809	-	62.101.834	788.276.289	124.137.361.814
319	Kab. Banjar	176.073.979.758	529.374.882	-	174.688.711.553	-	67.617.034	788.276.289	176.073.979.758
320	Kab. Banjar	202.337.413.487	529.374.882	-	200.898.913.676	-	120.848.640	788.276.289	202.337.413.487
321	Kab. Banjar	363.882.079.966	2.753.576.400	-	359.940.370.832	-	399.856.445	788.276.289	363.882.079.966
322	Kab. Banjar	424.987.245.741	529.374.882	-	423.575.832.613	-	93.761.957	788.276.289	424.987.245.741



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 608 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasar Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
323	Kab. Tapin	231.458.925.896	529.374.882	-	230.079.137.841	-	62.136.884	788.276.289	231.458.925.896
324	Kota Banjarbaru	176.928.202.312	529.374.882	-	175.546.332.041	-	84.219.100	788.276.289	176.928.202.312
325	Kota Banjarmasin	176.074.969.591	529.374.882	-	174.688.711.553	-	68.606.867	788.276.289	176.074.969.591
326	Kab. Balangan	308.571.749.775	398.446.400	-	307.322.803.302	-	62.123.784	788.276.289	308.571.749.775
327	Kab. Tanah Bumbu	442.874.822.012	529.374.882	-	441.223.306.144	-	333.864.697	788.276.289	442.874.822.012
328	Provinsi Kalimantan Timur	2.829.832.886.020	129.857.018.986	269.684.900.330	2.340.407.391.165	-	136.357.228.289	-	2.876.106.539.770
329	Kab. Berau	890.043.185.568	45.717.457.999	120.575.486.675	714.867.934.932	-	8.094.050.673	788.276.289	890.043.185.568
330	Kab. Kutai Kartanegara	1.794.211.785.355	157.868.213.487	236.957.887.710	1.387.328.387.059	-	11.271.020.810	788.276.289	1.794.211.785.355
331	Kab. Kutai Barat	853.956.738.215	45.717.457.999	120.575.486.675	671.069.176.617	-	15.860.209.185	734.428.739	853.956.738.215
332	Kab. Kutai Timur	1.551.794.400.347	27.187.926.060	56.326.665.734	1.444.816.246.161	-	22.875.286.103	788.276.289	1.551.794.400.347
333	Kab. Mahakam Ulu	543.118.673.033	45.717.457.999	120.575.486.675	365.070.177.418	-	11.021.143.202	734.428.739	543.118.673.033
334	Kab. Paser	924.485.152.855	45.717.457.999	120.575.486.675	751.033.184.292	-	6.370.788.400	788.276.289	924.485.152.855
335	Kota Balikpapan	686.408.332.463	45.717.457.999	120.875.488.275	513.737.882.837	-	5.489.227.063	788.276.289	686.408.332.463
336	Kota Bontang	609.837.785.503	33.126.879.840	56.263.638.334	514.038.771.252	-	5.620.219.788	788.276.289	609.837.785.503
337	Kota Samarinda	539.709.468.196	27.064.560.316	56.387.728.854	449.980.985.551	-	5.487.918.186	788.276.289	539.709.468.196
338	Kab. Penangam Paser Utara	489.638.906.846	32.906.236.994	68.042.710.734	381.687.064.732	-	6.028.408.297	788.276.289	489.638.906.846
339	Provinsi Kalimantan Utara	290.899.317.450	16.735.232.848	1.565.148.361	155.425.269.381	-	89.621.822.418	-	293.347.473.000
340	Kab. Bulungan	114.633.144.803	12.126.938.600	1.377.714.215	85.480.500.112	-	14.879.714.587	788.276.289	114.633.144.803
341	Kab. Malinau	190.589.314.055	8.367.616.646	782.574.680	139.494.809.264	-	41.156.037.176	788.276.289	190.589.314.055
342	Kab. Nunukan	134.221.238.851	6.739.131.200	698.140.600	115.150.795.534	-	10.843.895.228	788.276.289	134.221.238.851
343	Kab. Tana Tidung	118.222.990.764	8.365.801.268	782.574.680	98.504.728.580	-	9.781.609.947	788.276.289	118.222.990.764
344	Kota Tarakan	101.902.343.584	18.158.227.542	1.751.244.200	76.992.239.428	-	6.212.356.127	788.276.289	101.902.343.584
345	Provinsi Sulawesi Utara	33.619.049.898	-	-	30.286.596.428	3.030.126.754	87.443.564	-	33.324.168.746



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 609 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	Kab. Bolaang Mongondow	15.686.641.264	-	-	14.457.991.333	432.875.324	6.081.418	788.276.289	15.685.224.364
347	Kab. Minahasa	7.229.975.598	-	-	4.124.087.978	2.312.982.400	4.628.931	788.276.289	7.229.975.598
348	Kab. Saephe	5.349.867.960	-	-	4.124.123.411	432.875.329	4.592.931	788.276.289	5.349.867.960
349	Kota Brting	23.063.533.584	-	-	21.837.789.035	432.875.329	4.592.931	788.276.289	23.063.533.584
350	Kota Manado	5.331.502.784	-	-	4.125.124.344	413.509.200	4.592.931	788.276.289	5.331.502.784
351	Kab. Kepulauan Talaud	5.349.888.804	-	-	4.124.142.255	432.875.329	4.592.931	788.276.289	5.349.888.804
352	Kab. Minahasa Selatan	5.438.264.751	-	-	4.238.889.986	407.091.450	4.871.376	788.276.289	5.437.129.101
353	Kab. Minahasa Tenggara	4.933.715.232	-	-	3.744.763.153	384.953.700	4.640.140	788.276.289	4.932.633.282
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	5.349.832.527	-	-	4.124.087.978	432.875.329	4.592.931	788.276.289	5.349.832.527
355	Kota Kotamobagu	5.014.203.534	-	-	3.788.051.285	432.875.329	4.055.181	788.276.289	5.013.258.084
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.759.922.191	-	-	5.533.478.343	432.875.329	4.291.180	788.276.289	6.759.922.141
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9.605.734.752	-	-	8.363.396.174	432.875.329	21.186.960	788.276.289	9.605.734.752
358	Kota Tomohon	8.207.138.948	-	-	4.124.087.978	3.290.181.750	4.592.931	788.276.289	8.207.138.948
359	Kab. Minahasa Utara	13.228.582.137	-	-	11.890.280.817	545.432.100	4.592.931	788.276.289	13.228.582.137
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.086.236.779	-	-	3.821.562.303	432.875.329	43.522.858	788.276.289	5.086.236.779
361	Provinsi Gorontalo	1.977.102.593	-	-	233.942.002	-	1.382.036.451	-	1.615.078.453
362	Kab. Boalemo	848.532.913	-	-	460.362	-	59.796.262	788.276.289	848.532.913
363	Kab. Gorontalo	1.009.203.177	-	-	168.211.642	-	52.715.246	788.276.289	1.009.203.177
364	Kota Gorontalo	848.647.262	-	-	1.357.324	-	59.013.649	788.276.289	848.647.262
365	Kab. Pohuwato	1.191.250.342	-	-	243.990.863	-	158.963.190	788.276.289	1.191.250.342
366	Kab. Gorontalo Utara	1.038.862.179	-	-	11.989.449	-	238.596.441	788.276.289	1.038.862.179
367	Kab. Bone Bolango	1.192.120.043	-	-	335.818.363	-	67.860.241	788.276.289	1.182.054.893
368	Provinsi Sulawesi Tengah	194.621.274.290	22.623.727.530	124.189.108.120	42.640.999.877	-	4.424.837.061	-	193.878.472.599



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 610 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	Kab. Banggai	296.424.516.001	36.499.015.725	248.378.216.239	7.652.264.359	-	2.658.717.239	788.276.289	295.976.489.851
370	Kab. Banggai Laut	31.688.460.554	3.770.620.331	20.698.184.745	6.380.507.409	-	104.719.330	734.428.739	31.688.460.554
371	Kab. Banggai Kepulauan	31.702.953.401	3.770.620.331	20.698.184.745	6.377.541.259	-	104.119.677	734.428.739	31.684.894.751
372	Kab. Buol	30.817.836.842	3.770.620.331	20.698.184.745	5.332.822.244	-	202.673.983	788.276.289	30.792.577.592
373	Kab. Tolitoli	31.131.924.451	3.770.620.331	20.698.184.745	5.478.855.006	-	395.988.080	788.276.289	31.131.924.451
374	Kab. Donggala	30.923.670.506	3.770.620.331	20.698.184.745	5.532.176.103	-	111.926.538	788.276.289	30.901.184.008
375	Kab. Morowali	92.938.208.549	3.770.620.331	20.698.184.745	65.492.580.212	-	1.966.029.072	734.428.739	92.661.843.099
376	Kab. Morowali Utara	34.912.583.959	3.921.559.731	20.698.184.745	9.331.908.289	-	226.502.455	734.428.739	34.912.583.959
377	Kab. Poso	31.607.230.701	3.770.620.331	20.698.184.745	4.822.379.003	-	1.427.770.333	788.276.289	31.607.230.701
378	Kota Palu	32.081.815.520	3.770.620.331	20.698.184.745	9.679.035.546	-	145.898.608	788.276.289	32.081.815.520
379	Kab. Pangkajene	31.275.628.141	3.770.620.331	20.698.184.745	5.876.135.403	-	142.411.373	788.276.289	31.275.628.141
380	Kab. Sigi	31.815.741.713	3.770.620.331	20.698.184.745	6.444.677.573	-	113.982.775	788.276.289	31.815.741.713
381	Kab. Tojo Una-Una	32.150.901.711	3.770.620.331	20.698.184.745	5.526.811.903	-	1.367.008.443	788.276.289	32.150.901.711
382	Provinsi Sulawesi Selatan	52.508.322.084	1.068.290	3.325.774.800	48.211.048.189	-	484.543.796	-	52.022.424.984
383	Kab. Bantaeng	5.046.037.777	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	16.571.972	788.276.289	5.046.037.777
384	Kab. Barru	4.196.641.283	91.656	289.197.800	3.106.358.072	-	12.716.466	788.276.289	4.196.641.283
385	Kab. Bone	5.766.343.197	91.656	289.197.800	4.658.462.668	-	29.314.784	788.276.289	5.766.343.197
386	Kab. Bulukumba	5.044.675.953	91.656	289.197.800	3.951.902.840	-	15.207.368	788.276.289	5.044.675.953
387	Kab. Enrekang	5.088.006.086	91.656	289.197.800	3.971.518.920	-	18.921.421	788.276.289	5.088.006.086
388	Kab. Gowa	5.078.654.932	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	49.189.127	788.276.289	5.078.654.932
389	Kab. Jenebera	5.045.179.470	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	15.713.665	788.276.289	5.045.179.470
390	Kab. Luwu	4.472.648.300	91.656	289.197.800	3.379.387.409	-	15.695.146	788.276.289	4.472.648.300
391	Kab. Luwu Utara	7.128.180.538	91.656	289.197.800	6.034.197.650	-	16.417.143	788.276.289	7.128.180.538



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 611 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	Kab. Maros	5.114.796.175	91.656	289.197.800	4.019.975.744	-	17.254.686	788.276.289	5.114.796.175
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	4.322.823.122	91.656	289.197.800	3.204.129.022	-	38.607.155	788.276.289	4.320.301.922
394	Kab. Pinrang	5.045.039.651	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	15.573.846	788.276.289	5.045.039.651
395	Kab. Kepulauan Selayar	5.057.137.927	91.656	289.197.800	3.964.364.814	-	15.207.368	788.276.289	5.057.137.927
396	Kab. Sidenreng Rappang	5.444.917.273	91.656	289.197.800	4.348.790.523	-	16.070.555	788.276.289	5.442.426.823
397	Kab. Sinjai	4.197.562.690	91.656	289.197.800	3.102.048.522	-	17.950.423	788.276.289	4.197.562.690
398	Kab. Soppeng	4.206.352.006	91.656	289.197.800	3.100.952.199	-	27.834.062	788.276.289	4.206.352.006
399	Kab. Takalar	5.044.675.417	91.656	289.197.800	3.951.902.304	-	15.207.368	788.276.289	5.044.675.417
400	Kab. Tana Toraja	4.267.694.674	91.656	289.197.800	3.161.686.789	-	28.442.140	788.276.289	4.267.694.674
401	Kab. Wajo	11.435.316.560	218.847	6.651.551.200	3.979.671.169	-	15.599.055	788.276.289	11.435.316.560
402	Kota Parepare	5.044.873.173	91.656	289.197.800	3.951.900.080	-	15.207.368	788.276.289	5.044.673.173
403	Kab. Toraja Utara	4.213.195.651	91.656	289.197.800	3.119.118.063	-	18.511.843	788.276.289	4.213.195.651
404	Kota Makassar	5.058.896.745	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	29.430.940	788.276.289	5.058.896.745
405	Kota Palopo	5.044.677.473	91.656	289.197.800	3.951.904.360	-	15.207.368	788.276.289	5.044.677.473
406	Kab. Luwu Timur	76.953.169.808	91.656	289.197.800	75.634.530.027	-	212.268.396	788.276.289	76.924.365.158
407	Provinsi Sulawesi Barat	375.663.219	-	-	56.822.249	-	263.668.970	-	320.491.219
408	Kab. Majene	808.003.892	-	-	2.097.213	-	17.630.390	788.276.289	808.003.892
409	Kab. Mamuju	889.675.862	-	-	145.002.020	-	20.245.103	734.428.739	889.675.862
410	Kab. Mamuju Tengah	815.379.103	-	-	2.111.157	-	78.839.207	734.428.739	815.379.103
411	Kab. Polewali Mandar	870.528.492	-	-	57.860.998	-	24.591.205	788.276.289	870.528.492
412	Kab. Mamasa	821.460.851	-	-	2.140.793	-	31.043.769	788.276.289	821.460.851
413	Kab. Pasangkayu	802.078.248	-	-	2.136.449	-	9.464.410	788.276.289	799.877.148
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	180.289.058.168	-	-	188.148.326.606	-	1.368.536.062	-	189.517.362.668



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 612 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAMA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	Kab. Buton	19.030.335.441	-	-	18.216.659.661	-	45.721.191	762.246.139	19.024.526.991
416	Kab. Konawe	24.872.217.569	-	-	19.250.861.062	-	4.036.441.066	734.428.739	24.021.730.869
417	Kab. Konawe Kepulauan	17.168.188.881	-	-	16.400.027.661	-	33.732.481	734.428.739	17.168.188.881
418	Kab. Kolaka	105.747.240.119	-	-	102.162.078.951	-	2.850.732.429	734.428.739	105.747.240.119
419	Kab. Kolaka Timur	27.028.672.864	-	-	26.245.857.036	-	39.262.389	734.428.739	27.019.568.164
420	Kab. Muna	24.070.503.176	-	-	23.249.177.665	-	47.065.272	768.754.789	24.064.997.726
421	Kota Kendari	18.054.668.717	-	-	17.241.390.718	-	25.001.710	788.276.289	18.054.668.717
422	Kota Bau-bau	18.090.548.358	-	-	17.270.937.068	-	31.335.001	788.276.289	18.090.548.358
423	Kab. Konawe Selatan	50.482.201.655	-	-	49.650.608.258	-	43.317.108	788.276.289	50.482.201.655
424	Kab. Bombana	67.806.461.988	-	-	66.987.219.450	-	30.966.249	788.276.289	67.806.461.988
425	Kab. Konawe Utara	104.807.220.002	-	-	103.949.405.132	-	137.435.581	788.276.289	104.875.117.002
426	Kab. Buton Utara	18.097.676.977	-	-	17.278.893.018	-	28.583.920	788.276.289	18.091.563.227
427	Kab. Wakatobi	24.327.436.716	-	-	23.510.318.937	-	28.541.490	788.276.289	24.327.436.716
428	Kab. Kolaka Utara	21.670.309.334	-	-	20.802.912.314	-	79.120.731	788.276.289	21.670.309.334
429	Kab. Muna Barat	24.111.021.858	-	-	23.256.698.187	-	28.920.082	825.403.589	24.111.021.858
430	Kab. Buton Tengah	24.208.297.770	-	-	23.359.944.049	-	28.063.632	817.269.139	24.203.276.820
431	Kab. Buton Selatan	17.935.018.894	-	-	17.091.161.420	-	21.567.385	817.269.139	17.929.997.944
432	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Badung	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
434	Kab. Bangli	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
435	Kab. Buleleng	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
436	Kab. Gianyar	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
437	Kab. Jembrana	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 613 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438	Kab. Kerangas	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
439	Kab. Klungkung	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
440	Kab. Tabanan	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
441	Kota Denpasar	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	59.598.296.781	-	-	57.131.574.238	-	2.147.475.843	-	59.279.050.081
443	Kab. Bima	13.722.401.476	-	-	12.886.728.950	-	43.786.637	788.276.289	13.718.791.876
444	Kab. Dompu	13.815.561.178	-	-	12.843.573.000	-	173.380.739	788.276.289	13.805.230.028
445	Kab. Lombok Barat	13.214.867.024	-	-	12.350.743.233	-	75.847.502	788.276.289	13.214.867.024
446	Kab. Lombok Tengah	13.171.366.622	-	-	12.305.081.913	-	74.559.020	788.276.289	13.167.914.222
447	Kab. Lombok Timur	13.305.578.189	-	-	12.437.880.150	-	72.457.100	788.276.289	13.298.613.539
448	Kab. Sumbawa	16.038.397.634	-	-	15.004.026.381	-	246.894.964	788.276.289	16.038.397.634
449	Kota Mataram	13.165.829.841	-	-	12.305.081.913	-	72.471.438	788.276.289	13.165.829.841
450	Kab. Lombok Utara	13.165.775.606	-	-	12.305.081.913	-	72.417.404	788.276.289	13.165.775.606
451	Kota Bima	13.165.775.606	-	-	12.305.081.913	-	72.417.404	788.276.289	13.165.775.606
452	Kab. Sumbawa Barat	114.656.045.293	-	-	113.475.500.500	-	375.371.954	788.276.289	114.638.148.743
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.799.305.113	-	-	719.216.458	1.064.088.971	16.000.684	-	1.799.305.113
454	Kab. Alor	912.952.749	-	-	897.450	116.975.090	8.704.010	788.276.289	912.952.749
455	Kab. Belu	1.240.282.218	-	-	403.377.900	101.342.169	1.133.410	734.428.739	1.240.282.218
456	Kab. Ende	1.340.860.245	-	-	1.885.138	539.318.580	11.380.318	788.276.289	1.340.860.245
457	Kab. Flores Timur	904.645.021	-	-	1.261.072	113.399.950	1.383.580	788.276.289	904.320.871
458	Kab. Kupang	1.114.004.718	-	-	220.635.700	101.342.169	3.750.580	788.276.289	1.114.004.718
459	Kab. Lembata	1.027.514.871	-	-	1.261.072	236.409.600	1.567.810	788.276.289	1.027.514.871
460	Kab. Malaka	838.123.091	-	-	1.276.073	101.342.169	1.076.110	734.428.739	838.123.091



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 614 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	Kab. Manggarai	1.640.010.649	-	-	108.388.450	743.778.000	1.567.910	788.276.289	1.640.010.649
462	Kab. Ngada	891.427.374	-	-	1.262.475	100.320.700	1.567.910	788.276.289	891.427.374
463	Kab. Sikka	904.022.490	-	-	1.261.072	101.342.169	13.142.960	788.276.289	904.022.490
464	Kab. Sumba Barat	892.550.231	-	-	1.279.713	101.342.169	1.652.060	788.276.289	892.550.231
465	Kab. Sumba Timur	1.458.128.923	-	-	564.942.555	101.342.169	1.567.910	788.276.289	1.458.128.923
466	Kab. Timor Tengah Selatan	2.011.548.618	-	-	1.119.271.900	101.342.169	2.658.260	788.276.289	2.011.548.618
467	Kab. Timor Tengah Utara	1.367.155.918	-	-	475.969.550	101.342.169	1.567.910	788.276.289	1.367.155.918
468	Kota Kupang	892.447.440	-	-	1.261.072	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.447.440
469	Kab. Rote Ndao	892.183.818	-	-	997.450	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.183.818
470	Kab. Nagekeo	934.237.265	-	-	43.050.897	101.342.169	1.567.910	788.276.289	934.237.265
471	Kab. Sumba Tengah	892.477.404	-	-	1.291.036	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.477.404
472	Kab. Sumba Barat Daya	892.504.253	-	-	1.317.885	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.504.253
473	Kab. Manggarai Timur	920.419.468	-	-	29.233.100	101.342.169	1.567.910	788.276.289	920.419.468
474	Kab. Sabu Raya	892.183.818	-	-	997.450	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.183.818
475	Kab. Manggarai Barat	892.183.818	-	-	997.450	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.183.818
476	Provinsi Maluku	48.924.857.543	3.434.820.802	-	6.580.148.989	-	24.441.713.752	-	34.376.683.543
477	Kab. Kepulauan Tawee	5.126.102.418	686.964.260	-	1.256.102.975	-	2.087.758.394	788.276.289	4.819.101.918
478	Kab. Maluku Tengah	4.408.912.802	686.964.260	-	1.256.103.297	-	1.677.568.956	788.276.289	4.408.912.802
479	Kab. Maluku Tenggara	3.766.363.573	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.035.020.049	788.276.289	3.766.363.573
480	Kab. Buru	4.806.137.883	686.964.260	-	1.285.263.754	-	1.723.283.330	788.276.289	4.463.787.833
481	Kota Ambon	3.767.717.113	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.036.373.589	788.276.289	3.767.717.113
482	Kab. Seram Bagian Barat	4.333.243.986	686.964.260	-	1.502.021.413	-	1.355.862.024	788.276.289	4.333.243.986
483	Kab. Seram Bagian Timur	10.792.726.086	6.859.552.094	-	1.256.105.625	-	1.888.792.078	788.276.289	10.792.726.086



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 615 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
484	Kab. Maluku Barat Daya	13.692.356.800	686.964.260	-	11.183.643.981	-	1.033.472.270	788.276.289	13.692.356.800
485	Kab. Buru Selatan	9.336.169.408	686.964.260	-	1.256.109.525	-	6.057.847.484	788.276.289	8.789.197.558
486	Kab. Kepulauan Aru	3.906.913.330	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.175.599.806	788.276.289	3.906.913.330
487	Kota Tual	3.764.638.970	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.033.295.446	788.276.289	3.764.638.970
488	Provinsi Maluku Utara	130.255.890.884	-	-	115.306.350.758	218.278.273	10.622.774.253	-	126.147.403.284
489	Kab. Halmahera Tengah	48.704.191.709	-	-	47.194.865.246	48.785.045	672.265.129	788.276.289	48.704.191.709
490	Kab. Halmahera Barat	20.366.860.093	-	-	19.021.557.103	69.637.195	487.189.506	788.276.289	20.366.860.093
491	Kota Ternate	25.523.894.625	-	-	24.168.449.895	48.785.045	510.363.296	788.276.289	25.523.894.625
492	Kab. Halmahera Timur	50.156.846.064	-	-	48.452.733.718	48.785.045	867.051.014	788.276.289	50.156.846.064
493	Kota Tidore Kepulauan	25.874.504.260	-	-	24.508.994.935	48.785.045	528.447.981	788.276.289	25.874.504.260
494	Kab. Kepulauan Sula	23.364.291.978	-	-	21.482.190.503	47.531.345	1.100.141.391	734.428.739	23.364.291.978
495	Kab. Pulau Morotai	20.319.275.504	-	-	18.936.959.505	48.785.045	472.599.315	788.276.289	20.246.620.154
496	Kab. Pulau Taka	40.066.281.677	-	-	38.768.805.745	47.531.345	418.005.448	734.428.739	39.968.771.277
497	Kab. Halmahera Selatan	78.270.503.046	-	-	74.424.598.341	132.766.850	2.481.216.816	788.276.289	77.826.858.086
498	Kab. Halmahera Utara	60.694.140.172	-	-	58.250.788.031	48.785.045	606.290.807	788.276.289	60.694.140.172
499	Provinsi Papua	533.030.988.719	-	-	478.985.183.412	-	39.160.629.057	-	518.145.792.469
500	Kab. Yakimo	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
501	Kab. Lanny Jaya	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
502	Kab. Bani Wae	35.285.114.642	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	784.599.000	35.285.114.642
503	Kab. Jayapura	26.983.595.324	-	-	25.313.609.722	-	885.386.602	784.599.000	26.983.595.324
504	Kab. Jayawijaya	26.732.407.707	-	-	25.397.245.514	-	550.563.193	784.599.000	26.732.407.707
505	Kab. Merauke	38.521.565.445	-	-	33.949.952.449	-	3.787.013.896	784.599.000	38.521.565.445
506	Kab. Mimika	712.185.966.309	-	-	709.342.054.796	-	1.853.636.563	784.599.000	711.790.290.359



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 616 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507	Kab. Nabire	32.007.783.167	-	-	26.213.099.164	-	4.095.541.714	788.276.289	31.096.917.167
508	Kab. Paniai	27.375.716.746	-	-	26.036.877.264	-	550.563.193	788.276.289	27.375.716.746
509	Kab. Puncak Jaya	26.559.788.280	-	-	25.220.946.614	-	550.565.357	788.276.289	26.559.788.280
510	Kab. Kepulauan Yapen	35.288.829.174	-	-	33.849.989.682	-	550.563.193	788.276.289	35.288.829.174
511	Kota Jayapura	35.285.133.084	-	-	33.949.952.449	-	550.581.815	784.599.000	35.285.133.084
512	Kab. Sarmi	31.127.782.030	-	-	25.733.823.364	-	3.764.994.527	788.276.289	30.287.194.180
513	Kab. Keerom	30.194.357.162	-	-	26.649.789.814	-	2.269.616.659	788.276.289	29.707.682.762
514	Kab. Yahukimo	35.289.129.545	-	-	33.950.290.063	-	550.563.193	788.276.289	35.289.129.545
515	Kab. Pegunungan Bintang	30.741.804.204	-	-	29.492.864.722	-	550.563.193	788.276.289	30.741.804.204
516	Kab. Tolikara	26.732.341.196	-	-	25.393.501.714	-	550.563.193	788.276.289	26.732.341.196
517	Kab. Boven Digoel	36.959.379.593	-	-	33.949.972.424	-	2.221.130.880	788.276.289	36.959.379.593
518	Kab. Mappi	35.498.432.337	-	-	33.949.952.449	-	780.203.599	788.276.289	35.498.432.337
519	Kab. Asmat	35.547.420.364	-	-	33.949.952.449	-	809.191.626	788.276.289	35.547.420.364
520	Kab. Waropen	35.782.892.742	-	-	34.375.161.833	-	486.052.970	788.276.289	35.649.401.082
521	Kab. Mamberamo Raya	35.479.886.473	-	-	33.950.428.224	-	600.875.710	788.276.289	35.339.580.223
522	Kab. Mamberamo Tengah	35.373.554.331	-	-	33.949.952.449	-	835.325.593	788.276.289	35.373.554.331
523	Kab. Nduga	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
524	Kab. Dogiyai	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
525	Kab. Intan Jaya	26.559.788.096	-	-	25.220.946.614	-	550.563.193	788.276.289	26.559.788.096
526	Kab. Puncok	35.633.592.331	-	-	34.294.752.849	-	550.563.193	788.276.289	35.633.592.331
527	Kab. Deyar	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
528	Kab. Supit	35.288.796.403	-	-	33.949.953.676	-	550.566.438	788.276.289	35.288.796.403
529	Provinsi Papua Barat	2.096.719.838.592	366.079.369.948	1.641.006.368.360	8.892.093.389	-	79.030.093.946	-	2.085.088.725.642



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 617 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
530	Kab. Sorong	55.757.256.097	10.738.238.400	34.743.149.665	3.477.560.157	-	5.395.568.286	788.276.289	55.142.792.797
531	Kab. Manokwari	74.064.774.701	2.801.941.224	65.503.345.230	1.415.401.956	-	3.250.640.002	716.479.939	73.687.808.351
532	Kab. Manokwari Selatan	73.208.737.174	2.801.941.224	65.503.345.230	1.415.128.831	-	2.771.841.950	716.479.939	73.208.737.174
533	Kab. Fak Fak	82.201.628.717	3.158.885.624	67.110.033.830	1.421.943.615	-	9.722.489.359	788.276.289	82.201.628.717
534	Kota Sorong	75.921.864.862	3.158.885.624	67.110.033.830	1.421.747.531	-	3.442.921.589	788.276.289	75.921.864.862
535	Kab. Pegunungan Arfak	73.523.511.680	2.801.941.224	65.503.345.230	1.415.128.831	-	3.088.816.458	716.479.939	73.523.511.680
536	Kab. Serang Selatan	77.420.096.540	3.158.885.624	67.110.033.830	1.419.388.583	-	4.406.608.834	788.276.289	76.883.193.140
537	Kab. Raja Ampat	53.491.652.311	2.519.227.324	31.420.577.158	15.481.198.122	-	3.282.373.418	788.276.289	53.491.652.311
538	Kab. Teluk Bintuni	394.318.836.030	8.281.723.400	368.904.287.091	1.422.151.685	-	13.687.068.965	788.276.289	393.083.507.430
539	Kab. Teluk Wondama	82.124.571.468	3.158.885.624	67.110.033.830	1.612.161.832	-	8.305.336.293	788.276.289	80.974.693.968
540	Kab. Tambora	78.500.389.575	3.158.885.624	67.110.033.830	1.421.747.531	-	3.589.853.001	788.276.289	78.088.586.275
541	Kab. Maybrat	75.858.108.786	3.158.885.624	67.110.033.830	1.570.224.320	-	2.777.197.553	788.276.289	75.404.617.616
542	Kab. Kaimana	84.546.005.391	3.158.885.624	67.110.033.830	1.519.533.866	-	11.989.275.782	788.276.289	84.546.005.391
Jumlah		46.725.647.541.156	10.634.450.778.887	10.637.837.161.265	22.795.930.108.187	1.333.181.001.349	1.298.813.700.378	408.290.981.679	46.488.603.739.756



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 618 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Aceh	5.743.164.284	5.299.261.920
2	Kab. Aceh Barat	286.347.773	264.150.849
3	Kab. Aceh Besar	565.174.015	522.346.933
4	Kab. Aceh Selatan	284.267.330	262.070.406
5	Kab. Aceh Singkil	278.026.000	255.829.076
6	Kab. Aceh Tengah	496.438.044	458.109.867
7	Kab. Aceh Tenggara	278.026.000	255.829.076
8	Kab. Aceh Timur	344.394.841	317.755.397
9	Kab. Aceh Utara	373.488.907	344.382.262
10	Kab. Bireuen	342.555.512	315.380.987
11	Kab. Pidie	621.301.159	573.100.841
12	Kab. Simeulue	278.026.000	255.829.076
13	Kota Banda Aceh	284.267.330	262.070.406
14	Kota Sabang	284.267.330	262.070.406
15	Kota Langsa	286.347.773	264.150.849
16	Kota Lhokseumawe	284.267.330	262.070.406
17	Kab. Nagan Raya	282.186.886	259.989.962
18	Kab. Aceh Jaya	286.347.773	264.150.849
19	Kab. Pidie Jaya	742.307.248	684.379.594
20	Kab. Aceh Barat Daya	282.186.886	259.989.962
21	Kab. Gayo Lues	4.715.785.244	4.350.611.592
22	Kab. Aceh Tamiang	286.347.773	264.150.849
23	Kab. Bener Meriah	1.181.526.913	1.091.837.228
24	Kota Subulussalam	286.347.773	264.150.849
25	Provinsi Sumatera Utara	4.949.271.897	4.570.414.178
26	Kab. Asahan	156.787.907	144.948.755
27	Kab. Dairi	413.556.731	383.745.006
28	Kab. Deli Serdang	538.966.035	502.104.266
29	Kab. Karo	535.925.761	494.143.400
30	Kab. Labuhanbatu	150.415.977	108.214.656
31	Kab. Langkat	156.787.907	144.948.755
32	Kab. Mandailing Natal	160.512.509	148.593.173



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 619 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
33	Kab. Nias	154.663.930	142.824.778
34	Kab. Simalungun	579.785.907	534.175.761
35	Kab. Tapanuli Selatan	154.663.930	142.744.721
36	Kab. Tapanuli Tengah	156.787.907	144.948.755
37	Kab. Tapanuli Utara	1.023.000.614	942.117.753
38	Kab. Toba Samosir	154.663.930	142.824.778
39	Kota Binjai	152.539.954	140.700.802
40	Kota Medan	310.550.388	286.431.409
41	Kota Pematang Siantar	3.773.638.975	3.477.953.007
42	Kota Sibolga	156.787.907	144.948.755
43	Kota Tanjung Balai	156.787.907	144.948.755
44	Kab. Batu Bara	156.787.907	144.948.755
45	Kab. Labuhanbatu Utara	154.663.930	142.744.721
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	154.663.930	142.824.778
47	Kab. Padang Lawas Utara	154.663.930	142.824.778
48	Kab. Padang Lawas	209.996.907	193.909.595
49	Kab. Nias Utara	154.663.930	142.824.778
50	Kab. Nias Barat	150.415.977	138.576.825
51	Kota Tebing Tinggi	156.787.907	144.948.755
52	Kota Padang Sidempuan	154.663.930	142.824.778
53	Kab. Pakpak Bharat	165.744.520	153.402.863
54	Kab. Nias Selatan	156.787.907	144.948.755
55	Kab. Humbang Hasundutan	377.387.236	348.790.244
56	Kab. Serdang Bedagai	156.787.907	144.948.755
57	Kab. Samosir	154.663.930	142.824.778
58	Kota Gunungsitoli	154.663.930	142.824.778
59	Provinsi Sumatera Barat	1.549.088.581	1.434.980.580
60	Kab. Limapuluh Kota	973.732.724	902.769.540
61	Kab. Agam	464.493.052	429.579.136
62	Kab. Kepulauan Mentawai	86.060.444	79.763.566
63	Kab. Padang Pariaman	86.060.444	79.763.566
64	Kab. Pasaman	96.516.042	90.219.164



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 620 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
65	Kab. Pesisir Selatan	84.262.833	77.923.453
66	Kab. Sijunjung	86.060.444	79.763.566
67	Kab. Solok	261.260.466	241.677.059
68	Kab. Tanah Datar	435.454.682	402.986.048
69	Kota Bukit Tinggi	86.060.444	79.721.064
70	Kota Padang Panjang	82.465.222	76.168.344
71	Kota Padang	86.060.444	79.763.566
72	Kota Payakumbuh	98.024.051	91.684.671
73	Kota Sawahlunto	252.323.798	233.594.676
74	Kota Solok	86.060.444	79.763.566
75	Kota Pariaman	86.060.444	79.721.064
76	Kab. Pasaman Barat	80.667.611	74.370.733
77	Kab. Dharmasraya	86.060.444	79.721.064
78	Kab. Solok Selatan	82.465.222	76.168.344
79	Provinsi Riau	2.668.000	1.363.700
80	Kab. Bengkalis	243.000	124.200
81	Kab. Indragiri Hilir	243.000	124.200
82	Kab. Indragiri Hulu	243.000	124.200
83	Kab. Kampar	243.000	124.200
84	Kab. Kuantan Singingi	243.000	124.200
85	Kab. Pelalawan	243.000	124.200
86	Kab. Rokan Hilir	243.000	124.200
87	Kab. Rokan Hulu	243.000	124.200
88	Kab. Siak	243.000	124.200
89	Kota Dumai	243.000	124.200
90	Kota Pekanbaru	3.560.000	1.819.900
91	Kab. Kepulauan Meranti	243.000	124.200
92	Provinsi Kepulauan Riau	184.479.324	174.077.104
93	Kab. Bintan	26.231.624	24.497.766
94	Kab. Natuna	30.747.247	29.013.389
95	Kab. Karimun	30.747.247	29.013.389
96	Kota Batam	245.969.882	232.100.579



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 621 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
97	Kab. Kepulauan Anambas	30.747.247	29.001.716
98	Kota Tanjung Pinang	30.747.247	29.013.389
99	Kab. Lingga	30.747.247	29.013.389
100	Provinsi Jambi	724.104.316	671.054.793
101	Kab. Batang hari	74.398.245	69.093.352
102	Kab. Bungo	70.422.623	65.117.730
103	Kab. Kerinci	702.447.844	653.357.590
104	Kab. Merangin	168.410.426	155.581.573
105	Kab. Muaro Jambi	72.410.434	67.105.541
106	Kab. Sarolangun	72.410.434	67.105.541
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	74.398.245	69.093.352
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	68.434.811	63.129.918
109	Kab. Tebo	74.398.245	69.093.352
110	Kota Jambi	74.398.245	69.093.352
111	Kota Sungai Penuh	257.465.017	238.041.514
112	Provinsi Sumatera Selatan	614.719.990	404.294.362
113	Kab. Lahat	34.576.000	21.424.070
114	Kab. Musi Banyuasin	34.576.000	-
115	Kab. Musi Rawas	34.576.000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	34.576.000	-
117	Kab. Muara Enim	34.576.000	17.675.900
118	Kab. Ogan Komering Ilir	37.139.211	23.987.281
119	Kab. Ogan Komering Ulu	34.576.000	-
120	Kota Palembang	35.857.605	1.281.605
121	Kota Pagar Alam	34.576.000	-
122	Kota Lubuk Linggau	34.576.000	-
123	Kota Prabumulih	34.576.000	-
124	Kab. Empat Lawang	39.702.422	12.385.422
125	Kab. Banyuasin	37.139.211	23.987.281
126	Kab. Ogan Ilir	38.420.816	25.268.886
127	Kab. OKU Timur	82.551.681	2.829.681
128	Kab. OKU Selatan	795.627.267	532.233.009



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 622 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	34.576.000	-
130	Provinsi Bangka Belitung	71.000	36.100
131	Kab. Bangka	11.000	5.700
132	Kab. Belitung	11.000	5.700
133	Kota Pangkal Pinang	11.000	5.700
134	Kab. Bangka Selatan	11.000	5.700
135	Kab. Bangka Tengah	95.000	48.300
136	Kab. Bangka Barat	11.000	5.700
137	Kab. Belitung Timur	11.000	5.700
138	Provinsi Bengkulu	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	Provinsi Lampung	1.960.076.879	1.812.739.170
150	Kab. Lampung Barat	1.272.866.407	1.179.368.137
151	Kab. Lampung Selatan	149.047.157	137.846.984
152	Kab. Lampung Tengah	160.000.263	103.399.816
153	Kab. Lampung Utara	160.132.018	148.186.079
154	Kab. Lampung Timur	584.006.396	539.398.469
155	Kab. Tanggamus	324.250.810	299.729.726
156	Kab. Tulang Bawang	130.672.248	120.849.630
157	Kab. Way Kanan	151.442.584	140.027.995
158	Kab. Pesawaran	242.308.577	224.143.790
159	Kab. Pesisir Barat	139.516.248	128.987.619
160	Kab. Pringsewu	245.184.518	227.059.188



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 623 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
161	Kab. Mesuji	148.488.248	137.243.289
162	Kab. Tulang Bawang Barat	136.597.727	126.095.107
163	Kota Bandar Lampung	582.186.248	536.315.969
164	Kota Metro	144.838.736	133.932.192
165	Provinsi DKI Jakarta	146.764.000	75.027.600
166	Provinsi Jawa Barat	121.422.171.238	111.997.250.335
167	Kab. Bandung	14.837.140.008	13.680.941.872
168	Kab. Bekasi	4.579.216.832	4.213.879.259
169	Kab. Bogor	4.680.073.812	4.317.318.588
170	Kab. Ciamis	4.920.029.822	4.538.509.697
171	Kab. Cianjur	5.029.046.477	4.639.211.841
172	Kab. Cirebon	5.442.748.060	5.020.732.456
173	Kab. Garut	29.563.161.426	27.269.641.492
174	Kab. Indramayu	4.677.800.591	4.315.288.161
175	Kab. Karawang	97.341.022.333	89.731.010.577
176	Kab. Kuningan	6.438.705.719	5.939.315.444
177	Kab. Majalengka	11.167.252.711	10.294.811.015
178	Kab. Pangandaran	4.845.706.089	4.470.272.654
179	Kab. Purwakarta	4.646.370.166	4.283.873.172
180	Kab. Subang	4.803.396.906	4.431.052.934
181	Kab. Sukabumi	4.677.519.065	4.315.022.071
182	Kab. Sumedang	22.843.047.020	21.116.757.249
183	Kab. Tasikmalaya	4.844.396.994	4.466.233.064
184	Kab. Bandung Barat	5.480.455.285	5.055.350.133
185	Kota Bandung	4.741.299.098	4.370.785.240
186	Kota Bekasi	4.642.636.855	4.279.999.708
187	Kota Bogor	4.685.299.978	4.322.022.287
188	Kota Cirebon	4.641.879.903	4.279.382.909
189	Kota Depok	4.540.794.000	4.178.269.094
190	Kota Sukabumi	4.642.546.290	4.280.013.941
191	Kota Cimahi	4.675.333.242	4.310.127.364
192	Kota Tasikmalaya	4.664.583.413	4.300.313.864



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 624 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
193	Kota Banjar	4.677.868.307	4.315.259.749
194	Provinsi Banten	58.052.000	29.677.500
195	Kab. Lebak	7.257.000	3.710.000
196	Kab. Pandeglang	11.969.000	6.118.800
197	Kab. Serang	7.580.000	3.875.000
198	Kab. Tangerang	8.066.000	4.123.400
199	Kota Cilegon	7.257.000	3.710.000
200	Kota Tangerang	20.864.000	10.666.300
201	Kota Serang	7.257.000	3.710.000
202	Kota Tangerang Selatan	65.209.000	33.336.000
203	Provinsi Jawa Tengah	220.298.759.554	203.223.552.895
204	Kab. Banjarnegara	6.893.489.734	6.359.322.016
205	Kab. Banyumas	6.571.561.672	6.062.010.067
206	Kab. Batang	7.632.772.199	7.038.975.956
207	Kab. Blora	7.771.675.646	7.173.507.710
208	Kab. Boyolali	19.072.538.234	17.594.364.508
209	Kab. Brebes	7.133.679.194	6.580.109.965
210	Kab. Cilacap	6.683.266.705	6.165.164.435
211	Kab. Demak	18.574.141.615	17.122.734.556
212	Kab. Grobogan	10.848.173.919	10.005.929.011
213	Kab. Jepara	7.839.329.953	7.229.434.598
214	Kab. Karanganyar	13.883.081.034	12.809.872.077
215	Kab. Kebumen	7.290.182.681	6.726.858.288
216	Kab. Kendal	15.955.280.416	14.726.805.697
217	Kab. Klaten	15.060.063.194	13.895.448.837
218	Kab. Kudus	155.302.754.474	143.277.291.868
219	Kab. Magelang	12.503.038.414	11.543.346.311
220	Kab. Pati	9.501.429.810	8.758.920.714
221	Kab. Pekalongan	6.559.538.528	6.051.083.833
222	Kab. Pemalang	7.630.930.862	7.039.336.261
223	Kab. Purbalingga	7.183.102.238	6.626.142.304
224	Kab. Purworejo	7.972.743.877	7.354.255.989



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 625 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
225	Kab. Rembang	29.927.595.266	27.585.260.014
226	Kab. Semarang	9.224.224.375	8.509.764.219
227	Kab. Sragen	7.011.925.183	6.469.552.827
228	Kab. Sukoharjo	7.027.094.572	6.483.793.965
229	Kab. Tegal	7.485.479.790	6.904.547.417
230	Kab. Temanggung	31.104.159.154	28.698.506.772
231	Kab. Wonogiri	8.684.757.402	8.008.887.798
232	Kab. Wonosobo	12.894.088.165	11.897.337.723
233	Kota Magelang	6.556.824.036	6.048.660.601
234	Kota Pekalongan	7.103.935.039	6.554.360.138
235	Kota Salatiga	6.699.456.036	6.179.676.155
236	Kota Semarang	8.907.105.479	8.215.382.603
237	Kota Surakarta	7.061.651.328	6.514.487.496
238	Kota Tegal	6.479.374.518	5.977.162.694
239	Provinsi DI Yogyakarta	3.889.725.912	3.591.562.731
240	Kab. Bantul	3.954.819.963	3.651.759.746
241	Kab. Gunung Kidul	1.474.105.275	1.360.418.664
242	Kab. Kulon Progo	972.430.744	897.890.097
243	Kab. Sleman	1.690.510.753	1.560.660.663
244	Kota Yogyakarta	984.156.382	908.708.756
245	Provinsi Jawa Timur	540.994.216.135	498.948.284.475
246	Kab. Bangkalan	17.581.348.189	16.211.009.227
247	Kab. Banyuwangi	18.864.654.005	17.397.287.565
248	Kab. Blitar	19.619.388.654	18.092.898.308
249	Kab. Bojonegoro	50.187.665.799	46.268.746.079
250	Kab. Bondowoso	33.937.954.349	31.292.981.201
251	Kab. Gresik	17.347.492.004	15.995.997.535
252	Kab. Jember	52.154.502.171	48.129.717.657
253	Kab. Jombang	42.244.088.524	38.950.616.613
254	Kab. Kediri	38.835.182.131	35.822.999.936
255	Kab. Lamongan	39.513.835.418	36.428.488.903
256	Kab. Lumajang	23.511.443.753	21.676.888.481



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 626 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
257	Kab. Madiun	19.562.772.328	18.036.110.153
258	Kab. Magetan	17.389.420.747	16.036.427.475
259	Kab. Malang	77.421.149.217	71.426.026.930
260	Kab. Mojokerto	18.997.263.463	17.515.761.792
261	Kab. Nganjuk	20.127.368.035	18.559.757.187
262	Kab. Ngawi	21.568.405.754	19.894.538.030
263	Kab. Pacitan	17.706.436.997	16.326.714.866
264	Kab. Pamekasan	55.025.316.778	50.746.349.661
265	Kab. Pasuruan	187.850.472.480	173.291.263.548
266	Kab. Ponorogo	19.797.915.392	18.254.278.591
267	Kab. Probolinggo	61.705.035.722	56.907.065.784
268	Kab. Sampang	25.216.772.991	23.248.533.628
269	Kab. Sidoarjo	17.918.082.672	16.522.040.119
270	Kab. Situbondo	29.724.232.153	27.420.468.549
271	Kab. Sumenep	40.095.631.675	36.978.488.028
272	Kab. Trenggalek	17.368.339.429	16.014.722.995
273	Kab. Tuban	23.995.701.638	22.129.593.085
274	Kab. Tulungagung	23.007.845.206	21.215.738.636
275	Kota Blitar	17.791.450.804	16.405.581.168
276	Kota Kediri	61.073.488.095	56.344.167.289
277	Kota Madiun	16.760.502.013	15.455.519.425
278	Kota Malang	30.529.704.385	28.157.136.356
279	Kota Mojokerto	17.770.386.371	16.385.835.885
280	Kota Pasuruan	16.329.600.876	15.058.856.093
281	Kota Probolinggo	16.298.512.850	15.030.405.648
282	Kota Surabaya	21.544.119.769	19.877.395.806
283	Kota Batu	15.946.364.563	14.706.263.671
284	Provinsi Kalimantan Barat	70.503.501	67.679.796
285	Kab. Bengkayang	52.386.810	2.702.810
286	Kab. Landak	5.228.810	3.994.310
287	Kab. Kapuas Hulu	5.228.810	3.460.610
288	Kab. Ketapang	49.374.694	49.173.091



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 627 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
289	Kab. Mempawah	5.228.810	4.268.012
290	Kab. Sambas	5.228.810	4.268.012
291	Kab. Sanggau	5.228.810	3.210.210
292	Kab. Sintang	5.228.810	4.268.012
293	Kota Pontianak	5.228.810	3.994.310
294	Kota Singkawang	5.228.810	5.017.480
295	Kab. Kayong Utara	5.228.810	3.994.310
296	Kab. Kubu Raya	5.228.810	4.258.285
297	Kab. Sekadau	5.228.810	3.752.154
298	Kab. Melawi	5.228.810	5.017.480
299	Provinsi Kalimantan Tengah	63.683.401	63.683.401
300	Kab. Barito Selatan	5.789.429	5.789.429
301	Kab. Barito Utara	-	-
302	Kab. Kapuas	2.894.714	2.894.714
303	Kab. Kotawaringin Barat	23.307.051	23.307.051
304	Kab. Kotawaringin Timur	5.976.154	5.976.154
305	Kota Palangkaraya	5.789.429	5.789.429
306	Kab. Barito Timur	-	-
307	Kab. Murung Raya	5.789.429	5.789.429
308	Kab. Pulang Pisau	27.814.077	27.814.077
309	Kab. Gunung Mas	5.789.429	5.789.429
310	Kab. Lamandau	-	-
311	Kab. Sukamara	5.789.429	5.789.429
312	Kab. Katingan	1.447.357	1.447.357
313	Kab. Seruyan	-	-
314	Provinsi Kalimantan Selatan	288.000	147.100
315	Kab. Banjar	55.000	27.900
316	Kab. Barito Kuala	23.000	11.700
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	23.000	11.700
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	23.000	11.700
319	Kab. Hulu Sungai Utara	23.000	11.700
320	Kab. Kotabaru	23.000	11.700



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 628 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
321	Kab. Tabalong	23.000	11.700
322	Kab. Tanah Laut	23.000	11.700
323	Kab. Tapin	23.000	11.700
324	Kota Banjarbaru	184.000	94.100
325	Kota Banjarmasin	216.000	110.500
326	Kab. Balangan	23.000	11.700
327	Kab. Tanah Bumbu	23.000	11.700
328	Provinsi Kalimantan Timur	1.399.000	715.300
329	Kab. Berau	139.000	71.200
330	Kab. Kutai Kartanegara	139.000	71.200
331	Kab. Kutai Barat	139.000	71.200
332	Kab. Kutai Timur	139.000	71.200
333	Kab. Mahakam Ulu	139.000	71.200
334	Kab. Paser	139.000	71.200
335	Kota Balikpapan	544.000	278.000
336	Kota Bontang	139.000	71.200
337	Kota Samarinda	1.595.000	815.600
338	Kab. Penajam Paser Utara	139.000	71.200
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 629 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	Provinsi Gorontalo	359.000	330.411
362	Kab. Boalemo	72.000	21.600
363	Kab. Gorontalo	379.000	348.804
364	Kota Gorontalo	170.000	87.100
365	Kab. Pohuwato	72.000	-
366	Kab. Gorontalo Utara	72.000	44.310
367	Kab. Bone Bolango	72.000	14.400
368	Provinsi Sulawesi Tengah	329.704.591	308.925.398
369	Kab. Banggai	225.063.269	208.505.804
370	Kab. Banggai Laut	30.603.569	21.603.899
371	Kab. Banggai Kepulauan	30.603.569	28.701.899
372	Kab. Buol	30.603.569	28.714.713
373	Kab. Toli-Toli	28.867.676	19.868.006
374	Kab. Donggala	30.603.569	21.603.899
375	Kab. Morowali	28.867.676	19.868.006
376	Kab. Morowali Utara	30.603.569	21.603.899
377	Kab. Poso	28.867.676	19.868.006
378	Kota Palu	79.208.485	77.306.815
379	Kab. Parigi Moutong	152.636.954	141.377.912
380	Kab. Sigi	30.603.569	28.701.899
381	Kab. Tojo Una-Una	28.867.676	26.978.820
382	Provinsi Sulawesi Selatan	4.451.792.510	4.109.142.102
383	Kab. Bantaeng	302.054.970	278.707.215
384	Kab. Barru	216.780.773	200.079.433



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 630 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
385	Kab. Bone	812.039.367	749.278.368
386	Kab. Bulukumba	296.799.647	274.186.450
387	Kab. Enrekang	245.428.830	226.389.543
388	Kab. Gowa	193.555.830	178.658.130
389	Kab. Jeneponto	206.582.295	190.682.502
390	Kab. Luwu	213.898.389	197.430.286
391	Kab. Luwu Utara	193.555.830	178.658.130
392	Kab. Maros	196.066.830	180.968.500
393	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	193.555.830	178.658.130
394	Kab. Pinrang	193.555.830	178.658.130
395	Kab. Kepulauan Selayar	193.555.830	178.658.130
396	Kab. Sidenreng Rappang	193.555.830	178.658.130
397	Kab. Sinjai	1.389.790.052	1.283.308.440
398	Kab. Soppeng	3.778.435.182	3.487.433.820
399	Kab. Takalar	193.555.830	178.658.130
400	Kab. Tana Toraja	193.555.830	178.658.130
401	Kab. Wajo	213.413.185	196.979.169
402	Kota Pare-pare	193.555.830	178.658.130
403	Kab. Toraja Utara	193.555.830	178.658.130
404	Kota Makassar	193.555.830	178.658.130
405	Kota Palopo	193.555.830	178.658.130
406	Kab. Luwu Timur	193.555.830	178.658.130
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Pasangkayu	-	-
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.259.000	643.400
415	Kab. Buton	75.000	38.100
416	Kab. Konawe	75.000	38.100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 631 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
417	Kab. Konawe Kepulauan	75.000	38.100
418	Kab. Kolaka	75.000	38.100
419	Kab. Kolaka Timur	75.000	38.100
420	Kab. Muna	75.000	38.100
421	Kota Kendari	1.683.000	860.400
422	Kota Bau-bau	75.000	38.100
423	Kab. Konawe Selatan	146.000	74.900
424	Kab. Bombana	75.000	38.100
425	Kab. Konawe Utara	75.000	38.100
426	Kab. Buton Utara	75.000	38.100
427	Kab. Wakatobi	75.000	38.100
428	Kab. Kolaka Utara	75.000	38.100
429	Kab. Muna Barat	75.000	38.100
430	Kab. Buton Tengah	75.000	38.100
431	Kab. Buton Selatan	75.000	38.100
432	Provinsi Bali	2.746.029.642	2.535.755.848
433	Kab. Badung	747.419.588	688.587.830
434	Kab. Bangli	396.096.597	365.744.770
435	Kab. Buleleng	1.289.011.788	1.194.602.437
436	Kab. Gianyar	673.890.832	623.969.639
437	Kab. Jembrana	368.638.282	340.468.855
438	Kab. Karangasem	397.261.173	367.059.649
439	Kab. Klungkung	343.253.451	316.969.243
440	Kab. Tabanan	541.423.451	499.317.943
441	Kota Denpasar	1.646.898.451	1.516.534.607
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	105.236.594.109	97.023.352.402
443	Kab. Bima	12.409.810.767	11.440.085.308
444	Kab. Dompu	6.038.042.271	5.566.309.191
445	Kab. Lombok Barat	18.750.465.509	17.287.106.296
446	Kab. Lombok Tengah	61.092.543.926	56.320.147.364
447	Kab. Lombok Timur	65.305.377.065	60.226.343.839
448	Kab. Sumbawa	11.225.757.496	10.350.380.023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 632 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
449	Kota Mataram	53.754.459.134	49.541.649.218
450	Kab. Lombok Utara	10.903.205.222	10.054.052.623
451	Kota Bima	2.550.451.978	2.351.279.902
452	Kab. Sumbawa Barat	3.521.938.929	3.245.444.961
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.348.520.966	2.168.796.499
454	Kab. Alor	183.415.000	93.531.500
455	Kab. Belu	157.276.000	80.202.000
456	Kab. Ende	137.252.000	125.642.871
457	Kab. Flores Timur	713.999.580	446.325.365
458	Kab. Kupang	157.537.659	145.268.955
459	Kab. Lembata	128.597.000	26.998.200
460	Kab. Malaka	182.454.000	-
461	Kab. Manggarai	762.182.000	-
462	Kab. Ngada	128.332.354	66.520.354
463	Kab. Sikka	429.328.000	-
464	Kab. Sumba Barat	119.440.415	7.481.415
465	Kab. Sumba Timur	181.576.612	94.277.812
466	Kab. Timor Tengah Selatan	135.522.000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	106.477.000	-
468	Kota Kupang	106.477.000	-
469	Kab. Rote Ndao	128.501.000	118.241.724
470	Kab. Nagekeo	446.072.567	410.690.994
471	Kab. Sumba Tengah	106.477.000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	451.217.700	114.910.700
473	Kab. Manggarai Timur	188.760.459	174.806.531
474	Kab. Sabu Raijua	124.750.000	-
475	Kab. Manggarai Barat	219.247.139	202.016.312
476	Provinsi Maluku	-	-
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 633 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-
487	Kota Tual	-	-
488	Provinsi Maluku Utara	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	Provinsi Papua	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 634 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	Provinsi Papua Barat	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
JUMLAH		3.391.311.758.299	3.124.018.679.699



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 635 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Aceh	1.961.334.010.000	1.956.492.796.000	1.866.371.343.840	1.765.347.493.622
2	Kab. Aceh Barat	556.256.983.000	553.850.567.000	156.733.772.460	154.158.397.706
3	Kab. Aceh Besar	763.979.511.000	759.179.351.000	226.939.170.912	223.419.898.306
4	Kab. Aceh Selatan	607.341.339.000	603.242.255.000	203.739.322.000	202.026.258.533
5	Kab. Aceh Singkil	411.019.842.000	409.538.540.000	131.601.009.000	128.581.026.386
6	Kab. Aceh Tengah	577.052.678.000	572.047.248.000	175.803.454.808	170.850.172.667
7	Kab. Aceh Tenggara	550.538.893.000	546.648.237.000	191.811.551.000	189.373.859.763
8	Kab. Aceh Timur	774.098.033.000	769.038.917.000	190.816.695.000	189.394.300.895
9	Kab. Aceh Utara	802.933.982.000	897.980.136.000	383.550.515.000	378.588.927.584
10	Kab. Bireuen	819.566.518.000	815.284.270.000	224.826.089.000	221.687.846.266
11	Kab. Pidie	842.069.723.000	836.281.109.000	239.974.342.998	236.967.047.815
12	Kab. Simeulue	423.680.373.000	422.324.539.000	77.023.987.000	75.660.193.129
13	Kota Banda Aceh	551.564.266.000	547.629.398.000	128.372.577.171	126.767.937.685
14	Kota Sabang	339.726.509.000	338.311.725.000	79.076.522.000	72.154.778.566
15	Kota Langsa	416.834.350.000	414.459.534.000	96.841.881.000	94.038.676.777
16	Kota Lhokseumawe	428.195.816.000	425.306.246.000	84.462.179.000	83.901.224.637
17	Kab. Nagan Raya	487.688.377.000	485.041.973.000	139.870.935.000	138.348.797.994
18	Kab. Aceh Jaya	389.247.229.000	387.557.698.000	88.172.744.000	87.019.047.742
19	Kab. Pidie Jaya	413.543.469.000	410.145.461.000	124.830.555.000	123.021.751.871
20	Kab. Aceh Barat Daya	418.989.448.000	415.850.396.000	111.738.369.000	111.231.042.072
21	Kab. Gayo Lues	425.668.061.000	423.662.731.000	102.562.079.000	100.377.282.837
22	Kab. Aceh Tamiang	497.724.291.000	493.782.581.000	122.070.139.000	121.063.114.154
23	Kab. Bener Meriah	427.246.462.000	424.584.268.000	132.503.277.000	131.457.952.854
24	Kota Subulussalam	319.242.599.000	318.039.401.000	82.125.004.000	61.266.891.422
25	Provinsi Sumatera Utara	2.483.124.579.000	2.474.485.343.000	4.534.964.288.000	4.404.905.425.375
26	Kab. Asahan	837.408.029.000	830.566.749.000	207.218.869.000	203.640.416.243
27	Kab. Deli	569.042.190.000	565.078.900.000	147.498.452.000	141.672.241.007
28	Kab. Deli Serdang	1.385.860.252.000	1.376.847.320.000	406.157.260.000	401.788.428.950
29	Kab. Karo	694.659.836.000	687.569.659.000	162.826.610.000	156.281.446.842
30	Kab. LabuhanBatu	652.519.523.000	649.797.327.000	142.944.468.000	141.885.645.054
31	Kab. Langkat	1.106.713.503.000	1.089.658.531.000	321.335.402.000	319.827.325.100
32	Kab. Mandailing Natal	754.946.034.000	751.402.758.000	222.743.783.041	214.805.539.148
33	Kab. Nias	419.794.128.000	417.880.380.000	121.541.719.000	120.003.693.317
34	Kab. Simalungun	1.146.405.476.000	1.136.239.874.000	343.415.355.454	342.322.328.863
35	Kab. Tapanuli Selatan	609.162.427.000	605.063.671.000	158.195.115.000	155.934.176.856
36	Kab. Tapanuli Tengah	614.127.615.000	609.816.945.000	220.017.752.295	218.573.854.896
37	Kab. Tapanuli Utara	609.962.657.000	606.062.527.000	182.906.267.410	179.466.901.072
38	Kab. Tobo Samosir	522.549.596.000	519.088.428.000	127.453.911.000	123.304.514.898
39	Kota Binjai	544.802.063.000	535.778.557.000	109.684.604.000	109.312.150.396
40	Kota Medan	1.560.956.851.000	1.493.919.764.000	348.592.969.355	332.193.857.467
41	Kota Pematang Siantar	569.499.118.000	565.804.258.000	105.838.614.286	104.063.218.352
42	Kota Sibolga	393.325.325.000	381.678.849.000	58.132.817.000	56.327.365.218
43	Kota Tanjung Balai	412.466.823.000	410.581.497.000	69.112.855.000	65.181.784.950
44	Kab. Batu Bara	568.210.836.000	565.927.402.000	137.225.182.984	136.243.025.283
45	Kab. LabuhanBatu Utara	562.859.404.000	560.374.058.000	136.599.827.163	135.821.695.341
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	481.566.736.000	479.785.624.000	128.240.084.000	126.972.024.433
47	Kab. Padang Lawas Utara	523.820.730.000	521.528.022.000	157.358.247.567	149.964.719.310
48	Kab. Padang Lawas	498.935.494.000	498.576.468.000	153.920.789.000	152.417.989.816
49	Kab. Nias Utara	393.721.097.000	392.014.347.000	161.888.730.000	155.695.405.149



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 636 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
50	Kab. Nias Barat	333.762.307.000	332.435.647.000	135.068.035.000	132.881.922.300
51	Kota Tobing Tinggi	395.688.258.000	393.452.394.000	102.798.397.000	98.701.020.680
52	Kota Padang Sidempuan	478.792.324.000	478.335.400.000	115.005.289.000	111.240.529.756
53	Kab. Pakpak Bharat	324.896.653.000	323.371.338.000	67.053.906.000	59.170.322.588
54	Kab. Nias Selatan	628.496.288.000	626.743.578.000	336.151.738.000	330.253.546.843
55	Kab. Humbang Hasundutan	491.293.205.000	489.171.029.000	151.639.779.000	148.542.851.038
56	Kab. Serdang Bedagai	734.027.202.000	727.436.456.000	263.663.135.240	260.890.435.464
57	Kab. Samosir	422.251.066.000	418.883.094.000	117.485.547.000	113.710.367.331
58	Kota Gunungsitok	408.549.541.000	408.222.095.000	109.960.809.999	108.068.804.568
59	Provinsi Sumatera Barat	1.901.922.227.000	1.891.323.979.000	2.085.030.546.809	1.966.673.956.310
60	Kab. Lima Puluh Kota	702.365.062.000	698.866.984.000	255.404.414.100	243.349.664.710
61	Kab. Agam	762.542.948.000	756.378.532.000	279.549.333.391	273.763.270.526
62	Kab. Kepulauan Mentawai	557.853.377.000	556.457.541.000	94.172.610.000	88.727.843.885
63	Kab. Padang Pariaman	722.635.928.000	716.079.920.000	270.738.103.000	255.389.154.257
64	Kab. Pasaman	561.308.754.000	557.421.256.000	171.338.289.000	164.280.193.869
65	Kab. Pesisir Selatan	792.358.743.000	784.053.203.000	316.868.205.638	310.419.508.485
66	Kab. Sijunjung	513.243.250.000	509.071.532.000	167.097.120.000	145.195.451.116
67	Kab. Solok	568.243.258.000	661.472.507.000	202.576.204.837	195.128.204.145
68	Kab. Tanah Datar	651.739.785.000	646.914.341.000	232.449.015.000	222.232.695.277
69	Kota Bukit Tinggi	430.965.335.000	429.026.323.000	65.852.332.000	61.811.192.521
70	Kota Padang Panjang	354.367.009.000	352.753.271.000	55.791.027.768	51.344.545.210
71	Kota Padang	1.069.755.501.000	1.061.387.887.000	285.463.733.977	283.328.985.489
72	Kota Payakumbuh	423.286.932.000	421.054.226.000	94.506.039.000	88.625.959.927
73	Kota Sawahlunto	349.197.280.000	347.498.276.000	88.702.909.750	84.175.651.384
74	Kota Sokok	377.778.817.000	376.130.341.000	54.558.205.000	53.123.129.963
75	Kota Pariaman	391.518.784.000	389.252.496.000	105.553.942.280	87.166.530.837
76	Kab. Pasaman Barat	606.699.346.000	598.772.766.000	228.953.470.000	208.636.347.115
77	Kab. Dharmasraya	482.461.174.000	478.355.774.000	243.557.356.803	239.862.423.955
78	Kab. Solok Selatan	445.646.713.000	441.989.749.000	194.869.582.297	187.662.507.978
79	Provinsi Riau	1.438.451.620.000	1.432.349.278.000	2.029.374.641.000	2.002.731.291.347
80	Kab. Bengkalis	344.485.485.000	338.731.609.000	213.428.238.851	210.031.551.844
81	Kab. Indragiri Hilir	897.840.706.000	884.826.668.000	275.473.080.000	266.627.100.585
82	Kab. Indragiri Hulu	640.211.130.000	635.230.964.000	192.739.307.266	170.808.203.304
83	Kab. Kampar	775.090.963.000	765.107.999.000	370.189.758.000	362.509.735.421
84	Kab. Kuantan Singingi	609.487.997.000	603.990.247.000	211.635.857.353	189.822.028.586
85	Kab. Pelalawan	602.962.236.000	601.518.018.390	163.828.910.000	144.123.971.777
86	Kab. Rokan Hilir	491.772.859.000	488.590.681.000	294.009.208.000	283.501.675.103
87	Kab. Rokan Hulu	651.346.142.000	647.253.374.000	220.568.448.782	217.350.875.282
88	Kab. Siak	365.851.291.000	363.379.380.140	254.175.609.000	246.200.293.171
89	Kota Dumai	437.822.618.000	424.090.440.000	211.513.844.878	203.845.255.402
90	Kota Pekanbaru	818.435.221.000	810.814.967.000	201.655.223.624	196.288.582.686
91	Kab. Kepulauan Meranti	411.574.919.000	408.248.293.000	228.460.356.000	218.510.841.873
92	Provinsi Kepulauan Riau	1.101.552.533.000	1.098.291.405.000	736.075.458.008	723.348.846.915
93	Kab. Bintan	487.690.253.000	486.117.589.000	147.906.848.000	142.280.703.139
94	Kab. Natuna	397.785.704.000	396.383.552.000	92.365.690.000	86.178.582.546
95	Kab. Karimun	422.360.762.000	415.443.182.000	146.741.883.000	143.649.875.034
96	Kota Batam	633.957.077.000	629.854.829.000	266.854.501.287	255.996.277.761
97	Kab. Kepulauan Anambas	378.722.003.000	375.518.805.000	74.817.449.000	74.058.223.149
98	Kota Tanjung Pinang	459.035.650.000	457.305.066.000	92.620.957.000	83.017.065.330



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 637 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
99	Kab. Lingga	459.083.527.000	457.814.011.000	109.362.522.000	108.796.589.398
100	Provinsi Jambi	1.291.923.707.000	1.288.418.327.000	1.145.504.847.019	1.116.935.079.452
101	Kab. Batanghari	571.897.802.000	569.633.516.000	190.126.924.353	180.393.385.685
102	Kab. Bungo	602.613.586.000	600.093.502.000	190.401.078.811	183.262.303.602
103	Kab. Kerinci	570.389.066.000	567.859.510.000	152.782.064.000	150.793.264.999
104	Kab. Merangin	669.437.069.000	666.860.141.000	230.423.826.000	228.175.066.269
105	Kab. Muaro Jambi	631.350.550.000	629.162.056.000	176.587.968.900	173.488.609.584
106	Kab. Sarolangun	539.027.521.000	536.952.715.000	173.325.750.000	169.603.177.135
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	490.342.499.000	487.550.827.000	179.827.134.389	176.246.637.961
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	523.900.364.000	521.920.298.000	174.573.978.000	170.201.426.594
109	Kab. Tebo	536.524.337.000	534.449.531.000	146.217.777.080	143.800.805.548
110	Kota Jambi	690.724.772.000	687.484.664.000	254.829.051.182	250.111.507.881
111	Kota Sungai Penuh	414.326.985.000	412.574.295.000	99.539.447.000	97.765.658.013
112	Provinsi Sumatera Selatan	1.575.373.367.000	1.568.602.615.000	2.381.936.073.000	2.336.160.972.552
113	Kab. Lahat	655.196.297.000	650.245.697.000	206.220.768.000	205.177.625.209
114	Kab. Musi Banyuasin	381.276.692.000	378.024.938.000	335.379.294.000	332.184.817.761
115	Kab. Musi Rawas	600.180.128.000	594.887.320.000	255.609.338.000	252.808.445.176
116	Kab. Musi Rawas Utara	366.081.248.000	365.295.893.000	107.733.534.000	108.468.475.230
117	Kab. Muara Enim	820.313.421.000	813.136.827.000	246.557.620.000	235.012.566.306
118	Kab. Ogan Komering Ilir	978.571.504.000	969.636.496.000	260.237.051.000	259.690.573.285
119	Kab. Ogan Komering Ulu	603.568.602.000	599.614.786.000	171.256.950.000	158.158.689.917
120	Kota Palembang	1.235.336.956.000	1.226.620.875.000	484.136.458.034	458.038.945.229
121	Kota Pagar Alam	374.034.900.000	372.566.430.000	98.397.808.000	95.834.758.657
122	Kota Lubuk Linggau	451.901.335.000	450.072.853.000	116.269.684.000	115.017.174.922
123	Kota Prabumulih	401.337.761.000	398.247.165.000	120.881.738.000	120.020.605.741
124	Kab. Empat Lawang	402.951.186.000	400.547.948.000	137.378.336.000	135.437.736.647
125	Kab. Banyuasin	886.097.109.000	878.495.803.000	343.323.045.228	341.483.438.395
126	Kab. Ogan Ilir	592.817.070.000	588.788.514.000	249.270.919.000	247.002.753.866
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	759.212.795.000	754.627.379.000	245.995.266.635	244.384.774.074
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	590.626.515.000	587.250.613.000	153.309.106.000	152.841.429.990
129	Kab. Penuk Abab Lematang Ilir	297.726.294.000	295.503.062.000	89.910.291.000	88.827.606.866
130	Provinsi Bangka Belitung	943.982.191.000	942.308.451.000	552.393.994.155	543.239.599.450
131	Kab. Bangka	500.682.611.000	498.137.263.000	168.632.274.801	163.262.397.653
132	Kab. Belitung	463.002.382.000	460.955.998.000	126.697.401.594	119.611.180.985
133	Kota Pangkal Pinang	434.574.143.000	432.562.497.000	95.189.762.000	91.530.241.135
134	Kab. Bangka Selatan	442.497.090.000	441.031.778.000	135.381.066.000	133.160.794.214
135	Kab. Bangka Tengah	426.219.372.000	424.586.686.000	157.479.156.000	152.838.041.873
136	Kab. Bangka Barat	427.997.278.000	425.158.892.000	118.333.631.000	112.466.896.467
137	Kab. Belitung Timur	423.426.747.000	421.531.947.000	109.548.495.000	97.386.111.542
138	Provinsi Bengkulu	1.223.341.227.000	1.219.949.535.000	743.632.412.526	731.821.341.084
139	Kab. Bengkulu Selatan	525.650.342.000	519.472.780.000	255.377.229.726	252.469.895.006
140	Kab. Bengkulu Utara	590.458.935.000	588.327.285.000	257.516.202.581	255.568.903.856
141	Kab. Rejang Lebong	566.437.095.000	563.983.329.000	160.633.337.529	157.710.558.215
142	Kota Bengkulu	649.681.045.000	647.053.589.000	141.074.995.000	135.895.693.642
143	Kab. Kaur	415.365.742.000	413.916.220.000	141.926.846.000	140.118.474.480
144	Kab. Seluma	477.383.614.000	475.498.288.000	169.496.264.000	166.092.835.243
145	Kab. Mukomuko	460.324.684.000	457.001.337.000	160.973.102.000	156.145.828.246
146	Kab. Lebong	377.859.122.000	376.400.126.000	141.503.608.862	128.982.298.558
147	Kab. Bengkulu Tengah	409.476.286.000	407.865.706.000	132.872.292.000	130.589.534.940



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 638 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
148	Kab. Kepahang	403.631.660.000	386.946.604.000	126.847.216.648	125.948.121.527
149	Provinsi Lampung	1.739.916.377.000	1.732.551.921.000	2.275.113.853.051	2.232.035.122.921
150	Kab. Lampung Barat	500.613.338.000	487.587.974.000	197.341.734.549	193.523.163.066
151	Kab. Lampung Selatan	969.397.258.000	966.261.362.000	331.083.521.000	323.112.507.172
152	Kab. Lampung Tengah	1.258.529.176.000	1.248.586.762.000	350.849.915.181	347.123.102.374
153	Kab. Lampung Utara	888.494.843.000	880.015.613.000	230.065.585.000	218.626.806.835
154	Kab. Lampung Timur	1.015.031.133.000	1.007.072.973.000	350.849.382.000	320.004.675.425
155	Kab. Tanggamus	725.176.840.000	718.696.624.000	314.354.225.358	311.206.580.730
156	Kab. Tulang Bawang	580.505.819.000	577.189.919.000	191.248.697.263	182.480.900.834
157	Kab. Way Kanan	626.301.547.000	621.848.787.000	245.881.325.000	244.431.794.888
158	Kab. Pesawaran	624.502.440.000	618.834.816.000	221.461.751.000	219.919.178.843
159	Kab. Pesisir Barat	406.509.124.000	404.769.686.000	146.017.162.000	142.967.686.310
160	Kab. Pringsewu	582.828.145.000	578.016.439.000	181.907.006.000	178.534.123.710
161	Kab. Mesuji	410.246.380.000	407.710.506.000	133.894.896.908	131.884.635.306
162	Kab. Tulang Bawang Barat	443.399.456.000	441.732.032.000	166.394.956.000	165.097.476.923
163	Kota Bandar Lampung	1.025.122.725.000	1.019.027.785.000	248.602.962.259	245.542.511.187
164	Kota Metro	437.364.108.000	435.052.452.000	123.688.792.000	117.481.279.591
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-	3.405.403.588.783	3.282.953.513.783
166	Provinsi Jawa Barat	2.994.344.725.000	2.984.612.155.000	11.216.667.175.821	10.855.903.522.028
167	Kab. Bandung	1.991.762.404.000	1.967.815.290.000	707.590.936.250	695.014.262.785
168	Kab. Bekasi	1.109.084.444.000	1.105.286.422.000	344.041.428.483	333.403.018.273
169	Kab. Bogor	1.883.157.955.000	1.848.796.843.000	742.290.363.490	734.880.598.347
170	Kab. Ciamis	1.124.523.808.000	1.112.349.718.000	435.074.830.000	432.038.291.082
171	Kab. Cianjur	1.508.219.679.000	1.472.420.591.000	526.309.000.021	521.888.245.452
172	Kab. Cirebon	1.430.715.056.000	1.417.094.602.000	522.238.467.886	511.304.207.898
173	Kab. Garut	1.697.761.221.000	1.663.193.753.000	686.878.332.851	678.248.383.595
174	Kab. Indramayu	1.307.670.691.000	1.297.006.125.000	429.706.829.000	416.212.603.738
175	Kab. Karawang	1.216.810.516.000	1.211.636.504.021	446.219.648.957	438.252.924.386
176	Kab. Kuningan	1.138.000.689.000	1.122.096.015.000	450.220.704.519	444.588.965.747
177	Kab. Majalengka	1.134.532.450.000	1.127.919.598.000	429.444.106.425	421.170.417.461
178	Kab. Pangandaran	514.231.954.000	508.879.144.000	172.213.815.000	168.647.531.738
179	Kab. Purwakarta	813.567.867.000	810.270.915.000	280.967.468.100	274.892.815.882
180	Kab. Subang	1.203.407.054.000	1.198.944.800.000	437.573.707.320	429.738.868.066
181	Kab. Sukabumi	1.514.827.358.000	1.494.898.286.000	510.068.250.280	507.104.731.289
182	Kab. Sumedang	1.082.326.099.000	1.085.253.951.000	476.185.235.000	468.775.336.332
183	Kab. Tasikmalaya	1.403.102.763.000	1.381.182.559.000	551.660.299.455	541.228.730.987
184	Kab. Bandung Barat	1.026.982.842.000	1.022.493.222.000	414.122.271.267	393.806.085.024
185	Kota Bandung	1.601.834.557.000	1.589.629.887.000	490.964.244.479	475.855.854.061
186	Kota Bekasi	1.163.901.497.000	1.147.628.323.000	328.304.888.000	324.848.231.970
187	Kota Bogor	769.048.963.000	762.556.115.000	204.633.650.265	201.168.777.874
188	Kota Cirebon	548.789.411.000	545.288.189.000	186.730.118.100	183.596.202.150
189	Kota Depok	862.665.355.000	843.978.499.000	227.571.317.000	222.001.836.210
190	Kota Sukabumi	474.164.097.000	471.842.967.000	157.404.253.529	147.675.487.214
191	Kota Cimahi	542.550.698.000	539.717.972.000	168.082.564.797	163.497.095.617
192	Kota Tasikmalaya	759.061.154.000	753.316.752.000	241.729.076.354	239.935.363.984
193	Kota Banjar	353.432.625.000	351.736.779.000	73.293.470.000	70.486.850.531
194	Provinsi Banten	1.048.158.451.000	1.042.988.771.000	2.679.320.942.000	2.631.365.851.785
195	Kab. Lebak	1.025.617.879.000	1.014.388.131.000	434.856.441.000	429.647.807.806
196	Kab. Pandeglang	1.125.384.369.000	1.107.241.659.000	462.681.150.000	457.784.587.395



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 639 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
197	Kab. Serang	1.034.125.411.000	1.030.506.343.000	342.917.871.000	336.365.544.059
198	Kab. Tangerang	1.126.643.872.000	1.107.392.704.000	389.746.894.036	386.616.004.339
199	Kota Cilegon	599.460.814.000	597.547.066.000	126.209.805.000	124.224.695.253
200	Kota Tangerang	846.130.955.000	843.004.535.000	234.458.258.348	234.236.896.423
201	Kota Serang	618.641.127.000	613.720.963.000	157.584.440.000	157.033.149.524
202	Kota Tangerang Selatan	584.580.206.000	558.077.884.000	184.712.592.950	160.079.414.578
203	Provinsi Jawa Tengah	3.460.064.369.000	3.438.709.973.000	7.465.851.587.582	7.333.764.336.013
204	Kab. Banyuwangi	914.958.948.000	900.564.784.000	313.008.478.578	307.582.239.878
205	Kab. Banyuwangi	1.317.798.068.000	1.308.921.916.000	512.650.616.977	504.739.681.915
206	Kab. Batang	753.352.485.000	743.088.164.000	236.039.423.000	232.905.719.145
207	Kab. Blora	883.338.891.000	871.284.279.000	293.839.394.201	286.602.728.815
208	Kab. Boyolali	966.489.944.000	956.428.556.000	366.198.694.088	357.803.707.608
209	Kab. Brebes	1.261.293.035.000	1.241.906.073.000	433.708.064.000	429.882.548.779
210	Kab. Cilacap	1.295.279.562.000	1.281.940.170.000	435.211.448.615	425.331.404.682
211	Kab. Demak	875.987.653.000	860.873.465.000	284.229.427.000	280.687.280.390
212	Kab. Grobogan	1.054.010.287.000	1.038.763.632.000	369.670.765.175	365.411.577.219
213	Kab. Jepara	948.598.557.000	934.338.029.000	309.677.640.000	307.341.820.288
214	Kab. Karanganyar	924.285.617.000	917.524.339.000	300.508.962.455	293.835.826.487
215	Kab. Kebumen	1.206.245.637.000	1.187.504.283.000	406.551.004.615	396.996.788.590
216	Kab. Kendal	921.727.933.000	909.781.219.000	284.863.091.596	281.859.461.657
217	Kab. Klaten	1.175.695.180.000	1.167.212.792.000	324.928.517.679	316.097.410.933
218	Kab. Kudus	764.591.394.000	757.087.370.000	219.087.123.390	217.684.287.267
219	Kab. Magelang	997.304.689.000	987.675.947.000	332.843.046.128	319.601.196.107
220	Kab. Pati	1.131.935.623.000	1.115.340.333.000	359.770.710.000	352.059.738.201
221	Kab. Pekalongan	890.703.494.000	885.145.414.000	298.080.362.000	293.126.208.732
222	Kab. Pemalang	1.130.573.652.000	1.118.791.154.000	335.278.225.635	328.402.381.276
223	Kab. Purbalingga	847.952.218.000	841.051.988.000	285.544.978.094	278.795.718.070
224	Kab. Purworejo	934.828.751.000	930.205.439.000	272.870.114.679	269.928.984.153
225	Kab. Rembang	734.621.624.000	727.781.395.000	237.681.240.751	235.472.474.082
226	Kab. Semarang	917.605.364.000	909.555.622.000	304.463.652.193	294.647.680.712
227	Kab. Sragen	1.006.988.298.000	991.204.614.000	334.899.586.429	331.127.589.977
228	Kab. Sukoharjo	867.256.150.000	859.146.408.000	276.026.462.505	265.709.253.548
229	Kab. Tegal	1.097.564.744.000	1.086.704.382.000	366.286.856.835	358.827.068.463
230	Kab. Temanggung	770.269.689.000	762.027.309.000	245.220.908.668	234.910.025.225
231	Kab. Wonogiri	1.084.170.043.000	1.074.092.865.000	355.768.176.000	352.944.043.603
232	Kab. Wonosobo	810.365.559.000	799.113.605.000	295.691.023.278	288.971.503.007
233	Kota Magelang	418.992.998.000	416.722.396.000	84.018.278.540	82.037.843.646
234	Kota Pekalongan	436.146.579.000	433.354.907.000	114.698.870.909	106.158.516.627
235	Kota Salatiga	427.568.712.000	425.080.208.000	75.209.488.818	72.134.446.789
236	Kota Semarang	1.194.313.031.000	1.183.614.821.000	336.514.432.667	330.808.185.892
237	Kota Surakarta	798.896.485.000	794.665.771.000	194.560.878.403	193.530.837.141
238	Kota Tegal	482.030.024.000	458.758.336.000	141.374.783.763	136.070.680.950
239	Provinsi DI Yogyakarta	1.234.516.326.000	1.227.847.676.000	1.050.551.379.489	1.029.450.030.199
240	Kab. Bantul	931.998.005.000	923.213.607.000	323.438.990.885	315.430.452.101
241	Kab. Gunung Kidul	887.858.891.000	882.566.083.000	334.308.215.000	332.276.514.355
242	Kab. Kulon Progo	683.335.010.000	658.082.730.000	272.720.657.001	268.499.660.301
243	Kab. Sleman	947.130.889.000	938.351.449.000	282.017.325.000	279.453.500.572
244	Kota Yogyakarta	631.639.948.000	627.247.170.000	155.092.678.772	146.530.512.784
245	Provinsi Jawa Timur	3.679.167.411.000	3.662.910.027.000	8.182.500.762.173	7.950.598.326.851



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 640 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
246	Kab. Bangkalan	951.659.130.000	933.519.578.000	277.684.063.245	273.856.815.894
247	Kab. Banyuwangi	1.322.589.373.000	1.303.602.427.000	400.474.639.031	392.068.968.573
248	Kab. Blitar	1.067.772.656.000	1.056.024.896.000	331.030.194.000	327.003.217.465
249	Kab. Bojonegoro	890.015.652.000	875.289.888.000	347.922.353.761	337.984.852.264
250	Kab. Bondowoso	862.433.102.000	851.793.900.000	328.542.761.804	315.715.152.162
251	Kab. Gresik	890.343.102.000	871.987.860.000	294.039.901.896	280.626.383.877
252	Kab. Jember	1.644.233.797.000	1.611.693.896.000	517.533.308.000	456.719.704.525
253	Kab. Jombang	1.028.640.058.000	1.016.614.394.000	372.189.049.000	337.637.078.122
254	Kab. Kediri	1.176.199.423.000	1.166.589.629.000	388.487.314.000	382.419.476.247
255	Kab. Lamongan	1.111.233.893.000	1.098.971.379.000	338.546.501.926	332.447.073.508
256	Kab. Lumajang	920.012.364.000	908.168.708.000	288.793.905.650	279.247.541.526
257	Kab. Madiun	826.600.103.000	819.494.603.000	274.402.187.427	270.406.114.538
258	Kab. Magetan	856.858.766.000	848.821.655.000	283.990.850.000	271.406.356.538
259	Kab. Malang	1.592.832.074.000	1.570.043.946.000	477.209.662.000	470.885.577.224
260	Kab. Mojokerto	924.376.463.000	915.503.303.000	286.747.877.842	272.826.055.600
261	Kab. Nganjuk	1.005.432.269.000	998.778.363.000	359.122.919.536	355.159.215.266
262	Kab. Ngawi	988.487.546.000	980.835.712.000	321.743.302.517	320.698.526.895
263	Kab. Pacitan	748.480.938.000	739.878.366.000	296.168.813.448	286.935.981.805
264	Kab. Pamekasan	809.642.625.000	800.743.391.000	263.030.107.000	257.820.608.821
265	Kab. Pasuruan	1.120.144.784.000	1.103.294.454.000	403.109.618.000	384.580.085.229
266	Kab. Ponorogo	1.001.863.677.000	992.269.673.000	326.823.896.174	319.382.157.367
267	Kab. Probolinggo	945.721.138.000	938.173.518.000	317.749.342.060	311.112.650.112
268	Kab. Sampang	796.463.846.000	784.115.888.000	253.023.921.808	249.579.934.277
269	Kab. Sidoarjo	1.157.958.587.000	1.149.801.473.000	413.556.537.759	397.142.658.188
270	Kab. Situbondo	761.038.751.000	753.652.188.000	281.405.734.428	276.595.731.874
271	Kab. Sumenep	1.106.373.716.000	1.090.889.516.000	304.001.864.000	301.365.896.620
272	Kab. Trenggalek	842.342.631.000	834.599.215.000	305.596.418.272	289.727.864.446
273	Kab. Tuban	982.179.381.000	972.894.861.000	307.197.090.180	304.817.944.782
274	Kab. Tulungagung	1.087.050.427.000	1.079.847.029.000	404.999.623.000	385.688.178.894
275	Kota Blitar	402.974.374.000	400.918.516.000	82.878.896.350	79.076.520.515
276	Kota Kediri	582.747.476.000	579.131.566.000	141.054.374.805	137.935.984.088
277	Kota Madiun	476.135.673.000	473.852.439.000	74.214.694.343	73.285.694.611
278	Kota Malang	810.812.876.000	805.071.632.000	175.482.406.284	164.804.590.549
279	Kota Mojokerto	375.978.526.000	373.898.704.000	90.297.679.156	87.223.828.086
280	Kota Pasuruan	412.694.511.000	403.909.797.000	77.655.439.210	71.639.831.452
281	Kota Probolinggo	440.456.818.000	438.274.640.000	114.162.514.014	83.455.369.867
282	Kota Surabaya	1.208.468.472.000	1.203.461.856.000	496.560.437.022	441.472.361.070
283	Kota Batu	455.694.746.000	453.338.878.000	66.750.459.000	59.432.879.625
280	Provinsi Kalimantan Barat	1.568.574.205.000	1.563.770.887.000	1.801.842.883.718	1.766.052.768.548
281	Kab. Bengkayang	550.462.013.000	547.392.437.000	193.872.827.000	173.963.389.816
282	Kab. Landak	614.784.644.000	611.306.636.000	304.284.260.287	300.871.451.032
283	Kab. Kapuas Hulu	903.455.857.000	900.430.493.000	286.543.141.000	261.301.585.146
284	Kab. Ketapang	1.044.411.014.000	1.040.646.678.000	395.705.422.000	380.331.046.304
285	Kab. Mempawah	542.270.990.000	539.545.636.000	135.067.952.455	134.253.614.635
286	Kab. Sambas	818.348.874.000	813.846.622.000	345.946.013.597	338.179.643.149
287	Kab. Sanggau	750.468.162.000	747.178.578.000	223.240.595.526	221.657.560.856
288	Kab. Sintang	847.220.789.000	843.500.665.000	327.231.573.000	319.749.181.769
289	Kota Pontianak	661.544.958.000	658.270.110.000	187.658.345.362	162.461.857.504
300	Kota Singkawang	467.470.514.000	465.326.232.000	92.980.673.807	91.313.259.787



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 641 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
301	Kab. Kayong Utara	449.210.743.000	447.780.169.000	125.324.369.000	118.799.796.847
302	Kab. Kubu Raya	729.912.591.000	726.710.379.000	222.011.498.000	214.309.680.963
303	Kab. Sekadau	469.758.743.000	467.314.451.000	111.135.230.000	107.593.545.848
304	Kab. Melawi	559.720.948.000	557.377.712.000	145.172.406.000	135.919.757.836
305	Provinsi Kalimantan Tengah	1.442.658.367.000	1.439.305.729.000	1.103.304.925.724	1.078.647.800.511
306	Kab. Barito Selatan	527.224.632.000	524.889.810.000	123.896.032.000	123.095.219.110
307	Kab. Barito Utara	512.512.783.000	510.002.173.000	170.389.741.232	169.218.213.689
308	Kab. Kapuas	795.355.088.000	791.344.428.000	313.243.057.000	310.043.487.471
309	Kab. Kotawaringin Barat	604.341.284.000	602.446.484.000	298.601.738.668	293.407.633.115
310	Kab. Kotawaringin Timur	772.439.994.000	770.071.494.000	189.502.266.743	181.629.778.082
311	Kota Palangkaraya	606.015.978.000	603.866.424.000	145.557.597.000	143.354.168.407
312	Kab. Barito Timur	445.962.789.000	443.711.145.000	121.688.790.000	120.340.229.181
313	Kab. Murung Raya	623.153.023.000	621.569.287.000	132.310.931.000	130.212.328.117
314	Kab. Pulang Pisau	524.333.062.000	521.961.404.000	140.375.015.000	136.495.156.046
315	Kab. Gunung Mas	520.224.021.000	518.013.421.000	151.312.274.000	145.606.550.883
316	Kab. Lamandau	427.114.478.000	425.762.854.000	114.695.814.000	109.885.087.448
317	Kab. Sukamara	389.882.723.000	388.663.735.000	56.795.541.000	56.263.166.689
318	Kab. Katingan	636.084.451.000	634.091.753.000	144.924.680.371	140.400.989.687
319	Kab. Seruyan	567.765.658.000	566.243.502.000	162.351.083.000	159.347.105.742
320	Provinsi Kalimantan Selatan	1.095.796.117.000	1.091.037.011.000	1.110.904.150.184	1.081.851.073.491
321	Kab. Banjar	689.489.862.000	684.702.334.000	251.501.931.000	240.089.283.455
322	Kab. Barito Kuala	536.423.276.000	532.810.524.000	237.694.458.365	236.495.930.430
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	485.605.763.000	482.100.383.000	163.696.315.801	161.910.306.003
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	489.090.030.000	485.837.290.000	173.615.707.000	167.125.890.354
325	Kab. Hulu Sungai Utara	457.931.481.000	454.719.805.000	174.561.479.000	170.313.476.360
326	Kab. Kotabaru	581.870.214.000	580.032.258.000	174.111.179.000	170.710.181.092
327	Kab. Tabalong	461.740.456.000	457.489.788.000	162.362.834.477	156.802.040.347
328	Kab. Tanah Laut	505.805.530.000	502.182.258.000	185.073.141.000	183.222.175.126
329	Kab. Tapin	426.224.950.000	421.844.570.000	146.412.715.000	144.621.778.332
330	Kota Banjarbaru	421.090.093.000	419.144.765.000	139.439.566.820	132.285.871.484
331	Kota Banjarmasin	674.930.481.000	671.766.165.000	163.793.290.000	161.369.314.624
332	Kab. Balangan	354.448.216.000	352.411.306.000	130.714.692.000	126.925.483.455
333	Kab. Tanah Bumbu	438.026.626.000	435.828.558.000	210.476.455.908	208.789.757.537
334	Provinsi Kalimantan Timur	834.938.558.000	831.404.756.000	1.239.941.619.299	1.217.556.243.556
335	Kab. Berau	558.818.045.000	556.588.497.000	145.160.363.000	138.112.664.178
336	Kab. Kutai Kartanegara	452.961.957.000	440.463.493.000	401.092.873.000	384.055.914.728
337	Kab. Kutai Barat	557.072.217.000	555.082.677.000	140.634.786.339	136.020.019.397
338	Kab. Kutai Timur	571.773.275.000	570.247.961.000	249.208.106.569	241.799.913.212
339	Kab. Mahakam Ulu	453.136.962.000	451.971.660.000	62.319.950.000	60.282.914.194
340	Kab. Paser	384.896.323.000	382.202.548.000	175.856.889.000	166.236.896.822
341	Kota Balikpapan	437.726.788.000	429.199.860.000	166.820.316.814	164.394.262.058
342	Kota Bontang	231.143.244.000	229.778.988.000	64.446.921.000	62.310.272.926
343	Kota Samarinda	675.500.904.000	670.356.522.000	261.842.456.000	234.916.972.241
344	Kab. Penajam Paser Utara	277.611.967.000	275.868.751.000	109.738.161.599	106.308.830.211
284	Provinsi Kalimantan Utara	1.083.715.768.000	1.082.389.408.000	380.071.144.821	374.389.806.790
285	Kab. Bulungan	526.600.151.000	525.055.889.000	177.433.962.180	178.100.666.404
286	Kab. Malinau	785.670.183.000	784.353.307.000	146.469.795.614	145.143.087.736
287	Kab. Nunukan	499.443.580.000	497.918.246.000	224.178.199.333	219.912.957.973
288	Kab. Tana Tidung	413.508.614.000	412.379.208.000	89.751.331.000	77.862.241.125



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 642 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
289	Kota Tarakan	427.504.956.000	425.960.694.000	89.954.739.630	88.361.174.075
345	Provinsi Sulawesi Utara	1.340.960.749.000	1.335.813.289.000	1.104.137.394.724	1.071.559.669.601
346	Kab. Bolaang Mongondow	520.863.307.000	518.152.776.000	154.644.580.479	149.169.610.743
347	Kab. Minahasa	626.891.615.000	626.199.943.000	212.563.761.172	209.877.616.446
348	Kab. Sangihe	504.778.603.000	502.583.793.000	185.575.688.556	180.752.147.252
349	Kota Bitung	475.306.720.000	473.502.344.000	108.214.531.294	103.370.561.038
350	Kota Manado	718.105.042.000	715.060.730.000	168.077.629.452	165.112.810.086
351	Kab. Kepulauan Talaud	466.829.170.000	465.378.648.000	129.424.408.467	126.707.982.570
352	Kab. Minahasa Selatan	512.617.579.000	509.955.385.000	138.624.074.000	137.714.541.016
353	Kab. Minahasa Tenggara	388.590.506.000	387.103.088.000	115.846.857.000	112.933.113.150
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	368.894.458.000	367.501.780.000	92.050.440.000	89.183.228.273
355	Kota Kotamobagu	361.109.537.000	359.457.903.000	98.864.835.999	98.086.635.492
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	329.834.100.000	328.486.686.000	135.608.283.000	130.803.489.848
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	333.549.036.000	332.283.730.000	125.479.376.800	122.401.026.501
358	Kota Tomohon	402.379.553.000	400.737.383.000	113.965.338.625	112.462.024.703
359	Kab. Minahasa Utara	478.884.543.000	472.542.815.000	157.927.354.206	146.140.163.179
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	354.425.767.000	353.070.985.000	128.036.864.411	125.444.416.340
361	Provinsi Gorontalo	944.452.624.000	944.270.446.000	452.494.883.461	444.897.109.770
362	Kab. Boalemo	428.873.901.000	427.405.431.000	160.563.903.015	153.898.341.795
363	Kab. Gorontalo	622.762.737.000	618.060.475.000	267.440.925.000	266.441.978.231
364	Kota Gorontalo	492.892.141.000	490.394.163.000	139.447.007.886	124.752.695.966
365	Kab. Pohuwato	489.117.966.000	487.482.122.000	231.235.187.000	227.785.095.388
366	Kab. Gorontalo Utara	381.954.333.000	380.457.441.000	163.570.447.319	158.575.377.099
367	Kab. Bone Bolango	461.575.596.000	459.408.122.000	164.343.672.077	163.319.947.061
368	Provinsi Sulawesi Tengah	1.492.182.668.000	1.488.847.818.000	1.324.010.541.582	1.266.312.761.734
369	Kab. Banggai	820.986.428.000	818.466.344.000	247.799.615.000	246.379.714.319
370	Kab. Banggai Laut	390.478.710.000	389.292.480.000	94.301.142.000	88.896.565.496
371	Kab. Banggai Kepulauan	446.343.684.000	444.960.480.000	148.685.974.000	144.938.735.341
372	Kab. Buol	485.229.562.000	483.685.300.000	179.618.664.000	178.213.696.616
373	Kab. Tojoh	588.276.474.000	586.447.892.000	194.731.787.493	183.313.581.624
374	Kab. Donggala	627.024.200.000	624.939.920.000	276.107.475.000	272.032.285.775
375	Kab. Morowali	466.016.546.000	466.453.336.000	169.421.516.000	163.069.312.490
376	Kab. Morowali Utara	641.152.527.000	639.257.727.000	234.209.121.958	234.186.253.050
377	Kab. Poso	885.789.750.000	883.391.776.000	282.671.528.090	280.104.461.691
378	Kota Palu	650.829.308.000	648.403.965.000	187.567.056.098	182.888.272.163
379	Kab. Parigi Moutong	729.166.148.000	727.263.874.000	352.493.839.661	347.085.243.448
380	Kab. Sigi	589.752.115.000	587.639.413.000	208.608.212.360	202.128.998.382
381	Kab. Tojo Una-Una	552.080.735.000	550.536.473.000	220.298.076.000	215.408.536.886
382	Provinsi Sulawesi Selatan	2.357.581.182.000	2.349.983.034.000	2.347.344.302.910	2.273.530.404.322
383	Kab. Bantaeng	478.709.520.000	476.988.410.000	178.219.221.362	176.023.572.528
384	Kab. Barru	493.676.854.000	491.478.886.000	143.284.068.000	139.409.126.124
385	Kab. Bone	1.015.212.018.000	1.009.527.318.000	433.885.684.499	430.225.154.356
386	Kab. Bulukumba	672.997.972.000	665.224.246.000	304.393.667.000	298.713.977.419
387	Kab. Enrekang	506.950.764.000	505.093.680.000	206.938.737.264	204.807.421.036
388	Kab. Gowa	811.842.983.000	808.650.245.000	395.416.812.091	388.687.471.805
389	Kab. Jeneponto	616.181.444.000	613.992.950.000	252.582.127.445	248.740.858.802
390	Kab. Luwu	659.004.993.000	652.082.657.000	283.432.811.482	279.388.309.186
391	Kab. Luwu Utara	626.246.756.000	619.965.494.000	225.103.133.000	219.452.900.401
392	Kab. Maros	675.113.981.000	666.954.323.000	197.531.544.024	195.020.942.972



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 643 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	715.539.546.000	713.388.948.000	228.821.528.000	225.278.052.974
394	Kab. Pinrang	675.600.723.000	673.175.379.000	243.411.346.000	240.622.430.395
395	Kab. Kepulauan Selayar	568.560.531.000	565.134.101.000	178.375.836.723	172.722.177.817
396	Kab. Sidenreng Rappang	588.705.480.000	585.892.758.000	228.626.616.000	223.990.427.523
397	Kab. Sinjai	553.586.735.000	551.234.025.000	256.757.958.453	253.327.899.175
398	Kab. Soppeng	592.427.212.000	588.492.344.000	249.683.308.108	248.158.812.625
399	Kab. Takalar	576.931.978.000	574.658.219.000	172.832.069.000	172.153.517.733
400	Kab. Tana Toraja	548.165.995.000	544.504.797.000	202.834.102.713	199.034.987.123
401	Kab. Wajo	681.631.121.000	676.935.175.000	282.953.161.426	279.228.076.567
402	Kota Parepare	438.708.311.000	437.822.985.000	102.146.786.000	100.725.022.930
403	Kab. Toraja Utara	509.432.943.000	505.895.883.000	163.526.849.000	162.428.067.212
404	Kota Makassar	1.288.419.315.000	1.249.847.391.000	342.009.651.574	311.972.793.008
405	Kota Palopo	498.865.870.000	497.008.966.000	154.838.832.109	152.444.231.820
406	Kab. Luwu Timur	512.404.165.000	508.456.665.000	160.278.981.181	153.742.678.090
407	Provinsi Sulawesi Barat	970.566.678.000	969.832.938.000	681.203.576.276	659.732.952.520
408	Kab. Majene	496.316.515.000	492.454.281.000	214.568.224.000	212.721.852.287
409	Kab. Mamuju	600.303.844.000	598.579.575.000	179.469.738.360	177.002.751.209
410	Kab. Mamuju Tengah	337.153.909.000	335.931.863.000	151.767.821.000	150.480.853.021
411	Kab. Polewali Mandar	676.178.238.000	671.333.866.000	333.374.802.000	331.013.031.526
412	Kab. Mamasa	495.966.812.000	494.358.232.000	184.958.444.000	182.842.314.779
413	Kab. Pasangkayu	460.581.283.000	459.368.611.000	175.513.270.347	174.634.728.453
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.458.672.026.000	1.454.628.700.000	1.230.963.047.000	1.211.860.541.129
415	Kab. Buton	401.791.686.000	400.048.470.000	142.352.858.558	138.828.487.869
416	Kab. Konawe	669.708.539.000	667.195.829.000	251.236.508.804	249.394.374.837
417	Kab. Konawe Kepulauan	306.193.542.000	304.961.822.000	78.527.672.000	75.847.689.878
418	Kab. Kolaka	555.034.971.000	550.288.497.000	208.326.504.372	207.281.202.630
419	Kab. Kolaka Timur	384.572.762.000	383.188.558.000	125.533.478.000	122.816.955.020
420	Kab. Muna	625.789.665.000	620.942.135.000	314.638.377.000	313.424.445.539
421	Kota Kendari	643.432.736.000	641.234.788.000	192.182.135.717	187.821.488.627
422	Kota Bau-bau	497.754.032.000	495.773.966.000	136.918.924.000	135.889.886.596
423	Kab. Konawe Selatan	675.526.307.000	673.728.247.000	243.800.216.000	241.474.137.788
424	Kab. Bombana	456.475.139.000	455.101.409.000	217.393.836.000	216.017.647.821
425	Kab. Konawe Utara	430.241.971.000	428.934.559.000	112.563.616.000	111.468.466.648
426	Kab. Buton Utara	392.867.034.000	391.697.518.000	96.703.012.000	95.054.193.322
427	Kab. Wakatobi	448.618.554.000	446.641.974.000	209.412.605.000	197.577.330.375
428	Kab. Kolaka Utara	461.923.459.000	460.597.099.000	137.691.174.000	136.242.811.049
429	Kab. Muna Barat	341.651.382.000	338.976.556.000	126.993.301.000	126.374.842.513
430	Kab. Buton Tengah	344.201.396.000	342.875.036.000	104.373.048.405	100.733.901.019
431	Kab. Buton Selatan	339.720.973.000	336.333.934.000	113.749.837.000	113.396.265.417
432	Provinsi Bali	1.210.991.525.000	1.204.700.789.000	1.188.363.792.277	1.155.492.719.218
433	Kab. Badung	335.170.598.000	330.780.978.000	156.810.381.472	149.693.311.953
434	Kab. Bangli	538.001.454.000	535.235.046.000	109.431.193.728	102.808.088.382
435	Kab. Buleleng	910.488.837.000	904.071.781.000	248.431.397.000	243.240.852.056
436	Kab. Gianyar	652.219.599.000	648.742.641.000	193.354.425.555	184.841.588.444
437	Kab. Jembrana	525.591.005.000	523.048.815.000	94.196.427.000	90.867.496.114
438	Kab. Karangasem	716.253.373.000	713.291.168.000	205.181.867.218	186.609.384.863
439	Kab. Klungkung	505.586.391.000	503.097.887.000	120.048.601.069	116.714.381.685
440	Kab. Tabanan	783.334.806.000	757.249.338.000	266.449.090.330	258.716.325.129
441	Kota Denpasar	623.672.157.000	619.582.547.000	129.586.538.198	126.305.094.166



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 644 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.484.527.774.000	1.475.540.106.000	1.832.294.948.373	1.602.255.569.207
443	Kab. Bima	846.199.889.000	832.124.683.000	389.283.093.000	387.428.358.668
444	Kab. Dompu	545.998.418.000	543.072.110.000	165.584.628.500	165.244.896.085
445	Kab. Lombok Barat	730.288.354.000	724.706.010.000	341.895.871.406	322.429.416.268
446	Kab. Lombok Tengah	957.311.842.000	943.972.250.000	453.586.947.000	437.808.802.657
447	Kab. Lombok Timur	1.091.094.297.000	1.078.831.783.000	456.246.829.000	451.276.445.397
448	Kab. Sumbawa	792.884.648.000	782.261.134.000	281.547.636.387	274.552.242.547
449	Kota Mataram	582.765.685.000	579.228.725.000	153.744.316.828	151.387.504.567
450	Kab. Lombok Utara	378.529.590.000	376.031.612.000	156.433.238.920	148.426.697.293
451	Kota Bima	442.038.321.000	439.644.557.000	123.747.988.000	122.281.863.845
452	Kab. Sumbawa Barat	376.608.234.000	373.292.334.000	102.149.118.666	98.753.861.965
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.722.181.082.000	1.716.208.146.000	2.456.619.190.000	2.369.198.255.882
454	Kab. Alor	572.919.255.000	570.797.079.000	212.657.450.904	210.602.708.109
455	Kab. Belu	476.169.938.000	472.964.568.000	194.197.867.000	189.903.042.031
456	Kab. Ende	599.004.483.000	592.619.007.000	220.981.127.000	218.075.261.826
457	Kab. Flores Timur	595.854.496.000	593.304.944.000	179.350.306.000	177.669.793.788
458	Kab. Kupang	635.495.332.000	633.088.936.000	214.549.930.000	211.121.805.068
459	Kab. Lmbata	445.274.975.000	443.588.603.000	166.113.461.000	161.012.664.238
460	Kab. Malaka	430.115.689.000	427.260.957.000	128.127.718.000	122.868.117.861
461	Kab. Manggarai	561.139.653.000	553.087.333.000	236.709.858.000	228.091.060.619
462	Kab. Ngada	448.202.354.000	445.805.432.000	104.559.135.000	100.696.706.961
463	Kab. Sikka	590.110.814.000	586.220.258.000	175.277.579.469	171.346.808.006
464	Kab. Sumba Barat	379.392.302.000	377.323.812.000	124.381.453.000	122.459.544.327
465	Kab. Sumba Timur	605.609.005.000	602.846.901.000	206.131.320.000	186.907.859.058
466	Kab. Timor Tengah Selatan	716.929.578.000	704.510.671.000	275.488.270.000	267.320.330.287
467	Kab. Timor Tengah Utara	565.758.348.000	553.537.786.000	184.412.110.000	173.865.638.692
468	Kota Kupang	623.858.772.000	621.573.538.000	181.653.742.000	181.188.456.011
469	Kab. Rote Ndao	424.607.948.000	422.697.358.000	124.380.310.000	122.431.506.872
470	Kab. Nagekeo	414.631.577.000	412.477.821.000	159.785.691.000	152.262.450.165
471	Kab. Sumba Tengah	333.876.062.000	332.308.538.000	112.657.943.760	110.058.351.419
472	Kab. Sumba Barat Daya	462.481.864.000	459.832.302.000	182.971.779.000	180.097.123.823
473	Kab. Manggarai Timur	491.172.097.000	488.307.791.000	219.105.722.002	214.265.340.143
474	Kab. Sabu Raijua	341.480.888.000	339.873.471.000	135.755.446.000	134.176.320.766
475	Kab. Manggarai Barat	502.486.188.000	498.893.859.000	231.074.415.000	217.167.875.426
476	Provinsi Maluku	1.528.230.557.000	1.524.486.221.000	936.802.477.611	898.898.261.262
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	529.865.897.000	527.488.999.000	204.228.873.000	191.068.003.073
478	Kab. Maluku Tengah	892.490.766.000	889.448.612.000	356.221.444.444	348.432.210.249
479	Kab. Maluku Tenggara	481.412.381.000	459.754.431.000	213.830.559.000	208.332.253.990
480	Kab. Buru	482.604.098.000	481.128.312.000	240.664.699.000	238.231.302.087
481	Kota Ambon	635.403.609.000	632.334.033.000	187.479.190.000	186.170.758.581
482	Kab. Seram Bagian Barat	567.548.852.000	565.120.350.000	182.330.296.400	180.505.560.731
483	Kab. Seram Bagian Timur	506.174.564.000	504.379.471.000	140.585.580.800	139.108.637.964
484	Kab. Maluku Barat Daya	535.779.323.000	534.339.275.000	142.267.989.000	137.517.419.941
485	Kab. Buru Selatan	405.165.999.000	403.896.483.000	100.122.918.000	98.005.488.913
486	Kab. Kepulauan Aru	559.785.012.000	557.767.648.000	89.818.382.000	88.882.778.543
487	Kota Tual	370.628.836.000	369.245.632.000	84.959.816.000	81.815.827.596
488	Provinsi Maluku Utara	1.223.169.329.000	1.221.012.415.000	735.680.784.000	723.037.932.806
489	Kab. Halmahera Tengah	417.517.843.000	416.218.905.000	134.240.597.000	131.280.258.082
490	Kab. Halmahera Barat	465.217.012.000	463.683.276.000	188.518.287.000	187.136.536.236



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 645 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
491	Kota Ternate	602.070.200.000	599.701.700.000	113.035.670.000	111.187.268.198
492	Kab. Halmahera Timur	449.275.611.000	448.081.887.000	158.136.643.000	156.402.913.829
493	Kota Tidore Kepulauan	515.610.810.000	513.897.062.000	164.729.322.453	163.813.412.030
494	Kab. Kepulauan Sula	456.604.667.000	455.227.969.000	117.537.427.000	116.820.963.720
495	Kab. Pulau Morotai	365.535.480.000	364.322.788.000	198.108.380.819	197.802.607.108
496	Kab. Pulau Taliabu	332.146.239.000	331.028.307.000	118.993.587.000	118.971.178.027
497	Kab. Halmahera Selatan	702.340.036.000	700.871.566.000	330.381.930.000	328.968.188.701
498	Kab. Halmahera Utara	455.192.353.000	452.568.055.000	143.692.472.278	140.831.960.501
499	Provinsi Papua	2.333.184.319.000	2.330.020.083.000	1.257.607.205.000	1.066.623.919.096
500	Kab. Yalimo	574.824.986.000	573.707.054.000	176.256.436.000	174.087.448.740
501	Kab. Lanny Jaya	611.251.000.000	610.076.224.000	103.065.457.000	102.253.102.113
502	Kab. Biak Numfor	544.038.318.000	540.023.310.000	228.495.970.790	226.540.057.020
503	Kab. Jayapura	639.644.847.000	637.736.899.000	164.608.602.000	162.195.865.465
504	Kab. Jayawijaya	674.896.836.000	673.343.094.000	129.748.810.454	128.694.930.008
505	Kab. Merauke	1.138.620.943.000	1.136.915.623.000	244.046.244.000	228.875.230.808
506	Kab. Mimika	563.432.699.000	562.077.917.000	208.619.294.000	206.952.890.274
507	Kab. Nabire	673.300.440.000	669.918.688.000	175.504.713.685	174.108.002.720
508	Kab. Paniai	550.917.243.000	541.513.688.000	213.661.511.000	211.677.817.256
509	Kab. Puncak Jaya	704.292.072.000	701.980.787.000	106.587.825.000	71.191.606.995
510	Kab. Kepulauan Yapen	522.738.652.000	521.098.650.000	160.384.173.000	158.785.431.822
511	Kota Jayapura	593.754.625.000	592.096.675.000	179.676.374.998	162.675.683.348
512	Kab. Sarmi	645.243.003.000	643.304.589.000	144.346.893.000	138.272.058.637
513	Kab. Keerom	502.722.947.000	501.425.009.000	99.870.769.000	98.706.598.334
514	Kab. Yahukimo	706.692.026.000	687.756.966.000	133.011.876.000	131.866.490.400
515	Kab. Pegunungan Bintang	780.715.539.000	779.531.289.000	258.880.457.000	257.630.923.780
516	Kab. Tolikara	693.480.031.000	692.352.625.000	197.190.929.000	196.639.844.773
517	Kab. Boven Digoel	762.608.266.000	761.281.906.000	138.963.998.000	126.526.232.144
518	Kab. Mappi	708.296.586.000	706.979.710.000	155.348.085.000	153.764.370.267
519	Kab. Asmat	828.103.071.000	826.843.029.000	134.158.455.000	122.911.704.967
520	Kab. Waropen	533.813.787.000	532.582.167.000	111.241.835.000	110.588.692.450
521	Kab. Mamberamo Raya	675.263.588.000	674.145.836.000	111.173.084.000	104.273.863.085
522	Kab. Mamberamo Tengah	608.244.984.000	605.098.630.000	90.823.547.000	90.565.152.861
523	Kab. Nduga	573.202.494.000	572.103.510.000	121.483.198.000	118.807.582.814
524	Kab. Dogiyai	462.198.879.000	461.024.103.000	181.125.512.000	178.272.161.542
525	Kab. Intan Jaya	642.463.149.000	641.345.217.000	67.482.984.000	66.059.571.775
526	Kab. Puncak	749.381.270.000	748.282.286.000	119.811.865.000	60.195.741.700
527	Kab. Doryai	457.268.042.000	456.140.636.000	157.136.072.000	156.687.874.551
528	Kab. Supiori	417.661.447.000	416.486.671.000	79.433.292.000	74.714.031.808
529	Provinsi Papua Barat	1.301.320.812.000	1.299.870.490.000	530.580.752.000	484.154.042.850
530	Kab. Sorong	502.914.153.000	501.237.255.000	208.668.825.000	205.209.835.760
531	Kab. Manokwari	501.716.434.000	499.695.314.000	133.822.433.000	130.544.997.809
532	Kab. Manokwari Selatan	322.971.817.000	321.872.833.000	53.637.627.000	53.328.046.296
533	Kab. Fak Fak	650.432.018.000	648.774.088.000	118.617.172.000	116.721.350.155
534	Kota Sorong	468.463.160.000	468.899.950.000	115.487.544.000	113.294.648.279
535	Kab. Pegunungan Arfak	349.305.628.000	348.266.644.000	144.489.200.000	133.739.434.680
536	Kab. Sorong Selatan	440.860.850.000	438.762.912.000	126.679.323.000	123.953.061.158
537	Kab. Raja Ampat	647.093.633.000	645.899.908.000	167.912.867.000	165.796.591.845
538	Kab. Teluk Bintuni	505.009.267.000	503.821.438.000	112.409.384.000	108.467.572.661
539	Kab. Teluk Wondama	426.228.883.000	424.672.088.000	124.611.791.599	123.499.673.738



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 646 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
540	Kab. Tambora	470.637.002.000	469.490.648.000	145.944.622.000	142.915.494.365
541	Kab. Maybrat	410.834.045.000	402.099.733.000	152.098.400.000	151.698.438.744
542	Kab. Kaimana	574.547.299.000	573.211.465.000	65.649.060.000	60.204.460.362
543	Sisa Dana Cadangan/ Dana Tambahan	-	-	1.261.839.767.624	-
	JUMLAH	384.381.524.227.000	381.612.451.495.551	182.871.717.766.000	176.578.831.927.772



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 647 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Anggaran					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
1	Provinsi Aceh	7.555.278.348.000	10.399.635.000	-	-	7.565.678.000.000	7.555.278.348.000	18.399.635.000	-	-	7.565.678.000.000
2	Kab. Aceh Barat	-	38.820.701.000	-	250.632.328.000	289.453.029.000	-	38.820.701.000	-	249.925.770.000	288.746.471.000
3	Kab. Aceh Besar	-	67.449.350.000	-	437.565.848.000	505.005.198.000	-	67.449.350.000	-	438.934.690.000	504.383.950.000
4	Kab. Aceh Selatan	-	18.760.817.000	-	205.268.050.000	224.028.867.000	-	18.760.817.000	-	205.268.050.000	224.028.867.000
5	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	108.080.283.000	108.080.283.000	-	-	-	108.080.283.000	108.080.283.000
6	Kab. Aceh Tengah	-	47.568.295.000	-	223.350.548.000	270.918.843.000	-	37.731.975.000	-	223.346.951.999	261.079.926.999
7	Kab. Aceh Tenggara	-	18.672.151.000	-	284.561.253.000	303.233.404.000	-	18.672.151.000	-	284.561.253.000	303.233.404.000
8	Kab. Aceh Timur	-	29.471.150.000	-	387.797.538.000	417.259.088.000	-	29.471.150.000	-	387.787.838.000	417.259.088.000
9	Kab. Aceh Utara	-	29.433.901.000	-	626.338.212.000	655.772.113.000	-	29.433.901.000	-	626.310.457.736	654.744.358.736
10	Kab. Bireuen	-	8.370.650.000	-	455.521.085.000	463.892.735.000	-	8.370.650.000	-	455.521.595.000	463.892.735.000
11	Kab. Pidie	-	-	-	524.715.756.000	524.715.756.000	-	-	-	524.530.630.400	524.530.630.400
12	Kab. Simeulue	-	17.315.064.000	-	119.684.330.000	136.999.414.000	-	17.315.064.000	-	119.684.330.000	136.999.414.000
13	Kota Banda Aceh	-	41.144.614.000	-	75.927.388.000	117.122.012.000	-	41.144.614.000	-	75.927.388.000	117.122.012.000
14	Kota Sabang	-	53.472.920.000	-	25.156.301.000	78.629.221.000	-	53.472.920.000	-	78.629.221.000	78.629.221.000
15	Kota Lingsa	-	-	-	59.424.404.000	59.424.404.000	-	-	-	59.422.833.227	59.422.833.227
16	Kota Uluksamawe	-	18.391.468.000	-	80.285.819.000	98.677.287.000	-	18.391.468.000	-	80.285.819.000	98.677.287.000
17	Kab. Nagan Raya	-	18.912.339.000	-	175.871.395.000	194.783.734.000	-	18.912.339.000	-	175.871.395.000	194.783.734.000
18	Kab. Aceh Jaya	-	34.029.199.000	-	135.065.795.000	169.094.994.000	-	34.029.199.000	-	135.065.795.000	169.094.994.000
19	Kab. Pidie Jaya	-	30.388.228.000	-	155.862.465.000	186.250.693.000	-	30.388.228.000	-	155.862.465.000	186.250.693.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	-	21.005.554.000	-	119.823.298.000	140.828.842.000	-	21.005.554.000	-	119.823.298.000	140.828.842.000
21	Kab. Gayo Lues	-	9.952.510.000	-	114.193.844.000	124.146.254.000	-	9.952.510.000	-	114.193.844.000	124.146.254.000
22	Kab. Aceh Tamiang	-	41.072.184.000	-	171.872.967.900	212.745.151.000	-	41.072.184.000	-	170.939.358.000	212.011.540.000
23	Kab. Bener Meriah	-	9.474.092.000	-	182.534.539.000	192.008.631.000	-	9.474.092.000	-	182.736.016.066	192.210.108.066
24	Kota Subussalam	-	9.678.788.000	-	70.422.534.000	80.101.323.000	-	9.678.788.000	-	70.422.534.000	80.101.323.000
25	Provinsi Sumatera Utara	-	9.872.679.000	-	-	9.872.679.000	-	36.954.952.000	-	-	36.954.952.000
26	Kab. Asahan	-	57.564.940.000	-	148.593.486.000	206.158.426.000	-	57.564.940.000	-	148.593.486.000	206.158.426.000
27	Kab. Deli	-	25.334.381.000	-	128.564.543.000	153.898.929.000	-	25.334.381.000	-	153.898.929.000	153.898.929.000
28	Kab. Deli Serdang	-	57.246.737.000	-	308.170.689.000	365.417.406.000	-	57.246.737.000	-	308.170.689.000	365.417.406.000
29	Kab. Karo	-	14.905.745.000	-	189.406.273.000	213.315.018.000	-	14.905.745.000	-	189.067.760.758	212.973.505.758
30	Kab. Labuhan Batu	-	-	-	71.372.171.000	71.372.171.000	-	-	-	71.260.626.342	71.260.626.342
31	Kab. Langkat	-	12.506.807.000	-	208.819.585.000	221.326.392.000	-	-	-	208.819.585.000	221.326.392.000
32	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	288.845.864.000	288.845.864.000	-	-	-	286.685.994.487	286.685.994.487
33	Kab. Nias	-	4.000.000.000	-	179.544.025.000	183.544.025.000	-	-	-	179.327.035.600	183.327.035.600
34	Kab. Samatung	-	-	-	294.518.231.000	294.518.231.000	-	-	-	294.518.231.000	294.518.231.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	-	52.025.950.000	-	169.754.513.000	221.780.463.000	-	52.025.950.000	-	169.383.617.000	221.409.567.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	-	11.934.598.000	-	142.631.022.000	154.565.620.000	-	-	-	142.628.803.600	154.257.396.600
37	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	182.016.817.000	224.378.807.000	-	-	-	182.016.817.000	224.378.807.000
38	Kab. Tobo Samosir	-	37.134.105.000	-	177.074.852.000	214.208.957.000	-	37.134.105.000	-	177.074.852.000	214.208.957.000
39	Kota Binjai	-	40.871.654.000	-	-	40.871.654.000	-	40.871.654.000	-	-	40.871.654.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 648 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
40	Kota Medan	8.538.533.000	-	-	-	8.538.533.000	-	8.538.533.000	-	-	8.538.533.000
41	Kota Pematang Siantar	14.919.829.000	-	-	-	14.919.829.000	-	14.919.829.000	-	-	14.919.829.000
42	Kota Sibolga	42.995.348.000	-	-	-	42.995.348.000	-	42.995.348.000	-	-	42.995.348.000
43	Kota Tanjung Balai	13.415.171.000	-	-	-	13.415.171.000	-	13.415.171.000	-	-	13.415.171.000
44	Kab. Batu Bara	63.026.300.000	-	-	120.110.241.000	183.136.541.000	-	63.026.300.000	-	120.038.949.000	183.065.249.000
45	Kab. Labuhanbatu Utara	13.415.171.000	-	-	82.889.984.000	96.305.155.000	-	13.415.171.000	-	82.889.984.000	96.305.155.000
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	10.079.243.000	-	-	94.514.290.000	104.593.533.000	-	10.079.243.000	-	94.514.290.000	104.593.533.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	8.845.138.000	-	-	289.345.427.000	298.190.585.000	-	8.845.138.000	-	289.345.427.000	298.190.585.000
48	Kab. Padang Lawas	8.538.533.000	-	-	230.275.200.000	238.813.733.000	-	8.538.533.000	-	230.275.200.000	238.813.733.000
49	Kab. Nias Utara	-	-	-	136.386.189.000	136.386.189.000	-	-	-	136.386.189.000	136.386.189.000
50	Kab. Nias Barat	-	-	-	117.397.253.000	117.397.253.000	-	-	-	117.397.253.000	117.397.253.000
51	Kota Teluk Tinggi	8.845.138.000	-	-	-	8.845.138.000	-	8.845.138.000	-	-	8.845.138.000
52	Kota Padang Selayan	-	-	-	40.865.674.000	40.865.674.000	-	-	-	40.865.674.000	40.865.674.000
53	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-	49.862.156.000	49.862.156.000	-	-	-	49.862.156.000	49.862.156.000
54	Kab. Nias Selatan	-	-	-	351.138.751.000	351.138.751.000	-	-	-	351.138.751.000	351.138.751.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	19.688.111.000	-	-	124.374.983.000	144.064.094.000	-	19.688.111.000	-	124.374.983.000	144.064.094.000
56	Kab. Serdang Bedagai	28.079.769.000	-	-	185.273.335.000	213.353.104.000	-	28.079.769.000	-	185.273.335.000	213.353.104.000
57	Kab. Samosir	31.289.175.000	-	-	107.929.748.000	139.218.923.000	-	31.289.175.000	-	107.929.748.000	139.218.923.000
58	Kota Gunungsitoli	14.065.588.000	-	-	89.308.306.000	103.373.894.000	-	14.065.588.000	-	89.308.306.000	103.373.894.000
59	Provinsi Sumatera Barat	44.421.312.000	-	-	-	44.421.312.000	-	44.421.312.000	-	-	44.421.312.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	250.000.000	-	-	77.575.698.000	77.825.698.000	-	250.000.000	-	77.575.698.000	77.825.698.000
61	Kab. Agam	22.897.830.000	-	-	76.037.634.000	98.935.464.000	-	22.897.830.000	-	76.037.634.000	98.935.464.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	35.561.158.000	-	-	57.284.785.000	92.845.943.000	-	35.561.158.000	-	57.284.785.000	92.845.943.000
63	Kab. Padang Pariaman	14.183.265.000	-	-	96.749.416.000	110.932.681.000	-	14.183.265.000	-	96.749.416.000	110.932.681.000
64	Kab. Pasaman	58.594.528.000	-	-	48.177.123.000	106.771.651.000	-	58.594.528.000	-	48.177.123.000	106.771.651.000
65	Kab. Pasaman Barat	44.965.382.000	-	-	167.365.647.000	212.331.029.000	-	44.965.382.000	-	167.365.647.000	212.331.029.000
66	Kab. Sijunjung	46.873.537.000	-	-	50.010.080.000	96.883.617.000	-	46.873.537.000	-	50.010.080.000	96.883.617.000
67	Kab. Solok	20.979.380.000	-	-	77.319.619.000	98.299.000.000	-	20.979.380.000	-	77.319.619.000	98.299.000.000
68	Kab. Tanah Datar	34.701.123.000	-	-	67.945.156.000	102.646.279.000	-	34.701.123.000	-	67.945.156.000	102.646.279.000
69	Kota Bukittinggi	56.127.080.000	-	-	-	56.127.080.000	-	56.127.080.000	-	-	56.127.080.000
70	Kota Padang Panjang	27.961.238.000	-	-	-	27.961.238.000	-	27.961.238.000	-	-	27.961.238.000
71	Kota Padang	44.449.435.000	-	-	-	44.449.435.000	-	44.449.435.000	-	-	44.449.435.000
72	Kota Payakumbuh	38.898.942.000	-	-	-	38.898.942.000	-	38.898.942.000	-	-	38.898.942.000
73	Kota Sawahlunto	-	-	-	28.631.236.000	28.631.236.000	-	-	-	28.631.236.000	28.631.236.000
74	Kota Solok	30.460.206.000	-	-	-	30.460.206.000	-	30.460.206.000	-	-	30.460.206.000
75	Kota Pamanangan	26.785.086.000	-	-	49.884.423.000	76.669.509.000	-	26.785.086.000	-	49.884.423.000	76.669.509.000
76	Kab. Pesisir Barat	8.246.384.000	-	-	48.319.821.000	56.566.205.000	-	8.246.384.000	-	48.319.821.000	56.566.205.000
77	Kab. Dharmasraya	46.554.026.000	-	-	53.272.850.000	99.826.876.000	-	46.554.026.000	-	53.272.850.000	99.826.876.000
78	Kab. Sekeloa Selatan	24.095.009.000	-	-	44.523.218.000	68.618.227.000	-	24.095.009.000	-	44.523.218.000	68.618.227.000
79	Provinsi Riau	28.243.618.000	-	-	-	28.243.618.000	-	28.243.618.000	-	-	28.243.618.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 649 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa
80	Kab Bengkulu	35 625 238.000	-	-	131 032 200.000	166 657 836.000	-	35 625 238.000	-	131 032 200.000
81	Kab Indragiri Hilir	29 874 660.000	-	-	171 913 227.000	201 787 887.000	-	29 874 660.000	-	171 913 227.000
82	Kab Indragiri Hulu	11 515 631.000	-	-	158 258 239.000	169 773 870.000	-	11 515 631.000	-	158 258 239.000
83	Kab Kampar	15 839 028.000	-	-	212 934 016.000	228 773 044.000	-	15 839 028.000	-	212 934 016.000
84	Kab Kepulauan Singingi	45 339 940.000	-	-	175 256 296.000	220 595 236.000	-	45 339 940.000	-	175 256 296.000
85	Kab Pesisir Selatan	41 714 809.000	-	-	108 307 280.000	148 022 089.000	-	41 714 809.000	-	108 307 280.000
86	Kab Rokan Hilir	19 556 722.000	-	-	144 465 232.000	164 021 954.000	-	19 556 722.000	-	144 465 232.000
87	Kab Rokan Hulu	31 215 601.000	-	-	143 249 015.000	174 464 616.000	-	31 215 601.000	-	143 249 015.000
88	Kab Sakti	39 249 156.000	-	-	114 400 614.000	153 649 770.000	-	39 249 156.000	-	114 400 614.000
89	Kota Dumai	45 719 565.000	-	-	45 719 565.000	45 719 565.000	-	45 719 565.000	-	45 719 565.000
90	Kota Pekanbaru	53 718 433.000	-	-	53 718 433.000	53 718 433.000	-	53 718 433.000	-	53 718 433.000
91	Kab Kepulauan Meranti	20 047 281.000	-	-	95 383 524.000	115 430 805.000	-	20 047 281.000	-	95 383 524.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	34 926 458.000	-	-	34 926 458.000	34 926 458.000	-	34 926 458.000	-	34 926 458.000
93	Kab Batam	58 797 193.000	-	-	39 183 570.000	95 870 763.000	-	58 797 193.000	-	39 183 570.000
94	Kab Bintan	28 129 235.000	-	-	64 932 954.000	93 062 189.000	-	28 129 235.000	-	64 932 954.000
95	Kab Karimun	26 154 605.000	-	-	44 045 068.000	70 199 673.000	-	26 154 605.000	-	44 045 068.000
96	Kota Batam	47 386 132.000	-	-	47 386 132.000	47 386 132.000	-	47 386 132.000	-	47 386 132.000
97	Kab Kepulauan Anambas	25 151 920.000	-	-	52 454 050.000	77 605 970.000	-	25 151 920.000	-	52 454 050.000
98	Kota Tanjung Pinang	26 285 414.000	-	-	26 285 414.000	26 285 414.000	-	26 285 414.000	-	26 285 414.000
99	Kab Lingga	27 934 137.000	-	-	89 729 098.000	97 713 235.000	-	27 934 137.000	-	89 729 098.000
100	Provinsi Jambi	13 767 184.000	-	-	13 767 184.000	13 767 184.000	-	13 767 184.000	-	13 767 184.000
101	Kab Batanghari	39 315 342.000	-	-	98 684 937.000	137 999 279.000	-	39 315 342.000	-	98 684 937.000
102	Kab Bangko	23 053 320.000	-	-	116 858 962.000	139 912 282.000	-	23 053 320.000	-	116 858 962.000
103	Kab Kerinci	26 232 717.000	-	-	214 220 895.000	240 453 612.000	-	26 232 717.000	-	214 220 895.000
104	Kab Merangin	11 252 470.000	-	-	172 645 487.000	183 897 957.000	-	11 252 470.000	-	172 645 487.000
105	Kab Muaro Jambi	74 034 263.000	-	-	125 480 967.000	199 515 230.000	-	74 034 263.000	-	125 480 967.000
106	Kab Sarolangun	32 997 631.000	-	-	131 739 421.000	164 737 052.000	-	32 997 631.000	-	131 739 421.000
107	Kab Tanjung Jabung Barat	27 085 232.000	-	-	108 187 123.000	135 272 355.000	-	27 085 232.000	-	108 187 123.000
108	Kab Tanjung Jabung Timur	7 907 227.000	-	-	74 332 548.000	81 939 775.000	-	7 907 227.000	-	74 332 548.000
109	Kab Tebo	26 932 458.000	-	-	108 787 852.000	135 720 310.000	-	26 932 458.000	-	108 787 852.000
110	Kota Jambi	37 746 049.000	-	-	37 746 049.000	37 746 049.000	-	37 746 049.000	-	37 746 049.000
111	Kota Sungai Penuh	35 043 462.000	-	-	55 804 101.000	90 847 563.000	-	35 043 462.000	-	55 804 101.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	40 221 648.000	-	-	40 221 648.000	40 221 648.000	-	40 221 648.000	-	40 221 648.000
113	Kab Lahat	30 723 548.000	-	-	302 858 256.000	333 581 804.000	-	30 723 548.000	-	302 858 256.000
114	Kab Musi Banyuasin	59 727 891.000	-	-	232 858 342.000	292 586 233.000	-	59 727 891.000	-	232 858 342.000
115	Kab Musi Rawas	48 042 243.000	-	-	189 366 612.000	237 408 855.000	-	48 042 243.000	-	189 366 612.000
116	Kab Musi Rawas Utara	19 379 057.000	-	-	100 855 988.000	120 235 045.000	-	19 379 057.000	-	100 855 988.000
117	Kab Muara Enim	56 575 501.000	-	-	236 152 242.000	292 727 743.000	-	56 575 501.000	-	236 152 242.000
118	Kab Ogan Komering Ilir	50 909 898.000	-	-	292 756 086.000	343 665 984.000	-	50 909 898.000	-	292 756 086.000
119	Kab Ogan Komering Ulu	11 289 245.000	-	-	137 092 577.000	148 381 822.000	-	11 289 245.000	-	137 092 577.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 650 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
120	Kota Palembang	-	38.443.326.000	-	-	38.443.326.000	-	38.443.326.000	-	-	38.443.326.000
121	Kota Pagar Alam	-	10.557.416.000	-	-	10.557.416.000	-	10.557.416.000	-	-	10.557.416.000
122	Kota Lubuklinggau	-	46.150.671.000	-	-	46.150.671.000	-	46.150.671.000	-	-	46.150.671.000
123	Kota Prabumulih	-	26.680.256.000	-	21.888.335.000	48.568.591.000	-	26.680.256.000	-	21.888.335.000	48.568.591.000
124	Kab. Empat Lawang	-	7.607.227.000	-	130.205.546.000	137.812.773.000	-	7.607.227.000	-	130.205.546.000	137.812.773.000
125	Kab. Banyuwangi	-	34.033.245.000	-	297.112.067.000	331.145.316.000	-	34.033.245.000	-	296.569.512.200	330.602.761.200
126	Kab. Ogan Ilir	-	31.757.133.000	-	202.142.617.000	233.899.750.000	-	31.757.133.000	-	202.142.616.200	233.899.749.200
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	33.454.919.000	-	244.517.784.000	277.972.703.000	-	33.454.919.000	-	244.516.395.597	277.971.314.597
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	7.522.959.000	-	218.431.696.000	225.954.657.000	-	7.522.959.000	-	218.431.696.000	225.954.657.000
129	Kab. Pemukut Abah Lematang Ilir	-	24.892.224.000	-	77.726.446.000	102.618.670.000	-	24.892.224.000	-	77.726.446.000	102.618.670.000
130	Provinsi Bangka Belitung	-	52.820.045.000	-	-	52.820.045.000	-	52.820.045.000	-	-	52.820.045.000
131	Kab. Bangka	-	50.257.407.000	-	61.490.333.000	111.747.740.000	-	50.257.407.000	-	61.490.333.000	111.747.740.000
132	Kab. Belitung	-	24.542.041.000	-	47.580.353.000	72.122.394.000	-	24.542.041.000	-	47.580.353.000	72.122.394.000
133	Kota Pangkal Pinang	-	28.645.184.000	-	-	28.645.184.000	-	28.645.184.000	-	-	28.645.184.000
134	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	51.610.695.000	51.610.695.000	-	-	-	51.610.695.000	51.610.695.000
135	Kab. Bangka Tengah	-	88.420.714.000	-	54.587.594.000	143.008.308.000	-	88.420.714.000	-	54.587.594.000	143.008.308.000
136	Kab. Bangka Barat	-	23.204.942.000	-	58.433.325.000	81.638.267.000	-	23.204.942.000	-	58.433.325.000	81.638.267.000
137	Kab. Belitung Timur	-	8.020.830.000	-	44.689.087.000	52.710.027.000	-	17.857.250.000	-	44.689.045.980	62.556.296.980
138	Provinsi Bengkulu	-	31.396.339.000	-	-	31.396.339.000	-	31.396.339.000	-	-	31.396.339.000
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	8.797.149.000	-	110.975.195.000	119.772.344.000	-	8.797.149.000	-	110.975.195.000	119.772.344.000
140	Kab. Bengkulu Utara	-	27.395.226.000	-	170.927.459.000	198.322.685.000	-	27.395.226.000	-	170.927.459.000	198.322.685.000
141	Kab. Rejang Lebong	-	18.029.763.000	-	113.169.136.000	131.198.899.000	-	18.029.763.000	-	112.676.812.200	130.705.575.200
142	Kota Bengkulu	-	45.661.000.000	-	-	45.661.000.000	-	35.593.488.000	-	-	35.593.488.000
143	Kab. Kaur	-	12.655.029.000	-	147.024.967.000	159.683.996.000	-	12.655.029.000	-	147.024.967.000	159.683.996.000
144	Kab. Sulawe	-	17.978.641.000	-	141.005.233.000	158.983.874.000	-	40.968.000.000	-	141.005.233.000	182.051.233.000
145	Kab. Mukomuko	-	21.367.402.000	-	122.876.536.000	144.243.938.000	-	21.367.402.000	-	122.876.536.000	144.243.938.000
146	Kab. Lebong	-	21.415.796.000	-	79.784.679.000	101.200.475.000	-	21.415.796.000	-	79.427.185.950	100.842.981.950
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	13.446.531.000	-	112.456.380.000	125.902.911.000	-	13.446.531.000	-	112.456.380.000	125.902.911.000
148	Kab. Kepahang	-	9.970.853.000	-	86.691.075.000	96.661.928.000	-	20.323.707.000	-	86.691.075.000	107.014.762.000
149	Provinsi Lampung	-	46.434.098.000	-	-	46.434.098.000	-	46.434.098.000	-	-	46.434.098.000
150	Kab. Lampung Barat	-	20.362.528.000	-	126.016.068.000	146.378.596.000	-	20.362.528.000	-	126.016.068.000	146.378.596.000
151	Kab. Lampung Selatan	-	26.505.944.000	-	260.924.995.000	287.430.939.000	-	26.505.944.000	-	260.173.670.850	286.679.614.850
152	Kab. Lampung Tengah	-	34.625.067.000	-	310.176.977.000	344.802.074.000	-	34.625.067.000	-	310.176.977.000	344.802.074.000
153	Kab. Lampung Utara	-	10.654.291.000	-	245.652.825.000	256.307.116.000	-	10.654.291.000	-	245.652.824.287	256.307.115.287
154	Kab. Lampung Timur	-	40.653.243.000	-	278.517.033.000	319.170.276.000	-	30.300.426.000	-	278.517.033.000	308.817.462.000
155	Kab. Tanggamus	-	23.204.074.000	-	290.451.321.000	313.655.395.000	-	23.204.074.000	-	289.994.771.250	313.198.645.250
156	Kab. Tulang Bawang	-	18.096.887.000	-	133.276.906.000	151.373.893.000	-	18.096.887.000	-	133.276.906.000	151.373.893.000
157	Kab. Way Kamb	-	7.607.227.000	-	185.295.274.000	192.902.501.000	-	7.607.227.000	-	185.295.274.000	192.902.501.000
158	Kab. Pasawaran	-	60.155.003.000	-	155.789.561.000	215.944.564.000	-	60.155.003.000	-	155.789.561.000	215.944.564.000
159	Kab. Pesawaran	-	14.446.531.000	-	119.755.097.000	134.201.628.000	-	14.446.531.000	-	119.755.097.000	134.201.628.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 651 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi			
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa
160	Kab. Pangkep	62.787.777.000	-	-	126.299.920.000	189.087.697.000	-	62.787.777.000	-	126.299.920.000
161	Kab. Majene	8.120.650.000	-	-	162.687.170.000	170.807.820.000	-	8.120.650.000	-	162.687.170.000
162	Kab. Tulung Bawang Barat	7.854.859.000	-	-	90.895.123.000	98.750.000.000	-	7.854.859.000	-	90.895.123.000
163	Kota Bander Lampung	40.888.117.000	-	-	40.888.117.000	40.888.117.000	-	40.888.117.000	-	40.888.117.000
164	Kota Metro	49.532.667.000	-	-	49.532.667.000	49.532.667.000	-	49.532.667.000	-	49.532.667.000
165	Provinsi DKI Jakarta	85.178.975.000	-	-	85.178.975.000	85.178.975.000	-	85.178.975.000	-	85.178.975.000
166	Provinsi Jawa Barat	29.413.272.000	-	-	29.413.272.000	29.413.272.000	-	29.413.272.000	-	29.413.272.000
167	Kab. Bandung	82.890.666.000	-	-	319.299.290.000	402.189.956.000	-	82.890.666.000	-	319.299.290.000
168	Kab. Bekasi	55.265.598.000	-	-	255.641.111.000	310.906.709.000	-	55.265.598.000	-	255.641.111.000
169	Kab. Bogor	67.197.129.000	-	-	507.395.217.000	574.592.346.000	-	67.197.129.000	-	507.395.217.000
170	Kab. Ciamis	32.046.036.000	-	-	280.240.548.000	292.286.584.000	-	32.046.036.000	-	280.240.548.000
171	Kab. Cianjur	423.935.085.000	-	-	423.935.085.000	423.935.085.000	-	423.935.085.000	-	423.935.085.000
172	Kab. Cirebon	52.144.693.000	-	-	452.375.165.000	504.519.858.000	-	52.144.693.000	-	452.375.165.000
173	Kab. Garut	50.082.095.000	-	-	504.941.320.000	555.023.415.000	-	50.082.095.000	-	504.941.320.000
174	Kab. Indramayu	42.478.286.000	-	-	350.299.016.000	432.777.302.000	-	42.478.286.000	-	350.299.016.000
175	Kab. Karawang	38.317.765.000	-	-	342.895.075.000	381.212.841.000	-	38.317.765.000	-	342.895.075.000
176	Kab. Kuningas	47.800.852.000	-	-	303.168.088.000	350.968.940.000	-	47.800.852.000	-	303.168.088.000
177	Kab. Majalengka	84.986.945.000	-	-	391.668.514.000	476.655.459.000	-	84.986.945.000	-	391.668.514.000
178	Kab. Pangandaran	71.978.458.000	-	-	88.353.508.000	160.332.966.000	-	71.978.458.000	-	88.353.508.000
179	Kab. Purwakarta	74.767.844.000	-	-	167.468.522.000	242.236.366.000	-	74.767.844.000	-	167.468.522.000
180	Kab. Subang	32.371.964.000	-	-	212.605.496.000	244.977.460.000	-	32.371.964.000	-	212.605.496.000
181	Kab. Sukabumi	59.634.740.000	-	-	368.011.004.000	427.645.744.000	-	59.634.740.000	-	368.011.004.000
182	Kab. Sumedang	84.002.531.000	-	-	222.389.199.000	306.391.730.000	-	84.002.531.000	-	222.389.199.000
183	Kab. Tasikmalaya	-	-	-	399.451.057.000	399.451.057.000	-	-	-	399.451.057.000
184	Kab. Bandung Barat	9.072.182.000	-	-	251.204.676.000	260.276.858.000	-	9.072.182.000	-	251.204.676.000
185	Kota Bandung	97.308.562.000	-	-	-	97.308.562.000	-	97.308.562.000	-	-
186	Kota Bekasi	71.382.704.000	-	-	-	71.382.704.000	-	71.382.704.000	-	-
187	Kota Bogor	28.928.585.000	-	-	-	28.928.585.000	-	28.928.585.000	-	-
188	Kota Cirebon	21.470.454.000	-	-	-	21.470.454.000	-	21.470.454.000	-	-
189	Kota Depok	63.884.803.000	-	-	-	63.884.803.000	-	63.884.803.000	-	-
190	Kota Sukabumi	19.863.306.000	-	-	-	19.863.306.000	-	19.863.306.000	-	-
191	Kota Cimahi	97.730.028.000	-	-	-	97.730.028.000	-	97.730.028.000	-	-
192	Kota Tasikmalaya	7.970.882.000	-	-	-	7.970.882.000	-	7.970.882.000	-	-
193	Kota Banjar	71.520.637.000	-	-	23.265.229.000	94.785.866.000	-	71.520.637.000	-	23.265.229.000
194	Provinsi Banten	39.938.878.000	-	-	-	39.938.878.000	-	39.938.878.000	-	-
195	Kab. Lebak	28.301.537.000	-	-	289.814.489.000	318.116.026.000	-	28.301.537.000	-	289.814.489.000
196	Kab. Pandeglang	266.266.589.000	-	-	-	266.266.589.000	-	266.266.589.000	-	-
197	Kab. Serang	43.205.030.000	-	-	281.898.051.000	305.103.081.000	-	43.205.030.000	-	281.898.051.000
198	Kab. Tangerang	45.190.408.000	-	-	291.455.144.000	336.645.552.000	-	45.190.408.000	-	291.455.144.000
199	Kota Cilegon	33.584.527.000	-	-	-	33.584.527.000	-	33.584.527.000	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 652 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
200	Kota Tangerang	-	78.196.496.000	-	-	78.196.496.000	-	78.196.496.000	-	-	78.196.496.000
201	Kota Serang	-	31.891.617.000	-	-	31.891.617.000	-	31.891.617.000	-	-	31.891.617.000
202	Kota Tangerang Selatan	-	70.765.756.000	-	-	70.765.756.000	-	42.417.844.000	-	-	42.417.844.000
203	Provinsi Jawa Tengah	-	68.212.465.880	-	-	68.212.465.880	-	68.212.465.880	-	-	68.212.465.880
204	Kab. Banjarnegara	-	26.668.112.000	-	285.128.597.000	291.796.709.000	-	26.668.112.000	-	285.128.597.000	291.796.709.000
205	Kab. Banyumas	-	39.577.682.000	-	378.545.183.000	418.122.865.000	-	39.577.682.000	-	378.545.183.000	418.122.865.000
206	Kab. Batang	-	86.872.377.000	-	193.031.345.000	279.903.722.000	-	86.872.377.000	-	193.031.345.000	279.903.722.000
207	Kab. Blora	-	47.710.729.000	-	267.071.340.000	314.782.069.000	-	47.710.729.000	-	267.071.340.000	314.782.069.000
208	Kab. Boyolali	-	106.978.179.000	-	216.961.458.000	323.959.637.000	-	106.978.179.000	-	216.961.458.000	323.959.637.000
209	Kab. Brebes	-	-	-	492.478.504.000	492.478.504.000	-	5.318.939.000	-	492.478.504.000	497.798.443.000
210	Kab. Cilacap	-	71.823.372.000	-	293.893.896.000	365.717.268.000	-	71.823.372.000	-	293.893.896.000	365.717.268.000
211	Kab. Demak	-	95.161.483.000	-	284.463.387.000	379.624.870.000	-	95.161.483.000	-	284.463.387.000	379.624.870.000
212	Kab. Grobogan	-	65.057.796.000	-	302.039.754.000	367.097.540.000	-	65.057.796.000	-	302.039.754.000	367.097.540.000
213	Kab. Jepara	-	53.953.320.000	-	247.118.045.000	301.071.365.000	-	53.953.320.000	-	247.118.045.000	301.071.365.000
214	Kab. Karanganyar	-	83.272.655.000	-	186.140.456.000	249.413.111.000	-	83.272.655.000	-	186.140.456.000	249.413.111.000
215	Kab. Kebumen	-	45.243.965.000	-	405.025.865.000	450.269.830.000	-	45.243.965.000	-	405.025.865.000	450.269.830.000
216	Kab. Kendal	-	44.612.446.000	-	248.445.837.000	293.058.283.000	-	49.230.726.000	-	248.445.837.000	297.676.563.000
217	Kab. Klaten	-	57.067.155.000	-	380.848.601.000	437.915.756.000	-	57.067.155.000	-	380.848.601.000	437.915.756.000
218	Kab. Kudus	-	89.301.426.000	-	147.823.481.000	237.124.887.000	-	88.301.426.000	-	147.823.481.000	237.124.887.000
219	Kab. Magelang	-	59.165.462.000	-	391.044.109.000	450.209.571.000	-	59.165.462.000	-	391.044.107.982	450.209.569.982
220	Kab. Pati	-	39.355.375.000	-	426.390.634.000	465.746.009.000	-	39.355.375.000	-	426.390.634.000	465.746.009.000
221	Kab. Pekalongan	-	40.827.086.000	-	293.397.106.000	304.324.192.000	-	40.827.086.000	-	293.397.106.000	304.324.192.000
222	Kab. Pemalang	-	10.629.878.000	-	327.255.494.000	337.885.362.000	-	20.823.828.000	-	327.255.494.000	347.279.412.000
223	Kab. Purbalingga	-	30.676.594.000	-	245.875.204.000	276.551.798.000	-	245.875.204.000	-	245.875.204.000	276.551.798.000
224	Kab. Purworejo	-	62.878.422.000	-	363.993.225.000	426.871.647.000	-	62.878.422.000	-	363.993.225.000	426.871.647.000
225	Kab. Rembang	-	86.746.665.000	-	260.523.814.000	346.270.479.000	-	84.001.845.000	-	260.523.814.000	344.525.659.000
226	Kab. Semarang	-	56.446.874.000	-	184.866.676.000	241.313.550.000	-	56.446.874.000	-	184.866.676.000	241.313.550.000
227	Kab. Sragen	-	45.170.818.000	-	171.103.129.000	216.273.947.000	-	45.170.818.000	-	171.103.129.000	216.273.947.000
228	Kab. Sukoharjo	-	52.189.671.000	-	145.041.137.000	197.231.108.000	-	46.904.112.000	-	144.973.519.600	191.877.631.600
229	Kab. Tegal	-	64.411.379.000	-	358.311.953.000	422.723.332.000	-	64.411.379.000	-	358.311.953.000	422.723.332.000
230	Kab. Temanggung	-	56.311.496.000	-	247.881.875.000	304.193.371.000	-	56.311.496.000	-	247.881.875.000	304.193.371.000
231	Kab. Wonorejo	-	38.503.148.000	-	224.681.357.000	263.184.505.000	-	38.503.148.000	-	224.649.959.500	263.152.107.500
232	Kab. Wates	-	45.074.867.000	-	282.301.519.000	327.376.386.000	-	45.074.867.000	-	282.301.519.000	327.376.386.000
233	Kota Magelang	-	57.423.984.000	-	57.423.984.000	57.423.984.000	-	57.423.984.000	-	-	57.423.984.000
234	Kota Pekalongan	-	58.355.913.000	-	58.355.913.000	58.355.913.000	-	58.355.913.000	-	-	58.355.913.000
235	Kota Salatiga	-	68.096.041.000	-	68.096.041.000	68.096.041.000	-	68.096.041.000	-	-	68,096,041,000
236	Kota Semarang	-	114.971.389.000	-	114.971.389.000	114.971.389.000	-	114.971.389.000	-	-	114,971,389,000
237	Kota Surakarta	-	61.860.673.000	-	61.860.673.000	61.860.673.000	-	61.860.673.000	-	-	61,860,673,000
238	Kota Tegal	-	24.567.556.000	-	24.567.556.000	24.567.556.000	-	24.567.556.000	-	-	24,567,556,000
239	Provinsi DI Yogyakarta	-	68.953.894.880	1.328.000.000.000	-	1.396.953.894.880	-	68.953.894.880	1.328.000.000.000	-	1.396.953.894.880



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 653 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSentif DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
240	Kab. Bantul	-	88.583.558.000	-	105.405.470.000	191.989.028.000	-	88.583.558.000	-	105.405.470.000	191.989.028.000
241	Kab. Gunung Kidul	-	85.794.904.000	-	140.465.795.000	205.260.699.000	-	85.794.904.000	-	140.465.795.000	205.260.699.000
242	Kab. Kulon Progo	-	68.069.773.000	-	93.551.808.000	161.621.581.000	-	68.069.773.000	-	93.551.808.000	161.621.581.000
243	Kab. Sleman	-	73.459.058.000	-	105.030.676.000	178.489.734.000	-	73.459.058.000	-	105.030.676.000	178.489.734.000
244	Kota Yogyakarta	-	83.457.815.000	-	-	83.457.815.000	-	83.457.815.000	-	-	83.457.815.000
245	Provinsi Jawa Timur	-	95.883.168.888	-	-	95.883.168.888	-	95.883.168.888	-	-	95.883.168.888
246	Kab. Bangkalis	-	37.191.773.000	-	327.939.755.000	365.131.528.000	-	37.191.773.000	-	327.939.755.000	365.131.528.000
247	Kab. Banyuwangi	-	94.824.042.000	-	210.904.572.000	305.728.614.000	-	94.824.042.000	-	210.904.572.000	305.728.614.000
248	Kab. Blora	-	47.872.741.000	-	189.098.858.000	236.971.599.000	-	47.872.741.000	-	189.098.858.000	236.971.599.000
249	Kab. Boyolali	-	63.247.800.000	-	362.673.177.000	425.920.977.000	-	63.247.800.000	-	362.673.177.000	425.920.977.000
250	Kab. Brebes	-	19.903.560.000	-	238.217.080.000	258.120.640.000	-	19.903.560.000	-	238.217.080.000	258.120.640.000
251	Kab. Gresik	-	83.381.983.000	-	284.325.494.000	367.707.477.000	-	83.381.983.000	-	284.325.494.000	367.707.477.000
252	Kab. Jember	-	24.279.611.000	-	302.869.947.000	327.149.558.000	-	24.279.611.000	-	302.869.947.000	327.149.558.000
253	Kab. Jombang	-	70.937.477.000	-	276.886.419.000	347.823.896.000	-	70.937.477.000	-	276.886.419.000	347.823.896.000
254	Kab. Kediri	-	53.888.648.000	-	319.175.844.000	372.864.492.000	-	53.888.648.000	-	319.175.844.000	372.864.492.000
255	Kab. Lamongan	-	122.352.374.000	-	386.764.832.000	489.117.206.000	-	122.352.374.000	-	386.764.832.000	489.117.206.000
256	Kab. Lumajang	-	34.236.645.000	-	193.127.732.000	227.364.377.000	-	34.236.645.000	-	193.127.732.000	227.364.377.000
257	Kab. Madura	-	64.337.347.000	-	180.451.289.000	224.788.636.000	-	64.337.347.000	-	180.451.289.000	224.788.636.000
258	Kab. Magelang	-	58.518.414.000	-	169.140.615.000	227.659.029.000	-	58.518.414.000	-	169.140.615.000	227.659.029.000
259	Kab. Malang	-	85.076.215.000	-	379.396.630.000	464.472.845.000	-	85.076.215.000	-	379.396.630.000	464.472.845.000
260	Kab. Mojokerto	-	93.773.671.000	-	234.937.062.000	328.710.733.000	-	93.773.671.000	-	234.937.062.000	328.710.733.000
261	Kab. Ngawi	-	68.127.296.000	-	284.983.204.000	353.110.500.000	-	68.127.296.000	-	284.983.204.000	353.110.500.000
262	Kab. Ngasem	-	64.708.053.000	-	194.961.707.000	259.669.760.000	-	64.708.053.000	-	194.961.707.000	259.669.760.000
263	Kab. Pacitan	-	53.487.161.000	-	148.862.788.000	202.349.949.000	-	53.487.161.000	-	148.862.788.000	202.349.949.000
264	Kab. Pamekasan	-	40.356.621.000	-	202.879.989.000	243.236.610.000	-	40.356.621.000	-	202.879.989.000	243.236.610.000
265	Kab. Ponorogo	-	18.772.412.000	-	385.057.770.000	381.830.182.000	-	18.772.412.000	-	385.057.770.000	381.830.182.000
266	Kab. Probolinggo	-	62.247.092.000	-	254.218.268.000	316.465.360.000	-	62.247.092.000	-	254.218.268.000	316.465.360.000
267	Kab. Purbalingga	-	28.807.752.000	-	428.195.412.000	456.903.164.000	-	28.807.752.000	-	428.195.412.000	456.903.164.000
268	Kab. Sampang	-	47.081.591.000	-	231.242.401.000	278.323.992.000	-	47.081.591.000	-	231.242.401.000	278.323.992.000
269	Kab. Sidoarjo	-	95.055.600.000	-	282.689.108.000	387.744.708.000	-	95.055.600.000	-	282.689.108.000	387.744.708.000
270	Kab. Situbondo	-	55.531.634.000	-	137.842.701.000	193.374.335.000	-	55.531.634.000	-	137.842.701.000	193.374.335.000
271	Kab. Sumedang	-	28.384.645.000	-	317.720.100.000	387.104.745.000	-	28.384.645.000	-	317.720.100.000	387.104.745.000
272	Kab. Tanggulang	-	49.573.436.000	-	153.239.974.000	202.813.410.000	-	49.573.436.000	-	153.239.974.000	202.813.410.000
273	Kab. Tulungagung	-	106.000.581.000	-	260.084.081.000	365.884.662.000	-	106.000.581.000	-	260.084.081.000	365.884.662.000
274	Kab. Tuban	-	33.668.895.000	-	234.886.567.000	268.555.462.000	-	33.668.895.000	-	234.886.567.000	268.555.462.000
275	Kota Blitar	-	56.837.217.000	-	-	56.837.217.000	-	56.837.217.000	-	-	56.837.217.000
276	Kota Kediri	-	40.907.528.000	-	-	40.907.528.000	-	40.907.528.000	-	-	40.907.528.000
277	Kota Madiun	-	73.313.029.000	-	-	73.313.029.000	-	73.313.029.000	-	-	73.313.029.000
278	Kota Malang	-	73.440.909.000	-	-	73.440.909.000	-	73.440.909.000	-	-	73.440.909.000
279	Kota Nopokerto	-	28.495.701.000	-	-	28.495.701.000	-	28.495.701.000	-	-	28.495.701.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 654 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu				Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa
280	Kota Pasuruan	4.271.704.000	-	-	-	4.271.704.000	-	16.725.769.000	-	16.725.769.000
281	Kota Probolinggo	39.702.663.000	-	-	-	39.702.663.000	-	39.702.663.000	-	39.702.663.000
282	Kota Surabaya	122.695.879.000	-	-	-	122.695.879.000	-	122.695.879.000	-	122.695.879.000
283	Kota Batu	35.365.261.000	-	-	28.987.722.000	64.352.983.000	-	35.365.261.000	-	64.352.983.000
284	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	125.000.000	-	125.000.000
285	Kab. Bengkayang	3.504.549.000	-	-	106.863.514.000	117.368.063.000	-	3.504.549.000	-	117.368.063.000
286	Kab. Landak	30.813.655.000	-	-	184.407.675.000	215.221.330.000	-	30.813.655.000	-	215.221.330.000
287	Kab. Kaguas Hulu	18.732.633.000	-	-	271.331.546.000	290.064.179.000	-	18.732.633.000	-	290.064.179.000
288	Kab. Kotawaringin	38.956.750.000	-	-	260.918.092.000	299.874.842.000	-	38.956.750.000	-	299.874.842.000
289	Kab. Mempawah	30.036.915.000	-	-	66.584.359.000	96.621.274.000	-	30.036.915.000	-	96.621.274.000
290	Kab. Sambas	250.000.000	-	-	202.892.034.000	203.142.034.000	-	250.000.000	-	203.142.034.000
291	Kab. Sanggau	58.302.012.000	-	-	152.750.875.000	211.052.887.000	-	58.302.012.000	-	211.052.887.000
292	Kab. Sintang	48.887.973.000	-	-	348.804.262.000	398.492.235.000	-	48.887.973.000	-	398.492.235.000
293	Kota Pontianak	27.627.968.000	-	-	-	27.627.968.000	-	27.627.968.000	-	27.627.968.000
294	Kota Singkawang	7.404.658.000	-	-	-	7.404.658.000	-	7.404.658.000	-	7.404.658.000
295	Kab. Kayong Utara	-	-	-	50.870.713.000	50.870.713.000	-	-	-	50.870.713.000
296	Kab. Kubu Raya	60.483.410.000	-	-	133.198.213.000	193.671.623.000	-	60.483.410.000	-	193.671.623.000
297	Kab. Sekeloa	73.548.396.000	-	-	83.765.630.000	157.314.026.000	-	73.548.396.000	-	157.314.026.000
298	Kab. Melawi	-	-	-	156.406.205.000	156.406.205.000	-	-	-	156.406.205.000
299	Provinsi Kalimantan Tengah	63.222.385.000	-	-	-	63.222.385.000	-	63.222.385.000	-	63.222.385.000
300	Kab. Bako Selatan	53.849.007.000	-	-	85.232.612.000	139.081.619.000	-	53.849.007.000	-	139.081.619.000
301	Kab. Bako Utara	46.362.385.000	-	-	92.744.604.000	139.096.989.000	-	46.362.385.000	-	139.096.989.000
302	Kab. Kapuas	39.562.979.000	-	-	187.846.758.000	227.409.737.000	-	39.562.979.000	-	227.409.737.000
303	Kab. Kotawaringin Barat	81.761.160.000	-	-	81.588.169.000	163.349.329.000	-	81.761.160.000	-	163.349.329.000
304	Kab. Kotawaringin Timur	28.297.831.000	-	-	157.898.385.000	186.196.216.000	-	28.297.831.000	-	186.196.216.000
305	Kota Palangkaraya	54.738.541.000	-	-	-	54.738.541.000	-	54.738.541.000	-	54.738.541.000
306	Kab. Barito Timur	35.466.481.000	-	-	86.215.622.000	121.682.103.000	-	35.466.481.000	-	121.682.103.000
307	Kab. Murung Raya	18.241.318.000	-	-	126.210.460.000	144.451.778.000	-	18.241.318.000	-	144.451.778.000
308	Kab. Pulang Pisau	27.597.284.000	-	-	93.915.684.000	121.512.968.000	-	27.597.284.000	-	121.512.968.000
309	Kab. Gunung Mas	39.387.800.000	-	-	104.021.540.000	143.409.340.000	-	39.387.800.000	-	143.409.340.000
310	Kab. Lahat	53.613.870.000	-	-	76.880.571.000	130.494.441.000	-	53.613.870.000	-	130.494.441.000
311	Kab. Sekeloa	37.445.607.000	-	-	37.445.607.000	74.891.214.000	-	37.445.607.000	-	74.891.214.000
312	Kab. Kutai	10.079.243.000	-	-	147.441.003.000	157.520.246.000	-	10.079.243.000	-	157.520.246.000
313	Kab. Seruyan	-	-	-	105.835.982.000	105.835.982.000	-	-	-	105.835.982.000
314	Provinsi Kalimantan Selatan	63.846.881.000	-	-	-	63.846.881.000	-	63.846.881.000	-	63.846.881.000
315	Kab. Banjar	43.683.822.000	-	-	215.477.025.000	259.160.847.000	-	43.683.822.000	-	259.160.847.000
316	Kab. Barito Kuala	60.367.577.000	-	-	153.420.269.000	213.787.846.000	-	60.367.577.000	-	213.787.846.000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	74.722.884.000	-	-	117.434.196.000	192.156.880.000	-	74.722.884.000	-	192.156.880.000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	9.884.370.000	-	-	126.420.199.000	136.304.569.000	-	9.884.370.000	-	136.304.569.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara	44.477.282.000	-	-	172.389.277.000	216.866.559.000	-	44.477.282.000	-	216.866.559.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 655 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH

Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
320	Kab Kotabaru	52 076 082 000	-	-	189 157 221 000	226 233 303 000	-	52 076 082 000	-	189 157 221 000	219 787 703 500
321	Kab Takalar	60 518 563 000	-	-	107 396 299 000	167 914 861 000	-	37 465 710 000	-	107 396 299 000	144 852 008 000
322	Kab Tanah Laut	62 537 346 000	-	-	107 853 555 000	170 390 900 000	-	73 985 781 000	-	107 508 384 992	181 482 165 992
323	Kab Tapin	50 002 203 000	-	-	102 204 375 000	152 206 578 000	-	60 002 203 000	-	102 204 375 000	152 208 578 000
324	Kota Banjarbaru	70 296 638 000	-	-	-	70 296 638 000	-	70 296 638 000	-	-	70 296 638 000
325	Kota Banjarmasin	82 894 477 000	-	-	-	82 894 477 000	-	82 894 477 000	-	-	82 894 477 000
326	Kab Balangan	62 346 727 000	-	-	119 613 925 000	181 960 562 000	-	62 346 727 000	-	119 672 954 500	180 919 581 500
327	Kab Tanah Bumbu	85 525 226 000	-	-	120 771 786 000	206 297 012 000	-	85 525 226 000	-	120 771 786 000	206 287 012 000
328	Provinsi Kalimantan Timur	72 338 826 000	-	-	-	72 338 826 000	-	84 734 622 000	-	-	84 734 622 000
329	Kab Berau	43 821 893 000	-	-	115 138 296 000	158 960 189 000	-	43 821 893 000	-	114 600 867 800	156 422 550 800
330	Kab Kutai Kartanegara	25 334 156 000	-	-	185 547 777 000	210 881 933 000	-	185 547 777 000	-	202 427 898 000	202 427 898 000
331	Kab Kutai Barat	34 930 612 000	-	-	177 923 483 000	212 854 095 000	-	34 930 612 000	-	177 923 483 000	212 854 095 000
332	Kab Kutai Timur	33 027 245 000	-	-	181 943 313 000	214 970 558 000	-	33 027 245 000	-	181 716 899 854	214 744 144 854
333	Kab Mahakam Ulu	12 463 673 000	-	-	77 626 280 000	90 089 953 000	-	12 463 673 000	-	77 626 277 000	90 089 950 000
334	Kab Paser	52 135 240 000	-	-	125 217 974 000	177 353 214 000	-	43 328 877 000	-	125 182 388 258	168 512 263 258
335	Kota Balikpapan	71 303 699 000	-	-	-	71 303 699 000	-	51 181 537 000	-	-	51 181 537 000
336	Kota Bontang	85 731 300 000	-	-	-	85 731 300 000	-	58 649 027 000	-	-	58 649 027 000
337	Kota Samarinda	35 336 461 000	-	-	-	35 336 461 000	-	35 336 461 000	-	-	35 336 461 000
338	Kab Paseran Pasar Utara	27 240 345 000	-	-	36 490 369 000	63 730 714 000	-	22 240 345 000	-	36 490 369 000	63 730 714 000
339	Provinsi Kalimantan Utara	47 482 275 000	-	-	-	47 482 275 000	-	47 482 275 000	-	-	47 482 275 000
340	Kab Buhaya	14 069 932 000	-	-	88 787 882 000	102 857 814 000	-	14 069 932 000	-	88 787 882 000	102 857 814 000
341	Kab Malinau	21 801 351 000	-	-	157 973 035 000	179 574 386 000	-	21 801 351 000	-	157 973 035 000	179 574 386 000
342	Kab Nunukan	38 854 741 000	-	-	193 752 489 000	232 607 230 000	-	38 854 741 000	-	193 752 489 000	232 607 210 000
343	Kab Tana Tidung	26 034 690 000	-	-	42 108 006 000	68 143 696 000	-	26 034 690 000	-	42 109 006 000	68 143 696 000
344	Kota Tarakan	14 163 285 000	-	-	-	14 163 285 000	-	37 226 118 000	-	-	37 226 118 000
345	Provinsi Sulawesi Utara	28 367 899 000	-	-	-	28 367 899 000	-	28 367 899 000	-	-	28 367 899 000
346	Kab Bolaang Mongondow	14 940 580 000	-	-	161 562 494 000	176 503 074 000	-	14 940 580 000	-	161 562 493 800	176 503 083 800
347	Kab Minahasa	43 394 136 000	-	-	170 710 121 000	212 104 257 000	-	41 394 136 000	-	170 672 568 926	212 066 704 926
348	Kab Sangihe	40 874 103 000	-	-	113 931 470 000	154 805 573 000	-	40 874 103 000	-	113 931 470 000	154 805 573 000
349	Kota Bitung	17 473 669 000	-	-	-	17 473 669 000	-	17 473 669 000	-	-	17 473 669 000
350	Kota Manado	56 604 015 000	-	-	-	56 604 015 000	-	56 604 015 000	-	-	56 604 015 000
351	Kab Kepulauan Talaud	29 257 832 000	-	-	113 984 531 000	143 242 363 000	-	29 257 832 000	-	112 907 470 228	142 165 102 228
352	Kab Minahasa Selatan	28 737 016 000	-	-	138 430 303 000	167 167 319 000	-	28 737 016 000	-	138 422 580 500	167 158 878 500
353	Kab Minahasa Tenggara	17 425 669 000	-	-	106 114 696 000	123 540 365 000	-	17 425 669 000	-	106 114 696 000	123 540 365 000
354	Kab Kepulauan Sula Tagulandang Buro	51 728 725 000	-	-	59 328 272 000	121 056 997 000	-	51 728 725 000	-	59 328 272 000	121 056 997 000
355	Kota Katobago	21 533 086 000	-	-	22 362 109 000	43 895 205 000	-	21 533 086 000	-	22 362 109 000	43 895 205 000
356	Kab Bolaang Mongondow Timur	18 117 034 000	-	-	58 485 332 000	84 612 366 000	-	18 117 034 000	-	58 485 332 000	84 612 366 000
357	Kab Bolaang Mongondow Selatan	28 717 447 000	-	-	70 782 060 000	99 499 507 000	-	28 717 447 000	-	70 782 060 000	99 499 507 000
358	Kota Tomohon	78 377 116 000	-	-	-	78 377 116 000	-	78 377 116 000	-	-	78 377 116 000
359	Kab Minahasa Utara	28 978 492 000	-	-	103 179 193 000	133 157 685 000	-	28 978 492 000	-	103 023 890 200	133 002 181 200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 656 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa
360	Kab. Bojonegara Mangrove Utara	33.341.265.000	-	-	86.362.113.000	119.703.378.000	33.341.265.000	-	-	86.362.113.000
361	Provinsi Gorontalo	32.421.158.000	-	-	32.421.158.000	32.421.158.000	32.421.158.000	-	-	32.421.158.000
362	Kab. Boalemo	18.584.784.000	-	-	91.444.009.000	110.028.793.000	18.584.784.000	-	-	91.444.009.000
363	Kab. Gorontalo	30.466.918.000	-	-	211.803.144.000	242.270.062.000	30.466.918.000	-	-	211.803.126.000
364	Kota Gorontalo	29.484.275.000	-	-	-	29.484.275.000	29.484.275.000	-	-	29.484.275.000
365	Kab. Pohuwato	31.836.384.000	-	-	88.483.317.000	120.319.701.000	31.836.384.000	-	-	88.333.820.412
366	Kab. Gorontalo Utara	48.701.892.000	-	-	103.010.201.000	152.712.093.000	48.701.892.000	-	-	102.877.010.138
367	Kab. Bone Bolango	52.128.432.000	-	-	142.178.740.000	194.306.172.000	52.128.432.000	-	-	142.176.740.000
368	Provinsi Sulawesi Tengah	24.928.624.000	-	-	24.928.624.000	24.928.624.000	24.928.624.000	-	-	24.928.624.000
369	Kab. Banggai	-	-	-	234.192.435.000	234.192.435.000	-	-	-	234.192.435.000
370	Kab. Banggai Laut	-	-	-	56.416.593.000	56.416.593.000	-	-	-	56.416.593.000
371	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	114.114.949.000	114.114.949.000	-	-	-	113.787.207.343
372	Kab. Buol	-	-	-	93.537.508.000	141.273.391.000	-	-	-	93.537.508.000
373	Kab. Taltok	-	-	-	90.151.991.000	90.151.991.000	-	-	-	90.151.991.000
374	Kab. Donggala	-	-	-	142.080.824.000	142.080.824.000	-	-	-	141.919.150.400
375	Kab. Marowali	-	-	-	104.495.355.000	186.887.870.000	-	-	-	104.494.629.000
376	Kab. Morowali Utara	-	-	-	114.176.402.000	114.176.402.000	-	-	-	114.004.184.600
377	Kab. Pasa	-	-	-	132.876.034.000	195.436.681.000	-	-	-	132.876.034.000
378	Kota Palu	-	-	-	31.231.328.000	31.231.328.000	-	-	-	31.231.328.000
379	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	18.368.829.000	237.328.945.775	-	-	-	18.368.829.000
380	Kab. Sigi	-	-	-	21.542.058.000	189.548.387.000	-	-	-	21.542.058.000
381	Kab. Tojo Una-Una	-	-	-	28.578.741.000	157.271.944.000	-	-	-	28.578.741.000
382	Provinsi Sulawesi Selatan	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000
383	Kab. Bantaeng	-	-	-	45.142.373.000	78.487.836.000	-	-	-	45.142.373.000
384	Kab. Barru	-	-	-	52.438.178.000	88.411.243.000	-	-	-	52.438.178.000
385	Kab. Bone	-	-	-	333.787.856.000	375.498.413.000	-	-	-	333.787.856.000
386	Kab. Bulukumba	-	-	-	49.163.543.000	109.548.109.000	-	-	-	49.163.543.000
387	Kab. Enrekang	-	-	-	56.845.005.000	115.950.564.000	-	-	-	56.845.005.000
388	Kab. Gowa	-	-	-	51.144.603.000	146.733.217.000	-	-	-	51.144.603.000
389	Kab. Jangjono	-	-	-	15.633.258.000	105.932.176.000	-	-	-	15.633.258.000
390	Kab. Luwu	-	-	-	27.430.787.000	193.005.440.000	-	-	-	27.430.787.000
391	Kab. Luwu Utara	-	-	-	52.625.487.000	172.862.387.000	-	-	-	52.625.487.000
392	Kab. Maros	-	-	-	44.575.598.000	87.203.723.000	-	-	-	44.575.598.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	71.528.276.000	71.528.276.000	-	-	-	71.528.276.000
394	Kab. Pinrang	-	-	-	68.215.483.000	82.828.748.000	-	-	-	68.215.483.000
395	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	16.523.889.000	84.532.957.000	-	-	-	16.523.889.000
396	Kab. Selayar	-	-	-	31.409.840.000	66.571.092.000	-	-	-	31.409.840.000
397	Kab. Soppeng	-	-	-	22.779.311.000	72.163.881.000	-	-	-	22.779.311.000
398	Kab. Takalar	-	-	-	9.877.479.000	51.485.291.000	-	-	-	9.877.479.000
399	Kab. Takalar	-	-	-	26.101.880.000	83.927.455.000	-	-	-	26.101.880.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 657 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa
400	Kab. Tana Toraja	-	-	-	124.549.994.000	124.549.994.000	-	-	-	123.485.529.000
401	Kab. Wajo	-	34.794.649.000	-	120.444.939.000	155.239.588.000	-	34.794.649.000	-	120.444.939.000
402	Kota Pangarepe	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
403	Kab. Toraja Utara	-	10.639.878.000	-	136.239.743.000	146.879.621.000	-	10.639.878.000	-	136.239.739.000
404	Kota Makassar	-	74.623.320.000	-	-	74.623.320.000	-	-	-	74.623.320.000
405	Kota Palopo	-	8.983.797.000	-	-	8.983.797.000	-	-	-	8.983.797.000
406	Kab. Luwu Timur	-	-	-	115.448.707.000	115.448.707.000	-	-	-	115.448.707.000
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	8.417.248.000	-	-	8.417.248.000	-	8.417.248.000	-	-
408	Kab. Majene	-	11.289.245.000	-	85.197.974.000	76.477.219.000	-	11.289.245.000	-	85.197.974.000
409	Kab. Mamuju	-	-	-	80.981.051.000	80.981.051.000	-	-	-	80.981.051.000
410	Kab. Mamuju Tengah	-	30.812.878.000	-	54.654.084.000	85.466.962.000	-	30.812.878.000	-	54.654.084.000
411	Kab. Palawahi Mandar	-	8.222.783.000	-	181.333.063.000	189.555.846.000	-	8.222.783.000	-	181.333.063.000
412	Kab. Mamasa	-	14.452.365.000	-	146.877.495.000	161.329.860.000	-	14.452.365.000	-	146.877.495.000
413	Kab. Pangkep	-	65.571.497.000	-	59.504.394.000	125.075.891.000	-	65.571.497.000	-	59.447.230.804
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	48.933.421.000	-	-	48.933.421.000	-	48.933.421.000	-	-
415	Kab. Buton	-	61.073.328.000	-	73.417.992.000	134.491.320.000	-	61.073.328.000	-	73.417.992.000
416	Kab. Konawe	-	67.100.645.000	-	223.449.380.000	290.550.025.000	-	67.100.645.000	-	182.198.444.000
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	-	75.258.167.000	75.258.167.000	-	-	-	75.258.167.000
418	Kab. Kolaka	-	54.660.072.000	-	86.724.186.000	141.384.258.000	-	54.660.072.000	-	86.092.938.600
419	Kab. Kolaka Timur	-	26.793.690.000	-	96.682.166.000	123.475.856.000	-	26.793.690.000	-	96.682.166.000
420	Kab. Muna	-	14.940.590.000	-	124.184.357.000	139.124.947.000	-	14.940.590.000	-	124.184.357.000
421	Kota Kendari	-	43.869.490.000	-	-	43.869.490.000	-	-	-	43.869.490.000
422	Kota Baubau	-	44.855.721.000	-	-	44.855.721.000	-	-	-	44.855.721.000
423	Kab. Konawe Selatan	-	43.714.974.000	-	251.853.568.000	295.568.542.000	-	43.714.974.000	-	251.836.088.390
424	Kab. Bombana	-	38.636.812.000	-	108.166.652.000	146.803.464.000	-	34.455.941.000	-	108.166.652.000
425	Kab. Konawe Utara	-	27.889.037.000	-	125.761.543.000	153.650.580.000	-	27.889.037.000	-	125.761.543.000
426	Kab. Buton Utara	-	250.000.000	-	69.990.946.000	70.240.946.000	-	75.111.901.000	-	69.990.946.000
427	Kab. Wakatobi	-	8.238.782.000	-	86.967.168.000	95.205.950.000	-	8.238.782.000	-	86.967.168.000
428	Kab. Kolaka Utara	-	23.334.038.000	-	127.185.139.000	150.523.177.000	-	23.334.038.000	-	127.185.139.000
429	Kab. Muna Barat	-	9.952.610.000	-	79.482.630.000	89.435.240.000	-	9.952.610.000	-	79.482.630.000
430	Kab. Buton Tengah	-	31.818.600.000	-	64.836.461.000	96.655.061.000	-	31.818.600.000	-	64.836.461.000
431	Kab. Buton Selatan	-	25.314.618.000	-	81.159.128.000	106.473.746.000	-	25.314.618.000	-	81.159.128.000
432	Provinsi Bali	-	78.802.282.000	-	-	78.802.282.000	-	78.802.282.000	-	-
433	Kab. Badung	-	96.352.731.000	-	56.719.868.000	153.072.599.000	-	96.352.731.000	-	56.719.868.000
434	Kab. Bangli	-	53.462.813.000	-	62.757.351.000	116.220.164.000	-	53.462.813.000	-	62.757.351.000
435	Kab. Buleleng	-	50.118.451.000	-	125.791.128.000	175.909.579.000	-	50.118.451.000	-	125.791.128.000
436	Kab. Gianyar	-	65.182.515.000	-	61.633.017.000	126.815.532.000	-	65.182.515.000	-	61.633.017.000
437	Kab. Jembrana	-	98.075.145.000	-	51.818.011.000	149.893.156.000	-	98.075.145.000	-	51.818.011.000
438	Kab. Karangasem	-	38.250.487.000	-	61.803.656.000	100.054.143.000	-	38.250.487.000	-	61.803.656.000
439	Kab. Klungkung	-	90.682.659.000	-	53.494.770.000	144.177.429.000	-	90.682.659.000	-	53.494.770.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 658 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
440	Kab. Tabanan	-	87.490.382.000	-	121.485.538.000	208.975.920.000	-	87.490.382.000	-	121.485.538.000	208.975.920.000
441	Kota Denpasar	-	35.367.717.000	-	35.621.601.000	121.889.318.000	-	35.367.717.000	-	35.621.601.000	121.889.318.000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	39.135.054.000	-	-	39.135.054.000	-	39.135.054.000	-	-	39.135.054.000
443	Kab. Bano	-	46.915.708.000	-	187.383.189.000	234.308.877.000	-	46.915.708.000	-	187.383.189.000	234.308.877.000
444	Kab. Dompu	-	12.202.472.000	-	73.451.503.000	85.653.975.000	-	12.202.472.000	-	73.451.503.000	85.653.975.000
445	Kab. Lombok Barat	-	53.254.212.000	-	180.436.939.000	213.691.151.000	-	53.254.212.000	-	180.436.939.000	213.691.151.000
446	Kab. Lombok Tengah	-	24.928.083.000	-	207.840.370.000	232.768.463.000	-	24.928.083.000	-	207.840.370.000	232.768.463.000
447	Kab. Lombok Timur	-	30.810.888.000	-	313.801.225.000	344.612.113.000	-	30.810.888.000	-	313.801.225.000	344.612.113.000
448	Kab. Sumbawa	-	53.755.536.000	-	148.633.976.000	200.389.512.000	-	53.755.536.000	-	148.633.976.000	200.389.512.000
449	Kota Mataram	-	63.730.680.000	-	63.730.680.000	63.730.680.000	-	63.730.680.000	-	63.730.680.000	63.730.680.000
450	Kab. Lombok Utara	-	45.725.321.000	-	71.068.014.000	116.813.335.000	-	45.725.321.000	-	71.068.014.000	116.813.335.000
451	Kota Bima	-	19.485.769.000	-	19.485.769.000	19.485.769.000	-	19.485.769.000	-	19.485.769.000	19.485.769.000
452	Kab. Sumbawa Barat	-	66.795.082.000	-	61.955.960.000	128.727.022.000	-	66.795.082.000	-	61.955.960.000	128.727.022.000
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	15.956.467.000	-	-	15.956.467.000	-	15.956.467.000	-	-	15.956.467.000
454	Kab. Alor	-	-	-	164.822.155.000	164.822.155.000	-	-	-	164.822.155.000	164.822.155.000
455	Kab. Bata	-	39.171.332.000	-	87.504.939.000	126.676.271.000	-	39.171.332.000	-	87.504.939.000	126.676.271.000
456	Kab. Ende	-	14.940.589.000	-	199.730.688.000	214.671.258.000	-	14.940.589.000	-	199.730.688.000	214.671.258.000
457	Kab. Flores Timur	-	-	-	174.470.905.000	174.470.905.000	-	-	-	174.470.905.000	174.470.905.000
458	Kab. Kupang	-	185.402.239.000	-	185.402.239.000	185.402.239.000	-	185.402.239.000	-	185.402.239.000	185.402.239.000
459	Kab. Lembata	-	3.000.000.000	-	133.447.188.000	136.447.188.000	-	3.000.000.000	-	133.447.188.000	136.447.188.000
460	Kab. Malaka	-	-	-	112.668.518.000	112.668.518.000	-	-	-	112.668.518.000	112.668.518.000
461	Kab. Manggarai	-	34.457.484.000	-	147.565.938.000	182.023.433.000	-	34.457.484.000	-	147.565.938.000	182.023.433.000
462	Kab. Ngada	-	48.960.134.000	-	110.760.227.000	159.720.361.000	-	48.960.134.000	-	110.760.227.000	159.720.361.000
463	Kab. Sikka	-	-	-	152.764.232.000	152.764.232.000	-	-	-	152.764.232.000	152.764.232.000
464	Kab. Sumba Barat	-	3.000.000.000	-	87.786.467.000	90.786.467.000	-	3.000.000.000	-	87.786.467.000	90.786.467.000
465	Kab. Sumba Timur	-	48.048.781.000	-	129.358.568.000	177.403.349.000	-	48.048.781.000	-	129.358.568.000	177.403.349.000
466	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	289.840.128.000	289.840.128.000	-	-	-	289.840.128.000	289.840.128.000
467	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	163.541.992.000	163.541.992.000	-	-	-	163.541.992.000	163.541.992.000
468	Kota Kupang	-	11.924.596.000	-	-	11.924.596.000	-	11.924.596.000	-	-	11.924.596.000
469	Kab. Rote Ndao	-	2.000.000.000	-	108.362.083.000	110.362.083.000	-	2.000.000.000	-	108.362.083.000	110.362.083.000
470	Kab. Nagekeo	-	23.710.906.000	-	89.154.916.000	112.865.822.000	-	23.710.906.000	-	89.154.916.000	112.865.822.000
471	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	72.220.578.000	72.220.578.000	-	-	-	72.220.578.000	72.220.578.000
472	Kab. Sumba Barat Daya	-	6.900.000.000	-	239.592.238.000	246.492.238.000	-	6.900.000.000	-	239.592.238.000	246.492.238.000
473	Kab. Manggarai Timur	-	196.297.095.000	-	204.964.341.000	401.261.436.000	-	196.297.095.000	-	204.964.341.000	401.261.436.000
474	Kab. Sabu Raga	-	-	-	84.586.861.000	84.586.861.000	-	-	-	84.586.861.000	84.586.861.000
475	Kab. Manggarai Barat	-	50.885.951.000	-	145.502.115.000	196.387.966.000	-	50.885.951.000	-	145.502.115.000	196.387.966.000
476	Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	31.873.082.000	-	85.596.312.000	117.469.394.000	-	31.873.082.000	-	85.596.312.000	117.469.394.000
478	Kab. Maluku Tengah	-	8.733.797.000	-	179.858.090.000	188.591.887.000	-	8.733.797.000	-	179.858.090.000	188.591.887.000
479	Kab. Maluku Tenggara	-	8.378.002.000	-	147.029.186.000	155.407.188.000	-	8.378.002.000	-	147.029.186.000	155.407.188.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 659 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu			Realisasi		
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
480	Kab. Baru	40 747 237 000	40 747 237 000	125 597 981 000	40 747 237 000	125 597 981 000	125 597 981 000
481	Kota Ambon	35 326 206 000	35 326 206 000	72 434 371 000	35 326 206 000	72 434 371 000	72 434 371 000
482	Kab. Seram Bagian Barat	27 905 745 000	27 905 745 000	135 871 918 000	27 905 745 000	135 871 918 000	135 871 918 000
483	Kab. Seram Bagian Timur	161 378 367 000	161 378 367 000	161 378 367 000	161 378 367 000	161 378 367 000	161 378 367 000
484	Kab. Maluku Barat Daya	107 626 341 000	107 626 341 000	107 626 341 000	107 626 341 000	107 626 341 000	107 626 341 000
485	Kab. Buru Selatan	88 351 815 000	88 351 815 000	88 351 815 000	88 351 815 000	88 351 815 000	88 351 815 000
486	Kab. Kepulauan Aru	111 108 207 000	111 108 207 000	111 108 207 000	111 108 207 000	111 108 207 000	111 108 207 000
487	Kota Tual	7 154 659 000	7 154 659 000	42 723 679 000	7 154 659 000	42 723 679 000	42 723 679 000
488	Provinsi Maluku Utara	15 833 258 000	15 833 258 000	15 833 258 000	15 833 258 000	15 833 258 000	15 833 258 000
489	Kab. Halmahera Tengah	53 122 572 000	53 122 572 000	113 923 534 000	53 122 572 000	113 923 534 000	113 923 534 000
490	Kab. Halmahera Barat	25 652 262 000	25 652 262 000	132 394 097 000	25 652 262 000	132 394 097 000	132 394 097 000
491	Kota Ternate	64 961 612 000	64 961 612 000	64 961 612 000	64 961 612 000	64 961 612 000	64 961 612 000
492	Kab. Halmahera Timur	39 718 831 000	39 718 831 000	129 959 829 000	39 718 831 000	129 959 829 000	129 959 829 000
493	Kota Tidore Kepulauan	37 417 198 000	37 417 198 000	85 435 947 000	37 417 198 000	85 435 947 000	85 435 947 000
494	Kab. Kepulauan Sula	14 446 531 000	14 446 531 000	90 898 640 000	14 446 531 000	90 898 640 000	90 898 640 000
495	Kab. Pulau Morotai	39 279 454 000	39 279 454 000	116 706 331 000	39 279 454 000	116 706 331 000	116 706 331 000
496	Kab. Pulau Taliabu	66 142 254 000	66 142 254 000	66 142 254 000	66 142 254 000	66 142 254 000	66 142 254 000
497	Kab. Halmahera Selatan	11 924 596 000	11 924 596 000	208 366 417 000	11 924 596 000	208 366 417 000	208 366 417 000
498	Kab. Halmahera Utara	17 305 630 000	17 305 630 000	171 014 042 000	17 305 630 000	171 014 042 000	171 014 042 000
499	Provinsi Papua	7 999 969 920 000	7 999 969 920 000	7 999 969 920 000	7 999 969 920 000	7 999 969 920 000	7 999 969 920 000
500	Kab. Yalimo	21 006 277 000	21 006 277 000	246 628 196 000	21 006 277 000	246 628 196 000	246 628 196 000
501	Kab. Lanny Jaya	346 062 585 000	346 062 585 000	346 062 585 000	346 062 585 000	346 062 585 000	346 062 585 000
502	Kab. Bani Wae	206 938 478 000	206 938 478 000	206 938 478 000	206 938 478 000	206 938 478 000	206 938 478 000
503	Kab. Jayapura	132 523 592 000	132 523 592 000	142 553 417 000	132 523 592 000	142 553 417 000	142 553 417 000
504	Kab. Jayawijaya	3 000 000 000	3 000 000 000	281 993 719 000	3 000 000 000	281 993 719 000	281 993 719 000
505	Kab. Merauke	226 138 406 000	226 138 406 000	226 138 406 000	226 138 406 000	226 138 406 000	226 138 406 000
506	Kab. Mimika	55 893 532 000	55 893 532 000	204 673 271 000	55 893 532 000	204 673 271 000	204 673 271 000
507	Kab. Nabire	11 348 813 000	11 348 813 000	105 675 227 000	11 348 813 000	105 675 227 000	105 675 227 000
508	Kab. Paniai	198 200 708 000	198 200 708 000	198 200 708 000	198 200 708 000	198 200 708 000	198 200 708 000
509	Kab. Puncak Jaya	12 589 569 000	12 589 569 000	290 823 709 000	12 589 569 000	290 823 709 000	290 823 709 000
510	Kab. Kepulauan Yapen	138 720 355 000	138 720 355 000	138 720 355 000	138 720 355 000	138 720 355 000	138 720 355 000
511	Kota Jayapura	23 941 890 000	23 941 890 000	50 341 716 000	23 941 890 000	50 341 716 000	50 341 716 000
512	Kab. Sarmi	105 882 367 000	105 882 367 000	118 571 836 000	105 882 367 000	118 571 836 000	118 571 836 000
513	Kab. Keerom	14 088 932 000	14 088 932 000	112 545 193 000	14 088 932 000	112 545 193 000	112 545 193 000
514	Kab. Yahukimo	409 146 088 000	409 146 088 000	419 343 863 000	409 146 088 000	419 343 863 000	409 146 088 000
515	Kab. Pegunungan Bintang	262 585 131 000	262 585 131 000	262 585 131 000	262 585 131 000	262 585 131 000	262 585 131 000
516	Kab. Tolikara	422 326 878 000	422 326 878 000	422 326 878 000	422 326 878 000	422 326 878 000	422 326 878 000
517	Kab. Boven Digoel	143 825 230 000	143 825 230 000	143 825 230 000	143 825 230 000	143 825 230 000	143 825 230 000
518	Kab. Mappi	188 375 681 000	188 375 681 000	188 375 681 000	188 375 681 000	188 375 681 000	188 375 681 000
519	Kab. Asmat	249 773 820 000	249 773 820 000	249 773 820 000	249 773 820 000	249 773 820 000	249 773 820 000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 660 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu			Realisasi		
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY
520	Kab. Marangeni		12.658.029.000			12.658.029.000	
521	Kab. Mamberamo Raya			104.244.371.000	116.903.400.000		104.244.371.000
522	Kab. Mamberamo Tengah			107.542.582.000	107.542.582.000		107.542.582.000
523	Kab. Nduga			94.118.210.000	94.118.210.000		94.118.210.000
524	Kab. Dageun			216.457.263.000	216.457.263.000		216.457.263.000
525	Kab. Intan Jaya			116.055.432.000	116.055.432.000		116.055.432.000
526	Kab. Puncak			142.477.523.000	142.477.523.000		142.477.523.000
527	Kab. Deyan			213.411.610.000	213.411.610.000		213.411.610.000
528	Kab. Supiori			93.708.402.000	93.708.402.000		93.708.402.000
529	Provinsi Papua Barat	4.001.479.428.000	17.365.183.000	43.347.119.000	4.018.844.531.000	17.365.183.000	43.347.119.000
530	Kab. Serong		42.076.555.000			42.076.555.000	
531	Kab. Manikwani			176.341.863.000	218.418.519.000		176.341.863.000
532	Kab. Manokwari Selatan			143.530.587.000	143.530.587.000		143.530.587.000
533	Kab. Fak Fak			64.829.871.000	64.829.871.000		64.829.871.000
534	Kota Sorong		29.337.770.000			29.337.770.000	
535	Kab. Papeenangan Arak		27.412.352.000			27.412.352.000	
536	Kab. Sorong Selatan			142.947.613.000	142.947.613.000		142.947.613.000
537	Kab. Raja Ampat		7.522.959.000			7.522.959.000	
538	Kab. Teluk Wondane		106.568.057.000			106.568.057.000	
539	Kab. Tambora		50.877.815.000			50.877.815.000	
540	Kab. Tanimbar		117.815.333.000			117.815.333.000	
541	Kab. Maybrat		21.144.403.000			21.144.403.000	
542	Kab. Kaimana			73.545.682.000	94.690.090.000		73.545.682.000
	Jumlah	19.558.727.896.000	18.580.898.000.000	1.320.001.889.000	71.193.840.000.000	18.558.285.266.000	1.320.001.889.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 661 -

LAMPIRAN 4

RINCIAN REALISASI

PROGRAM PC-PEN

TAHUN 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 662 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
1	Perlindungan Sosial	230.280.000.000.000	230.031.454.878.153	216.587.101.593.829	
	- Program Keluarga Harapan (PKH)	41.970.000.000.000	41.973.588.000.000	41.940.368.869.358	Kemensos
	a. PKH		36.713.986.000.000	36.683.018.869.358	
	b. Bansos beras bagi penerima PKH		4.505.850.000.000	4.505.850.000.000	
	c. Biaya Distribusi Bansos beras bagi penerima PKH		753.750.000.000	751.500.000.000	
	- Sembako (BNPT)	46.200.000.000.000	42.609.011.689.480	43.888.985.603.016	Kemensos
	a. Sembako (BPNT)		42.590.761.689.480	39.376.633.472.066	
	b. Biaya kirim paket Sembako (BPNT) Papua-Papua Barat		18.250.000.000	12.462.850.950	
	c. Bansos Tunai (BST) bagi penerima sembako non PKH		4.499.889.280.000	4.499.889.280.000	
	- Paket Sembako Jabodetabek	7.000.000.000.000	7.100.874.000.000	7.094.322.604.917	Kemensos
	a. Paket Sembako		6.732.786.600.000	6.726.251.483.944	
	b. Biaya Kirim Paket Sembako		368.087.400.000	368.071.120.973	
	- Bansos Tunai (BST) Non Jabodetabek	33.610.000.000.000	33.067.963.599.673	32.603.359.599.673	Kemensos
	a. Bansos Tunai (BST)		32.139.126.000.000	31.674.522.000.000	
	b. Biaya Distribusi Bansos Tunai (BST)		928.837.599.673	928.837.599.673	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 663 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	- Kartu Prakerja	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924	BA 999.08
	- Diskon Listrik	11.540.000.000.000	11.618.579.841.000	11.448.439.134.297	BA 999.07
	- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	31.800.000.000.000	31.800.000.000.000	23.737.018.473.021	BA 999.05
	- Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29.780.000.000.000	29.848.063.743.000	29.483.840.923.223	
	a. Subsidi gaji/upah (Kemenakertrans)			29.483.021.996.500	Kemenakertrans
	b. Safeguarding (Kemenakertrans)			818.926.723	
	- Subsidi Kuota Internet/ Kemendikbud	3.820.000.000.000	6.725.354.020.000	3.828.410.431.000	Kemendikbud
	- Bantuan Internet dan Bantuan Tunai Guru Kemenag	390.000.000.000	1.185.875.985.000	234.847.665.000	Kemenag
	- Bantuan Gaji Guru Honoror Kemenag	1.150.000.000.000	1.159.448.400.000	1.132.568.638.400	Kemenag
	- Bantuan Gaji Guru Honoror Kemendikbud	2.940.000.000.000	2.942.697.600.000	2.942.697.600.000	Kemendikbud
2	Kesehatan	99.500.000.000.000	62.748.728.065.221	62.674.747.638.246	
	- Belanja Penanganan Covid Lainnya	43.410.000.000.000	43.590.960.832.221	41.773.346.302.532	
	a. Kemenkes		23.283.390.802.581	22.103.261.069.765	Kemenkes
	b. Kemnhan/TNI		9.500.006.685.640	9.499.989.382.650	Kemenhan
	c. Polri		3.145.407.026.000	3.141.616.239.091	POLRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 664 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	d. BNPB (Gabungan)		6.588.960.590.000	5.969.789.278.021	BNPB
	e. BIN		817.677.915.000	816.874.770.200	BIN
	f. Kominfo: Internet Puskesmas		161.008.840.000	161.005.987.685	Kominfo
	g. Kemenristek (BRIN)		94.509.173.000	80.809.575.120	Kemenristek/BRIN
	• Insentif Tenaga Medis	7.660.000.000.000	8.828.055.841.000	8.826.352.577.424	
	a. Insentif Nakes Pusat (Kemenkes)		4.654.725.841.000	4.653.033.999.048	Kemenkes
	b. Insentif Nakes Daerah (TKDD)		4.173.330.000.000	4.173.318.578.376	BA 999.05
	• Santunan Tenaga Medis	60.000.000.000	60.000.000.000	58.800.000.000	Kemenkes
	• Bantuan Iuran JKN	4.110.000.000.000	4.118.336.624.000	4.118.240.745.500	BA 999.08
	• Gugus Tugas Covid-19	3.220.000.000.000	3.503.411.784.000	3.210.480.608.210	BNPB
	• Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	4.600.000.000.000	2.014.116.984.000	4.053.681.404.580	
	a. DTP		2.014.116.984.000	1.936.218.632.936	BA 999.07 dan Non DIPA
	b. Non-DTP		Non DIPA	2.117.462.771.644	
	• Penanganan Vaksin Covid-19 Tahun 2020	36.440.000.000.000	633.846.000.000	633.846.000.000	Kemenkes
3	Dukungan Sektor K/L & Pemda	67.860.000.000.000	72.417.467.522.576	65.222.482.027.735	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 665 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	Padat Karya K/L	20.960.000.000.000	21.542.047.201.855	19.791.640.948.095	
	a. Kementerian Pertanian		994.532.565.000	976.033.298.901	Kementan
	b. Kementerian Perhubungan		7.966.761.430.855	7.108.681.201.726	Kemenhub
	c. Kementerian Kelautan Perikanan		175.544.514.000	171.613.526.419	Kemen Kelautan & Perikanan
	d. Kementerian PUPR		12.405.208.692.000	11.535.312.921.049	Kemen PUPR
	Insentif Perumahan	540.000.000.000	1.500.790.030.000	482.785.765.525	BA 999.07
	Pariwisata	2.850.000.000.000	3.978.823.754.000	2.897.280.569.198	
	a. Dukungan kepada Pemda		3.300.000.000.000	2.264.647.247.182	BA 999.05
	b. Dukungan Pariwisata Kemenparekraf		372.642.830.000	329.476.999.521	Kemenparekraf
	c. Dukungan Kemenhub		306.180.924.000	303.156.322.495	Kemenhub
	DID Pemulihan Ekonomi	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	4.955.285.206.000	BA 999.05
	Cadangan DAK Fisik	7.290.000.000.000	8.715.745.783.000	7.285.623.090.246	BA 999.05
	Fasilitas Pinjaman Daerah	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235	BA 999.03
	Cadangan perluasan	11.220.000.000.000	11.680.060.753.721	11.047.238.881.436	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 666 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEM
	a. Kemenag		2.646.511.473.000	2.653.932.732.310	Kemenag
	- Bantuan Ops. Pendidikan & Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren		2.603.315.000.000	2.613.814.929.000	
	- Sertifikasi Daif dan Bantuan Ormas Keagamaan		43.196.473.000	40.117.803.310	
	b. KemenPUPR		1.803.691.153.000	1.663.728.571.253	Kemen PUPR
	- Dukungan pembelian produk rakyat/UMKM		1.363.581.763.000	1.342.102.155.257	
	- Dukungan Prioritas Nasional		254.739.517.000	137.773.841.044	
	- Dukungan utk Food Estate dan Kawasan Industri		185.369.873.000	183.852.574.952	
	c. Kemenaker		533.048.515.000	531.784.194.630	Kemenaker
	- Dampak Covid Bidang Naker			531.784.194.630	
	d. BKPM		84.902.904.000	83.916.739.373	BKPM
	- Peta investasi Proyek Prioritas Strategis			83.916.739.373	
	e. Kementan		1.521.644.541.000	1.330.461.286.108	Kementan
	- Swasembada Gula		137.387.173.000	92.988.110.300	
	- Antisipasi kekurangan pangan akibat covid-19,		1.260.040.868.000	1.115.502.611.608	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT)		124.216.500.000	121.970.564.200	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 667 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	f. KLHK		812.435.435.000	717.005.925.391	KLHK
	- Dukungan Ketahanan pangan terpadu (food Estate)		406.257.935.000	334.885.638.125	
	- Penanaman mangrove seluas 15.000 Hektar		406.177.500.000	382.120.287.266	
	g. KemenATR/BPN		69.835.072.000	61.196.147.877	Kemen ATR/ BPM
	- Food Estate			12.627.996.531	
	- Penyusunan RDTR dan PMO Penataan Ruang Jabodetabek			48.568.151.346	
	h. Kementerian Kelautan dan Perikanan		741.984.921.000	541.524.496.186	Kemen Kelautan & Perikanan
	- Restorasi terumbu karang		153.274.772.000	151.576.087.736	
	- Produktivitas perikanan		588.710.149.000	389.948.408.450	
	i. Kominfo		318.139.119.000	315.830.955.728	Kemenkominfo
	- Komunikasi Publik PEN		318.139.119.000	315.830.955.728	
	j. Tambahan Sertifikasi TKDN		10.648.629.721	10.648.629.721	Kemenperin
	k. Tambahan Subsidi Pupuk		3.137.218.991.000	3.137.209.202.861	
4	Dukungan kepada UMKM	116.300.000.000.000	72.532.223.620.431	112.259.468.378.755	
	- Subsidi Bunga UMKM	12.930.000.000.000	35.401.238.776.000	12.806.502.689.132	BA 999.07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 668 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	- Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan	66.750.000.000.000	Non DIPA	66.750.000.000.000	BA 999.00
	- IJP UMKM	1.500.000.000.000	4.930.000.000.000	1.091.611.029.137	BA 999.07
	- Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	BA 999.03
	- PPh Final UMKM DTP	1.070.000.000.000	1.084.150.594.431	671.166.848.877	BA 999.07
	- Pembiayaan Investasi untuk LPDB KUKM	1.290.000.000.000	1.292.000.000.000	1.292.000.000.000	BA 999.03
	- Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	28.800.000.000.000	28.824.834.250.000	28.648.187.811.609	Kemen KUKM
	a. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)			28.639.162.198.755	
	b. Safeguarding Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro			9.025.612.854	
	- Cadangan UMKM	2.960.000.000.000	Tidak di DIPA-kan		
5	Pembiayaan Korporasi	60.730.000.000.000	65.523.764.200.000	60.729.869.488.357	
	- PMN	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000	BA 999.03
	- Pemberian Pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000	BA 999.03
	- IJP Korporasi	10.000.000.000	4.803.000.000.000	9.105.288.357	BA 999.07
	- Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i>		764.200.000	764.200.000	BA 999.99



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 669 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.A

**Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster**

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	- <i>Stop Loss</i> Penjaminan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	BA 999.03
	- Pembiayaan SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	BA 999.03
6	Insentif Usaha	120.610.000.000.000	11.082.383.325.808	58.377.811.427.970	
	- PPh 21 DTP	4.030.000.000.000	8.811.056.325.808	1.722.767.990.009	BA 999.07
	- Pengurangan Angsuran PPh 25	21.590.000.000.000	Non DIPA	20.625.776.797.644	Non Anggaran
	- Penurunan Tarif PPh Badan	18.780.000.000.000	Non DIPA	12.677.845.239.238	Non Anggaran
	- Pembebasan PPh 22 Impor	13.390.000.000.000	Non DIPA	14.001.829.078.329	Non Anggaran
	- Pengembalian Pendahuluan PPN	7.550.000.000.000	Non DIPA	7.570.475.576.080	Non Anggaran
	- BM DTP	580.000.000.000	583.287.000.000	91.076.746.670	BA 999.07
	- Pembebasan abonemen listrik	1.690.000.000.000	1.688.040.000.000	1.688.040.000.000	BA 999.08
	Bantuan DTP dan Pembebasan abodomen listrik	53.000.000.000.000	Tidak di DIPA-kan		
	TOTAL	695.200.000.000.000	514.336.021.612.189	575.851.480.554.892	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 670 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.B

Rincian Belanja Kementerian/Lembaga Pelaksana Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020

No	BA	Uraian BA	Pagu DIPA	Akun Khusus	Akun Reguler	Realisasi	Barang (52)			Modal (53)			Bansos (57)			Keterangan
							Akun Khusus	Akun Reguler	Total	Akun Khusus	Akun Reguler	Total	Akun Khusus	Akun Reguler	Total	
1	012	Kementerian	9.500.008.685.640	9.499.989.382.650		9.499.989.382.650	4.655.054.184.010		4.655.054.184.010	4.844.935.198.640		4.844.935.198.640				
2	018	Kementerian	2.518.177.106.000	1.261.421.625.808	1.045.072.959.201	2.305.494.585.009	1.138.751.870.608	1.161.929.940.001	2.300.681.810.609	689.191.000	5.113.593.400	5.812.774.400				
3	018	Kementerian	10.691.119.000	10.648.629.721		10.648.629.721	10.648.629.721		10.648.629.721							
4	022	Kemendagri	8.272.942.354.855	375.795.070.089	7.036.942.454.152	7.411.377.524.221	361.577.378.870	31.273.821.153	392.853.200.113	14.217.691.189	7.004.768.503.909	7.018.984.195.108				
5	023	Kemendikbud	9.669.051.829.000	6.771.108.031.000		6.771.108.031.000	6.771.108.031.000		6.771.108.031.000							
6	024	Kemendiknas	28.631.952.443.581	27.449.941.068.813		27.449.941.068.813	19.923.994.709.727	10.832.848.016	24.646.761.658.791	2.800.574.411.022	1.005.001.000	2.802.179.412.022				
7	025	Kemendagri	5.007.315.787.000	4.621.349.036.710		4.621.349.036.710	4.621.349.036.710		4.621.349.036.710							
8	026	Kemendagri	30.381.112.258.000	30.005.489.671.113	10.135.448.740	30.015.625.117.853	30.005.489.671.113		10.135.448.740							
9	027	Kemendagri	129.282.130.774.200	57.721.461.957.838	67.805.574.719.126	125.527.036.676.984	2.048.408.720.845		12.462.850.950							
10	029	Kemendagri	812.435.435.000	4.735.068.454	712.270.856.937	717.005.925.351	328.035.954	691.431.664.656	691.759.700.620		25.246.224.771	25.246.224.771				
11	032	Kemendagri	917.529.435.000	489.211.298.786	223.926.725.819	713.138.022.605	488.614.421.151	223.926.725.819	719.541.546.979	2.595.475.635		2.595.475.635				
12	033	Kemendagri	14.208.899.945.000		13.199.041.492.302	13.199.041.492.302		12.083.153.145.642	12.083.153.145.642	1.115.888.348.680		1.115.888.348.680				
13	040	Kemendagri	389.685.370.000.00	329.476.999.521		329.476.999.521	329.476.999.521		329.476.999.521							
14	042	Kemendagri	94.509.173.000	80.809.575.120		80.809.575.120	30.196.167.120		30.196.167.120	50.623.409.000		50.623.409.000				
15	044	Kemendagri	28.924.834.250.000	29.639.149.873.755	9.038.937.854	28.648.187.811.609	28.800.000.000.000	7.809.618.854	28.648.958.482.609		1.229.319.000	1.229.319.000				
16	050	BNP	817.877.915.000	816.874.770.200		816.874.770.200	816.874.770.200		816.874.770.200							
17	056	Kemendagri	89.835.072.000	4.939.943.944	56.256.203.633	61.196.147.877	4.868.854.456	36.322.885.629	41.191.740.087	71.089.486	19.939.318.304	20.004.407.790				
18	058	Kemendagri	479.147.956.000	476.936.943.411		476.936.943.411	485.983.528.107		485.983.528.107	10.853.415.304		10.853.415.304				
19	060	Palu	3.145.407.026.000	3.141.618.239.081		3.141.618.239.081	1.024.444.210.650		1.024.444.210.650	2.117.172.028.441		2.117.172.028.441				
20	065	BNP	84.902.904.000	80.811.894.576	3.105.044.797	83.616.739.373	77.971.494.678		81.076.539.373	2.840.200.000		2.840.200.000				
21	103	BNP	10.082.312.374.000	9.180.269.886.231		9.180.269.886.231							9.227.458.860.755		9.180.269.886.231	
TOTAL			283.182.605.986.276	198.360.935.764.811	80.108.484.848.861	278.461.408.605.672	100.873.131.114.147	14.272.484.082.267	119.796.608.268.102	9.944.583.108.727	8.173.782.297.044	18.018.365.405.771	64.986.542.097.947	67.812.076.118.178	132.846.434.991.589	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 671 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

Rincian Realisasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Per Klaster
Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Tahun Anggaran 2020

Klaster	BA BUN	PAGU DIPA	REALISASI
A. Kesehatan			10.227.777.956.812
1. Tenaga Medis Daerah (BOK Kesehatan)	999.05	4.173.330.000.000	4.173.318.578.376
2. Bantuan Iuran JKN	999.08	4.118.336.624.000	4.118.240.745.500
3. PPN dan PPh (PMK 28)	999.07	2.014.116.984.000	1.936.218.632.936
B. Perlindungan Sosial			53.437.699.658.242
1. Kartu Prakerja	999.08	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924
2. Diskon Listrik	999.07	11.618.579.841.000	11.448.439.134.297
3. BLT Dana Desa*	999.05	31.800.000.000.000	23.737.018.473.021
C. Sektoral dan Pemda			36.888.178.079.049
1. Tambahan Subsidi Pupuk	999.07	3.137.218.991.000	3.137.209.202.861
2. Subsidi Bunga Kredit Perumahan	999.07	788.790.030.000	115.747.765.525
3. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	999.07	712.000.000.000	367.038.000.000
4. Hibah kepada Pemda	999.02	3.300.000.000.000	2.264.647.247.182
5. Dana Insentif Daerah Pemulihan Ekonomi	999.05	5.000.000.000.000	4.955.285.206.000
6. Cadangan DAK Fisik	999.05	8.715.745.783.000	7.285.623.090.246
a. Reguler		2.875.771.283.000	2.529.490.258.283
b. Afirmasi		4.268.068.045.000	3.415.465.207.181
c. Penugasan		1.411.599.221.000	1.340.667.824.782
d. Dana Cadangan**		160.307.234.000	
7. Fasilitas Pinjaman Daerah	999.03	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235
D. Insentif Usaha			3.501.884.736.679
1. PPh 21 DTP	999.07	8.811.056.325.808	1.722.767.990.009
2. Bantuan Pembayaran Listrik	999.08	1.688.040.000.000	1.688.040.000.000
3. Insentif BM DTP	999.07	583.287.000.000	91.076.746.870
E. UMKM			83.611.280.567.146
1. Subsidi Bunga KUR	999.07	5.081.357.176.000	4.984.218.342.076
2. Subsidi Bunga/Selisih Margin Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan	999.07	27.197.182.900.000	6.332.908.394.939
3. Subsidi Bunga/Selisih Margin Pegadaian dan PT PNM	999.07	2.371.000.000.000	1.457.106.553.933
4. Subsidi Bunga/Selisih Margin Koperasi	999.07	751.698.700.000	32.269.398.184
5. Penempatan Dana	999.00		66.750.000.000.000
6. Pembayaran IJP oleh Pemerintah	999.07	4.930.000.000.000	1.091.611.029.137
7. Dana cadangan penjaminan untuk stop-loss	999.03	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
8. PPh Final UMKM DTP	999.07	1.084.150.594.431	671.166.848.877
9. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM	999.03	1.292.000.000.000	1.292.000.000.000
F. Pembiayaan Korporasi			60.729.869.488.357
1. PMN	999.03	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000
a. Hutama Karya		7.500.000.000.000	7.500.000.000.000
b. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)		6.000.000.000.000	6.000.000.000.000
c. Permodalan Nasional Madani		1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
d. Indonesia Tourism Development Corp.		500.000.000.000	500.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 672 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

Rincian Realisasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Per Klaster
Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Tahun Anggaran 2020

Klaster	BA BUN	PAGU DIPA	REALISASI
e. LPEI		5.000.000.000.000	5.000.000.000.000
f. PT PII		1.570.000.000.000	1.570.000.000.000
g. Bio Farma		2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
2. Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	999.03	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000
a. Garuda		8.500.000.000.000	8.500.000.000.000
b. KAI		3.500.000.000.000	3.500.000.000.000
c. Perumnas		650.000.000.000	650.000.000.000
d. PTPN III		4.000.000.000.000	4.000.000.000.000
e. Krakatau Steel		3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
3. IJP Korporasi	999.07	4.803.000.000.000	9.105.288.357
4. Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit	999.99	764.200.000	764.200.000
5. Stop Loss Penjaminan	999.03	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
8. Pembiayaan SWF	999.03	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 673 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.D

PEMINDAHAN DANA BLU LMAN
PADA BLU RUMPUN LAYANAN KESEHATAN

No	BLU Penerima	BA	Jumlah pemindahan Dana	Jumlah Realisasi	Sisa Dana	Sumber data (tgl/w Surat laporan/LK)	Sisa Dana Yang disetorkan	Tgl setor	NTPN	SKTB
1	RSCM	024	329.661.558.405	306.743.801.840	22.917.756.565	KU.04.05/VN.3/1992/2021 tanggal 21 Januari 2021	22.917.756.565	10/05/2021	825E18N3DNNHDE9L	KET-35/WPB.12/KP.0705/2021
2	RSUP Fatmawati	024	150.282.749.919	150.147.834.210	134.915.709	KU.01.07/VIII.3/1072/2021 tanggal 4 Mei 2021	134.915.709	10/05/2021	7847A3CIE093SDPJ	KET-37/WPB.12/KP.0705/2021
3	RSUP Persahabatan	024	93.165.684.000	98.700.688.256	4.465.005.744	KU.02.01/13.2/2021 tanggal 8 Januari 2021	4.465.005.744	06/05/2021	556063CE093NU1J	KET-30/WPB.12/KP.0705/2021
4	RSUP Wahidin Sudirohusodo	024	63.391.126.000	49.950.050.320	13.441.075.680	KU.03.01/VIII.3/8477/2021 tanggal 24 Mei 2021	13.441.075.680	06/05/2021	EF3097QLT14VBV4U	SKTB-002/WPB.25/KP.0205/2021
5	RSUP M Hoesin	024	19.477.715.440	19.454.347.340	23.368.100	KU.01.02/XVII.3/040/2021 tanggal 1 Februari 2021	23.368.100	05/05/2021	1FBF648VUIRER0L8	KET-004/WPB.07/KP.0105/2021
6	RSP1 Sulianti Saroso	024	41.372.096.600	40.577.076.185	795.079.815	KU.03.01/XXXVIII/5634/2020 tanggal 30 Desember 2020	795.079.815	07/05/2021	01FF581QU80934TK	KET-29/WPB.12/KP.0705/2021
7	BBLK Jakarta	024	4.591.303.885	4.025.680.037	565.643.848	PR.05.01/XL.1/0280/2021 tanggal 28 Januari 2021	565.643.848	04/05/2021	E4017264U7MJU65A	KET-28/WPB.12/KP.0705/2021
8	BBLK Surabaya	024	9.116.398.000	8.916.396.701	200.001.299	KU.04.01/XLI.1/17191/2020 tanggal 30 Desember 2020	200.001.299	10/05/2021	9024D2G4UTMPGDCE	KET-7/WPB.16/KP.0205/2021
9	RSB R. Said Sukanto	060	35.241.496.500	35.241.496.500		Surat Karumkit R Said Sukanto nomor B/26N/2021/Rs.Bhay.Tk.I tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Pemindahan Dana Transfer Kas BLU				
10	RSB Bromo Kelapa Dua	060	14.534.804.000	13.420.553.117	1.114.250.883	Surat Karumkit Bhayangkara Bromo nomor B/04/I/KEU.1/2021/Rumkit tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer Kas BLU bulan Desember 2020	1.114.250.883	6 Mei 2021	1AAE9550EDDR9C5P	KET-005/WPB.12/KP.03/2021
11	RSB Pontianak	060	4.457.066.500	4.457.066.500		Surat Karumkit Pontianak nomor B/11/I/2021/Rabhy tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Realisasi Belanja Transfer Masuk Kas BLU				
12	RSB Makassar	060	11.983.981.000	11.105.957.652	878.013.348	Laporan Penggunaan Pemindahan Dana RSB Makassar bulan Desember 2020	878.013.348	24 Mei 2021	7C94SDN9V8IC1FU4	Proses pengajuan SKTB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 674 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.D

13	RSB Bandung	060	11.103.813.300	10.219.924.575	883.988.725	Surat Karumkit Bhayangkara Bandung nomor B/04/II/REN/2021/RSBSA tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Penggunaan Pemindahan Dana /Transfer Kas	883.988.725	7 Mei 2021	2A90048VUJRG9DCA	SKTB - 05/WPB.13/KP.0105/2021
14	RSB Surabaya	060	13.684.000.000	13.684.000.000		Surat Karumkit H.S. Samsen Martojoso nomor B/6/KEU/2021/RUMKIT tanggal 11 Januari 2021 hal Laporan Penggunaan Pemindahan Dana Transfer Masuk Kas BLU				
15	RSB Semarang	060	5.599.852.388	5.599.698.972	153.416	Surat Karumkit Bhayangkara Semarang nomor B/20/II/KEU./2021/Rumkit tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan penggunaan pemindahan dana	153.416	18 Mei 2021	C88C048VUJRD2A8SQ	KET-21/WPB 14/KP 026/2021
16	RSB Setukpa Sukabumi	060	4.200.000.000	4.200.000.000		Surat Karumkit Bhayangkara Setukpa nomor B/420/XII/OTL.2.3/2021/Rumkit tanggal Desember 30 2021 hal Laporan penggunaan pemindahan dana				
17	RSB Padang	060	1.933.353.600	1.933.353.600		Surat Karumkit Bhayangkara Padang nomor B/471/XII/2020/Rumkit tanggal 30 Desember 2021 hal Laporan penggunaan pemindahan dana				
18	RSB Nasta Brata Bali	060	3.477.532.290	3.477.529.915	2.375	Surat Karumkit Bhayangkara Nasta Brata Bali nomor B/13/II/REN.4.1./2021/Rumkit tanggal 11 Januari hal Laporan Penggunaan Transfer Masuk Kas BLU sampai Bulan Desember 2020	2.375	5 Mei 2021	988D61JNF349K17L	
19	RSB Bengkulu	060	2.987.528.000	2.987.528.000		Surat Karumkit Bengkulu nomor B/48/II/KEU/2021/Rumkit tanggal 27 Januari 2021 hal Laporan Realisasi Penggunaan Pemindahan Dana Bulan Desember 2020				
20	RSB Pekanbaru	060	1.776.332.000	1.776.332.000		Surat Karumkit Bhayangkara Pekanbaru nomor B/12/II/2021/RS. BHY tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Penggunaan Transfer Masuk Kas BLU Bulan Desember Tahun 2020				
21	RSAD Putri Haju	012	33.379.846.105	10.377.834.932	23.002.011.173	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/70/II/2021 tanggal 12 Januari 2021	23.002.011.173	19/05/2021	AAC84DN9V88NNIE	
22	RSPAL Ramelan	012	50.906.142.806	50.716.083.361	190.058.445	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/25/II/2021 tanggal 7 Januari 2021	190.058.445	06/05/2021	A79502G4UTMM1LLM	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 675 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 4.D

23	RSAD Pekemena	012	51.234.269.281	51.232.792.206	1.477.075	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor BJ03/I/2021 tanggal 4 Januari 2021	1.477.075	07/05/2021	002D26U0E2ILG6UV	
24	RSAD Dustrira	012	48.860.877.000	48.791.712.956	69.164.044	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor BJ013/I/2021 tanggal 5 Januari 2021	69.164.044	11/05/2021	E5764DN9V8I1N7R2	
25	RSPAU Hardjolukto	012	30.680.098.461	30.536.723.868	123.374.593	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor BJ11/I/2021 tanggal 5 Januari 2021	dalam proses penyetoran			
26	RSAD Ciremai	012	7.660.000.000	7.659.003.396	996.604	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor BJ02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021	996.604	24/05/2021	696D348VUIS0JRJK	
27	RSAD Soepraosen	012	26.198.510.943	26.138.080.316	60.420.627	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor BJ45/I/2021 tanggal 8 Januari 2021	60.420.627	05/05/2021	AF36E0M9V8HT6UBC	
28	RSAD Soedjono	012	24.490.745.820	24.490.745.820						
29	RSAD Wijayakusuma	012	20.983.596.808	20.983.596.808						

Realisasi dan Setoran Sisa Dana Transfer Kas pada BLU Penerima (Per BA)

No	BLU Penerima Transfer Kas	BA	Jumlah Pemindahan Dana	Jumlah Realisasi	Sisa Dana	Sisa Dana Yang disetorkan	Sisa Dana Yang Belum Disetor
1	RS BLU Kemenkes	024	711.058.641.649	688.515.794.889	42.542.846.760	42.542.846.760	
2	RS BLU Polri	060	110.979.857.578	108.103.448.831	2.876.408.747	2.876.408.747	
3	RS BLU TNI	012	294.384.087.324	270.936.583.763	23.447.503.561	23.324.128.968	123.374.593
TOTAL REALISASI			1.116.422.586.551	1.047.555.827.483	68.866.758.068	68.743.384.475	123.374.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 676 -

LAMPIRAN 5

SALDO KAS DI REKENING

KPPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 677 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 5

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	3.545.187.656.732	2.891.111.227.978
2	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	400.953	7.986.125
JUMLAH KAS DI KPPN			3.545.188.057.685	2.891.119.214.103



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 678 -

LAMPIRAN 6

KAS PADA KL DAN BUN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 679 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 <i>Audited</i>	31 Desember 2019 <i>Audited</i>	31 Desember 2020 <i>Audited</i>	31 Desember 2019 <i>Audited</i>	31 Desember 2020 <i>Audited</i>	31 Desember 2019 <i>Audited</i>
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	330.259.934	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	3.011.929.438	152.903.312
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	-	-	-	1.362.172.130	5.898.219.611
4	005	MAHKAMAH AGUNG	71.747.044	331.818.397	10.282.500	22.228.000	3.892.320.180	3.031.425
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1.838.225.659	1.256.573.831	70.272.702.095	90.660.879.712	80.865.759.254	70.599.089.482
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.159.950.338	9.086.378.908	-	-	42.074.491.700	58.563.511.865
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	48.500.000	32.852.895	4.383.550.000	4.716.981.000	182.578.532	1.159.231.725
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	196.479.515.140	177.159.041.478	8.281.799.850	14.480.375.170	22.576.800.681	19.585.248.866
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.889.330.992	77.391.000	41.771.394	27.884.662	108.239.627.234	320.544.677.910
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	437.017.887	1.937.351.678	1.000.000	-	44.953.188.625	52.788.944.267
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	421.755.120	2.210.908.864	3.831.484.423	5.041.393.083	417.435.317.207	464.064.488.257
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.216.248.020	266.681.076	47.725.202	14.061.000	16.573.529.510	182.184.589.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.153.789.857	1.221.986.058	-	89.842.259	3.713.425.505	528.199.431
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	85.601.054	-	-	1.831.809.783	2.262.483.816
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	841.409.136	1.366.397.215	222.797.627	16.015.058.606	44.298.001.071	31.552.751.711
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.943.625.066	16.978.061.883	25.942.755.848	1.604.000	505.100.983.904	80.465.430.689
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	61.991.806	38.995.296	917.446.300	125.769.723	226.249.872.801	611.420.745.577
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.265.839.155	888.228.527	12.778.881	828.552.276	179.431.816.302	42.848.058.768
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.580.897.441	279.559.381	-	82.500.000	3.167.787.101	82.690.942
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.100.000	67.686.000	-	-	2.058.132.172.068	2.011.950.360.832
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	201.694.134	2.161.926.711	30.200.000	182.341.000	9.868.899.857	59.800.603.661
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	179.952.437	18.124.586	4.584.677	2.337.500	321.150.077.100	323.118.323.395
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	191.710.583	74.664.285	-	-	98.243.428.746	1.804.456.796
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	149.980.723	-	-	78.359.727	93.422.527



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 680 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	6.424.000	87.591	-	-	28.839.130	180.462.613
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.196.156.127	-	2.050.000	2.050.000	926.287.054	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	-	657.972.536	-	27.158.742.703	5.408.323.854	471.433.500.118
30	044	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN UKM	-	100.000	-	-	4.063.594.668	4.294.107.374
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.443.250	177.838.780	-	-	69.716.582	171.322.254
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	-	5.851.237.358	23.771.608
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	7.653.824	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	23.811.826
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	9	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	31.310.000	60.431.458	4.476.420	-	1.888.196.843	1.211.682.100
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	77.254.583	38.135.194	-	-	638.208.958	5.967.367.257
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	341.644.568	89.560.967	-	-	1.180.080.290	2.429.202.388
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	214.654	-	-	70.000	31.124.387
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.714.000	225.009	3.050.000	-	72.523.073.254	2.448.615.012
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	326.877.826	158.344.184	8.345.582.200	2.080.260.500	376.411.646.206	178.573.565.699
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	254.767.530	18.910.010	-	-	28.807.150	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	73.708.353	-	-	-	1.447.191.717	1.202.743.681
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	39.053.944	169.405.201	8.120.000	-	158.444.681	1.510.737.282



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 681 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 6

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	500.000	-	-	219.087.387	1.178.000
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-	114.807.412	170.275.490
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	4.128.952.986	3.439.915.392
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	385.363.300	3.337.000	-	-	8.881.622	3.780.165
50	078	KOMISI PEMILIHAN UMUM	411.849.034	1.149.243.313	-	-	2.179.138.992.023	366.268.764.461
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	13.073.774	101.921.980
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	16.777.287	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	2.642.352	-	13.300.000	29.096.417.181	899.375.091
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	199.420.426	-	-	-	1.660.042.957	822.968.861
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	13.016.884	814.521.772	462.913.075	373.138.050	14.935.332.281	2.489.073.382
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	-	-	-	26.145.558.048	1.772.240
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	-	80.932.828	139.085.359
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	-	18.792.186
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	2.720.000	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.205.725	-	-	-	4.071.600	44.019.000
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	111.982.741	-	-	-	200.650
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.904.250.259	7.139.398.465	1.395.411.780	4.198.728.123	511.571.598	738.699.927
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134.909.200	7.611.600	2.082.163	1.844.000	303.808.686	2.873.893.828
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	302.117.598	-	0	393.051	907.670.688	29.125.942.979
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	2.607.730.318	-	-	4.532.662.246	7.683.851.598
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	4.266.989
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	481.036.991.370	-	-	-	92.462.532.750	27.509.790.021
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	284.513.200	-	411.825	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	45.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 682 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 6

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited
72	107	BADAN SAR NASIONAL	103.800.000	-	-	-	-	-
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	180.793.773	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	3.512.000	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	42.000.924
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	77.841.223.705	94.215.715.907
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	104.059.700	6.433.319	-	-	-	993.915.575
79	114	SEKRETARIAT KABINET	1.793.096.739	3.272.809.348	-	-	-	1.035.224.316
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	523.877.328	1.765.995.583	-	-	551.216.623.989	139.688.221.070
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	488.380.700	8.292.002	7.787.000	4.750.000	12.806.747	44.452.120
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	238.770.428	41.776.824	-	23.996.500	145.502.372	34.860.215
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	1.031.795.805	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	122.551.396
PENYESUAIAN			-	-	-	-	(3.862.816.464.090)	(1.632.840.904.985)
JUMLAH KAS PADA K/L			731.061.274.902	234.188.768.027	124.232.758.260	166.170.010.918	3.793.142.060.512	3.956.448.649.872
JUMLAH KAS PADA SATKER BUN			-	-	-	-	6.637.139.658.744	1.834.617.895.228
JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN			731.061.274.902	234.188.768.027	248.465.516.520	166.170.010.917	10.430.281.717.256	5.591.063.945.100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 683 -

LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI

MUKA, UANG MUKA

BELANJA, DAN

PENDAPATAN YANG

MASIH HARUS DITERIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 684 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	14.160.886.078	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	169.600.126	366.650.226	-	-	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	15.525.154.445	10.730.282.768	-	-	-	-
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	20.074.471.764	18.823.430.028	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	899.400.900	1.350.000.000	-	-	37.201.493	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	88.990.361.778	91.616.963.772	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	45.933.581.700	1.086.250.000	22.317.263.212.916	22.143.189.884.406	-	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	29.254.137.917	9.853.310.665	2.394.380.000	5.558.458.273	31.297.367	51.754.279
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	3.654.521.589.193	2.511.562.702.712	3.008.407.881	3.556.618.919	604.284.760.548	528.706.457.547
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	873.029.755.166	544.750.050.814	-	-	7.030.925.752	1.240.370.197
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	165.184.677	630.838.321	-	-	2.503.945.072	1.314.847.300
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	161.323.361.517	609.681.944	-	-	172.039.068.737	16.659.426.427
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	17.002.142.841	17.396.021.069	-	-	1.832.206.924	917.568.894
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	940.708.341.404	771.004.826.422	-	-	221.527.391.845	1.929.044.625
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	800.311.802.714	6.781.000.944	44.602.514.806	63.428.896.254	1.248.410.346	1.120.943.972
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	109.329.613.479	138.064.742.375	-	1.682.122.214	75.048.518.680	73.053.399.031
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	653.853.108.692	-	-	-	44.351.750	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 685 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	71.528.400	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100.458.892.744	11.186.221.915	-	-	6.007.500	6.007.500
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.164.858.980	3.889.438.586	-	-	3.821.849.871	4.262.423.003
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.187.000.000	4.392.000.000	578.597.833	-	2.888.292.959	2.418.384.698
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	35.646.813	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	409.578.500	502.280.600	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	8.694.504.866	8.583.486.818	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	2.782.488.208	801.380.961	-	-	32.017.185	379.285.240
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	-	291.032.815.892	-	2.518.238.898	-	49.477.918.354
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	55.545.207	352.191.621	-	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	-	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	92.711.831.043	154.413.458.451	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	5.881.096.260	-	3.790.666.823	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	26.189.689	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.882.867.312	3.790.809.575	-	-	77.092.431	9.623.499
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	41.221.576.013	43.207.682.176	-	-	502.342.500	2.287.530



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 686 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	811.573.801	580.234.407	-	-	4.824.654	-
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.004.877.419	14.001.410.618	-	-	4.694.400	61.157.500
40	058	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	312.542.628	18.658.378.421	-	-	2.744.876.083.099	2.286.089.668.018
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	114.959.820.313	233.084.734.647	1.989.376.302.214	2.264.441.428.139	120.723.262	1.766.268.484
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	960.338.623	6.765.197.904	-	-	-	-
43	064	LEMBAGA KETAMANAN NASIONAL	-	-	-	-	205.360.500	195.083.750
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.953.713.621	10.796.730.375	-	-	-	-
45	066	BADAN MARKOTIKA NASIONAL	11.496.744.224	7.432.341.022	-	-	-	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	294.891.667	15.126.451	-	-	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	22.125.795	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.999.398	3.000.000	-	-	7.234.088.697	28.806.305.761
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.393.099.460	12.252.180.457	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	146.479.260	23.679.775	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3.395.512.025	2.195.433.272	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	12.031.604.501	5.567.090.500	-	-	-	245.350.843
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	252.560.000	171.545.000	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	159.324.000	-	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.508.500.000	35.750.000	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 687 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)							
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.227.216.533	-	-	-	701.140
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	186.732.864	149.897.742	-	4.310.462.736	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.389.514	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	225.329.800	45.510.904	-	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	19.259.312	6.650.000	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	10.354.806.910	1.176.487.935	-	-	2.612.000
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.588.087.320	3.037.890.897	-	-	109.532.704
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.750.000.000	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	706.919.988	1.970.442.639	-	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	3.409.348.486	2.637.210.047	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	381.689.825	428.033.556	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.979.343.395.838	5.231.053.981.586	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	182.293.333	196.211.756	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	908.416.737	3.373.051.041	-	-	181.410.947
72	107	BADAN SAR NASIONAL	422.104.375	527.085.247	-	-	45.543.000
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAWAN USAHA	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	475.002.000	59.239.583	-	-	-
75	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	116.013.439	1.867.065.556	-	-	-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 688 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

LAMPIRAN 7

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	27.736.730.919	30.206.210.977
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	216.682.354	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	6.801.089.945	144.827.210.119	1.139.100.000	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	-	79.311.444	-	-	-	-
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	151.350.000	-	-	-	-	-
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	107.083.006.978	95.123.449.077	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	5.226.680.846	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	18.386.683	3.333.746.667	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			10.046.042.502.451	10.459.108.928.890	24.358.362.515.650	24.512.477.796.562	3.873.433.233.292	3.028.979.606.205
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 689 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	17.149.403.624	416.666.684	15.000.000	-	-	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	5.742.910.686	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BA BUN			17.149.403.624	416.666.684	15.000.000	-	5.742.910.686	-
TOTAL			10.063.191.906.075	10.458.525.595.574	24.358.377.515.650	24.512.477.796.562	3.879.176.143.888	3.028.979.606.205



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 690 -

LAMPIRAN 8

PIUTANG PAJAK DAN

PENYISIHAN PAJAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 691 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 8.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020

A. Direktorat Jenderal Pajak

(dalam Rupiah)

Akua	Nama Akun	Nilai	Penyisihan	Netto
115111	Piutang PPh Minyak Bumi	7.779.242,00	38.896,21	7.740.346
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.444.917.836.022,85	612.806.239.885,57	832.111.596.137
115122	Piutang PPh Pasal 22	803.738.345.732,16	449.453.276.827,20	154.285.068.905
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.121.870.765,00	10.609.353,83	2.111.261.411
115124	Piutang PPh Pasal 23	3.144.397.552.043,34	2.181.674.819.137,97	962.722.732.905
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.903.191.983.258,38	1.035.150.566.879,09	868.041.416.579
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	18.313.005.239.196,50	10.956.934.766.127,40	7.356.070.473.069
115127	Piutang PPh Pasal 26	1.443.919.359.473,57	749.554.789.103,33	694.364.570.370
115128	Piutang PPh Final	3.455.008.563.837,10	1.641.022.270.265,75	1.813.986.293.571
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	24.279.436.124.349,10	12.316.755.930.532,00	11.962.680.193.817
115132	Piutang PPN Impor	19.966.520.487,00	99.832.602,44	19.866.687.885
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	257.676.089.239,00	233.056.337.191,00	24.619.752.048
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.497.252.137.049,40	638.816.948.819,18	858.435.188.229
115154	Piutang PBB Kehutanan	829.381.698.675,00	410.905.448.401,57	418.476.250.273
115155	Piutang PBB Pertambangan	4.018.225.338.845,68	2.733.010.058.880,49	1.285.215.277.965
115159	Piutang PBB Lainnya	74.783.705.811,00	20.622.079.492,55	54.161.626.318
115165	Piutang Bea Materai	4.503.318.517,00	29.301.445,09	4.474.017.072
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	16.501.254.720,00	5.019.666.650,68	11.481.588.069
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	5.664.046.380.928,46	1.752.789.021.298,28	3.911.257.359.630
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	2.765.851.898.375,50	1.565.113.645.915,20	1.200.738.252.460
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	153.155.757.064,00	136.836.106.633,50	16.319.650.431
	Total (Berdasarkan TPA Modul RAS)	69.891.088.751.631	37.438.661.754.138	32.451.426.997.493

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kode Akun	Nama Akun	Nilai	Penyisihan	Netto
115123	PPh Pasal 22 Impor	71.762.115.163	11.756.169.060	60.005.946.103
115132	PPN Impor	199.765.862.092	35.038.130.688	164.727.731.404
115142	PPnBM Impor	59.553.447.581	7.237.840.586	52.315.606.995
115161	Cukai Hasil Tembakau	27.043.872.225.594	172.445.384.937	26.871.426.840.657
115163	Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.367.119.100	3.109.541.213	2.257.577.888
115164	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	26.602.811.990	25.367.052.813	1.215.759.177
115169	Pendapatan Cukai Lainnya	13.070.365.255	12.908.029.426	162.335.829
115174	Bunga Penagihan PPN	10.058.447.304	539.167.754	9.519.279.550
115181	Bea masuk	1.362.237.498.291	767.344.232.662	594.893.265.629
115183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	2.182.174.996.109	1.866.698.220.105	315.476.776.004
115184	Pendapatan Pabean Lainnya	379.421.596.874	370.155.130.971	9.266.465.903
115185	Pajak/Pungutan Ekspor (Bea Keluar)	163.752.913.762	153.509.557.914	10.243.355.848
115186	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	16.118.304.082	18.037.405.608	80.898.476
115187	Pendapatan Bunga Bea Keluar	787.291.683	778.661.053	8.630.630
115191	Bea Masuk Andidumping	24.384.785.599	22.977.154.124	1.407.631.475
115193	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	31.600.618.000	874.997.065	30.725.620.935
	Total	31.590.530.398.479	3.486.796.675.977	28.123.733.722.502



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 692 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 8.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020

A. PIUTANG PAJAK

Kode Akun	Nama Akun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	JUMLAH
115111	Piutang PPh Minyak Bumi	7.779.242	-	-	-	7.779.242
115121	Piutang PPh Pasal 21	392.714.914.389	375.201.098.080	204.628.739.080	472.372.084.474	1.444.917.836.023
115122	Piutang PPh Pasal 22	57.844.937.369	83.585.019.954	42.647.040.829	419.661.347.580	603.738.345.732
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.121.870.765	-	-	-	2.121.870.765
115124	Piutang PPh Pasal 23	428.702.546.548	477.353.540.663	209.870.009.829	2.028.471.455.003	3.144.397.552.043
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	370.105.928.923	317.538.138.526	400.453.662.792	815.094.253.017	1.903.191.983.258
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	3.681.343.519.339	3.117.152.609.227	1.733.896.153.557	9.780.612.957.073	18.313.005.239.197
115127	Piutang PPh Pasal 26	404.231.228.295	246.956.022.645	129.546.164.821	663.185.943.712	1.443.919.359.474
115128	Piutang PPh Final	559.340.775.124	971.489.538.913	757.173.104.788	1.167.005.145.013	3.455.008.563.837
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	5.185.092.111.824	5.108.523.464.235	4.307.347.110.760	9.698.473.437.530	24.279.436.124.349
115132	Piutang PPN Impor	19.966.520.487	-	-	-	19.966.520.487
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	32.851.560	886.808.032	47.578.235.034	209.178.394.613	257.676.089.239
115153	Piutang PBB Perkebunan	158.096.282.736	577.570.694.250	362.631.524.164	398.953.635.899	1.497.252.137.048
115154	Piutang PBB Kehutanan	120.686.843.754	212.214.347.953	214.799.855.161	281.680.651.807	829.381.698.675
115155	Piutang PBB Pertambangan	400.868.795.222	425.955.048.767	1.005.882.565.658	2.185.418.927.199	4.018.225.336.846
115159	Piutang PBB Lainnya	36.337.929.189	6.181.346.021	24.884.350.713	7.380.079.888	74.783.705.811
115165	Piutang Bea Materai	4.431.899.017	71.419.500	-	-	4.503.318.517
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	8.073.760.220	8.427.494.500	-	16.501.254.720
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.139.142.355.712	715.452.752.833	285.573.270.757	1.523.878.001.627	5.664.046.380.928
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	860.427.225.920	212.032.463.202	292.505.118.533	1.400.887.090.721	2.765.851.898.376
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	-	18.194.759.481	134.960.997.583	153.155.757.064
	Jumlah	15.801.496.315.415	12.856.237.873.020	10.046.140.160.457	31.187.214.402.739	69.891.088.751.631



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 693 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 8.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020**

B. PIUTANG BEA DAN CUKAI

Kode Akun	Nama Akun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	JUMLAH
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	38.193.417.512	23.926.432.153	940.432.000	8.701.833.498	71.762.115.163
115132	Piutang PPN Impor	139.560.228.650	28.427.974.040	559.236.000	31.218.423.401	199.765.862.091
115142	Piutang PPnBM Impor	5.047.941.000	52.547.673.000	-	1.957.833.581	59.553.447.581
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	27.006.459.136.340	-	-	37.413.089.255	27.043.872.225.595
115183	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.268.922.500	-	-	3.098.196.600	5.367.119.100
115184	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	1.139.468.520	70.000.000	37.976.000	25.355.367.470	26.602.811.990
115189	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	73.084.250	20.000.000	143.234.000	12.834.047.005	13.070.365.255
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	9.566.690.000	-	846.000	490.911.304	10.058.447.304
115181	Piutang Bea Masuk	305.226.319.720	321.097.731.785	4.069.759.000	731.843.687.785	1.362.237.498.290
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	305.948.810.311	5.688.999.000	9.646.297.800	1.860.891.088.998	2.182.174.996.109
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	2.423.244.000	4.943.344.140	4.726.331.480	367.328.677.253	379.421.596.973
115185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	10.294.830.000	-	-	153.458.083.764	163.752.913.764
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	81.305.000	-	-	16.036.999.081	16.118.304.081
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	8.674.000	-	-	778.617.683	787.291.683
115191	Piutang Bea Masuk Antidumping	1.414.705.000	-	-	22.970.080.599	24.384.785.599
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	24.053.313.000	7.547.305.000	-	-	-
	Jumlah	27.851.759.889.803	444.269.459.118	20.124.112.280	3.274.376.937.278	31.590.530.398.479
JUMLAH PIUTANG PAJAK, BEA DAN CUKAI (A + B)		101.481.619.150.110				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 694 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 8.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020

1 Direktorat Jenderal Pajak						(dalam Rupiah)
Akum	Jenis Pajak	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
115111	Piutang PPh Minyak Bumi	38.886	-	-	-	38.886
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.983.574.572	37.487.815.107	102.048.484.604	471.326.565.602	612.806.239.886
115122	Piutang PPh Pasal 22	289.224.687	8.345.540.900	21.259.823.566	419.558.687.674	449.453.276.827
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	10.609.354	-	-	-	10.609.354
115124	Piutang PPh Pasal 23	2.143.512.733	47.703.649.519	104.768.371.608	2.027.061.285.278	2.181.674.819.138
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.850.529.645	31.708.967.750	198.638.124.619	802.952.944.685	1.035.150.566.679
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	18.406.717.597	311.195.125.163	861.374.706.088	9.765.958.217.279	10.956.934.766.127
115127	Piutang PPh Pasal 26	2.021.156.141	24.648.243.472	64.773.082.411	658.112.307.079	749.554.789.103
115128	Piutang PPh Final	2.796.703.876	96.980.243.795	378.282.313.841	1.162.963.008.754	1.641.022.270.266
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	25.825.480.559	509.790.364.741	2.139.095.215.893	9.642.044.889.339	12.316.755.930.532
115132	Piutang PPN Impor	99.832.602	-	-	-	99.832.602
115141	Piutang PPNBM dalam Negeri	184.258	88.660.803	23.788.117.517	209.178.394.613	233.056.337.191
115153	Piutang PBB Perkebunan	790.491.414	57.757.069.425	181.315.762.082	398.953.635.899	638.816.948.819
115154	Piutang PBB Kehutanan	803.434.219	21.221.434.795	107.399.827.581	281.680.651.807	410.805.448.402
115155	Piutang PBB Pertambangan	2.004.343.976	42.585.504.877	502.991.282.829	2.185.418.927.199	2.733.010.058.880
115159	Piutang PBB Lainnya	181.689.646	618.134.602	12.442.175.357	7.380.079.888	20.622.079.493
115165	Piutang Bea Materai	22.158.495	7.141.950	-	-	29.300.445
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	805.919.401	4.213.747.250	-	5.019.666.651
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	15.695.711.779	71.545.275.283	142.144.478.108	1.523.403.556.129	1.752.789.021.298
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.302.136.130	21.075.929.559	145.437.158.513	1.394.299.421.714	1.565.113.645.915
115175	Piutang Bunga Penagihan PPNBM	-	-	9.097.379.741	127.738.726.893	136.836.106.634
Total (Berdasarkan LP3 BA 015)		79.007.481.577	1.283.554.821.143	4.999.068.151.606	31.078.030.299.812	37.439.661.754.138



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 695 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 8.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020

2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Akun	Uraian	s.d 1 th	1-2 th	2-3 th	dinas 3 th	Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
116112	Piutang PPh Pasal 22 Impor	190.867.088	2.392.643.215	470.216.000	8.701.833.498	11.755.659.801
116113	Piutang PPh Impor	697.801.143	2.842.797.404	279.618.000	31.218.423.491	35.038.639.948
116114	Piutang PPhBM Impor	25.239.705	5.254.767.300	-	1.957.833.581	7.237.840.586
116116	Piutang Cukai Hasil Tembakau	135.032.295.682	-	-	37.413.088.255	172.445.384.937
116116	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	11.344.613	-	-	3.098.196.600	3.109.541.213
116116	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	5.897.343	7.000.000	18.988.000	25.355.367.470	25.387.052.813
116116	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	385.421	2.000.000	71.617.000	12.834.047.005	12.908.029.426
116117	Piutang Bunga Penagihan PPN	47.833.450	-	423.000	490.911.304	539.167.754
116118	Piutang Bea Masuk	1.526.131.599	32.109.773.179	2.034.879.500	731.673.448.385	767.344.232.662
116118	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.529.743.052	568.899.900	4.823.148.900	1.859.776.428.254	1.869.898.220.105
116118	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	12.116.220	494.334.414	2.363.185.740	367.285.514.598	370.155.130.972
116118	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	51.474.150	-	-	153.458.083.784	153.509.557.914
116118	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	406.525	-	-	16.036.999.081	16.037.405.606
116118	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	43.370	-	-	778.617.683	778.661.053
116118	Piutang Bea Masuk Antidumping	7.073.525	-	-	22.970.080.599	22.977.154.124
116118	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	120.266.565	754.730.500	-	-	874.997.065
		139.258.799.449	44.426.945.912	10.062.056.140	3.273.048.874.478	3.466.796.675.979



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 696 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 8.D

**PIUTANG PAJAK DALUARSA
PER 31 DESEMBER 2020
(dalam ribuan rupiah)**

Kode Akun	Nama Akun	DALUWARSA
115121	Piutang PPh Pasal 21	107.924.125.958
115122	Piutang PPh Pasal 22	9.643.908.961
115124	Piutang PPh Pasal 23	321.636.904.458
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	209.393.701.067
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	2.244.085.667.956
115127	Piutang PPh Pasal 26	422.445.361.846
115128	Piutang PPh Final	164.384.198.075
115131	Piutang PPN	2.549.006.994.698
115141	Piutang PPnBM	41.148.473.148
115153	Piutang PBB Perkebunan	168.996.691.523
115154	Piutang PBB Kehutanan	90.746.574.353
115155	Piutang PBB Pertambangan	1.245.751.546.240
115159	Piutang PBB Lainnya	1.336.550.260
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.697.583.926.797
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.850.936.218.796
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	20.916.827.686
Jumlah		13.145.937.671.821



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 697 -

LAMPIRAN 9

PIUTANG BUKAN PAJAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 698 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 9

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	137.884.000	(13.788.400)	124.095.600	10.000	(50)	9.950
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	289.420.257	(78.062.283)	211.357.974	1.683.822.832	(36.016.306)	1.647.806.526
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.598.331.720	(104.502.185)	5.493.829.535	917.662.114	(81.098.836)	836.563.278
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.728.170.813	(8.640.852)	1.719.529.761	642.611.134	(3.213.055)	639.398.079
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	20.075.661.473.176	(11.305.083.446.011)	8.770.578.027.165	18.032.394.466.770	(11.174.011.634.407)	6.858.382.832.363
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	341.437.918	(1.707.181)	339.730.725	22.419.702	(112.098)	22.307.604
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	25.191.052.174	(8.276.187.140)	16.914.865.034	21.571.805.607	(6.231.171.963)	15.340.733.644
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	48.425.486.636	(242.127.434)	48.183.359.202	49.671.000.228	(248.355.002)	49.422.645.226
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	193.257.127.073	(20.176.633.996)	173.080.493.077	495.738.554.707	(19.898.600.136)	475.839.954.571
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	271.664.242.306	(244.723.769.903)	26.940.472.403	322.805.448.526	(302.472.521.625)	20.332.926.901
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	53.580.982.218	(45.865.512.951)	7.715.469.267	76.080.391.177	(45.332.331.819)	30.748.059.358
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	36.821.194.851	(8.700.049.771)	28.121.145.080	112.842.918.084	(8.475.051.039)	104.366.867.045
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	23.214.704.488	(21.059.231.002)	2.155.473.486	52.967.327.258	(21.765.609.241)	31.201.718.015
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.369.570.560.904	(20.039.688.134.723)	1.329.882.426.181	13.955.051.667.234	(13.386.383.805.159)	568.667.862.075
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	778.407.152.165	(174.963.882.566)	603.443.269.599	1.101.976.973.940	(235.889.424.283)	866.087.549.657
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	631.806.367.573	(124.889.301.594)	506.917.065.979	4.756.763.770	(23.783.819)	4.732.979.951
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	43.296.792.810	(2.013.244.386)	41.283.548.424	35.693.557.113	(2.948.051.054)	32.745.506.059
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	73.281.217.982	(2.840.064.472)	70.441.153.510	4.685.410.154	(2.840.099.042)	1.845.311.112
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	40.039.817.051	(36.537.012)	40.003.280.039	7.798.020.668	(36.980.102)	7.757.040.566
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	368.789.028.861	(1.843.945.145)	366.945.083.716	360.334.178.898	(1.801.670.900)	358.532.507.998



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 699 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)								
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.999.679.633.980	(4.534.551.735.061)	464.127.898.919	4.372.368.215.572	(3.969.547.069.780)	402.821.145.792
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	47.883.146.128	(29.314.301.301)	18.368.844.827	42.815.898.311	(16.297.073.382)	26.518.824.949
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.290.785.565.446	(2.140.375.492.818)	150.410.072.628	2.467.263.638.513	(1.912.041.122.718)	555.222.515.795
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.928.000	-	2.928.000	16.274.468	-	16.274.468
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	558.674	(2.793)	555.881	138.642.677	(693.212)	137.949.465
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	253.815.612	(1.269.078)	252.546.534	14.356.730	(71.783)	14.284.947
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	3.158.132.121	(72.528.910)	3.083.603.211	13.600.207.017	(68.001.034)	13.532.205.983
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	344.307.437	(41.709.952)	302.597.485	366.556.424	(108.215.814)	258.340.610
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	-	-	-	105.349.582.172	(52.035.211.197)	53.314.350.975
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	101.057.937.896	(100.897.964.800)	159.973.096
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	126.920.264	(634.600)	126.285.664	120.593.953	(602.970)	119.990.983
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	5.006.471.688	(25.032.358)	4.981.439.330
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	15.177.969.801	(120.435.921)	15.057.533.880	9.237.728.594	(90.609.491)	9.147.119.103



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 700 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 9

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	542.701.763	(2.828.360)	540.073.403	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.951.725.187	(2.579.193.928)	372.531.269	3.008.494.175	(2.420.943.359)	587.550.816
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.660.011.687.564	(1.465.350.501.382)	194.661.186.182	1.479.311.233.181	(1.363.499.875.646)	115.811.357.535
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.366.229.950	(11.831.150)	2.354.398.800	2.400.982.331	(37.821.032)	2.363.161.299
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.832.806.942	(9.164.035)	1.823.642.907	14.299.682.033	(71.496.411)	14.228.183.622
43	064	LEMBAGA KETAHAMAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	085	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	10.583.334.368	-	10.583.334.368	15.304.508	-	15.304.508
45	086	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	122.189.407	(610.948)	121.578.459	535.787.205	(2.678.938)	533.108.267
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.381.566.736	(56.448.233)	1.325.148.503	551.036.448	(2.522.535)	548.513.913
47	088	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	473.800.369	(2.369.002)	471.431.367	1.169.106.175	(5.847.528)	1.163.258.647
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	5.725.000	-	5.725.000
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.017.708.463	(15.088.547)	3.002.620.916	4.355.611.591	(21.778.058)	4.333.833.533
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	248.330.625	(1.241.652)	247.088.973	51.472.962	(257.365)	51.215.597
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.768.081.825	(3.890.319.956)	2.877.761.869	5.099.650.895	(1.817.535.875)	3.282.115.020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 701 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.849.451.625	(80.131.058)	1.769.320.567	3.359.984.703	(1.807.085.515)	1.552.899.188
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	75.843.689.292	(50.534.141.830)	25.309.547.462	36.791.887.028	(30.735.257.843)	6.056.609.183
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	475.018.933	(2.375.094)	472.643.839	5.673.118.370	(28.385.592)	5.644.752.778
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	28.192.973	(6.379.297)	21.813.676	1.735.077.436	(89.509.877)	1.645.567.559
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	622.499.086	(240.167.836)	382.331.250	1.081.085.944	(293.754.694)	787.331.250
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	12.269.760	(61.349)	12.208.411	51.677.374	(626.085)	51.051.289
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	61.689.402	(308.447)	61.380.955	256.473.838	(36.537.994)	219.935.844
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	56.119.260	(3.816.428)	52.302.852	638.672.617	(339.476.299)	299.196.316
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	260.427.796	-	260.427.796
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.598.350.134	(128.777.934)	1.469.572.200	3.141.375.084	(135.737.791)	3.005.637.293
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.734.716.385	(78.673.581)	15.656.042.814	22.500.000	(112.500)	22.387.500
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	868.048.019.501	(10.942.189.026)	857.105.839.575	695.695.615.952	(11.274.816.006)	684.420.799.946
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	133.588.149	(887.931)	132.918.218	172.603.982	(863.020)	171.740.962
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	125.076.119	(625.380)	124.450.739	26.195.023.392	(130.975.117)	26.064.048.275
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	16.034.200	(80.171)	15.954.029	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	177.742.924	(888.715)	176.854.209
72	107	BADAN SAR NASIONAL	30.005.138.000	(27.314.600.000)	2.690.538.000	29.416.028.000	(28.977.342.800)	438.685.200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 702 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 9

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	419.961.782.396	(391.490.775.127)	28.471.007.269	335.340.958.705	(291.570.162.699)	43.770.796.006
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	80.704.123	(403.521)	80.300.602
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	29.625.948	(148.135)	29.478.813	89.025.650	(445.128)	88.580.522
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.613.847.101	-	1.613.847.101	1.625.251.924	-	1,625,251,924
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	27.600.000	-	27,600,000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	147.715.999	-	147,715,999	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4,655,585,332	(1,461,809,589)	3,193,975,743	2,015,161,662	(1,072,841,784)	942,319,878
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	98,028,790,564	(89,858,223,912)	8,168,566,652	110,564,190,526	(91,270,387,724)	19,293,802,802
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1,702,912,323	(1,546,314,008)	156,598,315	1,849,577,340	(1,544,599,791)	104,977,549
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1,269,337,903	(6,346,890)	1,262,991,213	242,982,432	(1,214,912)	241,767,520
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	223,178,442	(1,115,893)	222,062,549
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	7,268,881,284	(36,344,456)	7,232,536,828
JUMLAH PADA KIL			54,609,431,085,961	(40,750,702,680,467)	13,858,728,385,494	44,529,590,076,959	(33,086,823,822,958)	11,442,766,254,001
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	135,281,871,828,297	(100,687,013,984,261)	34,594,857,844,036	121,727,173,168,564	(88,787,782,708,214)	32,939,390,460,350
TOTAL			189,891,302,914,258	(141,437,716,664,728)	48,453,586,019,760	166,256,763,245,523	(121,874,606,531,172)	44,382,156,714,351



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 703 -

LAMPIRAN 10

RINCIAN PIUTANG

TRANSFER KE DAERAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 704 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
1	Provinsi Aceh	60.004.606.314	9.377.302.720	-	69.381.909.034	-
2	Kab. Aceh Barat	1.269.256.748	6.225.510.314	-	7.494.767.062	-
3	Kab. Aceh Besar	1.520.730.265	9.492.822.152	-	11.013.552.417	-
6	Kab. Aceh Tengah	2.675.167.437	14.533.459.442	-	17.208.626.879	44.258.555
7	Kab. Aceh Tenggara	992.511.736	2.700.569.546	-	3.693.081.282	-
8	Kab. Aceh Timur	7.753.815.679	11.197.695.867	-	18.951.511.546	-
9	Kab. Aceh Utara	6.453.910.665	29.826.683.898	-	36.280.594.563	-
10	Kab. Bireuen	338.232.522	11.300.993.747	-	11.639.226.269	312.057.900
11	Kab. Pidie	2.137.563.154	25.638.715.399	-	27.776.278.553	-
12	Kab. Simeulue	1.090.982.826	2.828.845.470	-	3.919.828.296	-
13	Kota Banda Aceh	2.161.147.561	7.548.469.288	-	9.709.616.849	-
14	Kota Sabang	996.161.302	1.658.903.622	-	2.655.064.924	-
15	Kota Langsa	2.557.879.032	1.058.399.898	-	3.616.278.930	-
16	Kota Lhokseumawe	15.016.320.450	2.541.490.071	-	17.557.810.521	141.678.062
17	Kab. Gayo Lues	931.001.286	5.072.835.215	-	6.003.836.501	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	1.107.090.078	4.875.188.096	-	5.982.278.174	-
19	Kab. Aceh Jaya	521.064.920	6.538.938.173	-	7.060.003.093	-
20	Kab. Nagan Raya	1.499.066.455	2.612.088.453	-	4.111.154.908	-
21	Kab. Aceh Tamiang	7.101.817.341	2.979.574.227	-	10.081.391.568	-
22	Kab. Bener Meriah	829.755.492	4.559.956.397	-	5.389.711.889	-
23	Kab. Pidie Jaya	394.509.995	6.214.270.299	-	6.608.780.294	-
24	Kota Subulussalam	415.856.495	1.670.704.800	-	2.086.561.295	-
25	Provinsi Sumatera Utara	7.670.299.630	4.765.429.932	-	12.435.729.562	-
26	Kab. Asahan	2.324.201.412	13.032.406.032	-	15.356.607.444	571.776.753
27	Kab. Dairi	1.259.884.703	8.270.129.481	-	9.530.014.184	-
28	Kab. Deli Serdang	74.972.880	14.585.070.034	-	14.660.042.914	-
29	Kab. Karo	854.172.246	12.816.409.018	-	13.670.581.264	-
30	Kab. Labuhanbatu	3.099.160.816	3.720.162.395	-	6.819.323.211	-
31	Kab. Langkat	2.887.397.959	13.516.565.708	-	16.403.963.667	483.583.771
32	Kab. Mandailing Natal	32.446.125.927	5.422.354.082	-	37.868.480.009	719.554.600
33	Kab. Nias	133.748.588	7.967.857.036	-	8.101.605.624	-
34	Kab. Simalungun	2.616.630.903	27.142.665.818	-	29.759.296.721	-
35	Kab. Tapanuli Selatan	18.059.714.470	11.079.692.283	-	29.139.406.753	-
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.250.784.185	4.699.214.722	-	5.949.998.907	-
37	Kab. Tapanuli Utara	1.788.055.462	7.757.189.686	-	9.545.245.148	-
38	Kab. Toba Samosir	864.083.632	11.347.070.532	-	12.211.154.164	-
39	Kota Binjai	64.726.971	3.862.707.285	-	3.927.434.256	-
40	Kota Medan	5.952.355.904	20.384.691.637	-	26.337.047.541	-
41	Kota Pematang Siantar	1.491.534.269	4.890.333.728	-	6.381.867.997	-
42	Kota Sibolga	393.847.844	2.454.884.981	-	2.848.732.825	-
43	Kota Tanjung Balai	5.795.027.691	819.977.237	-	6.615.004.928	-
44	Kota Tebing Tinggi	471.420.642	6.904.560.489	-	7.375.981.131	-
45	Kota Padang Sidempuan	842.720.946	2.583.348.945	-	3.426.069.891	-
46	Kab. Pakpak Bharat	1.050.567.955	8.700.501.066	-	9.751.069.021	-
47	Kab. Nias Selatan	7.419.910.521	14.511.979.993	-	21.931.890.514	-
48	Kab. Humbang Hasundutan	6.964.443.658	3.672.560.568	-	10.637.004.226	-
49	Kab. Serdang Bedagai	848.064.359	11.033.466.722	-	11.881.531.081	2.068.891.463
50	Kab. Samosir	127.644.964	7.429.080.991	-	7.556.725.955	-
51	Kab. Batu Bara	1.322.545.842	3.754.874.721	-	5.077.420.563	953.753.770
52	Kab. Padang Lawas	673.625.976	8.402.771.756	-	9.076.397.732	3.896.574.600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 705 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.436.486.529	2.406.249.116	-	4.842.735.645	65.100
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.614.016.061	14.720.474.826	-	16.334.490.887	1.643.833
55	Kab. Labuhanbatu Utara	2.069.622.033	4.677.636.068	-	6.747.258.101	616.307.118
56	Kab. Nias Utara	64.726.971	10.466.683.495	-	10.531.410.466	-
57	Kab. Nias Barat	64.726.971	3.854.215.704	-	3.918.942.675	-
58	Kota Gunungsitoli	64.726.971	6.060.073.739	-	6.124.800.710	-
59	Provinsi Sumatera Barat	9.327.082.063	9.069.597.217	-	18.396.679.280	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	128.098.040	12.776.419.505	-	12.904.517.545	-
61	Kab. Agam	222.572.205	6.589.693.335	-	6.812.265.540	-
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.797.194.102	5.619.401.050	-	7.416.595.152	848.348.044
63	Kab. Padang Pariaman	1.108.114.524	4.957.879.517	-	6.065.994.041	-
64	Kab. Pasaman	742.450.209	6.090.325.963	-	6.832.776.172	-
65	Kab. Pesisir Selatan	1.497.177.118	12.510.693.831	-	14.007.870.949	-
66	Kab. Sijunjung	2.281.241.911	4.785.095.390	-	7.066.337.301	-
67	Kab. Solok	153.012.603	6.165.487.632	-	6.318.500.235	-
68	Kab. Tanah Datar	256.387.175	19.709.414.728	-	19.965.801.903	-
69	Kota Bukit Tinggi	713.325.255	3.441.092.049	-	4.154.417.304	-
70	Kota Padang Panjang	220.427.271	1.585.688.336	-	1.806.115.607	-
71	Kota Padang	646.597.393	15.690.636.708	-	16.337.234.101	-
72	Kota Payakumbuh	1.283.850.175	3.527.037.051	-	4.810.887.226	-
73	Kota Sawahlunto	4.311.099.931	2.821.226.921	-	7.132.326.852	-
74	Kota Solok	220.333.810	3.386.328.250	-	3.606.662.060	-
75	Kota Pariaman	465.710.406	2.460.730.252	-	2.926.440.658	-
76	Kab. Pasaman Barat	2.306.739.281	16.067.714.547	-	18.374.453.828	-
77	Kab. Dharmasraya	2.614.534.667	4.941.012.938	-	7.555.547.605	-
78	Kab. Solok Selatan	644.861.562	4.973.978.131	-	5.618.839.693	-
79	Provinsi Riau	12.466.452.695	5.443.318.114	-	17.909.770.809	-
80	Kab. Bengkalis	64.084.570.408	7.836.720.684	-	71.921.291.092	344.286.654
81	Kab. Indragiri Hilir	8.987.848.110	6.651.208.772	-	15.639.056.882	-
82	Kab. Indragiri Hulu	12.726.788.522	15.964.349.874	-	28.691.138.396	563.667.518
83	Kab. Kampar	13.146.940.320	14.745.172.245	-	27.892.112.565	-
84	Kab. Kuantan Singingi	18.645.491.839	5.207.618.911	-	23.853.110.750	-
85	Kab. Pelalawan	22.207.907.864	13.968.854.258	-	36.176.762.122	1.063.758.400
86	Kab. Rokan Hilir	12.286.721.221	13.497.997.514	-	25.784.718.735	264.774.526
87	Kab. Rokan Hulu	6.380.986.919	4.133.843.930	-	10.514.830.849	-
88	Kab. Siak	21.977.274.847	8.591.475.553	-	30.568.750.400	-
89	Kota Dumai	6.484.069.220	7.014.580.955	-	13.498.650.175	-
90	Kota Pekanbaru	7.430.113.375	11.180.498.523	-	18.610.611.898	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	12.795.867.516	8.201.105.364	-	20.996.972.880	-
92	Provinsi Jambi	4.699.006.154	6.313.066.411	-	11.012.072.565	-
93	Kab. Batanghari	1.856.727.647	8.041.018.566	-	9.897.746.213	-
94	Kab. Bungo	4.419.011.304	7.705.754.522	-	12.124.765.826	2.620.338.599
95	Kab. Kerinci	72.181.429	5.271.459.778	-	5.343.641.207	-
96	Kab. Merangin	1.118.819.947	10.274.191.144	-	11.393.011.091	-
97	Kab. Muaro Jambi	3.874.448.422	7.506.004.844	-	11.380.453.266	-
98	Kab. Sarolangun	5.217.504.154	9.499.154.549	-	14.716.668.703	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.806.274.997	5.129.176.704	-	7.935.451.701	-
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	707.468.353	2.737.866.728	-	3.445.335.081	-
101	Kab. Tebo	5.469.919.086	9.965.816.113	-	15.435.735.199	-
102	Kota Jambi	1.861.271.174	22.746.452.257	-	24.607.723.431	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 706 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
103	Kota Sungai Penuh	203.060.103	2.753.300.832	-	2.956.360.935	-
104	Provinsi Sumatera Selatan	33.945.908.171	6.759.230.808	-	40.705.138.979	-
105	Kab. Lahat	2.138.859.948	8.729.196.250	-	10.868.056.198	-
106	Kab. Musi Banyuasin	8.913.530.686	11.079.973.485	-	19.993.504.171	136.630.903
107	Kab. Musi Rawas	20.496.238.229	5.007.880.681	-	25.504.118.910	-
108	Kab. Muara Enim	74.999.217.236	13.016.501.956	-	88.015.719.192	-
109	Kab. Ogan Komering Ilir	3.143.426.737	4.379.785.602	-	7.523.212.339	-
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.866.301.659	5.173.973.373	-	7.040.275.042	461.210.875
111	Kota Palembang	2.681.273.928	12.010.604.981	-	14.691.878.909	-
112	Kota Prabumulih	4.210.715.140	2.631.783.112	-	6.842.498.252	-
113	Kota Pagar Alam	4.139.682.544	1.902.271.535	-	6.041.954.079	-
114	Kota Lubuk Linggau	2.987.144.683	3.522.688.441	-	6.509.833.124	-
115	Kab. Banyuasin	12.221.853.360	4.668.820.865	-	16.890.674.225	95.918.776
116	Kab. Ogan Ilir	11.140.730.444	2.528.012.513	-	13.668.742.957	279.338.800
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8.999.890.470	14.146.159.712	-	23.146.050.182	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5.877.571.996	5.132.447.000	-	11.010.018.996	-
119	Kab. Empat Lawang	4.401.279.308	3.074.863.938	-	7.476.143.246	-
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.881.630.535	5.280.389.513	-	9.162.020.048	-
121	Kab. Musi Rawas Utara	11.932.608.295	2.951.186.086	-	14.883.794.381	-
122	Provinsi Bengkulu	16.600.942.480	955.511.175	-	17.556.453.655	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	3.757.665.451	3.134.405.585	-	6.892.071.036	-
124	Kab. Bengkulu Utara	40.481.254.490	11.500.660.651	-	51.981.915.141	-
125	Kab. Rejang Lebong	3.147.186.925	6.243.724.502	-	9.390.911.427	1.804.228.229
126	Kota Bengkulu	1.721.951.047	11.495.020.867	-	13.216.971.914	-
127	Kab. Kaur	6.443.513.841	2.883.493.562	-	9.327.007.403	-
128	Kab. Seluma	4.156.949.554	4.155.886.124	-	8.312.835.678	-
129	Kab. Mukomuko	1.942.197.347	6.024.456.403	-	7.966.653.750	-
130	Kab. Lebong	5.328.598.722	5.652.141.034	-	10.980.739.756	1.154.716.200
131	Kab. Kepahiang	2.687.282.455	3.404.899.506	-	6.092.181.961	323.998.400
132	Kab. Bengkulu Tengah	14.363.851.820	4.545.228.575	-	18.909.080.395	-
133	Provinsi Lampung	5.836.728.421	5.577.863.691	-	11.414.592.112	-
134	Kab. Lampung Barat	919.944.626	2.982.880.117	-	3.902.824.743	-
135	Kab. Lampung Selatan	7.173.934.947	6.152.111.538	-	13.326.046.485	-
136	Kab. Lampung Tengah	2.672.164.255	34.045.974.870	-	36.718.139.125	-
137	Kab. Lampung Utara	1.199.141.036	28.234.737.935	-	29.433.878.971	-
138	Kab. Lampung Timur	895.570.996	12.463.944.821	-	13.359.515.817	1.411.494.400
139	Kab. Tanggamus	2.115.815.219	11.886.939.717	-	14.002.754.936	-
140	Kab. Tulang Bawang	1.601.157.775	5.151.873.477	-	6.753.031.252	-
141	Kab. Way Kanan	3.108.890.829	1.669.813.180	-	4.778.704.009	452
142	Kota Bandar Lampung	1.333.020.979	22.340.048.918	-	23.673.069.897	-
143	Kota Metro	872.897.719	2.260.692.541	-	3.133.590.260	-
144	Kab. Pesawaran	1.049.264.262	1.797.032.970	-	2.846.297.232	-
145	Kab. Pringsewu	812.433.055	2.485.284.735	-	3.297.717.790	43.010.000
146	Kab. Mesuji	1.402.372.698	5.295.175.825	-	6.697.548.523	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.482.987.613	1.561.636.878	-	3.044.624.491	-
148	Kab. Pesisir Barat	884.587.413	5.234.173.846	-	6.118.761.259	-
149	Provinsi DKI Jakarta	542.794.834.622	67.808.959.663	-	610.603.794.285	-
150	Provinsi Jawa Barat	4.948.760.861	13.109.241.270	-	18.058.002.131	-
151	Kab. Bandung	5.225.363.956	45.525.022.414	-	50.750.386.370	-
152	Kab. Bekasi	6.827.046.239	36.161.509.488	-	42.988.555.727	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 707 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
153	Kab. Bogor	971.179.069	28.469.709.619	-	29.440.888.688	-
154	Kab. Ciamis	288.920.400	7.217.950.688	-	7.506.871.088	-
155	Kab. Cianjur	2.867.146.514	6.994.260.548	-	9.861.407.062	-
156	Kab. Cirebon	148.544.664	17.794.567.311	-	17.943.111.975	-
157	Kab. Garut	2.248.519.972	14.620.508.688	-	16.869.028.660	-
158	Kab. Indramayu	16.021.900.131	47.528.549.438	-	63.550.449.569	-
159	Kab. Karawang	14.384.769.869	38.851.746.876	-	53.236.516.745	-
160	Kab. Kuningan	304.846.560	9.810.230.425	-	10.115.076.985	-
161	Kab. Majalengka	1.321.913.626	9.134.200.564	-	10.456.114.190	-
162	Kab. Purwakarta	1.716.718.780	9.822.281.502	-	11.539.000.282	-
163	Kab. Subang	17.991.719.013	18.011.974.097	-	36.003.693.110	60
164	Kab. Sukabumi	4.386.739.357	22.479.412.847	-	26.866.152.204	-
165	Kab. Sumedang	400.570.924	3.954.100.598	-	4.354.671.522	658.829.000
166	Kab. Tasikmalaya	2.113.918.821	7.682.502.009	-	9.796.420.830	-
167	Kota Bandung	1.438.325.201	48.658.506.297	-	50.096.831.498	-
168	Kota Bekasi	654.851.209	25.966.489.195	-	26.621.340.404	-
169	Kota Bogor	76.696.344	11.287.395.995	-	11.364.092.339	-
170	Kota Cirebon	118.215.152	2.605.921.602	-	2.724.136.754	-
171	Kota Depok	115.044.516	22.135.786.729	-	22.250.831.245	-
172	Kota Sukabumi	89.479.068	3.122.485.800	-	3.211.964.868	-
173	Kota Tasikmalaya	39.666.595	2.377.071.532	-	2.416.738.127	-
174	Kota Cimahi	111.793.932	8.037.139.313	-	8.148.933.245	-
175	Kota Banjar	3.198.443.044	3.294.833.179	-	6.493.276.223	-
176	Kab. Bandung Barat	1.555.768.576	22.372.070.773	-	23.927.839.349	-
177	Kab. Pangandaran	2.807.018.698	2.592.912.385	-	5.399.931.083	-
178	Provinsi Jawa Tengah	15.797.356.658	8.173.943.778	-	23.971.300.436	-
179	Kab. Banjarnegara	1.650.299.010	13.335.432.539	-	14.985.731.549	-
180	Kab. Banyumas	3.385.014.788	32.856.778.689	-	36.241.793.477	-
181	Kab. Batang	1.067.093.806	8.955.480.430	-	10.022.574.236	319.484.765
182	Kab. Blora	13.353.781.948	6.082.566.399	-	19.436.348.347	-
183	Kab. Boyolali	1.887.264.625	13.726.466.957	-	15.613.731.582	-
184	Kab. Brebes	399.652.711	10.537.611.636	-	10.937.264.347	-
185	Kab. Cilacap	2.803.074.886	14.728.482.605	-	17.531.557.491	-
186	Kab. Demak	812.266.591	8.013.055.554	-	8.825.322.145	-
187	Kab. Grobogan	531.743.912	6.255.998.865	-	6.787.742.777	-
188	Kab. Jepara	66.389.849	8.003.350.766	-	8.069.740.615	-
189	Kab. Karanganyar	1.146.352.241	8.467.245.598	-	9.613.597.839	-
190	Kab. Kebumen	1.955.468.811	17.830.414.360	-	19.785.883.171	-
191	Kab. Kendal	2.456.300.903	8.782.664.815	-	11.238.965.718	-
192	Kab. Klaten	2.919.402.822	14.372.368.839	-	17.291.771.661	-
193	Kab. Kudus	16.656.882.923	12.969.762.701	-	29.626.645.624	1.664.001.600
194	Kab. Magelang	2.562.477.188	16.735.797.769	-	19.298.274.957	-
195	Kab. Pati	1.030.418.386	11.951.194.098	-	12.981.612.484	-
196	Kab. Pekalongan	1.021.279.425	10.621.905.505	-	11.643.184.930	426.915.809
197	Kab. Pematang	745.883.545	8.205.798.043	-	8.951.681.588	-
198	Kab. Purbalingga	474.551.503	7.127.549.993	-	7.602.101.496	-
199	Kab. Purworejo	871.148.732	6.466.565.398	-	7.337.714.130	-
200	Kab. Rembang	3.458.807.757	5.409.204.542	-	8.868.012.299	-
201	Kab. Semarang	1.968.325.129	8.007.428.745	-	9.975.753.874	-
202	Kab. Sragen	597.200.497	10.338.835.000	-	10.936.035.497	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 708 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
203	Kab. Sukoharjo	1.149.177.376	10.542.306.707	-	11.691.484.083	-
204	Kab. Tegal	811.557.116	4.578.899.746	-	5.390.456.862	214.540.000
205	Kab. Temanggung	75.173.814	13.684.158.212	-	13.759.332.026	-
206	Kab. Wonogiri	1.366.755.086	8.436.470.055	-	9.803.225.141	-
207	Kab. Wonosobo	173.854.069	9.449.113.489	-	9.622.967.558	158.083.407
208	Kota Magelang	830.796.995	4.026.826.295	-	4.857.623.290	-
209	Kota Pekalongan	2.234.143.840	3.912.883.636	-	6.147.027.476	-
210	Kota Salatiga	635.423.747	3.288.072.358	-	3.923.496.105	-
211	Kota Semarang	13.675.480.175	7.872.916.561	-	21.548.396.736	-
212	Kota Surakarta	17.039.286.517	6.862.101.979	-	23.901.388.496	-
213	Kota Tegal	1.607.008.801	1.908.249.838	-	3.515.258.639	-
214	Provinsi DI Yogyakarta	2.321.127.551	1.509.286.597	40.427.344.921	44.257.759.069	-
215	Kab. Bantul	480.747.640	6.058.192.347	-	6.538.939.987	-
216	Kab. Gunung Kidul	117.028.584	12.009.367.871	-	12.126.396.455	-
217	Kab. Kulon Progo	40.116.557	4.796.368.052	-	4.836.484.609	-
218	Kab. Sleman	1.432.439.207	5.462.020.151	-	6.894.459.358	343.773.500
219	Kota Yogyakarta	7.165.704.787	12.254.513.189	-	19.420.217.976	-
220	Provinsi Jawa Timur	38.355.588.839	3.843.003.226	-	42.198.592.065	-
221	Kab. Bangkalan	2.864.553.045	13.278.265.398	-	16.142.818.443	-
222	Kab. Banyuwangi	3.482.478.003	40.674.001.806	-	44.156.479.809	-
223	Kab. Blitar	3.959.600.570	7.990.574.365	-	11.950.174.935	-
224	Kab. Bojonegoro	346.098.789.148	15.462.544.001	-	361.561.333.149	596.645.340
225	Kab. Bondowoso	4.929.628.813	16.874.392.522	-	21.804.021.335	-
226	Kab. Gresik	385.199.300	10.615.874.612	-	11.001.073.912	-
227	Kab. Jember	4.772.372.991	23.765.872.089	-	28.538.245.080	-
228	Kab. Jombang	1.857.679.759	17.424.836.415	-	19.282.516.174	-
229	Kab. Kediri	7.392.697.275	6.644.135.126	-	14.036.832.401	-
230	Kab. Lamongan	1.863.153.938	4.624.227.233	-	6.487.381.171	-
231	Kab. Lumajang	2.915.501.116	17.941.166.708	-	20.856.667.824	-
232	Kab. Madiun	3.617.313.696	17.254.364.088	-	20.871.677.784	-
233	Kab. Magetan	3.618.499.849	9.258.370.990	-	12.876.870.839	-
234	Kab. Malang	5.377.685.789	15.259.503.840	-	20.637.189.629	-
235	Kab. Mojokerto	1.143.096.639	5.531.133.282	-	6.674.229.921	970.836.000
236	Kab. Nganjuk	2.603.782.132	14.706.819.016	-	17.310.601.148	-
237	Kab. Ngawi	6.201.700.816	7.131.640.621	-	13.333.341.437	-
238	Kab. Pacitan	4.029.145.609	9.856.834.172	-	13.885.979.781	-
239	Kab. Pamekasan	3.294.429.360	10.340.128.255	-	13.634.557.615	-
240	Kab. Pasuruan	2.143.121.546	20.491.306.086	-	22.634.427.632	-
241	Kab. Ponorogo	6.110.981.595	5.645.335.259	-	11.756.316.854	-
242	Kab. Probolinggo	1.460.531.339	10.362.709.807	-	11.823.241.146	-
243	Kab. Sampang	6.482.581.408	17.594.674.191	-	24.077.255.599	-
244	Kab. Sidoarjo	1.458.368.817	47.547.891.047	-	49.006.259.864	-
245	Kab. Situbondo	4.840.846.144	6.075.716.949	-	10.916.563.093	-
246	Kab. Sumenep	2.650.397.143	13.856.675.462	-	16.507.072.605	-
247	Kab. Trenggalek	4.691.486.450	2.670.573.527	-	7.362.059.977	-
248	Kab. Tuban	9.895.807.170	5.740.658.277	-	15.636.465.447	-
249	Kab. Tulungagung	3.937.106.881	23.137.194.018	-	27.074.300.899	-
250	Kota Blitar	4.558.541.323	1.557.445.536	-	6.115.986.859	-
251	Kota Kediri	4.717.190.092	5.241.721.488	-	9.958.911.580	-
252	Kota Madiun	4.748.543.630	1.747.435.483	-	6.495.979.113	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 709 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
253	Kota Malang	2.509.537.242	5.458.556.070	-	7.968.093.312	-
254	Kota Mojokerto	3.152.056.737	2.853.976.589	-	6.006.033.326	-
255	Kota Pasuruan	3.143.964.785	5.948.212.079	-	9.092.176.864	-
256	Kota Probolinggo	4.279.317.643	4.442.374.582	-	8.721.692.225	-
257	Kota Surabaya	22.713.118.391	52.980.224.377	-	75.693.342.768	-
258	Kota Batu	2.417.230.890	2.112.087.155	-	4.529.318.045	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	26.106.217.549	8.739.166.465	-	34.845.384.014	-
260	Kab. Bengkayang	2.768.337.937	3.999.142.370	-	6.767.480.307	844.689.910
261	Kab. Landak	3.719.646.269	13.603.567.580	-	17.323.213.849	-
262	Kab. Kapuas Hulu	12.008.062.477	10.812.864.858	-	22.820.927.335	-
263	Kab. Ketapang	41.891.360.973	9.373.320.243	-	51.264.681.216	-
264	Kab. Mempawah	1.804.022.925	4.972.505.854	-	6.776.528.779	-
265	Kab. Sambas	6.271.473.584	5.901.083.252	-	12.172.556.936	578.100.026
266	Kab. Sanggau	12.939.543.514	15.820.577.064	-	28.760.120.578	-
267	Kab. Sintang	8.867.726.336	7.120.600.127	-	15.988.326.463	-
268	Kota Pontianak	233.789.858	7.963.989.130	-	8.197.778.988	-
269	Kota Singkawang	445.850.681	4.739.880.666	-	5.185.731.347	-
270	Kab. Sekadai	961.813.533	1.792.000.759	-	2.753.814.292	-
271	Kab. Melawi	16.479.976.288	5.991.087.602	-	22.471.063.890	797.548
272	Kab. Kayong Utara	3.849.182.443	2.618.535.902	-	6.467.718.345	-
273	Kab. Kubu Raya	11.427.905.816	11.528.878.147	-	22.956.783.963	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	61.674.391.197	5.223.404.452	-	66.897.795.649	-
275	Kab. Barito Selatan	10.685.830.777	1.904.717.684	-	12.590.548.461	128.916.000
276	Kab. Barito Utara	56.564.167.482	2.544.807.200	-	59.108.974.682	-
277	Kab. Kapuas	4.996.352.878	15.685.275.772	-	20.681.628.650	-
278	Kab. Kotawaringin Barat	11.217.542.704	7.482.023.751	-	18.699.566.455	765.299.492
279	Kab. Kotawaringin Timur	38.859.944.906	21.286.364.178	-	60.146.309.084	248.020.523
280	Kota Palangkaraya	504.968.950	4.197.154.531	-	4.702.123.481	-
281	Kab. Katingan	10.758.882.907	5.917.711.038	-	16.676.593.945	-
282	Kab. Seruyan	16.118.416.048	14.412.543.800	-	30.530.959.848	710.619.239
283	Kab. Sukamara	4.257.243.979	2.529.033.834	-	6.786.277.813	-
284	Kab. Lamandau	8.772.579.234	5.086.441.586	-	13.859.020.820	-
285	Kab. Gunung Mas	7.525.518.402	11.375.028.126	-	18.900.546.528	-
286	Kab. Pulang Pisau	2.583.934.834	2.308.447.407	-	4.892.382.241	-
287	Kab. Murung Raya	73.918.275.999	8.720.285.434	-	82.638.561.433	-
288	Kab. Barito Timur	14.239.461.520	4.220.442.260	-	18.459.903.780	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	224.342.552.488	6.709.710.426	-	231.052.262.914	-
290	Kab. Banjar	97.076.856.287	8.184.488.956	-	105.261.345.243	189.320.000
291	Kab. Barito Kuala	26.725.530.811	4.240.335.778	-	30.965.866.589	-
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	49.769.108.658	11.689.859.327	-	61.458.967.985	320.264.800
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	33.649.687.771	16.276.484.666	-	49.926.172.437	3
294	Kab. Hulu Sungai Utara	36.355.975.834	12.854.553.591	-	49.210.529.425	-
295	Kab. Kotabaru	179.717.093.534	14.572.321.600	-	194.289.415.134	-
296	Kab. Tabalong	128.767.897.235	13.949.764.673	-	142.717.661.908	-
297	Kab. Tanah Laut	74.986.673.320	20.689.772.171	-	95.676.445.491	108.452.000
298	Kab. Tapin	50.960.590.148	9.959.606.618	-	60.920.196.766	83.746.573
299	Kota Banjarbaru	42.916.309.006	2.884.913.087	-	45.801.222.093	-
300	Kota Banjarmasin	42.749.394.369	6.841.151.363	-	49.590.545.732	-
301	Kab. Balangan	160.285.049.752	10.062.708.821	-	170.347.758.573	-
302	Kab. Tanah Bumbu	58.574.405.527	8.191.756.409	-	66.766.161.936	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 710 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
303	Provinsi Kalimantan Timur	17.439.531.619	9.290.709.389	-	26.730.241.008	-
304	Kab. Berau	151.505.178.044	19.713.944.154	-	171.219.122.198	-
305	Kab. Kutai Kartanegara	222.129.002.156	53.132.378.720	-	275.261.380.876	-
306	Kab. Kutai Barat	117.012.621.448	8.211.637.171	-	125.224.258.619	-
307	Kab. Kutai Timur	431.334.851.997	6.325.255.081	-	437.660.107.078	244.722.140
308	Kab. Paser	97.894.673.155	8.205.956.374	-	106.100.629.529	-
309	Kota Balikpapan	75.335.762.994	18.552.425.121	-	93.888.188.115	-
310	Kota Bontang	66.864.023.064	2.721.496.132	-	69.585.519.196	-
311	Kota Samarinda	111.765.120.880	9.071.021.869	-	120.836.142.749	-
312	Kab. Penajam Paser Utara	55.580.518.069	4.440.517.455	-	60.021.035.524	-
313	Kab. Mahakam Ulu	77.204.956.612	4.858.450.494	-	82.063.407.106	-
314	Provinsi Sulawesi Utara	2.529.582.361	5.684.419.062	-	8.214.001.423	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	4.690.077.970	7.799.933.538	-	12.490.011.508	-
316	Kab. Minahasa	9.677.800	11.849.517.963	-	11.859.195.763	-
317	Kab. Sangihe	33.148.495	8.271.546.580	-	8.304.695.075	-
318	Kota Bitung	1.014.498.837	4.012.005.953	-	5.026.504.790	-
319	Kota Manado	3.247.851.503	7.756.937.519	-	11.004.789.022	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	146.354.182	2.312.472.540	-	2.458.826.722	51.301.558
321	Kab. Minahasa Selatan	37.372.231	7.811.834.436	-	7.849.206.667	82.723.166
322	Kota Tomohon	134.735.430	1.388.448.166	-	1.523.183.596	-
323	Kab. Minahasa Utara	22.400.551.777	3.586.876.299	-	25.987.428.076	-
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	28.745.685	18.306.266.011	-	18.335.011.696	-
325	Kota Kotamobagu	12.892.165	2.403.519.610	-	2.416.411.775	-
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	427.298.113	4.129.979.344	-	4.557.277.457	-
327	Kab. Minahasa Tenggara	91.939.390	11.202.753.078	-	11.294.692.468	-
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.656.768.250	3.109.721.586	-	6.766.489.836	-
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.432.239.501	2.387.118.849	-	3.819.358.350	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	63.844.806.404	3.895.437.559	-	67.740.243.963	-
331	Kab. Banggai	114.821.374.792	563.679.849	-	115.385.054.641	-
332	Kab. Banggai Kepulauan	7.249.544.053	5.863.370.403	-	13.112.914.456	232.517.371
333	Kab. Buol	8.283.579.230	5.147.565.785	-	13.431.145.015	-
334	Kab. Tolitoli	10.869.341.898	8.167.028.036	-	19.036.369.934	-
335	Kab. Donggala	14.619.420.752	13.522.310.220	-	28.141.730.972	258.256.964
336	Kab. Morowali	11.232.594.030	1.271.532.329	-	12.504.126.359	645.892.251
337	Kab. Poso	10.673.913.253	15.132.492.459	-	25.806.405.712	-
338	Kota Palu	8.902.400.241	9.355.526.988	-	18.257.927.229	-
339	Kab. Parigi Moutong	20.966.102.692	14.023.534.538	-	34.989.637.230	1.072.872.500
340	Kab. Tojo Una-Una	17.742.038.236	4.406.007.947	-	22.148.046.183	-
341	Kab. Sigi	8.776.603.946	7.871.835.591	-	16.648.439.537	31.803.855
342	Kab. Banggai Laut	7.218.159.730	2.050.793.619	-	9.268.953.349	-
343	Kab. Morowali Utara	27.786.762.701	242.933.505	-	28.029.696.206	-
344	Provinsi Sulawesi Selatan	10.650.353.056	3.439.415.467	-	14.089.768.523	-
345	Kab. Bantaeng	700.749.575	1.829.873.100	-	2.530.622.675	-
346	Kab. Barru	795.496.706	8.456.708.338	-	9.252.205.044	-
347	Kab. Bone	6.823.178.419	7.194.788.587	-	14.017.967.006	-
348	Kab. Bulukumba	12.189.403.625	831.491.700	-	13.020.895.325	-
349	Kab. Enrekang	880.997.038	1.887.466.729	-	2.768.463.767	-
350	Kab. Gowa	1.465.607.586	7.955.651.949	-	9.421.259.535	641.145.452
351	Kab. Jeneponto	706.528.812	2.678.844.836	-	3.385.373.648	137.886.010
352	Kab. Luwu	1.625.366.954	4.844.643.396	-	6.470.010.350	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 711 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
353	Kab. Luwu Utara	2.494.037.753	3.662.308.658	-	6.156.346.411	400
354	Kab. Maros	4.973.898.276	7.988.257.172	-	12.962.155.448	
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	844.749.321	8.614.329.321	-	9.459.078.642	
356	Kota Palopo	1.155.401.212	2.582.978.155	-	3.738.379.367	
357	Kab. Luwu Timur	12.340.556.445	12.006.320.007	-	24.346.876.452	
358	Kab. Pinrang	695.053.678	4.649.064.538	-	5.344.118.216	
359	Kab. Sinjai	695.053.678	4.681.460.245	-	5.376.513.923	
360	Kab. Kepulauan Selayar	1.733.212.707	5.033.553.900	-	6.766.766.607	
361	Kab. Sidenreng Rappang	1.399.728.699	12.071.366.665	-	13.471.095.364	
362	Kab. Soppeng	825.364.229	13.444.476.979	-	14.269.841.208	
363	Kab. Takalar	705.982.066	1.372.479.782	-	2.078.461.848	137.731.600
364	Kab. Tana Toraja	1.275.760.397	18.706.833.403	-	19.982.593.800	
365	Kab. Wajo	26.981.185.659	8.381.296.679	-	35.362.482.338	
366	Kota Parepare	1.516.395.143	2.549.089.291	-	4.065.484.434	
367	Kota Makassar	1.947.500.915	5.534.549.516	-	7.482.050.431	
368	Kab. Toraja Utara	2.906.865.503	17.047.423.091	-	19.954.288.594	
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	7.344.916.646	4.909.626.028	-	12.254.542.674	
370	Kab. Buton	325.319.813	3.993.695.779	-	4.319.015.592	
371	Kab. Konawe	5.901.373.794	2.402.556.037	-	8.303.929.831	
372	Kab. Kolaka	13.409.082.916	4.838.957.120	-	18.248.040.036	22.024.900
373	Kab. Muna	296.879.440	1.161.181.884	-	1.458.061.324	
374	Kota Kendari	411.724	2.127.970.820	-	2.128.382.544	
375	Kota Bau-bau	308.977.818	4.789.087.536	-	5.098.065.354	
376	Kab. Konawe Selatan	328.783.759	6.804.868.378	-	7.133.652.137	
377	Kab. Bombana	5.866.771.933	7.295.065.814	-	13.161.837.747	
378	Kab. Wakatobi	9.205.968	3.986.471.610	-	3.995.677.578	
379	Kab. Kolaka Utara	4.756.554.468	2.249.120.130	-	7.005.674.598	
380	Kab. Konawe Utara	25.829.306.070	2.427.174.764	-	28.256.480.834	
381	Kab. Buton Utara	35.157.523	3.321.840.937	-	3.356.998.460	
382	Kab. Konawe Kepulauan	158.351.815	2.088.987.325	-	2.247.339.140	
383	Kab. Kolaka Timur	70.878.391	2.355.967.793	-	2.426.846.184	10.953.774
384	Kab. Muna Barat	35.967.195	1.160.045.767	-	1.196.012.962	
385	Kab. Buton Tengah	91.076.935	3.103.992.364	-	3.195.069.299	
386	Kab. Buton Selatan	9.504.601	1.213.857.317	-	1.223.361.918	
387	Provinsi Bali	378.448.338	5.105.118.034	-	5.483.566.372	
388	Kab. Badung	297.926.792	4.705.443.538	-	5.003.370.330	
389	Kab. Bangli	1.593.720	6.900.296.389	-	6.901.890.109	
390	Kab. Buleleng	65.589.184	15.052.398.172	-	15.117.987.356	
391	Kab. Gianyar	2.449.200	13.884.445.129	-	13.886.894.329	
392	Kab. Jembrana	401.211.104	6.552.485.529	-	6.953.696.633	
393	Kab. Karangasem	23.825.658	7.774.537.745	-	7.798.363.403	
394	Kab. Klungkung	-	3.694.667.179	-	3.694.667.179	
395	Kab. Tabanan	70.790.963	6.651.796.552	-	6.722.587.515	
396	Kota Denpasar	2.178.676.384	5.750.187.319	-	7.928.863.703	
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	23.926.845.827	2.878.822.787	-	26.805.668.614	
398	Kab. Bima	9.472.940.725	3.062.757.381	-	12.535.698.106	
399	Kab. Dompu	7.209.357.181	1.178.055.572	-	8.387.412.753	
400	Kab. Lombok Barat	4.885.361.305	6.812.196.042	-	11.697.557.347	67.948.006
401	Kab. Lombok Tengah	7.845.433.648	5.406.305.071	-	13.251.738.719	
402	Kab. Lombok Timur	4.122.500.614	9.346.222.965	-	13.468.723.579	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 712 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
403	Kab. Sumbawa	12.445.110.552	12.320.336.627	-	24.765.447.179	
404	Kota Mataram	9.340.774.591	8.585.453.581	-	17.926.228.172	
405	Kota Bima	6.487.408.635	2.313.634.248	-	8.801.042.883	
406	Kab. Sumbawa Barat	66.398.464.409	3.794.664.552	-	70.193.128.961	
407	Kab. Lombok Utara	6.230.291.545	6.565.918.362	-	12.796.209.907	138.629.900
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.785.132.841	3.940.862.506	-	6.725.995.347	
409	Kab. Alor	195.330.178	7.424.546.509	-	7.619.876.687	
410	Kab. Belu	2.360.729.038	4.850.900.693	-	7.211.629.731	
411	Kab. Ende	211.459.002	19.493.299.663	-	19.704.758.665	1.389.295.956
412	Kab. Flores Timur	322.685.232	4.572.882.717	-	4.895.567.949	
413	Kab. Kupang	1.098.210.478	22.771.495.666	-	23.869.706.144	
414	Kab. Lembata	4.240.054	1.187.970.721	-	1.192.210.775	
415	Kab. Manggarai	175.773.510	6.817.625.827	-	6.993.399.337	
416	Kab. Ngada	249.794.240	1.504.376.591	-	1.754.170.831	
417	Kab. Sikka	194.996.185	8.332.137.297	-	8.527.133.482	
418	Kab. Sumba Barat	363.069.913	8.060.678.851	-	8.423.748.764	
419	Kab. Sumba Timur	1.371.064.200	776.773.133	-	2.147.837.333	20.135.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	845.344.574	23.476.794.030	-	24.322.138.604	
421	Kab. Timor Tengah Utara	2.154.492.677	9.219.117.527	-	11.373.610.204	1.088.250.755
422	Kota Kupang	352.065.852	1.397.408.594	-	1.749.474.446*	
423	Kab. Rote Ndao	4.240.054	6.027.507.403	-	6.031.747.457	
424	Kab. Manggarai Barat	4.240.054	11.992.521.274	-	11.996.761.328	
425	Kab. Nagekeo	8.235.631	8.068.862.147	-	8.077.097.778	
426	Kab. Sumba Barat Daya	546.367.247	15.493.719.214	-	16.040.086.461	
427	Kab. Sumba Tengah	432.401.914	6.331.368.671	-	6.763.770.585	
428	Kab. Manggarai Timur	126.001.403	12.624.222.991	-	12.750.224.394	
429	Kab. Sabu Raijua	74.096.392	9.357.241.536	-	9.431.337.928	
430	Kab. Malaka	4.240.054	1.568.145.491	-	1.572.385.545	
431	Provinsi Maluku	3.892.641.758	7.312.810.974	-	11.205.452.732	
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.253.641.300	3.444.487.932	-	4.698.129.232	
433	Kab. Maluku Tengah	4.012.379.276	9.288.876.072	-	13.301.255.348	
434	Kab. Maluku Tenggara	230.429.111	2.370.658.459	-	2.601.087.570	
435	Kab. Buru	3.447.573.732	271.313.547	-	3.718.887.279	
436	Kota Ambon	707.032.821	15.511.675.475	-	16.218.708.296	
437	Kab. Seram Bagian Barat	6.897.366.330	14.574.801.795	-	21.472.168.125	
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	2.062.495.900	-	2.062.495.900	
439	Kab. Kepulauan Aru	1.828.482.338	6.200.944.034	-	8.029.426.372	
440	Kota Tual	-	3.278.214.874	-	3.278.214.874	
441	Kab. Maluku Barat Daya	616.458.361	11.982.026.310	-	12.598.484.671	
442	Kab. Buru Selatan	3.939.307.654	2.081.688.322	-	6.020.995.976	
443	Provinsi Papua	138.509.570.462	6.100.441.121	-	144.610.011.583	
444	Kab. Biak Numfor	14.269.193.970	6.076.329.349	-	20.345.523.319	
445	Kab. Jayapura	14.350.665.250	3.625.540.296	-	17.976.205.546	
446	Kab. Jayawijaya	13.498.192.874	10.283.403.651	-	23.781.596.525	
447	Kab. Merauke	17.056.592.591	9.468.003.476	-	26.524.596.067	
448	Kab. Mimika	249.050.151.381	7.188.150.047	-	256.238.301.428	
449	Kab. Nabire	7.003.061.329	3.926.385.366	-	10.929.446.695	
450	Kab. Paniai	17.094.043.272	5.447.040.887	-	22.541.084.159	
451	Kab. Puncak Jaya	18.296.448.373	23.061.196	-	18.319.509.569	
452	Kab. Kepulauan Yapen	6.943.796.015	2.578.428.933	-	9.522.224.948	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 713 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
453	Kota Jayapura	6.614.775.524	1.186.829.898	-	7.801.605.422	
454	Kab. Sarmi	21.923.324.411	2.459.561.256	-	24.382.885.667	
455	Kab. Keerom	11.954.688.691	21.913.490.642	-	33.868.179.333	
456	Kab. Yahukimo	19.501.392.678	4.879.818.261	-	24.381.210.939	
457	Kab. Pegunungan Bintang	8.004.933.160	6.318.131.480	-	14.323.064.640	
458	Kab. Tolikara	7.856.957.200	12.255.396.816	-	20.112.354.016	
459	Kab. Boven Digoel	6.907.601.623	8.617.071.530	-	15.524.673.153	
460	Kab. Mappi	5.102.976.804	13.244.387.117	-	18.347.363.921	
461	Kab. Asmat	6.765.990.771	17.547.332.817	-	24.313.323.588	
462	Kab. Waropen	12.912.772.985	169.492.200	-	13.082.265.185	
463	Kab. Supiori	5.918.966.338	5.432.193.700	-	11.351.160.038	
464	Kab. Mamberamo Raya	47.009.543.215	1.373.198.000	-	48.382.741.215	
465	Kab. Mamberamo Tengah	5.750.596.031	10.643.997.900	-	16.394.593.931	
466	Kab. Yalimo	5.784.730.458	9.215.838.440	-	15.000.568.898	
467	Kab. Lanny Jaya	5.749.347.534	11.216.065.120	-	16.965.412.654	
468	Kab. Nduga	5.765.204.619	4.165.747.740	-	9.930.952.359	
469	Kab. Dogiyai	5.883.801.522	166.869.846	-	6.050.671.368	
470	Kab. Puncak	5.966.729.175	588.118.680	-	6.554.847.855	
471	Kab. Intan Jaya	7.686.227.767	2.384.701.278	-	10.070.929.045	
472	Kab. Deryai	5.706.607.625	81.675.700	-	5.788.283.325	
473	Provinsi Maluku Utara	27.442.946.553	1.235.134.529	-	28.679.081.082	
474	Kab. Halmahera Tengah	10.609.127.958	516.583.550	-	11.125.711.508	
475	Kota Ternate	1.884.916.965	3.607.695.297	-	5.492.612.262	
476	Kab. Halmahera Barat	2.896.078.751	6.752.509.500	-	9.648.588.251	50.000.000
477	Kab. Halmahera Timur	64.163.548.888	1.165.585.421	-	65.329.134.309	
478	Kab. Halmahera Selatan	3.504.155.506	3.386.755.299	-	6.890.910.805	
479	Kab. Halmahera Utara	49.469.120.190	6.548.029.768	-	56.017.149.958	1.322.825.987
480	Kab. Kepulauan Sula	28.326.047.801	6.270.476.486	-	34.596.524.287	1.082.149.600
481	Kota Tidore Kepulauan	3.550.134.642	811.318.129	-	4.361.452.771	184.073.482
482	Kab. Pulau Morotai	2.136.498.085	300.379.626	-	2.436.877.711	
483	Kab. Pulau Taliabu	2.742.356.736	1.858.028.200	-	4.600.384.936	
484	Provinsi Banten	558.326.394	5.988.176.381	-	6.546.502.775	
485	Kab. Lebak	5.559.279.979	29.900.821.538	-	35.460.101.517	
486	Kab. Pandeglang	1.439.801.950	38.982.129.164	-	40.421.931.114	
487	Kab. Serang	1.261.354.722	12.981.014.373	-	14.242.369.095	
488	Kab. Tangerang	1.995.325.682	28.116.250.117	-	30.111.575.799	
489	Kota Cilegon	209.858.254	3.408.587.216	-	3.618.445.470	
490	Kota Tangerang	2.662.765.922	2.446.385.126	-	5.109.151.048	
491	Kota Serang	70.728.584	2.834.895.367	-	2.905.623.951	
492	Kota Tangerang Selatan	72.733.673	16.091.292.597	-	16.164.026.270	
493	Provinsi Bangka Belitung	17.767.267.027	3.933.941.238	-	21.701.208.265	
494	Kab. Bangka	8.026.417.963	2.484.311.960	-	10.510.729.923	
495	Kab. Belitung	15.068.955.411	3.178.369.640	-	18.247.325.051	1.382.421.630
496	Kota Pangkal Pinang	3.048.438.650	2.485.802.339	-	5.534.240.989	
497	Kab. Bangka Selatan	26.594.972.749	8.520.600.481	-	35.115.573.230	
498	Kab. Bangka Tengah	10.316.249.277	2.846.857.558	-	13.163.106.835	
499	Kab. Bangka Barat	28.827.464.717	2.817.444.616	-	31.644.909.333	
500	Kab. Belitung Timur	9.342.691.251	4.158.916.474	-	13.501.607.725	
501	Provinsi Gorontalo	5.508.118.645	4.747.597.560	-	10.255.716.205	
502	Kab. Boalemo	800.658.989	3.010.015.273	-	3.810.674.262	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 714 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 10

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
503	Kab. Gorontalo	1.457.610.125	9.130.834.617	-	10.588.444.742	
504	Kota Gorontalo	418.883.567	2.720.838.625	-	3.139.722.192	
505	Kab. Pohuwato	4.165.905.389	9.076.482.128	-	13.242.387.517	
506	Kab. Bone Bolango	2.521.547.047	9.444.983.533	-	11.966.530.580	
507	Kab. Gorontalo Utara	2.066.702.219	6.672.005.390	-	8.738.707.609	
508	Provinsi Kepulauan Riau	10.018.439.141	1.621.321.892	-	11.639.761.033	
509	Kab. Natuna	1.118.666.057	18.598.464.741	-	19.717.130.798	
510	Kab. Kepulauan Anambas	3.033.805.652	2.677.299.064	-	5.711.104.716	
511	Kab. Karimun	1.819.347.291	5.175.058.021	-	6.994.405.312	855.139.140
512	Kota Batam	4.968.068.119	17.009.863.101	-	21.977.931.220	
513	Kota Tanjung Pinang	747.187.122	5.078.276.021	-	5.825.463.143	
514	Kab. Lingga	2.266.861.138	3.021.597.871	-	5.288.459.009	473.036.975
515	Kab. Bintan	1.050.879.019	5.706.382.680	-	6.757.261.699	
516	Provinsi Papua Barat	171.788.205.011	9.469.944.856	-	181.258.149.867	
517	Kab. Fak Fak	7.289.883.917	6.699.881.836	-	13.989.765.753	
518	Kab. Manokwari	14.059.314.801	9.531.597.462	-	23.590.912.263	1.751.974.108
519	Kab. Sorong	12.352.798.592	3.621.390.205	-	15.974.188.797	
520	Kota Sorong	5.054.512.028	2.705.364.820	-	7.759.876.848	
521	Kab. Raja Ampat	12.450.385.894	484.790.300	-	12.935.176.194	
522	Kab. Sorong Selatan	7.031.343.892	500.212.400	-	7.531.556.292	
523	Kab. Teluk Bintuni	36.808.364.639	12.574.199.800	-	49.382.564.439	
524	Kab. Teluk Wondama	7.394.808.694	3.347.523.758	-	10.742.332.452	
525	Kab. Kaimana	7.498.247.129	5.296.203.058	-	12.794.450.187	
526	Kab. Maybrat	3.070.940.710	59.102.400	-	3.130.043.110	
527	Kab. Tambrauw	4.554.914.143	1.637.621.250	-	6.192.535.393	
528	Kab. Manokwari Selatan	2.530.746.796	2.632.861.000	-	5.163.607.796	
529	Kab. Pegunungan Arfak	1.302.461.012	35.695.427.400	-	36.997.888.412	
530	Provinsi Sulawesi Barat	1.907.402.401	3.232.874.978	-	5.140.277.379	
531	Kab. Majene	79.621.672	1.501.963.644	-	1.581.585.316	
532	Kab. Mamuju	850.574.767	2.621.739.036	-	3.472.313.803	
533	Kab. Polewali Mandar	205.477.624	5.757.383.283	-	5.962.860.907	72.179.109
534	Kab. Mamasa	1.670.889.894	1.351.300.731	-	3.022.190.625	
535	Kab. Pasangkayu	1.514.671.184	6.470.587.686	-	7.985.258.870	
536	Kab. Mamuju Tengah	862.080.842	2.091.614.731	-	2.953.695.573	
537	Provinsi Kalimantan Utara	93.056.357.753	2.326.564.563	-	95.382.922.316	
538	Kab. Bulungan	53.542.629.109	4.153.777.106	-	57.696.406.215	
539	Kab. Malinau	19.043.259.691	5.497.757.055	-	24.541.016.746	
540	Kab. Nunukan	64.822.487.543	2.776.164.838	-	67.598.652.381	
541	Kota Tarakan	10.149.983.685	8.426.343.637	-	18.576.327.322	
542	Kab. Tana Tidung	13.307.672.846	3.270.228.460	-	16.577.901.306	329.566.688
Jumlah		7.652.864.361.849	4.602.812.676.254	40.427.344.921	12.296.104.383.024	44.334.660.173



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 715 -

LAMPIRAN 11

RINCIAN PIUTANG EKS

BANK DALAM LIKUIDASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 716 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 11

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2020

No	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekening BUN. 502.000000000			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2020	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2020
				Pengembalian s.d. Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2019	Pengembalian Periode s.d. 31 Desember 2020			
1	2		3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan								
1	PT. Bank Amco	07 Juni 2007	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	62.756.907.617,78	235.681.042,00	72.525.525.999,85	140.797.811.123,91	137.555.202.375,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	54.864.950.344,21	198.817.263,00	238.718.775.607,21	106.107.201.031,41	12.336.232.392,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	106.137.939.050,52	614.405.687,00	692.480.401.236,52	136.297.409.195,04	3.173.701.811.615,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	08 Maret 2007	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	8.985.293.214,00	41.688.430,00	34.125.171.481,19	172.736.782.621,00	167.676.995.454,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	08 Maret 2007	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	52.288.033.866,83	81.818.182,00	99.242.054.119,83	157.450.001.984,00	102.570.560.171,65
6	PT. Bank Mataram Ciharta	08 Maret 2007	336.763.209.888,98	31.188.000.000,00	10.008.577.476,00	-	41.194.577.476,00	6.760.484.884,70	295.568.632.390,98
7	PT. Bank Pacific	08 Maret 2007	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	286.668.571.230,96	26.866.753.564,00	645.558.401.062,76	1.638.279.007.000,00	1.487.808.033.776,97
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	378.668.685.137,15	1.067.782.446,00	1.237.123.684.976,80	1.015.640.110.944,00	450.225.830.395,73
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	97.522.520.581,79	3.218.885.017,00	200.044.124.879,68	181.953.841.474,06	689.354.898.326,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	110.105.897.130,87	8.970.134.600,00	28.025.568.872,00	-	34.995.693.472,00	114.546.589.155,04	75.110.303.668,87
11	PT. Astina Raya Bank	31 Maret 2008	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	85.643.609.406,42	4.375.454.608,00	221.968.667.614,42	56.733.811.676,21	358.949.593.084,35
12	PT. Bank Pinaesaaan	05 Maret 2008	681.084.490.919,58	18.456.880.100,11	49.892.743.342,52	59.470.986,00	68.208.894.428,63	92.182.282.117,24	612.875.596.490,95
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	210.984.000.000,00	120.959.930.081,67	90.034.069.938,00	-	210.993.999.998,67	81.323.394.608**	0,00
14	PT. Bank Industri	Sudah BAST	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	84.131.868.577,00	490.368.271,00	363.746.236.848,00	238.376.301.422,00	147.723.992.478,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	8.554.788.642,87	2.500.000.000,00	0,00	-	2.500.000.000,00	0,00	6.054.788.642,87
	Total BDL Eks Dana Talangan		11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	1.395.529.328.655,18	37.251.106.486,00	4.163.426.209.302,56	4.857.861.644.628,61	7.725.512.572.265,38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 717 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 11

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2020

No	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih Atas Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2020	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2020
				Pengembalian s.d. Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2019	Pengembalian Periode s.d. 31 Desember 2020			
1	2		3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan								
1	PT Bank Asiatic		886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	84.513.884.990,00	21.802.808,00	89.535.687.898,00		797.043.536.545,83
2	PT Bank Dagang Bah		1.331.516.911.477,24	-	498.850.578.608,00	2.114.792.497,00	498.865.372.105,00		832.551.539.372,24
3	PT Bank Global Internasional		804.234.270.395,51	-	329.791.455.812,00	914.850.000,00	330.706.305.812,00		473.527.964.583,51
4	PT Bank Ratu		71.817.985.362,00	-	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00		0,00
5	PT Bank Prasdha Utama		227.134.558.144,00	4.000.000.000,00	18.898.914.545,52	-	20.898.914.545,52		206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan		3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	899.872.820.307,52	3.051.445.405,00	1.011.924.265.712,52		2.309.358.685.100,06
	TOTAL SALDO PIUTANG BDL		15.210.221.732.370,90	TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI		40.302.551.901,00	5.175.350.475.015,08		18.034.871.257.355,40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 718 -

LAMPIRAN 12

RINCIAN ASET KREDIT EKS

BPPN DAN EKS PT PPA



- 719 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPH
Per 31 Desember 2020

Uraian	Debitur ATK di PUPH	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikurangi Karter Pasat (debitur ATK)	Grand Total	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)
JUMLAH	24.339.424.730.007	30.426.895.624.368	28.671.039.689.525	83.439.360.043.821	10.768.083.677.915	72.671.167.612.695

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPH *

• Aset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dolar Amerika (USD)	628.533.217	11.686.485.168.451	272.918.386	3.962.860.630.067	555.614.831	7.723.604.538.394
Dolar Australia (AUD)	7.191	77.455.916	7.191	77.455.916		
Dolar Hongkong (HKD)	12.807.644	23.301.458.707	12.807.644	23.301.458.707		
Dolar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	18.058.845.180	1.785.135	18.058.845.180		
Dolar Singapura (SGD)	412.424	4.389.878.880	412.424	4.389.878.880		
Euro (EUR)	12.917.091	223.853.249.754	90.023	23.888.877.629	12.826.976	199.854.572.131
Guilder Belanda (NLG)	6.393	244.169.496	6.393	244.169.496		
Poundsterling (GBP)	349.627	6.672.794.816	83.503	1.818.049.116	266.124	4.856.745.702
Rupiah (IDR)	9.871.894.028.168	9.871.894.028.168	2.136.131.908.361	2.136.131.908.361	7.735.862.113.608	7.735.862.113.608
Yen Jepang (JPY)	5.858.385.894	772.345.983.717	43.454.035	53.892.978.242	5.815.941.859	718.652.885.475
Jumlah				6.224.471.851.569		16.382.938.961.498



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 720 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

a. Non Aset Transfer Ke Non ATK telah PR/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	26.356.585	399.969.771.374		5.784.743.313	26.356.585	394.185.028.061
Dollar Australia (AUD)						
Dollar Hongkong (HKD)						
Dollar Selandia Baru (NZD)						
Dollar Singapura (SGD)						
Euro (EUR)						
Gulden Belanda (NLG)						
Poundsterling (GBP)						
Rupiah (IDR)	1.331.983.391.763	1.331.983.391.763	101.035.535.581	101.035.535.581	1.230.927.856.182	1.230.927.856.182
Yen Jepang (JPY)						
Jumlah						1.625.112.884.243

*Aset kredit Non ATK telah dipercepatkan tahap pengurusan yang telah PR/PJPN

a-b. Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	856.888.802	12.096.434.928.925	272.918.386	3.968.645.373.361	583.971.415	8.117.789.568.445
Dollar Australia (AUD)	7.191	77.455.316	7.191	77.455.816		
Dollar Hongkong (HKD)	12.807.644	23.301.458.707	12.807.644	23.301.458.707		
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	18.058.645.160	1.785.135	18.058.645.160		
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.388.878.880	412.424	4.388.878.880		
Euro (EUR)	12.917.001	223.853.249.754	90.023	23.838.677.623	12.826.978	199.954.672.131
Gulden Belanda (NLG)	6.393	244.189.498	6.393	244.169.498		
Poundsterling (GBP)	348.627	6.672.794.818	83.503	1.818.049.116	298.124	4.855.745.702
Rupiah (IDR)	11.203.857.419.932	11.203.957.419.932	2.237.187.443.942	2.237.187.443.942	8.968.789.975.990	8.968.789.975.990
Yen Jepang (JPY)	5.859.395.894	772.345.853.717	43.454.035	53.692.878.242	5.815.941.858	718.652.985.475
Jumlah		24.339.424.738.867	2.237.488.888.676	6.331.380.884.265		18.089.843.845.742



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 721 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 30 Desember 2020 (Unaudited)	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	KPKN
Dawanto Karmawan	Bank Deka				KPKN Jakarta I
Setuwan Hayono, Hendarwan Hayono	Bank Aspac (BBKU)	3 579 412 035 913	3 579 412 035 913		KPKN Jakarta I
Hedarto Tantular/Anton Tantular	Bank Central Dagang (BBKU)	1 470 120 709 878		1 470 120 709 878	KPKN Jakarta I
Sjamsul Nursalam	Bank Dewa Ruty (BBKU)	470 858 063 577		470 858 063 577	KPKN Jakarta I
Kaharudin Oglio	Bank Arya Panduarta (BBKU)	358 435 826 804		358 435 826 804	KPKN Jakarta I
Suante Gondokusumo	Bank Dharmala (BBKU)	822 254 323 305		822 254 323 305	KPKN Jakarta I
Kwan Benny Akadi	Bank Onest (BBKU)	143 389 156 494	143 389 156 494		KPKN Jakarta I
Barrigin Marulim Nasibela Penggabean & Joseph Januady	Bank Nipura	170 144 000 000		170 144 000 000	KPKN Jakarta II
Tryono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4 893 525 874 668		4 893 525 874 668	KPKN Jakarta II
Santoso Sumah	Bank Metropolitan	70 460 000 000		70 460 000 000	KPKN Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Bhan	406 416 000 000		406 416 000 000	KPKN Jakarta II
I M Sudarta/BD Darmawan	Bank Aken	509 986 363 636		509 986 363 636	KPKN Jakarta II
Fadil Muhammad	Bank Intan	136 430 000 000		136 430 000 000	KPKN Jakarta II
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	586 794 000 000		586 794 000 000	KPKN Jakarta II
David Naza Wijaya/Tarunggoro Naza	Bank Swetas	4 308 730 000 000		4 308 730 000 000	KPKN Jakarta II
Agus Anwar	Bank Pabta Ismarat	577 812 000 000		577 812 000 000	KPKN Jakarta V
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155 727 000 000		155 727 000 000	KPKN Jakarta V
Martinto Simonsan	Bank Putra Melakarsa	790 557 000 000		790 557 000 000	KPKN Jakarta V
Ulung Bursa	Bank Lantan Berkan	424 658 000 000		424 658 000 000	KPKN Jakarta V
Uda Mochtar	Bank Temura	188 483 118 182		188 483 118 182	KPKN Jakarta V
Samadion Martono	Bank Modern	2 525 651 574 703		2 525 651 574 703	KPKN Jakarta V
Kaharudin Oglio	Bank Uraha Nasional	7 828 253 577 427		7 828 253 577 427	KPKN Jakarta V
Jumlah		30.428.895.824.388	3.722.061.192.407	26.706.834.631.981	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 722 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

3 a) Dikelola Kantor Pusat (Debitor ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Rupiah (IDR)	10 978 101 991 459	10 978 101 991 459	(357 400 508 644)	11 335 502 500 103	11 335 502 500 103
Dolar Amerika (USD)	1 055 746 953	14 891 316 054 890	1 036 800 756 965	896 856 659	13 854 515 297 925
Dolar Australia (AUD)	1 351 561	14 559 056 778	1 578 009 838	1 332 783	12 980 046 940
Dolar Hongkong (HKD)	241 180	438 806 515	438 806 515		
Dolar Selandia Baru (NZD)	252 281	2 552 106 131	2 552 106 131		
Dolar Singapura (SGD)	6 486	89 036 364	89 036 364		
Euro (EUR)	795 074	13 778 731 804	6 976 071 508	436 387	6 902 660 206
Gulden Belanda (NLG)	136 642	5 218 448 582	5 218 448 582		
Poundsterling (GBP)	188 772	3 802 907 062	3 802 607 062		
Yen Jepang (JPY)	998 413 744	136 254 971 344	8 491 359 131	998 413 744	127 783 612 213
Krona Swedia (SEK)	43 357	74 782 693			
Krona Denmark (DKK)	88 828	202 263 626			
Jumlah		26.046.164.958.348	706 803 940 959		25.337.564.117.307

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271 003 330 923,94	271 003 330 923,94			271 003 330 923,94	271 003 330 923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1 980 529 395 026,31	1 800 529 395 026,31			1 980 529 395 026,31	1 980 529 395 026,31
	Dolar Amerika	26 403 968,65	377 629 845 672,30		10 587 967 428,71	26 403 968,65	367 041 978 243,58
Eraska Trestu	Rupiah	893 182 300,00	893 182 300,00			893 182 300,00	893 182 300,00
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17 331 000,00	17 331 000,00			17 331 000,00	17 331 000,00
Total			2 638.873.864 923		10.587.967.429		2 619 495.217.494



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 723 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

Catatan		Kurs B4 per 31 Desember 2020			
Kurs Tengah B4		31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kurs Jual	Kurs Beli
1	Dollar Amerika (USD)	14 105,01	13 901,01	14 175,53	14 034,48
2	Dollar Australia (AUD)	10 771,28	9 739,06	10 625,85	10 716,73
3	Dollar Hongkong (HKD)	1 819,34		1 828,46	1 810,22
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	10 116,13		10 169,53	10 062,72
5	Dollar Singapura (SGD)	10 644,06	10 320,74	10 699,51	10 589,66
6	Euro (EUR)	17 330,13	15 566,80	17 418,89	17 241,36
7	Gulden Belanda (NLG)	38 190,57		38 386,18	37 994,96
8	Poundsterling (GBP)	19 085,50	18 249,84	19 183,74	18 987,25
9	Rupiah (IDR)				
10	Yen Jepang (JPY)	136,47	127,87	137,16	135,78
11	Deutschmark (DEM)	33 894,78	7 970,32	34 068,39	33 721,17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 724 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total (31 Desember 2020)	Mutasi	Saldo Total 31 Desember 2019
TOTAL	3.960.224.870.627	4.944.271.560.052	8.904.496.430.679	(78.507.890.150)	8.983.004.420.829

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.509	1.506.590.969.558		21.789.751.779	106.812.509	1.484.801.217.779
Doller Singapore	79.387	845.113.207		25.672.768	79.387	819.440.438
Rupiah	2.407.807.114.403	2.407.807.114.403	(39.078.938.379)	(39.078.938.379)	2.446.886.052.782	2.446.886.052.782
Yen Jepang	141.216.723	19.272.050.884		1.201.252.989	141.216.723	18.070.797.895
Deutchmark	758.513	25.709.622.578		19.884.031.430	758.513	8.045.591.145
Jumlah		3.960.224.870.627		3.601.770.586		3.956.623.100.039

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PRKNSI

(dalam rupiah)

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)
Digantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000	-	1.299.150.000
Digantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024	-	108.990.024
Digantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.410	-	34.584.020.410



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 725 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Digantara Indonesia PT	BDO (Mandiri)	69.168.040.820	-	69.168.040.820
Digantara Indonesia PT	BDO (Mandiri)	62.099.370.000	-	62.099.370.000
Digantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.689	-	30.938.810.689
Digantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858	-	112.771.449.858
Digantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.549	-	425.983.823.549
Digantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800	-	8.693.911.800
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097	-	91.489.249.097
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.878	-	1.212.685.353.878
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.648	-	26.981.928.648
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	537.678.898.460	-	537.678.898.460
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000	-	45.000.000.000
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	645.087.207.200	(166.556.674.075)	811.643.881.275
Jumlah		3.304.570.204.432	(166.556.674.075)	3.471.126.879.507

*Putang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 726 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Group Texmaco (Malaka perkasa)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750	151.367.074.750	-	-	151.367.074.750	151.367.074.750
		Dollar Amerika	38.822.432	547.590.597.472	-	7.919.776.128	38.822.432	539.670.821.344
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536	459.555.536	-	-	459.555.536	459.555.536
		Dollar Amerika	960.092	13.542.102.460	-	195.858.768	960.092	13.346.243.682
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613	365.572.613	-	-	365.572.613	365.572.613
		Dollar Amerika	2.435	34.345.687	-	496.740	2.435	33.848.947
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948	10.493.948	-	-	10.493.948	10.493.948
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486	470.399.713.486	-	-	470.399.713.486	470.399.713.486
		Dollar Amerika	25.540.008	360.241.940.540	-	5.210.161.632	25.540.008	355.031.778.908
Total				1.544.011.396.493		13.326.293.268		1.530.685.103.225

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)
1	PT Cakra Makmur Asa	Rupiah	24.561.586.875	24.561.586.875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933	4.911.933
3	Fardah	Rupiah	2.528.941	2.528.941
4	Haryanto	Rupiah	59.267	59.267
5	Zamal Abidin	Rupiah	252.041	252.041
Total			24.589.339.056	24.589.339.056



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 727 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Debitur Dikembalikan ke Kantor Pusat

NO	KODE DEBITUR	NAMA	BANK	SURAT PENYERAHAN	TANGGAL PENYERAHAN	NILAI PENYERAHAN RUPIAH	MATA UANG	NILAI KONVERSI
1	03.02.00.00002021	GHAZIE AGUSNAN	BUN BBO	S-1782/KN/2009	06 Mei 2009	11.813.746	RUPIAH	11.813.745,67
2	03.02.00.00002148	PT. ADHIKARA DHARMA	DANA ASIA BBU	S-2666/KN/2009	03 Juli 2009	39.340.455.507	RUPIAH	39.340.455.506,58
3	03.02.00.00002225	BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	BUN BBO	S-1746/KN/2009	06 Mei 2009	250.000.000	RUPIAH	250.000.000,00
4	03.02.00.00002226	BPR NUSAMBA TEMON	BUN BBO	S-1769/KN/2009	06 Mei 2009	200.000.000	RUPIAH	200.000.000,00
5	03.02.00.00002264	PT. INDOKUNING FAJAR INDUSTRI	BAPINDO	S-1861/KN/2009	08 Mei 2009	9.037.798.096	RUPIAH	9.037.798.096,22
6	03.02.00.00002275	PT. SUPER DINAMIKA	BUN	S-1874/KN/2009	08 Mei 2009	5.811.023.048	RUPIAH	5.811.023.048,00
7	03.02.00.00002281	CV. ARROZAQ RIENJAYA qq. PT. ASRI SUMBER LANCAR	BUN	S-1857/KN/2009 & S- 2281/KN/2009	08 Mei 2009 & 10 Juni 2009	1.167.637	DOLLAR AMERIKA	16.469.529.672,59
JUMLAH								71.120.620.069,06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 728 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Catatan

Kurs BI per 31 Desember 2020

Kurs Tengah BI		31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kurs Jual	Kurs Beli
1	Dolar Amerika (USD)	14.105,01	13.901,01	14.175,53	14.034,48
2	Dolar Australia (AUD)	10.771,29	9.739,06	10.825,85	10.716,73
3	Dolar Hongkong (HKD)	1.819,34	-	1.828,46	1.810,22
4	Dolar Selandia Baru (NZD)	10.118,13	-	10.169,53	10.062,72
5	Dolar Singapura (SGD)	10.644,09	10.320,74	10.698,51	10.589,66
6	Euro (EUR)	17.330,13	15.588,60	17.418,89	17.241,36
7	Gulden Belanda (NLG)	38.190,57	-	38.386,18	37.994,96
8	Poundsterling (GBP)	19.085,50	18.249,94	19.183,74	18.987,25
9	Rupiah (IDR)	-	-	-	-
10	Yen Jepang (JPY)	136,47	127,97	137,16	136,78
11	Deutschmark (DEM)	33.894,78	7.970,32	34.068,39	33.721,17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 729 -

LAMPIRAN 13

BAGIAN LANCAR TP/TGR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 730 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 13

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI Rugi
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)								
No	BA	KEMENTERIAN/MEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT						
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT						
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	99.976.996	(13.867.801)	86.089.195	86.976.996	(13.837.802)	78.139.194
4	005	MAHKAMAH AGUNG	148.471.080	(52.235.820)	96.235.260	202.296.079	(49.519.945)	152.776.134
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	17.882.450	(89.462)	17.802.988	17.882.450	(89.462)	17.802.988
6	007	SEKRETARIAT NEGARA						
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.348.478.574	(18.343.007.074)	5.472.500	18.365.978.574	(9.418.049.958)	9.947.928.618
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.783.498.864	(806.731.948)	2.156.766.706	35.182.485.569	(32.940.270.573)	2.242.224.996
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	94.991.641.772	(902.572.505)	94.068.069.267	438.401.338	(429.806.303)	8.595.033
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	386.842.668	(1.934.714)	385.007.954	427.956.878	(2.139.784)	425.816.894
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	149.987.502	(749.837)	149.217.665	308.286.875	(1.541.434)	306.745.241
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	17.328.989.462	(10.585.010.826)	5.733.988.636	21.474.181.169	(17.610.177.092)	3.664.004.077
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				12.046.668	(8.492.833)	2.553.835
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	30.750.000	(163.790)	30.586.250	8.100.000	(40.500)	8.059.500
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	538.265.000	(2.691.326)	535.573.675	577.095.000	(2.885.475)	574.209.525
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	597.186.961	(4.125.834)	593.041.117	613.457.018	(28.109.867)	585.347.151
18	025	KEMENTERIAN AGAMA						
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	12.879.173.554	(5.472.852.718)	7.206.320.836	12.736.654.804	(5.473.155.124)	7.263.499.680
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.033.634.771	(10.188.174)	2.023.446.597			
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10.768.508.535	(8.235.395.182)	1.533.114.353	10.734.095.274	(8.335.814.536)	1.398.280.739
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.223.544	(45.160)	12.178.384
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	160.382.404	(80.1812)	159.580.592	135.819.210	(678.096)	134.941.114
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN						
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	46.000.000	(230.000)	45.770.000			
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN						
27	040	KEMENTERIAN PARAWISATA	1.017.439.000	(5.087.185)	1.012.351.815			
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.500.000	(17.500)	3.482.500	3.500.004	(17.500)	3.482.504
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI				250.000	(1.250)	248.750
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	6.996.300	(478.060)	6.517.940	19.996.000	(89.980)	19.896.020
31	047	KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI						
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA						
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA						
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL						
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	25.011.055.593	(18.034.352.948)	6.976.702.645	24.609.633.188	(18.122.541.878)	6.487.091.310
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS				51.805.080	(259.025)	51.546.055
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	81.550.030	(407.750)	81.142.280	189.094.328	(945.471)	188.148.855
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA				3.194.098	(15.970)	3.178.128
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.217.249.548	(756.733.488)	460.516.060	1.229.749.548	(757.983.488)	471.766.060
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	775.801.008	(3.879.005)	771.922.004	474.513.988	(2.372.570)	472.141.428
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.840.024	(24.200)	4.815.824	4.839.984	(24.200)	4.815.784
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL						
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL						
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	25.880.625	(129.453)	25.751.172	8.395.000	(41.975)	8.353.025
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	160.767.100	(8.796.710)	151.970.390	89.458.100	(442.338)	89.025.762
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	39.433.680	(197.168)	39.236.512	39.433.680	(187.168)	39.236.512
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA						
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA						
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.536.435.997	(9.923.898)	1.526.512.099	1.903.889.653	(12.889.113)	1.891.020.540
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	63.000.000	(63.000.000)		81.000.000	(81.000.000)	
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN						
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA						
54	080	BADAN TENAGA MUKUR NASIONAL	2.375.000	(11.875)	2.363.125	2.375.000	(11.875)	2.363.125



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 731 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 13

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	292.450.000	(292.450.000)	-	198.741.111	(993.706)	197.747.405
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	588.667.512	(2.943.338)	585.724.174	1.688.093.229	(8.440.486)	1.679.652.743
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	16.442.640	(82.213)	16.360.427	20.555.530	(102.778)	20.452.752
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62.068.956	(310.344)	61.758.612	62.068.956	(310.344)	61.758.612
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	471.256.000	(2.356.280)	468.899.720	473.568.000	(2.367.840)	471.200.160
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	85.868.324	(429.332)	85.439.992	109.866.324	(549.332)	109.316.992
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	64.166.538	(320.833)	63.845.703	132.984.381	(664.922)	132.319.459
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	101.285.715	(506.429)	100.779.286	101.285.715	(506.429)	100.779.286
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-	246.498.400	(12.632.482)	233.865.918
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	3.480.000	(17.400)	3.462.600	3.480.000	(17.400)	3.462.600
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	681.519.770	(528.086.999)	153.432.771	735.616.452	(484.948.682)	250.667.769
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	502.654.082	(209.282.538)	293.371.544	553.672.152	(285.414.185)	268.257.967
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	129.431.425	(847.227)	128.584.198	245.280.678	(1.135.403)	244.145.275
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	1.106.041.198	(5.530.206)	1.100.510.992
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
TOTAL			194.035.354.842	(95.163.080.776)	128.872.274.066	135.727.647.729	(85.254.892.747)	48.471.554.982



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 732 -

LAMPIRAN 14

PERSEDIAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 733 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 14

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	18.462.762.955	20.555.125.996
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	29.545.044.646	26.808.990.001
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	16.181.445.206	15.122.730.192
4	005	MAHKAMAH AGUNG	25.956.660.542	21.655.458.707
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	608.842.479.055	461.669.749.675
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	762.508.331.050	653.664.943.349
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	399.784.694.037	92.299.467.705
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	85.842.557.843	68.130.933.519
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	65.201.218.177.534	60.768.547.047.754
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	597.192.271.954	539.879.870.427
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	450.519.498.103	357.732.469.934
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.289.316.145.813	3.379.388.077.960
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	109.693.254.238	220.913.541.087
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.844.631.824.965	1.898.748.247.837
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.522.086.670.412	8.076.615.771.648
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.416.523.764.827	366.768.189.689
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	13.774.985.123.705	8.351.013.323.371
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	109.520.680.387	99.843.951.234
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	757.262.309.578	783.296.342.562
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	480.185.394.440	455.884.848.039
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	654.288.243.019	1.199.736.345.919
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	198.813.534.281	98.769.644.733
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	47.472.973.277.367	18.673.764.818.693
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	30.844.885	46.235.386
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	588.388.582	439.174.124
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	3.034.930.511	1.519.072.537
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	27.013.634.122	20.941.321.841
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.175.459.227	1.731.275.125
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	78.313.027.070	2.949.226.892.025
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	34.289.267.689	88.240.415.725
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.030.752.374	5.831.258.497



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 734 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 14

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.415.814.897	1.361.041.177
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	147.750.671.037	13.050.016.803
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.040.326.308	815.092.601
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	36.530.500	754.000
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	63.221.270.900	78.536.117.950
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.322.466.604	88.524.541.338
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	92.833.552.750	113.094.198.803
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	19.093.413.836	12.630.909.647
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.080.289.589	6.585.979.022
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	7.123.186.845.458	6.150.975.026.091
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	159.015.367.395	158.059.162.101
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.131.481.797	261.879.434
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.493.807.877	2.910.569.434
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	36.179.187.356	26.908.822.005
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	50.165.326.511	406.694.677.561
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	425.044.910.595	572.820.250.095
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	878.329.314	309.804.498
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	148.076.388.492	128.439.482.685
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	76.231.369.547	84.739.247.412
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2.233.315.110	2.475.602.620
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2.278.726.134	2.059.387.646
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	8.867.361.894	26.008.324.171
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	77.182.244.253	79.010.653.331
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	34.899.655.895	20.045.027.316
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	58.885.651.059	58.138.811.220
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	28.541.317.633	128.296.169.856
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	461.418.815	170.039.539
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.959.219.556	2.818.379.154
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.050.982.738	2.412.869.884
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.450.555.282	1.804.956.408
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	11.732.536.375	9.231.603.900
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	14.232.759.987	9.220.571.216



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 735 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 14

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.680.172.207.185	3.361.324.664.214
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	151.300.962.893	321.446.283.566
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.095.863.428.381	1.222.364.380.882
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.101.043.265	675.040.151
68	100	KOMISI YUDISIAL	1.096.262.776	665.953.472
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.478.982.522.845	191.049.761.763
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.223.194.903	44.919.082.188
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	615.131.282	493.086.650
72	107	BADAN SAR NASIONAL	158.492.381.669	123.152.102.407
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	604.300.529	241.905.396
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	102.168.055.006	69.909.295.651
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.170.981.135	976.731.399
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	142.826.008.200	155.033.238.928
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	15.915.570.132	16.583.264.314
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	622.716.518	475.377.062
79	114	SEKRETARIAT KABINET	2.945.404.915	3.466.775.929
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	432.324.366	14.448.455.322
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.654.707.986	2.935.224.196
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.992.053.060	1.788.828.755
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	5.718.879.596	189.068.620
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	68.986.165.969	13.487.365.480
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	3.958.277.278	207.218.045
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF		13.765.638.114
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	1.888.458.922	586.572.492
JUMLAH PADA K/L			160.512.514.584.112	123.447.381.818.805
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	2.293.705.512	2.708.106.030
TOTAL			160.514.808.289.624	123.450.089.924.835



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 736 -

LAMPIRAN 15

IKHTISAR LK PERUSAHAAN

NEGARA (BUMN)



- 737 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020**

(dalam jutaan rupiah)																		
NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
1	Perum Bulog	Audited 2020	15.104.050	6.539.207	21.643.258	12.514.800	885.854	13.400.654	12.522.387	-	-	(156.158)	(4.019.257)	8.346.874	(104.370)	8.242.604	100,00	8.346.874
2	Perum Damri	Audited 2020	125.248	953.401	1.078.650	123.002	461.222	584.225	19.700	631.987	-	(131.437)	(25.825)	494.425	-	494.425	100,00	494.425
3	Perum Jasa Tirta I	Unaudited 2020	500.364	428.054	928.418	196.286	17.176	213.462	31.701	4.186	-	6.432	670.851	713.170	1.786	714.956	100,00	713.170
4	Perum Jasa Tirta II	Audited 2020	770.443	762.633	1.533.076	145.780	166.456	312.236	164.548	-	-	(118.577)	1.164.948	1.210.919	9.921	1.220.840	100,00	1.210.919
5	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Unaudited 2020	189.851	100.738	290.589	97.604	126.878	224.482	9.116	47.606	-	(55.659)	64.757	65.820	287	66.107	100,00	65.820
6	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2020	2.618.711	2.458.742	5.075.453	495.568	88.394	583.962	2.446.043	(516.195)	-	(26.067)	2.807.711	4.511.492	-	4.511.492	100,00	4.511.492
7	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Unaudited 2020	64.697	234.015	298.712	159.380	100.826	260.206	231.769	270.328	-	5.683	(468.274)	38.506	-	38.506	100,00	38.506
8	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Unaudited 2020	140.523	927.951	1.068.474	464.563	199.071	663.635	43.749	-	-	761.072	(399.982)	404.840	-	404.840	100,00	404.840
9	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2020	2.188.177	3.966.900	6.155.077	1.429.085	1.477.386	2.906.470	363.573	(64.059)	-	(152.327)	3.085.985	3.233.173	15.434	3.248.606	100,00	3.233.173
10	Perum Perhutani	Audited 2020	2.515.230	14.080.137	16.595.367	1.173.624	4.168.438	5.342.062	2.586.303	(1.334.148)	-	(1.440.907)	11.450.804	11.262.052	(8.747)	11.253.305	100,00	11.262.052
11	Perum Perikanan Indonesia	Unaudited 2020	412.581	451.196	863.777	167.422	351.067	518.489	24.498	316.936	-	(12.919)	16.769	345.288	-	345.288	100,00	345.288
12	Perum Perumnas	Unaudited 2020	6.864.358	734.237	7.598.595	4.006.016	2.947.744	6.953.760	1.000	1.960.375	-	281.006	(1.606.173)	636.208	8.627	644.835	100,00	636.208
13	Perum Produksi Film Negara	TW III / 2020	10.364	30.059	40.423	11.893	5.388	17.281	56.783	-	-	(33.641)	23.142	-	-	23.142	100,00	23.142
	Total Perum		31.502.598	31.667.270	63.169.869	20.985.023	10.975.900	31.960.923	18.501.170	1.317.016	-	(1.039.851)	12.507.672	31.286.007	(77.062)	31.208.946		31.286.007
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	30.090.503	8.003.385	38.093.889	27.069.198	5.449.880	32.519.078	356.085	2.588.834	-	613.523	1.989.825	5.548.267	26.544	5.574.810	51,00	2.829.616
2	PT Amarta Karya (Persero)	Unaudited 2020	1.137.435	103.069	1.240.504	833.892	201.204	1.035.096	44.285	-	-	238.194	(77.071)	205.408	-	205.408	100,00	205.408
3	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2020	3.883.057	38.693.788	42.576.845	4.766.653	24.454.158	29.220.811	6.414.412	39.388	-	(33.979)	6.931.672	13.351.492	4.542	13.356.034	100,00	13.351.492
4	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2020	5.357.891	39.078.082	44.435.973	6.788.885	16.329.473	23.118.358	15.971.652	821.974	-	(88.189)	5.128.914	21.040.655	276.960	21.317.615	100,00	21.040.655
5	PT ASABRI (Persero)	Audited 2020	-	31.077.171	31.077.171	-	-	44.379.127	200.000	-	-	(1.972.956)	(11.529.000)	(13.301.956)	-	(13.301.956)	100,00	-
6	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2020	1.791.033	6.080.296	7.871.329	905.850	337.235	1.243.085	4.030.810	8.445	620.969	-	1.839.216	6.499.441	128.804	6.628.244	100,00	6.499.441
7	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Audited 2020	-	15.696.521	15.696.521	-	-	54.372.390	235.000	3.037	-	2.582.240	(41.502.448)	(38.682.171)	6.302	(38.675.869)	100,00	-
8	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	-	88.315.317	88.315.317	-	-	42.714.736	67.163.537	(25.366.877)	-	597.091	2.223.917	44.617.668	982.913	45.600.581	100,00	44.617.668
9	PT Balai Pustaka (Persero)	Unaudited 2020	119.671	176.146	295.817	128.057	38.341	166.398	14.400	-	-	122.614	(7.595)	129.419	-	129.419	100,00	129.419
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2020	-	-	1.429.334.484	-	-	1.235.538.401	11.666.667	17.185.297	-	35.654.937	124.656.051	189.142.952	4.653.131	193.796.083	60,05	113.571.924
11	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	-	-	891.337.425	-	-	778.465.226	9.054.807	14.489.019	-	19.667.993	66.980.701	110.192.520	2.679.679	112.872.199	60,06	66.185.001
12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	-	-	1.511.804.628	-	-	1.311.883.252	6.167.291	3.064.436	-	21.173.673	166.972.167	197.377.567	2.533.809	199.911.376	57,10	112.702.591
13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2020	-	-	361.208.406	-	-	341.220.561	5.295.000	2.054.454	-	3.675.087	8.763.294	19.987.845	-	19.987.845	80,00	11.992.707
14	PT Barata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	3.411.730	1.431.147	4.842.877	3.210.136	543.027	3.753.163	762.915	3.221	-	791.278	(467.700)	1.089.714	-	1.089.714	100,00	1.089.714
15	PT Bendikari (Persero)	Audited 2020	546.794	179.265	726.059	601.338	20.849	622.187	75.000	423	-	8.254	20.230	103.907	(35)	103.872	100,00	103.907



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 738 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
16	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Audited 2020	532.811	478.268	1.011.079	293.038	45.612	338.650	375.000	-	-	2.237	295.192	672.428	-	672.428	100,00	672.428
17	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2020	84.284	44.939	129.204	63.883	10.643	74.526	15.000	-	-	(5.104)	44.782	54.678	-	54.678	100,00	54.678
18	PT BioFarma (Persero)	Audited 2020	15.027.584	17.665.094	32.692.678	11.863.015	4.988.318	16.851.333	17.479.821	(6.370.720)	-	1.961.025	1.486.048	14.556.175	1.285.170	15.841.345	100,00	14.556.175
19	PT Bina Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2020	688.028	328.434	1.016.462	90.391	137.053	227.444	255.000	-	-	7.530	526.485	789.015	-	789.015	100,00	789.015
20	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Unaudited 2020	448.807	410.181	858.988	457.605	191.699	649.304	340.916	9.683	-	284.128	(424.992)	209.735	(51)	209.684	100,00	209.735
21	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2020	3.884.428	2.763.134	6.647.562	2.898.796	2.106.630	5.005.426	161.555	-	-	386.209	1.064.760	1.612.524	29.612	1.642.136	100,00	1.612.524
22	PT Dahana (Persero)	Audited 2020	1.179.098	764.271	1.943.369	654.502	144.094	798.596	250.000	2.013	-	28.835	791.873	1.072.721	72.052	1.144.773	100,00	1.072.721
23	PT Danareksa (Persero)	Audited 2020	-	-	2.625.584	-	-	1.860.697	701.480	240.655	-	446.843	(712.628)	676.351	88.536	764.887	100,00	676.351
24	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	7.375.283	3.654.821	11.030.083	4.162.240	3.491.543	7.653.783	20.618.143	1.042.334	-	47.802	(18.331.984)	3.376.295	5	3.376.300	100,00	3.376.295
25	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2020	361.955	811.302	1.173.257	298.923	360.360	659.283	1.984.729	1.427	-	63	(1.472.245)	513.974	-	513.974	78,88	405.423
26	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Unaudited 2020	671.774	1.674.927	2.346.701	3.382.789	349.325	3.732.114	976.600	635	-	-	(2.362.648)	(1.385.413)	-	(1.385.413)	99,95	-
27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	TW III / 2020	271.911	423.167	695.078	515.868	461.092	976.960	240.936	51	-	7.488	(538.598)	(290.123)	8.241	(281.882)	100,00	-
28	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	84.825	28.755	111.580	73.312	3.083	76.405	15.555	-	-	-	19.608	35.163	12	35.175	100,00	35.163
29	PT Garam (Persero)	Audited 2020	296.978	619.220	916.199	134.392	142.966	277.357	600.000	-	-	-	38.841	638.841	-	638.841	100,00	638.841
30	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2020	8.999.830	130.410.862	139.410.692	64.852.990	88.207.530	153.060.521	18.482.162	193.996	-	700.303	(32.849.980)	(13.473.519)	(176.310)	(13.649.829)	60,54	-
31	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2020	129.843	9.690.958	9.820.801	372.614	1.119.669	1.492.282	101.700	82	-	8.500.401	(273.420)	8.328.763	(244)	8.328.519	100,00	8.328.763
32	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2020	23.767.820	87.221.942	110.989.762	38.093.957	41.096.343	79.190.300	20.100.000	7.500.000	-	636.255	2.887.219	31.123.474	675.988	31.799.462	100,00	31.123.474
33	PT Iglas (Persero)	Unaudited 2020	16.092	160.091	176.183	1.369.245	-	1.369.245	47.007	94.583	-	-	(1.334.652)	(1.193.062)	-	(1.193.062)	63,82	-
34	PT Indah Karya (Persero)	Unaudited 2020	377.915	493.903	871.818	145.362	553.988	699.350	7.000	97.707	-	75	67.686	172.468	-	172.468	100,00	172.468
35	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2020	45.032.121	135.746.682	180.778.803	26.588.467	81.605.600	108.194.067	54.177.941	(19.001.920)	-	14.705.092	9.721.891	59.603.004	12.981.732	72.584.736	100,00	59.603.004
36	PT Indra Karya (Persero)	Unaudited 2020	175.856	94.727	270.583	137.657	43.353	181.010	2.000	-	-	57.308	30.265	89.573	-	89.573	100,00	89.573
37	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	213.561	602.006	815.567	142.525	233.159	375.684	456.684	3.656	-	2.772	(23.239)	439.883	-	439.883	100,00	439.883
38	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2020	2.946.902	2.116.562	5.063.464	4.061.837	441.723	4.503.560	1.251.843	-	-	754.376	(1.473.380)	532.839	27.066	559.905	100,00	532.839
39	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2020	20.065	16.916	36.981	23.456	27.518	50.974	27.200	-	-	586	(39.780)	(11.993)	-	(11.993)	100,00	-
40	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	TW III / 2020	143.056	446.005	589.061	313.908	113.556	427.464	198.870	650	-	188.074	(225.997)	161.597	-	161.597	100,00	161.597
41	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	364.486	931.279	1.295.765	643.298	1.072.846	1.716.144	350.000	1.229	-	731.796	(1.002.751)	(419.728)	(653)	(420.378)	100,00	-
42	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2020	10.705.995	93.380.651	104.086.646	14.928.687	64.382.344	79.311.031	3.628.936	3.997.085	-	(614.153)	12.062.621	19.074.489	5.701.126	24.775.615	70,00	13.352.142
43	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Unaudited 2020	519.226	1.636.656	2.155.882	746.468	515.984	1.262.452	363.945	111.968	-	(5.764)	423.161	893.310	120	893.430	73,15	653.456
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	TW III / 2020	153.161	113.916	267.077	12.120	38.317	50.437	40.000	-	-	(1.322)	177.862	216.640	-	216.640	60,00	129.884
45	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Unaudited 2020	347.963	252.287	600.250	111.926	1.850	113.776	150.000	-	-	-	336.474	486.474	-	486.474	60,00	291.884
46	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2020	117.652	271.910	389.562	47.368	51.073	98.441	25.863	-	-	(1.038)	265.695	290.521	600	291.121	51,09	148.427
47	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2020	9.164.500	44.042.569	53.207.069	9.281.616	26.865.473	36.167.090	12.268.743	-	-	(1.506.438)	6.085.705	16.848.010	191.969	17.039.980	100,00	16.848.010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 739 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
48	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	TW I / 2020	49.277	757.021	806.298	1.760.390	141.612	1.902.002	798.994	-	-	45.000	(1.939.698)	(1.095.704)	-	(1.095.704)	96,65	-
49	PT Kertas Leles (Persero) (dalam palit)	TW III / 2018	26.791	567.027	593.818	591.048	725.419	1.316.467	417.049	-	-	618.400	(1.758.098)	(722.649)	-	(722.649)	100,00	-
50	PT Klining Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2020	2.399.975	28.639	2.428.614	1.977.834	19.456	1.997.290	102.000	-	-	(1.954)	329.659	429.704	1.620	431.324	100,00	429.704
51	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Unaudited 2020	12.527.370	38.104.093	50.631.463	10.627.102	30.656.258	41.283.360	13.929.717	2.302.853	-	23.285.945	(29.544.801)	9.973.913	(625.811)	9.348.103	80,00	7.979.131
52	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2020	4.158.395	2.001.074	6.159.469	4.820.346	1.019.232	5.839.578	175.001	-	-	530.166	(492.336)	212.831	107.060	319.891	100,00	212.831
53	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	TW III / 2020	90.005	384.000	474.005	4.125.100	3.122.084	7.247.184	1.964.556	-	-	45.162	(8.783.029)	(6.773.311)	132	(6.773.179)	96,99	-
54	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2020	3.510.661	2.801.316	6.311.977	2.735.683	3.235.705	5.971.387	3.885.661	12.450	-	225.732	(3.783.217)	340.626	(36)	340.590	100,00	340.626
55	PT PAMN (Persero)	TW III / 2020	-	1.106.433	-	-	4.404.484	45.997	192.065	-	-	-	(3.536.113)	(3.298.051)	-	(3.298.051)	93,04	-
56	PT PDI Pulau Batam (Persero)	TW III / 2020	36.516	50.493	87.009	6.311	31.670	37.981	19.000	-	-	-	30.034	49.028	-	49.028	100,00	49.028
57	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2020	-	71.468.960	-	-	46.865.344	6.250.000	-	-	-	6.755.360	11.595.111	24.600.471	3.145	24.603.616	100,00	24.600.471
58	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2020	2.046.355	13.919.787	15.966.142	2.193.720	7.511.890	9.705.610	1.700.000	527.133	-	(221.735)	3.442.536	5.447.935	812.598	6.260.533	100,00	5.447.935
59	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2020	19.163.488	32.521.163	51.684.651	5.040.477	29.557.209	34.597.686	1.444.029	(178.179)	-	(1.119.690)	15.928.506	16.074.667	1.012.298	17.086.965	100,00	16.074.667
60	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2020	5.532.616	26.862.589	32.395.205	3.292.217	17.861.332	21.153.548	1.018.953	-	-	86.159	9.421.822	10.526.934	514.722	11.041.657	100,00	10.526.934
61	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2020	1.217.364	10.563.879	11.781.242	856.903	4.790.600	5.647.503	3.112.085	1.466	-	-	2.983.986	6.097.537	36.203	6.133.740	100,00	6.097.537
62	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	3.989.384	3.414.900	7.404.284	812.613	210.762	1.023.375	7.629.900	143	-	(134.919)	(1.117.255)	6.377.869	3.040	6.380.909	100,00	6.377.869
63	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2020	33.924.939	19.547.512	53.472.451	27.986.827	11.478.634	39.465.461	619.990	4.687.612	-	2.167.379	3.149.260	10.624.241	3.382.749	14.006.990	51,12	5.431.112
64	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	917.692	2.067.735	2.985.427	228.700	711.576	940.276	880.000	797.808	-	(7.467)	375.407	2.045.748	(597)	2.045.151	100,00	2.045.748
65	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2020	154.729	452.685	607.413	167.084	293.312	460.396	350.537	-	-	1.629	(205.149)	147.017	-	147.017	100,00	-
66	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Audited 2020	16.981.809	114.701.457	131.683.265	38.194.413	39.613.468	77.807.881	40.216.132	-	-	25.145.928	(15.187.554)	50.174.506	3.700.878	53.875.384	100,00	50.174.506
67	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2020	-	31.664.889	-	-	26.077.979	2.300.000	1.500.000	-	-	339	1.772.694	5.573.033	13.877	5.586.910	100,00	5.573.033
68	PT Pertamina (Persero)	Proforma Audited	325.523.554	648.131.450	973.655.004	150.815.907	381.996.860	532.812.567	230.425.218	(13.305.583)	12.453	(526.920)	193.752.923	410.358.091	30.484.347	440.842.437	100,00	410.358.091
69	PT Pertamina (Persero)	Audited 2020	456.564	1.138.244	1.594.808	268.634	596.036	864.669	1.021.315	39.722	-	744.939	(1.075.842)	730.133	5	730.139	100,00	730.133
70	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Proforma Audited	96.334.251	1.491.801.508	1.567.935.759	147.664.040	500.459.127	648.123.167	135.342.182	141.019	5.075.552	661.734.097	136.585.580	938.878.430	934.162	939.812.592	100,00	938.878.430
71	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2020	6.020.825	4.937.156	12.957.981	6.288.396	3.011.481	9.299.877	2.966.688	(308.059)	-	354.663	611.734	3.655.026	3.078	3.658.104	100,00	3.655.026
72	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2020	389.282	2.831.477	3.220.758	222.447	944.643	1.167.089	156.200	-	-	1.892.139	2.048.339	5.330	2.053.669	100,00	2.048.339	
73	PT Pindad (Persero)	Audited 2020	6.571.948	1.168.995	7.740.943	5.747.748	576.486	6.324.234	1.367.542	-	-	(356.404)	408.551	1.416.690	19	1.416.708	100,00	1.416.690
74	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2020	3.399.627	5.728.335	9.127.961	3.137.814	1.341.449	4.478.263	455.023	-	-	2.171.543	2.024.400	4.650.966	(2.268)	4.648.698	100,00	4.650.966
75	PT Primmisina (Persero)	TW III / 2020	32.084	126.801	158.885	110.043	10.417	120.460	13.000	2.276	-	104.868	(61.719)	38.425	-	38.425	53,00	20.365
76	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	43.041.157	84.243.716	127.284.873	23.063.301	31.604.765	54.668.066	25.000.000	-	-	32.033.193	15.377.883	72.411.076	205.731	72.616.807	100,00	72.411.076
77	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	4.983.891	9.440.000	14.423.891	5.101.332	8.034.959	1.051.567	996.231	-	-	3.148.698	1.114.242	6.310.739	78.194	6.389.933	100,00	6.310.739
78	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Unaudited 2020	-	10.660.941	-	-	7.173.272	878.358	270	-	-	1.174.960	1.434.063	3.487.651	18	3.487.669	100,00	3.487.651
79	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2020	154.801	4.937.471	5.092.272	561.802	1.429.226	1.991.028	534.000	1.008	-	4.718.969	(2.152.733)	3.101.244	-	3.101.244	100,00	3.101.244



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 740 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
80	PT Serinah (Persero)	Audited 2020	52.677	223.016	275.693	83.308	38.904	122.212	46.850	181	-	177.855	(71.461)	153.425	56	153.481	100,00	153.425
81	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2020	1.130.926	4.606.250	5.737.176	850.139	1.479.148	2.329.287	993.253	1.270.607	-	(59.326)	1.203.320	3.407.854	35	3.407.889	75,51	2.573.270
82	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	15.564.804	62.441.640	78.006.244	11.506.163	30.846.746	42.352.909	593.152	1.458.258	-	82.174	32.039.825	34.173.409	1.479.928	35.653.335	51,01	17.431.856
83	PT Semen Kupang (Persero)	Unaudited 2020	16.287	597.808	613.895	21.080	566.383	587.463	133.713	-	-	-	(107.281)	26.432	-	26.432	61,48	16.250
84	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2020	1.807.238	1.938.550	3.745.788	383.079	522.001	905.081	300.000	1.141	-	663.883	1.876.515	2.841.539	(832)	2.840.707	95,00	2.699.462
85	PT Survei Udara Panas (Persero)	Unaudited 2020	5.433	32.001	37.434	46.757	132.304	179.061	13.000	-	-	-	(154.627)	(141.627)	-	(141.627)	100,00	-
86	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2020	1.104.554	722.715	1.827.269	352.963	104.129	457.092	25.000	105	-	197.897	1.153.255	1.376.257	(6.080)	1.370.177	85,12	1.171.470
87	PT Taspen (Persero)	Unaudited 2020	-	-	289.239.176	-	-	274.431.523	500.000	-	-	(744.453)	14.939.587	14.695.134	112.519	14.807.653	100,00	14.695.134
88	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	46.503.000	200.440.000	246.943.000	69.093.000	56.961.000	126.054.000	4.953.000	2.711.000	-	374.000	94.489.000	102.527.000	18.362.000	120.889.000	52,09	53.406.314
89	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2020	143.657	557.221	700.878	33.664	30.236	63.900	250.000	106	-	(14.075)	400.947	636.977	1	636.978	100,00	636.977
90	PT Varuna Tirta Prakarya (Persero)	TW III / 2020	130.086	242.109	372.175	118.549	27.254	145.803	11.000	-	-	225.058	(9.688)	226.372	-	226.372	100,00	226.372
91	PT Virama Karya (Persero)	Unaudited 2020	390.344	135.133	525.477	224.380	75.561	299.941	25.000	1.051	-	109.183	90.302	225.536	-	225.536	100,00	225.536
92	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	32.538.763	73.050.197	105.588.960	48.237.836	40.773.569	89.011.405	1.357.395	5.849.531	-	765.435	(440.120)	7.532.242	9.045.313	16.577.555	66,04	4.974.292
93	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	47.980.946	20.128.239	68.109.185	44.168.468	7.283.292	51.451.760	896.995	6.555.389	-	1.835.684	4.390.063	13.678.131	2.979.294	16.657.425	65,05	8.897.624
94	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2020	396.251	179.472	575.723	282.877	36.248	319.125	50.000	-	-	(6.148)	212.746	256.599	-	256.599	100,00	256.599
	Total Persero		923.841.976	3.519.166.287	9.178.548.197	854.866.758	1.580.957.831	6.605.221.580	779.395.552	18.054.370	5.708.974	876.079.656	789.267.719	2.468.506.272	104.820.345	2.573.326.617		2.246.235.879
	TOTAL		955.344.574	3.550.833.557	9.241.718.066	875.851.780	1.591.933.731	6.637.182.503	797.896.722	19.371.387	5.708.974	875.039.805	801.775.391	2.499.792.280	104.743.283	2.604.535.563		2.277.521.887



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 741 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP - BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN LAIN	BEBAN LAIN LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
1	Perum Bulog	Audited 2020	27.698.291	26.880.285	818.006	379.172	303.188	894.015	1.670.724	(776.710)	44.308	(821.015)	72.055	(748.961)	(822.852)	(750.684)
2	Perum Damri	Audited 2020	738.335	950.246	(211.911)	9.632	15.205	(223.484)	18.736	(242.220)	(22.143)	(220.077)	(84.339)	(304.416)	(220.077)	(304.416)
3	Perum Jasa Tirta I	Unaudited 2020	650.907	467.984	182.923	17.665	48.567	52.021		52.021	10.608	41.413	6.018	47.431	41.386	47.414
4	Perum Jasa Tirta II	Audited 2020	815.627	678.520	137.106	28.246	26.785	138.567		138.567	14.608	123.960	(77.988)	45.970	124.003	45.970
5	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Unaudited 2020	375.355	369.154	6.201	9.286	4.147	11.340		11.340	1.248	10.091		10.091	10.091	10.091
6	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2020	1.551.464	2.444.905	(892.941)	130.266	12.948	(775.524)		(775.524)	(165.083)	(580.441)	(9.879)	(590.320)	(580.441)	(590.320)
7	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Unaudited 2020	324.949	342.865	(17.916)	9.129	707	(8.494)	9.339	(18.633)		(18.633)		(18.633)	(18.633)	(18.633)
8	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Unaudited 2020	145.427	166.370	(20.943)	10.758	8.180	(18.365)	38.452	(56.617)		(56.617)		(56.617)	(56.617)	(56.617)
9	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2020	3.293.407	2.821.308	472.099	111.511	24.809	558.802	156.001	402.801	101.703	301.098	(45.059)	256.039	296.195	253.231
10	Perum Perhutani	Audited 2020	4.524.280	4.277.123	247.157	91.825		339.082	32.208	306.883	(441.588)	748.471	(426.566)	321.905	748.452	321.949
11	Perum Perikanan Indonesia	Unaudited 2020	389.603	404.642	(15.039)	7.309	30.180	(37.910)		(37.910)		(37.910)		(37.910)	(37.910)	(37.910)
12	Perum Pemasaran	Unaudited 2020	687.608	777.186	(89.577)	71.740	438.240	(446.077)		(446.077)	12.541	(458.618)		(458.618)	(455.987)	(455.987)
13	Perum Produksi Film Negara	TW III / 2020	7.459	8.958	(1.500)	2.203	601	102		102		102		102	102	102
	Total Perum		41.812.722	40.588.925	1.223.797	872.847	913.563	483.085	1.925.461	(1.442.376)	(473.788)	(568.577)	(565.740)	(1.534.338)	(876.678)	(1.536.190)
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	10.877.682	9.819.950	1.057.732	156.794	330.573	824.254	794.519	39.735	16.033	23.703	41.208	64.909	23.977	65.122
2	PT Aneka Karya (Persero)	Unaudited 2020	526.030	519.151	6.879	150.133	118.750	38.271	20.178	18.093	14.142	1.950	2.990	6.940	3.850	6.940
3	PT Arifkasa Pura I (Persero)	Audited 2020	3.619.109	5.278.060	(1.658.950)	308.075	218.521	(1.577.398)	1.250.806	(2.828.202)	(489.579)	(2.338.623)	(273.195)	(2.611.818)	(2.327.509)	(2.600.702)
4	PT Arifkasa Pura II (Persero)	Audited 2020	5.843.728	7.209.797	(1.366.070)	170.214	190.392	(1.386.250)	1.136.912	(2.523.161)	(26.884)	(2.496.277)	514.419	(3.010.696)	(2.433.507)	(2.538.537)
5	PT ASABRI (Persero)	Audited 2020	2.763.930	8.384.535	(5.620.605)			(5.620.605)		(5.620.605)	18.100	(5.638.705)	838.184	(4.800.521)	(5.638.705)	(4.800.521)
6	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2020	3.042.520	2.990.671	51.849	221.312	31.838	241.323	36.196	205.127	23.980	181.147	(25.479)	155.668	167.397	138.916
7	PT Asuransi Jasa Raya (Persero)	Audited 2020	53.107	419.282	(366.175)		3.671.508	(4.037.683)		(4.037.683)	10.168	(4.047.851)	(21.514)	(4.069.365)	(4.045.500)	(4.068.634)
8	PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	20.743.536	18.599.810	2.143.726	739.067		2.881.813		2.881.813	648.787	2.233.026	44.982	2.277.978	2.233.917	2.274.563



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 742 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP - BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATMBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATMBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3-4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
9	PT Balai Pustaka (Persero)	Unaudited 2020	68 740	68 246	1 494	1 480	972	2 012	471	1 541	273	1 268		1 268	1 268	1 268
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2020	128 908 872	105 732 589	23 176 303	121 738	23 798 041	23 798 041		23 798 041	5 652 417	17 645 624	3 426 831	21 072 455	17 119 753	20 466 256
11	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	74 815 951	59 694 597	5 231 444		119 281	5 112 153		5 112 153	1 790 711	3 321 442	871 280	4 192 722	3 260 403	4 001 412
12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	148 143 711	125 814 483	22 329 228	4 461 039	65 421	26 724 848		26 724 848	8 064 453	18 660 393	3 097 386	21 757 779	18 654 753	21 727 515
13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2020	27 620 387	25 290 102	2 330 285	105	58 533	2 270 857		2 270 857	688 488	1 602 358	750 353	2 352 711	1 602 358	2 352 711
14	PT Barata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	1 247 785	1 583 658	(335 873)	17 776	64 126	(382 272)	90 498	(477 770)	14 654	(482 374)	313 680	(173 694)	(482 374)	(173 694)
15	PT Berdikam (Persero)	Audited 2020	1 747 956	1 633 681	114 074	49 041	68 385	93 730	1 048	92 684	30 961	61 723	769	62 493	61 735	62 501
16	PT Bhande Chara Pakse (Persero)	Audited 2020	1 107 480	989 455	108 005	8 970	208	114 769	13 428	101 341	25 580	75 761	1 103	76 864	75 761	76 964
17	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2020	105 408	103 362	2 046	7 388	1 295	9 119		9 119	4 607	4 512	(646)	3 665	4 512	3 665
18	PT BuiFama (Persero)	Audited 2020	14 327 864	13 489 075	838 889	303 687	1 132 576	725 285	407 281	118 106	289 195	(126 787)	162 398	284 631	168 765	
19	PT Buo Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2020	791 835	645 874	145 961	17 476	30 413	133 024		133 024	32 625	100 489	(6 221)	92 278	100 489	92 278
20	PT Bona Brima Indra (Persero)	Unaudited 2020	305 853	293 950	11 903	5 187	2 767	14 323	8 427	5 896		5 896		5 896	5 896	5 896
21	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2020	2 434 915	2 453 390	(18 475)	245 089	72 001	154 613	117 078	37 534	3 877	33 657	13 268	46 925	31 305	44 567
22	PT Dahana (Persero)	Audited 2020	1 632 879	1 583 051	49 828	105 134	154 941	13 652	141 309	18 366		122 923	(6 452)	114 471	123 730	115 278
23	PT Dinarsika (Persero)	Audited 2020	418 563	430 333	(11 831)	196 042	59 143	125 089		125 089	24 939	100 130	(40 170)	59 960	83 417	43 473
24	PT Diantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	2 321 082	2 130 545	190 537	52 436	29 166	213 807	280 136	(86 329)	38 874	(108 203)	(3 886)	(110 088)	(106 202)	(110 088)
25	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2020	611 520	560 338	51 182	14 707	4 288	41 621	26 895	14 626	6 811	7 815		7 815	7 815	7 815
26	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahan (Persero)	Unaudited 2020	528 118	793 003	(266 885)	110 946	83 746	(239 885)	21 206	(268 891)	1 579	(268 470)		(268 470)	(268 470)	(268 470)
27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	TW III 2020	129 111	121 572	7 539	3 674	680	9 533	14 376	(4 843)	1 214	(6 057)		(7 587)	(7 587)	(7 587)
28	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	92 230	86 827	5 403	2 661	1 315	6 749	3 998	2 751	210	2 541	(386)	2 175	2 541	2 175
29	PT Garam (Persero)	Audited 2020	111 323	272 636	(161 313)	37 683	72 010	(145 640)	8 231	(153 848)	(18 920)	(134 918)	(3 071)	(137 989)	(134 918)	(137 989)
30	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2020	22 252 580	43 768 490	(21 516 908)	778 852	1 342 284	(22 080 551)	6 202 086	(28 282 637)	(4 661 239)	(23 681 402)	134 544	(23 546 858)	(23 237 319)	(23 103 842)
31	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2020	233 864	422 955	(189 091)	99 738	25 830	(155 183)	25 548	(180 732)	895	(181 427)	(8 096)	(189 523)	(180 358)	(188 454)
32	PT Mutama Karya (Persero)	Audited 2020	21 842 841	20 960 780	882 061	751 911	790 616	843 376	2 554 192	(1 910 816)	149 977	(2 060 793)	245 183	(1 815 610)	(2 098 133)	(1 852 650)
33	PT Iglas (Persero)	Unaudited 2020	61	5 121	(5 060)	44 445	65 611	(26 226)	88 189	(94 415)	(19 084)	(75 331)		(75 331)	(75 331)	(75 331)
34	PT Indah Karya (Persero)	Unaudited 2020	52 174	51 424	750	2 336	324	2 762	2 308	454	114	340		340	340	340



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 743 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP - BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAJIN - LAJIN	BEBAN LAJIN - LAJIN	ERIS	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATMBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATMBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10+11	13	14
35	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2020	65 988 970	61 463 940	5 105 030	6 047 853	4 196	11 148 687	7 720 111	3 428 576	1 808 140	1 620 435	238 197	2 058 633	699 171	1 065 702
36	PT Indra Kerya (Persero)	Unaudited 2020	170 633	163 478	7 157	4 207		11 364	401	10 963	3 569	7 394		7 394	7 394	7 394
37	PT Industri Kapa Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	154 741	142 708	16 033	599	38	16 564	4 769	11 795	2 649	9 846		9 846	9 846	9 846
38	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2020	2 319 481	2 339 165	(19 685)	30 478	144 288	(133 495)	322 200	(455 695)	(120 705)	(334 990)	339 668	4 678	(336 453)	2 795
39	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2020	38 081	48 117	(10 036)	166	0	(8 871)	1 252	(11 122)	2 120	(13 242)	(207)	(13 449)	(13 242)	(13 449)
40	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	TW III / 2020	40 980	49 927	(8 937)	562	3 384	(11 759)	12 604	(24 363)	212	(24 575)		(24 575)	(24 575)	(24 575)
41	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	427 893	476 297	(48 604)	17 522	45 506	(76 588)	63 423	(140 011)	(8 115)	(131 896)	(16 847)	(151 743)	(130 650)	(160 497)
42	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2020	13 704 021	9 596 300	4 117 721	547 037	320 358	4 344 400	3 647 949	696 451	738 080	(41 629)	143 001	101 372	644 404	501 047
43	PT Kawasan Bankat Nusantara (Persero)	Unaudited 2020	579 968	521 802	58 066	56 349	30 483	83 932	16 371	67 561	48 870	18 691		18 691	18 691	18 691
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	TW III / 2020	34 332	22 695	11 637	3 369		15 006	3 311	11 695	2 314	9 381		9 381	9 381	9 381
45	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Unaudited 2020	199 106	178 709	20 397	2 824		23 221	3 099	20 122	3 535	16 587		16 587	16 587	16 587
46	PT Kawasan Industri Wiprakusuma (Persero)	Audited 2020	102 340	79 059	26 281	2 529	194	28 618		28 616	4 401	24 216	(699)	23 218	24 216	23 218
47	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2020	18 074 851	19 081 825	(1 007 074)	357 998	616 159	(1 267 235)	953 060	(2 220 295)	(494 057)	(1 736 238)	(1 111 724)	(2 847 962)	(1 691 730)	(2 803 524)
48	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	TW I / 2020	1 940	6 664	(4 724)		10	(4 714)	12 920	(17 634)		(17 634)		(17 634)	(17 634)	(17 634)
49	PT Kertas Lestes (Persero) (dalam pak)															
50	PT Kilang Bayangk Indonesia (Persero)	Audited 2020	154 071	88 267	85 804	17 824	3 727	99 900		98 900	33 454	86 447	(541)	65 908	66 373	65 832
51	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Unaudited 2020	20 742 779	19 391 508	1 356 273	3 665 839	584 261	4 437 651	1 849 951	2 487 900	787 741	1 700 159	2 213 809	3 913 968	1 717 316	3 932 131
52	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2020	3 040 129	3 179 270	(139 140)	196 195	87 736	(30 681)	238 443	(269 124)	62 870	(331 994)	225 282	(106 701)	(350 345)	(125 232)
53	PT Mergah Nusantara Airlines (Persero)	TW III / 2020	47 026	121 417	(74 391)	39 784	56 885	(71 432)	91 711	(163 203)		(163 203)		(163 203)	(163 198)	(163 198)
54	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2020	1 825 631	1 687 770	137 861	15 051	51 234	101 678	85 824	15 854	931	14 923	1 150	16 073	14 926	16 076
55	PT PANN (Persero)	TW III / 2020	18 622	30 138	(11 516)	19 330	1 599	6 216		6 216	5 880	336		336	336	336
56	PT PDI Pulau Batam (Persero)	TW III / 2020	42 769	48 120	(5 351)	1 844	1 100	(4 507)		(4 607)		(4 607)		(4 607)	(4 607)	(4 607)
57	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2020	21 964 403	19 173 144	2 781 259	84 844	6 679	2 869 424		2 869 424	848 577	2 022 447	(186 635)	1 835 812	2 021 988	1 835 353
58	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2020	3 841 910	3 165 922	675 988	65 999	2 870	738 818	526 995	211 823	28 702	183 120	(1 914)	181 207	309 298	307 369



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 744 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP- BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAJIN - LAJIN	DEBAN LAJIN - LAJIN	EBIT	DEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	DEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1) - 2	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
59	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2020	11 410 839	9 314 763	2 096 075	508 516	87 538	2 507 053	1 122 842	1 384 212	227 424	1 156 787	(1 014 877)	141 910	1 184 857	170 176
60	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2020	10 271 712	7 958 186	2 313 546	180 714	2 494 261	747 497	1 746 768	507 778	1 238 980	(821 791)	417 198	1 205 584	383 372	
61	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2020	3 901 717	3 410 957	480 760	79 483	22 665	537 578	145 461	392 117	108 355	293 762	(16 495)	267 267	279 971	263 162
62	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	4 148 084	4 131 556	14 528	519 012	119 341	414 197	158	414 039	87 173	326 866	9 810	336 678	326 655	336 365
63	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2020	15 831 388	14 241 639	1 589 749	819 407	1 225 006	1 184 150	884 583	289 567	23 297	266 270	(31 251)	235 019	128 753	96 778
64	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	241 307	217 407	23 900	89 789	51 278	42 410	36	42 374	24 456	17 918	(436)	17 482	18 224	17 758
65	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2020	179 694	231 970	(52 266)	9 816	12 207	(55 757)	34 922	(90 679)	(16 137)	(74 542)	334	(74 208)	(74 542)	(74 208)
66	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Audited 2020	39 390 437	35 958 436	3 424 001	273 186	5 833	3 691 358	3 525 680	165 676	1 302 279	(1 136 603)	(1 244 390)	(2 380 993)	(882 331)	(1 976 285)
67	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2020	5 776 257	5 560 090	216 167	183 113	145	399 195	399 195	40 541	358 555	(6 923)	351 672	358 180	351 419	
68	PT Pertamina (Persero)	Proforma Audited	544 715 071	59 785 204	6 578 950	15 147 617	51 216 537	16 305 432	32 811 105	20 918 217	11 994 889	(2 230 618)	9 764 272	15 322 424	13 791 052	10 317 601
69	PT Pertamina (Persero)	Audited 2020	1 288 990	1 415 574	(146 583)	9 926	7 550	(146 214)	54 541	(203 754)	15 117	(198 639)	(5 098)	(203 736)	(198 620)	(203 718)
70	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Proforma Audited	301 008 165	44 407 472	3 042 485	7 742 152	39 707 805	27 415 886	12 291 919	6 298 497	5 983 428	308 766	6 302 194	5 993 428	6 302 194	(5 869 812)
71	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2020	4 397 844	4 154 610	243 234	129 493	116 908	254 818	91 805	183 013	57 244	105 769	3 450	109 218	105 341	108 749
72	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2020	2 865 138	2 804 878	60 261	6 270	11 064	56 488	2 558	52 909	19 901	33 008	(14 233)	18 775	30 859	16 872
73	PT Pindad (Persero)	Audited 2020	3 503 473	3 117 976	386 098	125 970	151 422	360 046	355 756	4 290	(2 338)	6 628	(23 130)	(16 504)	6 622	(18 508)
74	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2020	5 455 531	5 395 105	60 426	739 781	213 137	587 070	211 923	375 146	33 119	342 029	268 402	610 431	345 695	614 002
75	PT Primsana (Persero)	TW III / 2020	52 898	82 880	(9 982)	14 116	13 952	(8 818)	2 342	(12 180)	(12 160)	(12 160)	(12 160)	(12 160)	(12 160)	(12 160)
76	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	72 301 318	66 514 941	5 786 377	530 125	6 316 503	3 059 299	3 257 204	1 105 376	2 151 828	(253 227)	1 898 601	2 210 940	1 856 195	
77	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	6 974 084	6 568 409	404 675	162 131	100 845	466 180	377 955	88 304	51 059	37 245	(34 949)	2 298	57 609	20 902
78	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Unaudited 2020	4 771 204	4 482 133	279 071	19 326	67 039	231 358	76 500	154 858	5 337	149 521	94 151	243 672	149 521	243 672
79	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2020	225 094	266 318	(41 224)	10 023	50 586	(81 795)	6 820	(86 615)	1 607	(80 222)	(11 773)	(101 995)	(90 272)	(101 995)
80	PT Samudra (Persero)	Audited 2020	644 329	675 616	(31 287)	2 627	50 368	(78 028)	1 494	(86 522)	(12 822)	(67 700)	(3 752)	(71 452)	(67 710)	(71 461)
81	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2020	1 721 907	1 508 770	213 137	5 110	220 247	183 780	36 468	25 486	10 982	10 982	(8 792)	1 190	10 985	1 182
82	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	35 171 668	29 518 014	5 652 654	214 077	57 300	5 809 431	2 320 781	3 488 650	814 307	2 674 343	(357 107)	2 317 236	2 792 321	2 423 372
83	PT Semen Kumpang (Persero)	Unaudited 2020	14 175	4 534	9 641	153	9 794	1 674	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 745 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 15.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

ID	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USABA	HPP - BEBAN USABA	LABA USABA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (8-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10+11	13	14
84	PT Suralindo (Persero)	Audited 2020	2 680 753	2 523 070	157 683	135 686	0	293 362	89	293 296	75 720	217 576	(121 622)	95 953	217 551	96 410
85	PT Sarwa Udara Panas (Persero)	Unaudited 2020	19 737	20 779	(1 042)	1 593	59	492	3 521	(3 029)		(3 029)		(3 029)	(3 029)	(3 029)
86	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2020	1 520 263	1 379 440	140 822	21 107	28 180	133 750		133 750	91 322	162 428	(2 365)	100 063	163 384	101 024
87	PT Taspen (Persero)	Unaudited 2020	18 318 845	18 440 382	(121 537)	1 218 480	211 982	884 871		884 871	198 851	686 320	1 680 952	2 387 272	685 177	2 365 129
88	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	138 462 000	83 274 000	43 188 000	1 202 000	1 095 000	43 295 000	4 520 000	38 775 000	8 212 000	28 563 000	(3 572 000)	25 988 000	20 894 000	17 595 000
89	PT TWC GP dan RB (Persero)	Audited 2020	100 387	202 704	(102 308)	21 675	749	(81 381)	166	(61 542)	(13 609)	192		(67 746)	(67 932)	(67 745)
90	PT Yama Tirta Prakarya (Persero)	TW H / 2020	240 486	234 175	6 311	132		6 443	3 254	3 189		3 189		3 189	3 189	3 189
91	PT Virama Karya (Persero)	Unaudited 2020	406 985	364 537	52 428	4 339	5 956	50 809	11 509	39 300	13 218	26 084	0	26 084	26 084	26 084
92	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	18 190 457	19 870 577	(3 680 121)	1 084 850	2 362 934	(4 999 205)	4 741 217	(8 729 423)	(233 898)	(8 495 726)	94 494	(9 401 232)	(7 378 534)	(7 284 059)
93	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	18 536 382	15 906 185	830 216	3 538 820	2 638 258	1 531 778	1 221 502	310 276	(12 067)	322 343	(20 775)	301 567	185 766	173 794
94	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2020	534 008	290 116	43 893	1 271	7 660	37 513		37 513	7 145	30 369	(264)	30 105	30 369	30 105
	Total Persero		1.822.314.787	1.077.426.767	112.978.885	55.058.135	188.163.788	163.008.688	97.998.515	91.706.597	47.448.354	33.108.008	21.233.325	61.513.587	48.232.138	37.678.995
	TOTAL		1.883.427.509	1.188.814.682	113.603.683	56.830.983	110.877.348	163.481.784	98.923.978	98.264.221	48.976.551	32.140.428	20.667.585	58.875.230	47.261.458	36.340.805



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 746 -

LAMPIRAN 16
IKHTISAR LK PERUSAHAAN
NEGARA
DI BAWAH KEMENKEU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 747 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 16.A

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Labas (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain	Beban Lain	Labas (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Labas (Rugi) Setelah Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Labas (Rugi) Taklin Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Labas (Rugi) Komprehensif	Labas (Rugi) Tahun Berjalan Distribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Labas (Rugi) Komprehensif Distribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5-6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
	PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	5.794.185.472.526	3.368.495.891.645	2.395.590.790.881	25.516.334.287	19.571.448.799	2.401.635.668.369		2.401.635.668.369	494.894.974.880	1.906.740.693.489	(363.088.348.742)	1.523.651.344.742	1.906.740.693.489	1.523.651.344.742
2	PT Pengamanan Infrastruktur Indonesia	Audited	998.110.931.000	378.687.367.000	621.423.564.000			621.423.564.000		621.423.564.000	853.242.000	620.580.322.000	291.915.913.000	912.476.235.030	620.580.322.000	912.476.235.030
3	PT Sarana Multiinfrastruktur Finansial	Audited	2.348.665.000.000	1.752.435.000.000	586.220.000.000			586.220.000.000		586.220.000.000	128.414.000.000	468.606.000.000	1.641.000.000	471.447.000.000	468.606.000.000	471.447.000.000
4	PT Geo Daya Energi	Audited	680.368.910.168	591.224.178.920	289.144.731.248	23.164.112.511	33.221.679.820	279.067.163.538		279.067.163.538	82.508.438.385	196.578.725.553	19.075.814.180	167.503.911.363	196.578.725.553	167.503.911.363
	Total Persero		10.011.321.313.694	6.188.642.237.569	3.902.479.076.129	48.680.446.798	52.793.128.619	3.856.368.358.388		3.856.368.358.388	794.860.656.268	3.193.645.741.042	(98.889.249.932)	3.095.756.491.105	3.193.645.741.042	3.095.756.491.105
	Badan Usaha Lainnya															
1	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited	3.553.076.000.000	3.431.440.000.000	121.636.000.000	249.923.000.000	434.421.000.000	(62.882.000.000)		(62.882.000.000)	45.556.000.000	(108.418.000.000)	328.030.000.000	219.612.000.000	(103.137.000.000)	188.889.000.000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	5.429.101.000.000	5.379.591.000.000	55.570.000.000	6.162.000.000		61.722.000.000		61.722.000.000	(226.696.000.000)	298.288.000.000	109.837.000.000	398.225.000.000	298.288.000.000	398.225.000.000
	Total Badan Usaha Lainnya		9.982.177.000.000	8.804.971.000.000	177.206.000.000	256.075.000.000	434.421.000.000	11.148.989.000		(1.160.000.000)	(181.110.000.000)	175.970.888.000	437.867.000.000	617.837.000.000	185.251.000.000	587.114.000.000
			19.993.498.313.694	14.993.613.237.569	4.079.685.076.129	304.755.446.798	487.214.128.619	3.917.226.358.388		3.917.226.358.388	613.670.656.268	3.373.665.741.042	339.257.750.063	3.712.913.491.105	3.373.665.741.042	3.682.869.491.105



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 748 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 16.B

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBIWAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	(17)	(18 = 16 + 17)	(19)	(20 = 16 x 19)
	PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan																	
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	-	-	100.740.244.241.489	-	-	63.216.800.934.460	30.516.800.000.000	-	-	16.698.919.212	6.990.144.387.817	37.523.443.307.029	-	37.523.443.307.029	100,00	37.523.443.307.029
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited	-	-	13.547.457.163.000	-	-	204.025.005.000	8.000.000.000.000	1.570.000.000.000	-	298.531.898.000	3.474.900.280.000	13.343.432.178.000	-	13.343.432.178.000	100,00	13.343.432.178.000
3	PT Sarana Multiinfra Finanstal	Audited	-	-	32.506.796.000.000	-	-	21.077.814.000.000	6.800.000.000.000	1.750.000.000.000	-	7.168.000.000	2.871.804.000.000	11.428.972.000.000	-	11.428.972.000.000	100,00	11.428.972.000.000
4	PT Geo Diga Energi	Audited	743.469.613.368	4.062.463.914.206	4.805.933.527.574	434.432.096.587	545.165.998.208	978.598.094.795	3.275.443.770.000	700.000.000.000	-	-	(148.108.337.221)	3.828.335.432.779	-	3.828.335.432.779	94,50	3.571.118.859.413
	Total Persero		743.469.613.368	4.062.463.914.206	151.600.420.952.063	434.432.096.587	545.165.998.208	85.478.238.034.255	48.592.043.770.000	4.020.000.000.000	-	322.398.817.212	13.187.740.330.596	66.122.182.917.808	-	66.122.182.917.808		65.866.968.344.442
	Badan Usaha Lainnya																	
5	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited	-	-	5.109.461.000.000	-	-	1.584.707.000.000	5.774.815.000.000	-	-	843.985.000.000	(3.249.369.000.000)	3.369.411.000.000	155.343.000.000	3.524.754.000.000	46,99	1.583.286.228.900
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	-	-	92.084.580.000.000	-	-	67.288.011.000.000	32.146.276.000.000	-	-	131.101.000.000	(7.480.828.000.000)	24.796.549.000.000	-	24.796.549.000.000	100,00	24.796.549.000.000
	Total Badan Usaha Lainnya		-	-	97.194.021.000.000	-	-	68.872.718.000.000	37.921.091.000.000	-	-	975.066.000.000	(10.730.197.000.000)	28.165.960.000.000	155.343.000.000	28.321.303.000.000		26.379.835.228.900
			743.469.613.368	4.062.463.914.206	248.794.441.952.063	434.432.096.587	545.165.998.208	154.350.956.034.255	86.513.134.770.000	4.020.000.000.000	-	1.297.464.817.212	2.457.543.330.596	94.288.142.917.808	155.343.000.000	94.443.485.917.808		92.246.801.573.342



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 749 -

LAMPIRAN 17

LAPORAN PMN PADA

LEMBAGA KEUANGAN

INTERNASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 750 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 17

**LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2020**

Institusi		Penyertaan Modal Pemerintah			Surat hutang		
			USD	IDR	Utang dalam MUA		Utang dalam IDR
A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional							
Asian Development Bank (ADB)		SDR	289.100.000,00	5.907.774.801.713			
World Bank Group							
	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD	167.203.427,47	2.358.406.016.499			
	International Development Association (IDA)	USD	53.013.471,00	747.755.538.590			5.237.901.545
	International Finance Corporation (IFC)	USD	240.952.000,00	3.398.630.369.520			
	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3.797.820,00	53.568.289.078	USD	1.135.018	16.009.440.240
Bank Pembangunan Islam (IDB)		ID	144.283.155,54	2.948.434.052.460			
International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)		USD	2.060.000,00	29.056.320.600			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 751 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 17

The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	SDR	246.693,17		5.041.188.839			
International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		74.959.000,00	1.057.297.444.590			
Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017)	EUR	223.450,38		18.385.076.443	EUR	223.450	3.872.424.134
	USD		15.588,60				
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD		22.242.552,28	313.730.928.660			
Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	177.723.126.000			
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD		672.100.000,00	9.479.977.221.000			
Jumlah		433.853.299,09	1.248.943.859,35	26.495.780.373.991			
PMN Lainnya							
ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.692.601.200.000			
International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	56.420.040.000			
Jumlah			124.000.000,00	1.749.021.240.000			
Jumlah		433.853.299,09	1.372.943.859,35	28.244.801.613.991			25.119.765.919



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 752 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 17

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,44878
2. Kurs Euro to IDR 17.330,13
3. Kurs USD to IDR Rp 14.105
3. Kurs USD to SDR 0,690234



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 753 -

LAMPIRAN 18

IKHTISAR LK NON BUMN

(MINORITAS)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 754 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 18.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2020	383 079	278 248	104 830	18 760	8 393	115 197	30	115 166	23 583	91 583	(3 738)	87 845	91 618	87 880
2	PT Jakarta Industrial Estate Puloagung	Audited 2020	181 888	144 760	37 128	20 529	7 058	50 596		50 598	20 216	30 383	(44)	30 338	30 383	30 338
3	PT Nindya Karya	Audited 2020	3 616 483	3 503 142	113 341	143 390	117 518	139 213	89 112	50 101	7 279	42 822	4 333	47 155	50 896	55 275
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2020	820 213	778 621	43 592	18 295		61 887	137 183	(75 296)		(75 296)		(75 296)	(75 261)	(75 261)
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2020	1 412 967	1 322 474	90 493	376 958	153 051	314 300	260 168	54 132		54 132		54 132	54 488	54 488
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2020	6 357 380	5 101 250	1 256 130	309 870	101 900	1 464 100	538 400	925 700	310 642	615 058	(519 762)	95 296	664 471	144 709
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2020	5 332 598	4 445 130	887 468	124 566	103 034	909 000	331 470	577 530	171 697	405 833		405 833	405 833	405 833
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2020	1 658 452	1 455 178	203 278	39 341		242 617	143 031	99 586	29 562	70 024	(117 024)	(47 000)	70 413	(46 612)
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2020	2 972 806	3 220 895	(248 089)	120 977	128 874	(755 936)	562 724	(818 660)		(818 660)		(818 419)	(818 419)	(818 419)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2020	1 186 610	1 421 863	(235 253)	180 532	29 527	(84 248)	197 204	(261 452)	619	(282 071)		(282 071)	(281 810)	(281 810)
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2020	781 074	1 196 637	(405 563)	138 107		(267 456)	186 934	(454 390)	11 358	(465 748)	(139 544)	(605 292)	(465 748)	(605 292)
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2020	2 488 400	2 454 783	33 617	317 838	73 390	278 085	193 416	84 969	37 974	46 695	281 856	328 591	41 230	324 419
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2020	3 532 670	3 495 927	36 743	124 314	242	170 815	179 212	(8 397)	26 458	(34 855)		(34 855)	(34 855)	(34 855)
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2020	1 434 139	1 471 758	(37 617)	128 671	131 813	(40 759)	392 448	(433 207)	15 864	(449 071)	6 850	(442 221)	(440 023)	(441 173)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2020	1 291 216	1 298 768	(7 550)	66 399	154 043	(95 194)	429 809	(525 003)	908	(525 911)	(34 506)	(560 417)	(527 802)	(562 308)
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2020	851 372	911 778	(60 406)	11 275	15 170	(64 301)	169 954	(263 255)		(263 255)		(263 255)	(263 255)	(263 255)
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2020	8 128 850	9 695 467	(1 566 617)	239 651	60 307	(1 387 273)	249 935	(1 637 208)	27 079	(1 664 287)	11 635	(1 652 652)	(1 693 136)	(1 681 581)
18	PT PANN Pembayasan Maritim	Unaudited 2020	14 717	20 141	(5 424)	28 038	327	20 287	6 416	13 871	6 462	7 408		7 408	7 408	7 408
19	PT Indosat Tbk	Audited 2020	27 925 561	26 503 919	1 421 742	1 188 841	145 116	2 445 487	3 045 068	(599 541)	30 619	(630 160)	(141 411)	(771 571)	(716 719)	(852 788)
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2020	4 187 913	6 280 546	(2 092 633)	804 582	7 759	(1 295 800)	82 862	(1 358 662)	(299 071)	(1 059 591)	186 455	(873 136)	(1 058 698)	(873 243)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 755 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 18.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
21	PT Soehindo															
22	PT Asean Bontolu Fertilizer															
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri															
24	PT Kawasan Industri Lampung															
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2020	17.325.192	14.804.867	2.520.335	843.775		3.364.110	132.515	3.231.595	823.758	2.407.837	(158.397)	2.249.440	2.386.819	2.228.422
26	PT Taneh Tbk	Audited 2020	15.215.980	14.998.526	217.454	183.098	67.138	333.414	607.370	(273.956)	66.646	(340.602)	(41.955)	(382.557)	(340.599)	(382.554)
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2020	27.372.461	25.340.158	2.032.303	308.738	134.408	2.206.830	585.452	1.641.178	481.824	1.149.354	(175.476)	973.878	1.149.353	973.877
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2020	42.062.460	37.311.851	4.750.609	1.834.924	6.644.546	(58.812)	2.497.346	(2.556.158)	589.090	(3.145.247)	65.318	(3.079.929)	(3.859.605)	(3.792.270)
29	PT Istaka Karya (Persero)	SMT U2020	23.172	30.133	(6.961)	1.321	0	(5.640)	8.055	(11.695)	251	(11.946)	0	(11.946)	(11.946)	(11.946)
30	PT IndoFarma Tbk	Unaudited 2020	1.744.219	1.600.075	144.144	0	40.723	103.421	37.017	66.404	18.701	47.703	45.455	93.158	47.698	93.153
31	PT Kertajaya Tbk	Audited 2020	10.006.173	9.675.054	331.119	348.699	8.282	669.736	596.377	73.359	52.933	20.426	(85.780)	(65.354)	17.839	(65.199)
32	PT Asuransi Jasa Indonesia	Unaudited 2020	3.694.815	3.795.052	(100.237)	604.022	864.121	(360.336)	71.433	(431.769)	4.006	(435.775)	43.488	(392.307)	(438.599)	(393.121)
33	PT Jasa Raharja	Unaudited 2020	6.394.778	4.775.830	1.618.949	24.721	27.402	1.618.268	1.618.268	232.345	1.383.923	(125.870)	1.258.053	1.379.072	1.251.892	1.251.892
34	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2020	3.957.008	3.426.049	530.959	72.472		603.431		603.431	181.801	421.830	126.031	547.861	421.830	547.861
35	PT Asuransi Kredit Indonesia	Unaudited 2020	8.952.364	7.883.220	1.069.144	11.459	80.578	1.000.025	1.000.025	118.429	881.596	47.417	929.013	881.327	928.744	928.744
Total			211.317.112	198.629.865	12.687.246	8.610.273	9.104.673	12.192.848	11.717.881	474.965	3.000.834	(2.525.869)	(724.650)	(3.250.277)	(3.332.996)	(4.047.296)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 756 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 18.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)	
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16	
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2020	538.134	466.868	1.005.002	108.074	18.492	126.566	200.000	-	-	(9.512)	688.160	878.648	(213)	878.435	50,00%	439.324	
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2020	527.373	272.895	800.268	114.974	453.923	568.897	200.000	-	-	(150)	31.522	231.372	0	231.372	50,00%	115.686	
3	PT Nindya Karya	Audited 2020	4.221.245	1.265.572	5.486.818	3.203.168	765.575	3.968.743	559.497	-	-	-	336.686	610.943	1.507.126	10.949	1.518.075	1,00%	59.500
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2020	264.785	2.177.511	2.442.296	1.527.307	1.160.500	2.687.807	160.997	7.766	-	-	230.329	(644.786)	(245.694)	183	(245.511)	24,00%	38.641
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2020	480.447	7.658.494	8.138.941	3.086.425	2.596.358	5.682.783	327.606	-	-	-	3.726.780	(1.598.512)	2.455.874	284	2.456.158	10,00%	32.761
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2020	2.569.317	15.966.152	18.535.469	2.710.041	8.669.638	11.379.679	2.942.116	45.658	-	-	3.093.308	1.113.027	7.194.109	(38.319)	7.155.790	10,00%	294.212
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2020	1.633.442	8.091.313	9.724.755	1.595.195	5.737.923	7.333.118	1.313.322	5.902	-	-	1.108.450	(36.038)	2.391.636	1	2.391.637	10,00%	131.332
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2020	551.042	3.853.313	4.404.355	659.992	2.196.396	2.856.388	653.293	28.353	-	-	735.702	127.639	1.544.987	2.980	1.547.967	10,00%	65.329
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2020	1.194.596	10.848.315	12.042.911	5.201.802	6.837.672	12.039.474	1.401.223	51.018	-	-	4.143.533	(5.593.038)	2.736	701	3.437	10,00%	140.122
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2020	817.592	10.609.030	11.426.622	2.542.700	2.933.567	5.476.267	930.302	24.485	-	-	6.088.923	(1.095.309)	5.948.401	1.954	5.950.355	13,17%	122.528
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2020	1.037.831	4.059.566	5.097.397	2.546.735	1.472.329	4.019.064	1.627.830	-	-	-	1.887.895	(2.437.392)	1.078.333	0	1.078.333	10,00%	159.981
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2020	2.192.595	10.338.887	12.531.482	1.429.623	1.891.608	3.321.231	1.845.596	482.965	-	-	6.339.583	469.369	9.137.513	72.738	9.210.251	10,00%	184.560
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2020	959.743	7.918.114	8.877.857	2.062.712	2.075.785	4.138.497	1.168.481	-	-	-	3.645.165	(74.286)	4.739.360	0	4.739.360	10,00%	116.848
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2020	864.667	10.427.247	11.291.914	2.851.817	2.249.240	5.101.057	1.272.976	92.738	-	-	5.105.270	(281.597)	6.189.387	1.470	6.190.857	10,00%	127.298
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2020	365.721	3.552.610	3.918.331	3.592.591	3.710.125	7.302.718	1.029.738	-	-	-	1.257.474	(5.711.197)	(3.423.985)	39.600	(3.384.385)	10,00%	102.974
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2020	380.754	2.091.700	2.472.454	1.398.752	2.094.970	3.493.722	235.000	2.859	-	-	910.414	(2.169.541)	(1.021.268)	0	(1.021.268)	10,00%	23.500
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2020	7.762.569	2.192.796	9.955.365	8.516.671	2.134.745	10.651.416	450.000	-	-	-	(1.675.825)	450.535	(775.290)	79.239	(696.051)	4,97%	22.366
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudited 2020	-	-	933.255	-	-	252.652	1.315.061	87.690	-	-	0	(722.148)	680.603	0	680.603	0,00%	1
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2020	9.594.951	53.183.789	62.778.740	22.658.094	27.207.250	49.865.344	543.393	1.546.587	-	-	353.504	9.426.998	11.870.482	1.042.914	12.913.396	14,29%	77.662
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2020	-	-	80.321.845	-	-	69.983.871	1.376.437	6.871.385	-	-	1.689.249	398.532	10.335.603	22.571	10.358.174	11,44%	150.786
21	PT Socfindo	Audited 2019	357.477	1.499.783	1.857.260	332.191	637.022	969.213	42.250	3.671	-	-	0	842.126	888.047	0	888.047	10,00%	4.225
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2017	978.516	2.670.815	3.649.331	210.068	462.601	672.669	1.000.500	-	-	-	0	1.976.162	2.976.662	0	2.976.662	13,00%	136.188
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2019	1.071.191	646.386	1.717.577	113.828	156.247	270.075	50.888	(22.638)	-	-	408.714	1.010.537	1.447.502	0	1.447.502	5,00%	2.479
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	21.461	304	21.765	78	0	78	8.656	-	-	-	0	13.031	21.687	0	21.687	20,36%	1.762
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2020	8.364.356	15.692.399	24.056.755	3.872.457	3.245.102	7.117.559	1.152.066	(132.439)	-	-	223.202	15.520.575	16.763.404	175.792	16.939.196	0,00%	0
26	PT Timah Tbk	Audited 2020	6.557.264	7.980.436	14.517.700	5.865.165	3.712.399	9.577.564	372.388	64.383	-	-	(106.645)	4.609.863	4.939.989	147	4.940.136	0,00%	0
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2020	9.150.514	22.578.999	31.729.513	7.553.261	5.136.803	12.690.064	2.403.076	3.934.833	-	-	3.915.455	8.786.064	19.039.428	21	19.039.449	0,00%	0
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2020	28.291.609	77.975.270	106.266.878	16.688.406	47.892.007	64.580.413	4.852.396	(6.595.140)	-	-	(560.950)	33.802.098	31.498.393	10.188.072	41.686.465	0,00%	0
29	PT Istaka Karya (Persero)	SMT I/2020	333.629	270.783	604.412	408.278	64.500	472.778	652.898	-	-	-	147.662	(668.926)	131.634	0	131.634	7,66%	50.000
30	PT Indo Farma Tbk	Unaudited 2020	1.339.714	632.604	1.972.318	947.196	451.449	1.398.645	309.927	81.120	-	-	212.949	(30.330)	573.666	7	573.673	0,00%	0
31	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2020	6.093.104	11.469.713	17.562.817	6.786.942	3.670.203	10.457.145	555.400	(885.401)	-	-	5.032.162	2.291.237	6.993.397	112.275	7.105.672	0,00%	0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 757 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 18.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16
32	PT Asuransi Jasa Indonesia	Unaudited 2020			14.055.335			11.232.650	425.000	-	-	115.827	2.272.965	2.813.792	8.893	2.822.685	0,00%	1
33	PT Jasa Raharja	Unaudited 2020			17.366.939			5.989.296	8.500.000	-	-	(527.140)	3.334.377	11.307.237	70.406	11.377.643	0,00%	1
34	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2020			19.380.636			8.824.082	7.638.733	-	-	268.385	2.649.422	10.556.540	14	10.556.554	0,00%	1
35	PT Asuransi Kredit Indonesia	Unaudited 2020			25.041.791			13.213.531	400.000	6.211.000	-	(103.770)	5.320.143	11.827.373	887	11.828.260	0,00%	1
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Ekuitas																	555.010
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																	2.045.059
	Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																	2.600.069



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 758 -

LAMPIRAN 19

IKHTISAR LK LEMBAGA

PENJAMIN SIMPANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 759 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 19

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)
AUDITED	4.000.000.000.000	19.355.871.786.000	(5.854.334.000)	119.829.633.684.000	139.179.651.136.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 760 -

LAMPIRAN 20

ASET TETAP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 761 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	855.795.947.000	855.795.947.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.145.127.861.259	1.143.368.231.643
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.920.800.077.963	5.980.428.125.661
4	005	MAHKAMAH AGUNG	19.866.238.947.020	19.810.522.554.459
5	008	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	17.458.553.879.670	17.152.277.843.897
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	624.043.348.021.233	563.825.145.662.880
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	11.983.889.739.493	11.780.535.039.124
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	38.233.070.437.776	38.217.108.897.564
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.452.256.556.019.210	1.450.878.813.267.800
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	54.289.885.533.612	54.456.131.211.590
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	94.886.555.741.841	95.993.397.699.923
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	71.957.472.116.814	76.634.434.244.419
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	8.706.734.244.987	8.694.889.734.067
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.399.741.468.127	15.410.595.700.127
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	307.637.163.028.720	312.551.921.002.102
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	362.926.207.366.365	16.811.909.997.257
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	66.279.951.211.967	70.914.878.240.094
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	68.424.386.869.769	61.700.844.520.566
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	7.681.588.339.500	7.643.451.530.970
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	18.565.546.383.592	18.532.038.706.705
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.975.448.946.436	9.974.257.123.792
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.095.136.196.088	16.045.992.090.586
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	861.022.746.769.176	944.793.411.541.173
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN		
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN		
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	6.265.743.969.368	6.202.012.806.068
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.468.058.953.000	1.448.189.807.000
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	12.058.461.798.500	352.606.484.493.014
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.282.411.957.000	3.282.411.957.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.358.220.000	1.626.120.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	32.784.833.000	
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.692.177.609.401	5.649.972.594.296
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.171.066.800.980	1.162.535.693.980
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL		
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.042.748.172.894	3.052.318.324.207
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.541.450.676.000	1.484.443.750.305
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	9.116.981.714.216	9.059.218.112.864
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.866.606.161.000	1.866.606.161.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.615.987.200.981	5.493.014.424.141
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	211.290.604.289.721	211.086.192.098.983
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.662.112.123.045	1.559.938.837.794
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.378.951.719.000	1.378.951.719.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 762 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA KIL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	621.749.806.223	592.366.444.327
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	677.750.355.000	677.750.355.000
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.082.892.458.616	2.068.090.785.806
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.426.546.945.512	3.387.359.220.617
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.060.182.468.203	1.012.520.186.736
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	506.815.456.000	506.815.456.000
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	235.129.558.040	233.761.358.040
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	29.471.771.617.855	29.454.769.398.491
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	13.034.026.829.000	13.034.026.829.000
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	4.697.895.152.000	4.697.895.152.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.562.543.166.209	1.612.229.053.490
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	195.151.853.800	185.634.271.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	112.976.306.000	112.976.306.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.037.206.223.100	3.037.206.399.100
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	805.323.718.068	802.566.806.600
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.302.109.905.449	2.551.874.317.382
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4.071.574.223.396	4.073.366.152.305
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.893.078.693.628	2.690.879.809.666
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	618.688.640.000	618.688.640.000
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.736.548.733.375	1.736.548.733.375
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	202.982.293.509	201.791.893.509
68	100	KOMISI YUDISIAL	272.460.683.000	272.480.683.000
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	279.632.984.000	279.632.984.000
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	238.470.821.000	237.659.879.100
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	369.821.075.000	369.821.075.000
72	107	BADAN SAR NASIONAL	974.033.303.053	954.743.527.882
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1.987.200.000	1.987.200.000
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	732.391.903.712	735.650.903.712
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	50.791.241.000	26.592.174.000
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	108.775.000	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	41.853.173.848.074	42.356.379.117.074
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	38.261.256.000	38.261.256.000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	94.220.358.803	9.942.054.967
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	12.649.246.747.578	12.615.286.988.073
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	11.377.229.505.514	11.356.325.846.639
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.753.656.459.824	1.769.726.523.620
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	18.987.160.495	18.556.963.495



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 763 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUM
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)				
NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-
JUMLAH PADA K/L			4.547.207.396.059.750	4.571.429.747.489.160
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	26.594.107.000	26.594.107.000
		Penyesuaian (Eliminasi) pada SPAN	(7.344.825.442.000)	(5.701.893.036.000)
TOTAL			4.539.889.164.724.750	4.565.754.448.540.160



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 764 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	188.952.116.351	(151.473.023.704)	37.479.092.647	175.144.842.083	(139.768.822.185)	35.375.819.898
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.777.244.120.443	(1.217.806.110.872)	559.438.010.371	1.658.100.510.792	(1.099.476.810.539)	558.623.700.253
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.159.391.106.309	(1.817.029.175.629)	342.361.930.680	1.891.163.973.440	(1.696.950.217.916)	294.213.755.524
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.422.382.841.931	(2.796.013.714.015)	626.368.927.916	3.231.892.318.912	(2.539.050.678.958)	692.841.639.954
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.480.695.672.574	(2.727.625.171.551)	2.753.070.501.023	5.398.671.338.531	(2.630.682.436.133)	2.767.988.903.398
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.153.427.190.604	(2.685.329.181.173)	1.468.098.009.431	4.023.211.260.680	(2.432.680.109.813)	1.590.531.150.867
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.160.929.282.184	(2.837.946.953.472)	322.982.328.712	3.064.758.107.592	(2.763.830.269.568)	300.927.838.024
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.511.546.269.874	(1.810.814.531.422)	700.731.738.452	2.431.479.656.691	(1.640.859.082.753)	790.620.573.938
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	278.199.640.486.008	(150.488.488.572.102)	127.701.151.913.906	244.484.487.394.530	(127.567.544.790.539)	116.916.942.603.991
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7.783.913.088.592	(6.036.170.230.382)	1.747.742.858.210	7.398.289.284.727	(5.208.649.428.511)	2.189.639.856.216
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.021.576.411.944	(12.025.979.872.739)	2.995.596.539.205	14.299.282.360.083	(11.404.194.747.156)	2.895.087.612.927
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.126.417.862.450	(4.928.705.573.842)	1.197.712.288.608	6.548.536.528.157	(5.175.230.663.237)	1.373.304.864.920
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.322.683.523.812	(2.448.171.847.912)	874.511.675.900	3.276.684.437.117	(2.223.119.262.684)	1.053.565.174.433
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.570.536.193.580	(4.532.338.427.649)	1.038.197.765.931	5.304.868.050.573	(4.291.886.898.696)	1.012.981.151.877
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	51.721.317.786.356	(33.593.087.876.426)	18.128.229.909.930	51.191.308.641.024	(30.020.487.586.567)	21.170.821.054.457
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30.758.069.685.438	(23.553.117.939.353)	7.204.951.746.085	3.696.121.667.805	(2.890.762.980.117)	1.005.358.687.788
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	26.416.281.114.199	(18.576.068.827.449)	7.840.212.286.750	22.482.127.439.185	(16.525.172.470.439)	5.956.954.968.746
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	10.579.302.828.985	(8.230.267.284.345)	2.349.035.544.620	9.457.063.852.418	(7.349.431.382.178)	2.107.632.470.240
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.804.248.609.916	(1.991.254.811.328)	812.993.798.588	2.600.242.724.246	(1.766.789.368.841)	833.453.355.405
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.037.635.381.225	(1.683.001.669.125)	354.633.712.100	1.904.924.241.165	(1.552.647.621.419)	352.276.619.746
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.586.431.265.499	(2.702.205.537.793)	884.225.727.706	3.476.102.967.487	(2.533.887.878.342)	942.215.091.145
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.889.878.225.933	(4.482.356.387.990)	1.407.521.837.943	5.761.526.276.152	(4.095.780.164.800)	1.665.736.111.352
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	14.234.787.604.272	(10.003.511.029.073)	4.231.276.575.199	13.743.729.056.080	(9.014.788.306.551)	4.728.960.749.529



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 765 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	122.313.208.080	(101.151.206.427)	21.162.001.653	126.310.524.363	(102.255.359.701)	24.055.164.662
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	78.465.371.778	(58.868.273.850)	19.597.097.928	73.866.781.172	(57.838.802.839)	16.027.978.333
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	83.811.500.009	(67.400.653.761)	16.410.846.248	76.925.679.584	(62.189.092.633)	14.736.586.951
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	798.838.828.277	(478.287.183.391)	317.551.644.886	636.501.767.984	(383.561.951.290)	252.939.816.694
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	107.900.878.431	(65.923.368.048)	41.977.510.383	125.125.261.746	(100.730.167.953)	24.395.093.793
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	870.084.053.256	(629.054.936.750)	241.029.116.506	25.528.249.736.793	(19.085.987.095.625)	6.440.252.641.168
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	408.554.665.064	(369.127.898.355)	39.426.766.709	408.983.816.837	(365.975.320.031)	43.008.296.806
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95.363.456.859	(84.769.412.108)	10.594.044.751	95.673.691.804	(79.552.158.307)	16.121.533.497
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	124.345.957.662	(88.708.701.869)	35.637.255.793	109.999.882.248	(78.398.689.409)	31.601.192.839
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	12.689.585.827.837	(8.997.297.530.582)	3.692.288.297.245	11.288.534.107.107	(7.167.749.760.905)	4.120.784.346.202
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	8.006.320.860.452	(6.780.206.785.856)	1.246.114.074.596	7.673.246.745.248	(6.082.680.059.497)	1.590.566.685.751
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	157.408.319.298	(140.823.036.855)	16.585.282.443	158.352.426.940	(123.825.120.127)	34.527.306.813
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.160.189.834.187	(1.744.721.681.418)	415.477.952.769	2.115.313.606.795	(1.607.883.274.699)	507.630.332.096
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	469.890.509.737	(285.218.172.126)	184.672.337.611	433.773.685.330	(236.258.194.736)	197.515.490.594
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.038.110.046.421	(2.348.194.342.134)	689.915.704.287	2.920.546.112.445	(2.079.068.939.052)	841.477.173.393
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	666.762.606.723	(429.672.140.419)	237.090.466.304	654.719.668.603	(333.143.799.859)	321.575.868.744
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.998.876.764.328	(1.557.985.215.827)	440.891.548.501	1.988.219.795.411	(1.508.459.452.959)	479.760.342.452
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	138.359.711.217.093	(89.900.799.721.185)	48.458.911.495.908	124.343.236.274.961	(71.530.000.351.896)	52.813.235.923.065
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.699.777.586.022	(1.849.314.403.097)	850.463.182.925	2.646.113.790.733	(1.674.074.319.017)	972.039.471.716
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	373.677.175.403	(318.665.235.186)	55.011.940.217	357.718.182.514	(292.114.819.449)	65.603.363.065



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 766 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	275.275.280.880	(231.305.700.347)	43.969.580.313	284.795.085.810	(220.420.635.531)	44.374.450.079
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.217.458.250.465	(1.584.824.629.915)	632.633.620.550	2.102.945.947.691	(1.387.542.102.556)	735.403.845.135
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	380.004.557.930	(296.358.156.625)	83.646.401.305	367.861.952.830	(264.548.073.679)	103.313.878.951
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	486.733.383.914	(406.606.406.380)	80.126.977.554	469.482.592.390	(384.270.395.574)	85.222.196.816
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	25.726.098.414	(21.808.085.081)	4.118.013.333	24.660.585.661	(21.830.343.217)	2.830.252.444
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	5.419.380.022.187	(3.997.899.699.402)	1.421.480.322.795	5.126.879.453.062	(3.565.055.208.347)	1.561.824.244.715
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.589.738.727.001	(1.053.299.520.742)	516.439.206.259	1.492.197.617.709	(872.000.067.350)	620.197.550.359
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	275.936.820.187	(247.097.073.436)	28.839.746.751	262.741.301.366	(235.483.388.941)	27.257.912.425
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	174.237.300.582	(114.175.260.665)	60.062.039.927	146.478.871.735	(101.987.535.400)	44.481.336.335
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.883.731.129.189	(1.220.720.686.929)	663.010.462.260	1.760.736.824.605	(1.085.070.327.481)	675.666.497.124
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.253.729.535.115	(784.535.021.663)	469.194.513.452	1.234.002.287.911	(695.310.225.668)	538.692.062.243
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.651.105.348.660	(2.281.247.835.028)	1.369.857.513.632	3.394.773.255.000	(2.079.022.628.748)	1.315.750.626.252
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.810.945.754.720	(1.000.450.919.489)	810.494.835.231	1.795.425.017.339	(877.956.697.722)	917.468.319.617
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.128.151.561.412	(929.532.831.292)	198.618.730.120	1.093.787.501.925	(850.297.929.114)	243.499.572.811
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	307.375.531.788	(214.441.665.825)	92.933.665.963	227.150.577.482	(198.275.718.536)	28.874.859.946
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	151.797.418.531	(107.645.136.733)	44.152.281.798	151.857.221.185	(94.545.315.879)	57.310.905.306
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	202.152.957.486	(167.608.946.053)	34.554.011.433	185.566.904.080	(158.502.087.020)	27.064.807.060
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	219.324.401.371	(189.851.456.321)	29.462.945.050	221.057.783.568	(182.723.430.638)	38.334.332.930
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	588.440.548.083	(487.381.520.102)	101.059.027.991	557.396.934.784	(451.523.348.089)	105.873.586.695
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511.789.415.675	(356.531.965.194)	145.257.450.481	425.017.008.495	(329.599.842.479)	95.417.166.016
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	909.965.571.123	(706.138.686.587)	203.826.884.536	844.845.772.199	(667.149.221.233)	177.696.550.966
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	516.839.454.549	(456.404.395.414)	60.435.059.135	588.627.791.420	(479.985.258.903)	118.632.532.517
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	612.886.806.743	(483.037.769.928)	129.849.036.815	619.826.156.543	(435.242.316.098)	184.683.840.445



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 767 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	146.684.438.280	(131.465.981.208)	15.218.457.072	140.247.104.900	(123.421.467.282)	16.825.637.608
68	100	KOMISI YUDISIAL	51.292.874.080	(47.721.818.883)	3.571.055.197	50.809.915.580	(45.497.519.146)	5.312.396.434
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.497.056.829.725	(1.217.357.541.178)	279.699.088.547	1.288.161.095.504	(1.124.216.549.809)	163.944.545.695
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	183.841.639.791	(149.271.159.573)	14.570.480.218	168.043.227.113	(145.675.590.473)	22.367.636.640
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	292.870.440.905	(253.387.891.301)	39.272.549.604	267.245.048.940	(195.913.778.048)	71.331.271.892
72	107	BADAN SAR NASIONAL	9.732.114.094.615	(6.301.283.860.840)	3.430.820.233.775	9.594.218.826.241	(5.548.286.887.463)	4.045.932.138.778
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	32.656.872.202	(24.251.024.211)	8.405.847.991	28.793.016.373	(21.688.809.712)	7.104.206.661
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	49.200.508.019	(27.069.490.223)	22.131.017.796	49.158.435.048	(22.808.707.827)	26.349.727.219
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	44.355.098.872	(37.277.391.719)	7.077.707.153	42.673.256.004	(33.911.399.058)	8.761.856.946
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	401.013.798.654	(179.208.024.866)	221.805.773.988	257.657.876.741	(85.189.698.935)	172.468.179.806
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.737.345.808.487	(1.117.114.639.328)	620.231.169.159	1.344.159.267.549	(964.437.508.753)	379.721.768.796
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	401.790.623.503	(320.244.738.726)	81.545.884.777	345.529.969.439	(233.545.280.149)	111.984.689.290
79	114	SEKRETARIAT KABINET	54.657.316.543	(42.919.219.727)	11.738.096.816	64.882.159.254	(45.993.304.558)	18.888.854.695
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	487.773.214.331	(273.277.891.964)	214.495.322.367	457.564.827.607	(201.188.448.544)	256.386.379.063
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.365.588.159.650	(1.160.424.475.411)	205.163.684.239	1.378.777.595.373	(1.180.905.509.366)	217.872.086.007
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.928.852.848.781	(1.854.578.532.089)	1.072.274.116.692	2.763.322.049.122	(1.627.298.828.807)	1.136.023.220.315
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	75.810.921.708	(49.816.089.422)	25.994.832.286	58.652.237.458	(44.774.862.436)	13.877.385.022
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2.109.185.445.237	(1.048.568.887.085)	1.060.616.558.152	2.022.269.725.417	(824.117.193.026)	1.198.152.532.391
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	114.220.921.381	(83.513.187.757)	30.707.733.624	111.353.395.238	(63.886.488.023)	47.466.907.215
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	31.551.646.060	(18.915.958.553)	12.635.687.507
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	42.783.062.620	(11.298.555.849)	31.484.506.771	32.378.088.100	(2.736.987.472)	29.641.100.628
JUMLAH PADA K/L			786.494.817.328.555	(449.284.737.387.471)	257.178.595.424.113	643.224.820.285.815	(387.467.972.377.378)	255.727.208.787.609



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 768 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	471.432.067.006	(431.119.995.473)	40.312.061.533	459.546.351.995	(391.217.254.584)	68.329.097.411
TOTAL			706.966.249.385.561	(449.715.857.392.944)	257.218.907.485.648	643.684.366.617.610	(387.859.189.831.962)	255.795.535.885.020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 769 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

		31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	215.807.359.557	(26.661.058.919)	189.146.300.638	211.882.975.921	(18.868.662.085)
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	943.539.385.783	(118.768.889.898)	824.772.696.087	877.246.448.738	(78.229.247.507)
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.544.150.887.350	(242.031.198.294)	2.302.119.689.056	2.508.643.269.633	(167.143.122.339)
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8.743.802.063.295	(1.138.286.798.010)	7.605.515.265.285	8.238.230.128.101	(841.889.652.971)
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.541.511.439.767	(809.605.118.459)	4.931.906.321.308	5.194.376.730.278	(451.794.085.025)
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	6.936.050.315.652	(747.379.860.041)	6.188.670.455.611	6.834.905.572.103	(440.835.410.048)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.757.603.421.959	(247.327.872.840)	2.510.275.549.119	2.756.244.855.806	(206.729.829.210)
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9.581.680.287.326	(1.309.304.369.458)	8.252.375.917.868	9.231.708.942.471	(804.218.035.834)
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	82.450.443.365.592	(11.515.265.701.777)	70.935.177.663.815	71.986.135.283.561	(12.158.195.476.298)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.533.396.297.024	(1.440.526.959.909)	11.092.869.337.115	11.958.064.335.324	(1.010.882.340.912)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	16.545.039.186.070	(1.838.028.618.908)	14.607.010.567.962	16.435.881.201.445	(1.389.990.400.427)
12	018	KEMENTERIAN PERTAMIAN	6.178.730.735.778	(727.374.648.856)	5.449.356.086.922	5.968.056.274.799	(524.822.572.147)
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.373.930.665.268	(326.880.488.420)	2.048.050.196.848	2.150.853.866.779	(219.681.354.373)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.653.005.120.546	(295.097.662.422)	2.357.907.458.124	2.558.745.423.102	(214.466.197.396)
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	27.501.018.488.532	(2.740.120.107.389)	24.760.898.381.143	26.101.194.186.746	(2.282.633.152.230)
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.682.540.415.084	(4.117.795.551.178)	40.564.744.863.906	6.679.857.570.435	(443.756.973.306)
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	17.440.281.915.978	(2.146.209.734.090)	15.294.072.181.889	16.309.053.886.131	(1.649.968.144.835)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	37.113.610.592.228	(3.256.404.032.407)	33.857.206.559.821	32.880.351.406.690	(2.253.910.404.087)
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.278.388.183.707	(270.540.872.818)	2.007.847.190.891	1.819.956.354.488	(178.031.821.927)
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.136.028.516.570	(283.649.854.987)	1.852.378.661.583	1.798.628.848.267	(182.053.118.595)
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.569.013.985.824	(360.291.406.061)	3.208.722.579.563	3.293.584.141.911	(255.913.152.553)
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.296.727.634.748	(514.339.205.491)	4.782.388.429.257	5.064.491.114.759	(368.205.780.239)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	24.734.339.705.827	(1.785.455.560.071)	22.948.884.145.756	23.888.215.003.244	(1.328.727.943.854)
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	10.474.038.777	(774.545.115)	9.699.493.662	10.474.038.777	(537.689.242)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 770 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	29.541.154.075	(1.779.587.595)	27.761.566.480
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	154.159.346.109	(11.711.534.298)	142.447.811.811	154.040.207.650	(8.380.129.765)	145.660.077.885
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.657.699.259.382	(138.848.415.441)	1.518.850.843.941	1.624.135.755.412	(92.193.671.434)	1.531.942.083.978
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	400.689.725.717	(26.529.064.349)	374.160.661.368	396.488.627.387	(18.434.322.660)	378.054.304.727
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	889.017.816.331	(127.005.770.038)	762.012.046.292	35.027.351.350.963	(2.651.183.986.378)	32.376.167.364.585
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	839.813.703.110	(98.227.319.414)	741.586.383.696	837.639.845.313	(75.646.709.150)	761.993.136.163
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	173.068.613.000	(12.908.269.087)	160.160.343.913	173.068.613.000	(9.220.192.205)	163.848.420.795
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	77.217.969.092	(7.032.399.702)	70.185.569.390	72.771.904.892	(5.049.121.269)	67.722.483.623
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.079.833.393.000	(133.430.830.541)	945.402.562.459	1.016.285.850.700	(80.908.180.505)	925.377.670.195
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.309.229.831.141	(95.509.319.693)	1.213.720.511.448	1.219.355.500.423	(64.561.908.060)	1.154.793.592.363
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.922.474.020.273	(209.081.465.711)	1.713.392.554.562	1.900.603.586.704	(152.084.221.131)	1.748.519.365.573
37	055	KEMENTERIAN PPMBAPPENAS	159.920.519.326	(26.635.326.428)	133.285.192.898	157.938.995.269	(18.822.558.857)	139.116.436.412
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.852.772.917.212	(297.211.727.085)	2.555.561.190.117	2.720.651.489.735	(208.192.205.538)	2.514.459.284.197
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	627.642.444.073	(45.212.084.513)	582.430.359.560	626.331.814.823	(28.535.187.799)	597.796.627.024
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	950.917.405.332	(123.037.756.950)	727.879.648.382	904.605.812.309	(94.701.601.577)	809.904.210.732
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	33.635.963.393.373	(3.984.698.895.288)	29.651.264.498.085	30.982.918.808.753	(3.100.557.941.250)	27.882.360.867.503
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	824.608.980.038	(75.252.660.536)	749.356.319.502	723.899.395.852	(62.711.739.251)	661.187.656.601
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	303.484.955.408	(22.789.631.920)	280.695.323.488	301.883.925.323	(18.150.150.905)	283.733.774.418
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	270.710.338.164	(39.895.687.698)	230.814.650.466	264.256.245.644	(28.396.929.423)	235.859.316.221
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	768.594.923.843	(69.432.981.094)	709.161.942.749	743.328.833.658	(41.678.916.556)	701.649.917.103
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	579.626.324.551	(50.096.198.866)	529.530.125.685	579.836.981.600	(36.904.129.929)	542.932.851.671
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	625.432.559.720	(91.898.403.250)	533.533.156.470	592.058.400.638	(65.238.706.743)	526.819.693.895
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.663.103.000	(1.028.405.823)	12.634.697.177	13.663.103.000	(734.575.445)	12.928.527.555



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 771 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.303.063.727.240	(137.025.583.507)	1.166.038.183.733	1.227.870.898.793	(105.085.788.833)	1.122.775.111.960
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	838.700.198.795	(51.332.790.785)	587.367.409.010	840.132.644.926	(39.227.528.459)	600.905.116.467
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	288.648.597.799	(21.827.233.688)	266.821.364.111	247.832.944.456	(14.085.867.338)	233.747.077.118
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	226.403.549.867	(18.664.385.012)	207.739.164.855	224.201.982.974	(13.977.770.618)	210.224.212.358
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAMUAN INDONESIA	1.537.897.307.245	(139.308.657.300)	1.398.588.649.945	1.402.966.092.176	(86.461.467.491)	1.318.504.624.685
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.151.849.472.193	(242.201.879.289)	909.747.592.904	1.108.708.019.384	(177.238.170.890)	931.469.848.494
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.102.070.660.235	(146.139.162.007)	955.931.498.228	1.043.739.095.308	(139.842.550.634)	903.896.544.674
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	388.942.294.270	(54.646.017.600)	334.296.276.670	368.971.545.623	(35.772.184.531)	333.199.361.292
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	69.292.748.684	(9.476.269.818)	59.816.478.866	67.603.738.668	(6.598.292.484)	61.005.446.184
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	118.968.463.689	(1.204.189.461)	115.764.274.228	867.897.875	(24.329.275)	843.668.600
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.660.420.614	(1.316.991.768)	13.343.428.846	14.660.420.614	(838.546.699)	13.721.873.915
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	674.303.352.860	(64.604.497.431)	609.798.855.429	663.471.874.888	(45.704.851.478)	617.767.023.409
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	365.362.212.486	(44.859.747.200)	320.502.465.286	364.584.089.636	(30.988.812.256)	333.597.477.380
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	833.845.886.323	(88.233.191.460)	747.612.694.863	839.778.988.996	(64.910.006.719)	774.868.982.277
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.086.097.445.734	(126.891.554.196)	959.185.891.538	1.078.044.520.683	(93.594.994.753)	984.449.525.930
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	820.998.685.512	(148.573.391.807)	774.423.293.705	918.066.690.182	(104.191.053.761)	813.875.636.421
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	322.065.385.669	(25.382.742.750)	296.682.642.919	330.872.511.049	(20.853.563.806)	310.018.947.140
66	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	413.108.756.058	(49.002.467.604)	364.106.288.455	411.539.424.542	(36.385.275.648)	375.154.148.894
67	096	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	44.332.422.111	(3.145.040.732)	41.187.381.379	42.316.280.700	(2.250.628.280)	40.065.652.420
68	100	KOMISI YUDISIAL	95.343.811.358	(7.894.698.588)	87.449.212.770	95.038.067.478	(5.627.886.858)	89.408.170.619
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	408.800.511.244	(28.805.568.238)	378.194.943.006	406.800.511.244	(20.398.801.546)	386.401.809.698
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	84.718.470.278	(7.734.977.717)	76.983.492.561	83.267.294.308	(5.328.948.563)	77.938.345.745
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	218.489.915.841	(15.699.320.013)	202.790.595.828	217.763.289.441	(11.150.301.598)	206.612.987.843
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.122.391.980.507	(87.800.634.236)	1.034.591.346.271	1.086.380.524.878	(82.215.453.378)	1.024.165.071.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 772 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	173.700.000	(56.118.463)	117.581.537	173.700.000	(50.773.847)	122.926.153
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	118.330.488.121	(5.928.785.185)	112.401.702.936	119.284.397.671	(3.634.011.430)	115.650.386.241
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	730.174.500	(208.254.188)	521.920.312	1.357.048.000	(27.140.980)	1.329.907.020
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.417.545.926.849	(59.381.919.386)	1.358.164.007.463	648.121.641.004	(14.102.355.957)	634.019.285.047
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	3.466.150.075.042	(685.112.239.040)	2.781.037.836.002	3.776.851.791.730	(730.756.904.137)	3.046.094.887.593
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	219.731.557.081	(12.887.809.405)	206.843.747.676	220.393.658.418	(8.318.692.281)	212.074.966.137
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	41.539.064.481	(3.472.479.290)	38.066.585.191	28.581.033.507	(1.807.641.620)	26.773.391.887
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	932.054.315.352	(189.102.647.095)	742.951.668.257	792.103.284.438	(118.797.001.943)	673.306.282.495
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.195.225.567.574	(199.586.109.312)	995.639.458.262	1.097.034.809.193	(171.533.191.942)	925.501.617.251
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	191.512.341.190	(10.302.264.385)	181.210.076.805	119.863.194.270	(7.088.606.891)	112.774.587.379
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	26.994.766.144	(1.805.327.811)	25.189.438.333	30.903.574.928	(1.392.774.005)	29.510.800.923
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			395.789.205.983.984	(44.500.966.068.875)	351.288.239.915.109	365.440.618.077.924	(38.519.689.209.677)	326.920.918.808.247
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	18.148.539.300	(249.483.764)	17.899.055.536	2.410.401.454	(33.904.355)	2.376.497.099
TOTAL			385.698.354.433.284	(44.501.215.562.639)	351.307.138.870.645	365.443.028.479.378	(38.519.733.114.032)	326.923.295.355.346



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 773 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA KIL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.646.277.700	(4.258.140.092)	9.388.137.608	13.646.277.700	(3.905.724.336)	9.740.553.364
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	95.203.392.507	(41.334.879.142)	53.868.513.365	93.206.026.002	(35.057.521.497)	58.148.504.505
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	394.002.898.853	(240.618.361.372)	153.384.537.481	390.041.392.700	(222.238.000.000)	167.803.392.700
4	005	MAHKAMAH AGUNG	257.545.948.592	(93.598.982.265)	163.946.966.327	234.168.244.636	(85.731.398.417)	148.436.846.219
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	85.082.239.208	(18.817.788.124)	66.264.451.084	58.079.452.455	(28.721.288.321)	29.358.164.134
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	871.398.199.771	(319.888.512.240)	551.409.687.531	844.101.432.447	(226.043.000.000)	618.058.432.447
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	270.623.013.752	(97.919.544.493)	172.703.469.259	291.580.470.407	(88.524.573.088)	203.055.897.319
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	24.780.652.402	(17.103.750.453)	7.676.901.949	24.792.326.158	(12.316.101.705)	12.476.224.453
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	14.543.655.300.107	(5.704.019.262.148)	8.839.636.037.959	13.278.074.914.779	(4.239.050.000.000)	9.039.024.914.779
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	106.092.953.219	(56.687.777.914)	49.405.175.305	99.520.892.828	(48.137.670.513)	51.383.222.315
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	482.330.477.847	(148.197.567.589)	334.132.910.258	494.748.320.295	(122.657.000.000)	372.091.320.295
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	666.275.399.509	(215.363.430.576)	450.911.968.933	636.398.426.494	(176.927.000.000)	459.471.426.494
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	82.668.059.083	(49.312.570.730)	33.355.488.353	79.422.928.203	(45.526.487.033)	33.896.441.170
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.166.835.754.555	(807.380.812.852)	5.359.454.941.703	5.600.863.024.279	(847.324.000.000)	4.753.539.024.279
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	140.715.591.306.257	(55.864.383.322.102)	84.851.207.984.155	134.734.662.130.363	(43.825.400.000.000)	90.909.262.130.363
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.730.574.005.788	(881.698.367.422)	1.048.875.638.366	268.903.858.914	(182.990.000.000)	185.913.858.914
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	619.362.519.947	(254.050.567.942)	365.311.952.005	599.526.448.925	(227.725.000.000)	371.801.448.925
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	575.795.257.721	(199.228.181.188)	376.567.076.533	512.371.379.458	(151.890.000.000)	360.481.379.458
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	82.978.868.231	(47.686.262.023)	35.292.606.208	73.810.949.272	(42.537.737.414)	31.273.211.858
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	104.828.063.058	(40.489.837.198)	64.338.225.860	102.663.682.834	(37.267.884.326)	65.395.798.508
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	500.778.165.894	(199.811.760.238)	300.966.405.656	433.943.153.388	(136.685.000.000)	297.258.153.388
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.950.368.184.989	(1.435.738.279.619)	2.514.629.905.380	3.670.002.974.743	(983.172.000.000)	2.686.830.974.743
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	750.227.340.882.791	(250.030.181.487.153)	500.197.159.395.638	673.689.964.604.995	(177.777.246.268.989)	495.912.718.336.006
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.556.164.233	(676.440.623)	1.881.723.610	2.548.154.233	(609.021.773)	1.939.132.460
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	2.078.674.827	(642.647.801)	1.436.027.026	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 774 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA KJL DAN BUM
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	144.386.000	(40.390.625)	103.995.375	144.386.000	(36.780.875)	107.605.025
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	59.761.635.198	(22.036.570.763)	37.725.064.435	42.185.538.195	(17.320.003.806)	24.865.534.389
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	7.706.388.680	(1.247.785.196)	6.458.603.484	3.201.058.420	(1.076.136.491)	2.124.919.929
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	82.556.352.084	(41.773.856.707)	40.782.495.377	1.360.957.011.452	(503.755.000.000)	857.202.011.452
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	38.461.026.984	(15.241.864.313)	23.219.162.671	38.211.323.571	(13.654.394.686)	24.556.928.905
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.152.456.725	(5.148.969.225)	3.487.500	5.152.456.725	(5.148.194.225)	4.262.500
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(693.319.470)	701.897.080	1.395.216.550	(648.589.182)	746.627.368
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	136.099.563.773	(61.516.349.328)	74.583.214.445	136.101.935.773	(50.304.991.747)	85.796.944.026
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	41.411.757.791	(14.410.039.196)	27.001.718.595	37.418.725.981	(12.570.188.377)	24.848.537.604
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL						
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK						
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.020.002.566	(3.302.790.802)	2.717.211.764	6.020.002.566	(3.121.445.789)	2.898.556.777
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	25.437.956.898	(10.545.157.818)	14.892.799.080	23.767.433.670	(9.242.558.657)	14.524.875.013
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	54.724.368.942	(2.819.708.692)	51.904.660.250	54.724.368.942	(991.775.508)	53.732.593.434
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.556.362.432	(10.626.325.575)	16.930.036.857	29.051.832.982	(9.662.478.863)	19.389.354.119
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	988.193.576.208	(443.891.151.132)	544.302.425.076	893.600.716.423	(378.521.000.000)	517.079.716.423
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	28.783.505.844	(8.005.978.424)	20.777.527.420	28.190.634.667	(6.496.978.035)	21.693.656.632
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	10.888.276.247	(2.882.857.408)	8.005.418.839	10.950.590.247	(1.951.095.501)	8.999.494.746
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	9.022.115.183	(3.939.015.450)	5.083.099.733	9.022.115.183	(3.727.809.678)	5.294.305.505
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	57.809.274.568	(18.870.510.820)	38.938.763.648	55.581.628.760	(15.518.092.301)	40.063.534.459



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 775 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	808.949.560.937	(244.955.910.528)	563.993.650.409	836.311.807.753	(225.366.000.000)	610.945.807.753
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	30.133.286.592	(16.080.967.620)	14.052.318.972	28.676.374.492	(13.827.988.794)	14.848.385.698
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	215.774.212.021	(88.864.048.347)	126.910.163.674	202.581.021.061	(70.454.651.892)	132.126.369.169
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.767.639.990	(597.107.762)	1.170.532.198	1.517.842.710	(502.267.526)	1.015.375.184
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45.415.834.050	(24.010.415.642)	21.405.418.408	45.418.669.050	(23.350.522.023)	22.068.147.027
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	235.802.000	(75.599.706)	160.202.294	235.802.000	(53.989.780)	181.812.210
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	330.334.787.610	(123.577.266.235)	206.757.501.375	275.087.358.726	(90.866.578.878)	184.220.779.848
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	413.196.647.893	(127.909.064.711)	285.287.583.182	413.078.126.893	(98.713.669.993)	314.364.456.900
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	121.860.778.878	(36.322.586.505)	85.538.192.373	122.430.873.378	(32.382.967.687)	90.047.905.691
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	60.534.021.849	(22.750.418.519)	37.783.603.130	58.610.857.849	(16.064.282.934)	42.546.594.915
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.940.202.750	(4.504.057.727)	6.436.145.023	9.216.788.655	(2.376.487.779)	6.840.300.876
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	500.500.000	(148.551.678)	351.948.322	500.500.000	(131.490.046)	369.009.954
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.356.628.189	(1.587.758.463)	768.869.726	2.356.628.189	(1.346.997.998)	1.009.630.191
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	10.784.903.511	(5.195.414.669)	5.589.488.842	10.903.259.475	(4.376.769.805)	6.526.489.670
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	62.881.974.526	(33.793.519.833)	29.088.454.693	62.881.974.526	(25.494.023.715)	37.387.950.811
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	22.986.811.820	(16.175.754.222)	6.810.857.598	21.187.821.770	(12.207.229.140)	8.980.592.630
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17.080.889.443	(8.282.870.748)	8.798.018.695	17.351.803.443	(7.017.429.349)	10.334.374.094
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26.502.013.121	(21.620.743.489)	4.881.269.632	26.399.268.021	(21.200.113.250)	5.199.154.771
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.422.702.736	(3.449.626.487)	2.973.076.249	6.234.395.736	(2.778.787.831)	3.455.607.905
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	129.488.001.499	(45.348.126.778)	84.139.874.721	129.488.001.499	(40.204.175.436)	89.283.826.063
67	095	DEWAS PERWAKILAN DAERAH	2.316.491.000	(172.504.647)	2.143.986.353	2.316.491.000	(123.217.605)	2.193.273.395
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.588.869.626	(3.472.894.041)	115.975.587	3.588.869.626	(3.464.989.886)	123.879.740
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.190.429.000	(214.277.220)	976.151.780	1.190.429.000	(166.660.080)	1.023.768.920
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	5.650.807.800	(3.294.487.252)	2.356.320.548	7.469.703.800	(3.747.769.425)	3.721.934.375



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 776 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	54.820.623.213	(12.770.029.383)	42.050.593.830	50.177.807.433	(9.353.954.025)	40.823.853.408
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	134.138.042.892	(27.889.098.740)	106.248.944.152	134.063.722.892	(18.399.806.559)	115.664.116.333
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	28.551.000	(6.938.176)	21.612.824	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	428.307.268.190	(93.820.026.576)	334.487.242.614	179.303.478.217	(20.290.562.650)	159.012.885.567
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	11.262.645.199.993	(4.123.133.858.967)	7.139.511.341.026	8.332.905.283.962	(2.585.700.000.000)	5.747.205.283.962
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	78.390.837.756	(10.548.556.008)	67.832.281.748	77.270.141.359	(6.891.845.848)	70.378.295.511
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMLU	867.391.000	(393.109.178)	474.281.822	1.115.711.700	(602.883.757)	512.827.943
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	26.035.028.365	(12.594.298.675)	13.440.729.690	22.740.493.037	(10.859.839.629)	11.880.653.408
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	62.477.832.524	(27.167.378.774)	35.310.453.750	45.878.655.104	(23.338.063.531)	22.541.591.573
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.546.416.349.593	(219.002.479.525)	1.327.413.870.068	1.446.365.989.648	(181.709.000.000)	1.264.656.989.648
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	13.432.024.000	(4.364.133.717)	9.067.890.283	13.432.024.000	(3.966.207.844)	9.465.816.156
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			940.071.561.409.663	(322.600.232.852.868)	617.471.328.556.794	851.550.907.014.621	(234.036.781.235.998)	617.514.145.778.623
88	899	BENDAHARA UMUM NEGARA	823.449.447.255	(149.005.824.893)	674.443.622.362	612.562.339.397	(78.267.167.400)	534.295.171.997
TOTAL			940.895.010.856.918	(322.749.238.677.762)	618.145.772.179.156	852.163.469.354.018	(234.115.028.403.398)	618.048.440.950.620



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 777 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	5.917.858.808	-	5.917.858.808	18.572.540.654	-	18.572.540.654
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	28.177.075.068	(647.551.533)	27.529.523.535	20.469.974.368	-	20.469.974.368
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	19.964.084.075	(762.695.664)	19.201.388.411	17.891.717.899	(599.270.781)	17.292.447.118
4	005	MAHKAMAH AGUNG	72.403.973.997	(1.312.239.413)	71.091.734.584	83.643.272.035	(1.009.494.413)	82.633.777.622
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	12.254.901.363	(375.561.857)	11.879.339.506	12.653.849.242	(518.100.073)	12.135.749.169
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.193.461.656.743	(4.615.135.195)	3.188.846.521.548	3.176.088.889.584	(4.658.134.973)	3.171.430.754.611
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	182.391.634.955	(138.115.878.628)	44.275.756.327	182.589.491.050	(137.938.093.876)	44.651.397.174
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	97.765.137.326	(7.021.867.788)	90.743.269.538	97.515.966.180	(6.404.732.124)	91.111.234.036
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	5.515.900.395.884	(1.304.023.236.070)	4.211.877.159.814	5.266.450.324.374	(1.183.930.828.333)	4.082.519.496.041
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	26.397.569.384	(5.516.331.154)	20.881.238.230	29.342.783.620	(5.467.887.245)	23.874.896.375
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	44.543.900.941	(721.959.786)	43.821.941.075	62.353.519.449	(996.180.731)	61.357.338.718
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	80.795.366.492	(2.731.748.076)	78.063.620.416	72.003.399.911	(1.792.072.767)	70.211.327.144
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	25.713.106.570	(1.022.599.100)	24.690.507.470	35.304.338.520	(1.022.649.100)	34.281.689.420
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	382.495.137.704	(1.872.680.761)	380.622.456.943	396.588.988.563	(1.743.854.011)	394.845.134.552
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.744.591.656.083	(115.186.335.705)	2.629.405.320.388	2.795.441.665.354	(94.161.247.078)	2.701.280.418.276
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.476.103.795.532	(69.599.586.769)	1.406.504.208.763	407.805.021.259	(5.023.830.737)	402.781.390.522
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	181.805.819.145	(3.600.063.311)	178.205.755.834	179.903.386.095	(3.470.398.347)	176.432.987.748
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.536.430.467.916	(78.392.392.907)	1.458.038.075.009	1.419.064.014.733	(75.360.145.420)	1.343.703.869.313
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15.283.210.972	(490.001.790)	14.793.209.182	10.541.848.852	(533.158.078)	10.008.690.778
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	22.818.085.114	(3.565.799.913)	19.252.285.201	21.990.010.062	(3.466.709.781)	18.523.300.281
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	67.993.719.870	(5.999.477.142)	61.994.242.728	72.979.895.525	(8.837.934.584)	64.141.960.941
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	84.078.416.078	(6.662.508.152)	77.415.907.924	83.814.510.994	(6.417.084.754)	77.397.426.240



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 778 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	36.227.381.061.615	(6.025.579.448.085)	30.201.801.613.530	31.663.073.245.824	(5.195.340.095.606)	26.467.733.150.218
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	30.286.918.444	(3.000.000)	30.283.918.444	27.153.228.550	(3.000.000)	27.150.228.550
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	842.598.787	-	842.598.787	464.570.712	0	464.570.712
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	969.395.742	(137.445.000)	831.950.742	969.168.592	(137.445.000)	831.723.592
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	34.555.285.553	(1.482.772.299)	33.072.513.254	16.352.787.812	(1.164.720.736)	15.188.067.076
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.066.410.162	-	1.066.410.162	1.066.410.162	0	1.066.410.162
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	35.667.832.662	(2.331.032.715)	33.336.799.947	1.076.998.825.638	(58.924.420.649)	1.018.074.404.989
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.480.898.885	(141.512.019)	3.339.386.866	3.416.599.885	(54.245.083)	3.362.354.802
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	315.310.076	(19.500.000)	295.810.076	315.310.076	(17.625.000)	297.685.076
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.889.655.712	-	1.889.655.712	1.066.687.595	0	1.066.687.595
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.519.354.367	(39.750.000)	3.479.604.367	3.327.389.145	(39.750.000)	3.287.639.145
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.488.984.404	(281.964.652)	7.207.019.752	7.080.408.071	(206.963.026)	6.873.445.045
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	568.097.704	-	568.097.704	568.097.704	0	568.097.704
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	55.028.713.007	(155.798.570)	54.872.914.437	54.000.004.095	(97.263.142)	53.902.740.953
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	111.114.920.719	-	111.114.920.719	101.395.867.321	0	101.395.867.321
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.738.722.790.707	(2.388.960.915)	1.736.333.829.792	1.644.008.610.213	(2.481.441.554)	1.641.527.168.659



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 779 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	224.244.432.837	(290.804.915)	223.953.627.922	211.408.483.218	(124.291.683)	211.284.191.535
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.387.854.280	(353.540.114)	20.014.114.166	30.478.468.553	(333.416.365)	30.145.052.188
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	69.594.500.305	(33.313.159.236)	36.281.341.069	76.204.526.855	(17.968.460.196)	58.236.066.659
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	19.135.872.279	(188.377.741)	18.947.494.538	18.800.129.290	(123.343.794)	18.676.785.496
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11.891.001.623	(886.617.168)	11.004.384.455	10.673.616.963	(886.617.168)	9.786.999.795
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	852.077.649	(444.976.050)	407.101.599	852.077.649	(444.976.050)	407.101.599
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	24.867.844.252	(2.354.335.008)	22.613.509.244	17.053.162.464	(2.278.044.784)	14.775.117.680
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	121.688.849.932	(8.852.125.742)	112.836.724.190	151.075.117.594	(12.064.395.864)	139.010.721.730
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.774.825.396	(95.079.813)	2.679.745.583	2.782.451.267	(77.344.001)	2.705.107.266
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.447.230.498	-	1.447.230.498	2.057.480.946	-	2.057.480.946
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	13.138.895.295	(843.340.450)	12.295.554.845	11.243.405.980	(827.522.950)	10.415.883.030
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.298.537.063	(906.130.543)	4.392.406.520	3.983.533.963	(804.531.892)	3.159.002.071
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	25.740.176.432	(1.094.243.335)	24.645.933.097	25.695.097.079	(650.088.004)	25.045.009.075
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	463.185.988	(27.406.250)	435.779.718	382.506.987	(22.552.500)	359.954.487
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	358.861.312.274	(159.191.959)	358.702.120.315	353.555.931.035	(61.097.083)	353.494.833.952
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	27.750.055.481	(43.205.809)	27.706.849.672	29.660.425.411	(109.684.797)	29.550.740.614
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	40.673.917.442	(1.188.110.364)	39.485.807.078	41.752.819.597	(849.517.112)	40.903.302.485
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	18.246.137.680	(22.270.000)	18.223.867.680	13.396.253.680	(22.270.000)	13.373.983.680
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	9.946.910.402	(36.400.000)	9.910.510.402	9.808.356.342	(36.400.000)	9.771.956.342
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.213.240.578	-	1.213.240.578	1.213.240.578	0	1.213.240.578



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 780 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

								(dalam Rupiah)
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.285.450.732	(3.000.000)	1.282.450.732	5.370.705.973	(3.000.000)	5.367.705.973
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.787.442.144	(112.971.314)	6.674.470.830	6.387.966.086	(88.845.389)	6.299.120.697
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	26.865.394.160	(60.483.100)	26.804.911.060	26.865.394.160	(60.483.100)	26.804.911.060
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	13.625.162.893	(5.503.180.195)	8.121.982.698	13.878.382.893	(573.622.512)	13.304.760.381
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	6.149.701.413	(757.664.259)	5.392.037.154	5.189.208.959	(590.236.381)	4.598.972.578
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.399.393.688	(372.056.403)	8.027.337.285	8.486.947.253	(607.460.403)	7.879.486.850
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	40.051.809.406	(7.304.559.123)	32.747.250.283	38.971.004.037	(5.903.779.375)	33.067.224.662
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	5.667.143.874	-	5.667.143.874	5.673.302.198	0	5.673.302.198
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	16.861.605.546	(610.245.680)	16.051.359.866	44.344.441.857	(950.782.48)	43.394.263.609
68	100	KOMISI YUDISIAL	2.225.816.257	-	2.225.816.257	2.225.816.257	0	2.225.816.257
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	14.202.140.840	-	14.202.140.840	14.183.138.780	0	14.183.138.780
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	16.354.507.673	(276.955.250)	16.077.552.423	16.014.510.408	(276.955.250)	15.737.555.158
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	686.058.235	(43.502.200)	642.556.035	695.197.035	(37.287.400)	657.929.635
72	107	BADAN SAR NASIONAL	30.253.877.462	(2.889.977.951)	27.363.899.511	29.727.542.422	(220.935.331)	27.506.607.091
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	2.977.950.406	(5.637.500)	2.972.312.906	3.171.148.246	(5.637.500)	3.165.510.746
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	5.592.717.893	-	5.592.717.893	5.592.717.893	0	5.592.717.893
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	4.225.119.385	(876.868.914)	3.348.250.471	4.225.119.385	(606.667.282)	3.618.452.103
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	14.217.438.382	(203.174.110)	14.014.264.272	220.452.865	(4.395.287)	216.057.578
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14.988.244.009	(587.715.750)	14.398.528.259	14.982.748.009	(547.039.500)	14.435.708.509
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	4.497.207.735	-	4.497.207.735	4.497.207.735	0	4.497.207.735



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 781 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
79	114	SEKRETARIAT KABINET	742.783.023	-	742.783.023	11.207.596.930	0	11.207.596.930
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	25.289.228.432	(3.156.694.889)	22.132.533.543	20.250.002.748	(620.852.754)	19.629.149.994
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	14.930.331.228	(6.006.633.798)	8.923.697.430	15.595.955.504	(5.967.645.736)	9.628.309.768
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	4.782.591.743	(1.415.699.042)	3.376.892.701	18.488.830.957	(1.663.178.281)	16.825.652.676
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	37.179.027.949	(136.874.651)	37.042.153.298	38.013.827.949	(136.874.651)	37.876.953.298
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	6.400.061.645	-	6.400.061.645	22.897.683.772	0	22.897.683.772
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	9.575.417.031	(2.236.082.751)	7.339.334.280	77.391.654.834	(56.963.200.00)	77.334.691.634
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	13.751.130.817	0	13.751.130.817
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	4.380.022.550	(138.669.795)	4.241.352.755	3.150.808.300	0	3.150.808.300
JUMLAH PADA K/L			55.407.453.501.874	(7.868.572.594.131)	47.534.639.554.788	50.547.784.127.411	(6.860.413.487.589)	43.684.219.831.522
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	86.210.919.219	(15.794.895.129)	70.416.024.090	83.346.134.691	(15.182.303.213)	68.163.831.478
TOTAL			55.493.664.420.893	(7.884.367.489.260)	47.605.055.578.878	50.631.130.262.102	(6.875.595.790.802)	43.752.383.883.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 782 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.F

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	68.417.931.422	17.201.344.575
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	148.295.000	48.800.000
4	005	MAHKAMAH AGUNG	400.567.668.371	335.957.047.294
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	38.343.017.539	211.168.435.402
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.712.579.850	9.347.165.666
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	32.921.865.346	24.016.934.779
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	234.797.668.363	94.605.435.790
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	12.244.338.664.394	4.814.616.095.988
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	174.381.031.855	217.154.025.040
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	287.102.517.576	130.966.788.109
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	85.628.889.418	109.794.054.699
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	103.728.888.414	142.441.255.953
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	367.626.147.524	305.146.699.950
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	52.097.911.080.290	42.749.102.979.012
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.387.520.151.209	563.946.376.700
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.943.703.629.795	2.112.015.308.839
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	3.482.888.346.523	2.594.268.254.238
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	142.811.381.638	66.232.461.701
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.194.436.815	281.836.313
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	115.623.422.606	42.995.053.578
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	187.703.770.549	176.053.544.514
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	71.648.472.943.207	70.152.213.383.529
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	637.664.080.626	395.964.080.975
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	68.862.035.362	1.647.770.000
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	198.657.800	6.668.088.167.077
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.522.511.000	2.522.511.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	74.916.600	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	4.287.139.500	60.491.450.298
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	949.091.298	1.109.199.298
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	7.431.790.551	11.819.517.817
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 783 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.F

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	337.624.000	8.399.308.095
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8.459.739.301.599	3.307.508.125.235
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	61.378.604.946	153.245.015.219
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.420.061.000	1.142.185.000
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	30.177.239.114	31.608.897.585
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.339.443.100	1.618.524.600
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	477.116.500	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	263.987.553.321	67.464.562.161
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	282.300.922.468	132.035.123.866
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	975.445.880	11.244.701.582
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	780.719.500	730.911.500
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	503.179.954.233	400.425.130.743
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	16.370.469.857	3.270.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	104.724.121.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	224.384.887	168.744.037
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	20.888.135.286	9.303.688.712
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	5.112.393.685	4.345.309.000
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.304.624.372	5.304.624.372
68	100	KOMISI YUDISIAL	120.234.730	120.234.730
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.943.351.573	2.534.331.148
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	295.054.071	325.937.404
72	107	BADAN SAR NASIONAL	200.120.529.005	593.716.510
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	761.550.555	221.669.000
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.840.394.050	1.840.394.050
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	593.771.435.699	393.987.073.321
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	72.000.000	72.000.000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	98.500.000	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	22.485.983.410	5.672.605.314



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 784 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 20.F

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	771.611.831	463.125.675
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	102.876.824.151	276.979.017.829
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	439.107.488.237	344.032.060.237
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	2.552.740.000	191.700.000
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-
JUMLAH PADA K/L			161.801.943.027.501	137.280.116.874.059
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	10.813.332.400	8.385.587.978
		Penyesuaian (Eliminasi pada SPAN)	-	-
TOTAL			161.812.756.359.901	137.288.502.462.037



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 785 -

LAMPIRAN 21

TAGIHAN TUNTUTAN

TP/TGR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 786 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	216.964.410	(210.034.822)	6.929.588	221.441.541	(210.057.208)	11.384.333
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.070.515.603	(2.626.452.252)	444.063.351	3.055.767.909	(2.588.888.511)	466.879.398
4	005	MAHKAMAH AGUNG	-	-	-	4.572.974	(22.865)	4.550.109
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	88.688.627	(443.443)	88.245.184	90.188.627	(438.943)	89.749.684
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.124.998	(20.625)	4.104.373	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	32.478.996.348	(32.478.996.348)	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	807.758.409	(788.237.441)	19.520.968	816.397.648	(788.195.265)	28.202.383
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.483.810.558	(100.434.093)	1.383.376.465	1.757.871.682	(84.433.721)	1.673.437.961
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.449.041.133	(12.083.560.521)	3.365.480.613	12.619.224.233	(12.003.781.456)	615.442.777
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	20.212.679.705	(7.605.399.528)	12.607.280.177	21.841.534.383	(179.946.428)	21.661.587.955
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.480.000	(9.480.000)	-	-	-	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.594.198.990	(376.840.802)	9.217.358.188	9.690.359.139	(376.524.103)	9.313.835.036
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.115.524.750	(5.391.319.352)	2.724.205.398	-	-	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.290.059.881	(1.646.937.938)	6.643.121.743	8.575.645.704	(1.616.104.466)	6.959.541.238
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	809.486.534	-	809.486.534	135.120.000	(5.000.000)	130.120.000
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 787 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	446.658.693	(2.233.293)	444.425.400	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.361.892.339	(1.265.216.776)	96.675.563	1.377.771.125	(1.265.291.170)	112.479.955
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	845.220.000	(229.755.000)	615.465.000	161.370.000	(161.370.000)	-
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	465.785.701	(208.587.955)	257.187.746	322.573.733	(214.665.886)	107.907.747
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	511.393.503	(169.781.448)	341.612.055	168.064.805	(168.064.805)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	28.240.748	(141.204)	28.099.544	28.864.410	(144.822)	28.819.588
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	29.196.350	(145.982)	29.050.368	7.067.807.565	(5.386.079.786)	1.881.527.799
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	2.332.000	(11.660)	2.320.340
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	783.139.873	(783.139.873)	-	783.412.600	(783.412.600)	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	108.492.500	(542.462)	107.950.038	837.351.144	(4.186.756)	833.164.388
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.596.965.086	(1.975.549.238)	621.415.848	2.650.541.830	(2.007.180.516)	643.361.314



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 788 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.104.641	(485.523)	96.619.118	97.869.573	(489.347)	97.380.226
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.906.096.428	(9.025.265.860)	1.880.830.568	10.467.992.809	(9.023.075.344)	1.444.917.465
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	433.372	(2.167)	431.205	5.273.396	(26.367)	5.247.029
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	756.321.114	(756.321.114)	-	752.121.114	(752.121.114)	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	32.714.287	-	32.714.287	31.644.572	-	31.644.572
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.223.188	(11.116)	2.212.082	37.139.058	(186.695)	36.953.363
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	189.863.000	(189.863.000)	-	189.863.000	(189.863.000)	-
48	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.000.000	(10.000)	1.990.000	2.000.000	(10.000)	1.990.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.129.845.056	(60.101.904)	12.069.743.152	11.369.270.829	(56.578.859)	11.312.691.970
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	9.350.090.207	(9.350.090.207)	-	9.540.934.923	(9.540.934.923)	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	23.362.743.163	(19.763.460.029)	3.599.283.134	23.640.957.235	(19.970.718.831)	3.670.238.404
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	81.958.836.331	(81.958.836.331)	-	103.708.888	(28.251.294)	75.457.594
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	6.978.645.840	(6.252.654.514)	726.191.326	7.487.105.546	(6.609.246.203)	877.859.343
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.370.722.119	(10.348.039.599)	22.682.520	10.395.959.442	(10.379.644.705)	16.314.737



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 789 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	31.034.524	(155.174)	30.879.350	93.103.480	(465.518)	92.637.962
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	29.631.455.523	(29.464.444.773)	167.010.750	28.400.564.911	(28.193.580.036)	206.984.875
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.541.234.605	(1.264.042.972)	1.277.191.633	2.733.455.929	(729.693.146)	2.003.762.783
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-	-	41.025.372	(205.127)	40.820.245
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	550.074.355	(513.259.355)	36.815.000	338.719.555	(142.116.926)	196.602.629
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	-
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUOSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 790 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	188.258.179	-	188.258.179	640.508.179	-	640.508.179
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	6.670.000	(33.350)	6.636.650	9.687.500	(48.437)	9.639.063
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	296.539.585	(1.379.860)	295.159.725	283.242.844	(2.016.610)	281.226.234
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	513.719.500	(2.568.598)	511.150.902
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			297.191.420.066	(236.901.717.244)	60.289.702.823	179.183.980.687	(113.486.641.127)	65.717.339.560
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	-	-	-	-	-	-
TOTAL			297.191.420.066	(236.901.717.244)	60.289.702.823	179.183.980.687	(113.486.641.127)	65.717.339.560



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 791 -

LAMPIRAN 22

ASET TAK BERWUJUD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 792 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	AMORTISASI	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	6.933.598.520	-	(3.090.894.741)	3.842.703.779	4.661.296.020	-	(1.574.714.895)	3.086.581.125
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	56.833.816.215	-	(29.716.836.078)	27.116.980.137	55.973.161.942	-	(24.242.593.477)	31.730.578.465
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	181.618.568.202	-	(124.009.905.595)	57.608.662.607	163.565.836.169	-	(110.015.543.488)	53.550.292.701
4	005	MAHKAMAH AGUNG	47.696.472.847	-	(37.710.300.885)	9.986.171.962	45.492.383.622	-	(34.359.868.623)	11.132.514.999
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	656.446.105.806	-	(420.109.183.626)	236.336.922.082	636.556.219.757	-	(365.101.104.895)	271.455.114.862
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	59.349.487.646	-	(43.421.232.704)	15.928.254.942	59.072.433.543	-	(38.515.799.865)	20.556.643.578
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	744.102.165.510	-	(697.087.151.741)	47.015.013.769	777.425.934.136	-	(729.256.428.168)	48.169.505.968
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	80.400.408.178	-	(55.996.773.782)	24.403.634.396	98.493.216.692	-	(69.866.615.671)	28.626.601.021
9	012	KEMENTERIAN PERTANAHAN	4.548.003.145.359	279.573.034.991	(1.668.392.488.202)	3.159.183.694.148	3.783.684.025.449	-	(1.400.835.680.348)	2.382.848.345.103
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	534.166.062.298	-	(432.954.291.804)	101.211.770.494	625.234.696.057	-	(442.517.380.284)	182.717.318.573
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.595.486.594.674	23.000.050.914	(1.138.392.978.241)	480.093.667.347	1.486.901.020.449	-	(1.035.960.188.625)	450.940.831.824
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	107.165.008.298	-	(28.840.991.338)	80.324.016.960	94.884.700.643	-	(21.884.137.302)	72.990.563.341
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	53.744.582.207	-	(28.433.095.318)	25.311.486.889	50.771.686.191	-	(21.963.363.488)	28.808.324.705



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 793 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)				(dalam Rupiah)
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	326.716.338.346		(209.197.528.826)	117.518.809.520	334.966.665.380	213.324.400	(200.710.553.809)	134.469.435.971	
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.681.878.163.989	71.034.174.887	(498.935.199.951)	2.253.977.139.925			(447.404.239.878)	2.255.911.437.401	
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	953.868.871.508	1.542.368.000	(471.084.197.316)	484.427.042.192	2.703.315.877.279		(119.006.412.377)	140.985.883.787	
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	288.163.095.465		(214.479.107.427)	73.683.988.038	259.992.096.184		(187.149.269.857)	101.728.713.896	
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	214.484.509.521		(116.635.506.144)	97.849.003.377	288.877.983.543		(105.308.245.336)	102.539.386.089	
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	49.549.068.283		(41.933.668.115)	7.615.400.168	207.847.630.425		(39.331.274.772)	14.439.671.235	
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	109.419.769.236		(92.943.058.147)	16.475.711.089	53.770.946.007		(85.278.449.458)	13.260.378.248	
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	145.902.739.686		(84.190.513.954)	61.712.225.732	98.538.827.706		(80.002.540.750)	45.129.974.230	
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	218.310.049.120	894.437.500	(98.554.238.883)	122.650.247.737	215.818.602.225		(90.499.336.968)	125.317.265.257	
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.095.253.956.766	59.153.807.200	(115.881.277.585)	7.038.526.486.281	7.203.074.520.673		(95.895.451.139)	7.107.179.069.534	
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	8.896.300.640		(8.345.857.290)	550.443.350	13.430.821.425		(12.084.103.929)	1.346.517.496	
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	17.050.923.442		(13.411.762.992)	3.639.160.450	15.108.143.042		(10.456.491.880)	4.649.651.182	
26	038	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.503.526.500		(780.706.188)	722.820.312	1.437.626.500		(749.370.063)	688.156.437	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 794 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	50.706.440.671		(25.840.379.667)	24.866.061.004	50.120.547.321		(19.383.854.316)	30.736.693.005
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	23.281.538.648		(18.768.358.763)	4.512.181.885	23.246.192.650		(18.200.326.458)	5.045.866.191
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	55.893.917.812		(47.590.113.424)	8.303.804.388	714.640.521.975		(362.364.839.998)	352.275.681.977
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	38.673.442.828		(29.241.581.960)	9.431.860.868	38.168.848.828		(19.450.495.595)	18.718.353.233
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.642.888.379		(15.135.328.387)	507.561.982	17.798.326.700		(15.290.490.864)	2.507.835.836
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUN NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	4.251.103.570		(2.876.201.835)	1.374.901.735	4.214.073.020		(2.874.389.394)	1.339.683.626
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.793.510.595.122		(1.280.428.900.485)	3.513.081.694.637	3.892.988.604.622		(938.791.548.756)	2.954.197.055.866
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.052.440.073.318		(554.117.055.948)	498.323.017.370	1.401.789.077.681		(844.530.848.098)	756.858.429.583
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	117.490.428.182		(98.417.223.220)	21.073.205.962	117.450.021.182		(77.782.773.712)	39.667.247.470
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	820.959.713.740		(603.967.204.067)	216.972.509.673	818.268.993.123		(512.227.608.935)	306.042.384.188
37	055	KEMENTERIAN PPW/BAPPENAS	131.912.902.018		(43.687.324.117)	88.225.577.901	55.783.312.439		(35.825.335.474)	19.957.976.965
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	242.778.845.504		(173.808.871.312)	68.969.974.192	215.425.808.967		(157.417.431.488)	58.008.377.481
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	204.531.978.810		(36.910.379.478)	167.621.599.334	180.959.556.233		(25.378.110.318)	155.581.445.915



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 795 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)										
31 DESEMBER 2020 (Audited)						31 DESEMBER 2019 (Audited)				
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	394.496.870.452	-	(317.710.757.717)	76.786.112.735	383.340.834.073	-	(298.012.674.181)	85.328.159.892
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.616.737.267.050	-	(3.033.337.534.813)	3.583.399.732.237	4.452.804.047.706	-	(1.835.851.571.656)	2.616.952.476.050
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	118.914.895.397	-	(55.327.374.438)	63.587.520.959	103.338.739.947	-	(45.031.586.155)	58.307.153.792
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	217.820.097.393	-	(207.082.880.562)	10.737.216.831	215.693.329.531	-	(195.424.884.377)	20.268.665.154
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	113.131.081.756	-	(79.325.168.019)	33.805.913.737	106.522.243.049	-	(69.086.243.488)	37.435.999.561
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	157.414.032.340	-	(118.868.376.890)	38.545.655.450	170.237.674.270	-	(106.561.863.597)	63.675.810.673
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	7.737.984.754	-	(5.277.768.179)	2.460.196.575	7.854.215.854	-	(6.173.813.529)	1.680.402.125
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	42.996.846.100	-	(36.240.520.314)	7.756.325.786	37.444.918.522	-	(31.543.455.740)	5.901.462.782
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	660.481.200	-	(479.903.075)	180.578.125	817.610.000	-	(586.972.500)	220.637.500
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	438.500.587.879	-	(414.233.320.257)	24.267.277.622	433.297.132.629	-	(405.552.342.610)	27.744.790.019
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	23.993.925.556	-	(13.983.846.457)	10.010.079.099	18.568.425.806	-	(9.831.282.800)	8.737.143.006
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	22.398.445.587	-	(15.802.714.325)	6.595.731.262	28.361.978.911	-	(16.032.714.847)	12.329.264.064
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	34.496.338.499	-	(20.240.518.854)	14.255.819.645	37.044.447.353	-	(20.942.776.917)	16.101.670.436



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 796 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	192.278.501.175	-	(45.669.542.149)	146.608.959.026	160.833.905.655	-	(33.176.678.891)	127.657.226.764
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	47.169.515.624	-	(33.372.121.357)	13.796.394.267	46.363.881.524	-	(28.934.809.881)	17.429.071.633
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	173.365.970.805	-	(116.557.492.824)	56.808.477.981	157.174.213.886	-	(89.762.703.280)	57.411.510.606
56	082	LEMBAGA PEMERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	556.802.077.105	81.649.980.810	(273.339.403.284)	344.112.634.631	514.319.188.407	-	(196.736.813.210)	317.582.375.197
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.098.213.643.612	64.203.445.178	(2.182.235.741.724)	981.181.347.066	2.996.886.940.090	-	(1.854.052.238.115)	1.142.834.700.975
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	12.430.477.200	-	(9.377.722.635)	3.052.754.565	9.725.556.950	-	(8.154.343.858)	1.571.213.092
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11.995.406.393	-	(8.364.011.438)	3.631.394.955	11.949.866.393	-	(6.452.518.282)	5.497.348.111
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5.853.702.800	-	(4.908.938.440)	944.764.360	4.707.376.900	-	(3.487.828.277)	1.219.548.623
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	16.541.087.383	-	(11.883.826.778)	4.657.260.605	15.970.656.383	-	(10.150.466.033)	5.820.190.350
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	150.148.317.195	-	(142.686.489.940)	7.461.827.255	182.079.955.859	-	(172.722.774.340)	9.357.181.519
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	55.430.601.817	291.000.000	(38.011.699.030)	17.709.902.787	47.151.503.048	100.033.000	(27.802.744.973)	19.448.791.075
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	98.238.849.525	-	(56.432.647.385)	41.806.202.140	104.242.462.764	-	(64.404.381.283)	39.838.081.501
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	934.400.402.688	-	(13.950.247.070)	920.450.155.598	933.088.953.889	-	(11.048.831.413)	922.018.122.476



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 797 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)										
			31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	92.914.722.458	-	(58.991.042.589)	33.923.679.869	78.129.402.444	-	(50.188.672.327)	27.960.730.117
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.247.005.162	-	(4.755.282.217)	491.722.935	5.197.450.152	-	(4.431.180.867)	766.269.285
68	100	KOMISI YUDISIAL	2.955.703.940	-	(2.309.143.384)	646.560.556	3.326.595.940	-	(2.316.452.846)	1.010.143.094
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	196.880.994.615	-	(125.083.511.732)	71.797.482.883	192.362.676.115	-	(94.828.288.092)	97.534.388.023
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	9.217.467.608	-	(8.637.147.849)	580.319.759	15.280.255.238	-	(13.008.043.769)	2.272.211.469
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	49.978.596.054	1.520.500.277	(28.298.578.621)	23.200.517.710	45.123.049.668	-	(20.736.808.495)	24.386.243.173
72	107	BADAN SAR NASIONAL	220.883.467.749	-	(153.852.547.184)	67.030.920.565	215.077.349.629	-	(128.976.622.717)	86.100.726.912
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1.237.413.863	-	(878.751.256)	358.662.608	931.099.883	-	(732.537.038)	198.562.825
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	88.550.875.721	193.560.000	(2.779.322.758)	85.964.912.963	87.802.204.971	-	(2.493.227.561)	85.308.977.410
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	991.349.234	-	(728.640.484)	262.708.750	848.899.234	-	(600.971.109)	247.928.125
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	210.973.585.963	-	(110.735.480.473)	200.238.105.490	210.174.630.963	-	(10.229.032.883)	199.945.598.080
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	208.868.500.512	22.641.461.193	(44.128.482.273)	187.381.479.432	203.182.103.888	-	(23.092.157.616)	180.089.946.050
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	188.378.710.486	-	(87.048.579.470)	101.330.131.026	238.149.897.668	-	(34.809.635.080)	203.340.262.588



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 798 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

		31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)				(dalam Rupiah)
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
79	114	SEKRETARIAT KABINET	3.700.317.683	-	(3.147.292.553)	553.025.130	3.671.760.383	-	(2.954.432.518)	717.327.865
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	14.813.033.769	-	(7.152.873.577)	7.660.160.192	18.244.862.448	-	(10.276.267.378)	7.968.595.069
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	9.397.052.974	-	(7.134.285.460)	2.262.767.514	8.541.645.118	-	(5.936.788.308)	2.604.856.810
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	10.475.154.007	-	(3.510.888.420)	6.964.264.587	5.774.406.516	-	(2.017.500.890)	3.756.905.626
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	390.209.000	-	(8.950.000)	380.259.000	310.609.000	-	-	310.609.000
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	68.887.723.834	-	(66.011.180.505)	2.876.543.329	66.756.427.848	-	(64.160.506.139)	2.605.921.709
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	5.230.191.790	-	(2.989.655.468)	2.240.536.322	5.607.181.289	-	(2.423.880.674)	3.183.300.615
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	9.239.838.720	-	(358.337.063)	8.881.501.657
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	1.751.467.700	-	(402.241.313)	1.349.226.387	752.977.000	-	(91.705.250)	661.271.750
JUMLAH PADA K/L			43.268.901.959.033	585.797.800.950	(17.471.424.930.083)	26.383.274.829.900	39.526.551.636.648	313.357.400	(14.829.669.137.469)	24.897.185.856.571
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	174.606.628.395	-	(100.207.974.358)	74.398.654.037	170.966.863.195	-	(84.005.895.941)	86.960.967.254
TOTAL			43.443.508.587.428	585.797.800.950	(17.571.632.904.441)	26.457.673.483.937	39.697.518.499.843	313.357.400	(14.713.675.033.410)	24.984.156.823.825



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 799 -

LAMPIRAN 23

ASET EKS BPPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 800 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.A

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2020**

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2019		Mutasi Tahun 2020		Saldo Per 31 Desember 2020	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	910	788.353.860.925,00	5	988.343.680.115,00	915	1.776.697.541.040,00
2	Temuan BPK	369	782.795.799.869,15			369	782.795.799.869,15
3	BJDA (Verifikasi 2009)	63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-	1	5.752.019.500,00	1	5.752.019.500,00
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-			-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000,00			2	295.000.000,00
7	Covernote	86	361.465.913.037,00			86	361.465.913.037,00
		1.472	2.353.306.709.831,15	6	994.095.699.615	1.478	3.347.402.409.446,15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 801 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET INVENTARIS EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2019		Mutasi Tahun 2020		Saldo 31 Desember 2020		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	18.620	8.476.788.157,35	.	.	18.620	8.476.788.157,35	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338	0	0	11.274	6.400.600.338	
	b. Tidak Digunakan (idle)	7.346	2.076.187.819	0	0	7.346	2.076.187.819	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 802 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2020
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp 5.341.796.415,00	(584.178.642,00)	Rp 5.257.616.773,00
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar	Bank luar negeri	Rp 3.592.554.880,69	Rp (3.592.554.880,69)	Rp -
3	Bank Bahari	Courts Bank Hongkong Branch sebesar	Bank luar negeri	Rp -	Rp -	Rp -
Total				Rp 9.434.351.295,68	Rp (4.176.734.522,69)	Rp 5.257.616.773,00
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
7	Bank Central Dagang BSKU	Bank CIL, Jakarta	Bank dalam negeri	Rp 2.044.748,80		Rp 2.044.748,80
3	BUN	BRI CIL Mutiah		Rp 83.311.328,35		Rp 83.311.328,35
4	BUN	Cribank		Rp 8.776.916.074,45		Rp 8.776.916.074,45
5	BDNI	BPR Tri Sayahtera Makmur, Jkt		Rp 97.886.237,95		Rp 97.886.237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp 706.429.119,47		Rp 706.429.119,47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp 196.059.779,49		Rp 196.059.779,49
8	Bank Kharisma BSKU	Bank Aspac		Rp 267.761,43		Rp 267.761,43
9	Bank Budi Internasional BSKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp 5.601.373,85		Rp 5.601.373,85
10	Bank Aken BSKU	Bank Central Dagang		Rp 625.069,88		Rp 625.069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp 2.994.990,16		Rp 2.994.990,16
14	HOKINDO	Bank Modern	telah dikudasi (BBO/BSKU)	Rp 6.207.877,95		Rp 6.207.877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp 122.086.331,08		Rp 122.086.331,08
16	SANHO	Bank Umum Servis		Rp 4.887.591,05		Rp 4.887.591,05
17	BDNI	BOH Finance, Hongkong		Rp 1.020.060.447,69		Rp 1.020.060.447,69
19	HOKINDO	Bank Felita		Rp 6.017.122,84		Rp 6.017.122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp 11.739.033,84		Rp 11.739.033,84
20	Bank Kharisma BSKU	Indover Bank		Rp 141.402.439,43		Rp 141.402.439,43
21	Bank Hastin Internasional BSKU	Indover Bank		Rp 361.433.693,83		Rp 361.433.693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp 2.864.035,05		Rp 2.864.035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp 268.237.424,51		Rp 268.237.424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BSKU	Indover Bank		Rp 109.652.042,65		Rp 109.652.042,65
25	BUN	Indover Bank	Bank Indover	Rp 925.492.300,83		Rp 925.492.300,83
26	BUN	Indover Bank		Rp 531.317.555,65		Rp 531.317.555,65
27	Bank BIRA BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.530.231,65		Rp 24.530.231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp 32.416.251,32		Rp 32.416.251,32
29	Bank Asia Pacific BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 16.993.382,21		Rp 16.993.382,21
30	Bank Unibank BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 45.288.112,29		Rp 45.288.112,29
31	Bank Unibank BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.849.497,80		Rp 24.849.497,80
32	Bank Mashil Utama BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 354.542.691,02		Rp 354.542.691,02
33	Bank Central Dagang BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 92.060.251,81		Rp 92.060.251,81
34	Bank Ficonmont BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 77.574.756,22		Rp 77.574.756,22
35	UHARMALA	Indover Bank, Amsterdam	Bank Indonesia tidak diketahui	Rp 1.139.267,42		Rp 1.139.267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 11.664.832,40		Rp 11.664.832,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 108.150.696,65		Rp 108.150.696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 120.045.719,98		Rp 120.045.719,98
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp 341.740.942,42		Rp 341.740.942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp 195.403.134,60		Rp 195.403.134,60
41	Bank Asia Pacific BSKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 956.004.486,45		Rp 956.004.486,45
42	Bank Unibank BSKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 2.996.775,68		Rp 2.996.775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp 254.274.894,54		Rp 254.274.894,54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp 27.358.123,38		Rp 27.358.123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank	Bank Indonesia tidak diketahui	Rp 122.424.166,80		Rp 122.424.166,80
46	BDNI	Bank Indonesia		Rp 406.733.525.331,33		Rp 406.733.525.331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)		Rp 2.359.921.197,78		Rp 2.359.921.197,78
48	BDNI	Kapitel Bank, Singapore		Rp 2.257.377.867,88		Rp 2.257.377.867,88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Devden)		Rp 1.758.722.655,31		Rp 1.758.722.655,31
50	BDNI	Americas Express Bank, NY		Rp 1.834.239.834,61		Rp 1.834.239.834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp 666.429.511,70		Rp 666.429.511,70
52	PESONA	Banca Commerciale		Rp 61.815.826,61		Rp 61.815.826,61
53	UHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVI)		Rp 44.241.246,97		Rp 44.241.246,97
54	BDNI	Bank Boston, RA Singapore		Rp 2.270.531,95		Rp 2.270.531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert	Bank luar negeri	Rp 378.699.549,31		Rp 378.699.549,31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp 234.342.412,12		Rp 234.342.412,12
57	Bank Yama BSKU	Bank Mashil		Rp 58.834.913,90		Rp 58.834.913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp 65.028.723,58		Rp 65.028.723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp 41.766.481,92		Rp 41.766.481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp 6.616.463.903,03		Rp 6.616.463.903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp 266.632.029,06		Rp 266.632.029,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp 339.690.834,35		Rp 339.690.834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp 357.108.818,21		Rp 357.108.818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp 6.463.800,47		Rp 6.463.800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore	Bank luar negeri	Rp 208.766.445,27		Rp 208.766.445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 327.222.380,61		Rp 327.222.380,61
67	BDNI	BEHB, Kuala Lumpur		Rp 1.675.910,59		Rp 1.675.910,59
68	BUN	BCCI London		Rp 1.312.775.083,50		Rp 1.312.775.083,50
69	BUN	BNP Singapore		Rp 490.837.088,12		Rp 490.837.088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp 4.122.298,55		Rp 4.122.298,55
71	BUN	Chemical Bank		Rp 909.494.185,25		Rp 909.494.185,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp 980.037.418,44		Rp 980.037.418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp 103.609.247,09		Rp 103.609.247,09
74	BUN	National Westminster		Rp 1.708.457.513,38		Rp 1.708.457.513,38
75	Bank Ficonmont BSKU	National Westminster Bank, London	Bank luar negeri	Rp 1.332.284.084,60		Rp 1.332.284.084,60
76	BDNI	Security Pacific Nat'l Bank Singapore		Rp 25.528.725,87		Rp 25.528.725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp 72.228.080,57		Rp 72.228.080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sydney		Rp 566.327.485,85		Rp 566.327.485,85
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp 456.088.074,81		Rp 456.088.074,81



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 803 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2020
80	BDNI	Sumitomo Bank Ltd, Tokyo		Rp 1.550.878.033,20		Rp 1.550.878.033,20
81	BUN	Summa Handbank		Rp 219.893.772,84		Rp 219.893.772,84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp 457.663.217,47		Rp 457.663.217,47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp 449.662.818,68		Rp 449.662.818,68
84	Bank Modern BBD	UBDC, New York		Rp 25.317.208,51		Rp 25.317.208,51
85	BUN	UMBC Kuala Lumpur		Rp 230.472.902,02		Rp 230.472.902,02
86	Bank Central Dagang BBU	Union Bank of California		Rp 124.810.097,58		Rp 124.810.097,58
87	Bank Metropolitan BBU	Union Bank of California		Rp 22.488.860,17		Rp 22.488.860,17
88	Bank Central Dagang BBU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp 93.484.495,37		Rp 93.484.495,37
89	Bank Modern BBU	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp 51.007.390,52		Rp 51.007.390,52
90	BDNI	United Pacific Bank, LA		Rp 1.926.555.302,27		Rp 1.926.555.302,27
91	PESONA	Westpac Bank Sydney		Rp 7.752.795,93		Rp 7.752.795,93
92	Masih dalam penyelesaian			Rp 508.554.149,20		Rp 508.554.149,20
Total				Rp 454.445.361.290,83		Rp 454.445.361.290,83

* Pengkonversian nilai rekening BIRA di Clearstream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Coutts Bank menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

Kurs tengah Bank Indonesia		Kurs Tengah BI per 31 Desember 2020	
		Rp 14.105,01	
		13.438,00	Rp 13.548,00
** Mutasi nilai rekening eks. BIRA di Clearstream merupakan selisih kurs			
*** Dana Nostro yang telah disetorkan ke RKUN			
Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp	54.584.286,49	
Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	1.187.712.120,85	
Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2018)	Rp	8.840.515.509,00	
Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018)	Rp	4.697.519.206,00	
Rekening Eks Bank BIRA di Clearstream Banking SA, Singapore (disetorkan tanggal 18 Desember 2020)	Rp	3.655.871.021,00	
Rekening Eks Bank Dewa Rupa di Bank Ganasha (Cicilan I disetorkan tanggal 30 November 2020)	Rp	584.179.642,00	
Total	Rp	19.026.381.785,34	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 804 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar/Lembar per 31 Desember 2020	Nilai Pasar per 31 Desember 2020	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2019	mutasi	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2020	Kustodian
a. Corporate Bonds												
1	DGS International Finance Co.	Scriptless	0,01	USD	1 000 000							HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	Scriptless	101,88	USD	4 500 000	1,02	4 584 686	31 Desember 2020	63.731 738 058	935 275 842	64 667 011 901	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	Scriptless	1,00	USD	25 000 000	0,01	250 000	31 Desember 2020	3 475 251 250	51 000 000	3 526 251 250	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	Coupon	38 750 000,00	IDR		1,00	38 750 000	27 Juni 2008	38 750 000		38 750 000	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	Coupon	800.000.000,00	IDR		1,00	800 000 000	27 Juni 2008	800.000.000		800 000 000	JAKARTA
6	Muka Glass	Coupon	38 125.000,00	IDR		1,00	38.125.000	27 Juni 2008	38.125.000		38.125.000	JAKARTA
7	Muka Kacamat	Coupon	38 125.000,00	IDR		1,00	38 125 000	27 Juni 2008	38.125.000		38 125 000	JAKARTA
8	Polyindo Eka Perkasa	Scriptless	2,10	USD	3 000 000	0,02	63 000	31 Desember 2020	875 763 315	12 852 000	888 615 315	BRUSSEL
9	TPE International Finance Co. Bv	Scriptless	1,00	USD	2 000 000	0,01	20 000	31 Desember 2020	278 020 100	4 080 000	282 100 100	BRUSSEL
10	Bank Papan	Principal dan Coupon	100,00	IDR	500 000 000	1,00	500 000 000	10 Juni 2015	500 000 000		500 000 000	JAKARTA
11	Polyindo Eka Perkasa	Scriptless	2,10	USD	4 000 000	0,02	84 000	31 Desember 2020	1 167 684 420	17 136 000	1 184 820 420	EUROCLEAR
12	Polyindo Eka Perkasa	Scriptless	88,21	USD	182 000	0,88	160 547	31 Desember 2020	2 231 771 322	32 751 686	2 264 523 008	EUROCLEAR
Total									73.175.228.466	1.053 095 528	74 228.321.994	
b. Medium Term Notes												
1	Polyindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scriptless	93,92	USD	182 000	0,94	179 937	31 Desember 2020	2 376 202 903	34 871 248	2 411 074 151	EUROCLEAR
2	Polyindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scriptless	90,00	USD	20 000 000	0,90	18 000 000	29 Maret 2019	250 218 090 000	3 672 000 000	253 890 090 000	HONGKONG
3	Polyindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scriptless	90,00	USD	980 580	0,90	884 504	29 Maret 2019	12 017 474 427	176 356 816	12 193 833 243	HONGKONG
4	Polyindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scriptless	90,00	USD	985 840	0,90	889 256	29 Maret 2019	12 083 532 002	177 328 224	12 260 860 226	HONGKONG
5	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1 000 000	1,00	1 000 000	01 Oktober 2004	13 801 005 000	204 000 000	14 005 005 000	JAKARTA
6	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1 000 000	1,00	1 000 000	01 Oktober 2004	13 801 005 000	204 000 000	14 005 005 000	JAKARTA
7	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1 000 000	1,00	1 000 000	01 Oktober 2004	13 801 005 000	204 000 000	14 005 005 000	JAKARTA
8	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	5 000 000	1,00	5 000 000	01 Oktober 2004	69 505 025 000	1 020 000 000	70 525 025 000	JAKARTA
Total									387 903 338 332	5 692 558 288	393 595 897 620	
c. Non Convertible Debentures												
1	Polyindo Eka Perkasa	Principal	100,00	IDR	5 000 000 000	1,00	5 000 000 000	31 Desember 2020	5 000 000 000		5 000 000 000	JAKARTA
Total									5 000 000 000		5 000 000 000	
Total (a + b + c)									468 078 585 798	6 745 653 816	472 824 219 614	

Total Nilai

19.178.654.337,95

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 805 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.D

Catatan		
Kurs Tengah BI		31 Desember 2020
1 Dollar Amerika		14.105,01

Keterangan

- * Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berharga di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI
- ** Emiten surat berharga berstatus aktif karena masih tercatat di Bursa
- *** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 806 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2020	Nilai	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Informasi kepada Emiten/Berita ANU	Tanggapan Emiten	Revisi Surat Emiten	Berita ANU
1	PT Apac Citra Condantes, Tbk (PT Asia Pacific Investment, Tbk) (MYSTK)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32.137.300	184	4.627.771.200		4.627.771.200	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1253XN/5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten			
2	PT Apac Citra Condantes, Tbk (PT Asia Pacific Investment, Tbk) (MYSTK)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37.459.700	50	2.091.743.200	224.759.200	1.872.885.000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1252XN/5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten			
3	PT Aspek Dharma Ind		Scrapless	40.000	850	34.000.000		34.000.000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-422/BA/5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Dirjen ANU			Persediaan masih tercatat sebagai badan hukum, namun belum perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional		Sertifikat	48.250	75	3.618.750		3.618.750	BBB					
5	PT Bank Dagang Nasional		Sertifikat	353	75	27.225		27.225	BBB					
6	PT Bank Farmwest		Sertifikat	400	50	20.000		20.000	BBB					
7	PT Bank PDPCI		Sertifikat	250	350	87.500		87.500	BBB					
8	PT Bank Surya		Sertifikat	400	100	240.000		240.000	BBB					
9	PT Cititah Tbk (CTTH)	Penggalan batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scrapless	11.304.425	55	781.903.750	169.569.375	621.743.375	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1253XN/5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penggalan lembar kepemilikan saham Kementerian Keuangan	034/CTTH/FF/Regulir/014 tanggal 10 Juli 2014	
10	PT Cititah Tbk (CTTH)	Penggalan batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scrapless	11.421.438	55	2.898.500.700	621.321.585	2.278.179.115	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1251XN/5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penggalan lembar kepemilikan saham	034/CTTH/FF/Regulir/014 tanggal 10 Juli 2014	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 807 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	Cara Besarnya Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2018	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Rata Penyusutan	Komitmen kepada Emiten/Diagen AHD	Tanggapan Emiten	Waktu Surat Emiten	Diagen AHD
11	PT Gayah Tunggal Tbk (GUTH)	Manufaktur Ben	SertiMat	200	655	117.000	14.000	131.000	Aktif	Nila berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1348/KN 5/2014 tanggal 10 Juni 2014 kepada Emiten			
12	PT Hicora Indonesia Tbk (PT Sejahtera Bangsa Indonesia Tbk) (SMBI)	Manufaktur Garam	SertiMat	13.095.500	1.440	16.400.230.000	3.613.610.000	20.013.840.000	Aktif	Nila berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1348/KN 5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	0398/CA/DIR/AN/2014 tanggal 14 Juli 2014	
13	PT Lenggong Makmur Incubator Tbk (LAMP)	Manufaktur Plastik	SertiMat	57.601.000	85	5.153.109.178	231.804.000	4.921.505.170	Aktif	Nila berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1367/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Centem atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	102/III/14/An sb tanggal 11 Juli 2014	
14	PT Star Pacific Tbk (di PT Upco E-Mat (PLI))	Investasi dan bisnis media	SertiMat	100	140	14.000		14.000	Aktif	Nila berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1368/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten			
15	PT Merck Tbk (MERK)	Farmasi San Kewa	SertiMat	100	40.000	4.000.000		4.000.000	Aktif	Nila berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1388/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan pengelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan telah diberikan nama Pemegang Saham	127/BB/KA/DIR/AN/2014 tanggal 14 tanggal 15 Juli 2014	
17	PT Multi Sarana R. Agung		SertiMat	94.800	673	63.855.000		63.855.000	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S 423/KN 5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Diagen AHD			Perseroan sudah tercatat sebagai badan hukum, namun status perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama		SertiMat	49.251.500	50	2.462.575.000		2.462.575.000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nila berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 424/KN 5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Diagen AHD			Perseroan sudah tercatat sebagai badan hukum, namun status perseroan tidak jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 808 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2019	Matras	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyisipan	Kewajiban kepada Emiten/Di luar AHU	Kategori Emiten	Revisi Saham Emiten	Di luar AHU
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk (PRAS)	Manufaktur eng. Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2.500	75	187.500		187.500	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1371/KM 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten			
20	PT Sejahtera Sewa Indonesia (PT Sejahtera Produce, Tbk) (SIPIH)	Perdagangan	Scrapless	1.919.865	1.500	1.431.635.250	1.247.262.250	2.878.297.500	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020. Perubahan nama perusahaan per 1.10.2020	Surat Nomor S 1372/KM 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten			
21	PT Sico, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	10.500	6.422.500	927.500	7.350.000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1373/KM 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak terdapat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham pendirian atas nama BPPN	290/XL.08 JFD/2014 tanggal 14 Agustus	
22	PT Sico, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Scrapless	248.000	10.500	3.182.900.000	461.100.000	3.654.000.000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1374/KM 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Conform atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	290/XL.08 JFD/2014 tanggal 14 Agustus	
23	PT Tani Sawitosa, Tbk (TASG)	Manufaktur polypropylene dan polietilen Mm	Sertifikat	100	418	38.000	3.800	41.800	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1375/KM 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	34/JPT/15/2014 tanggal 15 Juli 2014	
24	PT Karibia Dgdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana perikanan dan pariwisata sarana olahraga golf	100,00%	10.000		Rp. 251.240.240.596	Rp. (251.240.240.596)	Rp.	Aktif	Tidak disetujui pengalihannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipertahankan sebagai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRN 25.1/KM/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengalihan Aset Saham Nomor BA 1/XM 2/2020 tanggal 23 Januari 2020	Deza Tapos, Kecamatan Cramagis, PO BOX 38, Depok 16953			
25	PT Aqua Golden Nusantara	Consumer Goods	0,0024%	312		Rp. 312.000	Rp.	Rp. 312.000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perusahaan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 Building, 12th Floor, Jalan H R Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950			
26	PT Kabeindo Mera, Tbk (KBUM)	Manufaktur Kabel	6,24%	69.982.400	216	Rp. 47.100.737.600	Rp. (32.006.130.200)	Rp. 15.094.598.400	Aktif	Nilai per lembar saham per 30 Desember 2020 berdasarkan nilai saham tanggal 30 Desember 2020 pada Bursa Efek Indonesia	Cyber Kawasan Industri Puri Gading II Rangsang No 2 Jakarta 2 Building, 12th floor, Jalan H R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 809 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SANAM EKS GPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	Cara Sistem Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Risiko Pengajian	Konfirmasi kepada Emiten/Biaya APU	Tanggapan Emiten	Metode Survei Emiten	Deteksi APU
27	PT Permata Kharisma Ni	Pemilikan		1.218	Rp	Rp	Rp	Rp	Asuf					
28	PT Sarana Mahakam Ventura		0.00%		Rp	Rp	Rp	Rp		Pada laporan TW 3 tercatat nilai nominal saham berdasarkan surat Direksi Utama PT Sarana Mahakam Ventura No 052/SMD/VMU/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Setelah diproses, lembar saham merupakan saham yang berasal dari BOK. Saham SMV yang berasal dari eks GPPN hanya sejumlah 63.106, tercatat pada data saham eks PPA.	Jalan Jend Sudirman, Kavling Bendi, Kompleks Pondok Permata (Asier) RT 004/RW 05 Kecamatan Sempu Kota Amboi 87128			
TOTAL					Rp	337.718.821.880	Rp	(279.171.212.484)	Rp	68.598.708.686,00				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 810 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.F

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020**

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Neraca	Saldo Per 31 Desember 2019		Mutasi Tahun 2020		Saldo Per 31 Desember 2020	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	233	1.750.941.946.444	7	77.810.607.400	240	1.828.752.553.844
BS	973	1.434.919.274.361	(5)	(8.155.580.000)	968	1.426.763.694.361
BT	282	806.135.693.344	(1)	(223.800.000)	281	805.911.893.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	31	701.654.125.452	.	(15.496.488.000)	31	686.157.637.452
JUMLAH	1.519	4.693.651.039.601	1	53.934.739.400	1.520	4.747.585.779.001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 811 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.F

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020**

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang diungkap dalam CaLK						
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, <i>Copy</i> Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	592	1.921.938.517.404	(35)	(196.120.219.889)	557	1.725.818.297.515
JUMLAH	592	1.921.938.517.404	(35)	(196.120.219.889)	557	1.725.818.297.515
JUMLAH TOTAL	2.111	6.615.589.557.005	(34)	(142.185.480.489)	2.077	6.473.404.076.516



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 812 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.G

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2019 (Audited)*	Nilai Aset Per 31 Desember 2020	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intitama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	310.310.110.000,00	Various	USD	22.000.000,00	Rp 310.310.110.000,00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	216.597.479.674,96	BII	USD	15.356.072,52	Rp 216.597.479.674,96	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000,00	423.150.150.000,00	BALI	USD	30.000.000,00	Rp 423.150.150.000,00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	21.157.507.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00	Rp 21.157.507.500,00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	28.210.010.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 28.210.010.000,00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	28.210.010.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 28.210.010.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	14.105.005.000,00	Danamon	USD	1.000.000,00	Rp 14.105.005.000,00	
8.	Mulia Keramik I/97 - Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik I/97 - Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
Total			16.657.242.209,00	1.041.750.141.600,96				Rp 1.041.750.141.600,96	

* Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs

8.465



- 813 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2019	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan		na	Rp 223.500	Rp 223.500	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Pemintaan Informasi kepada Dirjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
3	PT Danaloka Pratama	-	BONI	380	14,29%	Rp 141.550.000	Rp 141.550.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Pemintaan Informasi kepada Dirjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-428/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pana Indonesia Ltd	-	BONI	1.500	15,00%	Rp 28.310.000	Rp 28.310.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Pemintaan Informasi kepada Dirjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui
5	PT Pana Ventura Indonesia	-	BONI	200	20,00%	Rp 234.871	Rp 234.871	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Pemintaan Informasi kepada Dirjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750	99,00%	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
7	PT Aplikasi Lintasarta	-	19 Bank	400	na	Rp 125.015.692	Rp 125.015.692	Rp -	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kd. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Pemintaan Informasi kepada Dirjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BONI	450	5,43%	Rp 385.154.000	Rp 385.154.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Pemintaan Informasi kepada Dirjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui,
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BONI	330	15,00%	Rp -	Rp -	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BONI	208.179	2,31%	Rp 323.903.996	Rp 208.179.000	Rp (115.724.996)	Aktif	nilai per 31-12-20 berdasar surat no: 01/DIR/SJ/II/2020 tgl 4-1-21	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 868398, 868389, Fax : (0741) 868 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BONI-BNN	535.270	3,67%	Rp 355.094.954	Rp 535.270.000	Rp 180.175.046	Aktif	Nilai saham per 31-12-20 berdasar surat No.005/SKV/01/2021 tgl 7-1-21	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BONI	193.066	1,04%	Rp 390.958.650	Rp 390.958.650	Rp -	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 015/SKV/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	-
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106	1,33%	Rp 31.286.000	Rp 63.106.000	Rp 31.820.000	Aktif	Nilai nominal berdasar surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura Nomor 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 814 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2019	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115	16,64%	Rp 4.038.531.684	Rp -	Rp (4.038.531.684)	Likuidasi	Nilai Buku saham per 31-12-2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited).	Seriabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	Telah dilikuidasi dengan nilai likuidasi sebesar Rp3.365.184.715 yang diterima oleh DJKN pada November 2020. Nilai mutasi dicatat sebesar Rp4.038.531.683,85 sehingga terdapat selisih Rp673.346.969 yang dicatat sebagai dampak kumulatif pengurang ekuitas
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,04%	Rp 4.341.276.000	Rp 4.500.000.000	Rp 158.724.000	Aktif	Nilai nominal saham per 30 Juni 2020 sesuai Surat Ptl. Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri No.S2798/AJTM/DIR/0720 tanggal 13 Juli 2020	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11, Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	-
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	Rp 335.020.000	Rp 335.020.000	Rp -	Dicabut jin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.08/2007	-	-
17	PT Sarana Solut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	Rp 61.553.000	Rp 61.553.000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Solut Ventura Nomor 056/ISSV/VII/2016 tanggal 25 Agustus 2016	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Padi Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
18	PT Sarana Sunbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	1.037.495	3,72%	Rp 970.886.000	Rp 1.037.495.000	Rp 66.609.000	Aktif	Nilai saham per 31-12-20 berdasar surat no 01/DIR/I/2021 tgl 4-1-21.	Gedung Rangkang Ventura, Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 sld 7 Padang - Sumatera Barat.	-
19	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	Rp 82.471.000	Rp 82.471.000	Rp -	Aktif	Nilai per 31-12-20 berdasar surat Dirut SPV No.19/DIR/SPV/II/2021 tgl 11-1-2021	JL.Abe Tasangkapura No. 58, RT001/ RW.011, Kelurahan Ardipura, Japsel, Jayapura-Papua. Telp: 0867-5162490	-
20	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000	15,00%	Rp 3.750.000.000	Rp 3.750.000.000	Rp -	Dicabut jin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL/10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	-
21	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	-	22.006.500	0,97%	Rp 1.100.325.000	Rp 1.100.325.000	Rp -	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2019	-	Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di bursa telah di-suspend/ oleh BEI. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
22	PT Jumbo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	-	654.500	0,43%	Rp 4.041.537.500	Rp 3.665.200.000	Rp (376.337.500)	Aktif	berdasarkan nilai saham pada data BEI per 30 September 2020	-	Pada tahun 2016, aset saham PT Jumbo Cable tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
23	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13,87%	Rp 1.425.000.000	Rp 1.425.000.000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/OSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifikasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).
24	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-	-	100,00%	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Aktif	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 815 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2019	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
25	PT Sejhtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukaan dan penyediaan	-	273.000	96,53%	Rp 22.470.000.000	Rp -	Rp (22.470.000.000)	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23
Total						Rp 45.873.331.847	Rp 19.410.065.713	Rp (26.563.266.134)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 816 -

LAMPIRAN 24

ASET LAIN-LAIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 817 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 24

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	18.262.582.182	(2.596.154.736)	15.666.427.446	17.496.296.270	(1.343.981.189)	16.152.315.081
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	64.020.089.973	(53.454.951.931)	10.565.138.042	20.173.827.251	(10.249.884.151)	9.923.943.100
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	8.561.800.761	(7.351.450.013)	1.210.150.748	10.117.675.753	(9.332.784.682)	784.891.071
4	005	MAHKAMAH AGUNG	129.734.443.660	(117.252.465.600)	12.481.978.060	134.270.790.419	(121.132.540.564)	13.138.249.855
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	87.470.710.579	(76.525.752.561)	10.944.958.018	78.105.303.293	(67.550.375.113)	10.554.928.180
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	233.824.540.001	(71.826.216.040)	161.998.323.961	264.537.455.528	(123.472.178.418)	141.065.277.110
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	195.507.375.570	(186.551.309.252)	8.956.066.318	466.402.451.690	(219.184.986.354)	247.217.465.336
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	437.590.120.643	(152.210.417.324)	285.379.703.319	395.869.847.716	(92.117.353.769)	303.752.493.947
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.291.218.701.775	(3.591.209.366.053)	2.700.009.315.722	6.632.504.630.582	(3.702.529.825.677)	2.929.974.804.905
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	426.406.705.940	(363.107.275.556)	63.299.430.384	326.651.278.466	(256.181.205.310)	70.470.073.156
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	891.638.853.844	(844.188.387.449)	47.450.466.395	1.280.812.642.589	(1.204.620.241.889)	76.192.400.700
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	748.646.368.953	(285.669.537.866)	462.976.831.087	772.510.080.456	(255.444.818.181)	517.065.262.275
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	914.305.978.521	(745.632.134.808)	168.673.843.713	1.091.275.271.237	(817.822.719.132)	273.452.552.105
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	326.281.583.168	(222.438.459.335)	103.823.103.833	930.953.945.445	(372.778.505.891)	558.175.439.554
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4.943.570.296.343	(1.913.879.355.578)	3.029.690.940.765	6.562.888.409.971	(1.877.503.973.199)	4.685.384.436.772
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.046.886.405.682	(822.927.984.640)	223.958.421.042	572.360.053.029	(533.697.385.376)	38.662.667.653
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	12.842.175.264.211	(9.998.150.616.335)	2.844.024.647.876	13.098.325.036.995	(9.180.365.484.936)	3.917.959.552.059
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	394.842.973.855	(245.146.355.716)	149.696.618.139	377.897.410.777	(232.400.665.470)	145.496.745.307



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 818 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 24

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)								
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	416.481.278.702	(373.586.806.308)	42.894.672.394	439.111.606.995	(378.418.760.358)	60.692.846.637
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	32.144.606.305	(28.642.422.752)	3.502.183.553	26.297.974.644	(23.497.248.286)	2.800.726.358
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.012.951.000.216	(546.948.521.349)	1.466.002.478.867	1.993.377.950.941	(520.048.478.151)	1.473.329.472.790
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	419.627.207.466	(328.836.523.400)	90.790.684.066	347.866.128.627	(295.012.299.155)	52.853.829.472
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	32.119.006.615.739	(9.143.239.421.955)	22.975.767.193.784	42.290.876.831.978	(10.838.067.676.213)	31.452.809.155.765
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	6.701.980.160	(6.643.134.755)	58.845.405	1.028.775.466	(131.472.623)	897.302.843
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9.646.100.004	(9.447.297.881)	198.802.123	513.326.510	(487.976.948)	15.349.562
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.789.027.900	(1.789.027.900)	-	250.365.400	(250.365.400)	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	78.172.284.187	(12.935.447.780)	65.236.836.407	64.592.895.321	(15.202.583.970)	49.390.311.351
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	50.942.645.557	(48.877.453.853)	2.065.191.704	151.433.500	(68.021.600)	83.411.900
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	49.063.126.905	(30.066.811.202)	18.996.315.703	511.933.872.514	(290.100.975.274)	221.832.897.240
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	19.539.728.532	(7.420.806.188)	12.118.922.344	38.140.973.294	(23.273.631.440)	14.867.341.854
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	356.500.000	(356.500.000)	-	618.114.185	(580.626.685)	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 819 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 24

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	3.303.405.671	(3.267.873.618)	35.532.053	2.572.608.800	(2.555.893.000)	16.915.800
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.707.768.851	(2.699.423.143)	8.345.708	4.767.753.563	(1.976.276.686)	2.791.476.877
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	659.905.422.246	(388.734.019.330)	271.171.402.916	14.789.826.926	(13.884.007.124)	905.819.802
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	4.938.578.745	(4.809.273.147)	129.305.598	3.910.803.103	(3.725.522.622)	185.280.481
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	142.861.398.037	(116.214.789.580)	26.446.608.457	119.939.596.185	(112.766.919.982)	7.172.676.203
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	66.639.026.947	(6.310.727.678)	60.328.299.269	68.180.544.422	(6.977.126.803)	61.203.417.619
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	140.530.815.031	(134.415.018.162)	6.115.796.869	122.459.665.056	(115.352.248.687)	7.107.416.369
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.969.907.624	(26.200.500.235)	71.769.407.389	97.969.907.624	(26.023.553.407)	71.946.354.217
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.453.594.812	(37.321.525.228)	1.132.069.584	27.903.683.354	(25.955.358.055)	1.948.327.299
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.385.908.294.484	(1.178.810.999.942)	207.097.294.542	1.075.050.005.534	(915.384.862.554)	159.655.142.980
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	52.715.534.885	(48.435.066.623)	4.280.468.262	21.341.215.127	(19.506.073.185)	1.835.141.942
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	5.959.713.781	(5.192.592.914)	767.120.867	6.502.014.047	(4.196.598.138)	2.305.415.909
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	6.261.921.106	-	6.261.921.106	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	129.906.051.318	(111.977.961.143)	17.928.090.175	48.378.820.356	(47.706.727.822)	672.092.534
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.550.857.892.252	(846.837.653.492)	704.020.238.760	1.851.342.537.306	(919.988.872.487)	931.353.664.819



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 820 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 24

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	9.553.121.878	(9.193.880.106)	359.241.772	8.848.882.345	(8.242.311.595)	606.550.750
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.940.016.042	(2.907.525.417)	32.490.625	2.558.222.192	(2.558.222.192)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	58.486.407.597	(50.724.962.628)	7.761.444.969	45.878.706.396	(41.097.161.901)	4.781.544.495
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97.520.149.436	(90.903.303.793)	6.616.845.643	89.792.431.168	(81.954.852.341)	7.837.578.827
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	21.143.102.583	(18.474.612.854)	2.668.489.729	12.136.402.704	(12.045.803.072)	90.599.632
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	18.535.412.879	(17.173.422.671)	1.361.990.208	4.336.379.891	(3.012.957.003)	1.323.422.888
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	102.610.595.460	(48.089.259.922)	53.521.335.538	104.763.204.465	(54.610.534.943)	50.152.669.522
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	10.977.404.894	(10.810.751.314)	166.653.580	3.302.771.391	(3.126.001.825)	176.769.566
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	230.693.833.918	(222.545.169.809)	8.148.664.109	292.625.134.604	(163.648.194.189)	128.976.940.415
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	151.185.035.042	(10.615.154.219)	140.569.880.823	96.279.897.967	(6.467.469.895)	89.812.228.072
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.105.752.926	-	1.105.752.926	406.647.875	(406.152.875)	495.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.833.747.523	(8.484.183.549)	1.349.563.974	10.131.712.521	(8.736.971.132)	1.394.741.389
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	749.740.120	(749.740.120)	-	1.144.732.285	(1.123.388.900)	21.343.385
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4.546.977.873	(4.525.541.578)	21.436.295	1.651.189.878	(1.640.749.240)	10.440.638
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.678.350.353	(10.629.090.587)	49.259.766	5.719.311.911	(5.554.278.612)	185.033.299
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	45.898.772.635	(44.648.595.795)	1.250.176.840	9.691.419.774	(9.678.959.049)	12.460.725



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 821 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 24

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17.008.814.833	(13.420.156.884)	3.588.657.949	16.014.374.923	(15.584.380.145)	429.994.778
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	85.833.120.065	(74.986.423.068)	10.846.696.996	112.322.656.076	(71.685.849.294)	40.636.806.782
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134.763.086.898	(57.083.981.282)	77.679.105.616	155.963.830.881	(52.588.918.451)	103.374.912.430
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	44.129.215.236	(42.174.910.417)	1.954.304.819	14.731.134.942	(12.762.142.829)	1.968.992.113
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	8.683.242.280	(8.640.302.881)	22.939.399
68	100	KOMISI YUDISIAL	471.879.032	(412.729.153)	59.149.879	1.331.114.444	(1.321.548.986)	9.565.458
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	59.640.740.980	(58.906.719.810)	734.021.170	79.056.426.225	(76.642.324.207)	2.414.102.018
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	25.637.113.046	(25.216.636.183)	420.476.863	16.537.387.618	(16.001.819.318)	535.568.300
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	9.858.961.580	(9.581.437.065)	277.524.515	7.013.983.227	(6.748.910.397)	265.072.830
72	107	BADAN SAR NASIONAL	153.930.294.695	(99.746.884.475)	54.183.410.220	84.968.890.058	(29.827.749.756)	55.141.140.302
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	55.650.000	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	1.602.900.000	(1.602.900.000)	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	912.570.495	(812.177.648)	100.392.847	912.570.495	(806.453.836)	106.116.659
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	916.921.000	(813.309.358)	103.611.642	916.921.000	(744.234.928)	172.686.072



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 822 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 24

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	281.326.752.339	(185.353.872.826)	95.972.879.513	243.038.329.815	(149.799.540.762)	93.238.789.053
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	305.900.000	-	305.900.000	6.922.173.376	(6.922.173.376)	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	20.025.235.393	(18.345.396.075)	3.679.839.318	10.435.239.541	(8.833.531.774)	1.601.707.767
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	104.847.340.257	(102.673.857.937)	2.173.482.320	42.371.373.191	(41.524.721.829)	846.651.362
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	198.787.260.364	(178.743.190.987)	20.044.069.377	210.006.379.664	(184.765.113.440)	25.241.266.224
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589.396	(3.295.501.853)	252.087.543	3.547.589.396	(2.791.326.766)	756.262.630
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	3.422.921.442	(3.376.561.236)	46.360.206	2.676.092.322	(2.483.053.473)	193.038.849
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1.065.184.499	(817.342.438)	247.842.061	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	1.290.322.969	(593.627.041)	696.695.928
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	602.000.000	(89.583.333)	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			71.429.632.975.833	(34.575.461.476.742)	36.854.171.499.091	83.922.411.398.055	(34.775.463.496.209)	49.146.948.414.346
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	622.124.210.046.919	(280.741.881.826.004)	341.382.328.220.915	587.279.754.484.932	(245.910.488.788.749)	341.369.264.696.183
TOTAL			693.553.843.022.752	(315.317.343.302.746)	378.236.499.720.006	671.202.165.882.987	(280.685.953.284.958)	390.516.175.110.529